PERUBAHAN RENCANA KERJA

(P-RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan perubahan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 -2026.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun Tahun 2017.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun-tahun sebelumnya dan

evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 serta dikaitkan dengan Renja K/L dan Renja Provinsi. Selanjutnya, rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 akan ditindaklanjuti dengan proses penyusunan R-APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar I.1.

Gambar I.1.

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya

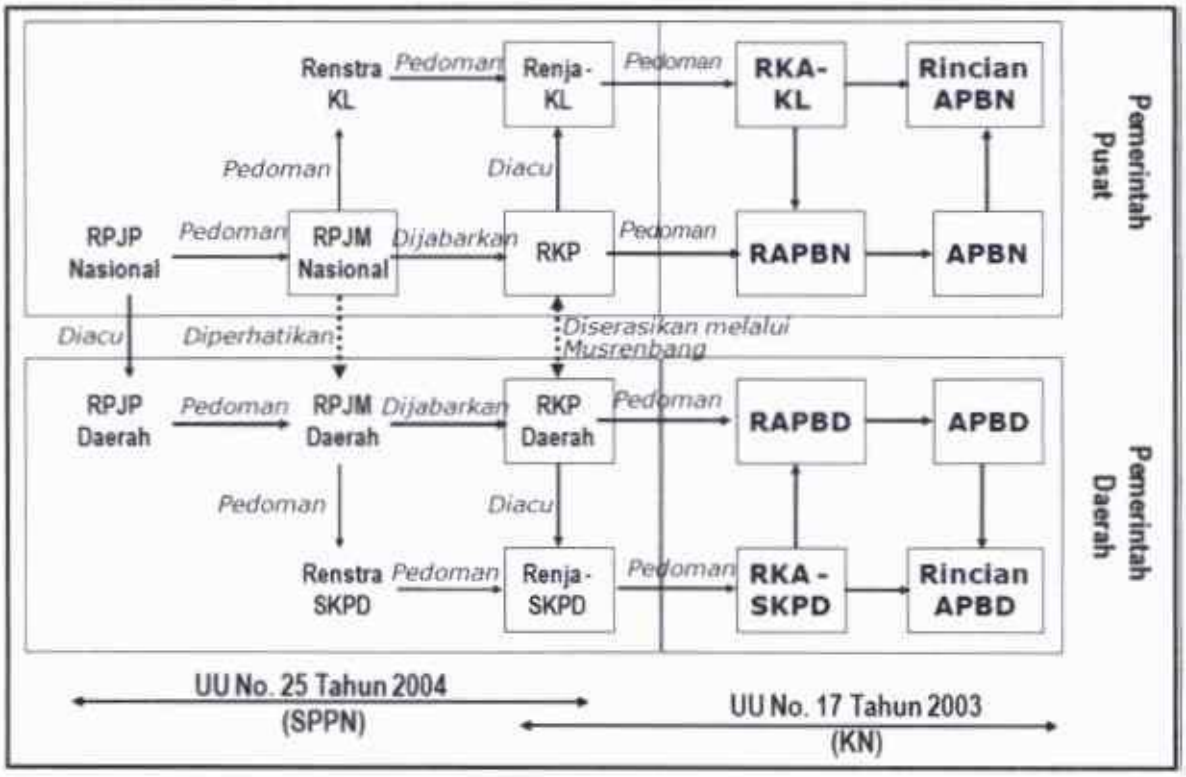

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
   Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4111);
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Undang-undang 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183 Tambahan lembaran Negara Republik
   Indonesia nomor 6398);

6. Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemik corona virus disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 134, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6516);
7. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
8. Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 4);
9. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 2, tambahan lembaran Negara nomor 6178);
10. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
11. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan Stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas system keuangan; (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6485);

12. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 238 tahun 2022, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6841);
13. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2022 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantu (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 122 tahun 2022, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6794);
14. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 136 tahun 2017);
15. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 120 tahun 2018 (berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi Pemerintah Daerah (berita Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah (berita Negara
    republik Indonesia tahun 2019 nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (berita Negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (berita Negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 581);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis keuangan daerah (berita Negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal (berita Negara republik Indonesia tahun 2021 nomor 1419);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Preaturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025.

a. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh ASN dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
4. Menjamin keterkaitan, keserasian, serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;
2. Mengembangkan kerangka pemirikan kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik dimasa depan.

b. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis. Pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilaksanakannya penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, sehingga pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										
	Bidang Administrasi Pemerintahan										
	Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah	**Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah**	**Persen**	**100%**		**88**	**100**	**100%**			
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara	Laporan		3	1	1	**100%**	1	**5**	**2.5**
	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Terlaksananya Penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan		3	1	1	**100%**	**1**	**5**	**2.5**

	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) Bupati Tapanuli Utara	Laporan		3	1	1	**100%**	**1**	**5**	**2.5**
	Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten	Terlaksananya Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten	Kegiatan		3	1	1	**100%**	**1**	**5**	**2.5**
	Penegasan Batas Antar kecamatan, antar desa dan antara kelurahan dalam wilayah kabupaten	Terlaksananya Penegasan Batas Antar kecamatan, antar desa dan antara kelurahan dalam wilayah kabupaten	Desa			20	20	**100%**			
	Penataan Unsur rupa bumi di kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penataan Unsur rupa bumi di kabupaten Tapanuli Utara	Kecamatan					**0**			
	Penyelenggaraan Hari jadi kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Peringatan Hari jadi kabupaten Tapanuli Utara	Kegiatan			1	1	**100%**	**1**	**2**	**2**
	Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara	Kecamatan		1	15	0	**0**	**1**	**2**	**2**
	Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah	Laporan		1	1	1	**100%**	**1**	**2**	**2**
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kegiatan		1	1	1	**100%**	**1**	**2**	**2**
	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintah	**Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan**	**Persen**	**100%**		**88**	**100**	**100%**			
	Jasa Pendukung Forum koordinasi pimpinan daerah (FORKOPOIMDA) Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pendukung Forum koordinasi pimpinan daerah (FORKOPOIMDA) Kabupaten Tapanuli Utara	Bulan		12	12	12	**100%**	**12**	**24**	**2**
	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Kali		10	10	10	**100%**	**10**	**20**	**2**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintahan	Kali		4	4	4	**100%**	**4**	**8**	**2**
	Jasa Pendukung persiapan kunjungan kerja Bupati Tapanuli Utara ke Kecamatan dan Deas/Kelurahan	Tersedianya Jasa Pendukung persiapan kunjungan kerja Bupati Tapanuli Utara ke Kecamatan dan Deas/Kelurahan	Kali		10	10	10	**100%**	**10**	**20**	**2**
	Penyediaan Jasa Pendukung Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pendukung Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	kegiatan			1	0	**0**	**0**		

	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	**Cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi**	**Persen**	**100%**		**88**	**96**	**100%**			
	Biaya Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia	Terlaksananya Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia	Kegiatan		1	1	1	**100%**	**1**	**2**	**2**
	Pengkajian dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengkajian dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		1	1	1	**100%**	**1**	**2**	**2**
	Penyusunan Nomenklatur Jabatan pelaksana	Terlaksananya Penyusunan Nomenklatur Jabatan pelaksana	Perbub		1	1	1	**100%**	**1**	**2**	**2**
	Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis	Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis	Kegiatan		1	1	1	**100%**			
	Fasilitasi Penyusunan Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)	Proposal		3	3	3	**100%**			
	Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Perangkat Daerah		45	45	45	**100%**			
	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Evaluasi Jabatan	Perangkat Daerah		45	45	45	**100%**			
	Pendampingan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Kegiatan		1	1	1	**100%**			
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kegiatan		1	1	1	**100%**			
	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Perangkat Daerah		11	11	11	**100%**			
	PROGRAM PERUMUSAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	**Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian**	**Persen**	**100%**		**88**	**100**	**100%**			
	Monitoring Ketersediaan LPG 3 KG dan BBM	Terlaksananya Monitoring Ketersediaan LPG 3 KG dan BBM	Persen		90	90	90	**100%**			
	Penyediaan Jasa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Persen		90	90	90	**100%**			
	Perencanaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Corporate Sosial Responsibility (CSR)	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi	Persen		90	90	90	**100%**			

		Pemanfaatan Corporate Sosial Responsibility (CSR)									
	Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Terlaksananya Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Persen		90	90	90	**100%**			
	Koordinasi Program Kerjsama dengan Investor	Terlaksananya Koordinasi Program Kerjsama dengan Investor	Investor			2	0	**100%**			
	Pameran Pembangunan Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Kegiatan Pameran Pembangunan Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara	Persan			100	0	**100%**			
	PROGRAM PENINGKATAN BUMD DAN LEMBAGA KEUANGAN	Jumlah BUMD dan Lembaga Keuangan	**Unit**	**100%**		**3**					
	Penyediaan Jasa Administrasi Tim Pengembalian Kredit Bona Pasogit Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Tim Pengembalian Kredit Bona Pasogit Tapanuli Utara	Persen			90	0	**0**			
	Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyar (KUR)	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyar (KUR)	Persen		90	90	90	**100%**			
	Penyusunan Ranperda Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Tersusunnya Ranperda Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Ranperd a		3	3	3	**100%**			
	PROGRAM PERUMUSAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	**Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan**	**Persen**	**100%**		**85**	**98**	**100%**			
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku		1	1	1	**100%**			
	Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik	Terlaksananya KegiatanVerifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik	OPD		14	14	14	**100%**			
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan	OPD		57	57	57	**100%**			
	Pelatihan Sistem Standar Satuan Harga	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Sistem Standar Satuan Harga	Orang			120	0	**100%**			
	Sistem Monev Online	Terlaksananya Kegiatan Sistem Monev Online	OPD		54	54	54	**100%**			
	Koordinasi dan Administrasi Penggunaan Dana Tidak Terduga	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Administrasi Penggunaan Dana Tidak Terduga	Tahun		1	1	1	**100%**			
	Koordinasi Jasa Konstruksi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Jasa Konstruksi	Tahun			1	0	**100%**			

	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas ASN dalammemahami hukum Kontrak Konstruksi	Terlaksananya KegiatanBimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas ASN dalammemahami hukum Kontrak Konstruksi	Orang		70	70	70	**100%**			
	Koordinasi Pelaksanaan Gotongroyong	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Gotongroyong	Tahun		1	1	1	**100%**			
	Pengendalian Proyek Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Proyek Pembangunan	Tahun		1	1	1	**100%**			
	Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja	Buku		200	200	200	**100%**			
	Pengendalian Proyek Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Proyek	Buku		5	5	5	**100%**			
	Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Buku		17	17	17	**100%**			
	Verifikasi Rencana kerja dan Anggaran	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Rencana kerja dan Anggaran	OPD		54	54	54	**100%**			
	PROGRAM PERUMUSAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN	**Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan**		**100%**		**88**	**90**	**100%**			
	Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Persen		95	95	95	**100%**			
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEMASYARAKATAN	**Cakupan Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan**	**Persen**	**100%**		**88**	**81**	**92.04%**			
	Syukuran Tahun Baru/Open House PNS Pemkab Tapanuli Utara	Terlaksananya Kegiatan Syukuran Tahun Baru/Open House PNS Pemkab Tapanuli Utara	Persen		95	95	95	**100%**			
	Safari Ramadhan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Tapanuli Utara	Persen			95	0	**0**			
	Berbuka Puasa Bersama Pemkab Tapanuli Utara	Terlaksananya Kegiatan Berbuka Puasa Bersama Pemkab Tapanuli Utara	Tempat		6	6	0	**0**			

	Pemberangkatan/Pelepasan Calon Jamaah Haji Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya KegiatanPemberangkatan/Pelepasan Calon Jamaah Haji Kabupaten Tapanuli Utara	Calon Jamaah Haji		3	3	0	**0**			
	Pemberangkatan/Pelepasan Wisata Rohani Tokoh Agama Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Kegiatan Pemberangkatan/Pelepasan Wisata Rohani Tokoh Agama Kabupaten Tapanuli Utara	Tokoh Agama			3	0	**0**			
	Syukuran Tahun Baru/Open House Non PNS/Masyarakat Pemkab Tapanuli Utara	Terlaksananya Kegiatan Syukuran Tahun Baru/Open House Non PNS/Masyarakat Pemkab Tapanuli Utara	Persen		95	95	95	**100%**			
	Perayaan Natal Oikumene Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Kegiatan Perayaan Natal Oikumene Kabupaten Tapanuli Utara	Persen		95	95	95	**100%**			
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**		**100%**		**100**	**98**	**98%**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Biaya Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Teresdianya Biaya Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Biaya Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Biaya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Biaya KegiatanPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Biaya Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Biaya Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Dayar Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Dayar Air dan Listrik	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Rapat-Rapat Kooedinasi Dalam Daerah	Tersedianya Biaya Kegiatan Rapat-Rapat Kooedinasi Dalam Daerah	Bulan		12	12	12	**100%**			

	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya Biaya Kegiatan Penyediaan Jasa Non PNS	Bulan		12	12	12	100%			
	Penyediaan Jasa Internet Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tersedianya Biaya kegiatan Penyediaan Jasa Internet Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bulan		12	12	12	100%			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Biaya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan		12	12	12	100%			
	Penyediaan Jasa Petugas Pengamanan Melekat Bupati	Tersedianya Jasa Petugas Pengamanan Melekat Bupati	Bulan		12	12	12	100%			
	Penyediaan Jasa Staff Ahli Bupati	Tersediany Jasa Staff Ahli Bupati	Bulan		12	12	12	100%			
	Penyediaan Jasa Operasional Supir Pejabat Pengganti Perjalanan Dinas	Tersedianya Jasa Operasional Supir Pejabat Pengganti Perjalanan Dinas	Bulan		12	12	12	100%			
	Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah Kabupaten	Tersedianya Jasa Tamu Pemerintah Kabupaten	Bulan		12	12	12	100%			
	Penyediaan Cendramata/Tropy dan Penghargaan	Tersedianya Cendramata/Tropy dan Penghargaan	Bulan		12	12	12	100%			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	**Persen**	**100%**		**72**	**85**	**100%**			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tertaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bulan		12	12	12	100%			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tertaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bulan		12	12	12	100%			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bulan		12	12	12	100%			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bulan		12	12	12	100%			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	TerlaksananyaPemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Bulan		12	12	12	100%			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulan		12	12	12	100%			
	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Bulan		12	12	12	100%			
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terlkaksananya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Bulan		12	12	12	100%			
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantro	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantro	Bulan		12	12	12	100%			

	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Bulan		12	12	12	100%			
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bulan		12	12	12	100%			
	Rehab Gedung Kantor Bupati Unit A	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Bupati Unit A	Bulan		12	12	12	100%			
	Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Bupati	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Bupati	Bulan		12	12	0	0			
	Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Wakil Bupati	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Wakil Bupati	Bulan		12	12	0	0			
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Bulan		12	12	12	100%			
	Penyediaan Jasa Petugas Peralatan dan Gedung Pemda	Terlaksananya Penyediaan Jasa Petugas Peralatan dan Gedung Pemda	Bulan		12	12	12	100%			
	Rehab/Pemeliharaan Rumah Dinas Bupati	Terlaksananya Rehab/Pemeliharaan Rumah Dinas Bupati	Bulan		12	12	12	100%			
	Rehab/Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Bupati	Terlaksananya Rehab/Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Bupati	Bulan		12	12	12	100%			
	Pengadaan Alat-Alat Band	Terlaksananya Pengadaan Alat-Alat Band	Bulan		12	12	0	0			
	Pembangunan Gudang di Kompleks Terminal Madya Tarutung	Terlaksananya Pembangunan Gudang di Kompleks Terminal Madya Tarutung	Bulan		12	12	0	0			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM	**Persentase kualitas pemeliharaan gedung/ kantor dan kendaraan dinas Bupati/Wakil Bupati serta kendaraan pool**	**Persen**	**100%**		**88**	**81**	**92.04%**			
	Pengadaan Peralatan dan kelengkapan lainnya di Mess Pemda Ajibata	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan kelengkapan lainnya di Mess Pemda Ajibata	Bulan		12	12	12	100%			
	Pengadaan Peralatan dan kelengkapan lainnya di Mess Pemda Medan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan kelengkapan lainnya di Mess Pemda Medan	Bulan		12	12	12	100%			
	Penyediaan Jasa Operasional Pemasangan Peralatan Pemda Jaringan Instalasi Listrik dan kelengkapan lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Operasional Pemasangan Peralatan Pemda Jaringan Instalasi Listrik dan kelengkapan lainnya	Bulan		12	12	12	100%			

	Pembangunan Dek Penahan di rumah Dinas Belakang Pendopo	Terlaksananya Pembangunan Dek Penahan di rumah Dinas Belakang Pendopo	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Pemeliharaan Paving Blok di Halaman Kantor Bupati Unit A	Terlaksananya Pemeliharaan Paving Blok di Halaman Kantor Bupati Unit A	Bulan		12	12	0	**0**			
	Penggantian Atap Mess Pemda Tapanuli Utara di Medan	TerlaksananyaPenggantian Atap Mess Pemda Tapanuli Utara di Medan	Bulan		12	12	12	**100%**			
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH/WAKIL KDH	**Cakupan kinerja pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH**	**Persen**	**100%**		**88**	**100**	**100%**			
	Biaya Operasional Bupati	Tersedianya Biaya Operasional Bupati	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Biaya Operasional Wakil Bupati	Tersedianya Biaya Operasional WakilBupati	Bulan		12	12	12	**100%**			
	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Cakupan penyusunan produk dan pelayanan Hukum	**Persen**			**88**	**88**	**100%**			
	Pengkajian dan Penetapan Draf Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pengkajian dan Penetapan Draf Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen		10	10	10	**100%**			
	Pengkajian dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati	Terlaksananya Pengkajian dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati	Dokumen		80	80	80	**100%**			
	Evaluasi dan Eksaminasi Perjanjian Pemerintah Daerah	Terlaksananya Evaluasi dan Eksaminasi Perjanjian Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	**100%**			
	Pengkajian Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA)	Terlaksanany Pengkajian Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA)	Persen			100	0	**0**			
	Pengkajian dan Evaluasi Produk-Produk Hukum	Terlaksananya Pengkajian dan Evaluasi Produk-Produk Hukum	Persen		100	100	100	**100%**			
	Forum Komunikasi Bidan g Hukum	Terlaksananya Forum Komunikasi Bidan g Hukum	Persen			100	0	**0**			
	Penyediaan Jasa Penanganan Perkara	T Tersedianya Jasa Penanganan Perkara	Persen		100	100	100	**100%**			
	Fasilitasi HAM	Terlaksananya Fasilitasi HAM	Persen		100	100	100	**100%**			
	Jaringan Dokumentasi Hukum	Tersedianya Jaringan Dokumentasi Hukum	Persen		100	100	100	**100%**			

	Penyuluhan Hukum	Terlaksananya Penyuluhan Hukum	Persen			100	0	**100%**			
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Persen		100	100	100	**100%**			
	Himpunan Produk-Produk Hukum	Terhimpunnya Produk-Produk Hukum	Persen		100	100	100	**100%**			
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN SERTA KEBIJAKAN BUPATI	**Persentase Kegiatan serta Kebijakan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang dimuat oleh media massa**	**Persen**	**100%**		**88**	**99**	**100%**			
	Penyediaan Notulensi Rapat dan Fasilitasi Peliputan Media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Biaya Penyediaan Notulensi Rapat dan Fasilitasi Peliputan Media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen			100	0	**0**			
	Dokumentasi Kegiatan Kepala aerah Dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Biaya Dokumentasi Kegiatan Kepala aerah Dan Wakil Kepala Daerah	Buah		300	300	300	**100%**			
	Penyediaan Dokumen Melalui Pengumpulan dan Penjilidan Klipping Berita Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dokumen Melalui Pengumpulan dan Penjilidan Klipping Berita Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Buku			48	0	**0**			
	Pembuatan Buku Himpunan Pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Biaya Pembuatan Buku Himpunan Pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Buku			180	0	**0**			
	Penyediaan Jasa Bahan Bacaan Harian /Mingguan/majalah	Tersedianya Jasa Bahan Bacaan Harian /Mingguan/majalah	exp		34	34	34	**100%**			
	PROGAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, KEPROTOKOLAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH	**Persentase Pelayanan Keprotokolan sesuai dengan SOP Protokol**	**Persen**	**100%**		**88**	**100**	**100%**			

	Penunjang Kegiatan Aparatur Protokoler, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan	Tersedianya Biaya Kegiatan Aparatur Protokoler, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan	Laporan		12	12	12	100%			
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGADAAN BARANG/JASA	**Cakupan Pengadaan Barang/Jasa**		**100%**		**88**	**100**	**100%**			
	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bulan		12	12	12	100%			
	Sistem Rencana Umum Pengadaan	Terlaksananya Sistem Rencana Umum Pengadaan	Bulan		12	12	12	100%			
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan		1	1	1	100%			
	Penyediaan Jasa Administrasi dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	OPD		46	46	46	100%			
	Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	OPD		46	46	46	100%			
	Penyediaan Jasa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Tersedianya Jasa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Tahun		1	1	1	100%			
	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan		1	1	1	100%			
	Pelatihan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Orang		90	90	90	100%			
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan**	**Persen**	**100%**		**88**	**100**	**100%**			
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen		1	1	1	100%			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		1	1	1	100%			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dokumen		1	1	1	100%			

	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah	Dokumen		1	1	1	**100%**			
	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah	Terusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah	Dokumen		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Dokumen		1	1	1	**100%**			
	Penyediaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Tersedianya Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Dokumen		1	1	1	**100%**			
	Sistem Pengendalian Intern	Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern	Tahun			1	0	**0**			
	Penyediaan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah	Tersedianya Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah	Bulam		12	12	12	**100%**			
	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Sekretariat Daerah	Dokumen		1	1	1	**100%**			
	Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah	Dokumen		1	1	1	**100%**			
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**100%**					**100**	**100**	**100%**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Cakupan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	30	16	18	18	**100%**	3	37	123,3%
		Jumlah Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan									
		Jumlah Kunjungan Kerja Bupati Tapanuli Utara ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan									
		Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang dilaksanakan									
		Jumlah Rapat – rapat koordinasi pemerintah di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan dan di fasilitasi									

		Jumlah Kecamatan yang dilakukan penilaian									
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	**100%**	3	12	12	**100%**	3	18	90%
		Jumlah Jalan, Gang, Sarana Umum dan Rumah yang diberikan Nama atau Nomor									
		Jumlah Unsur Rupa Bumi yang ditata									
		Persentase Batas antar Kecamatan, Antar Desa dan Kelurahan yang dilakukan verifikasi penegasan									
		Persentase wikayah /daerah yang dilakukan verifikasi penegasan batas									
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	30	14	18	18	**100%**	4	36	120 %
		Kegiatan APKASI yang disediakan Jasa Pendukungnya									
		Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara yang diselenggarakan									
		Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawabann (LKPJ) Bupati Tapanuli Utara yang disusun									
		Buku laporan LPPD Kabupaten Tapanuli Utara yang disusun									
		Buku laporan SPM Daerah yang disusun									
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Cakupan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	25	6	15	15	**100%**	8	29	116%
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama		25	5	15	15	**100%**	8	28	112%
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Dokumen	40	12	8	8	**100%**	12	32	80%
		Jumlah Masjid yang dikunjungi Tim Safari Ramadhan Kab. Tapanuli Utara									

		Jumlah Perayaan Natal Oikumene di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan									
		Jumlah Perayaan Paskah Raya di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan									
		Jumlah Acara Berbuka Puasa Bersama di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan									
		Jumlah Syukuran Tahun Baru Non PNS/Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan									
		Jumlah Syukuran Tahun Baru PNS/Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan									
		Jumlah Calon Jamaah Haji di Kabupaten Tapanuli Utara yang diberangkatkan									
		Jumlah Tokoh Agama yang diberangkatkan melaksanakan Wisata Rohani									
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	35	2	15	15	**100%**	2	34	97%
		Jumlah Kelompok Masyarakat dan Individu yang mendapat Bantuan Sosial									
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil kebijakan,Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,Perpustakaan, Kearsipan, Tamtribun Linmas	Dokumen	5	1	1	1	**100%**	1	4	80%

4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Cakupan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persen**	**100**					100	100	100%
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi	Dokumen	3.528	1154	879	967	110%	889	3.010	85,3%
		Jumlah Surat Keputusan Bupati,Surat Keputusan Sekretaris Daerah yang di Evaluasi dan Dieksaminasi	SK								
		Jumlah Rancangan Peraturan Bupati yang dievaluasi dan ditetapkan	Perda								
		Jumlah draf Rancangan Peraturan Daerah yang fasilitasi dan ditetapkan	Draf Ranperda								
		Jumlah PROMPEMPERDA yang ditetapkan	PROMPER PERDA								
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang difasilitasi	Perkara	31	3	8	5	62,5%	8	16	51,6%
		Jumlah dokumen yang dilaporkan terkait RANHAM	Dokumen								
		Jumlah peserta yang mengikuti forum komunikasi bidang hukum	Orang								
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang didokumentasikan dan dipublikasikan	Dokumen	3.092	1.022	770	831	107%	780	2.633	85,1%
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui JDIH	Produk Hukum								
		Jumlah peserta yang mendapat penyuluhan hukum	Orang								
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Cakupan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persen**	**100**				100%	**100**	**100**	100%
1.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan	60	4	24	24	100%	12	40	66,6%
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	laporan	200	40	80	80	100%	40	160	80%
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase UMKM yang dimonitoring	laporan	60	12	12	12	100%	12	48	80%
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Pembanguhan	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%

4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	30	4	18	18	100%	4	26	86,6%
		Jumlah Standar Satuan Harga yang disusun	Standar								
		Jumlah Sistem Monev Online yang dikoordinasikan	Laporan								
		Jumlah Perangkat Daerah Pengusul Kegiatan DAK fisik yang diverifikasi	Perangkat Daerah								
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	25	0	15	15	100%	9	24	96%
		Jumlah Jasa Konstruksi yang dikoordinasikan	Laporan								
		Jumlah Pelaksanaan Gotong Royong yang dikoordinasikan	Laporan								
		Jumlah Proyek Pembangunan yang dikendalikan	Paket								
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	15	1	9	9	100%	3	13	86,6%
		Jumlah Proyek yang dimonitoring dan di Evaluasi									
		Jumlah Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja yang disusun									
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jsa	Dokumen	5	0	3	3	100%	1	4	80%
		Jumlah dokumen Strategi Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Evaluasi PBJ	Dokumen								
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Lyanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	5	0	3	3	100%	1	4	80%
		Persentase Pengadaan sistem Pengadaan Barang/jasa Secara Elektornik yang ditindaklanjuti	Persen								
		Jumlah Dokumen data hasil Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen								
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	250	50	150	150	100%	50	250	100%

4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Dokumen**	**31**	**19**	**6**	**6**	100%	**6**	**31**	100%
		Jumlah Dokumen Renja yang disusun	Dokumen								
		Jumlah Dokumen Renaksi yang disusun	Dokumen								
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun	Dokumen								
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan yang disusun	Dokumen								
		Jumlah Dokumen Renaksi Perubahan yang disusun	Dokumen								
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun	Dokumen								
		Jumlah Dokumen Renstra Perubahan yang disusun	Dokumen								
		Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	Dokumen								
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	4	75%
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	4	75%
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	4	75%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	100%	1	4	100%

4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	4	100%
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**							100%
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Bulan	70	14	14	14	100%	14	56	75%
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	12	12	12	100%	12	48	75%
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	1	100%	1	4	75%
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bul;anan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	90	18	18	18	100%	18	72	75%
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun**	**Persen**	**100**							100%
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	10	2	2	2	100%	2	8	75%
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Bulan**	**12**					**12**	**12**	100%
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	70	14	14	14	100%	14	56	75%
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Derah**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	75	35	37	35	95	3	73	97%
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	264	120	140	130	93	4	254	96%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	43	20	21	20	95	2	42	98%

4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	99	45	50	48	96	4	97	98%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase PNS yang difasilitasi terkait koordinasi dan konsultasi SKPD	Persen	12146	5360	6782	6682	99	4	12046	99%
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	10	3	7	7	100	0	10	100%
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	125	15	19	19	100	91	125	100%
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit	155	50	63	62	98%	42	154	99%
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	**100%**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat MenyurT	Laporan	5	2	2	2	100	1	5	100%
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	96	45	50	49	98	1	95	99%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	217	98	118	110	93	1	209	96%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayaan umum Kantor yang disediakan	Laporan	1756	850	905	900	99	1	1751	100%
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	**100%**

4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara yang dibayarkan pajaknya	unit	192	78	85	83	98	29	190	99%
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	JumlahMebel yang dipelihara	Unit	136	15	19	19	100	102	136	100%
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	185	50	69	69	100	66	185	100%
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	Unit	49	15	25	23	92	9	47	96%
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau angunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	9	2	4	4	100	3	9	100%
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretarit Daerah**	Persen	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Deerah yang disediakan	Paket	617	280	310	310	100	27	617	100%
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	603	265	309	309	100	29	29	100%
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Cakupan Penataan Organisasi**	Persen	**95**					**95**	**95**	100%
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	3					3	3	100%
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	laporan	2					2	2	100%
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	3					3	3	100%

4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Laporan	8	2	2	2	100%	2	6	75%
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	3	3	3	100%	3	9	75%
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	4	1	1	1	100%	1	3	75%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Ada beberapa indikator kinerja yang menjadi dasar Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah. Secara umum capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sebagaimana yang ditargetkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dapat dicapai dengan baik.

Berikut ini disajikan pada Tabel 2.2 capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 (n-2), tahun 2025 (n-1), dan proyeksi tahun berjalan (tahun 2025), dan tahun 2026 (n+1).

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

NO	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			
			Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025(Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Peringkat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tingkat Provinsi	Perintakat	10	9			7			
2	Realisasi permohonan bantuan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap permohonan masyarakat yang masuk	Persen	100	100			100			
3	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan terhadap produk hukum yang diusulkan	Persen	100	100			100			
4	Persentase kinerja BUMD baik (sehat dan profitable)	Persen	66	66			60			
5	Persentase pengecer pupuk dan LPG menjual sesuai HET	Persen	100	100			100			
6	Persentase kegiatan fisik yang terlaksana dengan baik (tidak menjadi temuan pengawas)	Persen	98.20	98.4			98.2			
7	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa yang terealisasi	Persen	100	100			100			
8	Persentase Layanan Administrasi yang sesuai SOP	Persen	100	100			100			
9	Indeks Reformasi Birokrasi (Hasil PMPRB On line)	Persen	40	50			-			
10	Persentase acara/kegiatan sesuai keprotokolan	Persen	100	100			100			
11	Persentase Pelaporan tepat waktu	Persen	100	100			100			

12	Persentase capaian kinerja dan keuangan sekretariat daerah	Persen	100	100			100			
1	Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Atas Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor	4,0	4,0			4,0	4,0		
2	Persentase Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial kepada Individu dan Lembaga Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100		
3	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Produk Hukum	770	780			770	780		
4	Persentase Kegiatan Fisik yang Terlaksana dengan Baik	Persen	98,6	98,8			98,6	98,8		
5	Percepatan Akses Keuangan Daerah	Laporan	4	4			4	4		
6	Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif (Level 9/9)	Level	5/9	7/9			5/9	7/9		
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kabupaten	Indeks	85	86			85	86		
8	Nilai Laporan Kinerja OPD Kategori Baik	Nilai	85	86			85	86		
9	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100			100	100		
10	Meningkatnya Hubungan Layanan Kemasyarakatan Oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen	100	100			100	100		
11	Persentase Penyerapan Anggaran Sekretariat Daerah	Persen	97	98	100	100	97	98		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dinilai baik yang ditandai dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang baik pula.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, antara lain:
   - Belum optimalnya tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas kinerja
   - Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.
   - Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur.
   - Perlunya peningkatan pelayanan kecamatan, kelurahan, dan desa
   - Perlunya peningkatan pengelolaan BUMD untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
   - Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah
   - Masih kurangnya tindak lanjut implementasi terhadap kesepakatan bersama atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) yang telah ditandatangani.
   - Masih minimnya layanan administrasi umum dan produk hukum berbasis IT
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Tapanuli Utara

   Fungsi utama pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah mengkoordinasi seluruh Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi Bupati Tapanuli Utara. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mencerminkan tingkat koordinasi yang baik dalam rangka mensinergiskan pelayanan setiap Perangkat Daerah untuk mencapai visi dan misi Bupati Tapanuli Utara.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara :
   - Semakin besarnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan Perangkat Daerah sehingga dituntut pelayanan aparatur yang maksimal.
   - Berkembangnya teknologi informasi yang menyebab informasi dapat disampaikan secara cepat dan massal.
   - Semakin banyaknya produk-produk hukum yang mengatur pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah.
   - Semakin meningkatnya pengawasan aparat hukum dalam pelaksanaan program/kegiatan instansi pemerintah.
   - Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat digunakan dalam meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025:
   - Pentingnya fungsi koordinasi untuk mensinergiskan pelayanan Perangkat Daerah dalam mencapai Visi dan Misi Bupati Utara sehingga meningkatnya kualitas koordinasi dari Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
   - Pentingnya sistem koordinasi yang cepat dan tepat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan baik.
   - Perlunya peningkatan SDM Aparatur sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan agar rumusan program dan kegiatan dapat sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD menggambarkan bahwa Rancangan Awal RKPD telah sesuai dengan analisis kebutuhan sehingga Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024. Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2025 disajikan pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
		Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
4.01	Sekretariat Daerah					33.866.211.213,	Sekretariat Daerah					33.866.211.213,
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	28.192.869.038	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tapanuli Utara	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	42.832.720,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	42.832.720,00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	5.031.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	5.031.000

			Jumlah Dokumen Renja yang disusun	Dokumen	1			Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	dokumen	1	
			Jumlah Dokumen Renaksi yang disusun		1				Jumlah Dokumen Renaksi yang disusun	dokumen	1	
			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun	Dokumen	1				Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun	dokumen	1	
			Jumlah Dokumen Renja Perubahan yang disusun	Dokumen	1				Jumlah Dokumen Renja Perubahan yang disusun	dokumen	1	
			Jumlah Dokumen Renaksi Perubahan yang disusun	Dokumen	1				Jumlah Dokumen Renaksi Perubahan yang disusun	dokumen	1	
			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun	Dokumen	1				Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun	dokumen	1	
			Jumlah Dokumen Renstra Perubahan yang disusun	Dokumen	1				Jumlah Dokumen Renstra Perubahan yang disusun	dokumen	1	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.999.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	4.999.700
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya DPA Sekretariat Daerah	Dokumen	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Tapanuli Utara	Tersusunnya DPA Sekretariat Daerah	dokumen	1	5.000.000
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan,	Tersusunnya DPA Perubahan Sekretariat Daerah	Dokumen	1	5.002.220	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Tapanuli Utara	Tersusunnya DPA Perubahan Sekretariat	dokumen	1	5.002.220

		Semua Kelurahan							Daerah			
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunya Dokumen LPPD, SAKIP, IKU, dan PKTersusunya Dokumen LPPD, SAKIP, IKU, dan PK	Dokumen	4	17.799.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Tersusunya Dokumen LPPD, SAKIP, IKU, dan PKTersusunya Dokumen LPPD, SAKIP, IKU, dan PK	Bagian	10	17.799.800
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi	Dokumen	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapanuli Utara	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi	Dokumen	1	5.000.000
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**12**	**12.513.437.559**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**100**	**12.513.437.559**
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang/Bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	**12.347.821.559**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Orang/Bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14/org	**12.347.821.559**
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	20	**155.616.000**	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	300	**155.616.000**
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Laporan	1	**5.000.000**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Laporan	1	**5.000.000**

4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	13	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	5.000.000
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun**	**Laporan**	**2**	**14.411.300**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun**	**Laporan**	**100**	**14.411.300**
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	**14.411.300**	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	**14.411.300**
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Bulan**	**12**	**778.000.000**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Bulan**	**12**	**778.000.000**
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang/Bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	**778.000.000**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Orang/Bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	14/org	**778.000.000**
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua**	**Persentase Kebutuhan Administrasi**	**Persen**	**12**	**1.578.539.996**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Persentase Kebutuhan Administrasi**	**Persen**	**100**	**1.578.539.996**

		Kecamatan, Semua Kelurahan	**Umum Perangkat Derah**						**Umum Perangkat Derah**			
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	37	**100.000.000**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	37	**100.000.000**
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	140	**428.539.996**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	140	**428.539.996**
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Pernggandaan yang disediakan	Paket	21	100.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Paket Barang cetakan dan Pernggandaan yang disediakan	Paket	21	100.000.000
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	50	700.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	50	700.000.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooerdinasi dan konsultasi SKPD	Dokumen	6.782	**250.000.000**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooerdinasi dan konsultasi SKPD	laporan	7.477	**250.000.000**

4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**934.866.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan**	**Persen**	**100**	**934.866.000**

									Pemerintahan Daerah			
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit		
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit		754.866.000	Pengadaan Mebel	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	1	754.866.000
.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	63	**180.000.000**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1	**180.000.000**
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**12**	**2.743.548.657**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**2.743.548.657**

4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	2	**9.000.000**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	2	**9.000.000**

			Jumlah Mou dengan PT.Pos Indonesia terkait pengiriman surat, dokumen dan pengiriman lainnya	**MoU**					Jumlah Mou dengan PT.Pos Indonesia terkait pengiriman surat, dokumen dan pengiriman lainnya	**MoU**	1	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	50	707.117.189	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	50	707.117.189
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	118	**100.000.000**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	118	**100.000.000**
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	905	**1.927.431.468**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	laporan	8	**1.927.431.468**

									Umum Kantor yang disediakan			
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		12	**3.609.399.173**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Tapanuli Utara	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100**	**3.609.399.173**
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Item	85	**449.391.900**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapanuli Utara	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Unit	66	**449.391.900**
			Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraaan (STNK) yang diperpanjang						Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraaan (STNK) yang diperpanjang		7	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang dipelihara Jumlah Mebel yang dipelihara	Item			Pemeliharaan Mebel	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Mebel yang dipelihara Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	100	-
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Item	69	**80.000.000**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	72	**80.000.000**

4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Gedung	25	**3.080.007.273**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Gedung	7	**3.080.007.273**
			Jumlah Gedung Kantor yang dibayarkan PBB						Jumlah Gedung Kantor yang dibayarkan PBB		5	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau angunan Lainnya	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Gedung		
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Kebutuhan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretarit Daerah**	**Bulan**	**12**	**5.900.000.000**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Persentase Kebutuhan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretarit Daerah**	**Bulan**	**100**	**5.900.000.000**

4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga	**Item**	**310**	**3.400.000.000**	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga	**paket**	27	**3.400.000.000**

		Semua Kelurahan	Kepala Daerah yang disediakan						Kepala Daerah yang disediakan			
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Item		**2.500.000.000**	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	paket		**2.500.000.000**
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Penataan Organisasi**	**Persen**		**46.077.233**	**Penataan Organisasi**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan Penataan Organisasi**	**Persen**		**46.077.233**
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Perangkat Daerah		**22.000.000**	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Dokumen		**22.000.000**
			Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi kelembagaannya						Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi kelembagaannya			

			Jumlah Perangkat Daerah yang disusun						Jumlah Perangkat Daerah yang disusun			

			nomenklatur jabatan pelaksana						nomenklatur jabatan pelaksana			
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan Tata Laksana	Dokumen	3	**12.000.000**	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan Tata Laksana	Laporan	2	**12.000.000**
			Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang dikrimkan						Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang dikrimkan		2	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan	2	**12.077.233**	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	dokumen	3	**12.077.233**
			Jumlah Perangkat Daerah Nilai PMRB Online > 50						Jumlah Perangkat Daerah Nilai PMRB Online > 50		5	

			Jumlah Perangkat Daerah yang						Jumlah Perangkat Daerah yang		45	

			menyampaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu						menyampaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu			
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persen**		**31.756.400**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Kab. Tapanuli Utara	**Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persen**	**2**	**31.756.400**
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	**laporan**	**12**	**27.756.400**	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	**laporan**	200	**27.756.400**
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	**laporan**			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	**laporan**	3	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	**laporan**	12	4.000.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	**laporan**	1	4.000.000
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Pesen**	**100%**	**5.027.311.900**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Kab. Tapanuli Utara	**Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**100**	**5.027.311.900**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persen**	**100**	**836.321.425**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persen**	**100**	**836.321.425**
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	**724.018.200**	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	4	**724.018.200**

			Jumlah Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1				Jumlah Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	4	
			Jumlah kunjungan kerja Bupati Tapanuli Utara ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan	Dokumen	12				Jumlah kunjungan kerja Bupati Tapanuli Utara ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan	Dokumen	6	
			Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang dilaksanakan	Dokumen	16				Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang dilaksanakan	Dokumen		
			Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan dan fasilitasi	Dokumen	4				Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan dan fasilitasi			
			Jumlah Kecamatan yang dilakukan penilaian	Dokumen	15				Jumlah Kecamatan yang dilakukan penilaian			
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kelurahan			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kelurahan	100	-

			tersedianya dokumen batas daerah antar kecamatan	Kecamatan					tersedianya dokumen batas daerah antar kecamatan	Kecamatan	2	
			tersedianya dokumen penegasan batas daerah antar kabupaten	Dokumen					tersedianya dokumen penegasan batas daerah antar kabupaten	Dokumen	100	
			terselenggaranya Penilainan Kecamatan Terbaik	Kegiatan					terselenggaranya Penilainan Kecamatan Terbaik	Kegiatan		
			tersusunnya buku rupabumi	Buku					tersusunnya buku rupabumi	Buku		
			tersusunnya dokumen pemberian nama jalan,gang sarana umu dan penomoran rumah	Dokumen					tersusunnya dokumen pemberian nama jalan,gang sarana umu dan penomoran rumah	Dokumen		
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanaannya Fasilitasi Otonomi Daerah	**Dokumen**		**112.303.225**	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	**dokumen**	2	**112.303.225**
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kegiatan APKASI yang disediakan Jasa Pendukungnya	Kegiatan					Kegiatan APKASI yang disediakan Jasa Pendukungnya	Kegiatan	10	

		Peringkat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas LPPD Kabupaten Tapanuli Utara	Tersusunnya Buku LKPJ Bupati Tapanuli Utara	Dokumen					Tersusunnya Buku LKPJ Bupati Tapanuli Utara	Dokumen	1	
		Pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara yang diselenggarakan	Tersusunnya Buku LPPD Kabupaten Tapanuli Utara	Dokumen					Tersusunnya Buku LPPD Kabupaten Tapanuli Utara	Dokumen	1	
		Jumlah Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tapanuli Utara yang disusun	tersusunnya EPPD terhadap LPPD	Dokumen					tersusunnya EPPD terhadap LPPD	Dokumen	1	
		Jumlah Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara yang disusun	tersusunnya laporan SPM	Dokumen					tersusunnya laporan SPM	Dokumen	1	
		Jumlah Buku Laporan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tapanuli Utara yang disusun										

		Jumlah Kegiatan APKASI yang difasilitasi										
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Dokumen**			**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Dokumen**	**100**	-
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen			Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	10	-
	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Dokumen			Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Dokumen	1	-
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan kerjasama	Dokumen			Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan kerjasama	Dokumen	21	-

4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**		**3.186.489.450**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**100**	**3.186.489.450**
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasai Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen		**330.135.300**	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasai Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	17	**330.135.300**
			Jumlah Perayaan Natal Oikumene di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen					Jumlah Perayaan Natal Oikumene di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen	1	
			Jumlah Perayaan Paskah Raya di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen					Jumlah Perayaan Paskah Raya di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen	1	
			Jumlah Acara Berbuka Puasa Bersama di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen					Jumlah Acara Berbuka Puasa Bersama di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen	1	

			Jumlah Syukuran Tahun Baru Non PNS/Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen					Jumlah Syukuran Tahun Baru Non PNS/Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen	1	
			Jumlah Syukuran Tahun Baru PNS/Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen					Jumlah Syukuran Tahun Baru PNS/Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen	1	
			Jumlah Calon Jamaah Haji di Kabupaten Tapanuli Utara yang diberangkatkan	Dokumen					Jumlah Calon Jamaah Haji di Kabupaten Tapanuli Utara yang diberangkatkan	Dokumen	10	
			Jumlah Tokoh Agama yang diberangkatkan melaksanakan Wisata Rohani	Dokumen					Jumlah Tokoh Agama yang diberangkatkan melaksanakan Wisata Rohani	Dokumen	5	

4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, Tansmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan pencataran sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			**2.781.503.400**	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, Tansmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan pencataran sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	240	**2.781.503.400**
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga,			**74.850.750**	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan	**dokumen**	340	**74.850.750**

			Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tantibum Linmas						dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tantibum Linmas			
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			**1.004.501.025**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Dokumen**	**100**	**1.004.501.025**
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun			287.141.375	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Dokumen	904	287.141.375
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang dilaporkan terkait RANHAM Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Komunikasi Bidang Hukum Jumlah Peserta yang mendapatkan penyuluhan Hukum			**646.413.150**	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen yang dilaporkan terkait RANHAM Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Komunikasi Bidang Hukum Jumlah Peserta yang	kasus	8	**646.413.150**

									mendapatkan penyuluhan Hukum			
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan pengelolaan informasi Hukum yang di Dokumentasikan			**70.946.500**	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Produk Hukum dan pengelolaan informasi Hukum yang di Dokumentasikan	Dokumen	795	**70.946.500**
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Cakupan Program Perekonomian dan Pembangunan**			**646.030.275**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Kab. Tapanuli Utara	**Cakupan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persen**	**100**	**646.030.275**
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**			**127.605.600**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persen**	**100**	**127.605.600**
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			39.755.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	12	39.755.000

4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	laporan		87.850.600	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	laporan	1	87.850.600
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persen**	**97**	**104.765.425**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persen**	**100**	**104.765.425**
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan	Dokumen	4	**35.065.150**	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan	Dokumen	4	**35.065.150**
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Program Pembangunan	laporan	4	**34.899.725**	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Program Pembangunan	laporan	4	**34.899.725**
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan	laporan	3	**34.800.550**	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	laporan	4	**34.800.550**

			Pelaksanaan Pembangunan						Pembangunan			
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**		**413.659.250**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**	**100**	**413.659.250**
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	100	**252.515.700**	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	2	**252.515.700**
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	dokumen	145	**144.996.750**	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	dokumen	2	**144.996.750**
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa	orang	45	**16.146.800**	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa	orang	200	**16.146.800**
TOTAL						**33.866.211.213,-**	**TOTAL**					**33.866.211.213,-**

Tabel 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

No.	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 28.192.869.038	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 5.027.311.900	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 646.030.275	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dengan Kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2024. Berdasarkan hasil usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyeleggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tapanuli Utara merupakan dokumen transisi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang akan berakhir pada tahun 2024 dan RPJMD pasca Pilkada pada tahun 2024. Pada periode tersebut tidak ada Bupati dan Wakil Bupati yang memimpin sehingga akan berdampak pada perencanaan pembangunan daerah. RPD Kabupaten Tapanuli Utara disusun berdasarkan isu strategis aktual yang telah dirumuskan dengan memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan visi dan misi daerah yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025. Berlandaskan pada hal tersebut, maka tujuan dan sasaran daerah disusun sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan.	1. Menurunnya Daerah Rentan Pangan 2. Meningkatkan Diversifikasi Pangan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	➢ Meningkatkan Nilai Investasi ➢ Meningkatnya PDRB sektor pertanian ➢ Meningkatkan Kontribusi PDRB sektor Industri ➢ Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan ➢ Meningkatkan Pertumbuhan UMKM ➢ Meningkatkan Koperasi Berkualitas
Meningkatnya sistem pendidikan daerah	➢ Memenuhi standar pendidikan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	➢ Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas
Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	➢ Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan Kerja ➢ Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Prestasi olahraga
Meningkatnya Jumlah wisatawan	➢ Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata ➢ Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah	➢ Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak ➢ Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi

	➢ Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air
Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	➢ Meningkatkan penataan dan pengendalian tata ruang
Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik	➢ Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup daerah ➢ Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau ➢ Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif
Meningkatnya kapasitas Desa	➢ Meningkatkan status desa
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	➢ Meningkatkan akuntabilitas kinerja ➢ Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan ➢ Meningkatkan pendapatan daerah ➢ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ➢ Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan ➢ Meningkatkan Kualitas ASN yang profesional dan berintegritas
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	➢ Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026, tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah "Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja".

Sesuai dengan Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dirumuskan 3 (tiga) sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu:

1. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi di bidang tata pemerintahan, kerja sama kesejahteraan rakyat dan hukum
2. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa
3. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi

Untuk lebih jelasnya, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dituangkan pada Tabel III.2 Berikut

Tabel III.2
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi di bidang tata pemerintahan, kerja sama kesejahteraan rakyat dan hukum	1. Persentase Terlaksananya fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100
		2. Persentase Terpenuhinya Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah	Persen	100
		3. Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	Persen	100

	2. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa	1. Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100
		2. Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Persen	100
		3. Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Persen	100
	3. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi	1. Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Persen	100

	pimpinan, serta perencanaan dan keuangan			
		2. Persentase Terlaksananya Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100
		3. Persentase Terpenuhi Administrasi dan Operasional Sekretariat Daerah	Persen	100
		4. Persentase Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penggangaran, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026
2. Perubahan Rencana Kerja Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026
3. Kepmendagri Nomor 50-589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangungan dan Keuangan Daerah.

Tabel III.3
Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tapanuli Utara

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Pagu Perubahan	Penambahan/Pengurangan	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**											
4.01	**Sekretariat Daerah**											
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	Kab. Tapanuli Utara	**100 Persen**				**DAU**		**95 Persen**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	Kab. Tapanuli Utara	**100**	**42.832.720**	**50.841.720**	**8.009.000**	**DAU**	**Bertambah**	**100**	**47.115.992**
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1	5.031.000	16.590.000	11.559.000	DAU	Bertambah	1	5.534.100
		Jumlah Dokumen Renaksi yang disusun	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1						1	
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1						1	
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan yang disusun	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1						1	
		Jumlah Dokumen Renaksi Perubahan yang disusun	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1						1	
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1						1	

4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1	4.999.700	4.999.700	-	DAU	-	1	5.499.670
		Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1						1	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1	5.000.000	5.000.000	-	DAU	-	1	5.500.000
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1	5.002.220	5.002.220	-	DAU	-	1	5.502.442
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	1	17.799.800	14.249.800	3.550.000	DAU	Berkurang	1	19.579.780
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja san iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	1	5.000.000	5.000.000	-	DAU	-	1	5.500.000
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**12.513.437.559**	**12.143.664.906**	**369.772.653**	**DAU**	**Berkurang**	**100**	**13.764.781.315**
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	Kab. Tapanuli Utara	14	12.347.821.559	11.978.048.906	269.772.653	DAU	Berkurang	14	13.582.603.715
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1	155.616.000	155.616.000	-	DAU	-	1	171.177.600
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	1	5.000.000	5.000.000	-	DAU	-	1	5.500.000
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	12	5.000.000	5.000.000	-	DAU	-	12	5.500.000
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun**	**laporan**	**Kab. Tapanuli Utara**	**2**	**14.411.300**	**47.812.300**	**33.401.000**	**DAU**	**Bertambah**	**2**	**15.852.430**
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	Kab. Tapanuli Utara	2	14.411.300	47.812.300	33.401.000	DAU	Bertambah	2	15.852.430
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala**	**Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Bulan**	**Kab. Tapanuli Utara**	**12**	**778.000.000**	**778.000.000**	**-**	**DAU**	**-**	**12**	**855.800.000**

	Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang/Bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	Kab. Tapanuli Utara	14 Bulan	778.000.000	778.000.000	-	DAU	-	2 Orang/Bulan	855.800.000
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Derah**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100 Persen**	**1.539.071.996**	**4.613.499.671**	**3.034.959.675**	**DAU**	**Bertambah**	**100 Persen**	**1.692.979.195**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Kab. Tapanuli Utara	3 Paket	100.000.000	122.444.900	22.444.900	DAU	Bertambah	3 Paket	110.000.000
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Kab. Tapanuli Utara	4 Paket	389.071.996	773.701.001	345.161.005	DAU	Bertambah	4 Paket	427.979.195
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Perriggandaan yang disediakan	Paket	Kab. Tapanuli Utara	2 Paket	100.000.000	102.720.000	2.720.000	DAU	Bertambah	2 Paket	110.000.000
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	Kab. Tapanuli Utara	4 laporan	700.000.000	2.368.688.770	1.668.688.770	DAU	Bertambah	4 laporan	770.000.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooerdinasi dan konsultasi SKPD	laporan	Kab. Tapanuli Utara	4 laporan	250.000.000	1.245.945.000	995.945.000	DAU	Bertambah	4 laporan	275.000.000
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**355.000.000**	**5.815.270.421**	**4.880.404.421**	**DAU**	**Bertambah**	**100**	**390.500.000**
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalLapangan yang Dilaksanakan	Unit	Kab. Tapanuli Utara	2	**0**	1.000.450.000	1.000.450.000	DAU	Bertambah	2	2.000.000.000
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	Kab. Tapanuli Utara	91 unit	175.000.000	2.116.935.400	1.362.069.400	DAU	Bertambah	91 unit	192.500.000
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	Kab. Tapanuli Utara	42 unit	180.000.000	2.248.335.021	2.068.335.021	DAU	Bertambah	42 unit	198.000.000
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**2.743.548.657**	**2.784.523.206**	**40.974.549**	**DAU**	**Bertambah**	**100**	**3.017.903.523**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	Kab. Tapanuli Utara	1 laporan	9.000.000	1.500.000	7.500.000	DAU	Berkurang	1 laporan	9.900.000
		Jumlah Mou dengan PT.Pos Indonesia terkait pengiriman surat, dokumen dan pengiriman lainnya	MoU	Kab. Tapanuli Utara	1 laporan						1 laporan	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	Kab. Tapanuli Utara	1 laporan	707.117.189	1.117.197.881	410.080.692	DAU	Bertambah	1 laporan	777.828.908

4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	Kab. Tapanuli Utara	1 laporan	100.000.000	226.043.725	126.043.725	DAU	Bertambah	1 laporan	110.000.000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	Kab. Tapanuli Utara	1 laporan	1.927.431.468	1.439.781.600	487.649.868	DAU	Berkurang	1 laporan	2.120.174.615
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**637.206.923**	**4.405.488.223**	**796.089.050**	**DAU**	**Bertambah**	**100**	**700.937.690**
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Persen	Kab. Tapanuli Utara	100	449.397.900	574.528.600	125.136.700	DAU	Bertambah	100	494.337.690
		Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraaan (STNK) yang diperpanjang	Unit	Kab. Tapanuli Utara	29 unit						7 unit	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang dipelihara	Unit Unit	Kab. Tapanuli Utara	0 unit 66 unit	80.000.000	144.607.100	64.607.100	DAU	Bertambah	0 unit 66 unit	88.000.000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	Kab. Tapanuli Utara	9 Unit	107.815.023	3.686.352.523	3.578.537.500	DAU	Bertambah	9 Unit	118.600.000
		Jumlah Gedung Kantor yang dibayarkan PBB	Unit	Kab. Tapanuli Utara	5 Unit						5 unit	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**5.900.000.000**	**5.432.790.438**	**467.209.562**	**DAU**	**Berkurang**	**100**	**6.490.000.000**
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Paket	Kab. Tapanuli Utara	27	3.400.000.000	3.435.031.488	35.031.488	DAU	Bertambah	27	3.740.000.000
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	Kab. Tapanuli Utara	29	2.500.000.000	1.997.758.950	502.241.050	DAU	Berkurang	29	2.750.000.000
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Cakupan Penataan Organisasi**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**95**	**46.077.233**	**96.398.695**	**50.321.462**	**DAU**	**Bertambah**	**95**	**50.690.000**
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	3	22.000.000	44.217.462	22.217.462	DAU	Bertambah	3	24.200.000
		Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi kelembagaannya	Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara	45						45	

		Jumlah Perangkat Daerah yang disusun nomenklatur jabatan pelaksana	Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara	45						45	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasi; fasilitasi pelayanan publik dan Tata Laksana	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	2	12.000.000	26.474.000	14.474.000	DAU	Bertambah	2	13.200.000
		Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang dikirimkan	Proposal	Kab. Tapanuli Utara	2						2	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	3	12.077.233	25.707.233	13.630.000	DAU	Bertambah	3	13.290.000
		Jumlah Perangkat Daerah Nilai PMRB Online > 50	Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara	5						8	
		Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu	Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara	45						45	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**31.756.400**	**347.770.500**	**316.014.100**	**DAU**	**Bertambah**	**100**	**34.932.040**
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	2	27.756.400	312.816.200	285.059.800	DAU	Bertambah	2	30.532.040
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	2	0	22.524.800	22.524.800	DAU	Bertambah	2	30.000.000
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	1	4.000.000	12.429.500	8.429.500	DAU	Bertambah	1	4.400.000
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**				**DAU**		**100**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Cakupan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**836.321.425**	**1.732.091.225**	**895.769.800**	**DAU**	**Bertambah**	**100**	**919.953.567**
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	4	724.018.200	942.890.600	218.872.400	DAU	Bertambah	4	796.420.020
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	2	0	15.000.000	15.000.000	DAU	Bertambah	2	20.000.000
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	6	112.303.225	774.200.625	661.897.800	DAU	Bertambah	6	123.533.547
		Kegiatan APKASI yang disediakan Jasa Pendukungnya	Kegiatan	Kab. Tapanuli Utara	10						10	
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Cakupan Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Daerah**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**		**0**	**48.154.900**	**48.154.900**	**DAU**	**Bertambah**		**50.000.000**

4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	2	0	48.154.900	48.154.900	DAU	Bertambah	2	50.000.000
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**3.186.489.450**	**5.077.089.600,92**	**1.890.600.150,92**	**DAU**	**Bertambah**	**100**	**3.505.138.395**
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasai Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	8	330.135.300	1.734.238.850,92	1.404.103.550,92	DAU	Bertambah	8	363.148.830
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, Tansmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan pencataran sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	2	2.781.503.400	3.253.000.000	471.496.600	DAU	Bertambah	2	3.059.653.740
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkai Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tantibum Linmas	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	2	74.850.750	89.850.750	15.000.000	DAU	Bertambah	2	82.335.825
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Cakupan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**1.004.501.025**	**977.789.425**	**26.711.600**	**DAU**	**Berkurang**	**100**	**1.104.951.127**
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	5	287.141.375	273.102.625	14.038.750	DAU	Berkurang	5	315.655.512
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen yang dilaporkan terkait RANHAM	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	3	646.413.150	636.061.300	10.351.850	DAU	Berkurang	3	711.054.465
		Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus		4				DAU		4	
		Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Komunikasi Bidang Hukum	Orang		200				DAU		200	
		Jumlah Peserta yang mendapatkan penyuluhan Hukum	Orang		200				DAU		200	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan pengelolaan informasi Hukum yang di Dokumentasikan	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	2	70.946.500	68.625.500	2.321.000	DAU	Berkurang	2	78.041.150
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Cakupan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**98,8**						**98,8**	

4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**127.605.600**	**622.772.650**	**495.167.050**	**DAU**	**Bertambah**	**100**	**140.366.160**
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	12	39.755.000	145.229.000	105.474.000	DAU	Bertambah	12	43.730.500
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	7	87.850.600	465.543.650	377.693.050	DAU	Bertambah	7	96.635.660
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro yang Dilaksanakan	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	2	0	12.000.000	12.000.000	DAU	Bertambah	2	60.000.000
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**104.765.425**	**252.250.825**	**147.485.400**	**DAU**	**Bertambah**	**100**	**118.731.940**
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	4	35.065.150	84.323.600	49.258.450	DAU	Bertambah	4	38.571.665
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Program Pembangunan	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	4	34.899.725	83.510.425	48.610.700	DAU	Bertambah	4	41.879.670
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	3	34.800.550	84.416.800	49.616.250	DAU	Bertambah	3	38.280.605
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**413.659.250**	**463.730.900**	**50.071.650**	**DAU**	**Bertambah**	**100**	**455.025.175**
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	3	252.515.700	221.692.450	30.823.250	DAU	Berkurang	3	277.767.270
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	3	144.996.750	184.117.250	39.120.500	DAU	Bertambah	3	159.496.425
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa	Orang	Kab. Tapanuli Utara	30	16.146.800	57.921.200	41.774.400	DAU	Betambah	30	17.761.480

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten, dirumuskan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebesar 45.689.939.605,92,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tapanuli Utara. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 36.516.060.080,-
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
   Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri 3 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.835.125.150,92;
3. Program Perekonomian dan Pembangunan
   Program Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari 3 Kegiatan dan 8 sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.338.754.375.

Secara keseluruhan, untuk Perubahan Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai 3 Program, 17 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar **Rp. 45.689.939.605,92**,-.

Uraian yang lebih rinci mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat seperti dibawah ini:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, terdiri dari 11 Kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
    c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
    d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
    e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
    f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
    c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
    d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Administrasi Keuangan dan Operasionak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
    c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
    d. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
    e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Pengadaan Mebel;
    b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 5 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
    b. Pemeliharaan Mebel;
    c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
    d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
    e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;
    b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.
10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Fasilitasi Keprotokolan;
    b. Pendokumentasian Tugas Pimpinan.
11. Penataan Organisasi, terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
    c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

II. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri 3 Kegiatan, yaitu:

1. Administrasi Tata Pemerintahan, terdiri dari 2 Sub Kegiatan,
    a. Penataan Administrasi Pemerintahan;
    b. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
    b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Rakyat;
    c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.
3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
    b. Fasilitasi Bantuan Hukum;
    c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

III. Program Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 3 Kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
    b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
    c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
2. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;

3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
   a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
   b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
   c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB V
PENUTUP

Untuk memperoleh hasil pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan yang dicita-citakan oleh masyarakat, maka melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, dapat tergambar Rencana Pembangunan dan prioritas yang diinginkan. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, mempedomani penjaringan aspirasi masyarakat serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan adanya penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat terkoordinasi, terintegrasi dan interaktif lintas pelaku, transparan dan bertanggungjawab. Disamping itu, pertimbangan pada perencanaan pembangunan yang lebih efisien dan lebih responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dengan memperhatikan potensi dan karakteristik serta permasalahan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, untuk mencapai keberhasilan dan menjaga kesinambungan pembangunan pada Tahun Anggaran 2025, maka Perubahan RENJA Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini

dapat disajikan sebagai pedoman perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan anggaran yang dialokasikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Tarutung, September 2025

Plt. Sekretaris Daerah,

Ir. David P. Sipahutar, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 199503 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN TAPANULI UTARA

Alamat : Jl. Sisingamangarja no 194 Tarutung

Tarutung

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunianya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini didasarkan pada rancangan tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang akan tertuang pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029. Dokumen ini berfungsi sebagai kerangka dan acuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara selama 1 (Satu) tahun kedepan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam peningkatan kinerja sekaligus upaya percepatan perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Kiranya Perubahan Renja (Perubahan Rencana Kerja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja, sekaligus memberi manfaat dalam peningkatan pelayanan dan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten Tapanuli Utara.

Tarutung, September 2025
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

TOHOM P. SILABAN, ST.M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19760309 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 26

2.4 Review Terhadap RKPD 26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 40

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 40

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 41

3.3 Program dan Kegiatan 50

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 51

BAB V PENUTUP 62

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 6

Tabel 2.2 Anggaran Belanja Program dan Kegiatan OPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 8

Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025 11

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD 13

Tabel 2.5 Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 14

Tabel 2.6 Target dan Realisasi Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2025 16

Tabel 2.7 Data Pelaksanaan Rapat-Rapat dan Persidangan DPRD Tahun 2025 18

Tabel 2.8 Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya (Indikator Tujuan) 21

Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan SKPD 26

Tabel 2.10 Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara 29

Tabel 3.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran 42

Tabel 3.2 IKU Sekretariat DPRD Tahun 2025 43

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD ini disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja;
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja;
3. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja;
6. Penetapan Perubahan Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara ini merupakan dokumen perencanaan tahunan (periode 1 tahun). Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini menjadi acuan, dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2025 serta menjadi solusi penyelesaian atas permasalahan Perubahan Rencana Kerja tahun sebelumnya. Perubahan Rencana Kerja ini juga koreksi bagi kekurangan sebelumnya, bahan untuk peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2025 Sekretariat DPRD terlebih dahulu melakukan analisis dan telaah terhadap target tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029, serta teknokratik khususnya menyangkut permasalahan di DPRD dan Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD berada pada Misi Ketuju Bupati Tapanuli Utara Periode 2025-2029 yaitu

"Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan" dan berada pada Tujuan yaitu ***"Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemerintahan"*** Bupati Tapanuli Utara Periode 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Tahun 2018 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom 80 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang atas Peraturan Pemerintah 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini adalah mewujudkan dokumen perencanaan dan anggaran untuk periode 1 (Satu) tahun (Tahun 2025);

b. Tujuan

1. Menyusun arah dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2025 sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi stakeholders Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai fasilitator kepada DPRD Kabupaten Tapanulli Utara sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan dapat tercapai;
3. Mengendalikan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Sebagai tolak ukur guna pengukuran dan evaluasi selama kinerja selama Tahun 2024 bagi para Stakeholres Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Sebagai landasan bagi perencanaan dan evaluasi kerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang meliputi Perubahan Rencana Kerja Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Kehormatan Dewan, Badan Anggaran, Badan Legislatif Dewan dan Badan Musyawarah, dll.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara ini adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan;

Bab II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

Bab IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Indikator pencapaian keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengemban amanat untuk mencapai tujuan dan sasaran diantaranya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) OPD Tahun Anggaran 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disajikan dalam bentuk pencapaian realisasi kinerja dan tingkat capaian kinerja sesuai dengan target sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yang pada umumnya merupakan gambaran dari capaian kinerja sasaran yanag telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran capaian pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja 97.28%, dengan catatan terdapat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja.

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2025, akan menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian realisasi dan target kinerja.

Pada sisi belanja tahun 2025, OPD Sekretariat DPRD menganggarkan belanja (setelah rasionalisasi) sebesar Rp 37.549.611.816,00 dan realisasi sebesar Rp 37.025.838.625,00 atau realisasi sebesar 97.28 %, dengan uraian sebagai berikut :

a. **Belanja Operasi**

Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp 37.549.611.816,00 dan realisasi sebesar Rp 37.025.838.625,00 atau (97.27 %) terdiri dari :

- Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 16.235.807.392,00 realisasi sebesar Rp. 15.968.919.749 atau (98.35%);

- Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp 20.724.129.500,00 realisasi sebesar Rp. 20.047.898.828,00 atau (96.73%);

Tabel 2.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

Belanja Daerah	**Tahun 2023**		Persen
	Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**	
Belanja Modal	1.408.093.700	1.206.240.500	85.66
Belanja Operasi	38.710.464.902	23.340.158.421	60.29
Jumlah	40.118.558.602	24.546.398.921	61.18

Dari Tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa :

- Belanja Pegawai, Anggaran sebesar Rp. 16.235.807.392.00 realisasi sebesar Rp 15.968.919.749,00 atau (98.35%). Diakibatkan tingginya agres gaji dan Medical Chek Up DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli utara
- Belanja Barang dan Jasa Anggaran sebesar Rp. 20.724.129.500,00 realisasi sebesar Rp. 20.047.898.828,00 atau (96.73%) terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat di pertanggunjawabkan sehingga mengakibatkan sisa seperti Penyediaan Pendalam Tugas DPRD (Bimtek DPRD) yang pelaksanaan di Dalam Provinsi Sumatera Utara sementara Penganggaran di Luar Provinsi Sumatera Utara sehingga capainnya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

b. **Belanja Modal**

Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp 1.408.093.700 dan realisasi sebesar Rp 1.206.240.500 atau (98.35%) terdiri dari :

- Belanja belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp. 113.700.000 realisasi sebesar 106.960.000 atau (98.35%) Adapun sisa pada belanja dimaksud adalah diakibatkan selisih harga sehingga capain realisasi hanya 96,74%.

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 49.276.481,00 realisasi sebesar Rp. 0,00 (0%), hal ini terjadi diakibatkan perencanaan yang tidak sesuai sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai target.

Berikut ini disajikan ringkasan anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.2

Anggaran Belanja Program dan Kegiatan OPD Sekretariat DPRD

Tahun Anggaran 2025

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Keterangan
SEKRETARIAT DPRD	**43.615.629.170,00**	**40.118.558.602,00**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**25.480.783.320,00**	**25.468.723.352,00**	98,56	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**142.769.600,00**	**145.510.000,00**	99,98	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.920.000,00	3.060.000,00	100,00	Berkurang
Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	4.823.600,00	3.336.000,00	99,94	Berkurang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.976.000,00	3.472.000,00	100,00	Berkurang
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	128.050.000,00	135.642.000,00	99,98	Bertambah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.943.057.733,00**	**2.824.260.590,00**	97,38	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.838.892.533,00	2.721.609.390,00	97,31	Berkurang
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.181.200,00	99.181.200,00	99,65	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.984.000,00	3.470.000,00	100,00	Berkurang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**136.831.000,00**	**66.461.000,00**	99,99	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	136.831.000,00	66.461.000,00	99,99	Berkurang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**861.827.075,00**	**472.676.750,00**	98,38	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.291.000,00	10.583.900,00	100,00	Berkurang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.341.875,00	59.821.050,00	89,43	Berkurang
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.018.200,00	36.016.000,00	100,00	Berkurang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.126.000,00	33.594.800,00	98,91	Berkurang
Fasilitasi Kunjungan Tamu	76.050.000,00	30.420.000,00	94,72	Berkurang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	302.241.000,00	99,88	Berkurang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.447.244.400,00**	**1.353.501.400,00**	99,96	
Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	1.332.206.000,00	1.316.911.000,00	0,00	Berkurang

Pengadaan Mebel	29.040.000,00	3.960.000,00	99,96	Berkurang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.998.400,00	32.630.400,00	0,00	Berkurang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**554.996.000,00**	**411.147.600,00**	98,15	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	5.100.000,00	100,00	Berkurang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.900.000,00	62.790.000,00	97,98	Bertambah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	492.096.000,00	343.257.600,00	98,14	Berkurang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**363.437.200,00**	**387.661.600,00**	99,30	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	271.469.000,00	291.114.500,00	99,43	Bertambah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.127.800,00	87.995.700,00	98,18	Bertambah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.840.400,00	8.551.400,00	100,00	Berkurang
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**16.429.295.912,00**	**16.340.243.912,00**	99,51	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.216.016.912,00	15.223.256.912,00	99,67	Bertambah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	611.314.000,00	587.727.000,00	97,18	Berkurang
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	601.965.000,00	529.260.000,00	96,35	Berkurang
Layanan Administrasi DPRD	**2.601.324.400,00**	**3.467.260.500,00**	96,43	
Fasilitasi Fraksi DPRD	11.324.300,00	7.377.500,00	100,00	Berkurang
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	689.054.000,00	1.297.500.000,00	99,97	Bertambah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.900.946.100,00	2.162.383.000,00	90,11	Bertambah
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**18.134.845.850,00**	**14.649.835.250,00**	98,69	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**457.624.000,00**	**235.879.000,00**	98,49	
Pembahasan Rancangan Perda	457.624.000,00	235.879.000,00	98,49	Berkurang
Pembahasan Kebijakan Anggaran	**700.000.000,00**	**363.029.800,00**	98,78	
Pembahasan APBD	700.000.000,00	363.029.800,00	99,06	Berkurang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**117.640.000,00**	**68.640.000,00**	97,48	
Pengawasan Penggunaan Anggaran	117.640.000,00	68.640.000,00	97,48	Berkurang
Peningkatan Kapasitas DPRD	**1.324.128.600,00**	**1.116.978.200,00**	95,58	
Pendalaman Tugas DPRD	937.160.000,00	789.215.000,00	94,70	Berkurang
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	118.135.000,00	58.929.600,00	94,17	Berkurang

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	268.833.600,00	268.833.600,00	99,98	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**3.960.553.250,00**	**1.566.163.250,00**	98,14	
Kunjungan Kerja dalam Daerah	117.000.000,00	100.500.000,00	99,90	Berkurang
Pelaksanaan Reses	3.843.553.250,00	1.465.663.250,00	98,10	Berkurang
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**120.201.000,00**	**60.200.000,00**	99,96	
Pengawasan Kode Etik DPRD	120.201.000,00	60.200.000,00	99,96	Berkurang
Fasilitasi Tugas DPRD	**11.454.699.000,00**	**11.238.945.000,00**	99,54	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.394.359.000,00	10.567.976.000,00	99,64	Bertambah
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	700.000.000,00	367.129.000,00	98,80	Berkurang
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	360.340.000,00	303.840.000,00	97,70	Berkurang
	43.615.629.170,00	**40.118.558.602,00**	98,61	

Anggaran Belanja Program dan Kegiatan OPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 43.615.629.170,00, setelah Perubahan berkurang menjadi sebesar Rp. 40.118.558.602,00

Seluruh kegiatan rata-rata mencapai tingkat realisasi > 98,61 % kecuali ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan target seperti selisih harga dengan standart harga pemerintah sehingga mengakibatkan sisa anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 mengacu pada Renstra, Perubahan Rencana Kerja, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 selanjutnya diuraikan pada tabel berikut.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPANULI UTRA TAHUN 2025

Kabupaten	:	Tapanuli Utara
Perangkat Daerah	:	Sekretariat DPRD
Tugas	:	
Fungsi	a.	Pengelolaan tata usaha, pelaksanaan urusan dalam (intern) dan perlengkapan, aparatur, rumah tanga DPRD dan Sekretarita DPRD;
	b.	Penyusunan program kerja dan pelaksanaan ketatausahaan dan keuangan Sekretariat dan DPRD;
	c.	Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan rapat – rapat, pertemuan dan kunjungan kerja DPRD, pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan alat kelengkapan DPRD yaitu komisi, kepanitan dan fraksi serta penyelenggaraan keprotokolan;
	d.	Penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran serta penyelenggaraan kerja sama dan dukungan dalam penjaringan aspirasi; dan
	e.	Pelaksanaan tugasl lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh DPRD.

NO	SASARAN RPJMD YANG DIACU	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Pelayanan Fasilitasi	Persentase Agenda Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah Agenda Kerja Tahunan / Jumlah Agenda Kerja Tahunan yang dilaksanakan X 100 %	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Laporan Triwulanan	Jumlah Agenda Kerja Alat Kelengkapan yang dilaksanakan

		Aspirasi Masyarakat kepada Dewan.	Persentase Penatapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Peraturan Daerah yang diusulkan / Jumlah Perda yang ditetapkan	X 100 %	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Laporan Triwulanan	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan
		Meningkatkan nilai AKIP Sekretariat DPRD	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi AKIP yang dikeluarkan Inspektorat		Semua Bagian	Laporan Triwulanan	Nilai Evaluasi AKIP yang dikeluarkan Inspektorat
			Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah Temuan BPK/Inspektorat / Jumlah Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	X 100 %	Semua Bagian	Laporan Triwulanan	Jumlah Temuan BPK/Inspektorat. Jumlah Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja sasaran kerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Sekretariat DPRD sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD pada tahun 2024 sebagai mana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Tabel perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Program/Kegiatan	**Tahun Anggaran 2025**			
	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
SEKRETARIAT DPRD				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100,00	97,29
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00	99,62
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	100,00	100,00	99,87
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	90,00	100,00	99,41
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00	99,48
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	100,00	100,00	99,47
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	OB	100,00	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	80,00	100,00	97,81
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00	98,21

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kali	100,00	100,00	98,21
Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00	98,25
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	50,00	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	10,00	100,00	97,82
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	100,00	100,00	99,76
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	100,00	100,00	98,10
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	100,00	100,00	99,76
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	100,00	90,00	83,28
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	100,00	100,00	99,96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00	95,35
Pengadaan Mebel	Unit/Set	30,00	100,00	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit/ Buah	100,00	100,00	95,12
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00	97,79
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buah	40,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	20,00	90,00	82,11
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OB	100,00	100,00	99,36
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00	99,67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	100,00	100,00	99,68

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tahun	30,00	100,00	99,36
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	20,00	100,00	99,77
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			100,00	97,07
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	OB	10,00	100,00	98,13
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Stell Pasanag	10,00	90,00	84,43
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Orang	100,00	100,00	100,00
Layanan Administrasi DPRD			100,00	96,34
Fasilitasi Fraksi DPRD	Bulan	90,00	100,00	100,00
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kali	10,00	100,00	99,56
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	OB	10,00	100,00	92,82
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			100,00	97,25
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			100,00	99,64
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kali	40,00	100,00	99,92
Pembahasan Rancangan Perda	Buah	10,00	100,00	99,49
fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah Akademik	Buah	10,00	100,00	100,00
Pembahasan Kebijakan Anggaran			100,00	98,78
Pembahasan KUA dan PPAS	Kali	30,00	100,00	99,80
Pembahasan APBD	Kali	10,00	100,00	99,49
Pembahasan APBD Perubahan	Kali	30,00	100,00	90,75

Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Kali	30,00	90,00	87,50
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			80,00	72,57
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Laporan	10,00	80,00	72,57
Peningkatan Kapasitas DPRD			100,00	90,56
Pendalaman Tugas DPRD	Orang	10,00	100,00	90,87
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kegiatan	10,00	100,00	95,21
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kegiatan	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	OB	10,00	90,00	85,59
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kali	0,00	0,00	0,00
Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen	0,00	0,00	0,00
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			100,00	96,02
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Dokumen	10,00	100,00	98,47
Pelaksanaan Reses	Orang	10,00	100,00	95,81
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			100,00	99,75
Pengawasan Kode Etik DPRD	Kali	10,00	100,00	99,75
Fasilitasi Tugas DPRD			100,00	99,75
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kali	10,00	100,00	99,92
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kali	10,00	100,00	99,74
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Orang	10,00	100,00	91,97
			100,00	97,28

Dari uraian diatas bahwa realisasi kinerja pada Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebesar 83,83 % yang terbagi dari dua belanja Operasi dan Belanja Modal, realisasi belanja pegawai sebesar 83,79 % dan Belanja Barang sebesar 91,72 %, belanja modal yang diuraikan dengan belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 96,67% dan Belanja Modal Aset lainnya nihil pada tahun 2020. Tingkat capaian terendah adalah pada belanja pegawai yang diuraikan dengan Gaji ASN, Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dengan realisasi sebesar 77,01 % sedangkan belanja barang dan jasa terdapat beberapa yaitu :

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan realisasi sebesar 54,55 % hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan kantor yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran maka tidak dapat direalisasikan.
- Dana Pendukung Kegiatan Kerisalahan realisasi sebesar 57,02 % hal ini disebabkan ada beberapa agenda Kerja DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang tertunda akibat Pandemi Covid 19 pada tahun 2020.
- Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi untuk Fraksi-fraksi DPRD realisasi sebesar 75,35 % hal ini dikarenkan adanya Fraksi yang bergabung dalam satu Fraksi yaitu Garda Persatuan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara.

Target dan realisasi dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disampaikan tepat waktu sebagai berikut :

Tabel 2.6

Target dan Realisasi Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2023

No.	Jenis Dokumen/Laporan	Satuan	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Perubahan Rencana Kerja	Dokumen	1.00	1.00	100.00
2	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja	Dokumen	1.00	1.00	100.00

3	Perubahan Rencana Kerja	Dokumen	1.00	1.00	100.00
4	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja	Dokumen	1.00	1.00	100.00
5	Laporan Keuangan	Dokumen	1.00	1.00	100.00
6	Laporan Fisik dan Non Fisik (Triwulan)	Dokumen	4.00	4.00	100.00
7	Laporan Evaluasi Perubahan Rencana Kerja (Triwulan)	Dokumen	4.00	4.00	100.00
8	LKJiP	Dokumen	1.00	1.00	100.00
9	Dokumen Pra RKA	Dokumen	1.00	1.00	100.00
10	Dokumen RKA	Dokumen	1.00	1.00	100.00
11	DPA	Dokumen	1.00	1.00	100.00
12	Laporan Aset	Dokumen	1.00	1.00	100.00
13	Laporan Realisasi dan Prognosis Anggaran	Dokumen	1.00	1.00	100.00
14	Dokumen LPPD	Dokumen	1.00	1.00	100.00
15	Dokumen LKPJ	Dokumen	1.00	1.00	100.00
	Jumlah		21.00	21.00	100.00

Target kinerja indikator jumlah hasil rapat-rapat DPRD yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 adalah sebesar 151 kali dan realisasi sebesar 128 kali atau nilai capaian kinerja sebesar 98,61. Dari target 151 kali rapat yang direncanakan pada tahun 2024 realisasi sebanyak 128 kali rapat. Capaian kinerja pelaksanaan rapat Rapat Paripurna, Rapat Badan Anggaran dan Rapat Bapemperdayang memenuhi target sebesar 100 %. Tingkat capaian ini menunjukkan tingkat keseriusan DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran, mulai dari pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pembahasan KUA dan PPAS, serta pembahasan APBD.

Pada tabel berikut disajikan data pelaksanaan rapat-rapat dan persidangan DPRD selama tahun 2023.

Tabel 2.7

Data pelaksanaan rapat-rapat dan persidangan DPRD Tahun 2023

No	Jenis Rapat	Satuan	Target dan Realisasi		%
			Target	Realisasi	
1	Rapat Konsultasi (unsur Pimpinan)	Kali	5	4	80,00
2	Rapat Badan Musyawarah	Kali	12	10	83,33
3	Rapat Paripurna	Kali	24	24	100,00
4	Rapat badan Anggaran	Kali	12	12	100,00
5	Rapat Bapemperda	Kali	6	6	100,00
6	Rapat Gabungan Komisi	Kali	6	2	33,33
7	Rapat Komisi A	Kali	29	23	79,31
8	Rapat Komisi B	Kali	24	21	87,50
9	Rapat Komisi C	Kali	27	27	100,00
10	Rapat BKD	Kali	6	2	33,33
Jumlah			**151**	**128**	**98,61**

Sumber data : Bagian Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat DPRD (Data lengkap pelaksanaan rapat dan persidangan DPRD selama tahun 2023;).

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 bahwa DPRD diberikan hak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan/medical check up sebanyak satu kali dalam satu tahun. Kegiatan jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD pada tahun 2022, dari target sebanyak 35 anggota DPRD untuk melakukan pemeriksaan kesehatan/medical check up, 35 orang Anggota DPRD yang melaksanakannya sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 %.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa DPRD harus difasilitasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui penyediaan Tim Ahli/Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli dengan memperhatikan urgensi dan kemampuan keuangan daerah. Dari delapan AKD (Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah DPRD, Badan Anggaran DPRD, BKD, Bapemperda, Komsi A, Komisi B, Komisi C), dan asumsi pembentukan AKD Lainnya (Pansus/Pokja) belum dapat direlisasikan karen refocusing sedangkan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi DPRD Kabupate Tapanuli Utara tertampung 7 Orang dan realisasi 6 Orang dengan realisasi sebesar 75,35 % Tahun 2020.

Realisasi kinerja jumlah tim ahli Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tapanuli utara dari target 84 OB, atau tingkat capaian kinerja sebesar 75,35 %. Realisasi kinerja indikator jumlah tenaga ahli fraksi terpenuhi sebesar 72 OB dari target 84 OB, atau capaian kinerja sebesar 75,35 % dari target 84 OB(7 orang) tenaga ahli sebelumnya yang dibutuhkan hanya (6orang) fraksi dikarenakan ada salah satu fraksi bergabung menjadi satu yaitu Fraksi Garda Persatuan. Tugas tenaga ahli ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD terutama fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Membantu Fraksi dalam menjalankan tugasnya, baik itu melakukan kajian atas rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh eksekutif dan inisiatif DPRD, memberikan masukan kepada DPRD berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan, serta melaksanakan tugas administrasi yang dibutuhkan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.Realisasi capaian kinerja indikator persentase capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada tahun 2024 sebesar 85,35 %, dari target sebesar 100 %, realisasi kinerja ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan realisasi kinerja sebesar 95 % dan capaian kinerja sebesar 98 %.

Selanjutnya pada tabel berikut akan disajikan perbandingan capaian kinerja sasaran Eselon II, Eselon III s/d Eselon IV (mulai dari sasaran OPD sampai dengan sasaran kinerja kegiatan pada tahun 2022 dengan tahun 2023.

Tabel 2.8

Tabel perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun sebelumnya (Indikator Tujuan)

Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Anggaran 2025		Ket
			Target	Realisasi	
	SEKRETARIAT DPRD				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	98,42	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	96,76	
	koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Dokumen			
	koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Dokumen			
	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Laporan			
	evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	28	91,41	

	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	98,92	
	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	98,38	
	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan			
	penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen			
	Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah				
	Kodinasi dan penilaian Barang Milik daerah SKPD	Laporan			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kali			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	95,412598	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peket	1	98,78	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peket	1	95,15	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peket	1	88,98	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peket	1		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peket	1	94,80	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Dokumen.			
	penyediaan bahan/ material	Paket			

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	94,49	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	91,66	
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen.			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit			
	Pengadaan kendaraan perorangan operasional atau lapangan	Unit			
	Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Unit			
	Pengadaan Mebel	Unit	3	90,91	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	98,15	
	Pengadaan aset tetap lainnya	Unit			
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit			
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1500	100,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	56,06	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	22	99,24	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	6	93,04	
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit			
	pemeliharaan mebel	Unit			
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3	98,62	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	3	93,08	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Orang/Bulan	35	93,06	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Paket	1	82,74	
	Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Orang	35	78,90	
	Layanan Administrasi DPRD				
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen		90,80	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	6	99,70	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	300	97,35	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Paket	3	85,73	
II	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**				

	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	10		
	Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	10	93,68	
	Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Dokumen			
	fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah Akademik	Buah			
	Penyusunan tata Tertib DPRD	Buah			
	Pembahasan Kebijakan Anggaran				
	Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	2	92,59	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen			
	Pembahasan APBD	Dokumen	1	97,88	
	Pembahasan APBD	Dokumen	1	95,03	
	Pembahasan Laporan Semester	Dokumen	1		
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	99,53	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan		30,43	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan			
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan			
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan		63,15	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan			

	Pengawasan tindak lanjut hasil Pemeriksaan laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	Dokumen			
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	20	99,32	
	Pembahasan Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen			
	Peningkatan Kapasitas DPRD				
	Orientasi DPRD	Dokumen			
	Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	4	83,83	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	5	94,68	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang			
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6	95,24	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen			
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen	1	98,40	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Laporan	50	86,87	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen.			
	Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	82,20	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen.		97,98	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1		
	Fasilitasi Tugas DPRD				
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen.	32	97,01	
	Penyusunan Laporan kinerja DPRD	Laporan			

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen.	12	88,98	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen.	12	94,74	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen.			

Tahun 2025

Program/Kegiatan	Satuan	Anggaran Realisai 2023		Ket
		Target	Realisasi	
SEKRETARIAT DPRD				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100,00	97,29	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	99,62	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100,00	99,87	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	100,00	99,41	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00	99,48	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	100,00	99,47	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 OB	100,00	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	100,00	97,81	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00	98,21	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Kali	100,00	98,21	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00	98,25	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	100,00	100,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	100,00	97,82	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	100,00	99,76	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	100,00	98,10	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	100,00	99,76	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	90,00	83,28	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Dokumen	100,00	99,96	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00	95,35	
Pengadaan Mebel	3 Unit/Set	100,00	100,00	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16 Unit/ Buah	100,00	95,12	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00	97,79	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Buah	100,00	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	90,00	82,11	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22 OB	100,00	99,36	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00	99,67	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	100,00	99,68	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Tahun	100,00	99,36	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	100,00	99,77	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100,00	97,07	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	35 OB	100,00	98,13	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	140 Stell Pasanag	90,00	84,43	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	35 Orang	100,00	91,73	
Layanan Administrasi DPRD		100,00	96,34	

Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Bulan	100,00	100,00	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	35 Kali	100,00	99,56	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	3 OB	100,00	92,82	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100,00	97,25	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100,00	99,64	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Kali	100,00	99,92	
Pembahasan Rancangan Perda	13 Buah	100,00	99,49	
fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah Akademik	3 Buah	100,00	100,00	
Pembahasan Kebijakan Anggaran		100,00	98,78	
Pembahasan KUA dan PPAS	2 Kali	100,00	99,80	
Pembahasan APBD	4 Kali	100,00	99,49	
Pembahasan APBD Perubahan	1 Kali	100,00	90,75	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Kali	90,00	87,50	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		80,00	72,57	
Pengawasan Penggunaan Anggaran	100 Laporan	80,00	72,57	
Peningkatan Kapasitas DPRD		100,00	90,56	

Pendalaman Tugas DPRD	140 Orang	100,00	90,87	
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	200 Kegiatan	100,00	95,21	
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 Kegiatan	0,00	0,00	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	6 OB	90,00	85,59	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Kali	0,00	0,00	
Penyusunan Program Kerja DPRD	1 Dokumen	0,00	0,00	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		97,00	96,02	
Kunjungan Kerja dalam Daerah	1000 Dokumen	100,00	98,47	
Pelaksanaan Reses	105 Orang	100,00	95,81	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		100,00	99,75	
Pengawasan Kode Etik DPRD	4 Kali	100,00	99,75	
Fasilitasi Tugas DPRD		100,00	99,75	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	17 Kali	100,00	99,92	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Kali	100,00	99,74	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3 Orang	100,00	91,97	
		100,00	97,28	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2025, hal ini dikarenakan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hanya dibatasi diberbagai daerah di Indonesia secara khusu Pulau Sumatera Utara bahwa Kabupaten Tapanuli Utara tidak termasuk dalam wilayah dimaksud. sekaitan dengan itu capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tapanuli Utara telah mencapai kinerja sesuai dengan program kerja yang ditetapkan.

Nilai capaian kinerja > 50 % sampai dengan tahun 2025 terdapat pada beberapa indikator kegiatan sebagai berikut :

a. Jumlah hasil rapat, Koordinasi dan konsultasi yang ditindaklanjuti, dengan tingkat realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 hanya mencapai 97.27 % sedangkan realisasi kinerja sekretariat DPRD pada Tahun 2025 mencapai 97,28 %, penyebab rendahnya realisasi ini adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terutama pada tahun 2024 yaitu adanya beberapa kegiatan yang mengalami pergeseran Anggaran;
b. Adanya kode kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen Klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana pada tahun sebelumnya kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung Tugas dan Fungsinya mengalami , sehingga capain kinerja tersebut tidak tidak tercapai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD meliputi dalam bidang administrasi surat menyurat DPRD dan Sekretariat DPRD, penataan Asset, pengelolaan keuangan serta hal-hal terkait peningkatan kualitas para anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan yang didalamnya terkandung kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, dan tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Secara struktur lingkungan yang dimaksudkan adalah lingkungan internal organisasi Sekretariat DPRD itu sendiri, yang terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dan lingkungan external berupa peluang dan tantangan.

Secara sistematik faktor yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan SKPD diuraikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.9

Permasalahan Pelayanan SKPD

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	**External (Diluar Kewenangan SKPD)**	
Gambaran Pelayanan SKPD	Peningkatan dukungan pelayanan administrasi dan teknis dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Capaian Persentase	Ketersediaan dan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingginya standart pelayanan yang dibutuhkan oleh DPRD	Belum optimalnya penempatan ASN yang dibutuhkan Sekretariat DPRD
			Hubungan harmonis antara DPRD dengan Sekretariat DPRD	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD	Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang cukup tinggi
			Tersedianya tata tertib/kode etik yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD	Pemanfaatan tenaga ahli dalam mendukung pelaksanaan tugas tertentu	Tingkat kedisplinan Anggota dalam menghadiri sidang rendah dan kurangnya konsistensi dalam menjalankan kode etik

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara selain untuk mencapai tujuan melalui kegiatan pelayanan juga untuk menentukan permasalahan atau hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara.

Mempertimbangkan kondisi dan situasi saat ini maupun kondisi pelayanan SKPD Sekretariat DPRD dimasa lampau serta kecenderungan dimasa depan, isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara terutama dalam memberikan dukungan dan pelayanan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah :

1) Penetapan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Bupati belum menggunakan tim penilai/tim appraisal;
2) Kebutuhan akan kompetensi berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD;
3) Kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang cukup tinggi;
4) Dinamika peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Berdasarkan kondisi real pelayanan OPD Sekretariat DPRD di masa lampau serta kecenderungan di masa depan, isu-isu strategis Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara mengarahkannya kepada:

1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi pelaksanaan tugas fungsi DPRD dengan Lembaga Pemerintah, LSM dan Masyarakat;

2.4 Review Terhadap RKPD

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 khususnya yang menyangkut program kerja terhadap pelaksanaan tugas fungsi DPRD, Sekretariat DPRD meminta masukan sekaligus analisis kebutuhan dari Pimpinan DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi, Pimpinan dan Anggota Fraksi DPRD sehingga program yang disusun benar-benar berdasarkan analisis kebutuhan terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD.

Penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dirumuskan program pada Tahun 2025 sebagai berikut :

a. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

b. **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**

Hasil analisis Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 selanjutnya diuraikan pada Tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja/ Outcome dan output	Satuan	Pagu Indikatif Tahun 2025	
									Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatkan nilai AKIP Sekretariat DPRD	Persentase Capaian Pelaksanaan Tugas DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN LAYAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERTANGANI		25.468.723.352,00	95	24.315.535.626,00
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			%	100	145.510.000,00
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.060.000,00	0	4.920.000,00
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisaai Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.336.000,00	1	4.823.600,00
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.472.000,00	1	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	135.642.000,00	24	4.976.000,00
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.468.723.352,00	12	128.050.000,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			%	95	2.824.260.590,00
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	27	2.721.609.390,00

					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	99.181.200,00
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.470.000,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			%	95	66.461.000,00
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	66.461.000,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah			%	90	472.676.750,00
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.583.900,00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	59.821.050,00
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	36.016.000,00
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	33.594.800,00
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	30.420.000,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	302.241.000,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			%	95	1.353.501.400,00
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1.316.911.000,00

					Pengadaan Mebel	Tersedianya Peralatan Pengadaan Mebel Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	3.960.000,00
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	32.630.400,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%	95	411.147.600,00
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pendistribusian Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.100.000,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	62.790.000,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	343.257.600,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%	95	387.661.600,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	291.114.500,00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	87.995.700,00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.551.400,00
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			%	95	16.340.243.912,00
					Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Gaji dan hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	35	15.223.256.912,00
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Meningkatnya Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	1	587.727.000,00
					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terpeliharanya kesehatan DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	35	529.260.000,00

					Layanan Administrasi DPRD			%	90	3.467.260.500,00
					Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya Administrasi fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	6	7.377.500,00
					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya Dana Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	1.297.500.000,00
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	3	2.162.383.000,00
			Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Pelayanan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat kepada Dewan.		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			%	85	14.649.835.250,00
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			%	80	235.879.000,00
					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya Bahan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	11	235.879.000,00
					Pembahasan Kebijakan Anggaran			%	90	363.029.800,00
					Pembahasan KUA dan PPAS	Tersedianya Bahan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	
					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	
					Pembahasan APBD	Tersedainya Bahan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	100	363.029.800,00
					Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	
					Pembahasan Laporan Semester	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	2	
					Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			%	95	68.640.000,00

					Pengawasan Penggunaan Anggaran	Tersedianya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	12	68.640.000,00
					Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	13 Dokumen	0	
					Peningkatan Kapasitas DPRD			%	95	1.116.978.200,00
					Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	
					Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	4	789.215.000,00
					Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	4	58.929.600,00
					Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	3	
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6	268.833.600,00
					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	0	
					Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunanya Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	
					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			%	90	1.566.163.250,00
					Kunjungan Kerja dalam Daerah	Tersedianya Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	50	100.500.000,00
					Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	
					Pelaksanaan Reses	Terserapnya Aspirasi Masyarakat melalui Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	1.465.663.250,00
					Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			%	80	60.200.000,00

					Penyusunan Kode Etik DPRD	-	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	
					Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	60.200.000,00
					Fasilitasi Tugas DPRD			%	90	11.238.945.000,00
					Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tersedianya Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	35	10.567.976.000,00
					Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunya Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	12	367.129.000,00
					Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tersedianya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	1	303.840.000,00
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	1	
									TOTAL	**40.118.558.602,00**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat urusan OPD Sekretariat DPRD adalah urusan pemerintahan fungsi penunjang maka program dan kegiatannya adalah menyangkut urusan-urusan wajib pemerintahan, artinya usulan-usulan program dan kegiatan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD tidak dapat di tuangkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Rencana Kerja) Sekretariat DPRD, namun usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat pada saat kegiatan Reses DPRD selanjutnya di tetapkan oleh DPRD menjadi Pokir dan menjadi salah satu sumber usulan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara tidak menerima secara langsung usulan dari masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD memfasilitasi usulan kegiatan yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD baik secara langsung maupun usulan masyarakat pada saat kunjungan ataupun reses DPRD dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi masyarakat, yang selanjutnya dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah *"Optimalisasi Kinerja Pemerintahan sebagai Penyokong Perekonomian daerah yang Berdikari."*

dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan ;
2. Percepatan penurunan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
3. Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ;
4. Percepatan penataan kota yang berkualitas dan infrastruktur yang berkelanjutan ;dan
5. Percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan ketentraman/ketertiban umum.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara, dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global, maka arah pembangunan perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara diprioritaskan kepada sektor yang dominan memberikan konstribusi terhadap PDRB, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pariwisata, juga pada sektor yang memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang serta tahan terhadap goncangan ekonomi yaitu sektor KUMKM dan pariwisata, sedangkan sektor lainnya menjadi pendukung.

Berdasarkan telaah terhadap kebijakan nasional sebagaimana diuraikan diatas, maka ASN dan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan mampu merumuskan program kerja (Perubahan Rencana Kerja) berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan mempedomani Nawa Cita Presiden.

DPRD Kabupaten Tapanuli Utara sebagai lembaga perwakilan rakyat diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan dan fungsinya dengan baik dan efisien, terutama dalam menuangkan dan memperjuangkan Pokir (*Pokok Pikiran)* Dewan dalam perumusan dan pembahasan APBD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara didasarkan pada visi dan misi Bupati Tapanuli Utara sebagaimana dituangkan dalam RPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029. Sekretariat DPRD

berada pada Misi ketujuh (7) Bupati Tapanuli Utara Periode 2025-2029 yaitu ***"Memperkuat Reformasi Birokrasi , Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan"*** dan berada pada Tujuan ***"Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemerintahan"*** dengan sasaran "***Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD"***.

Untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana diuraikan di atas Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara merumuskan tujuan Renstra 2025-2029***" Terwujudnya Pelayanan Yang Profesional dan Optimal Kepada DPRD Kabupaten Tapanuli Utara"*** dan selanjutnya ditetapkan sasaran ***"Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD".***

Sasaran-sasaran sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya diturunkan kepada setiap Bagian yang ada pada OPD Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. Bagian Umum dan Keuangan
   - Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan kualitas Perencanaan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
   - Meningkatnya kualitas Layanan Kegiatan Persidangan, hukum, AKD, humas dan keprotokolan.
3. Bagian Fasiliasi Penganggaran dan Pengawasan
   - Meningkatnya kualitas Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama serta layanan aspirasi

Tabel 3.1

HUBUNGAN DAN TUJUAN SASARAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Pelayanan Yang Profesional dan Optimal Kepada DPRD	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Pelayanan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat kepada Dewan.	Persentase Agenda Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD
		Persentase Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Untuk mencapai target tujuan, sasaran dan indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD yang mencerminkan capaian kinerja Sekretariat DPRD, juga menggambarkan hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta Indikator Kinerja Utama dapat disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

IKU SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sasaran	Outcome dan Output
1	Terwujudnya Pelayanan yang Profesional dan Optimal kepada DPRD	Indeks Kepuasan DPRD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Keuangan DPRD dan Setwan**	**Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan**
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnyakualitas penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja setwan**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan tepat waktu**

						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyusunan dokumen perencanaan Setwan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan terpenuhi tepat waktu
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas koordinasi dan peyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan kinerja terpenuhi tepat waktu
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan**	**Persentase pemenuhan laporan keuangan tepat waktu**
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN terpenuhi
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honor Bendahara, dll)	Terpenuhinya Penatausahaan Keuangan	Jumkah Pengelola Keuangan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya kualitas koordinasi dan peyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun laporan kinerja terpenuhi tepat waktu
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian**	**Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian**

						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPPD	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek dengan nilai baik
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas penyelengaraan administrasi dan rumah tangga**	**Persentase peningkatan kualitas administrasi dan rumah tangga**
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhi
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya pememenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga terpenuhi
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan terpenuhi
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Makanan Tamu	Jumlah Makanan Tamu terpenuhi
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah hasil rapat koordinasi dan konsultasi yang ditindaklanjuti

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah**
					Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Atau Perorangan Dinas	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan dan/atau Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan
					Pengadaan Mebel	Meningkatnya ketersediaan pememenuhan mebel kantor	Jumlah ketersediaan mebel terpenuhi
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya pememenuhan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya terpenuhi
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos terpenuhi
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik kantor	Jumlah rekening dibayarkan

						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya Kebersihan dan Keamanan kantor	Jumlah Personil Tenaga Kebersihan/Jaga Malan dan Tenaga Supir
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah**	**Persentase barang milik daerah terpelihara dengan baik**
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendraan dinas jabatan	Jumlah kendraan dinas jabatan terpelihara
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya /Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Kantor Lainnya	Persentase luas gedung terpelihara dengan baik
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor	Persentase luas gedung terpelihara dengan baik
						Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Meningkatnya kualitas layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**Persentase Realisasi Hak keuangan dan Kesejahteraan DPRD**
						Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terpenuhinya Hak Keuangan DPRD	Persentase Realisasi Hak keuangan DPRD

						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terpenuhinya Hak Keuangan DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD Terpenuhinya setiap tahunya
						Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Terlaksananya Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up
						Layanan Administrasi DPRD	**Meningkatnya kualitas layanan administrasi DPRD**	**Persentase Kegiatan DPRD terfasilitasi dengan baik**
						Fasilitasi Fraksi DPRD	Meningkatnya kualitas fasilitas fraksi - fraksi DPRD	Jumlah Alat Tulis fraksi DPRD terpenuhi
						Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Meningkatnya kualitas fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD terpenuhi
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD
			Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan	Persentase Capaian Pelaksanaan Tugas DPRD	B	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Meningkatkan kualitas layanan kegiatan persidangan, hukum, AKD, dan layanan Aspirasi**	**Persentase capaian Program Kerja DPRD**

			Fungsi DPRD				
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi pembentukan perda**	**Persentase capaian PROPEMPERDA**
					Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersusunya PROPEMPERDA	Jumlah rapat - rapat penyusunan PROPEMPERDA
					Pembahasan Rancangan Perda	Meningkatnya capaian PROPEMPERDA	Jumlah rapat - rapat pembahasan Ranperda
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi anggaran**	**Persentase pemenuhan dokumen anggaran tepat waktu**
					Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS tepat waktu	Jumlah hasil rapat - rapat pembahasan KUA dan PPAS yang ditindaklanjuti
					Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD tepat waktu	Jumlah hasil rapat pembahasan APBD yang ditindaklanjuti
					Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD tepat waktu	Jumlah hasil rapat pembahasan APBD yang ditindaklanjuti

						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah hasil rapat pembahasan pertangunggjawaban APBD yang ditindaklanjuti
						Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan bidang penyelenggaraan pemerintah**	**Persentase capaian pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**
						Pengawasan Penggunaan Anggaran	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan bidang Anggaran	Jumlah hasil rapat urusan pemerintahan bidang anggaran yang diawasi dan ditindaklanjuti
						Peningkatan Kapasitas DPRD	**Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD**	**Persentase peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD**
						Bimbingan Teknis DPRD	Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek dengan nilai baik
						Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Meningkatnya publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang terdokumentasi dan terpublikasi dengan baik

						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi AKD	Jumlah Tim Ahli AKD/Kelompok Pakar AKD terpenuhi
						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi-Fraksi DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Terpenuhi
						Penyusunan Program Kerja DPRD	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen program kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja terpenuhi
						Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Meningkatnya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat**	**Persentase peningkatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat**
						Kunjungan Kerja dalam Daerah	Meningkatnya hasil kunjungan kerja dalam daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil kunjungan kerja dalam daerah yang ditindaklanjuti
						Pelaksanaan Reses	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat pada daerah konstituen	Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang ditindaklanjuti
						Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Terlaksananya Pengawasan Kode Etik yang ditindaklanjuti**	**Jumlah Pengawasan Kode Etik yang ditindaklanjuti**

						Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengawasan Kode Etik yang ditindaklanjuti
						Fasilitasi Tugas DPRD	**Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas DPRD**	**Persentase peningkatan kualitas fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD**
						Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang ditindaklanjuti
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Meningkatnya Pelaksanaan Rapat Badan Musyawarah	Jumlah Hasil Rapat Badan Musyawarah yang ditindaklanjuti
						Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pimpinan	Persentase Tuga Pimpinan yang ditindaklanjuti

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan OPD Sekretariat DPRD dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara serta pertimbangan atas pelaksanaan/review atas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Rencana Kerja) Tahun 2024 dan Tahun 2053 serta dengan mempedomani Permendagri 90 Tahun 2019 maka ditetapkan program prioritas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana pada Tabel T-C.33 sebagaimana akan diuraikan pada Bab IV.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menjawab isu-isu strategis Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri dari belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, kurangnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi pelaksanaan tugas fungsi DPRD dengan Lembaga Pemerintah, LSM dan Masyarakat, rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM dalam mendukung kinerja dan fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD, belum terpenuhinya saranadan prasarana yang memadai, Peraturan dan Perundang-Undangan yang fluktuatif, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Setelah melalui pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara serta analisis kebutuhan setiap bagian yang ada di OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara sekaligus untuk menjawab/mengatasi isu-isu dan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD maka dapat dirumuskan dan diuraikan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sebagai berikut :

4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah;

4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;

4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD;

4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;

4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran;

4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;

4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD;

4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;

4.02.02.2.06 Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD;

4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD;

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2025
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja/ Outcome dan output	Lokasi	Satuan	Pagu Indikatif Tahun 2025		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN LAYAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERTANGANI		SETWAN	%	95	25.926.218.320	95	30.369.056.400
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			SETWAN	%	100	142.769.600	100	216.252.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SETWAN	Dokumen	0	4.920.000	0	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisaai Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	SETWAN	Dokumen	1	4.823.600	1	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	SETWAN	Dokumen	1		1	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SETWAN	Laporan	12	4.976.000	12	6.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SETWAN	Laporan	12	128.050.000	12	200.252.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			SETWAN	%	95	2.943.149.633	95	3.110.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SETWAN	Orang/bulan	26	2.838.984.433,00	2	3.000.000.000

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SETWAN	Dokumen	1	99.181.200	1	100.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SETWAN	Laporan	1	4.984.000	1	10.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SETWAN	Laporan	0	0	0	0,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SETWAN	Dokumen	0		0	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			SETWAN	%	95	136.831.000	95	150.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SETWAN	Orang	13	136.831.000	13	150.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			SETWAN	%	90	861.827.075	90	1.027.803.900
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SETWAN	Paket	1	12.291.000	1	12.331.600
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SETWAN	Paket	1	85.341.875	1	85.687.100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	SETWAN	Paket	1	50.018.200	1	50.027.200
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	SETWAN	Paket	1	38.126.000	1	79.758.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	SETWAN	Laporan	1	76.050.000	1	100.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SETWAN	Laporan	100	600.000.000	100	700.000.000

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	SETWAN	Dokumen	1		1	0,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			SETWAN	%	95	1.447.244.400	95	1.410.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	SETWAN	Unit	1	1.332.206.000	1	1.300.000.000
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Peralatan Pengadaan Mebel Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	SETWAN	Unit	3	29.040.000	3	110.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	SETWAN	Unit	4	85.998.400	4	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			SETWAN	%	95	554.996.000	95	670.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pendistribusian Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SETWAN	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SETWAN	Laporan	1	52.900.000	1	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SETWAN	Laporan	12	492.096.000	12	600.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			SETWAN	%	95	434.242.200	95	370.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	SETWAN	Unit	6	342.274.000	6	300.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SETWAN	Unit	2	80.127.800	2	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SETWAN	Unit	2	11.840.400	2	20.000.000
	Layanan Keuangan dan			SETWAN	%	95		95	15.400.000.000

	Kesejahteraan DPRD						16.429.295.912		
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Gaji dan hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	SETWAN	Orang/Bulan	35	15.216.016.912	35	14.000.000.000
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Meningkatnya Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	SETWAN	Paket	1	611.314.000	1	800.000.000
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terpeliharanya kesehatan DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	SETWAN	Orang	35	601.965.000	35	600.000.000
	Layanan Administrasi DPRD			SETWAN	%	90	2.975.862.500	90	8.015.000.000
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya Administrasi fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	SETWAN	Laporan	6	11.324.300	6	15.000.000
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya Dana Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	SETWAN	Laporan	12	697.442.000	12	6.000.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	SETWAN	Paket	3	2.267.096.200	3	2.000.000.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			SETWAN	%	85	17.689.410.850	85	18.317.793.600
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			SETWAN	%	80	457.624.000	80	600.000.000
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersusunya Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SETWAN	Dokumen	2	0	2	150.000.000
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya Bahan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	SETWAN	Dokumen	11	457.624.000	11	500.000.000
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	SETWAN	Dokumen	1		1	0,00
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Tersedianya fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	SETWAN	Dokumen	3		3	0

	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase Agenda Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Persentase Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Persentase Agenda Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Persentase Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	SETWAN	Dokumen	1		1	0,00
	Pembahasan Kebijakan Anggaran			SETWAN	%	90	700.000.000	90	740.000.000
	Pembahasan KUA dan PPAS	Tersedianya Bahan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	SETWAN	Dokumen	1		1	40.000.000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	SETWAN	Dokumen	1		1	0,00
	Pembahasan APBD	Tersedainya Bahan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	SETWAN	Dokumen	100	700.000.000	100	700.000.000
	Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	SETWAN	Dokumen	1		1	0,00
	Pembahasan Laporan Semester	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	SETWAN	Dokumen	2		2	0,00
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	SETWAN	Dokumen	1		1	0,00
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			SETWAN	%	95	117.640.000	95	200.000.000
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Tersedianya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	SETWAN	12 Dokumen	12	117.640.000	12	200.000.000
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	SETWAN	13 Dokumen	0		0	0,00
	Peningkatan Kapasitas DPRD			SETWAN	%	95	1.324.128.600	95	2.507.793.600
	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	SETWAN	Dokumen	1	937.160.000	1	500.000.000

	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	SETWAN	Dokumen	4	999.660.000	4	1.500.000.000
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	SETWAN	Dokumen	4	118.135.000	4	200.000.000
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	SETWAN	Orang	3		3	80.000.000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	SETWAN	Orang	6	268.833.600	6	227.793.600
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	SETWAN	Dokumen	0		0	0,00
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunanya Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja DPRD	SETWAN	Dokumen	1		1	0,00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			SETWAN	%	90	3.960.553.250	90	3.150.000.000
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Tersedianya Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	SETWAN	Laporan	50	117.000.000	50	150.000.000
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	SETWAN	Dokumen	1		1	0,00
	Pelaksanaan Reses	Terserapnya Aspirasi Masyarakat melalui Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	SETWAN	Dokumen	3	3.843.553.250	3	3.000.000.000
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			SETWAN	%	80	120.201.000	80	150.000.000
	Penyusunan Kode Etik DPRD	-	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	SETWAN	Dokumen	1		1	0,00
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	SETWAN	Laporan	1	120.201.000	1	150.000.000
	Fasilitasi Tugas DPRD			SETWAN	%	90	11.009.264.000	90	10.970.000.000
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tersedianya Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	SETWAN	Dokumen	35	9.948.924.000	35	10.000.000.000
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunya Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	SETWAN	Laporan	1		1	20.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SETWAN	Dokumen	12	700.000.000	12	700.000.000

	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tersedianya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	SETWAN	Dokumen	1	360.340.000	1	250.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	SETWAN	Dokumen	1		1	0,00
						TOTAL	**40.118.558.602**		**48.686.850.000**

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang dialokasikan dalam RAPBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025.

Output Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara adalah program tahunan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program serta sasaran kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara selain menjadi acuan penyusunan program dan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan DPRD dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja, hasil kinerja ke arah yang lebih baik dan efisien.

Tarutung, September 2025
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

TOHOM P. SILABAN, ST.M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19760309 200212 1 004

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Sisingamangaraja Nomor 100 Tarutung, Sumatera Utara 22411,
Telepon (0633) 21580, Faxmile (0633) 21580,
Laman inspektorat.taputkab.go.id, Pos-el inspektur@taputkab.go.id.

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Sisingamangaraja Nomor 100 Tarutung, Sumatera Utara 22411,
Telp. (0633) 21580, Faxmile (0633) 21580,
Laman inspektorat.taputkab.go.id, Pos-el inspektur@taputkab.go.id.

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 110 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025–2026;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 500 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
16. Surat Keputusan Inspektur Nomor 101 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N :

MEMUTUSKAN : PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu merupakan acuan/ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang digunakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk penetapan rencana kerja tahunan, penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 17 November 2025

Inspektur Daerah,

Erikson Siagian

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan kemudahan yang telah diberikan bagi kita semua, sehingga dengan Rahmat dan Hidayah-Nya Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Perubahan Inspektorat ini mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 dan dijabarkan dalam satu periode, yaitu tahun 2025 secara sistematis.

Dalam melaksanakan kegiatan selama periode 2025, Inspektorat merencanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (sebelas) Kegiatan dan 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan. Dimana dalam program-program tersebut menggambarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026.

Demikian Rencana Kerja Perubahan ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara khususnya dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ke depan pada umumnya sehingga dapat mewujudkan good governance dan clean government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Inspektur Daerah,

Drs. Erikson Siagian, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19690422 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Maksud dan Tujuan 1

1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan 2

1.3. Sistematika Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah 7

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ..... **9**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Sampai Dengan Tahun 2024 9

2.2. Faktor-faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/Kegiatan 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaton Tapanuli Utara..... 18

2.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran 19

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025 ..... **20**

3.1. Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara..... 20

BAB V PENUTUP **25**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Pelaksanaan Tahun 2024 11

Tabel 3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan dalam penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya dalam upaya pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah memiliki ruang lingkup terdiri dari atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan prinsip memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, tetap mengacu pada rencana tata ruang yang dilaksanakan secara bersama semua pemangku kepentingan dalam bingkai satu kesatuan.

Arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif dan professional dan peningkatan jumlah aparatur yang memiliki Jabatan Fungsional APIP, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan Aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN-RB yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan system pengawasan dan audit, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) ddalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya

system pengawasan dan audit, serta system akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel dilingkungan aparatur Negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat, menata dan menyempurnakan kebijakan system struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang indenpenden, efektif, efisien, transparan dan terukur, menindaklanjuti temuan pengawasan, meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparat pengawasan instansi pemerintahan, sistem pengendalian intern) mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja dan profesionalisme tenaga pemeriksa dan meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik, dan standar audit melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Para aparatur pengawasan lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang lebih disebutkan diatas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perrencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabpaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Perubahan Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dibidang pengawasan dalam

kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Untuk itu perumusan program dan kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 akan menyelaraskan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan ditingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
15. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perubahan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 500 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
19. Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 101 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Parameter pengukuran kinerja sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam periode 1 (satu) Tahun
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan atas program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN BERKENAAN

2.1. Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Tahun 2024.

2.2. Faktor-faktor Penyebab Pencapaian Target Anggaran dan Kinerja Program/Kegiatan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program Dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai unsur pengawasan urusan pemerintahan dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pada Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah menganggarkan dana sebesar Rp10.755.360.316,00 yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) urusan, 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Pada saat berjalannya waktu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan Pergeseran (Recofusing) anggaran untuk pemenuhan anggaran belanja pegawai PPPK yang baru diangkat dan pembayaran utang PEN pada tahun 2024, dimana anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan sebesar 12,48% menjadi Rp9.562.169.225,00.

Untuk hasil Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Tahun 2024, meliputi 3 (program) program yang terdiri dari:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota target anggaran semula sebesar Rp8.775.360.316,00 menjadi Rp7.811.565.225,00 per tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp7.489.780.717,00 atau sebesar 95,88%.
b. Program Penyelenggaraan Pengawasan target anggaran semula sebesar Rp1.430.000.000,00 menjadi Rp1.494.630.000,00 per tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp1.457.979.300,00 atau sebesar 97,55%.
c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi anggaran semula sebesar Rp550.000.000,00 menjadi Rp255.974.000,00 per tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp237.984.900,00 atau 92,97%. Realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang ditampilkan adalah data realisasi per tanggal 31 Desember 2024.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perubahan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan Recofusing Anggaran. Pagu Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang tertera dalam Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang telah direcofusing.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disajikan pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Pelaksanaan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15=12/7 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi yang terlayani	100,00%	32.812.582.472	78,54%	24.848.543.043	85,71%	7.811.565.225	84,29%	7.489.780.717	99,59%	32.338.323.760	99,77%	97,74%	84,29%	68,04%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlayani	100,00%	18.714.200	78,38%	18.714.200	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	18.714.200	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27 Dokume n	7.003.600	21 Dokum en	7.003.600	6 Dokume n	-	6	-	27	7.003.600	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	9.959.700	4 Lapora n	9.959.700	1 Laporan	-	1	-	5	9.959.700	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00%
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.750.900	4 Lapora n	1.750.900	1 Laporan	-	1	-	5	1.750.900	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Keuangan yang terlayani	100,00%	21.155.764.251	72,09%	14.925.312.965	100,00%	6.191.894.825	96,67%	5.955.364.343	99,07%	20.880.677.308	99,65%	98,70%	96,67%	96,18%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15=12/7 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.1	Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang /Bulan	20.938.934.051	135 Orang /Bulan	14.762.036.365	55 Orang /Bulan	6.138.341.225	53	5.901.810.743	188	20.663.847.108	98,95%	98,69%	96,36%	96,15%
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokume n	204.864.000	16 Dokum en	151.310.400	4 Dokume n	53.553.600	4	53.553.600	20	204.864.000	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	11.966.200	4 Lapora n	11.966.200	1 Laporan	-	1	-	5	11.966.200	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00%
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Administrasi Kepegawaian yang terlayani**	**100,00%**	**1.455.325.200**	**68,75%**	**981.972.074**	**100,00%**	**448.668.000**	**100,00%**	**400.098.332**	**100,00%**	**1.382.070.406**	**100,00 %**	**94,97%**	**100,00 %**	**89,17%**
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugs dan fungsi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	64 Orang	1.455.325.200	44 Orang	981.972.074	20 Orang	448.668.000	20	400.098.332	64	1.382.070.406	100,00 %	94,97%	100,00 %	89,17%
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani**	**100,00%**	**3.585.632.600**	**79,40%**	**2.958.401.358**	**100,00%**	**600.274.800**	**100,00%**	**587.513.166**	**100,00%**	**3.545.914.524**	**100,00 %**	**98,89%**	**100,00 %**	**97,87%**
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20 Paket	31.087.200	16 Paket	25.118.300	4 Paket	5.968.900	4	5.968.900	20	31.087.200	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Paket	442.583.600	14 Paket	353.300.500	1 Paket	75.695.300	1	72.580.700	15	425.881.200	100,00 %	96,23%	100,00 %	95,89%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15=12/7 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kantor															
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	20 Paket	49.987.900	16 Paket	34.358.900	4 Paket	15.069.000	4	15.069.000	20	49.427.900	100,00 %	98,88%	100,00 %	100,00%
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	20 Paket	255.273.400	16 Paket	196.581.800	4 Paket	58.691.600	4	50.234.400	20	246.816.200	100,00 %	96,69%	100,00 %	85,59%
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41 Dokume n	76.231.600	27 Dokum en	57.506.600	14 Dokume n	18.360.000	14	17.290.000	41	74.796.600	100,00 %	98,12%	100,00 %	94,17%
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1180 Laporan	2.730.468.900	940 Lapora n	2.291.535.258	240 Laporan	426.490.000	240	426.370.166	1180	2.717.905.424	100,00 %	99,54%	100,00 %	99,97%
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani**	**100,00%**	**4.130.406.000**	**100,00%**	**4.130.406.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**100,00%**	**4.130.406.000**	**100,00 %**	**100,00 %**	**0,00%**	**0,00%**
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	163 Unit	4.130.406.000	163 Unit	4.130.406.000	0 Unit	-	0	-	163	4.130.406.000	100,00 %	100,00 %	0,00%	0,00%
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani**	**100,00%**	**472.892.302**	**80,00%**	**327.672.132**	**100,00%**	**122.696.800**	**100,00%**	**120.024.517**	**100,00%**	**447.696.649**	**100,00 %**	**94,67%**	**100,00 %**	**97,82%**
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	28.415.000	16 Lapora n	23.415.000	4 Laporan	5.000.000	4	5.000.000	20	28.415.000	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15=12/7 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20 Laporan	242.483.702	16 Laporan	156.813.313	4 Laporan	63.200.000	4	60.527.717	20	217.341.030	100,00%	89,63%	100,00%	95,77%
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20 Laporan	201.993.600	16 Laporan	147.443.819	4 Laporan	54.496.800	4	54.496.800	20	201.940.619	100,00%	99,97%	100,00%	100,00%
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani**	**100,00%**	**1.993.847.919**	**71,15%**	**1.506.064.314**	**100,00%**	**448.030.800**	**93,33%**	**426.780.359**	**98,08%**	**1.932.844.673**	**98,77%**	**96,94%**	**93,33%**	**95,26%**
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Uniit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	436.188.963	3 Unit	323.506.498	1 Unit	101.366.800	1	98.930.775	4	422.437.273	100,00%	96,85%	100,00%	97,60%
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Uniit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	86 Unit	982.107.756	58 Unit	667.183.616	28 Unit	294.822.000	28	290.960.834	86	958.144.450	100,00%	97,56%	100,00%	98,69%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15=12/7 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	5 Unit	531.028.200	4 Unit	483.749.200	1 Unit	44.500.000	1	31.188.750	5	514.937.950	100,00 %	96,97%	100,00 %	70,09%
7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	61 Unit	44.523.000	46 Unit	31.625.000	15 Unit	7.342.000	12	5.700.000	58	37.325.000	95,08%	83,83%	80,00%	77,64%
II	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan yang terlaksana**	**100,00%**	**8.640.037.700**	**85,05%**	**6.965.113.700**	**100,00%**	**1.494.630.000**	**99,63%**	**1.457.979.300**	**99,88%**	**8.423.093.000**	**95,24%**	**98,02%**	**99,63%**	**98,30%**
1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang terlaksana**	**100,00%**	**2.927.734.500**	**83,27%**	**2.503.080.500**	**100,00%**	**414.630.000**	**99,26%**	**414.624.300**	**99,76%**	**2.917.704.800**	**90,48%**	**99,66%**	**99,26%**	**100,00%**
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	223 Laporan	648.192.700	179 Laporan	587.532.700	44 Laporan	59.960.000	44	59.960.000	223	647.492.700	100,00 %	99,89%	100,00 %	100,00%
2.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	223 Laporan	279.432.700	179 Laporan	215.887.700	44 Laporan	63.545.000	44	63.545.000	223	279.432.700	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%
1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	55.057.500	4 Laporan	55.057.500	1 Laporan	-	1	-	5	55.057.500	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00%
1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan	58.413.700	4 Laporan	58.413.700	1 Laporan	-	1	-	5	58.413.700	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00%
1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	75 Laporan	1.204.548.900	60 Laporan	1.063.423.900	15 Laporan	141.125.000	15	141.125.000	75	1.204.548.900	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15=12/7 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengawasan Internal yang dibentuk	3 Kerja sama	26.220.000	1 Kerja sama	26.220.000	1 Kerja sama	-	0	-	1	26.220.000	33,33%	100,00 %	0,00%	0,00%
1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	285 Dokume n	655.869.000	255 Dokum en	496.545.000	30 Dokume n	150.000.000	30	149.994.300	285	646.539.300	100,00 %	98,58%	100,00 %	100,00%
2	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang terlaksana**	**100,00%**	**5.712.303.200**	**86,92%**	**4.462.033.200**	**100,00%**	**1.080.000.000**	**100,00%**	**1.043.355.000**	**100,00%**	**5.505.388.200**	**100,00 %**	**96,38%**	**100,00 %**	**96,61%**
2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	10 Laporan	53.952.500	8 Lapora n	53.952.500	2 Laporan	-	2	-	10	53.952.500	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00%
2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	770 Laporan	5.658.350.700	670 Lapora n	4.408.080.700	100 Laporan	1.080.000.000	100	1.043.355.000	770	5.451.435.700	100,00 %	96,34%	100,00 %	96,61%
III	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Cakupan Pemenuhan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana**	**100,00%**	**1.147.662.300**	**86,90%**	**891.145.000**	**100,00%**	**255.974.000**	**100,00%**	**237.984.900**	**100,00%**	**1.129.129.900**	**100,00 %**	**99,17%**	**100,00 %**	**46,49%**
1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Kebutuhan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang terlaksana**	**100,00% 8**	**32.113.000**	**75,00%**	**32.113.000**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**-**	**100,00%**	**32.113.000**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**0,00%**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15=12/7 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	4 Rekomendasi	15.761.000	3 Rekomendasi	15.761.000	1 Rekomendasi	-	1	-	4	15.761.000	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan disusun	4 Rekomendasi	16.352.000	3 Rekomendasi	16.352.000	1 Rekomendasi	-	1	-	4	16.352.000	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
2	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Kebutuhan Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana**	**100,00% 137**	**1.115.549.300**	**87,59%**	**859.032.000**	**100,00%**	**255.974.000**	**100,00%**	**237.984.900**	**100,00%**	**1.097.016.900**	**100,00%**	**98,34%**	**100,00%**	**92,97%**
2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	44 Perangkat Daerah	27.740.900	38 Perangkat Daerah	21.766.900	6 Perangkat Daerah	5.974.000	6	5.961.800	44	27.728.700	100,00%	99,96%	100,00%	99,80%
2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 Perangkat Daerah	174.221.000	40 Perangkat Daerah	74.110.000	4 Perangkat Daerah	100.000.000	4	99.970.400	44	174.080.400	100,00%	99,92%	100,00%	99,97%
2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	110.415.000	3 Kegiatan	60.325.700	2 Kegiatan	50.000.000	2	45.541.300	5	105.867.000	100,00%	95,88%	100,00%	91,08%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15=12/7 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 Perangkat Daerah	803.172.400	39 Perangkat Daerah	702.829.400	5 Perangkat Daerah	100.000.000	5	86.511.400	44	789.340.800	100,00%	98,28%	100,00%	86,51%
			100,00% 3735	42.600.282.472	82,06% 3065	32.704.801.743	95,24% 669	9.562.169.225	94,64%	9.185.744.917	99,82%	41.890.546.660	98,34%	98,31%	94,64%	70,94%
Rata-rata capaian kinerja (%)									98,34%							
Predikat kinerja									BB							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan yang telah disusun sesuai rencana

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya recofusing anggaran yang tidak pada waktunya, sehingga pelaksanaan kegiatan terkendala.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya (diisi Bappelitbangda) :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya (diisi oleh Bappelitbangda) :

2.2. Faktor-faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/Kegiatan.

Dalam penyelenggaraan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target Anggaran dan Kinerja Program/Kegiatan pada Tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 94,64% dan realisasi anggaran sebesar 96,06%, antara lain:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Triwulan II dengan realisasi kinerja sebesar 84,29% dan realisasi anggaran sebesar 95,88% yang memiliki 8 Kegiatan antara lain:
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
   4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
   7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 99,63% dan realisasi anggaran sebesar 97,55% yang memiliki 2 Kegiatan antara lain:
   1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal; dan
   2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 100,00% dan realisasi anggaran sebesar 92,97% yang memiliki 2 Kegiatan antara lain:
   1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan; dan
   2. Pendampingan dan Asistensi.

Faktor-faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/Kegiatan antara lain:

1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada Auditan yang belum menindaklanjuti hasil temuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti;
2. Pemantauan berkelanjutan terhadap SPIP;
3. Peningkatan anggaran dalam rangka pengawasan minimal 0,75% dari APBD;
4. Penyempurnaan Pedoman sistem kebijakan dan prosedur Pengawasan;
5. Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan; dan
6. Peningkatan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara dengan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) bagi para pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaton Tapanuli Utara.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas dan fungsi yang berat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga mendapatkan tantangan dan peluang, seperti:

a. Tantangan:
   1) Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan keuangan maupun kinerja perangkat daerah;
   2) Implementasi pengendalian intern pada perangkat daerah masih belum berjalan dengan baik;

3) Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan;
4) Semakin besarnya alokasi APBD di Desa semakin meningkatkan kuantitas pengelolaan anggaran desa yang perlu dilakukan pengawasan;
5) Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

b. Peluang:
1) Adanya komitmen untuk mengefektifkan sistem pengawasan dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas KKN;
2) Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklat Pengawasan BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan;
3) Adanya semangat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun berikutnya.

2.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran.

Arah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli U untuk mengatasi faktor-faktor penyebab hasil capaian target kinerja program/kegiatan adalah:

1. Meningkatkan fasilitas sarana prasarana di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Mengoptimalkan anggaran khususnya dalam melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; dan
4. Memenuhi kebutuhan SDM (Auditor dan PPUPD) di Lingkungan Inspektorat Daerah.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan.

Dalam usaha : 1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja; dengan sasaran : 1) Pelaksanaan Pengendalian Internal Sesuai Standar. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 akan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang meliputi :

a. Kegiatan pengawasan, yaitu :
   1) Kinerja rutin pengawasan;
   2) Pengawasan prioritas nasional;
   3) Pengawalan reformasi birokrasi; dan
   4) Penegakan Integritas.
b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: Pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serla bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: Laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
d. Kegiatan reviu.

Pelaksanaan kegiatan Pembianan dan pengawasan sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah tertuang dalam :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Rumusan perubahan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 disajikan pada table 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perubahan
Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Sumber Dana	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**100,00**	**100,00**	**17.577.266.655**	**9.921.871.529**
6.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah SDM APIP Bersertifikat Yang Bertambah**	**Orang**	**DAU/ PAD**	**3**	**3**	**12.624.111.655**	**9.084.688.942**
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlayani**	**100%**	**DAU**	**9**	**9**	**33,25.000**	**-**
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	DAU	6	6	6.000.000	-
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	DAU	1	1	2.000.000	-
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	DAU	4	4	25.250.000	-
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Administrasi Keuangan yang terlayani**	**100%**	**DAU**	**55**	**55**	**6.390.319.155**	**6.156.084.729**
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	DAU	50	50	6.232.371.555	6.004.137.129
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	PAD	4	4	151.947.600	151.947.600
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	DAU	1	1	2.000.000	-
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Laporan	DAU	12	12	4.000.000	-
6.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Laporan**	**DAU**	**6**	**6**	**16.645.500**	**-**
6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	DAU	6	6	16.645.500	-
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang mengikuti Diklat/Sosialisasi**	**Orang**	**DAU**	**212**	**212**	**1.600.000.000**	**460.000.000**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Sumber Dana	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugs dan fungsi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	DAU	20	20	1.500.000.000	350.000.000
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	DAU	400	200	100.000.000	45.464.800
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan**	**DAU**	**408**	**408**	**1.117.911.800**	**498.274.000**
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket	DAU	4	4	10.038.000	3.854.800
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	DAU	1	1	250.000.000	100.000.000
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	DAU	4	4	20.000.000	8.000.000
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	DAU	4	4	73.180.400	61.019.200
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	DAU	15	7	20.618.400	8.250.000
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	DAU	24	6	44.075.000	8.200.000
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	DAU	120	90	650.000.000	795.986.000
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani**	**100%**	**DAU**	**74**	**31**	**1.538.772.400**	**540.316.000**
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	DAU	1	0	419.166.000	0
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	DAU	75	0	96.623.000	150.446.000
6.01.01.2.07.0006 .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	DAU	16	156	202.132.500	969.160.400
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani**	**100%**	**DAU**	**12**	**12**	**134.984.800**	**136.584.800**
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	DAU	4	4	10.000.000	4.000.000
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	DAU	4	4	70.380.000	77.980.000
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	DAU	4	4	54.496.800	54.496.800
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani**	**100%**	**DAU**	**36**	**36**	**1.792.228.000**	**388.633.200**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Sumber Dana	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Uniit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	DAU	1	1	149.858.000	63.287.400
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Uniit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	DAU	28	28	533.034.400	251.682.600
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	DAU	1	1	1.084.225.600	56.500.000
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	Unit	DAU	30	16	25.110.000	17.163.200
6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Jumlah Rekomendasi Temuan yang Menindaklanjuti Berdasarkan Wilayah Pemeriksaan**	**Rekomendasi**	**DAU**	**4.000**	**4.000**	**3.427.470.000**	**1.891.130.000**
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang terlaksana**	**100%**	**DAU**	**192**	**142**	**1.827.470.000**	**800.318.000**
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	DAU	44	44	517.050.000	175.830.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	DAU	44	44	481.850.000	245.700.000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	DAU	1	2	83.580.000,	30.892.000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	DAU	12	1	41.790.000	15.446.000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	DAU	15	15	353.200.000	202.650.000
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengawasan Internal yang dibentuk	Kesepakatan	DAU	1	0	50.000.000	0
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	DAU	24	16	300.000.000	129.800.000
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang terlaksana**	**100%**	**DAU**	**141**	**141**	**1.600.000.000**	**659.762.000**
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan	DAU	1	1	100.000.000	34.612.000
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	DAU	140	140	1.500.000.000	625.150.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Sumber Dana	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	
6.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti Evaluasi oleh APIP**	**Perangkat Daerah**	**DAU**	**37**	**35**	**1.525.685.000**	**346.434.000**
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Dokumen**	**DAU**	**2**	**2**	**175.110.000**	**21.434.000**
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Rekomen dasi	DAU	2	1	75.000.000	21.434.000
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan disusun	Rekomen dasi	DAU	2	1	100.000.000	-
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Kebutuhan Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana**	**100%**	**DAU**	**33**	**33**	**1.350.575.000**	**325.000.000**
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	DAU	10	10	150.000.000	-
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	DAU	12	12	600.575.000	175.000.000,
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	DAU	2	2	400.000.000	120.000.000
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	DAU	9	9	200.000.000	30.000.000

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan memperhatikan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 dan kebijakan pengawasan serta pengelolaan keuangan Tahun 2025 untuk meraih keberhasilan.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Daerah Kabupaten TapanuliUtara, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan mantaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya.

Tarutung, 29 November 2025

Inspektur Daerah,

Drs. Erikson Siagian, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19690422 198903 1 003

bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2025

TAHUN 2025

TARUTUNG

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,
Dto,-
JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN 11

1.1 Latar Belakang 11

1.2 Landasan Hukum 14

1.3 Maksud dan Tujuan 16

1.4 Sistematika Penulisan 17

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 20

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 20

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 29

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara 30

2.3.2 Dampak Pencapaian Tujuan Perangkat Daerah 31

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan 31

2.3.4 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Progran dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 32

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 33

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 47

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 47

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 47

3.3 Program dan Kegiatan 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH58

BAB IV PENUTUP 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang memegang peranan sangat penting bagi terlaksananya suatu kegiatan pembangunan yang baik. Perencanaan harus dijadikan suatu pedoman dan landasan bagi suatu kegiatan pembangunan, dan harus dilaksanakan secara baik dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi dan evaluasi terhadap kinerja dimasa yang lalu. Disamping itu perencanaan yang baik juga harus disesuaikan dengan visi dan misi dari pembangunan itu sendiri.

Renja Perubahan adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan, penyesuaian anggaran, maupun dinamika pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan.

Renja Perubahan dimaksudkan untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah agar tetap selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, khususnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta tetap mengacu pada arah kebijakan, strategi, visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dari uraian arti strategis mengenai Rencana Kerja Perubahan di atas, maka disusun Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dan disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, yang dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam satu tahun anggaran. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Perubahan merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun berkenaan.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan) untuk periode 1 tahun setelah disesuaikan dengan program, kegiatan dan anggaran pada perubahan APBD Tahun 2025, yaitu dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, sehingga penyusunan Renja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu pada Perubahan RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan Perubahan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD).

Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Perubahan RKPD. Kepala Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada

pasal 343 ayat lima (5) menyatakan bahwa Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan perubahan Renja perangkat daerah mencakup :

a. Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebelumnnya dan evaluasi kinerja terhadap realisasi pencapaian Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun berkenaan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
24. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
25. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Dasar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam kurun 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan;
2. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Merealisasikan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Menjadi kerangka acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam upaya meningkatkan kualitas kepegawaian;
6. Bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah. Penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada SPBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD tahun - tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yang berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang serta formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD, yang merupakan peninjauan kembali terhadap rancangan Rencana Kerja Perubahan awal dengan perbandingan dengan Rencana Kerja Perubahan yang dilaksanakan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, yang menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para *stakeholder*, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi,

Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD Perubahan, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP, yang menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabillitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/ tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II (Bulan Juni) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut dibawah ini :

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan II

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara

Tahun Anggaran 2025

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	APBD Tahun 2025				Realisasi Sampai Semester I Perubahan Renja			Selisih		Catatan/ Permasalahan
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif	Target		Pagu Indikatif	Pagu	%	Rp
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
5.03	**KEPEGAWAIAN**					**4,724,911,556.00**			**1,535,425,935.00**			
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**100**	**%**	**3,765,694,256.00**	**100**	**%**	**1,392,699,996.00**			
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**3**	**Laporan**	**17,999,750.00**	**3**	**Laporan**	**3,756,000.00**	**14,243,750.00**	**20.87**	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	6	Dokumen	5,999,800.00	6	Dokumen	1,050,800.00	4,949,000.00	17.51	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan	5,999,950.00	1	Laporan	2,705,200.00	3,294,750.00	45.09	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Laporan	6,000,000.00	2	Laporan	-	6,000,000.00	0.00	

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	APBD Tahun 2025				Realisasi Sampai Semester I Perubahan Renja			Selisih		Catatan/ Permasalahan
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif	Target		Pagu Indikatif	Pagu	%	Rp
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**4**	**Laporan**	**2,725,219,574.00**	**4**	**Laporan**	**1,321,593,256.00**	**1,403,626,318.00**	**48.49**	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	32	Orang/Bulan	2,675,876,649.00	32	Orang/Bulan	1,299,216,456.00	1,376,660,193.00	48.55	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	15	Laporan	42,343,200.00	15	Laporan	21,171,600.00	21,171,600.00	50.00	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan	5,999,925.00	1	Laporan	1,205,200.00	4,794,725.00	20.09	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	999,800.00	12	Laporan	-	999,800.00	0.00	
5.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**3**	**Laporan**	**3,999,900.00**	**1**	**Laporan**	**-**	**3,999,900.00**	**0.00**	
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	3	Laporan	3,999,900.00	3	Laporan	-	3,999,900.00	0.00	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**7**	**Laporan**	**249,042,800.00**	**7**	**Laporan**	**26,587,400.00**	**222,455,400.00**	**10.68**	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Paket	9,974,700.00	2	Paket	-	9,974,700.00	0.00	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	4	Paket	34,524,500.00	4	Paket	-	34,524,500.00	0.00	

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	APBD Tahun 2025				Realisasi Sampai Semester I Perubahan Renja			Selisih		Catatan/ Permasalahan
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif	Target		Pagu Indikatif	Pagu	%	Rp
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Paket	15,000,000.00	2	Paket	3,450,000.00	11,550,000.00	23.00	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Paket	15,073,600.00	2	Paket	2,768,100.00	12,305,500.00	18.36	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tapanuli Utara	3	Dokumen	-	3	Dokumen	-	-	#DIV/0!	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	5,999,000.00	12	Laporan	-	5,999,000.00	0.00	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	75	Laporan	168,471,000.00	75	Laporan	20,369,300.00	148,101,700.00	12.09	
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**1**	**Laporan**	**610,130,700.00**	**1**	**Laporan**	**-**	**610,130,700.00**	**0.00**	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tapanuli Utara	9	Unit	610,130,700.00	9	Unit	-	610,130,700.00	0.00	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**3**	**Laporan**	**82,848,300.00**	**3**	**Laporan**	**24,954,310.00**	**57,893,990.00**	**30.12**	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tapanuli Utara	10	Laporan	700,000.00	10	Laporan	360,000.00	340,000.00	51.43	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	27,543,500.00	12	Laporan	11,094,310.00	16,449,190.00	40.28	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	54,604,800.00	12	Laporan	13,500,000.00	41,104,800.00	24.72	

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	APBD Tahun 2025				Realisasi Sampai Semester I Perubahan Renja			Selisih		Catatan/ Permasalahan
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif	Target		Pagu Indikatif	Pagu	%	Rp
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**4**	**Laporan**	**76,453,232.00**	**4**	**Laporan**	**15,809,030.00**	**60,644,202.00**	**20.68**	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Unit	46,521,300.00	2	Unit	13,029,030.00	33,492,270.00	28.01	
	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		5	Unit	4,932,500.00	5	Unit	-	4,932,500.00	0.00	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tapanuli Utara	20	Unit	9,998,832.00	20	Unit	2,530,000.00	7,468,832.00	25.30	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Unit	15,000,600.00	1	Unit	250,000.00	14,750,600.00	1.67	
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**71,10**	**%**	**959,217,300.00**	**71,10**	**%**	**142,725,939.00**	**11,594,800.00**	**77.78**	
		Persentase Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**14,39**	**%**		**14,39**	**%**				

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	APBD Tahun 2025				Realisasi Sampai Semester I Perubahan Renja			Selisih		Catatan/ Permasalahan
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif	Target		Pagu Indikatif	Pagu	%	Rp
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		Persentase Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompmpetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**37,75**	**%**		**37,75**	**%**				
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**6**	**Laporan**	**74,620,850.00**	**6**	**Laporan**	**56,990,000.00**	17,630,850.00	76.37	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	10,008,900.00	1	Dokumen	5,173,000.00	4,835,900.00	51.68	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	20,000,000.00	1	Dokumen	51,817,000.00	- 31,817,000.00	259.09	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Tapanuli Utara	313	Dokumen	9,999,750.00	313	Dokumen	-	9,999,750.00	0.00	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Lembaga	9,314,000.00	1	Lembaga	-	9,314,000.00	0.00	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Tapanuli Utara	2500	Dokumen	14,999,800.00	2500	Dokumen	-	14,999,800.00	0.00	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Dokumen	10,298,400.00	2	Dokumen	-	10,298,400.00	0.00	

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	APBD Tahun 2025				Realisasi Sampai Semester I Perubahan Renja			Selisih		Catatan/ Permasalahan
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif	Target		Pagu Indikatif	Pagu	%	Rp
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**3**	**Laporan**	**121,718,500.00**	**3**	**Laporan**	**12,315,000.00**	**109,403,500.00**	**10.12**	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	90	Dokumen	11,999,000.00	90	Dokumen	-	11,999,000.00	0.00	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	900	Dokumen	99,719,500.00	900	Dokumen	12,315,000.00	87,404,500.00	12.35	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	18	Dokumen	10,000,000.00	18	Dokumen	-	10,000,000.00	0.00	
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**3**	**Laporan**	**728,176,525.00**	**3**	**Laporan**	**71,777,939.00**	**656,398,586.00**	**9.86**	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	10	Orang	209,975,375.00	10	Orang	20,203,338.00	189,772,037.00	9.62	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Orang	30,356,250.00	1	Orang	-	30,356,250.00	0.00	
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	33	Orang	487,844,900.00	33	Orang	51,574,601.00	436,270,299.00	10.57	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**4**	**Laporan**	**34,701,425.00**	**4**	**Laporan**	**1,643,000.00**	33,058,425.00	4.73	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	10,065,000.00	1	Dokumen	-	10,065,000.00	0.00	

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	APBD Tahun 2025				Realisasi Sampai Semester I Perubahan Renja			Selisih		Catatan/ Permasalahan
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif	Target		Pagu Indikatif	Pagu	%	Rp
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	15	Orang	7,275,900.00	15	Orang	1,643,000.00			
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Orang	7,829,375.00	1	Orang	-			
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan	9,531,150.00	1	Laporan	-	9,531,150.00	0.00	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**130,743,000.00**			**5,260,000.00**			
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Pelatihan Kepemimpinan)**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**14**	**%**	**130,743,000.00**	**14**	**%**	**5,260,000.00**	19,999,825.00	**4.02**	
		Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan Dasar)	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**100**	**%**		**100**	**%**				
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Terlaksananya sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**2**	**Laporan**	**130,743,000.00**	**2**	**Laporan**	**5,260,000.00**	125,483,000.00	**4.02**	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Laporan	130,743,000.00	2	Laporan	5,260,000.00	125,483,000.00	4.02	
TOTAL						**4,855,654,556.00**			**1,540,685,935.00**	**3,314,968,621.00**	**31.73**	

Berdasarkan tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas masih dibawah 60%. Hal ini perlu dilaksanakan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan agar capaian kinerja dapat mendekati 100%.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Secara umum rata-rata capaian kinerja yang telah dicapai tahun anggaran 2024 adalah sebesar 95,30%, dan diharapkan pada tahun 2025 ini capaian kinerja tersebut akan mencapai 100% disetiap Program dan Kegiatan. Oleh karena itu

secara umum dapat dikatakan capaian kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yang telah direncanakan.

Pelayanan yang telah dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka terlaksananya tugas pokok dan fungsinya yaitu :

a. Penyusunan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugasnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2022, menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tingkat kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara sejauh ini cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan secara umum setiap tahunnya. Capaian kinerja sebagian besar kegiatan menunjukkan persentase yang cukup bagus sesuai dengan yang telah ditargetkan.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara

Namun demikian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain :

1. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
2. Perubahan Regulasi Kepegawaian yang Dinamis
3. Kesenjangan antara Kebutuhan dan Ketersediaan ASN
4. Belum Optimalnya Pengembangan Kompetensi ASN
5. Belum Optimalnya Pengalihan Jabatan Struktural ke Fungsional
6. Tingginya Angka Pensiun dan Minimnya Regenerasi ASN
7. Belum Optimalnya Implementasi Sistem Reward and Punishment
8. Belum optimalnya penataan karir ASN

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan komponen penting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan, profesionalisme ASN seringkali dipertanyakan karena profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya ;
2. Pengelolaan manajemen ASN belum sepenuhnya berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras agama, asal usul, jenis kelamin dan kondisi kecacatan ;
3. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik masih menemui beberapa tantangan besar, salah satunya adalah rendahnya kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik ;
4. Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat ;

Akuntabilitas aparatur pemerintah merupakan hal yang mutlak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka good governance.

2.3.2 Dampak Pencapaian Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang akan hendak dicapai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Tujuan perangkat daerah yang ditetapkan agar dapat mengetahui hal yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam jangka waktu satu sampai dengan dua tahun kedepan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan tujuan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah **Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas.**

Berdasarkan uraian diatas, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan yaitu, Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas dengan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Indeks Profesionalitas ASN
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan antara lain: keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas

maupun kuantitas, keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan baik untuk peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, monitoring, maupun peninjauan lapangan.

Dengan keterbatasan yang dirasakan diatas, maka pelayanan yang dilaksanakan tidak akan dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan di tahun-tahun yang akan datang. Disamping itu, perlu juga dilihat peluang dan potensi yang harus dikembangkan dan diraih untuk meningkatkan pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, terlihat jelas bahwa potensi untuk mengembangkan Pengetahuan dan Kemampuan bagi Sumber Daya Manusia Aparatur sangat mungkin untuk dilaksanakan. Hal inilah yang perlu dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara.

2.3.4 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Progran dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Sebagai garda depan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tapanuli Utara yang menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Profesionalitas ASN, beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Meningkatkan Perencanaan Kebutuhan ASN;
2. Meningkatkan Manajemen Kinerja ASN;
3. Meningkatkan Pembinaan Karir dan Kompetensi;
4. Optimalisasi Sistem Pendukung Kepegawaian.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada Rancangan awal RKPD dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran Belanja Langsung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pada Tahun 2019 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 5 (Lima) Program dan 17 (Tujuh belas) kegiatan.
b. Pada Tahun 2020 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 5 (Lima) Program dan 15 (Lima belas) kegiatan.
c. Pada tahun 2021 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 3 (Tiga) Program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan dengan 39 (Tiga puluh Sembilan) Sub Kegiatan.
d. Pada tahun 2022 jumlah program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (Tiga) program dan 12 (Dua belas) kegiatan dengan 39 (Tiga puluh sembilan) sub kegiatan.
e. Pada tahun 2023 jumlah program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (Tiga) program dan 11 (Sebelas) kegiatan dengan 32 (Tiga puluh dua) sub kegiatan.
f. Pada tahun 2024 jumlah program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga) program dan 12 kegiatan dengan 37 sub kegiatan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disempurnakan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

dan disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menstandarkan program, kegiatan dan sub kegiatan di seluruh lndonesia melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang diharapkan melalui aplikasi ini akan dengan mudah didapatkan data pembangunan secara masif serta memperhatikan Standar Harga Satuan Regional dalam merencanakan pendanaannya.

Apabila kita membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terdapat kesamaan. Adapun kesamaan tersebut terjadi karena adanya identifikasi permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan untuk dapat segera dilaksanakan. Perbandingan ini sangat perlu dilakukan untuk dapat melihat apakah rancangan awal perangkat daerah yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan riil.

Akan tetapi, disamping itu juga terdapat adanya perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya kebutuhan akan suatu kegiatan yang tidak diakomodir pada rancangan awal RKPD. Perbedaan yang terjadi ini tidaklah mengurangi esensi atau pun bertentangan dengan Rancangan awal RKPD, hanya saja untuk menyikapi kekurangan-kekurangan didalam penyusunan sebelumnya serta sebagai jawaban atas antisipasi isu-isu strategis yang berkembang secara dinamis, dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan		Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**3,966,001,014.00**	**KEPEGAWAIAN**				**4,016,000,364.00**	
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**	**100 %**	**3,070,466,039.00**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**	**100 %**	**3,070,465,389.00**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3 Laporan**	**19,999,650.00**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3 Laporan**	**18,793,800.00**	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	5,999,800.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	5,999,800.00	

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan		Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,999,950.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,999,600.00	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	9,999,900.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8,794,400.00	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Laporan**	**2,533,542,389.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Laporan**	**2,534,747,589.00**	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	2,485,219,464.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	2,485,219,464.00	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Laporan	42,343,200.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Laporan	42,343,200.00	

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan		Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,979,725.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,184,925.00	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	0 Laporan	0.00	
5.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**1,600,100.00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**1,600,100.00**	
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,600,100.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,600,100.00	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Laporan**	**137,094,650.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Laporan**	**137,094,650.00**	

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan		Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	6,997,500.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	6,997,500.00	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	20,008,150.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	20,008,150.00	
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	15,718,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	15,718,000.00	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	15,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	15,000,000.00	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	6 Laporan	2,400,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	6 Laporan	2,400,000.00	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	76,971,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	76,971,000.00	
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Laporan**	**226,315,200.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Laporan**	**226,315,200.00**	

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan		Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		12	13
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	17	Unit	226,315,200.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	17	Unit	226,315,200.00	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**Laporan**	**46,105,100.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**Laporan**	**46,105,100.00**	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	360,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	360,000.00	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	27,543,500.00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	27,543,500.00	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	8	Laporan	18,201,600.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	8	Laporan	18,201,600.00	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**Laporan**	**105,808,950.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**Laporan**	**105,808,950.00**	

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan		Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	69,990,350.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	69,990,350.00	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	5,788,800.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	5,788,800.00	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	30,029,800.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	30,029,800.00	
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Persentase Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**71,10 %**	**895,534,975.00**	**Program Kepegawaian Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Persentase Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**71,10 %**	**945,534,975.00**	
			Persentase Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	**14,39 %**				**Persentase Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**14,39 %**		

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan		Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
			Persentase Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompmpetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	**37,75 %**				**Persentase Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompmpetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**37,75 %**		
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi**	**6 Laporan**	**137,421,225.00**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi**	**6 Laporan**	**187,421,225.00**	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	7,100,000.00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	7,100,000.00	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	108,530,075.00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	108,530,075.00	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	313 Dokumen	4,742,250.00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	313 Dokumen	4,742,250.00	

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan		Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		12	13
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	1	Lembaga	4,711,000.00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	1	Lembaga	54,711,000.00	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Tapanuli Utara	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	2500	Dokumen	7,831,000.00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Tapanuli Utara	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	2500	Dokumen	7,831,000.00	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Tapanuli Utara	Terkelolanya Data Kepegawaian	2	Dokumen	4,506,900.00	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Tapanuli Utara	Terkelolanya Data Kepegawaian	2	Dokumen	4,506,900.00	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN**	**3**	**Laporan**	**110,378,800.00**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN**	**3**	**Laporan**	**110,378,800.00**	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	90	Dokumen	5,915,050.00	Pengelolaan Mutasi	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	90	Dokumen	5,915,050.00	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900	Dokumen	99,719,250.00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900	Dokumen	99,719,250.00	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	18	Dokumen	4,744,500.00	Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	18	Dokumen	4,744,500.00	

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan		Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		12	13
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN**	**3**	**Laporan**	**631,985,600.00**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN**	**3**	**Laporan**	**631,985,600.00**	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Meningkatnya Kapasitas ASN	10	Orang	208,723,000.00	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Meningkatnya Kapasitas ASN	10	Orang	208,723,000.00	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1	Orang	14,000,050.00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1	Orang	14,000,050.00	
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	33	Orang	409,262,550.00	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	33	Orang	409,262,550.00	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**4**	**Laporan**	**15,749,350.00**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**4**	**Laporan**	**15,749,350.00**	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	4,748,000.00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	4,748,000.00	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	15	Orang	3,486,400.00	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	15	Orang	3,486,400.00	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Meningkatnya Disiplin ASN	1	Orang	3,712,100.00	Pembinaan Disiplin ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Meningkatnya Disiplin ASN	1	Orang	3,712,100.00	

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan		Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	3,802,850.00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	3,802,850.00	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**92,418,000.00**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**92,418,000.00**	
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Pelatihan Kepemimpinan)**	**14 %**	**92,418,000.00**	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Pelatihan Kepemimpinan)**	**14 %**	**92,418,000.00**	
			Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan Dasar)	**100 %**				**Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan Dasar)**	**100 %**		
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**2 Laporan**	**92,418,000.00**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**2 Laporan**	**92,418,000.00**	

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan		Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kabupaten Tapanuli Utara	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	92,418,000.00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kabupaten Tapanuli Utara	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	92,418,000.00	
TOTAL					**4,058,419,014.00**	**TOTAL**				**4,108,418,364.00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, sehingga sesuai dengan tupoksinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara tidak mengakomodir usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Terhadap kebijakan nasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai posisi untuk mendukung prioritas pembangunan untuk Pembangunan Manusia melalui penyiapan aparatur yang berkompeten melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembangunan manajemen kepegawaian dengan memberikan kepastian kepada aparatur untuk berkarir secara jelas dan adil, dengan menerapkan pembinaan dan mengusahakan kesejahteraan kepada aparatur sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah **Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas**, dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Indeks Profesionalitas ASN
2. Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesionalitas dan Berintegritas	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	43,08	43,08
	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP	75	75

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara ditunjang dengan 3 (tiga) program yang berhubungan dengan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang wajib harus diterapkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 dengan melalui aplikasi Sistem lnformasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Adapun secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari kegiatan, sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan Mebel
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Pada Program Kepegawaian Daerah terdiri dari kegiatan, sebagai berikut :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
   a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
   b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
   c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
   d. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
   e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
   f. Pengelolaan Data Kepegawaian
2. Mutasi dan Promosi ASN
   a. Pengelolaan Mutasi ASN
   b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN'
   c. Pengelolaan Promosi ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN
   a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
   b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
   c. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   b. Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai
   c. Pembinaan Disiplin ASN
   d. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari kegiatan, sebagai berikut :

1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
    a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2025 telah merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025. Program dan kegiatan tersebut merupakan hasil penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional. Perumusan program dan kegiatan telah mempertimbangkan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju pada Tahun 2025 dan hasil perhitungan kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi. Rumusan rencana program dan kegiatan tersebut disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Murni Tahun 2025 (sesuai DPA)				Perubahan Tahun 2025			Selisih		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif	Target		Pagu Indikatif	Pagu	%	
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
5.03	**KEPEGAWAIAN**					**4,724,911,556.00**			**4,016,000,364.00**	**(710,311,192.00)**		
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**100**	**%**	**3,765,694,256.00**	**100**	**%**	**3,070,465,389.00**	**(696,628,867.00)**	**81.54**	**BKPSDM Kab. Tapanuli Utara**
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**3**	**Laporan**	**17,999,750.00**	**3**	**Laporan**	**18,793,800.00**	**794,050.00**	**104.41**	**BKPSDM Kab. Tapanuli Utara**
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	6	Dokumen	5,999,800.00	6	Dokumen	5,999,800.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan	5,999,950.00	4	Laporan	3,999,600.00	(2,000,350.00)	66.66	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Murni Tahun 2025 (sesuai DPA)				Perubahan Tahun 2025			Selisih		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif	Target		Pagu Indikatif	Pagu	%	
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Laporan	6,000,000.00	2	Laporan	8,794,400.00	2,794,400.00	146.57	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**4**	**Laporan**	**2,725,219,574.00**	**3**	**Laporan**	**2,534,747,589.00**	**(191,871,985.00)**	**93.01**	**BKPSDM Kab. Tapanuli Utara**
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	32	Orang/Bulan	2,675,876,649.00	32	Orang/Bulan	2,485,219,464.00	(190,657,185.00)	92.87	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	15	Dokumen	42,343,200.00	15	Dokumen	42,343,200.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan	5,999,925.00	1	Laporan	7,184,925.00	1,185,000.00	119.75	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	999,800.00	0	Laporan	0.00			BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**3**	**Laporan**	**3,999,900.00**	**1**	**Laporan**	**1,600,100.00**	**(2,399,800.00)**	**40.00**	**BKPSDM Kab. Tapanuli Utara**
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	3	Laporan	3,999,900.00	1	Laporan	1,600,100.00	**(2,399,800.00)**	40.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**7**	**Laporan**	**249,042,800.00**	**7**	**Laporan**	**137,094,650.00**	**(111,948,150.00)**	**55.05**	**BKPSDM Kab. Tapanuli Utara**
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Paket	9,974,700.00	1	Paket	6,997,500.00	**(2,977,200.00)**		BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	4	Paket	34,524,500.00	2	Paket	20,008,150.00	(14,516,350.00)	57.95	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Murni Tahun 2025 (sesuai DPA)				Perubahan Tahun 2025			Selisih		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif	Target		Pagu Indikatif	Pagu	%	
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Paket	15,000,000.00	2	Paket	15,718,000.00	718,000.00	104.79	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Paket	15,073,600.00	2	Paket	15,000,000.00	(73,600.00)	99.51	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	5,999,000.00	6	Laporan	2,400,000.00	(3,599,000.00)	40.01	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tapanuli Utara	75	Laporan	168,471,000.00	30	Laporan	76,971,000.00	(91,500,000.00)	45.69	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**1**	**Laporan**	**610,130,700.00**	**1**	**Laporan**	**226,315,200.00**	**(383,815,500.00)**	**37.09**	**BKPSDM Kab. Tapanuli Utara**
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tapanuli Utara	9	Unit	610,130,700.00	17	Unit	226,315,200.00			
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**3**	**Laporan**	**82,848,300.00**	**3**	**Laporan**	**46,105,100.00**	**(36,743,200.00)**	**55.65**	**BKPSDM Kab. Tapanuli Utara**
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tapanuli Utara	10	Laporan	700,000.00	5	Laporan	360,000.00	**(340,000.00)**	51.43	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	27,543,500.00	12	Laporan	27,543,500.00	-	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	54,604,800.00	8	Laporan	18,201,600.00	(36,403,200.00)	33.33	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**4**	**Laporan**	**76,453,232.00**	**3**	**Laporan**	**105,808,950.00**	**29,355,718.00**	**138.40**	**BKPSDM Kab. Tapanuli Utara**
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Unit	46,521,300.00	2	Unit	69,990,350.00	23,469,050.00	150.45	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Murni Tahun 2025 (sesuai DPA)				Perubahan Tahun 2025			Selisih		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif	Target		Pagu Indikatif	Pagu	%	
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Tapanuli Utara	5	Unit	4,932,500.00	0	Unit	-			
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tapanuli Utara	20	Unit	9,998,832.00	10	Unit	5,788,800.00	(4,210,032.00)	57.89	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Unit	15,000,600.00	1	Unit	30,029,800.00	15,029,200.00	200.19	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**71,10**	**%**	**959,217,300.00**	**71,10**	**%**	**945,534,975.00**	**(13,682,325.00)**	**98.57**	**BKPSDM Kab. Tapanuli Utara**
		Persentase Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**14,39**	**%**		**14,39**	**%**				
		Persentase Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompmpetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**37,75**	**%**		**37,75**	**%**				
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**6**	**Laporan**	**74,620,850.00**	**6**	**Laporan**	**187,421,225.00**	**112,800,375.00**	**251.16**	**BKPSDM Kab. Tapanuli Utara**
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	10,008,900.00	1	Dokumen	7,100,000.00	(2,908,900.00)	70.94	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	20,000,000.00	1	Dokumen	108,530,075.00	88,530,075.00	542.65	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Tapanuli Utara	313	Dokumen	9,999,750.00	250	Dokumen	4,742,250.00	(5,257,500.00)	47.42	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Murni Tahun 2025 (sesuai DPA)				Perubahan Tahun 2025			Selisih		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif	Target		Pagu Indikatif	Pagu	%	
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Lembaga	9,314,000.00	1	Lembaga	54,711,000.00	45,397,000.00	587.41	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Tapanuli Utara	2500	Dokumen	14,999,800.00	1000	Dokumen	7,831,000.00	(7,168,800.00)	52.21	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Dokumen	10,298,400.00	2	Dokumen	4,506,900.00	(5,791,500.00)	43.76	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**3**	**Laporan**	**121,718,500.00**	**3**	**Laporan**	**110,378,800.00**	**(11,339,700.00)**	**90.68**	**BKPSDM Kab. Tapanuli Utara**
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	90	Dokumen	11,999,000.00	5	Dokumen	5,915,050.00	(6,083,950.00)	49.30	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	900	Dokumen	99,719,500.00	700	Dokumen	99,719,250.00	(250.00)	100.00	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	18	Dokumen	10,000,000.00	3	Dokumen	4,744,500.00	(5,255,500.00)	47.45	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**3**	**Laporan**	**728,176,525.00**	**3**	**Laporan**	**631,985,600.00**	**(96,190,925.00)**	**86.79**	**BKPSDM Kab. Tapanuli Utara**
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	10	Orang	209,975,375.00	9	Orang	208,723,000.00	(1,252,375.00)	99.40	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Orang	30,356,250.00	200	Orang	14,000,050.00	(16,356,200.00)	46.12	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	33	Orang	487,844,900.00	15	Orang	409,262,550.00	(78,582,350.00)	83.89	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**4**	**Laporan**	**34,701,425.00**	**4**	**Laporan**	**15,749,350.00**	**(18,952,075.00)**	**45.39**	**BKPSDM Kab. Tapanuli Utara**

Kode	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Murni Tahun 2025 (sesuai DPA)				Perubahan Tahun 2025			Selisih		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target		Pagu Indikatif	Target		Pagu Indikatif	Pagu	%	
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	10,065,000.00	1	Dokumen	4,748,000.00	(5,317,000.00)	47.17	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	15	Orang	7,275,900.00	15	Orang	3,486,400.00	(3,789,500.00)	47.92	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Orang	7,829,375.00	1	Orang	3,712,100.00	(4,117,275.00)	47.41	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan	9,531,150.00	1	Laporan	3,802,850.00	(5,728,300.00)	39.90	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**130,743,000.00**			**92,418,000.00**	**(38,325,000.00)**	**70.69**	
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Pelatihan Kepemimpinan)**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**14**	**%**	**130,743,000.00**	**14**	**%**	**92,418,000.00**	**(38,325,000.00)**	70.69	**BKPSDM Kab. Tapanuli Utara**
		Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan Dasar)		**100**	**%**		**100**	**%**				
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Terlaksananya sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**2**	**Laporan**	**130,743,000.00**	**2**	**Laporan**	**92,418,000.00**	**(38,325,000.00)**	**70.69**	**BKPSDM Kab. Tapanuli Utara**
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Tapanuli Utara	2	Laporan	130,743,000.00	2	Laporan	92,418,000.00	(38,325,000.00)	70.69	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara
TOTAL						**4,855,654,556.00**			**4,108,418,364.00**	**(748,636,192.00)**	**84.61**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia tahun 2025. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tarutung, 2025

Plt. Kepala BKPSDM
Kabupaten Tapanuli Utara,

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA BKPSDM

Jenri Suryandi Simanjuntak, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 198109112006041008

RENCANA KERJA (RENJA 2025)

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penyusunan 6
BAB II 9
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. 9
2.2. Analisa Pelayanan Kinerja 17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD 18
2.4. LINGKUNGAN INTERNAL 20
2.4.1 Kekuatan (*Strength*): 20
2.5. LINGKUNGAN EKSTERNAL PELUANG (OPPORTUNITY) 22
2.6. ANCAMAN (THREAT): 22
2.7. STRATEGI UMUM KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA: 23
2.8. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 24
2.9. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24
BAB III 26
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 26
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional 26
3.2 Tujuan & Sasaran 27
3.3 Program Dan Kegiatan 27
BAB IV 28
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 28
BAB V 29
PENUTUP 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2025 yang memuat program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata Kabupaten Tapanuli Utara yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rercana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara merupakan rencana pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan tersebut diatas, dokumen perencanaan disusun sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra

OPD.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan rencana kegiatan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Tapanuli Utara yang tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara, dimana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mengambil misi ke 8 (delapan) dimana misi ke 8 ini menurunkan tujuan dan sasaran seperti tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2029.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi dimana Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola keuangan dan kekayaan yang profesional;
2. Pengembangan Manajemen pengelola keuangan dan kekayaan daerah;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;

Rencana Awal (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran- sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Renja BKAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak

Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2012;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2010;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 65 Tahun 2016; tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara.

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan BKAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 adalah untuk memaduserasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) BKAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025.

Arti Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai panduan/pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Renja BKAD. Kabupaten Tapanuli Utara, dan juga sebagai arahan dan acuan dalam pemanfaatan secara optimal sumber dana dan sumber daya yang dimiliki Renja BKAD Kabupaten Tapanuli Utara sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada melalui kerjasama kemitraan dengan segenap komponen terkait untuk mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Sementara tujuan disusunnya Rencan Kerja (Renja) BKAD Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk memasukkan program yang ada di Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Tahun 2025 yakni:

a. Sebagai acuan/arah bagi BKAD dalam menyusun program/kegiatan prioritas Tahun 2025 berdasarkan ketersediaan sumberdaya dalam rangka mencapai Kabupaten Tapanuli Utara sebagai kabupaten termaju di Indonesia;
b. Merumuskan rencana program dan kegiatan BKAD Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencan Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ri ngkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU (BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD yang memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yangterkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan

uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannnya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun 2025 dan perkiraan target Tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 - 2024 (dijelaskan dalam lampiran Tabel Indikator Kinerja Utama).

2.1.2 Capaian Renstra

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi capaian kinerja yang dibandingkan capaian Renstra OPD dapat digambarkan pada Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2024. Capaian kinerja realisasi anggaran yang telah dicapai pada Tahun Anggaran (TA) 2024 adalah sebesar 90,51 % dan diharapkan pada TA. 2024 ini capaian kinerja tersebut akan mencapai peningkatan di setiap Program dan Kegiatan. Oleh karena itu secara umum dapat dikatakan capaian kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan pada Renstra OPD yang telah direncanakan.

2.1.3 Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Untuk tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2025 dengan usulan sebesar Rp. 280.474.938.604,00,- terurai dalam 3 program dan 50 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja meningkat atau minimal sama dengan Tahun 2024, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan Tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja Badan Keuangan dan Aset (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

a. Adanya beberapa kebijakan yang penerapannya dalam waktu singkat seperti rasionalisasi, dimana terdapat penghematan anggaran pada setiap kegiatan. Dana penghematan dari hasil rasionalisasi kegiatan dimaksud dipergunakan pada kegiatan lain seperti pengadaan fisik dan lain sebagainya;
b. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi ;
c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan;
d. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan;
e. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
f. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran

program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Renja Badan Keuangan Aset (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 - 2029, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Strategi mendorong berkembangnya tanggung jaMwab aparatur atas tugas–tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Peningkatan sistem yang mendukung mekanisme penganggaran di Kabupaten Tapanuli Utara yakni dengan diterapkannya sistem baru oleh Pemerintah Pusat yang disebut SIPD didalam memberi kemudahan, sehingga anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara semakin transparan dan tertata dengan baik.
b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
c. Peningkatan disiplin pegawai, ini terlihat dengan diberlakukannya absen dengan memakai alat deteksi jari (*fingerprint*), termasuk untuk pegawai yang akan keluar dan masuk ruangan kantor.
d. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (*reward and punishing*), dan kesejahteraan pegawai.
e. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan pelayanan satu pintu.
f. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.

Penjelasan di atas bisa diperhatikan juga pada Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024
Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran (Rp)	
				Target	Realisasi	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**Persen**	**100 %**	**86 %**	**6.541.944.342**	**5.613.535.668**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persen	**100 %**	**98.28%**	**196,553,000.00**	**193,175,300.00**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Laporan**	100%	98.28%	196,553,000.00	193,175,300.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai target**	**Persen**	**100**	**82.95**	**5,076,608,832.00**	**4,211,396,031.00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**Bulan**	12 Bulan	12 Bulan	4,617,476,132.00	3,754,102,631.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Dokumen**	100%	99.66%	453,133,200.00	451,600,200.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Dokumen**	100%	94.89	5,999,500.00	5,693,200.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**96.06**	**591,902,005.00**	**568,587,543.00**
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	**Paket**	**6**	**12**	27,811,300.00	27,811,300.00

	Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Paket**	**12**	**12**	81,839,925.00	67,237,600.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**Paket**	**12**	**12**	33,568,680.00	33,568,680.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Paket**	**12**	**12**	121,268,300.00	121,253,100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	**Dokumen**	**12**	**12**	14,050,800.00	6,360,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Laporan**	**12**	**12**	313,363,000.00	312,356,863.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100 %**	**88.69**	**29,843,000.00**	**26,470,000.00**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**Persen**	**100 %**	**88.69**	29,843,000.00	26,470,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100 %**	**100 %**	**356,988,976.00**	**332,372,576.00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Laporan**	**12**	**12**	4,565,600.00	2,805,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Laporan**	**12**	**12**	62,436,176.00	49,753,176.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**laporan**	**12**	**12**	289,987,200.00	279,814,400.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**96.20**	**313,621,529.00**	**301,734,218.00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	**Unit**	**12**	**12**	183,331,300.00	180,959,554.00

	Operasional atau Lapangan	Perizinannya					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Unit**	**1**	**1**	85,225,829.00	82,324,664.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Unit**	**12**	**12**	45,064,400.00	38,450,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Terlaksanannya koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah**	**Persen**	**100%**	**98.63%**	**1,297,227,000.00**	**1,279,506,190.00**
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	**Dokumen**	4	4	141,135,000.00	139,588,500.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	**Dokumen**	4	4	155,604,000.00	151,824,990.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	**OPD**	45	45	50,000,000.00	47,391,600.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	**OPD**	45	45	50,000,000.00	46,998,600.00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	**Dokumen**	6	6	370,630,000.00	367,330,100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	**Dokumen**	4	4	375,058,000.00	371,956,500.00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	**Dokumen**	12	12	144,800,000.00	144,527,100.00
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	**Dokumen**	1	1	10,000,000.00	9,888,800.00
	Koordinasi dan Pengelolaan	**Terlaksananya Koordinasi**	**Persen**	**100%**	**97.31**	**151,211,720.00**	**147,145,200.00**

	Perbendaharaan Daerah	**dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**					
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah yang baik, efektif dan efisien	**Dokumen**	12	12	10,010,520.00	8,079,000.00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	**Dokumen**	225	225	40,000,000.00	39,438,600.00
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	**Orang**	160	160	101,201,200.00	99,627,600.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persen**	**100 %**	**100 %**	**220,116,500.00**	**207,425,300.00**
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	**Dokumen**	**12**	**12**	30,117,000.00	19,320,200.00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	**Laporan**	**3**	**3**	64,999,800.00	63,704,700.00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Taput	**Dokumen**	**1**	**1**	124,999,700.00	124,400,400.00
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persen**	**100 %**	**94,48 %**	**279,744,122,171.00**	**264,312,585,216.00**
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran	**Laporan**	**12**	**9**	3,096,653,900.00	2,207,835,420.00

	Pinjaman Pemerintah Daerah	Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah					
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	**Laporan**	**12**	**12**	273,116,310,900.00	258,649,802,576.00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	**Laporan**	**12**	**12**	3,531,157,371.00	3,454,947,220.00
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Laporan**	**100%**	**99,79%**	**109,959,000.00**	**109,728,122.00**
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	**Laporan**	**12**	**12**	**109,959,000.00**	**109,728,122.00**
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100 %**	**79,21 %**	**295,913,775.00**	**234,403,886.90**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	**Laporan**	**12**	**12**	37,499,900.00	18,900,600.00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	**Laporan**	**12**	**12**	67,978,050.00	67,216,108.90
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Laporan**	**12**	**12**	14,997,950.00	13,954,600.00
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	**Dokumen**	**45**	**45**	79,278,000.00	71,308,000.00
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	**Laporan**	**12**	**12**	58,159,900.00	29,229,928.00
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	**Orang**	**45**	**45**	37,999,975.00	33,794,650.00

2.2. Analisa Pelayanan Kinerja

Analisa kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Target pelayanan dalam dimaksud tertuang pada Tabel T-C.30.

Tabel T-C.30.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN 2024		
					TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan	1	Ketepatan waktu Penyusunan RAPBD dan P-APBD. Rumus : 30 Nov Tahun n-1, 30 Sep Tahun n	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
		2	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja yang telah ditetapkan	Persen	95	95	
		3	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan penyampaiannya tepat waktu	Persen	100	85	
		4	Persentase OPD dengan penyerapan anggaran belanja sesuai dengan target	Persen	100	100	
		5	Persentase Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lengkap dan sah, diproses, terbit dan dicairkan di rekening tepat waktu dengan aplikasi CMS	Persen	100	100	
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Persentase Aset tanah pemerintah Daerah yang disertifikasi	Persen	100	76	
		2	Persentase kesesuaian data	Persen	100	100	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN 2024		
					TARGET	REALISASI	%
			rincian total Barang Milik Daerah (BMD) dengan aktiva tetap di neraca				
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	95	70	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. **Kedudukan :**

   a. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
   b. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi Pengelolaan Keuangan.

2. **Tugas**

   a. menyusun kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   b. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
   c. menyusun RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD;
   d. mengesahkan DPA-OPD;
   e. menetapkan SPD;
   f. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
   g. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;

h. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
i. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan pengelolaan ketatausahaan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Fungsi

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selaku Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan fungsinya berwenang untuk :

a. menyusun kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. menyusun kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
d. menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
e. mengesahkan DPA dan DPPA SKPD;
f. menetapkan SPD;
g. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
h. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
i. melakukan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
j. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
k. melakukan pengelolaan ketatausahaan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki peran penting dalam perealisasian seluruh anggaran belanja yang telah di tampung pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara, dan secara simultan bertanggung jawabselaku Pejabat Penatausahaan Keuangan

Daaerah (PPKD) yang menjadi bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), BKAD berperan dalam penyusunan APBD/P-APBD setiap tahunnya dimulai dari Penyusunan RKPD sampai pada penetapan Perda APBD/P-APBD berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh Kabupaten Tapanuli Utara, hal ini cukup rumit karena harus mensinkronkan laporan keuangan, realisasi anggaran, aliran kas dan neraca terhadap realisasi fisik di lapangan.

2. Selain bertanggung jawab dalam hal penyusunan LKPD, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah juga bertanggung jawab dalam hal penatauahaan aset yang bersinggungan dengan masyarakat.

Metode *SWOT Analysis* adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi *strength* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *opportunity* (peluang) dan *threaths* (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

2.4. LINGKUNGAN INTERNAL

2.4.1 Kekuatan (*Strength*):

2.4.1.1 Hukum dan Perundangan :

Sejak terbitnya peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah membagi 2 BPKPAD menjadi 2 Badan yaitu BKAD dan BAPENDA. BKAD terdiri dari 4 Bidang Teknis dan 1 Sekretariat.

2.4.1.2 Sumber Daya Manusia :

Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang Strata-2 sebanyak 22,81 % Strata-1 sebanyak 50,88 % dan Diploma III sebanyak 12.28 %, dan lulusan SMA sebanyak 14,04% yang merupakan kekuatan dan dapat

meningkatkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset daerah.

2.4.1.3 Sarana/Prasarana :

Tersedianya sistem informasi online yakni SIPD, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda), baik Simda Keuangan, Simda Gaji, Simda Barang Milik Daerah (BMD), Sistem Pembayaran CMS, menjadi faktor pendukung terhadap proses penyelesaian tugas tugas di tiap bidang, Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana;

2.4.1.4 Budaya Kerja;

Budaya kerja dalam satu institusi/organisasi haruslah memiliki kesamaan, dikarenakan disatukan oleh visi misi dan tujuan yang sama. Budaya kerja harus disosialisasikan terus menerus agar dapat berjalan sesuai dengan harapan;

2.4.1.5 Kepemimpinan;

Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam memimpin organisasinya, kedua aspek tersebut akan mempengaruhi kinerja para pegawai yang berada di dalamnya. Hal ini terkait dengan *human relation*, *delegation of authority* (pendelegasian wewenang) dan *divison of work* (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf yang sangat tinggi sebagai institusi baru, dapat mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

2.4.2 Kelemahan (Weaknesses):

2.4.2.1 Sumber Daya Manusia:

dari sisi kuantitas, jumlah SDM pada BKAD belum memadai untuk mengimbangi volume kerja yang begitu

besar. Sehingga masih dibutuhkan SDM yang kompeten dan dapat bekerja dengan baik serta berintegritas tinggi.

2.4.2.2 Sarana/Prasarana:

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah dibayar oleh Kemendagri, Masih memiliki kelemahan, belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penatausahaan keuangan di Pemerintah Daerah.

2.5. LINGKUNGAN EKSTERNAL PELUANG (OPPORTUNITY)

1). Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;

2). Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD;

3). Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah;

4). Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;

5). Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para *stakeholder*, seperti Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Pusat dan Provinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik;

2.6. ANCAMAN (THREAT):

Sikap pesimistis masyarakat terhadap pemerintah akan mempengaruhi kondusifitas pemerintahan. Sehingga perlu dilakukan pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

2.7. STRATEGI UMUM KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA:

2.7.1 Tahap Perencanaan;

1. Tahap ditentukannya target kerja dari sisi anggaran. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu, pengelolaan dan pengolahan Data yang lebih representatif dan akurat;
2. Tahap ditentukannya besaran anggaran untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tapanuli Utara untuk menunjang pembangunan yang dilaksanakan masing-masing OPD.

2.7.2 Tahap Pelaksanaan dan Koordinasi;

1. Kegiatan pengelolaan keuangan dimana seluruh OPD akan melaporkan setiap laporan/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk setiap realisasi kegiatan untuk selanjutnya akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Semester dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di akhir tahun anggaran.
2. Kegiatan pendataan, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di seluruh OPD di Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

2.7.3 Tahap Pengawasan;

Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas di lapangan, tetapi pengawasan pun dilakukan dengan pemeriksaan administratif. Demikian pula dengan pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dapatmengantisipasi penyimpangan/penyelewengan dalam penatausahaan keuangan dan aset

2.7.4 Tahap Evaluasi;

Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidentil, tetapi dapat dilakukan secara berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi lain, sehingga penatausahaan yang di awali dengan penganggaran dapat berjalan dengan baik;

Isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut :

a. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama 10 (Sembilan) tahun berturut-turut.
b. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sistem perencanaan, pendataan, penilaian, penetapan, penatausahaan, pengelolaan keuangan, pembinaaan SDM, sistem pengawasan internal.

2.8. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran. Hal di atas bisa diperhatikan pada Tabel T-C.31 dan T-C.32 (terlampir).

2.9. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Disamping program/kegiatan rutin, program/kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah merupakan program/kegiatan yang menunjang pada kegiatan hasil rumusan perencanaan melalui Musrenbang yang dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Dimana Program/Kegiatan ini secara teknis ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, namun perencanaan, pelaporan dan pencairan dana dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara Hal di atas bisa diperhatikan pada Tabel T-C.31 (terlampir).

Tabel T-C.31.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Tapanuli Utara

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-			
	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-			
1.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	
2.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	
3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Mengacu kepada visi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yaitu "Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Tujuan Wisata". Sektor Pariwisata Indonesia khususnya daerah sekitar Danau Toba menjadi perhatian serius dan utama Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Kabupaten sekitar Danau Toba. Presiden Jokowi berniat menggarap sektor pariwisata lebih serius dan menjadikannya sebagai suatu industri dan andalan pendapatan negara. Tanpa ditetapkan sebagai industri, sulit bagi sektor Pariwisata untuk berkembang, mendatangkan devisa untuk negara dan bersaing dengan negara lain yang mempunyai obyek pariwisata terbatas tetapi diurus dengan serius, seperti yang dilakukan oleh Malaysia, Singapore, Vietnam dan lain lain. Keseriusan Pemerintah untuk menjadikan industri Pariwisata sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara di masa depan merupakan niat yang harus didukung dan diharapkan dipersiapkan secara serius oleh Pemerintah, bukan hanya sekedar *lips service*. Target 20 juta wisatawan manca negara (wisman) hingga akhir tahun 2023 merupakan target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Jokowi dan untuk dapat mencapai target tersebut harus dibuat strategi yang handal dari sisi kebijakan, kesiapan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusianya.

Namun dengan adanya pandemi Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid'19) yang secara langsung mempengaruhi perekonomian seluruh negara di dunia, termasuk Negara republik Indonesia dan secara langsung mempengaruhi pula dengan perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara. Dimana dengan adanya covid'19, maka dana yang seharusnya diprioritaskan pada pembangunan fisik, akhirnya dialihkan pada penanganan para pasien yang terkena virus dimaksud.

Dari seluruh daerah wisata yang ditetapkan, Pemerintah menunjuk 10 daerah wisata unggulan dengan anggaran yang tidak sedikit (sekitar 20 trilyun), baik untuk pengembangan industri pariwisatanya sendiri maupun

pembangunan infrastruktur penunjangnya, seperti bandara, pelabuhan laut/sungai/danau, jalan tol dan sebagainya.

Dalam mengantisipasi program Pemerintah Pusat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ikut mempersiapkan diri khususnya di bidang pariwisata dengan memperbaiki infrastruktur jalan di sekitar Danau Toba di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, pembenahan Bandara Silangit dan juga mempersiapkan Kota Muara sebagai kota wisata sebagai tempat penyelenggaraan event-event pariwisata seperti Festival Danau Toba (FDT) yang rencananya akan dilaksanakan setiap tahun. Dalam hal ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara juga mempersiapkan diri, terutama dalam hal penganggaran dana yang ditampung untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

3.2 Tujuan & Sasaran

3.2.1 Tujuan

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada misinya yang bertujuan :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja
2. Meningkatkan kualias tata kelola keuangan;

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang direncanakan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara merupakan lanjutan dari sasaran dari target Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025 - 2029:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah;
3. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025 adalah mengacu pada Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 - 2024. Program dan kegiatan dimaksud tertulis pada Tabel T-C.32 pada lampiran.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

1) Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang Keuangan dan Aset Daerah dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021- 2026 dan hasil review Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026;
3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas.
2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 3 program di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sebanyak 13 kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2025 secara total sebesar Rp. 280.474.938.604,00,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tapanuli Utara Program dan kegiatan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana Tabel T-C.32.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara dimana pagu indikatif program dimaksud akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja Tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi staf pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

T-C.32

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (terlampir).

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			**280.474.938.604,00**						**322.527.500.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**280.474.938.604,00**						**322.527.500.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**			**280.474.938.604,00**						**322.527.500.000,00**	
1,	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**5.366.730.995,00**					**-**	**10.623.000.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00			-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN	-	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P		75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

									EMBANGUNAN			
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.515.933.045,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN	-	8.196.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	4.067.498.245,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		7.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5000 Dokumen	443.254.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		1.190.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.180.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif		6.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	458.603.650,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN	-	422.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.010.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		12.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	8.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		13.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	200.514.450,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.999.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		12.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	199.830.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	-	-	1.100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

						Semua Kel/Desa						
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	285.559.700,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN	-	370.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.238.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.183.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240.138.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		320.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	56.634.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN	-	460.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	31.446.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEP		130.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

									ATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGU NAN			
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.117.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEP ATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGU NAN		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.070.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEP ATAN CAPAIAN KINERJA P		30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

									EMBANGUNAN			
2,	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**	**-**	**275.028.255.459,00**					**-**	**311.653.000.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	1.467.604.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN	-	1.250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS										
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	186.004.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

									KINERJA P EMBANGUNAN			
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	191.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	194.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

									EMBANGUNAN			
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	189.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran										
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Dokumen	99.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

									EMBANGUNAN			
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	605.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	75.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN	-	103.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah										

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		17.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	225 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		26.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	160 Orang	20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	75.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN	-	215.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran										

			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	6 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		35.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah										
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota										

			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		115.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	273.310.576.459,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN	-	310.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.131.773.659,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEP		4.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

									ATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGU NAN			
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan										
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	266.178.802.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA DESA	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif		300.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak										
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5.000.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEP ATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGU NAN		6.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	100.075.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN	-	85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	100.075.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3,	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**	**-**	**79.952.150,00**					**-**	**251.500.000,00**	

	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	79.952.150,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN	-	251.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	13.452.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		37.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah										

			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	13.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	14.387.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		15.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah										

			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	45 Dokumen	11.427.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		58.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan	14.478.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	45 Orang	12.818.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA P EMBANGUNAN		15.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H				**280.474.938.604,00**						**322.527.500.000,00**	

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

(PERUBAHAN RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

(BAPENDA)

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

TARUTUNG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap PD diharuskan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan PD untuk kurun waktu satu tahun. Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode tahun berjalan dalam triwulan akhir tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang ditempuh sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Perubahan Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Perubahan Renja PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Perubahan Renja PD selaras dengan Renstra PD.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan III menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Perubahan Renja PD tahun berjalan. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Perubahan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Perubahan Renja PD dan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Perubahan Renja PD dibahas pada forum PD yang dikoordinasikan oleh Bapelitbangda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, penyelarasan program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD yang didukung dengan penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD.

Perubahan Renja PD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bapelitbangda yang selanjutnya Perubahan Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 secara hirarki berpedoman pada perencanan Pembangunan Daerah yang dimulai dari rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dijabarkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025.Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2025 yang memuat program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata Kabupaten Tapanuli Utara yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara merupakan rencana pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024.
11. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah untuk memaduserasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025.

Arti Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai panduan/pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Renja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara, dan juga sebagai arahan dan acuan dalam pemanfaatan secara optimal sumber dana dan sumber daya yang dimiliki Renja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara sehingga mampu mengantisipasi perubahandan perkembangan yang ada melalui kerjasama kemitraan dengan segenap komponen terkait untuk mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Sementara tujuan disusunnya Rencana Kerja Renja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk memasukkan program yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Tahun 2025 yakni:

a. Sebagai acuan/arah bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam menyusun program/kegiatan prioritas Tahun 2025 berdasarkan ketersediaan sumberdaya dalam rangka mencapai Kabupaten Tapanuli Utara sebagai kabupaten termaju di Indonesia;
b. Merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) KabupatenTapanuli Utara pada Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dalam sistematika sebagaiberikut:

BAB I. PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan
Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara.

2.2. Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja,baik yang berskala nasional, maupun lokal.

2.3. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Renja.

2.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU (BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD yang memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berlangsung dimaksudkan adalah proses penilaian pencapaian kinerja untuk peningkatan kualitas kinerja program. Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 memuat hasil evaluasi pelaksanaan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rencana program/kegiatan Tahun Anggaran 2025. Penyusunan rencana program/kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.

Adapun pencapaian target dan realisasi pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu	Sumber Dana	Realisasi	Persentase
5.02.0.00.0.00.03.0000	**BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TAPANULI UTARA**	**5.350.843.694**		**3.555.695.269**	**66,45**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.087.898.044**		**3.006.123.048**	**73,54**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.947.000,00**		**12.762.000,00**	**80,03**
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	DAU	3.000.000,00	100,00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00	DAU	3.000.000,00	100,00
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.000.000,00	DAU	3.000.000,00	100,00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.947.000,00	DAU	3.762.000,00	54,15
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.545.186.201**		**2.724.104.170**	**77,84**
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.388.707.401	DAU	2.609.230.970	77
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	156.478.800	DAU	114.873.200	73.41
5.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
5.02.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	0,00	DAU	0,00	0,00
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**146.110.792,00**		**88.164.869,00**	**60,34**
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.563.192,00	DAU	6.486.500,00	98,83
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.483.200,00	DAU	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.059.000,00	DAU	6.934.000,00	86,04
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.402.400,00	DAU	11.550.000,00	74,99
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.603.000,00	DAU	63.194.369,00	60,41
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**124.458.700,00**		**0,00**	**0,00**
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.958.700	DAU	0,00	0,00
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000	DAU	0,00	0,00
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**141.200.00**		**114.325.053**	**80,97**

5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	DAU	2.000.000	100,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.200.000	DAU	16.325.053	64.78
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.000.000	DAU	96.000,00	84,21
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**114.995.351**		**96.000.000**	**84,21**
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.706.751	DAU	36.135.058	38.98
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.582.800,00	DAU	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.705.800,00	DAU	5.282.600,00	68,55
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.262.936.650**		**549.572.221**	**43.52**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**1.262.936.650**		**549.572.221**	**43.52**
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	59.209.000	DAU	21.095.500	10
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	68.552.900	DAU	7.503.000	10,94
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	119.233.300	DAU	22.675.000	19,02
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	19.218.400	DAU	13.388.398	69,66
5.02.01.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	130.000.000	DAU	59.623.074	45,86
5.02.01.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	60.000.000	DAU	39.286.150	65,48
5.02.01.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	156.000.000	DAU	131.440.950	84,26
5.02.01.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	34.814.400	DAU	23.508.800	67,53
5.02.01.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	56.265.450	DAU	8.952.400	15,91
5.02.01.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	116.343.200	DAU	49.605.874	42.64
5.02.01.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	360.369.000	DAU	134.854.575	37,42
5.02.01.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	68.475.000	DAU	30.064.500	43,91
5.02.01.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	14.456.000	DAU	7.574.000	52,39

Dari evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terdapat kegiatan-kegiatan yang telah sesuai dengan tahapan target. Selain beberapa anggaran mengalami efisiensi terdapat beberapa kegiatan yang tidak mengalami PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025.

Perubahan namun terdapat juga kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran karena refokusing. Perubahan anggaran pada program/kegiatan dituangkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025. Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki target kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun Realialisasi PAD Sampai Bulan September 2025 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P APBD TA 2025 (Rp)	REALIASAI	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*
4	***PENDAPATAN DAERAH***	***1.445.042.643.252,00***	***1.036.964.058.101,01***	***71,76***
4.1	***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***	***154.000.000.000,00***	***113.890.383.342,01***	***73,95***
4.1.01	**Pajak Daerah**	**38.503.750.000,00**	***26.320.774.635,00***	**68,36**
4.1.01.09	**Pajak Reklame**	**850.000.000,00**	***671.567.807,00***	**79,01**
4.1.01.09.01.0001	- - Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	720.000.000,00	*544.897.493,00*	75,68
4.1.01.09.02.0001	- - Pajak Reklame Kain	100.000.000,00	*99.107.814,00*	99,11
4.1.01.09.05.0001	- - Pajak Reklame Berjalan	30.000.000,00	*27.562.500,00*	91,88
4.1.01.12	**Pajak Air Tanah**	**160.000.000,00**	***139.856.582,00***	**87,41**
4.1.01.12.01.0001	- - Pajak Air Tanah	160.000.000,00	*139.856.582,00*	87,41
4.1.01.14	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**2.000.000.000,00**	***1.126.565.155,00***	**56,33**
4.1.01.14.37.0001	- - Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000.000,00	*1.126.565.155,00*	56,33
4.1.01.15	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**5.000.000.000,00**	***3.036.643.966,00***	**60,73**
4.1.01.15.01.0001	- - PBBP2	5.000.000.000,00	*3.036.643.966,00*	60,73
4.1.01.16	**Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**6.050.000.000,00**	***4.843.993.700,00***	**80,07**
4.1.01.16.01.0001	- - BPHTB-Pemindahan Hak	6.050.000.000,00	*4.843.993.700,00*	80,07
4.1.01.19	**Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) :**	**13.500.000.000,00**	***8.609.297.427,00***	**63,77**
4.1.01.19.01	**PBJT-Makanan dan/atau Minuman**	**4.000.000.000,00**	***2.250.464.020,00***	**56,26**
4.1.01.19.01.0001	- - PBJT-Restoran	3.300.000.000,00	*1.852.180.020,00*	56,13
	- Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan /Tamu	1.600.000.000,00	*982.643.653,00*	61,42
	- Rumah Makan/Restoran dll	1.700.000.000,00	*869.536.367,00*	51,15
4.1.01.19.01.0002	- - PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	700.000.000,00	*398.284.000,00*	56,90
4.1.01.19.02	**PBJT - Tenaga Listrik**	**8.750.000.000,00**	***5.923.727.792,00***	**67,70**
4.1.01.19.02.0001	- - PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	8.750.000.000,00	*5.923.727.792,00*	67,70
4.1.01.19.03	**PBJT-Jasa Perhotelan**	**350.000.000,00**	***166.765.515,00***	**47,65**
4.1.01.19.03.0001	- - PBJT-Hotel	350.000.000,00	*166.765.515,00*	47,65
4.1.01.19.04	**PBJT-Jasa Parkir**	**350.000.000,00**	***239.149.100,00***	**68,33**
4.1.01.19.04.0001	- - PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	350.000.000,00	*239.149.100,00*	68,33
4.1.01.19.05	**PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan**	**50.000.000,00**	***29.191.000,00***	**58,38**
4.1.01.19.05.0006	- - PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	-	-	0,00

4.1.01.19.05.0007	- PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	*3.000.000,00*	60,00
4.1.01.19.05.0008	- PBJT-Permainan Ketangkasan	1.000.000,00	*3.500.000,00*	350,00
4.1.01.19.05.0009	- PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	4.500.000,00	*1.011.000,00*	22,47
4.1.01.19.05.0010	- PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	21.500.000,00	*12.680.000,00*	58,98
4.1.01.19.05.0012	- PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	18.000.000,00	*9.000.000,00*	50,00
4.1.01.20	**Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**	**7.283.136.000,00**	***5.222.765.948,00***	**71,71**
4.1.01.20.01.0001	- Opsen PKB	7.283.136.000,00	*5.222.765.948,00*	71,71
4.1.01.21	**Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**	**3.660.614.000,00**	***2.670.084.050,00***	**72,94**
4.1.01.21.01.0001	- Opsen BBNKB	3.660.614.000,00	*2.670.084.050,00*	72,94
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**94.877.368.000,00**	***67.241.989.604,00***	**70,87**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**	**89.075.768.000,00**	***65.207.901.804,00***	**73,20**
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	87.380.000.000,00	*64.303.817.004,00*	73,59
4.1.02.01.01.0001	- Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	80.000.000,00	*77.186.500,00*	96,48
4.1.02.01.01.0005	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	87.300.000.000,00	*64.226.630.504,00*	73,57
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	*65.340.000,00*	43,56
4.1.02.01.04.0001	- Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	*65.340.000,00*	43,56
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.000.000.000,00	*605.814.000,00*	60,58
4.1.02.01.05.0001	- Retribusi Pelataran	500.000.000,00	*262.616.000,00*	52,52
4.1.02.01.05.0002	- Retribusi Los	300.000.000,00	*229.978.000,00*	76,66
4.1.02.01.05.0003	- Retribusi Kios	200.000.000,00	*113.220.000,00*	56,61
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	545.768.000,00	*232.930.800,00*	42,68
4.1.02.01.14.0001	- Retribusi Pelayanan Persampahan	495.768.000,00	*229.030.800,00*	46,20
4.1.02.01.14.0002	- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	*3.900.000,00*	7,80
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.283.600.000,00**	***869.173.903,00***	**38,06**
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00	*5.450.000,00*	10,90

4.1.02.02.06.0001	- Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila	50.000.000,00	*5.450.000,00*	10,90
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	80.800.000,00	*25.845.000,00*	31,99
4.1.02.02.12.0001	- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	80.800.000,00	*25.845.000,00*	31,99
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	170.000.000,00	*93.692.000,00*	55,11
4.1.02.02.14.0001	-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	170.000.000,00	*93.692.000,00*	55,11
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	20.000.000,00	*10.300.000,00*	51,50
4.1.02.02.15.0001	-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	20.000.000,00	*10.300.000,00*	51,50
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	400.800.000,00	*231.341.096,00*	57,72
4.1.02.02.17.0001	-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	400.800.000,00	*231.341.096,00*	57,72
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.562.000.000,00	*502.545.807,00*	32,17
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.562.000.000,00	*502.545.807,00*	32,17
	- Penyewaan Tanah dan Bangunan	16.500.000,00	*14.000.000,00*	84,85
	- Lapangan Olahraga	*16.500.000,00*	*14.000.000,00*	84,85
	- Penyewaan Tanah	*710.000.000,00*	*153.170.207,00*	21,57
	- Luar Pekan	*600.000.000,00*	*151.849.602,00*	25,31
	- Dalam Pekan	*80.000.000,00*	*1.320.605,00*	1,65
	- Terminal Madya Tarutung	*30.000.000,00*	-	0,00
	- Pemakaian Ruangan	*223.500.000,00*	*117.850.000,00*	52,73
	- Pemakaian Kendaraan Bermotor	*592.000.000,00*	*213.325.600,00*	36,03
	- Sewa Alat Berat (Dinas PUTR)	*400.000.000,00*	*89.800.000,00*	22,45
	- Sewa Alat Berat (Dinas Ketapang)	*30.000.000,00*	*13.200.000,00*	44,00
	- Sewa Traktor (Dinas Pertanian)	*150.000.000,00*	*102.525.600,00*	68,35
	- Bus Pemda	*12.000.000,00*	*7.800.000,00*	65,00
	- Pemakaian Alat (Bagum Setdakab)	*20.000.000,00*	*4.200.000,00*	21,00
4.1.02.03	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**3.518.000.000,00**	***1.164.913.897,00***	**33,11**
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000,00	*1.125.625.897,00*	32,16
4.1.02.03.07.0001	-Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000,00	*1.125.625.897,00*	32,16

4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	18.000.000,00	*39.288.000,00*	218,27
4.1.02.03.08.0001	-Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	18.000.000,00	*39.288.000,00*	218,27
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**9.057.524.807,00**	***9.057.524.807,00***	**100,00**
4.1.03.02	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**	**9.057.524.807,00**	***9.057.524.807,00***	**100,00**
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.857.524.807,00	*8.857.524.807,00*	100,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	200.000.000,00	*200.000.000,00*	100,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**11.561.357.193,00**	***11.270.094.296,01***	**97,48**
4.1.04.01	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**510.000.000,00**	***150.000.000,00***	**29,41**
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	500.000.000,00	*149.000.000,00*	29,80
4.1.04.01.02.0054	- - Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	500.000.000,00	*149.000.000,00*	29,80
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	10.000.000,00	*1.000.000,00*	10,00
4.1.04.01.08.0001	- - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	10.000.000,00	*1.000.000,00*	10,00
4.1.04.03	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**200.000.000,00**	***85.366.875,00***	**42,68**
4.1.04.03.01.0001	- Hasil Sewa BMD	200.000.000,00	*85.366.875,00*	42,68
4.1.04.04	**Hasil Kerja Sama Daerah**	**116.161.290,00**	***36.330.180,00***	**31,28**
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	116.161.290,00	*36.330.180,00*	31,28
4.1.04.05	**Jasa Giro**	**385.195.903,00**	***285.796.489,00***	**74,20**
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	385.195.903,00	*285.796.489,00*	74,20
4.1.04.07	**Pendapatan Bunga**	**100.000.000,00**	***11.150.879,00***	**11,15**
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	100.000.000,00	-	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga/Renumerasi TDF	-	*11.150.879,00*	0,00
4.1.04.11	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**1.900.000.000,00**	***2.060.802.920,11***	**108,46**
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.900.000.000,00	*2.060.802.920,11*	108,46
4.1.04.15	**Pendapatan dari Pengembalian**	**8.200.000.000,00**	***8.028.385.524,90***	**97,91**
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	8.200.000.000,00	*8.028.385.524,90*	97,91
4.1.04.16	**Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah**	**150.000.000,00**	***612.261.428,00***	**408,17**

4.1.04.16.06					Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	150.000.000,00	*612.261.428,00*	408,17
4.2		**PENDAPATAN TRANSFER**				**1.262.595.437.124,00**	***916.686.496.981,00***	**72,60**
4.2.01			**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**			**1.188.936.596.000,00**	***878.716.896.673,00***	**73,91**
4.2.01.05				**Dana Desa**		**193.023.433.000,00**	***114.986.807.878,00***	**59,57**
4.2.01.05.01.0001					Dana Desa	193.023.433.000,00	*114.986.807.878,00*	59,57
4.2.01.06				**Insentif Fiskal**		**14.881.571.000,00**	***7.479.871.000,00***	**50,26**
4.2.01.06.02.0001					Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.881.571.000,00	*7.479.871.000,00*	50,26
4.2.01.07					**Dana Bagi Hasil (DBH)**	**75.444.726.000,00**	***50.568.974.000,00***	**67,03**
4.2.01.07.01				-	DBH Pajak	**55.665.540.000,00**	***35.308.534.800,00***	63,43
4.2.01.07.01.0001				-	- DBH PBB	**42.790.071.000,00**	*27.022.029.800,00*	63,15
	PBB Sektor Perkebunan	PBB Sektor Perkebunan	PBB Sektor Perkebunan	PBB Sektor Perkebunan	PBB Sektor Perkebunan	1.528.373.000,00	*917.023.800,00*	60,00
					PBB Sektor Perkebunan TDF	336.148.000,00	*336.148.000,00*	100,00
					PBB Sektor Perkebunan KB	588.420.000,00	*588.420.000,00*	100,00
	PBB Sektor Perhutanan	PBB Sektor Perhutanan	PBB Sektor Perhutanan	PBB Sektor Perhutanan	PBB Sektor Perhutanan	1.301.745.000,00	*781.047.000,00*	60,00
					PBB Sektor Perhutanan KB	76.821.000,00	*76.821.000,00*	100,00
	PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	734.956.000,00	*440.973.600,00*	60,00
					PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi KB	189.191.000,00	*189.191.000,00*	100,00
					PBB Sektor Pertambangan Non Migas KB	61.700.000,00	*61.700.000,00*	100,00
	PBB Sektor Pertambangan Pengusahaan Panas Bumi	PBB Sektor Pertambangan Pengusahaan Panas Bumi	PBB Sektor Pertambangan Pengusahaan Panas Bumi	PBB Sektor Pertambangan Pengusahaan Panas Bumi	PBB Sektor Pertambangan Pengusahaan Panas Bumi	35.408.058.000,00	*21.244.834.800,00*	60,00
					PBB Sektor Pertambangan Pengusahaan Panas Bumi KB	2.069.932.000,00	*2.069.932.000,00*	100,00
	PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	165.070.000,00	-	0,00
	PBB Sektor Lainnya	PBB Sektor Lainnya	PBB Sektor Lainnya	PBB Sektor Lainnya	PBB Sektor Lainnya	281.901.000,00	*169.140.600,00*	60,00
					PBB Sektor Lainnya TDF	19.880.000,00	*19.880.000,00*	100,00
					PBB Sektor Lainnya KB	27.875.000,00	*27.875.000,00*	100,00
	PBB Sektor Lainnya	PBB Sektor Lainnya	PBB Sektor Lainnya	PBB Sektor Lainnya	PBB Non Migas Lainnya	-	*99.042.000,00*	0,00
	PBB Sektor Lainnya	PBB Sektor Lainnya	PBB Sektor Lainnya	PBB Sektor Lainnya	Biaya Pemungutan Panas Bumi TDF	1.000,00	*1.000,00*	100,00
4.2.01.07.01.0002				-	- DBH PPh Pasal 21	8.756.205.000,00	*5.253.723.000,00*	60,00

		DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 KB	1.205.553.000,00	*1.205.553.000,00*	100,00
			9.961.758.000,00	**6.459.276.000,00**	**64,84**
4.2.01.07.01.0003	-	- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	527.052.000,00	*316.231.200,00*	60,00
		DBH Pajak Penghasilan Pasal 25/29 WPOPDN KB	128.019.000,00	*128.019.000,00*	100,00
			655.071.000,00	**444.250.200,00**	**67,82**
4.2.01.07.01.0004	-	- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.189.153.000,00	*1.313.491.800,00*	60,00
		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) KB	69.487.000,00	*69.487.000,00*	100,00
			2.258.640.000,00	**1.382.978.800,00**	**61,23**
4.2.01.07.02	-	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	**17.079.072.000,00**	*13.910.382.200,00*	81,45
4.2.01.07.02.0001	-	- DBH SDA Minyak Bumi	11.280.000,00	*11.280.000,00*	100,00
		- DBH SDA Minyak Bumi TDF	1.000,00	*1.000,00*	100,00
4.2.01.07.02.0002		- DBH SDA Gas Bumi	1.050.000,00	*1.050.000,00*	100,00
4.2.01.07.02.0003		- DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	135.595.000,00	*111.702.200,00*	82,38
		Iuran Produksi	109.050.000,00	*87.240.000,00*	80,00
		Iuran Produksi TDF	6.414.000,00	*6.414.000,00*	100,00
		Iuran Produksi KB	8.993.000,00	*8.993.000,00*	100,00
		Iuran Tetap	10.414.000,00	*8.331.200,00*	80,00
		Iuran Tetap TDF	301.000,00	*301.000,00*	100,00
		Iuran Tetap KB	423.000,00	*423.000,00*	100,00
4.2.01.07.02.0004		- DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	294.405.000,00	*235.524.000,00*	80,00
		- DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent TDF	7.587.000,00	*7.587.000,00*	100,00
		DBH SDA Mineral dan Batubara - Landrent KB	10.638.000,00	*10.638.000,00*	100,00
4.2.01.07.02.0005		- DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	14.161.513.000,00	*11.329.210.400,00*	80,00
		- DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty TDF	397.962.000,00	*397.962.000,00*	100,00
		DBH SDA Mineral dan Batubara - Royalti KB	558.021.000,00	*558.021.000,00*	100,00
4.2.01.07.02.0006		- DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	416.891.000,00	*333.512.800,00*	80,00
		- DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) TDF	96.975.000,00	*96.975.000,00*	100,00
		DBH SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) KB	135.978.000,00	*135.978.000,00*	100,00
4.2.01.07.02.0009		- DBH SDA Perikanan	851.176.000,00	*680.940.800,00*	80,00
4.2.01.07.03		DBH Lainnya	**2.700.114.000,00**	*1.350.057.000,00*	50,00

4.2.01.07.03.0001	- DBH Sawit	2.700.114.000,00	*1.350.057.000,00*	50,00
4.2.01.08	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**675.701.250.000,00**	***555.061.753.000,00***	**82,15**
4.2.01.08.01	- DAU yang tidak ditentukan Penggunaannya	586.029.870.000,00	*488.358.220.000,00*	83,33
4.2.01.08.01.0001	- DAU yang tidak ditentukan Penggunaannya	586.029.870.000,00	*488.358.220.000,00*	83,33
4.2.01.08.02	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya	89.671.380.000,00	*66.703.533.000,00*	74,39
4.2.01.08.02.0001	- - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.200.000.000,00	*1.100.000.000,00*	50,00
4.2.01.08.02.0004	- - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	52.691.025.000,00	*39.518.268.000,00*	75,00
4.2.01.08.02.0005	- - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	34.780.355.000,00	*26.085.265.000,00*	75,00
4.2.01.08.02.0006	- - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-	0,00
4.2.01.09	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**	**229.885.616.000,00**	***150.619.490.795,00***	**65,52**
4.2.01.09.01	- **DAK Fisik**	**4.805.395.000,00**	***4.772.399.978,00***	**99,31**
4.2.01.09.01.0067	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	485.726.000,00	*459.449.976,00*	94,59
4.2.01.09.01.0075	- - DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	4.217.790.000,00	*4.214.650.000,00*	99,93
4.2.01.09.01.0076	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	101.879.000,00	*98.300.002,00*	96,49
4.2.01.09.01.0081	- DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	-	-	0,00
4.2.01.09.01.0088	- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	-	-	0,00
4.2.01.09.01.0090	- DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	-	-	0,00
4.2.01.09.02	**DAK Non Fisik**	**225.080.221.000,00**	***145.847.090.817,00***	64,80
4.2.01.09.02.0001	- DAK Non Fisik-BOS Reguler	60.779.777.000,00	*60.779.528.399,00*	100,00

4.2.01.09.02.0 003	- DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.275.750.000,00	*2.275.750.000,00*	100,0 0
4.2.01.09.02.0 023	- DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.441.920.000,00	*2.719.976.692,00*	49,98
	Bidang Pangan	2.500.000.000,00	*1.250.000.000,00*	50,00
	Bidang Pertanian	2.294.400.000,00	*1.146.216.692,00*	49,96
	Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	647.520.000,00	*323.760.000,00*	50,00
4.2.01.09.02.0 028	- DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.475.160.000,00	*3.861.730.000,00*	86,29
4.2.01.09.02.0 029	- DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	*30.000.000,00*	100,0 0
4.2.01.09.02.0 030	- DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	769.680.000,00	*764.245.500,00*	99,29
4.2.01.09.02.0 031	- DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	*45.000.000,00*	100,0 0
4.2.01.09.02.0 033	- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kot a	11.969.066.000,00	*4.674.038.302,00*	39,05
4.2.01.09.02.0 034	- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	279.958.000,00	*139.979.000,00*	50,00
4.2.01.09.02.0 035	- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18.321.519.000,00	*12.084.195.109,00*	65,96
4.2.01.09.02.0 036	- DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	104.536.716.000,00	*51.974.680.100,00*	49,72
4.2.01.09.02.0 037	- DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.772.250.000,00	*790.500.000,00*	44,60
4.2.01.09.02.0 038	- DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	6.154.925.000,00	*1.885.768.600,00*	30,64
4.2.01.09.02.0 039	- DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	8.228.500.000,00	*3.821.699.115,00*	46,44
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**73.658.841.124,00**	***37.969.600.308,00***	**51,55**
4.2.02.01	**- Pendapatan Bagi Hasil**	**71.662.700.124,00**	***37.969.600.308,00***	**52,98**
4.2.02.01.01.0 001	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.003.131.957,00	*9.865.712.708,00*	61,65
4.2.02.01.01.0 002	- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.263.098.318,00	*5.287.705.759,00*	57,08
4.2.02.01.01.0 003	Pendapatan Bagi Hasil	23.133.913.623,00	*10.638.364.960,00*	45,99

	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.082.775.252,00	*705.089.761,00*	33,85
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.179.780.974,00	*11.472.727.120,00*	54,17
4.2.02.02	**Bantuan Keuangan**	**1.996.141.000,00**	**-**	**0,00**
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.996.141.000,00	-	0,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**28.447.206.128,00**	***6.387.177.778,00***	**22,45**
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**28.447.206.128,00**	***6.387.177.778,00***	**22,45**
4.3.03.02	**Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP**	**15.304.952.107,00**	**-**	**0,00**
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.304.952.107,00	-	0,00
4.3.03.05	**Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi**	**1.042.254.021,00**	**-**	**0,00**
4.3.03.05.01.0001	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Non kapitasi	1.042.254.021,00	-	0,00
4.3.03.06	**Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi**	**12.100.000.000,00**	***6.387.177.778,00***	**52,79**
4.3.03.06.01.0001	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	12.100.000.000,00	*6.387.177.778,00*	52,79
PENDAPATAN KABUPATEN TAPANULI UTARA		***1.445.042.643.252,00***	***1.036.964.058.101,01***	***71,76***

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 ayat (2), memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Kebutuhan pendanaan dalam RPJMD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun yang dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat diselaraskan, yang secara rinci terlampir dalam Perubahan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025.

PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025

No	Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah
					Tolak Ukur	Hasil Program	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH										5.802.684.836	5.350.834.694
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4.466.023.636	4.087.898.044
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										26.396.000	15.947.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	3.000.000	3.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	3.000.000	3.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	17.396.000	6.947.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3.679.233.686	3.545.186.201
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	3.534.514.886	3.388.707.401
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			jumlah laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Laporan	jumlah laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Laporan	144.718.800	156.478.800
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										8.160.000	0
7	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			jumlah dokumen Ketetapan retribusi daerah	100 dokumen	jumlah dokumen Ketetapan retribusi daerah	100 dokumen	8.160.000	0

		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**321.960.350**	**146.110.792**
8		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0 paket	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0 paket	25.474.300	6.563.192
9		Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	28.712.050	11.483.200
10		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	1 paket	jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	1 paket	20.148.000	8.059.000
11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	38.506.000	15.402.400
12		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	0	0
13		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	209.120.000	104.603.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**251.741.600**	**124.458.700**
14		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	200.240.700	121.958.700
15		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	51.500.900	2.500.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**98.666.153**
16		Penyediaan jasa surat menyurat	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	jumlah: laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	5.000.000	2.000.000
17		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	31.800.000	25.200.000
18		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	240.000.000	114.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**153.473.600**	**114.995.351**

19		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	94.246.500	92.706.751
20		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	36.807.900	14.582.800
21		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	22.419.200	7.705.800
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										**10.000.000**	**0**
22.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA						1 dokum	5.000.000	
23.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA						1 dokum	5.000.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										**1.326.661.200**	**1.262.936.650**
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											
24		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			jumlah dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	jumlah dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	45.845.000	59.209.000
25		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	3 dokumen	jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	3 dokumen	57.370.400	68.552.900
26		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			jumlah dokumen Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	jumlah dokumen Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	159.214.200	119.233.300
27		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1 unit	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1 unit	40.000.000	19.218.400
28		Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			jumlah laporan hasil Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	1 laporan	jumlah laporan hasil Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	1 laporan	130.000.000	130.000.000
29		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	0	0
30		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA			jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	1 objek pajak	jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	1 objek pajak	60.000.000	60.000.000

31			Penetapan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	1 dokumen	jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	1 dokumen	156.000.000	156.000.000
32			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	1 layanan	jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	1 layanan	34.814.400	34.814.400
33			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifil:asi	1 dokumen	jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	1 dokumen	28.004.600	56.265.450
34			Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1 dokumen	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1 dokumen	116.343.200	116.343.200
35			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	jumlah dokumen hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 dokumen	jumlah dokumen hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 dokumen	0	0
35			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	jumlah dokumen hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 dokumen	jumlah dokumen hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 dokumen	389.962.200	360.369.000
36			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BAPENDA	BAPENDA	BAPENDA	jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 laporan	jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 laporan	89..107.200	68.475.000
37			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BAPENDA		Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	1 dokumen	jumlah dokumen jumlah dokumen elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	1 dokumen	20.000.000	14.456.000

Tarutung, September 2025
KEPALA BADAN,

JOSUA P.SITUMEANG, S.STP, M.SP
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19841002 200212 1 001

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2025. Dengan adanya dokumen Perubahan Rencana Keja Tahun 2025 ini diharapkan dapat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara Pogram dan kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat mendukung tercapainya target dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Pogram dan kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat mendukung tercapainya target dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini juga sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.
4. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari program kerja sebelumnya, guna memberikan arah dan pedoman pelaksanaan tugas sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjaga konsistensi dan mencapai target capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan, Visi dan Misi Daerah.
5. Sebagai langkah tindak lanjut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya melakukan penyempurnaan dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan melalui :
   1. Peningkatan kompetensi SDM
   2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah.
   3. Meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan aturan perpajakan untuk mendorong kepatuhan masyarakat.
   4. Optimalisasi penagihan dan pengurangan piutang
   5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas, kendala maupun keberhasilan suatu program atau kegiatan KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapanuli Utara,ini disusun untuk terwujudnya penatausahaan keuangan dan kekayaan daerah yang sesuai, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Tarutung, September 2025

KEPALA BADAN,

JOSUA P.SITUMEANG.,S.STP, M.SP
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19841002 200212 1 001

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan kinerja perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnta disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025-2029.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025-2029.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renja PD Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2026.

Pasal 4

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 31 - 10 - 2025

BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 31 - 10 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV.a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 27 TAHUN 2025
TANGGAL : 31-10- 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2026.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RenjaPerangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat di bidang perencanaan yang tumbuh dan berkembang di Daerah berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu juga mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD dan dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 adalah untuk mengesahkan dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan pembangunan Daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah.

2. Adapun tujuannya adalah untuk:
   1) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.
   2) mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan; dan
   3) mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah serta usulan kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, perguruan tinggi, maupun anggota legislatif sebagai kompilasi hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

Perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, dan satuan, pagu indikatif, lokasi per Perangkat Daerah dirangkum dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026. Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Daerah dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 diupayakan melalui klarifikasi dan verifikasi dalam penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 meliputi:

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;
20. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Rencana Kerja Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Rencana Kerja Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Rencana Kerja Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;

34. Rencana Kerja Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Rencana Kerja Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Rencana Kerja Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Rencana Kerja Kecamatan Simagumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Rencana Kerja Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Rencana Kerja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Rencana Kerja Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Rencana Kerja Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Rencana Kerja Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Rencana Kerja Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Rencana Kerja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Rencana Kerja Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB III
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping itu, Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaannya. Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran program dan efektivitas pembangunan, perlu sinkronisasi dan komitmen seluruh Perangkat Daerah. Masing-masing Perangkat Daerah diharapkan mengambil peran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam rangka mewujudkan penguatan kemandirian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang sehat dan produktif, menuju swasembada pangan serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif.

BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV.a)
NIP. 197709102006042004

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Letjend S. Parman No. 1b Telp. (0633) 21512, Fax. (0633) 20667
web site: http://www.taputkab.go.id, e-mail: Bappelitbangda@taputkab.go.id
T A R U T U N G

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR: 23 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) dilingkungan masing-masing ;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tapanuli Utara, tentang Penetapan Perubahan IKU (Indikator Kinerja Utama) Bappelitbangda 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korups, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tntang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2025

MEMUTUSKAN

KESATU : Menetapkan Perubahan IKU (Indikator Kinerja Utama) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Penyusunan Perubahan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
b. Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara yang dlaksanakan setiap tahun.

KETIGA Perubahan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA).

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di T a r u t u n g
Pada tanggal Oktober 2025

Plt. Kepala Beppelitbangda,

Kartini Eva Christina Nahampun, S.STP, M.SP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19841025200212002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR: Tahun 2025 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiasn dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	**Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembagunan**	**Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan**	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1. Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah
				2. Persentase Program RKPD selaras dengan Renja Perangkat Daerah
				3. Persentase Program RKPD selaras dengan APBD
				4. Persentase Pencapaian dari Indikator Kinerja Daerah
			2. Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar Perumusan Kebijkan Pembangunan Daerah	Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan
			3. Meningkatnya Tata Kelola Bappelitbangda yang Baik, Bersih dan Akuntabel.	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR: 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2025

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
					2020	2021	2022	2025	2025
1	**Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembagunan**	**Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan**			B	B	BB	A	A
			1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	a. Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
				b. Persentase Program RKPD selaras dengan Renja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
				c. Persentase Program RKPD selaras dengan APBD	100%	100%	100%	100%	100%
				d. Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			2. Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar Perumusan Kebijkan Pembangunan Daerah	Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Meningkatnya Tata Kelola Bappelitbangda yang Baik, Bersih dan Akuntabel.	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten	B	B	BB	A	A
				b. Persentase Tindaklanjut Temuan BPK	100%	100%	100%	100%	100%

				dan Inspektorat Kabupaten					

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiasn dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	**Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembagunan**	**Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan**			**A**
			1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	a. Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	**100%**
				b. Persentase Program RKPD selaras dengan Renja Perangkat Daerah	**100%**
				c. Persentase Program RKPD selaras dengan APBD	**100%**
				d. Persentase Pencapaian dari Indikator Kinerja Daerah	**100%**
			A. Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar Perumusan Kebijkan Pembangunan Daerah	Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	**100%**
			B. Meningkatnya Tata Kelola Bappelitbangda yang Baik, Bersih dan Akuntabel.	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten	**A**

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR: 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020-2025

INDIKATOR KERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020-2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	% Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD = ∑ Program RENSTRA Tahun n ----------X 100 % ∑ Program RPJMD tahun ke n	Dokumen RPJMD, RKPD, RENSTRA RENJA & RTRW
		2. Persentase Program RKPD selaras dengan Renja Perangkat Daerah	% Keselarasan Program RENJA terhadap RKPD = ∑ Program RENJA Tahun n ----------X 100 % ∑ Program RKPD tahun ke n	Dokumen RPJMD, RKPD, RENSTRA RENJA
		3. Persentase Program RKPD selaras dengan APBD	% Keselarasan Program APBD terhadap RKPD = ∑ Program APBDTahun n ----------X 100 % ∑ Program RKPD tahun ke n	Dokumen RPJMD, RKPD, RENSTRA RENJA
2.	Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar Perumusan Kebijkan Pembangunan Daerah	Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	Pemanfaatan hasil kelitbangan yang dimaksud adalah PD menindaklanjuti hasil kelitbangan terkait dalam bentuk Program/Kegiatan ataupun perbaikan Tata kelola/Layanan PD yang bersangkutan.	Laporan Kelitbangan

			Kegiatan kelitbangan adalah Kegiatan penelitian dan pengembangan yang pernah dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi maupun Lembaga Litbang lainnya. % Hasil kelitbangan yang diimplementasikan = ∑ Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan ole PD ---------- X 100 % ∑ Kegiatan Kelitbangan	
3.	Meningkatnya Tata Kelola Bappelitbangda yang Baik, Bersih dan Akuntabel.	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten	Hasil Perhituangan INSpekrtorat Kabupaten	Inspektorat

Ditetapkan di T a r u t u n g
Pada tanggal Oktober 2025

Plt. Kepala Beppelitbangda,

Kartini Eva Christina Nahampun, S.STP, M.SP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19841025200212002

2025

DINAS PARIWISATA

KABUPATEN TAPANULI UTARA

wonderful indonesia

RENCANA KERJA (RENJA)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II EVALUASI RENJA DINAS PARIWISATA KAB.TAP. UTARA TAHUN 2024 .. 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kab. Tap. Utara 11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata 12
a. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12
b. Permasalahan/Hambatan 13
c. Dampak Program Dinas Pariwisata Kab. Tap. Utara terhadap Visi dan Misi Bupati Tapanuli Utara 14
d. Isu Strategis 14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 19
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kab. Tap. Utara 21
3.3 Program dan Kegiatan 22
BAB IV PENUTUP 23
LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana KerjaPemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja(Renja) Perubahan setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD maka Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara perlu menyusun Rencana KerjaPerangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2024 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah, disusun dengan me mpertimbangkan sasaran strategis Perangkat Daerah dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahun 2025.

KEPALA DINA S PARIWISATA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

SASMA H. SITUMORANG, S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 197704251997111001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organiasai Perangkat Daerah, Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan perencanaan kerja. Perencanaan terdiri dari dua elemen penting, yaitu *sasaran (goals)* dan rencana itu sendiri *(plan)*. Dalam menetapkan sasaran, masyarakat sebagai stake holder diharapkan menjadi pemain utama. Partisipasi masyarakat dan kemampuan untuk menangkap dan menerjemahkan tuntutan publik menjadi faktor penting dalam proses perencanaan. Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPD paruh ke dua dari RPJP-D Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024, yaitu

"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung SDM yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata", pencapaiannya didukung dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan
4. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*

Selain menjadi salah satu Visi Kabupaten Tapanuli Utara, dari kedelapan misi di atas, yang erat kaitannya dengan Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara adalah misi ke lima.

Rencana Kerja(Renja) Dinas Pariwisata mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang secara rinci pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara nomor : 4 Tahun 2024

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Rencana KerjaSatuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang- undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana KerjaPemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh ASN dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka mendukung Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara ini dimaksudkan untuk membuat Rencana Kerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2024 dan RENSTRA Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara 2020–2024 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD;
2. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan di bidang Pariwisata Tahun 2025;
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun 2025;
4. Untuk memadukan gerak antara pemerintah, pelaku pariwisata, pelaku seni dan budaya serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja(Renja) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja(Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara dan menjelaskan kedudukan Rancangan Awal Renja terhadap dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kondisi Fisik dan Keuangan sampai Tahun 2024

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kondisi tahun lalu

3.1. Analisis Pelayanan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

Mengemukakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

3.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

Mengemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kondisi umum, permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara.

3.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

3.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.5. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.6. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

3.7. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitaskinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatanyang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian programRenstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untukmengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul sertatindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tahun 2024 dengan pagu dana sebesar Rp. 14.738.235.372. (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dialokasi untuk pelaksanaan 5 (lima) program, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.491.623.929 (tuga belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan persentase sebesar 91,54%. Rangkuman tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 disajikan terlampir sebagaimana dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.156.600.000,00	343.030.963,00	29,66
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.156.600.000,00	343.030.963,00	29,66
5	BELANJA DAERAH	14.738.235.372,00	13.491.623.929,00	91,54
5.1	BELANJA OPERASI	7.146.503.172,00	6.819.583.256,00	95,43
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.146.503.172,00	6.819.583.256,00	95,43
5.2	BELANJA MODAL	7.591.732.200,00	6.672.040.673,00	87,89
	JUMLAH BELANJA MODAL	7.591.732.200,00	6.672.040.673,00	87,89
	JUMLAH BELANJA	*14.738.235.372,00*	*13.491.623.929,00*	*91,54*

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan Urusan Pilihan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman kepada Renstra Tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target, sasaran tahunan dan pencapaiannya dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja, outcome yang dikaitkan dengan capaian sasaran.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
				2020	2021	2022	2024	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2024	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumla h Wisata wan Manca negara	1.Bahan Promo si	450	550	650	750	850	0	0	0	235	310	0	0	0	31,33	36,47-
			2.Partisipa s i Event Pariwisa t a															

			3.Pembina n kepada pelaku usaha pariwisa t a															
2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumla h Wisata wan Nusan tara	1.Baha n Promo si	157.550	162.450	142.700	143.600	144.500	141.350	142.356	139.950	180.000	190.751	89,72%	87,63%	98,07%	125,35%	132,01

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 4 bidang dan 1 sekretariat.

a. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

- Sekretariat terdiri atas :
  - Sekretaris
  - Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
- Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pemasaran Pariwisata
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - Kelompok Jabatan Fungsional

- Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
  - Kepala Sub Bidang Riset, Edukasi, Pengambangan dan Infrastuktur
  - Kepala Sub Bidang Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah

Setiap bidang memiliki indikator dan target kinerja yang spesifik sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan di masing-masing bidang, Dimana kinerja masing-masing bidang ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara. Sasaran tersebut sesuai dengan arah kebijakan kepariwisataan untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisata dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah.

b. Permasalahan/Hambatan

Dalam upaya pengembangan pariwisata ditemukan berbagai hambatan/permasalahan yang timbul, diantaranya :

1. Terbatasnya promosi dan pemasaran pariwisata ke daerah/negara yang potensial bagi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Belum tersedianya Master Plan, DED atau RAB untuk melaksanakan pembangunan di obyek daya taris Wisata/ destinasi wisata.
3. Perlunya dilakukan evaluasi berkala bagi pengelola Daya Tarik Wisata agar kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik Wisata, sarana pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya lebih meningkat kapasitasnya.
4. Belum optimalnya fasilitasi dan wadah yang cocok serta belum memiliki zona kreatif bagi para pelaku ekonomi kreatif di wilayah dalam rangka penguatan pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Berbagai Data yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata belum dikelola secara sistematis sehingga ketersediaan dan akurasi data tidak maksimal.
6. Kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian, transportasi, dll.) yang belum memadai.
7. Kurangnya daya dukung infrastruktur menuju destinasi wisata
8. Pengembangan sektor pariwisata belum terintegrasi dengan dengan sektor lain

9. Belum adanya tata kelola obyek wisata yang jelas dan sesuai dengan karakterisik masing masing obyek wisata termasuk agenda wisata yang terencana
10. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru
11. Masih kurangnya promosi pariwisata, baik wisata alam maupun buatan
12. Belum optimalnya kapasitas dan profesionalisme tenaga kerja pariwisata

c. Dampak Program Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Pencapaian Visi/Misi Bupati Tapanuli Utara

Visi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dapat dirumuskan, yaitu "Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata". Visi tersebut akan diwujudkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbsis pertanian dan sumberdaya lokal
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja,pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government;

d. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, medesak dan menentukan.

1. Belum berkembangnya usaha Pariwisata yang dapat menunjang perkembangan destinasi Pariwisata daerah

2. Peningkatan daya saing produk wisata yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan aksesilibitas berpotensi untuk meningkatkan daya saing usaha dan Industri pariwisata masih dianggap kurang.
3. Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala besar dengan usaha –usaha ekonomi pariwisata skala Mikro, Kecil dan Menengah masih belum berjalan dengan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan
4. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan dibidang Pariwisata
6. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya daerah untuk mengangkat citra budaya daerah. Hal ini disebabkan masih kurangnya apresiasi karya seni budaya daerah
7. Belum optimalnya pengenalan, informasi dan promosi objek wisata
8. Belum adanya tata kelola obyek wisata yang jelas dan sesuai dengan karakterisik masing masing obyek wisata termasuk agenda wisata yang terencana
9. Peningkatan Kemitraan atau kerjasama pariwisata dengan pihak/daerah lain.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Arah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

I. BIDANG PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
- Pengelolaan Destinasi Pariwisata
- Perencanaan Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Destinasi Pariwisata

II. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- Melaksanakan berbagai jenis penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan kepariwisataan kepada masyarakat selaku pelaku usaha kepariwisataan
- Menjalin kerja sama atau bermitra dengan lembaga kepariwisataan untuk melaksanakan pengembangan kepariwisataan maupun pembuatan paket-paket wisata.
- Memberdayakan masyarakat dalam usaha pengembangan kepariwisataan di Tapanuli Utara, baik dengan seniman atau budayawan yang dijadikan sebagai guide maupun sebagai Pelaku Story legenda/mitos
- Melaksanakan survey dan peninjauan lapangan terhadap lokasi-lokasi wisata baru yang perlu dibenahi dan dikembangkan
- Melaksanakan pendataan terhadap jumlah pengunjung ke daerah-daerah wisata maupun ke penginapan-penginapan yang ada di lokasi wisata

III. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

- Menyelenggarakan promosi dan pemasaran wisata melalui berbagai kegiatan dan media, antara lain: pameran, mass media/eletronik, penyebaran brosur, booklet, facebook dan website
- Mengikuti Pameran Pariwisata, baik di dalam dan di luar daerah
- Melaksanakan berbagai event atau kegiatan yang sifatnya promosi dan publikasi wisata

PERMASALAHAN

1. Masih banyak daya tarik wisata dan fasilitas pendukung yang belum berkualitas/berstandar pelayanan prima;
2. Kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian, transportasi, dll.) yang belum memadai
3. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai media promosi dan informasi pariwisata, sebagai salah satu strategi pemasaran pariwisata
4. Belum memadainya kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik Wisata, sarana pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya

8. Kelembagaan pariwisata yang terkelola dengan baik dan berkelanjutan belum optimal, terutama yang berbasis komunitas/kemasyarakatanasih rendahnya sadar wisata dan penerapan sapta pesona oleh pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata maupun masyarakat tanggung jawab tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya.

PRIORITAS PENANGANAN

I. BIDANG PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

- ☐ Agar menganggarkan kegiatan untuk pengembangan lokasi-lokasi potensi wisata agar menjadi daerah atau lokasi tujuan wisata bagi para wisatawan.
- ☐ Melibatkan masyarakat khususnya yang berada di sekitar daerah wisata agar bersinergi dengan pemerintah untuk mengembangkan daerah wisata tersebut.
- ☐ Memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai ujung tombak dalam menyambut dan memberi pelayanan yang ramah dan baik kepada para pengunjung
- ☐ Menjalin kerja sama dengan lembaga kepariwisataan untuk melaksanakan paket-paket wisata.

II. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- ☐ Menjadikan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepariwisataan sebagai materi kepada masyarakat dalam upaya menjadi Raja bagi para pengunjung di lokasi objek Wisata.
- ☐ Mengadakan survey dan pendataan ke hotel-hotel yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara mengenai jumlah wisatawan yang berkunjung maupun menginap di Tapanuli Utara.
- ☐ Melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha kepariwisataan di Tapanuli Utara
- ☐ Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat dalam pengembangan bakat dan kemampuan dalam hal seni suara, lukis ataupun seni lainnya melalui festival atau lomba.

III. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

- ☐ Menyelenggarakan promosi dan pemasaran wisata melalui berbagai kegiatan dan media, antara lain: pameran, mass media/eletronik, penyebaran brosur, booklet dan website.
- ☐ Mengikuti Pameran Pariwisata, baik di dalam maupun di luar daerah
- ☐ Membuka Website dan Facebook Pariwisata guna publikasi objek dan tujuan wisata di Tapanuli Utara

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan yang baik mempunyai tujuan, sasaran dan target yang jelas untuk periode tertentu. Dalam perencanaan seringkali mengalami keterbatasan tertentu baik dari sisi dana, sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan PD harus memperhatikan kondisi umum daerah, potensi yang dimiliki dan permasalahan pokok yang dihadapi daerah dan PD dengan menyusun prioritas-prioritas tertentu.

Menurut SPPN 2004 ditetapkan 5 dokumen perencanaan pembangunan yang perlu disusun oleh perencana baik di tingkat nasional maupun daerah yaitu:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
c. Rencana Strategis
d. Rencana Kerja Pemerintahe. Rencana Kerja Institusi (Renja)

Renja PD merupakan rencana tahunan (annual planning) yang bersifat operasional yang mirip dengan RKPD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD sedangkan Renja PD merupakan penjabaran Renstra PD. Dalam SPPN dijelaskan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan nasional dilakukan dengan menciptakan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang disusun pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari RPJP hingga Renja PD.

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, yaitu:

Visi Indonesia Tahun 2019 – 2024 terdapat 5 visi :

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Undang investasi seluas – luasnya untuk buka lapangan pekerjaan
4. Reformasi Birokrasi
5. APBN yang fokus dan tepat sasaran

Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2025

Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa VisiKemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah: *"PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG".*

Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan dan Sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	• Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara ini adalah masyarakat terutama masyarakat pariwisata, lokasi potensi wisata dan Aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Fungsi dari Rencana Kerja SKPD 2025 ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2025 dan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 tertuang dalam program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan untuk Tahun 2025.

Untuk Tahun Anggaran 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Non Urusan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata*

- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rencana Kerja Program dan kegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian kinerja untuk Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut (terlampir).

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen rancangan awal perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara. Isi dari Rencana Kerjalebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPD Kabupaten Tapanuli Utara 2025 – 2026.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman awal dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Rencana Kerjadan selanjutnya menjadi Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder Pariwisata dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran serta dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

SASMA H. SITUMORANG, S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 197704251997111001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS PARIWISATA																			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				Rp. 5.297.125.726	Rp. 0			Rp. 5.297.125.726	Rp. 5.297.125.726	Rp. 0			Rp. 5.297.125.726	Rp. 16.374.995.088,00
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				Rp. 5.297.125.726	Rp. 0			Rp. 5.297.125.726	Rp. 5.297.125.726	Rp. 0			Rp. 5.297.125.726	Rp. 16.374.995.088,00
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 5.218.127.036				Rp. 5.218.127.036	Rp. 5.218.127.036				Rp. 5.218.127.036	Rp. 6.607.052.450,00
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 59.999.000				Rp. 59.999.000	Rp. 59.999.000				Rp. 59.999.000	Rp. 68.500.000,00
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 8.500.000,00
3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 4.999.800				Rp. 4.999.800	Rp. 4.999.800				Rp. 4.999.800	Rp. 6.000.000,00
3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 4.999.550				Rp. 4.999.550	Rp. 4.999.550				Rp. 4.999.550	Rp. 6.000.000,00
3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 6.000.000,00
3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 4.999.900				Rp. 4.999.900	Rp. 4.999.900				Rp. 4.999.900	Rp. 6.000.000,00
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 6.000.000,00
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 24.999.750				Rp. 24.999.750	Rp. 24.999.750				Rp. 24.999.750	Rp. 30.000.000,00
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 3.833.300.174				Rp. 3.833.300.174	Rp. 3.833.300.174				Rp. 3.833.300.174	Rp. 3.876.052.450,00
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 3.758.300.424				Rp. 3.758.300.424	Rp. 3.758.300.424				Rp. 3.758.300.424	Rp. 3.799.052.450,00
3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 70.000.000				Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000				Rp. 70.000.000	Rp. 71.000.000,00
3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 4.999.750				Rp. 4.999.750	Rp. 4.999.750				Rp. 4.999.750	Rp. 6.000.000,00
3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														Rp. 4.500.000,00
3	26	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa												Rp. 4.500.000,00
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														Rp. 90.000.000,00
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa												Rp. 90.000.000,00
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 445.128.900				Rp. 445.128.900	Rp. 445.128.900				Rp. 445.128.900	Rp. 575.000.000,00
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 54.999.500				Rp. 54.999.500	Rp. 54.999.500				Rp. 54.999.500	Rp. 60.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 49.998.000				Rp. 49.998.000	Rp. 49.998.000				Rp. 49.998.000	Rp. 60.000.000,00
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 54.999.000				Rp. 54.999.000	Rp. 54.999.000				Rp. 54.999.000	Rp. 60.000.000,00
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 35.182.400				Rp. 35.182.400	Rp. 35.182.400				Rp. 35.182.400	Rp. 45.000.000,00
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa - Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 249.950.000				Rp. 249.950.000	Rp. 249.950.000				Rp. 249.950.000	Rp. 350.000.000,00
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														Rp. 700.000.000,00
3	26	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa												Rp. 400.000.000,00
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa												Rp. 300.000.000,00
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 718.896.700				Rp. 718.896.700	Rp. 718.896.700				Rp. 718.896.700	Rp. 803.000.000,00
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 2.000.000				Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000				Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000,00
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 59.997.500				Rp. 59.997.500	Rp. 59.997.500				Rp. 59.997.500	Rp. 70.000.000,00
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 656.899.200				Rp. 656.899.200	Rp. 656.899.200				Rp. 656.899.200	Rp. 730.000.000,00
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 160.802.263				Rp. 160.802.263	Rp. 160.802.263				Rp. 160.802.263	Rp. 490.000.000,00
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 39.987.050				Rp. 39.987.050	Rp. 39.987.050				Rp. 39.987.050	Rp. 60.000.000,00
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 19.887.700				Rp. 19.887.700	Rp. 19.887.700				Rp. 19.887.700	Rp. 30.000.000,00
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa		Rp. 100.927.513				Rp. 100.927.513	Rp. 100.927.513				Rp. 100.927.513	Rp. 400.000.000,00
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				Rp. 0	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 6.287.942.638,00
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 200.000.000,00
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 200.000.000,00
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Rp. 0			Rp. 0		Rp. 0			Rp. 0	Rp. 6.087.942.638,00
3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 2.000.000.000,00
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 0			Rp. 0		Rp. 0			Rp. 0	Rp. 4.087.942.638,00
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Rp. 78.998.690				Rp. 78.998.690	Rp. 78.998.690				Rp. 78.998.690	Rp. 930.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				Rp. 78.998.690				Rp. 78.998.690	Rp. 78.998.690				Rp. 78.998.690	Rp. 930.000.000,00
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 57.998.690				Rp. 57.998.690	Rp. 57.998.690				Rp. 57.998.690	Rp. 280.000.000,00
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 21.000.000				Rp. 21.000.000	Rp. 21.000.000				Rp. 21.000.000	Rp. 200.000.000,00
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 450.000.000,00
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 900.000.000,00
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 900.000.000,00
3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 250.000.000,00
3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 300.000.000,00
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 200.000.000,00
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 150.000.000,00
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				Rp. 0	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 1.650.000.000,00
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				Rp. 0	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 1.650.000.000,00
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 800.000.000,00
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 850.000.000,00
							Jumlah		**Rp. 5.297.125.726**	**Rp. 0**			**Rp. 5.297.125.726**	**Rp. 5.297.125.726**	**Rp. 0**			**Rp. 5.297.125.726**	**Rp. 16.374.995.088,00**

Kab. Tapanuli Utara, ...
Kepala DINAS PARIWISATA

SASMA HAMONANGAN SITUMORANG, S.STP, M.Si
NIP. 197704251997111001

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi Kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Rencana Kerja Organsasi Perangkat Daerah (RENJA) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2029 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025. Renja ini dimaksudkan untuk meningkatkanpengelolaan dan daya dukung sumberdaya alam yang ada guna kesejahteraan masyarakat.

Semoga Rencana Kerja Organsasi Perangkat Daerah (RENJA) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tarutung, 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN TAPANULI UTARA,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERTANIAN TAPANULI UTARA

Ir. S.E.Y. PASARIBU, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680513 199403 1 004

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bagian dari wilayah otonom Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk dikelola demi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Sebagian besar penduduk Kabupaten Tapanuli Utara (±80%) menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Utara dipandang dari segi potensi sumber daya alam yang ada memang lebih cocok dikelola untuk sektor pertanian. Dinas Pertanian memandang sektor pertanian dengan ketersediaan sumber daya alam sebagai salah satu potensi dalam meningkatkan kesejahteraan pertanian dengan menjadikan Tapanuli Utara menjadi lumbung pangan, maka dalam mengimplementasikan kondisi dilakukan pembangunan pertanian dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai salah satu stakeholder dan pemerintah daerah kabupaten sebagai pemegang kebijakan daerah akan memberikan perkembangan kemakmuran yang nyata dan meninggalkan konsep lama yang hanya menjadikan masyarakat sebagai objek dari pembangunan.

Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki tersebut membutuhkan perencanaan pembangunan yang tepat dan terarah sehingga tujuan dan sasaran kinerja dapat dicapai serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kontribusi positif dalam sistem perencanaan daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bagian instansi pemerintahan kabupaten juga tetap meningkatkan pelayanan dengan mempersiapkan perencanaan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan dengan prosedur bottom up , yakni dengan menampung aspirasi dan kebutuhan petani dengan menyesuaikannya dengan program kerja yang telah ditetapkan. Aplikasinya diwujudkan dalam Rencana Strategi dan Rencana Kerja

Tahunan dengan memperhatikan analisis faktor kekuatan, kendala , tantangan dan peluang pengembangan daerah yang ada.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2024 yang menjabarkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian dengan memperhatikan kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah Kabupaten Tapanuli Utara serta capaian yang dihasilkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bagian instansi Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara, jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerha Kabupaten Dairi, jo Undang-undang Nomor 12 Tahun1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal; jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN Bappenas Nomor 050/4936/Sj, Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja ini dengan maksud sebagai pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arahan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governnace);
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pengelolaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan aplikasi dan turunan dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026, sekaligus sebagai acuan dasar pelaksanaan

kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan dan capaian kinerja. Disamping itu Rencana Kerja ini sebagai aplikasi secara makro dan mikro rencana pelaksanaan RPD Kabupaten Tapanuli Utara bidang Pertanian Tahun 2025-2026.

1. **Tujuan dan Sasaran**

Dinas Pertanian sebagai pelaksana pembangunan Pertanian di daerah Kabupaten Tapanuli Utara terus mendukung dan menyelenggarakan pembangunan Pertanian, sedangkan sasaran pelaksanaan pembangunan pertanian Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara sumber daya alam yang dimiliki masyarakat melalui peningkatan produksi, peningkatan produktivitas dengan tujuan meningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

2. **Rencana Strategis**

Adapun rencana strategis ini mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yakni : ***"Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan & Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata".*** Visi ini merupakan cara pandang jauh kedepan, yang merefleksikan cita-cita, yakni hendak menjadi apa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Utara dimasa depan, dan sekaligus menentukan arah perjalanan institusi ini. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan strategi dalam melaksanakan pembangunan pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain :

1. Meningkatkan Produktifitas, Kualitas dan produksi komoditas unggulan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan;
2. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan;
3. Meningkatakan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian;
4. Meningkatakan Produksi dan Ketersediaan Pangan beras secara berkelanjutan serta mempertahan Swasembada Pangan;
5. Meningkatkan keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat perkapita dan menurunnya konsumsi beras;
6. Mengendalikan perkembangan Hama dan Penyakit yang mengganggu produksi dan produktivitas .

3. **Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Dinamika pencapaian kinerja terus mengalami perubahan yang positif, dimana pencapaiannya tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2024 ini tujuan utamanya tetap mengarah pada perbaikan daya dukung lingkungan hidup dengan mengurangi lahan kritis melalui Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pengelolaan Hutan yang Berbasis kepada Masyarakat.

4. **Kendala yang Dihadapi**

Secara umum kendala yang dihadapi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 mencakup perubahan metode penyusunan yang mengadaptasi langsung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mana masih diperlukan sosialisasi agar SKPD dapat menelaah dan menuangkannya dalam penyusunan RENJA.

Persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan dimasa yang akan datang di daerah Kabupaten Tapanuli Utara dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) akar masalah yang selanjutnya merupakan masalah fundamental atau akar masalah pembangunan pertanian. Ketujuh masalah tersebut adalah : 1) Kepemilikan Lahan petani relative sempit dan tekanan alih fungsi lahan. 2) Lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan. 3) Keterbatasan infrastruktur, sarana prasrana, lahan dan air. 4) Lemahnya Kapasitas dan kelembagaan penyuluh. 5) Keterbatasan akses petani terhadap sumber permodalan. 6) Lemahnya peran kelompok tani dan kelembagaan petani lainnya, dan 7) transfer teknologi berjalan lambat dan belum berkembangnya industri hilir.

Disamping itu penerapan perundangan-undangan yang masih sulit serta kelembagaan masyarakat dan pendanaan dalam pengelolaan sektor pertanian masih bersifat parsial dan temporer bahkan sarana pendukung yang belum mencukupi.

5. **Solusi Pemecahan**

Memperhatikan kendala diatas, diharapkan penyusunan perencanaan pembangunan sektor pertanian ke depan memerlukan kebijakan dan langkah terobosan yang kongkrit dan berkesinambungan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan sehingga pemanfaatannya atas azas potensi dan tepat kelola untuk kesejahteraan masyarakat .

Terhadap beberapa langkah yang diambil untuk melaksanakan pembangunan pertanian yang mengacu pada potensi dan tepat kelola pada saat ini sampai masa akan datang akan memberi konsekuensi terhadap besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan, maka peningkatan alokasi anggaran biaya pembangunan pertanian pada masa yang akan datang sangat perlu. Namun selain pendanaan yang rutin (DAU/ DAK) diperlukan upaya kemitraaan dengan pihak swasta yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD
TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun2024 danCapaian Renstra OPD

Salah satu hasil pembangunan pertanian yang patut disyukuri dan membanggakan adalah Kabupaten Tapanuli Utara masih tetap mencapai swasembadapangansehinggakebutuhanberasbagipendudukKabupaten Tapanuli Utara masih tercukupi, kondisi demikian sangat diharapkan terjaga terus untukmeghindariterjadinyakrisispangan.

Memperhatikan Rencana Strategis OPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara maka dapat dilihat bahwa perlu adanya penyempurnaan materi guna mempertemukan antara format yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Halini dimaksudkan karena Renstra OPD telah disusun pada Tahun2014. Namun demikian lingkup Program dan Kegiatan Bidang Pertanian telah terakomodir dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD dilakukan dengan menitik beratkan pada capaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (ouput). Mengacu pada hal tersebut maka Rencana Kerja OPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara telah mencapai target berdasarkan programdan kegiatan, bahkan terdapat beberapa kegiatan yang telahbersinergidengan capaian kinerja yanglebihkompleks.

2.2. AnalisisKinerjaPelayananOPD

Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara diawali dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedomanpadaRencanaStrategi2020-2024.Pengukurankinerjaini ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja out comes yang dikaitkan terhadap capaian sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai evaluasi untuk melihat perubahan kinerja organisasi yang mana lebih lanjut digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja dan memberikan Solusi pemecahan permasalahan sekaligus sebagai bahan penyempurnaan pilihan-pilihandan kebijakan strategis padatahunmendatang.

Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Utara diukur berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam 4 (empat) tahun terakhir sekaligus tingkat pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh dengan kategori ‘Baik’. Berdasarkan Capaian Kinerja tersebut

maka kinerja akan terus dipertahankan dan ditingkatkan pada kinerja tahun yang akandatang.

2.3. Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsiOPD

Dalam pelaksanaan pembangunan Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Pertanian tetap diperhadapkan pada isu strategis yang perlu dikelola penanganannya secara cermat. Adapun isu strategis dimaksud antara lain:

1. Konsepsi Otonomi Daerah

Sistem pengurusan pembangunan bidang pertanian di daerah yang masihlemahsebagaiakibatkebijakanyangmasihditentukanolehpusat. Hal ini terlihat dari ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban daerah, kekuasaan antara pemerintah daerah, lembaga legislatif dan masyarakat,tugasdantanggungjawab,bebanpekerjaan,anggaranyang tersedia dan prestasi birokrasi pemerintah daerah. Sehingga menjadi permasalahandalampenerapanotonomidaerahdiKabupatenTapanuli Utara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan peran proaktif dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengantipasi permasalahan yang berkaitan dengan fungsi otonomi daerah dan desentralisasi sehingga pemerintah daerah dapat mengelola semua permasalahan sesuai dengan fungsinya sebagai lembagaotonom.

2. Kemiskinan

Kabupaten Tapanuli Utara masih identik dengan peta kemiskinan. Penciptaan lapangan pekerjaan yang didominasi dari sektor pertanian belummemberikangambaranperbaikankesejahteraanbagimasyarakat marginal di Tapanuli Utara. Hal ini dipicu dengan tingginya inflasi, terutama pada bahan makanan, transportasi dan kenaikan Bahan BakarMinyak(BBM).

3. KetersediaanInfrastruktur

Posisistrategissebagaijalurmobilitasantardaerahkabupatentetangga membutuhkan akses jalan yang tinggi. Disamping itu topografi Kabupaten Tapanuli Utara berada dalam wilayah pegunungan membutuhkanperhatianpengembanganinfrastrukturyangbaik(jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur dasar lainnya) sehingga mobilitas dalam pengelolaan pembangunan pertanian dan perkebunan dapat terselenggarakan.

4. PengelolaanPotensiDaerahyangBelumOptimal

Potensisumberdayaalamdaripertaniandanperkebunanhinggasaatini belum mendapat pengelolaan yang optimal. Pongelolaan ini perlu diupayakan secara tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat dan lingkungan ekosistemnya agar kelestarian tetap terjaga.

5. WawasanLingkungan

Kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat penggunaan pestisida dan zat kimia yang tinggi tidak terkendali menyebabkan terganggunya fungsi ekosistem. Degradasi kawasan pertanian dan perkebunan yang terjadi ini jika tidak dikendalikan

akan memberikan dampak negatif pada kelestarian hasil dan kesejahteraan Masyarakat sekitarnya. Secara global akan memberikan perubahan lingkungan yang akan mengancam kehidupan manusia dan lingkungan ekosistem.

Dalam mengelola isu yang menjadi permasalahan pembangunan bidang pertanian dan Perkebunan ke depannya perlu dilakukana nalisa dan asumsi guna memberikan Solusi yang tepat sehingga dapat menjadi upaya dan strategi dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan pokok dinas yang optimal.

Adapunsolusiyangdapatdiberikandalampengelolaanpermasalahanyang akandihadapidalampelaksanaankegiatan,antaralain:

1. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi pengelolaan pertaniandanperkebunan;
2. Mendukung program Kementerian pertanian dalam mempercepat produksi , meningkatkan produktivitas dan menjaga keswasembadaan pangandenganmelibatkanmasyarakat;
3. Peningkatan produksi hasil tanaman perkebunan rakyat dengan tidak mengesampingkankualitaspascapanen;
4. Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraannya.

2.4. ReviewTerhadapRancanganAwalRKPD

Perencanaan kerja yang baik akan selalu memberikan hasil dan manfaat yang optimal. Dalam mewujudkan aplikasi perencanaan ini akan memenuhi dan memberlakukan tahapan pembahasan antar instansi pemerintah yang difasilitasioleh Bappeda melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Forum OPD. Dalam proses ini akan mempertimbangkan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas Pembangunan daerah yang menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Hingga sampai saat ini belum terdapat perbedaan rancangan kebutuhan terhadap rancangan awal RKPD. Hal ini memberikan indikasi bahwa sistem perencanaan pembangunan telah membentuk suatu sistem yang cukup dipahami OPD. Apabila terdapat perbedaan penganggaran diperlukan pembahasan lanjutan dalam KUA –PPAS dan RKA oleh Tim Peneliti dan Tim Anggaran Kabupaten. Tahapan ini sangat penting guna penyelarasan anggaran kegiatan yang dapat diselenggarakan pada tahun yangdirencanakan.

2.5. PenelaahanUsulanProgramdanKegiatanMasyarakat

Dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan program dan kegiatan OPD maka diperlukan rekapitulasi usulan dan permohonan dari masyarakat umum, tanggapan LSM dan Lembaga pembangunan/penelitiannya atas kinerja OPD dan hubungan kerjasama antar kabupaten/ kota dan provinsi serta pemerintah pusat. Namun demikian

penyusunan program kerja juga tetap memperhatikan isu strategis yang berkembang yang dianggap dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah bidang Pertanian sesuai Tugas Pokok dan Fungsi OPD Dinas Pertanian

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 s/d TW IV

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
											I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**Nilai Akuntabilitas Kinerja yang dikeluarkan Inspektorat**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**Persen**	**100**	**63.816.097.600**	**225**	**50.144.394.705**	**100**	**17.302.567.901**	**25,00**	**3.043.680.784**		**5.762.285.886**		-		-	**25**	**8.803.822.970**	**250**	**58.948.217.675**	**250,00%**	**92,37%**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentasi terwujudnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan**	**Persen**	**100**	**193.335.938**	**4**	**58.297.900**	**5**	**131.013.000**		-	**3,00**	**60.305.200**	-	-	-	-	**3**	**60.305.200**	**7**	**118.603.100**	**200,00%**	**61,35%**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	56.010.000	0	-	2	56.010.000		-	1,00	29.627.200					1	29.627.200	1	29.627.200	50,00%	52,90%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Laporan	2	5.000.000	0	-	1	5.000.000		-		-					0	-	0	-	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	32.325.938	4	19.843.000	1	5.000.000		-	1,00	4.565.000	0				1	4.565.000	5	24.408.000	100,00%	75,51%
	Target : 74,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	100.000.000	0	38.454.900	1	65.003.000			1,00	26.113.000					1	26.113.000	1	64.567.900	50,00%	64,57%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan jasa pelayanan penatausahaan keuangan**	**Persen**	**100**	**47.755.367.801**	**250**	**44.017.136.311**	**100**	**14.844.745.389**	**25,00**	**2.781.280.784**	**25,00**	**4.902.201.702**	**0**	-	**0**	-	**50**	**7.683.482.486**	**300**	**51.700.618.797**	**300,00%**	**108,26%**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	60	47.482.330.002	39	43.659.019.511	12	14.779.306.189	3,00	2.781.280.784	3,00	4.882.614.502					**6**	**7.663.895.286**	**45**	**51.322.914.797**	**75,00%**	**108,09%**
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	60	240.711.861	36	338.674.400	12	60.439.200			6,00	15.109.800					**6**	**15.109.800**	**42**	**353.784.200**	**70,00%**	**146,97%**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	32.325.938	2	19.442.400	1	5.000.000			1,00	4.477.400		-		-	**1**	**4.477.400**	**3**	**23.919.800**	**60,00%**	**74,00%**
							0	-											**0**	-	**0**	-		
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Laporan**	**6**	**138.710.524**	**3**	**50.361.900**	**1**	**7.000.000**		-		**2.143.700**	**0**	-		-	**0**	-	**3**	**50.361.900**	**50,00%**	**36,31%**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	131.710.524	3	50.361.900	0	-				-					**0**	-	**3**	**50.361.900**	**60,00%**	**38,24%**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	Laporan	1	7.000.000			1	7.000.000				2.143.700										
							0	-											**0**	-	**0**	-		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.927.972.789**	**200**	**1.441.636.140**	**100**	**208.798.200**		-		**115.322.888**		-		-	**0**	**115.322.888**	**200**	**1.556.959.028**	**200,00%**	**80,76%**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	60	42.816.782	48	25.194.300	12	2.000.000			6,00	989.400					**6**	**989.400**	**54**	**26.183.700**	**90,00%**	**61,15%**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	60	193.955.194	48	193.758.400	12	40.000.000			6,00	24.458.500					**6**	**24.458.500**	**54**	**218.216.900**	**90,00%**	**112,51%**
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bulan	60	43.087.889	48	42.985.400	12	2.000.000			6,00	991.000					**6**	**991.000**	**54**	**43.976.400**	**90,00%**	**102,06%**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	60	129.304.612	48	100.122.400	12	20.813.200			6,00	11.000.000					**6**	**11.000.000**	**54**	**111.122.400**	**90,00%**	**85,94%**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	60	258.592.415	48	137.685.000		-			6,00						**6**	**77.883.988**	**54**	**215.568.988**	**90,00%**	**83,36%**
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	60	79.461.465	48	83.570.900		-			-						**0**	-	**48**	**83.570.900**	**80,00%**	**105,17%**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	60	1.180.754.434	48	858.319.740	12	143.985.000			6,00	77.883.988					**6**	**77.883.988**	**54**	**936.203.728**	**90,00%**	**79,29%**
							0	-											**0**	-	**0**	-		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Paket Peralatan Mesin Lainnya**	**Unit**	**20**	**422.594.251**	**3**	**89.550.000**	**10**	**14.000.000**		-		-		-		-	**0**	-	**3**	**89.550.000**	**15,00%**	**21,19%**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan Mesin Lainnya	Unit	20	222.594.251	7	89.550.000	4	14.000.000				-					**0**	-	**7**	**89.550.000**	**35,00%**	**40,23%**
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	200.000.000	0	-	0										**0**	-	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**11.828.762.276**	**455**	**3.952.585.572**	**100**	**1.531.423.212**	**25,00**	**262.400.000**		**378.504.862**		-		-	**25**	**640.904.862**	**480**	**4.593.490.434**	**480,00%**	**38,83%**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan	60	30.166.565	30	18.990.000	12	2.000.000			6,00	1.000.000					**6**	**1.000.000**	**36**	**19.990.000**	**60,00%**	**66,27%**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	60	223.558.426	30	75.249.810	12	39.705.700			6,00	16.140.334					**6**	**16.140.334**	**36**	**91.390.144**	**60,00%**	**40,88%**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	60	11.575.037.286	24	3.858.345.762	12	1.489.717.512	3,00	262.400.000	3,00	361.364.528					**6**	**623.764.528**	**30**	**4.482.110.290**	**50,00%**	**38,72%**
							0	-											**0**	-	**0**	-		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**1.549.354.022**	**100**	**534.826.882**	**100**	**565.588.100**		-		**303.807.534**		-		-	**0**	**303.807.534**	**100**	**838.634.416**	**100,00%**	**54,13%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	103	691.486.284	206	417.749.082	2	55.588.100			2,00	12.700.450					**2**	**12.700.450**	**208**	**430.449.532**	**201,94%**	**62,25%**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	57.867.738	20	37.077.800	10	10.000.000			5,00	5.000.000					**5**	**5.000.000**	**25**	**42.077.800**	**62,50%**	**72,71%**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	300.000.000	2	80.000.000	0	-			-	-					**0**	-	**2**	**80.000.000**	**100,00%**	**26,67%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kendaraan Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	10	500.000.000	0	-	10	500.000.000				286.107.084					**0**	**286.107.084**	**0**	**286.107.084**	**0,00%**	**57,22%**
	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan**			**50.967.565.709**	**0**	**20.068.882.421**		**3.291.887.959**		**687.955.750**		**1.172.273.300**		-		-		**1.860.229.050**	**0**	**21.929.111.471**	**#DIV/0!**	**43,03%**
	Produksi :		**Padi Sawah**	**Ton**	**118.800,00**		**118.911,40**		**118.800,00**		**11.799,79**		**76.392,32**						**88.192,11**		**74,24%**		**0,00%**	
	Padi Sawah : 118.600,00 Ton			**Kw/ha**	**49,65**		**52,68**		**49,65**		**52,68**		**52,68**						**52,68**		**106,10%**			
	Padi Gogo : 66.000,00 Ton		**Padi Ladang**	**Ton**	**70.600,00**		**66.507,42**		**70.600,00**		**17.163,30**		**21.665,88**						**38.829,18**		**55,00%**			
	Jagung : 88.000 Ton			**Kw/ha**	**29,69**		**29,72**		**29,69**		**29,72**		**29,72**						**29,72**		**100,10%**			
	Kacang Tanah : 2.501 Ton		**Jagung**	**Ton**	**91.000,00**		**126.500,99**		**91.000,00**		**29.755,61**		**23.013,55**						**52.769,16**		**57,99%**			
	Cabai Merah : 6830,20 Ton			**Kw/ha**	**51,89**		**55,96**		**51,89**		**55,96**		**55,96**						**55,96**		**107,84%**			

	Bawang Merah : 1.023 Ton	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung**	**Persen**	**100**	**42.165.664.628**	**49**	**15.700.880.076**	**0**	**2.391.887.599**		**687.955.750**		**622.772.600**		**-**		**-**	**0**	**1.310.728.350**	**49**	**17.011.608.426**	**49,00%**	**40,34%**
	Nenas : 160.200,00 Ton	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	Laporan	50	37.428.058.744	31	14.614.091.427		1.811.887.599		687.955.750		500.429.900					**0**	**1.188.385.650**	**31**	**15.802.477.077**	**62,00%**	**42,22%**
	Pisang : 26.500 Ton	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	25	4.397.605.884	18	1.086.788.649		240.000.000		-		8.027.000					**0**	**8.027.000**	**18**	**1.094.815.649**	**72,00%**	**24,90%**
	Kopi Arabika : 14.780,50 Ton	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah Benih Bersertifikat perkebunan berbentuk batang	batang		340.000.000				340.000.000		-		114.315.700									
	Kakao : 1790,50 Ton						**0**	-											**0**	-	**0**	-		
	Aren : 183 Ton	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme**	**Laporan**	**50**	**8.801.901.081**	**32**	**4.368.002.345**	**0**	**900.000.000**	**-**	**-**	**-**	**549.500.700**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**549.500.700**	**32**	**4.917.503.045**	**64,00%**	**55,87%**
		Pengamin Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Laporan	25	1.736.340.753	15	729.728.947	0	-									**0**	-	**15**	**729.728.947**	**60,00%**	**42,03%**
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Laporan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Laporan	25	7.065.560.328	17	3.638.273.398		900.000.000				549.500.700					**0**	**549.500.700**	**17**	**4.187.774.098**	**68,00%**	**59,27%**
							0	-											**0**	-	**0**	-		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian**	**Persen**	**46**	**125.341.309.082**	**30**	**57.635.688.150**	**10**	**10.823.826.000**		**-**		**2.733.642.445**		**-**		**-**		**2.733.642.445**	**30**	**60.369.330.595**	**65,22%**	**48,16%**
	Produktivitas Pertanian :	**Pengembangan PraSarana Pertanian**	**Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Laporan**	**42**	**3.863.723.900**	**20**	**1.150.586.872**	**0**	**635.000.000**	**-**	**-**	**-**	**261.914.470**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**261.914.470**	**20**	**1.412.501.342**	**47,62%**	**36,56%**
	Padi Sawah : 49,64 Kw/ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	20	1.297.711.400	14	681.290.172		350.000.000				3.505.800					**0**	**3.505.800**	**14**	**684.795.972**	**70,00%**	**52,77%**
	Padi Gogo 29,69 Kw/ha	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Laporan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Laporan	10	1.231.012.500	6	469.296.700											**0**	**258.408.670**	**6**	**727.705.370**	**60,00%**	**59,11%**
	Jagung : 51,86 Kw/ha	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan	Dokumen	10	750.000.000																		
	Kacang Tanah : 15,44 Kw/ha	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	2	300.000.000																		
	Cabai Merah : 48,10 Kw/ha	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas Kawasan pertanian yang dimanfaatkan	Ha		285.000.000				285.000.000				258.408.670										
	Bawang Merah : 93,00 Kw/ha																							
	Nenas : 1.602,00 Kw/ha	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian terbangun**	**Unit**	**465**	**121.477.585.182,00**	**151**	**56.485.101.278,35**	**3**	**10.188.826.000,00**		**-**		**2.471.727.975,00**		**-**		**-**	**0**	**2.471.727.975**	**151**	**58.956.829.253**	**32,47%**	**48,53%**
	Pisang : 455,00 Kw/ha	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit	120	55.224.434.704	39	18.927.086.325		5.398.826.000,00				1.361.345.375					**0**	**1.361.345.375**	**39**	**20.288.431.700**	**32,50%**	**36,74%**
	Kopi Arabika : 1.121,60 Kg/ha	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	10	982.708.500	2	228.000.000		-									**0**	-	**2**	**228.000.000**	**20,00%**	**23,20%**
	Kakao : 662,60 kg/ha	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	300	63.546.379.228	107	36.889.840.712		4.000.000.000				925.382.600					**0**	**925.382.600**	**107**	**37.815.223.312**	**35,67%**	**59,51%**
	Aren : 509,80 kg/ha	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	15	1.474.062.750	3	342.000.000	2	240.000.000				60.000.000					**0**	**60.000.000**	**3**	**402.000.000**	**20,00%**	**27,27%**
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	20	200.000.000		98.174.241	1	500.000.000				125.000.000						**125.000.000**		**223.174.241**	**0,00%**	**111,59%**
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	unit	1	50.000.000		-	1	50.000.000									**0**	-	**0**	-		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**	**Persen**	**88**	**3.319.080.373**	**100**	**1.355.203.173**	**3**	**305.000.000**		**-**		**27.843.600**		**-**		**-**		**27.843.600**	**100**	**1.383.046.773**	**113,64%**	**41,67%**
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**Jumlah Laporan Pengandalian OPT Tanaman**	**Laporan**	**15**	**3.319.080.373**	**103**	**1.355.203.173**	**3**	**305.000.000**		**-**		**27.843.600**		**-**		**-**	**0**	**27.843.600**	**103**	**1.383.046.773**	**686,67%**	**41,67%**
		Penegendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Laporan Pengandalian OPT Tanaman	Laporan	15	3.319.080.373	9	1.355.203.173		305.000.000				27.843.600					**27843600**	**#REF!**	**27843609**	**#REF!**	**185624060,00%**	**#REF!**
							0	-											**0**	-	**0**	-		
							0	-											**0**	-	**0**	-		
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Cakupan usaha pertanian yang dibina dan diawasi**	**Persen**	**16**	**560.314.526**	**100**	**334.424.060**	**100**	**125.000.000**		**-**		**21.577.786**		**-**		**-**		**21.577.786**	**100**	**356.001.846**	**625,00%**	**63,54%**
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**laporan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian**	**Laporan**	**10**	**560.314.526**	**6**	**334.424.060**	**2**	**125.000.000**		**-**		**21.577.786**		**-**		**-**	**0**	**21.577.786**	**6**	**356.001.846**	**60,00%**	**63,54%**
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Bulan	60	560.314.526	45	334.424.060		125.000.000				21.577.786					-	**#REF!**	**45**	**#REF!**	**75,00%**	**#REF!**
							0	-											**0**	-	**0**	-		
							0	-											**0**	-	**0**	-		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase rumah tangga petani yang masuk kelembagaan petani**	**Persen**	**94**	**11.840.488.346**	**85**	**7.926.243.310**	**90**	**1.266.299.940**	**-**	**-**		**158.709.700**		**-**		**-**		**158.709.700**	**85**	**8.084.953.010**	**90,43%**	**68,28%**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persen**	**100**	**11.840.488.346**	**30**	**7.926.243.310**	**15**	**1.266.299.940**	**-**	**-**		**158.709.700**		**-**		**-**	**0**	**158.709.700**	**30**	**8.084.953.010**	**30,00%**	**68,28%**
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan	Kecamatan	15	10.870.710.221	30	4.185.697.424		695.400.000				147.296.900					**15**	**147.296.900**	**45**	**4.332.994.324**	**300,00%**	**39,86%**
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan	15	323.259.375	30	1.441.410.650		545.899.940				2.118.000					**15**	**2.118.000**	**45**	**1.443.528.650**	**300,00%**	**446,55%**
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kecamatan	15	646.518.750	18	2.299.135.236		25.000.000				9.294.800					**0**	**9.294.800**	**18**	**2.308.430.036**	**120,00%**	**357,06%**
																			0	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)						**255.844.855.636**	**0**	**137.464.835.819**		**33.114.581.440**		**3.731.636.534**		**9.876.332.717**		**-**		**-**	**0**	**13.607.969.251**	**0**	**151.072.805.070**	**#DIV/0!**	**59,05%**
Predikat kinerja																								

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada Kebijakan Pembangunan Pertanian Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian.
2. Kebijakan pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor serta komoditas penyedia bahan baku bio-energi.
3. Kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan.
4. Kebijakan pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) dan agro-industri di perdesaan, sebagai dasar / landasan pengembangan bio-industri berkelanjutan.
5. Kebijakan re-orientasi memproduksi dari satu jenis produk menjadi multi produk (produk utama, bioenergi, produk sampingan, produk dari limbah, zero waste dan lainnya).
6. Kebijakan pengembangan klaster/kawasan, yaitu pada kawasan tertentu yang mengungkit pencapaian target nasional.
7. Kebijakan system perbenihan/pembibitan, perlindungan petani, kelembagaan petani, inovasi dan diseminasi teknologi, penyuluhan, dan kebijakan sistem perkarantinaan pertanian.
8. Kebijakan mendukung program tematik: MP3EI, MP3KI, PUG, KSS, ketenagakerjaan, percepatan daerah tertinggal, kawasan khusus dan wilayah perbatasan.Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penanganan pasca bencana alam.
9. Kebijakan subsidi: (1) subsidi pupuk tetap diperlukan dengan cara mengurangi pupuk tunggal, menaikan subsidi pupuk majemuk, (2) pupuk organik tetap dikembangkan bukan dengan dukungan subsidi, tetapi dialihkan menjadi kegiatan pengembangan pupuk organik, (3) subsidi benih ditiadakan dan dialihkan menjadi kegiatan penguatan penangkar benih/bibit.
10. ekebijakan kredit : (1) kredit ketahanan pangan akan terus dilanjutkan untuk mendorong dan meningkatkan produksi dan produktivitas pangan guna mendukung ketahanan pangan, (2) untuk lebih menjamin teralokasinya kredit untuk pangan, maka plafon kredit dialokasikan menurut subsektor, (3) untuk memecahkan kelangkaan tenaga kerja & menjamin pengelolaan pangan skala luas, maka Kredit Mekanisasi pertaniaan sangat diperlukan, (4) kegiatan sertifikasi tanah diperlukan, sehingga layak kredit.

Strategi Pembangunan Pertanian tahun 2019-2024 meliputi :

1. Menjadikan basis produksi komoditas pangan, komoditas ekspor, penyedia bahan baku industri dan bio-energi dengan pendekatan kawasan.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk pertanian.
3. Menyediakan prasarana dasar bidang pertanian
4. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara rinci uraian mengenai pengembangan pertanian dan perdesaan, dijelaskan dalam enam bidang program, yaitu:

a) Pengkajian kebijakan, perencanaan dan program terpadu pertanian.
b) Perbaikan produksi pertanian dan sistem bertani melalui diversifikasi usaha tani.
c) Peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
d) Konservasi dan rehabilitasi tanah.
e) Pengendalian hama terpadu (PHT).
f) Unsur hara bagi peningkatan produksi pangan.

Memperhatikan hal di atas maka arah kebijakan strategi pembangunan pertanian dan perkebunan ke depan bertujuan untuk pengelolaan sumber daya alam yang memiliki potensi pertanian secara tepat dengan tujuan peningkatan pendapatan petani yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai salah satu institusi pemerintahan untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partispatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai perwujudan tanggung jawab dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor Pertanian		PDRB Sub Sektor Pertanian	Milyar Rupiah	4.916,10	5.282,21	5.648,33	6.014,45	6.380,57	6.746,69
		Meningkatnya produktivitas komoditi pertanian	Jumlah produksi Pertanian pangan (padi sawah, padi gogo, jagung, kacang yanah, ubi kayu, ubi jalar) /Luas Panen	Ton/Ha	5,015	5,035	5,050	5,071	5,087	5,095

C. Program dan Kegiatan

Secara umum Rencana Kerja Tahun 2025 OPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara tetap mengacu pada RPD Kabupaten Tapanuli Utara dan Rencana Strategis OPD dan seoptimal mungkin untuk mendukung dan melanjutkan program pembangunan Pertanian dengan mendasari Capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang memperhatikan pendayagunaan potensi ekonomi daerah dalam bidang pertanian.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN KAB. TAPANULI UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERTANIAN							**35.454.930.151,00**	**40.814.382.039,00**	**31.905.900.034,98**	**-3.549.030.116,02**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**35.454.930.151,00**	**40.814.382.039,00**	**31.905.900.034,98**	**-3.549.030.116,02**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**35.454.930.151,00**	**40.814.382.039,00**	**31.905.900.034,98**	**-3.549.030.116,02**							**0,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**17.867.892.556,00**	**17.635.965.444,00**	**17.595.577.830,00**	**-17.867.892.556,00**							**0,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	45.000.000,00	19.301.400,00	-25.698.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Petanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	7.301.400,00	-7.698.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	15.844.279.344,00	15.844.279.344,00	14.342.940.170,00	-1.501.339.174,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				250 Orang/ bulan	250 Orang/ bulan	15.758.030.144,00	15.758.030.144,00	14.259.090.970,00	-1.498.939.174,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	82.249.200,00	82.249.200,00	82.249.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00	1.600.000,00	-2.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Petanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	283.750.800,00	283.750.800,00	149.375.400,00	-134.375.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Petanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	188.750.800,00	188.750.800,00	94.375.400,00	-94.375.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	1.183.974.200,00	1.173.974.200,00			-	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Petanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	980.000.000,00	980.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	199.974.200,00	199.974.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.531.423.212,00	1.199.496.100,00	1.198.296.100,00	-333.127.112,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Petanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.705.700,00	38.605.700,00	38.605.700,00	-1.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.489.717.512,00	1.158.890.400,00	1.158.890.400,00	-330.827.112,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	149.439.200,00	249.439.200,00	700.090.560,00	550.651.360,00			-	- -	Dinas Petanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	4 Unit	33.439.200,00	33.439.200,00	52.690.560,00	19.251.360,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	200.000.000,00	641.000.000,00	541.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.000.000,00	11.000.000,00	4.400.000,00	-6.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas Padi Gogo Produksi Padi Gogo Produktivitas Jagung Produktivitas Padi Sawah Produksi Padi Sawah Produksi Jagung**				**139.913,51 66.507,42 56 52,94 119.505,95 7 29,72 Ton Ton Kw/ha Kw/ha Ton Kw/ha**	**29,72 66.507,42 56 52,94 119.505,95 7 139.913,51 Kw/ha Ton Kw/ha Kw/ha Ton Ton**	**4.501.887.600,00**	**2.354.154.595,00**	**4.176.763.004,96**	**-4.501.887.600,00**							**0,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*				5 Laporan	8 Laporan	4.401.887.600,00	2.304.154.595,00	4.126.763.005,00	-275.124.595,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				5 Laporan	6 Laporan	2.061.887.600,00	867.830.600,00	880.448.710,00	-1.181.438.890,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	62.490.300,00	37.490.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih																		
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				3 Ton	17,975 Ton	1.050.000.000,00	621.323.995,00	1.121.323.995,00	71.323.995,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan				0 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan				0 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				20000 Batang	51000 Batang	400.000.000,00	275.000.000,00	685.000.000,00	285.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				20000 Batang	100000 Batang	300.000.000,00	100.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan				2 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				2 Ton	5,45 Ton	550.000.000,00	400.000.000,00	620.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*				6 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	49.999.999,96	-50.000.000,04			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	49.999.999,96	-50.000.000,04	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				0 Varietas Unggul Baru (VUB)	5 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian**				**46 Persen**	**46 Persen**	**11.765.149.995,00**	**17.050.062.000,00**	**6.210.910.600,02**	**-11.765.149.995,00**							**0,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian*				10 Laporan	2 Laporan	1.055.000.000,00	705.000.000,00	650.910.600,02	-404.089.399,98			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelompok Tani/Masyarakat		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				5 Laporan	5 Laporan	265.000.000,00	65.000.000,00	32.373.800,02	-232.626.199,98	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				150 Ha	4,38 Ha	790.000.000,00	640.000.000,00	618.536.800,00	-171.463.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan																		
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan																		
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura																		
			Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan																		
			Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota																		
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian																		
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian terbangun*				20 Lokasi	31 Lokasi	10.710.149.995,00	16.345.062.000,00	5.560.000.000,00	-5.150.149.995,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelompok Tani/Masyarakat		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				30 Unit	47 Unit	7.810.149.995,00	10.425.062.000,00	3.650.000.000,00	-4.160.149.995,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	360.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	5 Unit	500.000.000,00	1.500.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				6 Unit	16 Unit	1.000.000.000,00	4.060.000.000,00	1.210.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**470.000.000,00**	**440.000.000,00**	**428.546.000,00**	**-470.000.000,00**							**0,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengandalian OPT Tanaman*				4 Laporan	4 Laporan	470.000.000,00	440.000.000,00	428.546.000,00	-41.454.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelompok Tani/Masyarakat		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	100 Ha	470.000.000,00	440.000.000,00	428.546.000,00	-41.454.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Cakupan usaha pertanian (Kios Pengecer Pupuk Bersubsudi) yang dibina dan diawasi**				**90 Persen**	**90 Persen**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**19.861.300,00**	**-40.000.000,00**							**0,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*laporan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian*				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	19.861.300,00	-20.138.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Bidang Usaha Pertanian/ Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				3 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	19.861.300,00	-20.138.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**810.000.000,00**	**3.294.200.000,00**	**3.474.241.300,00**	**-810.000.000,00**							**0,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Kelompok Tani mendapatkan Penyuluhan*				90 Persen	90 Persen	810.000.000,00	3.294.200.000,00	3.474.241.300,00	2.664.241.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Unit	15 Unit	60.000.000,00	1.369.200.000,00	626.721.300,00	566.721.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Unit	15 Unit	750.000.000,00	1.925.000.000,00	2.200.000.000,00	1.450.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	142 Orang	0,00	0,00	647.520.000,00	647.520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	J U M L A H								**35.454.930.151,00**	**40.814.382.039,00**	**31.905.900.034,98**	**-3.549.030.116,02**							**0,00**	

BAB IV

PENUTUP

Demikian penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, dengan harapan untuk dapat menjadi kerangka acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang optimal dan bersinergi dengan Program Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Diharapkan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dapat menjadi salah satu perwujudan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan penganggaran daerah berdasarkan skala prioritas usulan program dan kegiatan pembangunan bidang kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya dalam aplikasinya tetap memenuhi peraturan dan aturan pelaksanaan anggaran yang berlaku dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Melalui sarana Musyawarah Pembangunan Tahun 2025 agar menjadi forum sinkronisasi rencana kegiatan tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan pemutahiran sistem perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara secara khususnya.

Masukan dan saran dalam pelaksanaan penyusunannya akan lebih dipertimbangakan dalam penyempurnaan rencana kegiatan pada masa yang akan datang dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam Institusi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan kerangka regulasi yang ada.

Tarutung, 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS PERTANIAN

Ir. S.E.Y. PASARIBU, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680513 199403 1 004

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

dispora

PERUBAAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara

Jln. Sisingamangaraja No. 199 Tarutung, 22411
Sumatera Utara Tel/Fax.
Website : http//www.taputkab.go.id; Email: disporataputkab@gmail.com

KATA PENGANTAR

Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja mengacu pada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara 2023.

Perubahan dalam Renja Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program, kegiatan dan Subkegiatan serta perubahan target indicator kinerja. Perubahan Renja diakibatkan oleh perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Pemuda dan Olahraga KabupatenTapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan RKA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara.

Kami sangat menyadari bahwa Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 masih perlu perbaikan dan untuk itu kritik serta sumbang saran pembaca dan semua pihak sangat kami harapkan untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 di masa yang akan datang.

Tarutung, Juli 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Ir. MARCO T. P. PANGGABEAN M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670317 199203 1 009

Dipindai dengan CamScanner

DAFTARISI

			Hal.
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I	PENDAHULUAN		I.1
	1.1	Latar Belakang	I.1
	1.2	Landasan Hukum	I.2
	1.3	Maksud dan Tujuan	I.4
	1.4	Sistematika Penyusunan	I.5
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025		II.1
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II.1
	2.2	Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD	II.9
	2.3	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II.10
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		III.1
	3.1	Telaahan Terhadap Program Nasional	III.1
	3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	III.2
	3.3	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	III.7
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		IV.1
	4.1	Telaahan Terhadap Program Nasional	IV.1
	4.2	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2025	VI.2
BAB IV	PENUTUP		V.1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (P-RKA PD), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD).

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara 2025.

Perubahan dalam Renja Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indicator kinerja program dan kegiatan. Perubahan Renja diakibatkan oleh perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Pemuda dan Olahraga KabupatenTapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan RKA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6232);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standard Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;

26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 ;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2014;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017-2037;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2025;
33. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai acuan/pedoman perubahan penganggaran tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara daerah Tahun 2025. Adapun tujuannya adalah:

1. Menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025.
2. Tersedianya acuan untuk penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.
3. Sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah yang mencakup:

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun berjalan. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut urusan pemerintah daerah.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Program Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

3.1 Telaahan Terhadap Program Nasional
3.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 mengacu pada pencapaian Kinerja dan Keuangan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026.

Capaian Kinerja dan Keuangan Renja Tahun 2025 berisi target dan realisasi yang dilaksanakan dari DPA tahun 2025 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025. Target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga dan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025, sedangkan jumlah anggaran untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025.

Realisasi penyerapan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan semester I tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.541.298.204,00 atau 14,76% persen dari total pagu OPD pada APBD sebesar Rp. 2.887.653.144,-.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan semester I tahun 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) digunakan untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaian dengan Renstra.

Untuk mengetahui capaian target yang direncanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan semester I tahun 2025 dengan realisasi yang terjadi dapat dilihat berdasarkan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2021 sebesar Rp. 2.887.653.144,-. untuk melaksanakan 3 program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 37 sub kegiatan sebagaimana disajikan dalam table 2.1.

Tabel 2.1
Evaluasi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara

Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode Keg/Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra Tahun 2030		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja Renja 2025 (%)	
						Target Kinerja Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025 s/d Tw II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				16.100.794.425		3.092.615.894		1.362.633.116	23,80	22,93
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang yang tertangani	Persen	600	13.354.022.167	100	2.532.881.394	50	1.160.533.547	47,60	22,10
2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	600	104.991.550	100	18.491.550	50	4.545.800	53,33	30,00
2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	12	12.999.950	2	1.999.950	1	648.400	33,33	32,42
2 19 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	12	10.000.000	2	1.500.000	1	469.400	50,00	31,29
2 19 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	12	6.999.700	2	999.700	1	292.000	33,33	29,21
2 19 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	6	12.999.900	1	1.999.900	1	742.000	100,0	37,10
2 19 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	72	61.992.000	12	11.992.000	6	2.394.000	50,00	19,96

2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan PD	Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	600	11.719.232.297	100	2.173.309.394	50	1.098.890.454	49,89	51,84
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	72	11.403.562.097	12	2.119.726.394	6	1.072.631.254	33,00	2.079
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dok	72	306.170.400	12	51.583.200	6	25.459.600	16,67	1.273
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	6	9.499.800	1	1.999.800	1	799.600	100	39,98
2	19	01	2.06		Administrasi Umum PD	Tingkat Ketersediaan Barang Jasa Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	600	633.427.300	100	116.973.650	50	19.146.839	32,00	12
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	72	50.367.000	12	8.967.000	6	1.765.600	33,33	19,69
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	72	64.995.850	12	9.995.850	6		33,33	-
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	72	50.372.800	12	8.997.800	6	1.188.000	33,33	13,20
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	72	46.678.650	12	8.000.000	6	800.000	33,33	10,00
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok		421.013.000		81.013.000		15.393.239	26,67	19,00
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	600	483.211.200	100	185.311.200	50	34.525.242	52,78	14,26
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	72	355.800.000	12	57.900.000	6	7.277.670	33,33	12,57
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	72	127.411.200	12	127.411.200	3	27.247.572	25,00	21,39

2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	600	413.159.820	100	38.795.600	50	3.425.212	100,0	8,83
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	153.849.300	2	28.849.300	1	3.125.212	50,00	2,02
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72	49.452.600	6	4.952.600	3	300.000	33,33	6,06
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	36	209.857.920	6	4.993.700	3		50,00	-
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen		1.084.234.500		149.234.500		-	-	-
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Lap	6	634.234.500	6	74.234.500	-		-	-
2	19	02	2.01	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Keg	6	634.234.500	1	74.234.500	-		-	-
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lap	6	450.000.000	0	75.000.000	-		-	-
2	19	02	2.02	03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organi	36	450.000.000	6	75.000.000	-	-	-	-
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Perolehan Medali	Medali		1.662.537.758		410.500.000		202.099.569	-	-

2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Lap	6	677.537.758	1	130.500.000	-	11.440.000	-	23,76
2	19	03	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, danpengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	36	677.537.758	6	130.500.000	3	11.440.000	50,00	8,77
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Lap	6	430.000.000	1	80.000.000	1	65.659.569	100,0	82,07
2	19	03	2.03	06	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	60	430.000.000	10	80.000.000	10	65.659.569	100,0	62,50
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Lap	12	555.000.000	2	200.000.000	1	125.000.000	50,00	62,50
2	19	03	2.04	06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi KeolahragaanKabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Lap	12	555.000.000	2	200.000.000	1	125.000.000	50,00	

2.2 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2025

Dalam perjalanan tahun 2025 terdapat pergeseran anggaran melalui peraturan Bupati Tapanuli Utara yang berpengaruh terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dispora dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dispora, dengan arahan kepala Dinas terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Dinas berdasarkan rancangan awal RKPD disajikan pada Tabel 2,3.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024

Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Rancangan Perubahan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinera	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinera	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**				3.271.204.641	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**				3.271.204.641	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Cakupan Layanan Penunjang yang tertangani	100 %	2.109.186.795	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Cakupan Layanan Penunjang yang tertangani	100 %	2.109.186.795	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Keg	22.898.950	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Keg	22.898.950	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	799.650	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	799.650	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		599.650			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		599.650	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	399.750	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	399.750	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	799.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	799.900	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.300.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Keg	1.851.810.366	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Keg	1.851.810.366	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bln	1.799.427.566	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bln	1.799.427.566	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifokasi Keuangan SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bln	51.583.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifokasi Keuangan SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bln	51.583.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok	799.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok	799.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat Ketersediaan Barang Jasa Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Keg	90.933.475	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat Ketersediaan Barang Jasa Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Keg	90.933.475	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispora	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Bln	3.583.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispora	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Bln	3.583.600	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Dispora	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Bln	7.736.675	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Dispora	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Bln	7.736.675	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispora	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Bln	7.463.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispora	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Bln	7.463.200	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispora	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Bln	3.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispora	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Bln	3.200.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispora	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Bln	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispora	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Bln	0	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bln	68.950.000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bln	68.950.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang	3	Keg	100.209.400	Penyediaan Jasa Penunjang		Tingkat Ketersediaan Jasa	3	Keg	100.209.400	

	Pemerintah Daerah		Urusan Pemerintah Daerah				Urusan Pemerintah Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bln	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bln	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bln	72.907.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bln	72.907.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bln	27.302.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bln	27.302.400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Keg	42.731.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Keg	42.731.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispora	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Bln	21.914.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispora	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Bln	21.914.300	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispora	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Bln	3.385.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispora	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Bln	3.385.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispora	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Bln	17.431.700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispora	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Bln	17.431.700	
2	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**		Rasio Wirausaha Pemuda		%	169.618.250	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**		Rasio Wirausaha Pemuda	100	%	169.618.250	
	Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader		Jumlah Laporan Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan	3	Keg	94.616.250	Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan		Jumlah Laporan Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda	3	Keg	94.616.250	

	Kabupaten/Kota		Pemuda Kader Kabupaten / Kota			Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat kabupaten/kota	Dispora	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Keg	94.616.250		Dispora	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Keg	94.616.250	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Keg	75.000.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Keg	75.000.000	
	Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Dok	75.000.000		Dispora	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Dok	75.000.000	
3	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**		Jumlah Perolehan Medali	129 Mdl	993.005.200	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**		Jumlah Perolehan Medali	129 Mdl	993.005.200	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Keg	224.195.200	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Keg	224.195.200	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit	224.195.200	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit	224.195.200	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah		Jumlah laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	1 Keg	68.810.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah		Jumlah laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	1 Keg	68.810.000	

	Provinsi		Tingkat Daerah Provinsi			Provinsi		Tingkat Daerah Provinsi				
	Seleksi Atlet Daerah	Dispora	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	6	Org	68.810.000	Seleksi Atlet Daerah	Dispora	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	6	Org	68.810.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100	%	700.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100	%	700.000.000	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dispora	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2	Org	700.000.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dispora	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2	Org	700.000.000	

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan.

Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara'

Pada tahun 2020, tidak ada usulan masyarakat melalui Musrenbang yang dapat diakomodir oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 2.4

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara

Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**				Tdk ada
	-	-	-	-	-
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**				Tdk ada

Sumber : Musrenbang Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Program Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis,
bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3).

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk, pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan Pemuda dan Olahraga dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa (pasal 4).

Pembangunan keolahragaan dapat dilaksanakan melalui :

1. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
2. Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat, Olahraga masyarakat dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.
3. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga.
4. Pemasalahan Olahraga sebagai Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat.
5. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat.
6. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
7. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan olahraga professional.

8. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.
9. Pendanaan olahraga.
10. Penyelenggaran akreditasi dan sertifikasi.
11. Pemberian penghargaan.
12. Pelaksanaan pengawasan
13. Evaluasi nasional terhadap pencapaian standard nasional keolahragaan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan

3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur.

Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bag masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah.

3.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sasaran strategi tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Tahun 2025-2029 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara dapat ditunjukkan pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

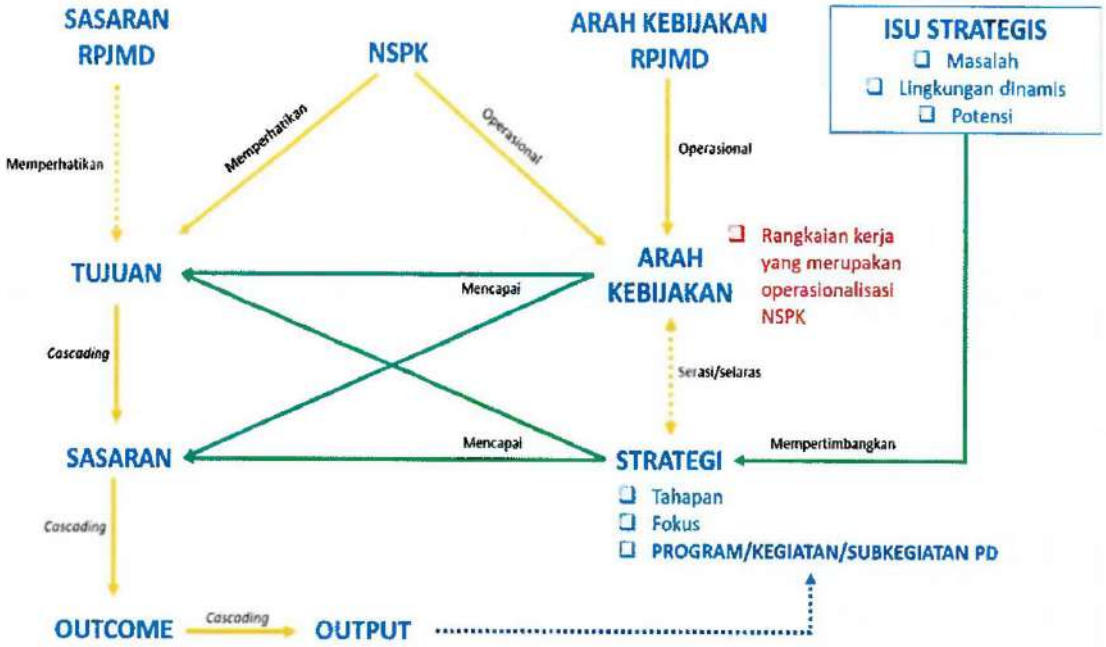

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah**, **Tujuan dan sasaran pembangunan daerah**, **strategi dan arah kebijakan pembangunan**, dan **Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Dawarblandong yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja dan RKPD

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

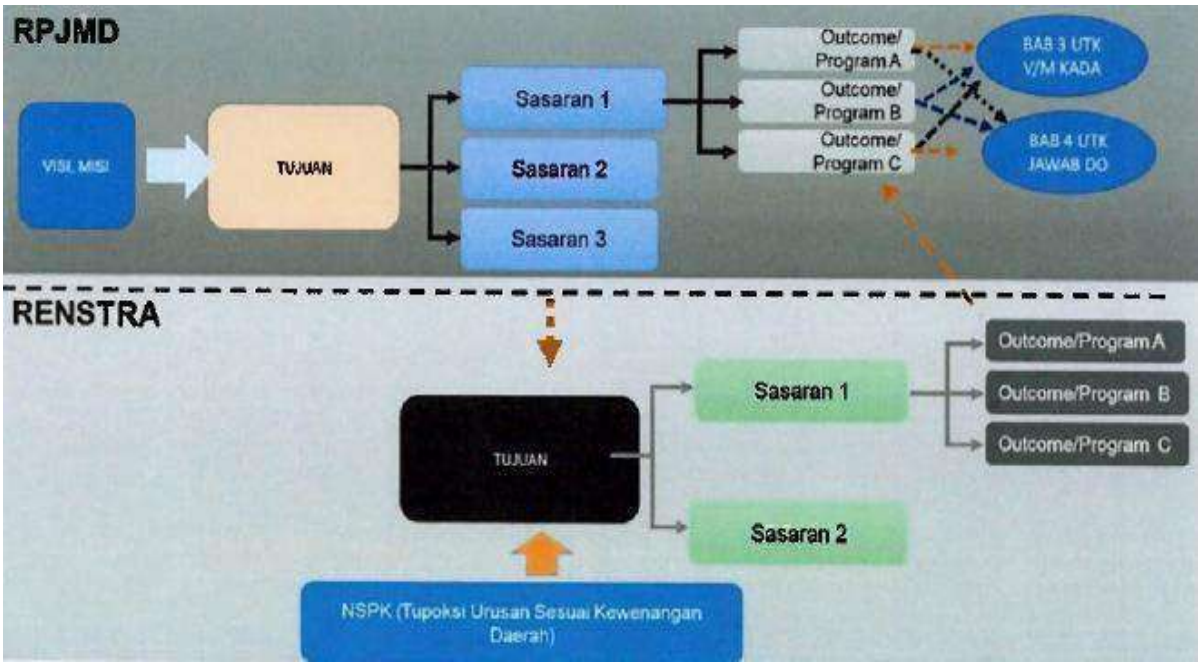

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program dan kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2025-2029, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara mendukung Misi ke 3 yaitu : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, pencegahan stanting serta peningkatan peran generasi muda dan perempuan dalam pembangunan dengan tujuan 3.1 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Responsif Gender dengan Sasaran 3.1.4 Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan.

Sekaitan dengan hal tersebut di atas maka Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan dan Prestasi Olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda	57,67	57,77	57,87	57,97	58,07	58,17	58,27	
		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63.22	65.22	67.22	69.22	71.22	73.22	75.22	
		Meningkatkan Pemberdayaan dan kapasitas pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	3,84	3,85	3,86	3,87	3,88	3,89	3,90	
			Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,638	0,640	0,642	0,644	0,646	0,648	0,650	
		Meningkatkan sarana prasarana dan pembinaan keolahragaan	Indeks Pembangunan Olahraga	0,35	0,38	0,40	0,42	0,45	0,47	0,50	

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program-program diharapkan akan dapat memacu peningkatan kinerja aparatur. Pelaksanaan dari program adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 dan turunannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, Dinas Pemuda dan Olahraga diarahkan pada 3 (tiga) Program. Perumusan program dan kegiatan untuk Tahun 2025, menyesuaikan antara indetifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara menurut RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	2.532.881.394
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	149.234.500
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	410.500.000
Jumlah	**Rp.**	**3.092.615.894**

Selengkapnya program dan kegiatan dan sub kegiatan beserta target indicator disajikan sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kode Kegiatan					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	19				**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**				3.092.615.894	3			3.378.215.894
2	19	O 1			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi		100%	2.532.881.394	3		100%	2.598.215.894
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Lap	18.491.550	3		5Lap	21.000.000
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora	3 Dok	1.999.950	3		3 Dok	2.500.000
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispora	2 Dok	1.500.000	3		2 Dok	2.000.000

2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dok	999.700	3		2 Dok	1.500.000
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora	1 Dok	1.999.900	3		1 Dok	2.500.000
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora	1 Lap	11.992.000	3		1 Lap	12.500.000
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		3 Lap	2.173.309.394	3	3 Lap		2.172.804.778
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora	19 Org/ Bulan	2.119.726.394	3		19 Org/ Bulan	2.119.717.578
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifokasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispora	12 Dok	51.583.200	3		12 Dok	50.587.200
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispora	1 Lap	1.999.800	3		1 Lap	2.500.000

2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispora	5 Lap	116.973.650	3		5 Lap	170.000.000
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dispora	12 Paket	8.967.000	3		12 Paket	10.000.000
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dispora	12 Paket	9.995.850	3		12 Paket	11.000.000
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dispora	12 Paket	8.997.800	3		12 Paket	10.000.000
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dispora	12 Paket	8.000.000	3		12 Paket	9.000.000
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora	75 Lap	81.013.000	3		75 Lap	130.000.000
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dispora	2 Lap	185.311.200	3		2 Lap	187.411.116
2	19	01	2.01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dispora	12 Lap	57.900.000	3		12 Lap	60.000.000

2	19	01	2.01	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dispora	12 Lap	127.411.200	3		12 Lap	127.411.116
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3 Lap	38.795.600	3		3 Lap	47.000.000
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dispora	2 Unit	28.849.300	3		2 Unit	35.000.000
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dispora	20 Unit	4.952.600	3		20 Unit	6.000.000
2	19	01	2.01	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dispora	6 Unit	4.993.700	3		6 Unit	6.000.000
2	19	02			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	Persentase Wirausaha Muda			**149.234.500**	3		Persen	**190.000.000**
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/	Jumlah Laporan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula,		1 Lap	74.234.500	3		1 Lap	110.000.000

					Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	dan Pemuda Kader							
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Dispora		74.234.500	3			110.000.000
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 Lap	75.000.000	3		1 Lap	80.000.000
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Dispora	1 Ogs	75.000.000	3		1Ogs	80.000.000
2	19	03			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Jumlah Perolehan Medali**		126 Medali	**410.500.000**	3		129 Medali	**590.000.000**
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1 Lap	130.500.000	3		1 Lap	140.000.000

2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dispora	4 Unit	130.500.000	3		4 Unit	140.000.000
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		1 Lap	80.000.000	3		1 Lap	100.000.000
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Dispora	10 Org	80.000.000	3		10 Org	100.000.000
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		1 Lap	200.000.000	3		1 Lap	350.000.000
2	19	03	2.04	06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dispora	2 Dok	200.000.000	3		2 Dok	350.000.000

Tarutung, Juli 2024

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Ir. MARCO T. P. PANGGABEAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670317 199203 1 009

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Telaahan Terhadap Program Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3).

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk, pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan Pemuda dan Olahraga dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa (pasal 4).

Pembangunan keolahragaan dapat dilaksanakan melalui :

1. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
2. Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat, Olahraga masyarakat dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.
3. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga.
4. Pemasalahan Olahraga sebagai Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat.
5. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat.
6. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
7. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan olahraga professional.

8. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.
9. Pendanaan olahraga.
10. Penyelenggaran akreditasi dan sertifikasi.
11. Pemberian penghargaan.
12. Pelaksanaan pengawasan
13. Evaluasi nasional terhadap pencapaian standard nasional keolahragaan.

4.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2025

Perumusan program dan kegiatan untuk Tahun 2025, menyesuaikan antara indetifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara menurut rancangan P-RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional, dan Kebijakan Provinsi.

Secara keseluruhan, total belanja pada perubahan Renja 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. 3.271.204.641,- dari yang semula Rp. 3.092.615.894,- atau bertambah sebesar Rp. **178.588.747**,- . Penambahan ini diakibatkan adanya kegiatan-kegiatan lain yang harus dianggarkan seperti Hibah dan Pertandingan Olahraga dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025. Secara rinci perubahan Belanja dalam Program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 4.1

Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara

Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode Keg/Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025				Alasan Perubahan
				Target Kinerja Renja Tahun 2025		Target Kinerja P- Renja PD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				K	Rp.	K	Rp.	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAG				3.092.615.894		3.271.204.641	
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang yang tertangani	Persen	100	2.532.881.394	100	2.108.583.191	
2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	18.491.550	100	22.898.950	
2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	1.999.950	2	799.650	
2 19 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	2	1.500.000	2	599.650	
2 19 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	2	999.700	2	399.750	
2 19 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	1	1.999.900	1	799.900	

2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	12	11.992.000	12	20.300.000	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan PD	Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	2.173.309.394	100	1.851.810.366	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12	2.119.726.394	12	1.799.427.566	
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dok	12	51.583.200	12	51.583.200	
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1.999.800	1	799.600	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum PD	Tingkat Ketersediaan Barang Jasa Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	116.973.650	100	90.933.475	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.967.000	12	3.583.600	
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	9.995.850	12	7.736.675	
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8.997.800	12	7.463.200	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	8.000.000	12	3.200.000	
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	72	81.013.000	60	68.950.000	
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	185.311.200	100	100.209.400	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	57.900.000	12	72.907.000	
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Lap	12	127.411.200	3	27.302.400	

						Disediakan						
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	38.795.600	100	42.731.000	
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	28.849.300	2	21.914.300	
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	4.952.600	6	3.385.000	
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	4.993.700	6	17.431.700	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen		149.234.500		169.616.250	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Lap	1	74.234.500	1	94.616.250	
2	19	02	2.01	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Keg	1	74.234.500	1	94.616.250	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lap	1	75.000.000	1	75.000.000	
2	19	02	2.02	03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organi	6	75.000.000	6 -	75.000.000	

2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Perolehan Medali	Medali	123	410.500.000	123	993.005.200	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Lap	1	130.500.000	1	224.195.200	
2	19	03	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, danpengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	6	130.500.000	6	224.195.200	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Lap	1	80.000.000	1	68.810.000	
2	19	03	2.03	06	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	10	80.000.000	10	68.810.000	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Lap	2	200.000.000	2	700.000.000	
2	19	03	2.04	06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi KeolahragaanKabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Lap	2	200.000.000	2	700.000.000	

Tarutung, Juli 2025
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Ir. MARCO T. P. PANGGABEAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670317 199203 1 009

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 ini, maka kebijakan, program dan kegiatan DISPORA Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 akan mengacu pada Renja ini.

Diharapkan semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Tapanuli Utara ini dapat terealisasi dengan baik, sehingga Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara dengan Visi dan Misi Kabupaten yang tertuangkan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 dapat diwujudkan.

Tarutung, Juli 2024

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Ir. MARCO T.P. PANGGABEAN M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670317 199203 1 009

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)
TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih karuniaNya semata sehingga **"Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara"** Tahun Anggaran 2025 ini dapat disusun.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 belum sempurna, untuk itu di harapkan kritik dan sarannya, agar masa mendatang dapat lebih disempurnakan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai landasan pijakan guna penyusunan program dan kegiatan pada tahun - tahun berikutnya.

Pada akhirnya semoga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini bermanfaat bagi kita semua.

Tarutung, Agustus 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten
Tapanuli Utara,

Dalan N.P. Simanjuntak, ST., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19730214 200502 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berkenan 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 15

2.4 Review terhadap RKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli UtaraKabupaten 19

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi 26

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja SKPD 27

3.3. Program dan Kegiatan 30

BAB IV. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 38

BAB V. PENUTUP 44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, disebutkan bahwa proses penyusunan Renja Perubahan SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perubahan SKPD. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan SKPD yang definitif. Keterkaitan antara Perubahan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, bahwa Renja Perubahan merupakan penjabaran Perubahan Renstra SKPD. Kemudian Renja Perubahan tersebut dijabarkan melalui Perubahan RKA SKPD yang berisi rincian Perubahan APBD untuk disusun menjadi Rancangan Perubahan APBD (R. P APBD). Sedangkan kaitannya dengan RKPD, Perubahan Renja menjadi landasan dalam penyusunan RKPD dimaksud.

Renja menduduki posisi penting dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA) ke dalam operasionalisasi program dan kegiatan berupa penganggarannya, yang menjembatani antara perencanaan strategis jangkamenengah dan tahunan.

Adapun ruang lingkup Perubahan Renja Tahun 2025 adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara selama satu tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dapat dicapai, dimana Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja(Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat IIMandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005- 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025- 2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2025 tentang Renstra Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya melakukan penyesuaian atas perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan tahun 2025.

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah

1. Menjadi acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.
2. Tersedianya acuan untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai pedoman 1 (satu) tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPJ).

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- **BAB I. PENDAHULUAN**
  - **1.1. Latar Belakang**
  - **1.2. Landasan Hukum**
  - **1.3. Maksud dan Tujuan**
  - **1.4. Sistematika Penulisan**
- **BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**
  - **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**
  - **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD**
  - **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

2.4. Review trehadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- **BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA DINAS PUPR**

2.5. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

2.6. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

2.7. Program dan Kegiatan

- **BAB IV. RENCANA KERJA PD**
- **BAB V. PENUTUP**

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/ program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada Triwulan II, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. **21,127,243,155.31** dan Realisasi Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli UtaraKabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **6,637,940,653.00** atau mencapai 31,42 %. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli UtaraKabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Utara Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Hasil) Kegiatan (Keluaran)	Target Capaian Kinerja		Jumlah Pagu	Realisasi Kinerja per Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja terhadap Renja tahun 2024 (%)
						I	II	III	IV	
1	2	3			4					
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**3**			**21,127,243,155.31**		**6,637,940,653.00**			31.42
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100**	**%**	**9,294,590,512.10**	**2,568,341,509.00**	**4,231,966,120.00**			**45,53**
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7**	**Dokumen**	**26,145,350.00**	**249,300.00**	**11,665,700.00**			**44,62**
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	**Dokumen**	**11,808,600.00**	249,300.00	**5,767,300.00**			48,84
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	**Laporan**	**2,014,000.00**	0	**907,500.00**			45,06

1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi perangkat Daerah	1	**Laporan**	**12,322,750.00**	0	**4,990,900.00**			40,50
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani**	**20**	**Dokumen**	***7,788,601,905.00***	**2,154,873,391.00**	**3,458,164,177.00**			**44,40**
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	**7,708,913,645.00**	2,154,873,391.00	**3,431,743,177.00**			44,52
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1	**Laporan**	**76,489,200.00**	0	**25,496,400.00**			33,33
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	**Laporan**	**1,599,280.00**	0	**408,000.00**			25,51
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	**Laporan**	**1,599,780.00**	0	**516,600.00**			32,29
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3**	**Laporan**	***1,999,440.00***	**0**	**0**			**0**
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**3**	**Laporan**	**1,999,440.00**	0	**0**			0
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**11**	**Dokumen**	***231,309,861.10***	**50,812,940.00**	**93,111,244.00**			**40,25**
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	**1,999,600.00**	0	**1,980,000.00**			99,02

1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	**42,335,050.00**	0	**0**			0
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	**12,029,800.00**	5,155,000.00	**11,998,000.00**			99,74
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	**8,086,411.10**	3,776,000.00	**8,086,000.00**			99,99
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Doumen	**26,515,000.00**	0	**0**			0
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	**10,000,000.00**	0	**0**			0
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	**130,344,000.00**	41,881,940.00	**71,047,244.00**			54,51
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani**	**36**	**Laporan**	**792,112,194.00**	**167,413,181.00**	**265,863,888.00**			**33,56**
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	**11,193,000.00**	1,216,500.00	**1,216,500.00**			10,87
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	**49,653,594.00**	4,501,881.00	**12,700,588.00**			25,58
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	**731,265,600.00**	161,694,800.00	**251,946,800.00**			34,45

1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**Bulan**	**454,421,762.00**	**194,992,697.00**	**403,161,111.00**			**88,72**
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51	Unit	**75,020,962.00**	4,450,000.00	**59,591,100.00**			79,43
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	51	Unit	**367,116,000.00**	190,542,697.00	**337,965,011.00**			92,06
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	**5,621,600.00**	0	**5,605,000.00**			99,70
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	**6,663,200.00**	0	**0**			0
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%)**	**22,08**	**%**	**1,718,107,500.00**	**0**	**465,720,000.00**			**27,11**
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6,11**	**KM**	**1,718,107,500.00**	**0**	**465,720,000.00**			**27,11**
1.03.02.2.02.0014	**Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**	**Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi**	**6,04**	**KM**	**1,658,107,500.00**	**0**	**457,800,000.00**			**27,61**
1.03.02.2.02.0021	**Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**	**Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara**	**0,071**	**KM**	**12,000,000.00**	**0**	**0**			**0**

1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3	Dokumen	48,000,000.00	0	7,920,000.00			16,50
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	69,95	%	10,105,353,493.21	261,134,700.00	1,940,254,533.00			19,20
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap 2. Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	15.124	KM	10,105,353,493.21	261,134,700.00	1,940,254,533.00			19,20
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	9	Dokumen	552,231,000.00	22,419,900.00	134,499,933.00			24,36
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	60	KM	1,332,200,000.00	0	142,200,000.00			10,67
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan	92,28	KM	3,259,430,000.00	0	284,430,000.00			8.73
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang direhabilitasi	8,8	Unit	0	0	0			0
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	165	Jembatan	1,200,000,000.00	0	0			0
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	7	Dokumen	0	0	0			0
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	8,08	KM	3,216,052,493.22	205,500,000.00	1,314,321,000.00			55,35
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2,1	KM	545,439,999.99	33,214,800.00	64,803,600.00			11,88

1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang**	**6**	**Dokumen**	**9,191,650.00**	**0**	**0**			**0**
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**1**	**Dokumen**	**9,191,650.00**	**0**	**0**			**0**
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	**1**	**Dokumen**	**9,191,650.00**	0	**0**			**0**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Kajian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tersusun dalam tabel 2.2. Berikut kinerja pelayanan OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli UtaraKabupaten Tapanuli Utara

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian						Proyeksi
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	-	-	65	66	66,75	69,05	69,95	64,75	67,15	67,87	68,83	69,43	47.26	
2	Persentase jumlah jembatan kondisi baik	-	-	78	84,6	84,00	89	90	82,00	82,81	85,87	89,62	90,16	89.07	
3	Cakupan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat	-	-	N/A	N/A	57	-	-	N/A	N/A	57	-	33	-	
4	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (%)	-	-	72,5	67,64	67,66	73,10	75,10	67,62	69,00	69,49	73,71	75,01	61.10	
5	Cakupan ketersediaan dokumen Tata Ruang (%)	-	-	N/A	33,33	35	25	31,25	N/A	0	20,00	-	20	33,33	
	Persentase Jumlah Kecamatan yang memiliki RDTR	-		N/A	33,33	33,33	25,00	31,25	N/A	6,25	20,00	20,00	20	20	
6	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	-	-	60,00	70,00	72,00	75,00	78,00	59,8	53,66	53,66	-	70,87	71,41	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		66,30	53,66	72,00	75,00	78,00	59,8	53,66	53,66	61,10	62,56		
7	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	100	100	100	-		100	100	100	-	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tingkat Kinerja Pelayanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja	Predikat
					Target	Realisasi		
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jaringan Jalan	1.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	Persen	69,95	47,26	67.56	Sedang
		2.	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	Persen	92,05	89,07	96.76	Sangat tinggi
2.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Air	1.	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi	Persen	76,10	61.10	80.28	Sangat tinggi
3.	Meningkatkan fungsi Penataan dan Pengendalian Tata Ruang	1.	Persentase Kecamatan yang sudah memiliki RDTR	Persen	40	20	30	Sangat rendah
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	71,41	89,26	Sangat tinggi
Jumlah rata-rata capaian kinerja							**72,77**	**Tinggi**

**Angka perhitungan Kertas Kerja Evaluasi AKIP Dinas PUTR tahun 2024*

Tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian kinerja dari keempat sasaran strategis adalah tahun 2024 adalah 72,77 %

Sasaran strategis **Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jaringan Jalan** mempunyai 2 (dua) indikator yaitu :

1. Indikator Kinerja Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap

Hal ini menunjukkan keadaan jalan mantap jalan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Kondisi jalan kewenangan Kabupaten dibagi dalam 4 (empat) katagori yaitu kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Jalan mantap merupakan penjumlahan kondisi baik ditambah kondisi sedang (Permen PU No.13 Tahun 2011).

Persentase kondisi jalan mantap tahun 2024 ditargetkan sebesar 69,45% dapat direalisasikan sebesar 47,26 % dengan capaian kinerja sebesar 67,56 %, dicapai melalui Program Penyelenggaraan Jalan. Dalam mewujudkan pencapaian target indikator tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2024 melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 1,45 km, rekonstruksi jalan sepanjang 20,57 km, rehabilitasi jalan sepanjang 1,93 km.

Adapun rincian realisasi fisik jenis penanganan program tersebut pada tahun 2024 adalah perkerasan hotmix sepanjang 19,48 km, perkerasan lapis penetrasi macadam sepanjang 2,890 km, perkerasan telford sepanjang 1,14 km, perkerasan beton sepanjang 0,44 km, gorong-gorong 1 unit serta dyk semen sepanjang 29 m' dan Rehabilitasi Jembatan sebanyak 1 Unit. Sumber pembiayaan adalah bersumber dari APBD (DAU, DAK, Bonus Produksi).

Untuk mempertahankan capaian kondisi jalan mantap ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara perlu secara serius menangani pemeliharaan jalan yang sudah baik dan perlu lebih memaksimalkan potensi sumber dana yang lain dalam upaya meningkatkan capaian kondisi jalan mantap di Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Indikator Kinerja Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik

Persentase jumlah jembatan kondisi baik menunjukkan keadaan jumlah jembatan dalam kondisi baik yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Persentase jumlah jembatan kondisi baik tahun 2024 ditargetkan sebesar 92,05 % dapat direalisasikan sebesar 89,07 % dengan capaian kinerja sebesar 96,76 % dicapai melalui Program Penyelengaraan Jalan. Realisasi fisik jembatan tahun 2024 adalah rahabilitasi jembatan sebanyak 1 unit jembatan.

Sumber pembiayaan adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara T.A 2024. Untuk mempertahankan capaian jembatan dalam kondisi baik ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara perlu secara serius menangani pemeliharaan jembatan yang kondisinya saat ini masih baik dan perlu lebih memaksimalkan potensi sumber dana yang lain dalam upaya meningkatkan capaian kondisi jembatan baik di Kabupaten Tapanuli Utara.

3. Sasaran Meningkatnya **Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air** merupakan upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan persentase pelayanan air irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara. Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu **Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi** dengan kategori Sangat tinggi. Persentase Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi tahun 2024 ditargetkan sebesar 76,10% dapat direalisasikan sebesar 61,10 % dengan capaian kinerja sebesar 80,28 %, dicapai melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Dalam mewujudkan pencapaian target indikator tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dengan membangun saluran semen dan saluran talang sepanjang 6.157 m'.

Indikator sasaran Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 80,28 %, predikat sangat tinggi. Capaian tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 98,88 % dengan predikat sangat tinggi.

Adapun pencapaian melalui indkator kinerja Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi dapat

dijelaskan sebagai berikut:

- **Persentase areal terdampak kondisi jaringan irigasi** menunjukkan keadaan jaringan irigasi mantap yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Kondisi saluran irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dibagi dalam 4 (empat) katagori yaitu panjang saluran irigasi kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Panjang saluran irigasi kondisi mantap merupakan penjumlahan kondisi baik ditambah kondisi sedang. Persentase irigasi kondisi baik tahun 2024 ditargetkan sebesar 75,10% dapat direalisasikan sebesar 75,01 %, dengan capaian kinerja sebesar 99,88 % dicapai melalui Program Pengembangan Sumber Daya Air. Adapun realisasi fisik dari program tersebut pada tahun 2024 adalah saluran semen sepanjang 6.157 m',Rehab Pintu Air sebanyak 7 Unit, talang sebanyak 3 unit. Sumber pembiayaan adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara T.A.2024. Capaian ini dapat diperoleh dengan adanya Dana alokasi Khusus Bidang sumber daya air.

  Sasaran **Meningkatkan fungsi penataan dan pengedalian tata ruang** merupakan upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan jumlah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara yang memiliki dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pada tahun 2022 dilakukan perubahan RENSTRA sesuai dengan reviu Tim Sakip, dimana **indikator sasaran dan target indiktor sasaran Meningkatkan fungsi penataan dan pengedalian tata ruang yang semula dengan indikator Cakupan ketersediaan dokumen Tata Ruang (%) berubah menjadi Persentase jumlah kecamatan yang memiliki RDTR.** Adapun capaian kinerja sasaran Meningkatkan fungsi penataan dan pengedalian tata ruang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase kecamatan yang sudah memiliki RDTR dengan kategori tinggi. Persentase kecamatan yang sudah memiliki RDTR tahun 2023 ditargetkan sebesar 40 % dengan realisasi 20% sehingga capaian kinerja sebesar 30 %, dicapai melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

  Dalam mewujudkan pencapaian target indikator tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan penyusunan 2 (dua) RDTR pada tahun 2022 yaitu RDTR Muara dan RDTR Siborongborong tidak dapat direalisaskan mengingat pada tahun 2021 terbit Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang provinsi, kabupaten, kota dan rencara detail tata ruang, sehingga meteri teknis yang sebelumnya telah dibuat mengikuti pedoman peraturan sebelumnya yaitu Permen ATR BPN No. 16 tahun 2018 harus direvisi kembali sesuai peraturan terbaru.

  Dalam pemenuhan sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai AKIP perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas ini adalah melakukan perubahan terhadap sasaran strategis, indikator sasaran strategis dan target indikator. Capaian kinerja Nilai AKIP perangkat daerah tahun 2024 sebesar 89,26 %.

2.4. Review terhadap RKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 merupakan rancangan program kegiatan Renja satu tahun yaitu tahun 2025. Sampai saat penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan, perkiraan kebutuhan masih tetap sama, dengan kata lain tidak ada perubahan kondisi yang mengharuskan adanya penyesuaian.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 21.127.243.155.31 sebagaimana tersaji dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara

No	Rancangan Awal RKPD				Pagu Indikatif	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**51,817,805,819.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**21,127,243,155.31**	
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**8,747,641,169.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**9,294,590,512.10**	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	**30,000,000.00**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	**26,145,350.00**	

2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Cakupan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani	20 Dokumen	**7,701,320,145.00**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Cakupan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani	20 Dokumen	***7,788,601,905.00***	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Laporan	**4,998,600.00**	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Laporan	**1,999,440.00**	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Dokumen	**344,997,375.00**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Dokumen	**231,309,861.10**	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Cakupan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani	36 Laporan	**150,517,794.00**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Cakupan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani	36 Laporan	**792,112,194.00**	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	**515,807,255.00**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	**454,421,762.00**	
II.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%)**	**22,08 %**	**10,260,175,000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%)**	**22,08 %**	**1,718,107,500.00**	
7.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,11 KM	**10,260,175,000.00**	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,11 KM	**1,718,107,500.00**	

8.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Tapanuli Utara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6,04 KM	10,240,175,000.00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Tapanuli Utara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6,04 KM	**1,658,107,500.00**	
9.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tapanuli Utara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,071 KM			Tapanuli Utara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,071 KM	**12,000,000.00**	
10.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tapanuli Utara	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	20,000,000.00	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tapanuli Utara	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	**48,000,000.00**	
III.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap**	**69,95 %**	**32,789,989,750.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap**	**69,95 %**	**10,105,353,493.21**	
11	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap 2. Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	15.124 KM	**32,789,989,750.00**	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap 2. Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	15.124 KM	**10,105,353,493.21**	
12.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	9 Dokumen	**1,445,239,000.00**	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	9 Dokumen	**552,231,000.00**	
13.	Pembangunan Jalan	Tapanuli Utara	Panjang Jalan yang Dibangun	60 KM	240,000,000.00	Pembangunan Jalan	Tapanuli Utara	Panjang Jalan yang Dibangun	60 KM	**1,332,200,000.00**	

14.	Rekonstruksi Jalan	Tapanuli Utara	Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan	92,28 KM	29.784.750.750,00	Rekonstruksi Jalan	Tapanuli Utara	Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan	92,28 KM	**3,259,430,000.00**	
15.	Rehabilitasi Jembatan	Tapanuli Utara	Panjang Jembatan yang direhabilitasi	8,8 Unit	0	Rehabilitasi Jembatan	Tapanuli Utara	Panjang Jembatan yang direhabilitasi	8,8 Unit		
16.	Pembangunan Jembatan	Tapanuli Utara	Panjang Jembatan yang dibangun	165 Jembatan	120.000.000,00	Pembangunan Jembatan	Tapanuli Utara	Panjang Jembatan yang dibangun	165 Jembatan	**1,200,000,000.00**	
17.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tapanuli Utara	Panjang Jembatan yang dibangun	7 Dokumen	0	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tapanuli Utara	Panjang Jembatan yang dibangun	7 Dokumen	**0**	
18.	Rehabilitasi Jalan	Tapanuli Utara	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	8,08 KM	1.200.000.000,00	Rehabilitasi Jalan	Tapanuli Utara	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	8,08 KM	**3,216,052,493.22**	
19.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tapanuli Utara	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2,1 KM	0	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tapanuli Utara	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2,1 KM	**545,439,999.99**	
IV.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang**	**4 Dokumen**	**19.999.900,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang**	**4 Dokumen**	**9,191,650.00**	
20.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	

21.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	
22.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.999.900,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	**9,191,650.00**	
JUMLAH					**51.817.805.819,00**					**21,127,243,155.31**	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun hasil dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten serta memperhatikan usulan-usulan masyarakat pada kunjungan kerja Bupati Tapanuli Utara ke Desa-desa terdapat beberapa usulan-usulan yang sesuai yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara

NO	Rancangan Awal RKPD					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		
1	2	3	4	5		6
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%)	19	Paket	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kabupaten Tapanuli Utara	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	75	Paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERENGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi Kementerian PU **"Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**, ditetapkan Misi Kementerian PU tahun 2015 – 2019, yaitu:

- Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatanpangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip **"infrastruktur untuk semua"**;
- Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dankawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
- Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untukmendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Untuk mendukung prioritas pembangunan Daerah dan Nasional sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Tujuan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun atau kapan harus dicapai. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 selaras dengan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2025-2026 Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 **:** Meningkatnya mobilitas dan aksesibilitas jalan

Sasaran : Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan

Tujuan 2 **:** Meningkatnya pengelolaan sumber daya air

Sasaran : Meningkatkan pengelolaan sumber daya air

Tujuan 3 **:** Meningkatnya penataan dan pengendalian tata ruang

Sasaran : Meningkatkan fungsi dan pengendalian tata ruang

Tujuan 4 **:** Meningkatnya kualitas manejemen perkantoran

Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Berikut adalah penjabaran atas keselarasan misi yang diemban, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL TUJUAN , SASARAN DAN PROGRAM RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2025-2026
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Keterangan		Rumus/ Formula	2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**					
	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah Persentase Prasarana Fisik, Produktivitas, Sarana Penunjang, Organisasi Persalia, Dokumentasi, P3A/GP3A/IP3A	66.00		66.02	
	SASARAN	**INDIKATOR SASARAN**					
	Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (%)	Areal Terdampak Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (Ha) /Areal Terdampak Jaringan Irigasi Kabupaten (Ha) x 100%	76.10		76.30	
	PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi(%)	Persentase Panjang Saluran Irigasi + Persentase Jumlah Bangunan Pelengkap	22.08		22.28	
2	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**					
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	(Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap + Persentase Jembatan Kondisi Baik)/2	81.00		81.02	
	SASARAN I	**INDIKATOR SASARAN I**					
	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	1. (Panjang Jalan kondisi mantap/panjang jalan seluruhnya) x 100%	69.95		70.15	
		2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	2. (Jumlah Jembatan kondisi baik/jumlah jembatan seluruhnya) x 100%	92.05		92.25	
	SASARAN II	**INDIKATOR SASARAN II**					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80.00		82.00	
	PROGRAM I	**INDIKATOR PROGRAM I**					
	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	1. (Panjang Jalan kondisi mantap/panjang jalan seluruhnya) x 100%	69.95		70.15	
		2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	2. (Jumlah Jembatan kondisi baik/jumlah jembatan seluruhnya) x 100%	92.05		92.25	

	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	SDM Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat (orang)	Jumlah Tenaga kontruksi bersertifikat	117.00		117.00	
	PROGRAM II	**INDIKATOR PROGRAM II**					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi yang tertangani		100.00%		100.00%	
3	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**					
	Meningkatnya penataan dan pengendalian tata ruang	Persentase Kesesuaian penataan dan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	Luas pemanfaatan ruang yang sudah sesuai /Lus kabupaten Tapanuli Utara x 100%	70.00		70.02	
	SASARAN	**INDIKATOR SASARAN**					
	Meningkatkan fungsi penataan dan pengendalian Tata Ruang	Persentase Jumlah kecamatan yang memiliki RDTR	Jumlah Kecamatan yang sudah memiliki RDTR/Jumlah Kecamatan Seluruhnya x 100%	40.00		40.02	
	PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**					
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang	Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang	3.00		4.00	

Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan Program Pembangunan yang direncanakan sebanyak 4 program dan 9 kegiatan dan 33 Sub kegiatan. Rincian rencana kegiatan per program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

Ada pun perubahan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat tabel 3.2. di bawah ini :

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. TAPANULI UTARA TAHUN 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0.00.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG																			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 10.812.795.165	Rp. 29.317.179.800			Rp. 40.129.974.965	Rp. 10.392.875.323	Rp. 14.618.574.717			Rp. 25.011.450.040	Rp. 57.694.433.184,00
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Rp. 10.812.795.165	Rp. 29.317.179.800			Rp. 40.129.974.965	Rp. 10.392.875.323	Rp. 14.618.574.717			Rp. 25.011.450.040	Rp. 57.694.433.184,00
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 9.587.055.615	Rp. 63.049.800			Rp. 9.650.105.415	Rp. 8.853.208.080	Rp. 32.425.400			Rp. 8.885.633.480	Rp. 12.995.443.434,00
1	03	01	2001		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 42.000.000				Rp. 42.000.000	Rp. 26.145.350				Rp. 26.145.350	Rp. 34.000.000,00
1	03	01	2001	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	Rp. 11.808.600				Rp. 11.808.600	Rp. 15.000.000,00
1	03	01	2001	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.000.000				Rp. 4.000.000	Rp. 2.014.000				Rp. 2.014.000	Rp. 4.000.000,00

1	03	01	2012	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 12.322.750				Rp. 12.322.750	Rp. 15.000.000,00
1	03	01	2012		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 7.793.400.495				Rp. 7.793.400.495	Rp. 7.069.905.779				Rp. 7.069.905.779	Rp. 10.726.443.434,00
1	03	01	2012	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.708.913.645				Rp. 7.708.913.645	Rp. 6.990.217.519				Rp. 6.990.217.519	Rp. 10.636.634.234,00
1	03	01	2012	0003	Pelaksanaan Pemantauan, Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 76.489.200				Rp. 76.489.200	Rp. 76.489.200				Rp. 76.489.200	Rp. 77.809.200,00
1	03	01	2012	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.998.200				Rp. 3.998.200	Rp. 1.599.280				Rp. 1.599.280	Rp. 6.000.000,00
1	03	01	2012	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.999.450				Rp. 3.999.450	Rp. 1.599.780				Rp. 1.599.780	Rp. 6.000.000,00
1	03	01	2013		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 4.998.600				Rp. 4.998.600	Rp. 1.999.440				Rp. 1.999.440	Rp. 7.000.000,00
1	03	01	2013	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.998.600				Rp. 4.998.600	Rp. 1.999.440				Rp. 1.999.440	Rp. 7.000.000,00
1	03	01	2016		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 372.222.825	Rp. 63.049.800			Rp. 435.272.625	Rp. 317.040.825	Rp. 32.425.400			Rp. 349.466.225	Rp. 625.000.000,00
1	03	01	2016	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.999.800				Rp. 4.999.800	Rp. 7.709.800				Rp. 7.709.800	Rp. 10.000.000,00

1	03	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 49.758.025	Rp. 53.000.000			Rp. 102.758.025	Rp. 30.516.625	Rp. 21.775.000			Rp. 52.291.625	Rp. 90.000.000,00
1	03	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.950.000	Rp. 10.049.800			Rp. 14.999.800	Rp. 4.380.000	Rp. 10.650.400			Rp. 15.030.400	Rp. 18.000.000,00
1	03	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 14.086.400				Rp. 14.086.400	Rp. 25.000.000,00
1	03	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.515.000				Rp. 26.515.000	Rp. 26.515.000				Rp. 26.515.000	Rp. 20.000.000,00
1	03	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 12.000.000,00
1	03	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 261.000.000				Rp. 261.000.000	Rp. 223.833.000				Rp. 223.833.000	Rp. 450.000.000,00
1	03	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 796.918.194				Rp. 796.918.194	Rp. 727.619.394				Rp. 727.619.394	Rp. 173.000.000,00
1	03	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.999.000				Rp. 15.999.000	Rp. 11.193.000				Rp. 11.193.000	Rp. 18.000.000,00
1	03	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 49.653.594				Rp. 49.653.594	Rp. 49.653.594				Rp. 49.653.594	Rp. 60.000.000,00

1	03	01	2.03	0.00.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 731.265.600				Rp. 731.265.600	Rp. 666.772.800				Rp. 666.772.800	Rp. 95.000.000,00
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 577.515.501				Rp. 577.515.501	Rp. 710.497.292				Rp. 710.497.292	Rp. 1.430.000.000,00
1	03	01	2.09	0.00.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 146.021.055				Rp. 146.021.055	Rp. 102.079.792				Rp. 102.079.792	Rp. 200.000.000,00
1	03	01	2.09	0.00.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 400.000.000				Rp. 400.000.000	Rp. 582.116.000				Rp. 582.116.000	Rp. 1.200.000.000,00
1	03	01	2.09	0.00.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.836.200				Rp. 14.836.200	Rp. 11.014.300				Rp. 11.014.300	Rp. 20.000.000,00
1	03	01	2.09	0.00.1.1	Pemeliharaan Renovasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.658.246				Rp. 16.658.246	Rp. 15.287.200				Rp. 15.287.200	Rp. 10.000.000,00
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				Rp. 150.000.000	Rp. 4.338.955.000			Rp. 4.488.955.000	Rp. 54.999.925	Rp. 2.038.107.500			Rp. 2.093.107.425	Rp. 10.900.000.000,00
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 150.000.000	Rp. 4.338.955.000			Rp. 4.488.955.000	Rp. 54.999.925	Rp. 2.038.107.500			Rp. 2.093.107.425	Rp. 10.900.000.000,00

1	03	02	202	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	-Dana Alokasi Umum (DAU) -DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengutaan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perkanaan, dan Hewan) -Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi -Pendapatan Bonus Produksi Panas Bum	-Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 4.338.955.000			Rp. 4.338.955.000		Rp. 2.038.107.500			Rp. 2.038.107.500	Rp. 10.500.000.000,00
1	03	02	202	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	-Dana Alokasi Umum (DAU)	-Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 12.000.000				Rp. 12.000.000	Rp. 150.000.000,00
1	03	02	202	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	-Dana Alokasi Umum (DAU)	-Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 120.000.000				Rp. 120.000.000	Rp. 42.999.925				Rp. 42.999.925	Rp. 250.000.000,00
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Rp. 1.055.740.000	Rp. 24.915.175.000			Rp. 25.970.915.000	Rp. 1.475.475.668	Rp. 12.548.041.817			Rp. 14.023.517.485	Rp. 33.773.989.750,00
1	03	10	201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				Rp. 1.055.740.000	Rp. 24.915.175.000			Rp. 25.970.915.000	Rp. 1.475.475.668	Rp. 12.548.041.817			Rp. 14.023.517.485	Rp. 33.773.989.750,00
1	03	10	201	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis, Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	-Dana Alokasi Umum (DAU) -DBH Sawit -DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengutaan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perkanaan, dan Hewan) -Pendapatan Bonus	-Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000	Rp. 1.398.400.000			Rp. 1.498.400.000	Rp. 400.000.000	Rp. 517.795.000			Rp. 917.795.000	Rp. 1.339.239.000,00

						Produksi Panas Bumi													
1	03	10	2.01	0.032	Pembangunan Jalan	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 1.357.500.000			Rp. 1.357.500.000		Rp. 1.936.800.000			Rp. 1.936.800.000	Rp. 650.000.000,00
1	03	10	2.01	0.033	Rekonstruksi Jalan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU) - DBH Sawit - DAK Fisik - Bidang Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perkebunan, dan Hewan) - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Opsen PKB	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 18.811.775.000			Rp. 18.811.775.000		Rp. 4.285.655.817			Rp. 4.285.655.817	Rp. 29.784.750.750,00
1	03	10	2.01	0.039	Rehabilitasi Jembatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 1.500.000.000,00
1	03	10	2.01	0.040	Pembangunan Jembatan	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 1.200.000.000			Rp. 1.200.000.000	Rp. 0	Rp. 1.353.500.000			Rp. 1.353.500.000	
1	03	10	2.01	0.043	Survey Komposisi Jalan/Jembatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan,		Rp. 393.300.000				Rp. 393.300.000	Rp. 0				Rp. 0	

							Semua Kel/Desa												
1	03	10	201	0044	Rehabilitasi Jalan	-Dana Alokasi Umum (DAU) -Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi -Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	-Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 347.000.000	Rp. 2.027.500.000			Rp. 2.374.500.000	Rp. 509.819.668	Rp. 4.229.291.000			Rp. 4.739.110.668	Rp. 500.000.000,00
1	03	10	201	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	-Dana Alokasi Umum (DAU) -Opsen PKB -Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	-Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 215.440.000	Rp. 120.000.000			Rp. 335.440.000	Rp. 565.656.000	Rp. 225.000.000			Rp. 790.656.000	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				Rp. 19.999.550				Rp. 19.999.550	Rp. 9.191.650				Rp. 9.191.650	Rp. 25.000.000,00
1	03	12	204		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 19.999.550				Rp. 19.999.550	Rp. 9.191.650				Rp. 9.191.650	Rp. 25.000.000,00
1	03	12	204	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-Dana Alokasi Umum (DAU)	-Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.999.550				Rp. 19.999.550	Rp. 9.191.650				Rp. 9.191.650	Rp. 25.000.000,00
							Jumlah		**Rp. 10.812.795.165**	**Rp. 29.317.179.800**			**Rp. 40.129.974.965**	**Rp. 10.392.875.323**	**Rp. 14.618.574.717**			**Rp. 25.011.450.040**	**Rp. 57.694.433.184,00**

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam perencanaan Perubahan Renja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara

Kode Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Hasil) Kegiatan (Keluaran)	Target Kinerja		Target Anggaran	
1	2	3	Muri	Perubahan	Muri	Perubahan
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**3**	**100**	**100**	**40,129,974,964.62**	**25,011,450,040.00**
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100**	**100**	**9,650,105,415.00**	**8,885,633,479.78**
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7**	**Dokumen**	**42,000,000.00**	**26,145,350.00**
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	18,000,000.00	11,808,600.00
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	4,000,000.00	2,014,000.00
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi perangkat Daerah	1	Laporan	20,000,000.00	12,322,750.00

1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani**	**20**	**Dokumen**	**7,793,400,495.00**	**7,069,905,779.00**
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	7,708,913,645.00	6,990,217,519.00
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1	Laporan	76,489,200.00	76,489,200.00
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Laporan	3,998,200.00	1,599,280.00
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	3,999,450.00	1,599,780.00
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3**	**Laporan**	**4,998,600.00**	**1,999,440.00**
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	4,998,600.00	1,999,440.00
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8 Paket, 1 Dokumen, 2 Laporan**	**8 Paket, 1 Dokumen, 2 Laporan**	**435,272,625.00**	**349,466,225.00**
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	4,999,800.00	7,709,800.00
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	102,758,025.00	52,291,625.00

1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	14,999,800.00	15,030,400.00
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	15,000,000.00	14,086,400.00
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Doumen	26,515,000.00	26,515,000.00
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	10,000,000.00	10,000,000.00
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	261,000,000.00	223,833,000.00
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani**	**36**	**Laporan**	**796,918,194.00**	**727,619,394.00**
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	15,999,000.00	**11,193,000.00**
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	49,653,594.00	**49,653,594.00**
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	731,265,600.00	**666,772,800.00**
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**Bulan**	**577,515,501.00**	**710,497,291.78**
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51	Unit	146,021,055.00	102,079,792.05

1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	51	Unit	400,000,000.00	582,115,999.73
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	14,836,200.00	11,014,300.00
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	16,658,246.00	15,287,200.00
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%)**	**32,50 %**	**32,50 %**	**4,488,955,000.00**	**2,093,107,425.00**
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6,04 KM**	**6,04 KM**	**4,488,955,000.00**	**2,093,107,425.00**
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,115 KM	1,115 KM	4,338,955,000.00	2,038,107,500.00
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	12 KM	12 KM	30,000,000.00	12,000,000.00
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2 Dokumen	Dokumen	120,000,000.00	42,999,925.00
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap**			**25,970,914,999.62**	**14,023,517,485.22**

1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap** **2. Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik**	**62,80%** **53,90 %**	**62,80%** **53,90 %**	**25,970,914,999.62**	**14,023,517,485.22**
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	10 Dokumen	10 Dokumen	1,498,400,000.00	917,795,000.00
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2,404 KM	2,404 KM	1,357,500,000.00	1,936,800,000.00
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan	2,738 KM	2,738 KM	18,811,775,000.00	4,285,655,817.00
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	3 Jembatan	3 Jembatan	1,200,000,000.00	1,353,500,000.00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/ Jembatan yang diSurvey Kondisinya	1 KM		393,300,000.00	-
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4,636 KM	4, 636 KM	2,374,499,999.62	4,739,110,668.22
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4,297 KM	4,297 KM	335,440,000.00	790,656,000.00
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**19,999,550.00**	**9,191,650.00**
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	19,999,550.00	9,191,650.00

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. ***Output Perubahan*** **Rencana Kerja** Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara adalah **Program Tahunan** Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Perubahan RENJA digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Perubahan RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025. Demikian Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini untuk dilaksanakan.

Tarutung, Agustus 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten
Tapanuli Utara

Dalan N.P Simanjuntak, ST., MM
Pembina TK.I
NIP. 19730214 200502 1 003

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Renstra PD, disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis PD dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahun 2025.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731025 199304 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan perencanaan kerja. Perencanaan terdiri dari dua elemen penting, yaitu sasaran *(goals)* dan rencana itu sendiri *(plan).* Dalam menetapkan sasaran, masyarakat sebagai stake holder diharapkan menjadi pemain utama. Partisipasi masyarakat dan kemampuan untuk menangkap dan menerjemahkan tuntutan publik menjadi faktor penting dalam proses perencanaan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2025, yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Ruang lingkup Rencana Kerja adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara 2025 – 2029 yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 – 2029, yaitu **“Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan”**, pencapaiannya didukung dengan misi sebagai berikut:

1. Memajukan ekonomi rakyat yang inklusif dan berdaya saing untuk meningkatkan pendapatan masayarakat;
2. Memajukan ekonomi melalui pertanian yang maju dan berteknologi yang mampu memberikan produktifitas yang tinggi;

3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, pencegahan stunting serta peningkatan peran generasi muda dan perempuan dalam pembangunan;
4. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan dan tanggap resiko bencana;
5. Penerapan kajian budaya dan kearifan lokal mulai dari pendidikan dasar untuk memperkuat karakter terbaik masyarakat sehingga mampu meminimalisir efek negatif arus cepat informasi dan media sosial;
6. Pengembangan kebuadayaan berdasarkan kekayaan budaya dan kearifan lokal;
7. Memperkuat reformasi birokrasi, mengoptimalkan tata kelola pemerintahan;
8. Menjadikan desa mandiri yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
9. Meningkatkan pelestarian lingkungan serta peningkatan upaya penanggulangan mitigasi dan bencana.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara mengampu misi ke 4 (empat) yaitu: “Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan dan tanggap resiko bencana” yang erat kaitannya dengan Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang secara rinci pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD.

Hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainya dapat dilihat pada diagram alir di bawah ini :

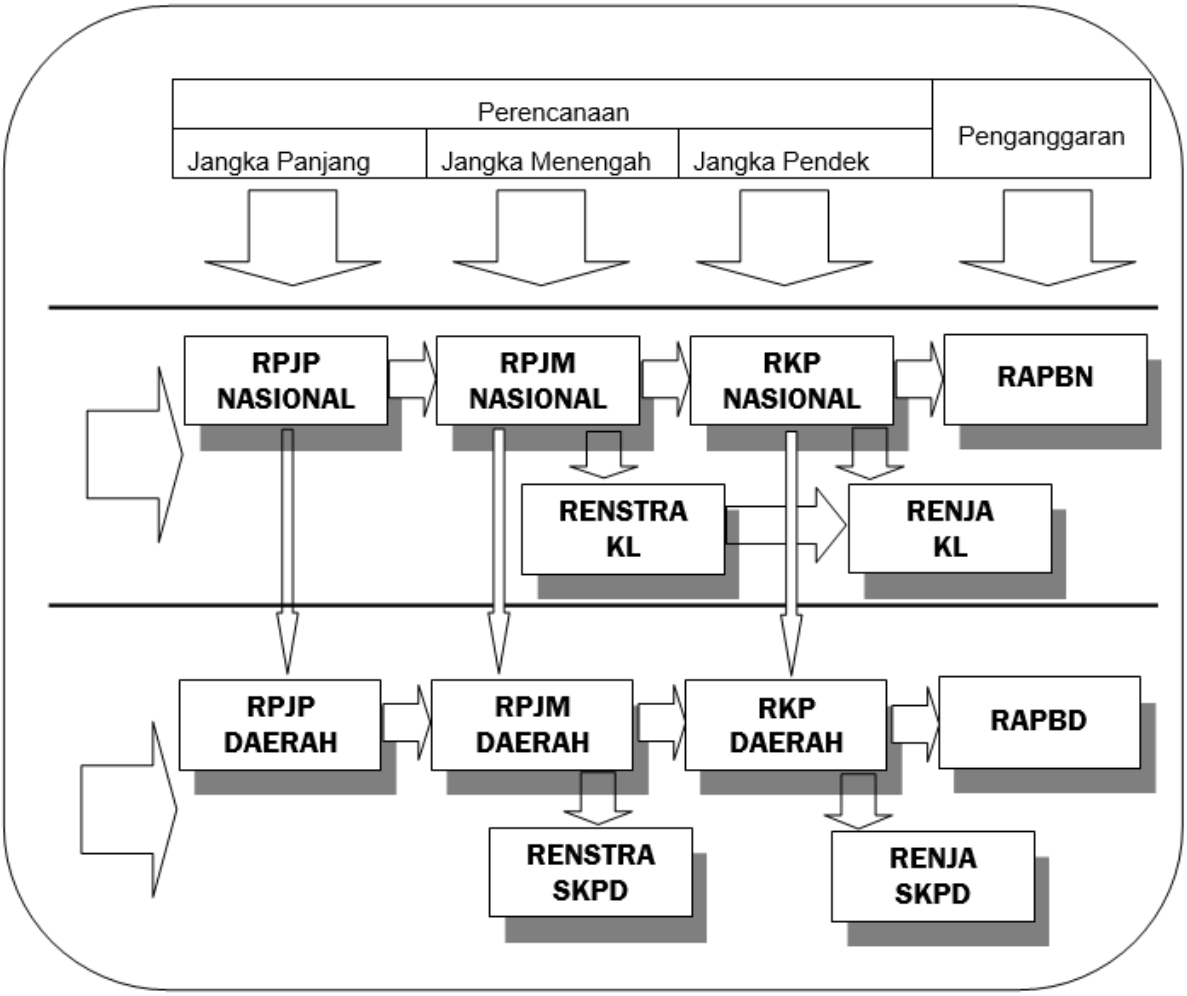

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan ini dimaksudkan untuk membuat Rencana Kerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2025 - 2029 dan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara 2025 - 2029 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang Perhubungan tahun 2025;
2. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan di bidang Perhubungan tahun 2025;
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2025;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dan menjelaskan kedudukan Renja terhadap dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024

2.2. Analisis Pelayanan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Mengemukakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Mengemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kondisi umum, permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4. Review Terhadap RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024

Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman kepada Renstra Tahun 2025-2026. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target, sasaran tahunan dan pencapaiannya dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja, outcome yang dikaitkan dengan capaian sasaran.

Tingkat capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja yang meliputi indikator input, output, outcomes, sedangkan untuk indikator kinerja benefit dan impact belum dikembangkan pengukurannya. Beberapa penyebab belum dapat dikembangkannya pengukuran antara lain : Kesulitan untuk menetapkan secara tepat apa yang mesti diukur, penampakan indikator benefit dan impact adalah hasil integrasi dari banyak kegiatan bahkan lebih dari satu program dengan jangka waktu melebihi satu tahun, disamping belum tersedianya media atau sistem pengumpulan data kinerja.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target s/d Tahun 2024	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
	Perhubungan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusuann Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KInerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KInerja SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
	Koordinasi dan Penyusnan Laporan Keuangan SKPD	Tersedianyan Laporan Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianyan Alat Tulis Kanotr	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersdianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daeran									
				Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BAngunan LAinnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BAngunan LAinnya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
				Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota									
				Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	100 persen	15 unit	15 unit	100 persen
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	8 lokasi	8 lokasi	100 persen
				Pengujian Berkala Kendraan Bermotor									
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	750 set	750 set	750 set	750 set	100 persen	750 set	750 set	100 persen
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan Bermotor	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100 persen	4 unit	4 unit	100 persen
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen

				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalan Trayek Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota									
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100 persen	1 tahun	1 tahun	100 persen
				Program Pengelolaan Pelayaran									
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabunan Sungai dan Danau									
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100 persen	1 tahun	1 tahun	100 persen

2.2. Analisis Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2026, Untuk Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam mencapai sasaran kinerja. Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kinerja yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (performance plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2024 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (performance gap).

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator		IKK	Satuan	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2023	2024	2024	2025	
1	**Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**												
	a	Jumlah Penumpang Bus dan Minibus		Orang	2.898.700	2.927.687	2.956.963	3.059.000	2.986.532	3.052.000	2.956.963	3.059.000	
	b	Jumlah Penumpang Kapal Danau		Orang	23.052	23.913	23.983	138.397	24.462	137.897	23.983	138.397	
	c	Jumlah Penumpang Pesawat Udara		Orang	203.052	206.045	209.135	507.994	212.272	506.994	209.135	507.994	
2	**Jumlah Uji KIR Angkutan Umum**			Unit	2.992	2.992	2.992	1.000	906	962	2.992	1.000	
3	**Jumlah Pelabuhan Udara/Danau/Terminal Bis**												
	a	Jumlah Pelabuhan Udara		Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	
	b	Jumlah Pelabuhan Danau		Unit	3	3	3	2	3	3	3	2	
	c	Jumlah Terminal Bis		Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	
4	**Jumlah Angkutan Darat**			Unit	1.610	1.620	1.600	1.627	1.632	1.592	1.600	1.627	
5	**Lama Pengujian Kelaikan Angkutan Umum (KIR)**			Menit	30	30	30	30	30	30	30	30	
6	**Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu**			Unit	350	375	400	55	20	0	400	55	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

a. Tingkat Kinerja Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada publik, Dinas Perhubungan diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pengembangan objek Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan memanfaatkan sarana prasarana dan SDM yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara maka diharapkan institusi ini dapat meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kinerja dan pelayanan yang baik.

b. Permasalahan/ Hambatan

Dalam upaya pelayanan perhubungan ditemukan berbagai hambatan/permasalahan yang timbul, diantaranya :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**

  Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah terbatasnya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah, sehingga survey lapangan dan monitoring pelaksanaan kegiatan sangat terbatas. Masalah lain adalah kurangnya ASN yang memiliki kompetensi sehingga berpengaruh terhadap pelayanan perhubungan yang kurang optimal. Strategi Pemecahan masalah: Perlunya penambahan Biaya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, dan peningkatan kualitas SDM agar pelaksanaan pelayanan administrasi umum pemerintahan berhasil dalam menunjang pelaksanaan program yang ditetapkan. Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah terlalu minimnya dana perbaikan maupun pengadaan sarana dan prasarana kantor. Sarana kantor yang masih jauh dari cukup diakibatkan terbatasnya dana untuk program ini. Melihat kondisi kenaikan standar harga-harga barang kebutuhan kantor. Strategi pemecahan masalah : perlunya pemberi wewenang memberikan perhatian yang serius kepada sarana dan prasarana aparatur khususnya pemberian kenaikan anggaran dalam APBD TA 2025 agar sarana dan prasarana kantor lebih memadai. Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah kurangnya dana, sehingga volume pelatihan maupun sosialisasi peningkatan SDM terhadap Aparatur di dalam daerah ataupun di luar

daerah terbatas. Strategi pemecahan masalah : perlu penambahan dana agar volume atau jumlah aparatur yang ikut serta dalam sosialisasi, pelatihan maupun Bimtek yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta bertambah, baik di dalam daerah maupun di luar daerah sehingga dapat menambah kualitas dan ilmu pengetahuan aparatur. Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah minimnya dana APBD untuk peningkatan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**
  Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah minimnya anggaran yang ada pada Dinas Perhubungan, sehingga penyediaan sarana prasarana perhubungan sangat terbatas, dan juga ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang perhubungan masih terbatas sehingga kinerja pelayanan perhubungan tidak maksimal. Hal itu juga diakibatkan oleh minimnya dana yang ditampung di APBD. Strategi pemecahan masalah : agar kedepannya Pemkab Tapanuli Utara lebih meningkatkan jumlah anggaran pada dinas perhubungan sehingga penyediaan sarana prasarana perhubungan dapat terpenuhi serta kualitas SDM yang komperten dapat ditingkatkan.

- **Program Pengelolaan Pelayaran**
  Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah minimnya SDM yang kompeten dalam bidang angkutan sungai danau dan penyeberangan sehingga pengelolaan pelayaran khususnya angkutan danau belum dapat dikelola secara maksimal. Strategi pemecahan masalah : Agar kedepannya perlu peningkatan kualitas SDM yang kompeten dalam bidang angkutan danau. Sehingga pelayanan pengelolaan pelayaran angkutan danau dapat terlaksana secara optimal.

c. Dampak Program Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Pencapaian Visi/Misi Bupati Tapanuli Utara

Dinas Perhubungan sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi kepala daerah Tapanuli

Utara dalam RPJMD 2025-2029 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu : **"Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan dan tanggap resiko bencana".**

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dipastikan ada tantangan dan peluang. Salah satu tantangan dalam peningkatan pelayanan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanui Utara diantaranya belum terpenuhinya ketersediaan Fasiltas Keselamatan laulintas, kurangnya kesadaran masyarakat tentang peraturan berlalulintas, serta masih terbatasnya ASN yang kompeten di bidang perhubungan sehingga sangat mempengaruhi kinerja terhadap pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja (Renja) Perubahan RKPD

Berbagai program kegiatan telah ditampung pada kegiatan 2024. Namun demikian masih banyak kegiatan yang telah tertuang pada RENSTRA 2025-2029 yang tidak tertampung pada anggaran 2024 maupun 2025. Hal ini disebabkan masalah dana yang terbatas, permohonan dari masyarakat yang tidak dianggarkan sebelumnya. Sehingga pada kegiatan yang direncanakan Tahun Anggaran 2025 terdapat kegiatan yang baru yang tidak terdapat di RKPD. Namun diharapkan program yang tidak dapat ditampung di APBD dapat dianggarkan di APBD Provinsi maupun APBN.

Tabel 2.3
Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Keterangan
Nama Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Nama Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**4.560.650.769,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tertangani**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tertangani**		**4.309.371.769,00**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**17.494.400,00**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.497.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.998.200,00	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.999.200,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Terciptanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terciptanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**3.753.833.725,00**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	492 Orang/ bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	492 Orang/ bulan	3.698.082.225,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50.755.200,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.996.300,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**95.219.156,00**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	3.485.800,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	18.989.350,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	2.076.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	11.717.406,00	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	3.710.600,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	55.240.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**383.061.688,00**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	58.820.400,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	323.241.288,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**59.762.800,00**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	56.841.800,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Pemeliharaan	10 Unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Pemeliharaan	10 Unit	2.921.000,00	

		Peralatan dan Mesin Lainnya					Peralatan dan Mesin Lainnya			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		**Cakupan Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Cakupan Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan**		**243.799.000,00**	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		**Terlaksananya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**			**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**		**25.000.000,00**	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		**Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**0,00**	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0 Unit		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0 Unit	0,00	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		**Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C**			**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		**Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C**		**8.790.000,00**	
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dinas Perhubungan	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	2 Unit		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dinas Perhubungan	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	2 Unit	8.790.000,00	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		**Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**			**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**40.000.000,00**	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	0,00	

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Unit		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Unit	40.000.000,00	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	0,00	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		**Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**			**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**170.009.000,00**	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	1 Laporan		Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (Zoss)	Dinas Perhubungan	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	1 Laporan	0,00	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	170.009.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		**Cakupan Pelayanan Keselamatan Pelayaran**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		**Cakupan Pelayanan Keselamatan Pelayaran**		**7.480.000,00**	
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		**Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**			**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**		**Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian**		**7.480.000,00**	

							Pelabuhan Sungai dan Danau			
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Unit		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Unit	7.480.000,00	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang. Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan dan Sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Program
Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, dan Aman	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas	1.	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	a.	Persentase Pelayanan Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	b.	Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target dan realisasi dari Sasaran Strategis pada Dinas Perhubungan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2025
1.	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	a.	Persentase Pelayanan Perhubungan	Persen	25,00%	19,53%	78,13%	20,17%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	b.	Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Nilai	65	68,22	100,00%	68,25

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 tertuang dalam program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan untuk Tahun 2025.

Untuk Tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan
- Program Pengelolaan Pelayaran

Rencana Kerja program dan kegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian kinerja untuk Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut (terlampir).

RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja					Anggaran Tahun 2025
			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5		6	7	8
	DINAS PERHUBUNGAN							**5.199.180.292,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							**4.424.771.456,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**17.486.500,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.492.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.996.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.998.500,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**3.921.151.260,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	492	Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	492 Orang/bulan	3.860.873.810,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	55.279.200,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.998.250,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							**88.699.196,00**

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.999.996,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.708.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2.500.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	17.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	7.498.200,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	44.993.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**343.669.200,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	55.230.800,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	287.438.400,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**53.765.300,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	50.870.900,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	2.894.400,00

	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								**764.408.836,00**
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								**25.000.000,00**
	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	25.000.000,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								**231.433.600,00**
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	85	Unit	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	85	Unit	200.000.000,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	70	Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	70	Unit	31.433.600,00
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								**10.000.000,00**
	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C		Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	2	Dokumen	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	2	Dokumen	10.000.000,00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								**19.995.236,00**
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan	19.995.236,00
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								**447.980.000,00**
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan	60.020.000,00
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1	Laporan	387.960.000,00

	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								**30.000.000,00**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan	30.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								**10.000.000,00**
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau								**10.000.000,00**
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Unit	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	Unit	10.000.000,00

BAB IV
PENUTUP

Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang good governance merupakan komitmen dari penyelenggara ditingkat atas sampai bawah, dimana semua kebijakannya disusun dalam kerangka yang jelas dan terletak pada bingkai ideologi dan konstiuante dalam suatu wilayah yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang termuat dalam susunannya membutuhkan mewujudkan semua kegiatan perlu mendapatkan prasarana dan sarana guna mendukung kegiatan dimaksud sehingga semua kegiatan yang tersusun dalam kerangka kerja pada Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara ini merupakan bagian penyelenggara pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara agar dapat terakomodir sesuai dengan mekanisme yang ada, sehingga semua kegiatan dimaksud sekiranya dapat bermanfaat bagi pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731025 199304 1 001

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH …. 10

BAB IV PENUTUP 63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program/kegiatan tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang disusun dengan perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD untuk Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 tersebut memuat rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dengan mengacu pada permasalahan program dan kegiatan Tahun 2024 dan didasarkan pada rencana kerja perubahan pemerintah daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025. Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang harus disusun oleh OPD yang bertujuan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara.

1.2. Landasan Hukum

Pedoman penyusunan Rencana Perubahan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara ini disusun atas berbagai Landasan Hukum, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negafa Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri **Republik Indonesia** Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara **Perencanaan,** Pengendalian **Dan Evaluasi** Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi **Rancangan Peraturan Daerah Tentang** Rencana Pembangunan **Jangka** Panjang Daerah **Dan Rencana Pembangunan Jangka** Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka **Panjang** Daerah, **Rencana** Pembangunan **Jangka Menengah** Daerah, Dan Rencana Keqa Pemerintah Daerah:
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri **Republik** Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, **Kodefikasi,** Dan **Nomenklatur** Perencanaan Pembangunan Dan **Keuangan** Daerah;
7) Peraturan menteri dalam negeri republik **indonesia nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan** anggaran pendapaan dan belanja daerah tahun anggaran 2021:

8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil **Verifikasi dan Validasi** Pemutakhiran Klasifikasi, **Kodefikasi,** dan Nomenklatur **Perencanaan Pembangunan dan Keuangan** Daerah;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
10) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
11) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
12) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
13) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.
14) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka penyusunan rencana kerja perubahan anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.

Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik menuju predikat "Informatif" secara berkelanjutan di tingkat Kabupaten. dalam 1 Tahun anggaran melalui program : Informasi dan Komunikasi Publik

2. Meningkatkan sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara dalam 1 Tahun anggaran melalui program : Aplikasi dan Informatika

3. Meningkatkan ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas dalam 1 Tahun anggaran melalui program : Penyelenggaraan statistik sektoral

4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun anggaran melalui program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan triwulan II Tahun 2025

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakn program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Pada tahun 2025 pengukuran kinerja kegiatan dilaporkan secara rutin setiap triwulan, disamping juga secara rutin melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran dalam sistem informasi manajemen pelaporan setiap bulan (laporan dinamis). Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan setiap triwulan berdasarkan sasaran yang ditetapkan karena pengukuran berdasarkan sasaran merupakan agregasi dari kinerja program dan kegiatan yang dijalankan pada sasaran tersebut. Adapun capaian kinerja untuk masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Pada triwulan II Tahun 2025 program ini menargetkan realisasi fisik sebesar 50% dan target keuangan sebesar Rp. 3.042.059.729,-, realisasi yang dicapai pada program ini yaitu kegiatan fisik 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.377.085.417,-

Secara keseluruhan dapat disimpulkan program ini mendapatkan realisasi fisik 50% dan keuangan 45% dari target tersebut di atas.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

   Pada triwulan II Tahun 2025 program ini menargetkan realisasi fisik sebesar 50% dan target keuangan sebesar Rp. 958.461.000.,- realisasi yang dicapai pada program ini yaitu kegiatan fisik 47% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 214.780.000.,-

Secara keseluruhan dapat disimpulkan program ini mendapat realisasi fisik 47% dan keuangan 22%, tidak tercapainya target diakarenakan adanya pergesaran anggaran pada program informasi dan komunikasi publik.

3. Program Aplikasi dan Informatika

   Pada triwulan II Tahun 2025 program ini menargetkan realisasi fisik sebesar 50% dan target keuangan sebesar Rp. 110.042.875,-

Realisasi yang dicapai pada program ini yaitu kegiatan fisik 45% dan realisasi keuangan sebesar Rp.96.252.612

Pada program Aplikasi dan informatika belum bisa mencapai target dikarenakan adanya pergeseran anggaran

4. Program penyelenggaraan statistik sektoral

   Pada triwulan II Tahun 2025 program ini menargetkan realisasi fisik 50% dan target keuangan sebesar Rp. 22.189.125,.

   Pada program ini realisasi fisik 65% dan realisasi keuangan Rp. 2.656.000, ketidak tercapainya target yang dilaksanakan pada program ini yaitu adanya pergeseran anggaran.

Capaian keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 ini, masih belum menunjukkan hasil yang optimal, tetapi ada hal yang perlu di perhatikan anggaran yang kurang optimal tersebut dikarenakan adanya beberapa pergeseran refocusing anggaran kebijakan Pemerintah Kabupaten tapanuli Utara dalam efisiensi anggaran, sehingga banyak rasionalisasi dan aturan yang menyebabkan pencairan dana kegiatan tidak bisa dilaksanakan sebagaimana tatakelola kegiatan yang telah dirancang. Evaluasi terhadap hasil renja SKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam lampiran tabel 2.1

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
2,16.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				
2,16.01 .2.01	**Perencanaan.Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja**			
2.16.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	Rp.68.000	
2,16.01 .2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	Rp.0	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
2,16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	Rp.6.750.000	
2,16.01.2.02	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah**			
2,16.01.2.02.01	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	Rp.1.149.396.546	
2,16.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp.102.000	
2,16.01.2.02.05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 dokumen	Rp.11.756.800	
2,16.01.2.06	**Administrasi Umum perangkat daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah**			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
2,16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp.2.787.500	
2,16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Paket	Rp.0	
2,16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Paket	Rp.0	
2,16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Paket	Rp.0	
2,16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Dokumen	Rp.0	
2,16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Rp.11.551.000	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen peralatan dan Mesin lainnya	-	-	
2.16.02.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**			
2.16.02.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Rp.0	
2.16.02.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 laporan	Rp. 158.988.722	
2.16.02.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	Rp. 25.681.028	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
2.16.02.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
2.16.02.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	Rp. 6.005.821	
2.16.02.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Rp.0	
	Program Informasi dan Komunikasi Publik				
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	1 Konten	Rp. 60.250.000	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2 Media	Rp. 48.280.000	
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2 komunitas	Rp. 106.250.000	
	Program Aplikasi dan Informatika				
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen) Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp. 2.650.000	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
	Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				
2.16.03.2.02.01	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 dokumen	Rp 8.310.294	
2.16.03.2.02.020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	-	-	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	-	Rp.0	
2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-	-	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	44 orang	Rp. 2.656.000	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	-	Rp0	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2025 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2024. Kesinambungan kegiatan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun program dan kegiatan. Mengingat saat ini secara struktur Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas salah satunya mendukung visi misi Bupati Tapanuli Utara yaitu salah satunya yang menjadi tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika "**Meningkatkan Pembangunan Teknologi Informasi".**

Dalam perencanaan kerja perubahan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 telah kami cermati beberapa output yang perlu kami sesuaikan baik target maupun besarnya anggaran yang diperlukan mengingat efisiensi dan target kerja yang harus dilaksanakan secara lengkap, rencana kerja perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika 2025 kami rinci sebagi berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Pada perubahan anggaran 2025, program ini mengalami pengurangan sejumlah target fisik dan keuangan berkaitan dengan adanya efisiensi anggaran, adapun anggaran semula Rp. 3.566.995.533 menjadi Rp. 3.178.109.729.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   Pada perubahan anggaran 2025, program ini mengalami penambahan anggaran yang semula Rp. 353.220.250 menjadi Rp.973.916.000 . adapun sub kegiatan yang bertambah pagu anggaran nya antara lain :

- Sub kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat terjadi penambahan anggaran sebesar 291.850.000.
- Sub kegiatan pengelolaan media komunikasi publik terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 123.037.000 terjadi penambahan pada advetorial yang bekerja sama dengan media.
- Sub kegiatan Penyusunan Konten terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 205.808.750.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

   Pada perubahan anggaran 2025, program ini mengalami penambahan anggaran yang semula Rp. 49.998.750 menjadi 110.042.875. adapun sub kegiatan yang bertambah pagu anggaran yaitu :

- Sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah bertambah sebesar Rp. 59.998.250 dimana dalam kegiatan ini yaitu pengembangan aplikasi E-pendapatan
- Sub kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo bertambah sebesar Rp. 20.009.000.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

   Pada perubahan anggaran 2025, program ini tidak mengalami Pengurangan Pagu anggaran yang semula Rp. 50.000.000 menjadi Rp. 22.189.125.

Adapun program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang masuk dalam rencana perubahan tercantum dalam lampiran tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) kegiatan dan sub kegiatan	Renja 2025		Perubahan renja 2025		Alasan perubahan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Urusan Wajib						
01	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Realisasi Anggaran (%)	100%				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	**9.341.000**	**4 dokumen**	**3.736.400**	Efisiensi anggaran
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	**2.144.000**	1 laporan	**857.600**	Efisiensi anggaran
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	**30.000.000**	12 Laporan	**12.000.000**	Efisiensi anggaran
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	**2.580.142.983**	23 orang	**2.153.015.454**	Penyesuaian anggaran

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) kegiatan dan sub kegiatan	Renja 2025		Perubahan renja 2025		Alasan perubahan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2	Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	**2.652.000**	1 laporan	**1.041.600**	Efisiensi anggaran
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	**35.270.400**	12 dokumen	**35.270.400**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	**7.001.000**	1 paket	**2.795.200**	Efisiensi anggaran
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	**20.001.850**	1 paket	**7.996.975**	Efisiensi anggaran
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	**10.001.300**	1 paket	**3.998.000**	Efisiensi anggaran
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	**10.234.800**	1 paket	**4.093.600**	Efisiensi anggaran
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	**8.011.700**	**1 dokumen**	**3.201.500**	Efisiensi anggaran
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	**150.062.000**	12 laporan	**74.976.000**	Efisiensi anggaran

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) kegiatan dan sub kegiatan	Renja 2025		Perubahan renja 2025		Alasan perubahan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	**-**	**-**	7 unit	**169.050.000**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	**3.000.000**	**1 laporan**	**1.200.000**	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	**528.609.500**	12 laporan	**528.609.500**	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	**90.828.000**	1 laporan	**36.331.200**	Efisiensi anggaran
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**2 Unit**	**30.060.200**	**3 unit**	**92.724.700**	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**4 unit**	**49.634.800**	**4 unit**	**47.211.600**	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) kegiatan dan sub kegiatan	Renja 2025		Perubahan renja 2025		Alasan perubahan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
1	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2 komunitas	**125.500.000**	3 komunitas	**417.350.000**	Temu pers,
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2 Media	**145.000.000**	5 media	**268.037.000**	Penambahan advetorial
3	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	1 konten	**82.720.250**	3 konten	**288.529.000**	
	PENGELOLAAN APLIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1 dokumen	**14.989.000**	1 dokumen	**13.393.375**	
2	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah Dokumen Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 dokumen	**20.002.500**	1 dokumen	**9.739.000**	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) kegiatan dan sub kegiatan	Renja 2025		Perubahan renja 2025		Alasan perubahan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
3	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	-	**-**	1 aplikasi	**59.998.250**	Penambahan pengembangan aplikasi E-pendapatan
4	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	1 dokumen	**15.007.250**	1 dokumen	**6.903.250**	
5	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-	**-**	1 dokumen	**20.009.000**	Monitoring pengadaan starlink
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
1	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah SDM Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	44 orang	**40.000.000**	44 orang	**17.902.500**	
2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	1 dokumen	**10.000.000**	1 dokumen	**4.286.625**	
JUMLAH ANGGARAN				**4.020.214.533**		**4.284.257.729**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran dari P-RKPD Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD. Rencana kerja perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara memuat program, kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang merupakan hasil analisis sebagai pedoman didalam pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 serta program dan kegiatan yang telah berjalan di Tahun 2025 sampai dengan triwulan II.

Tarutung, 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPANULI UTARA,

HENDRIK TARUNA, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780126 199612 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KETAHANAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

2025

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih karuniaNya sehingga Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 ini dapat disusun.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 belum sempurna, untuk itu di harapkan kritik dan sarannya, agar masa mendatang dapat lebih disempurnakan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada semua semua pihak yang telah membantu penyelesaian Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai landasan pijakan guna penyusunan program dan kegiatan pada tahun - tahun berikutnya.

Pada akhirnya semoga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini bermanfaat bagi kita semua.

Tarutung,

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Ramah Br. Saragih, SKM
Pembina (IV/a)
NIP 197506161999032007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAAN **6**
2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan III Tahun Berkenan 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara 17
2.4. Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara 20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **30**
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 30
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD 31
3.3. Program dan Kegiatan 39
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH **43**
BAB V PENUTUP **56**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025 7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan 16
Tabel 2.3 Review terhadap P-RKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 21
Tabel 2.4 Usulan Program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan dan Kelompok Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025..... 28
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 32
Tabel 3.2 Bobot Indikator Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten 33
Tabel 3.3 Rencana Aksi Kinerja Perubahan Tahun 2025 40
Tabel 4.1 Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, disebutkan bahwa proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, bahwa renja merupakan penjabaran dari renstra SKPD. Kemudian Renja tersebut dijabarkan melalui RKA SKPD yang berisi rincian APBD untuk disusun menjadi Rancangan APBD (RAPBD). Sedangkan kaitannya dengan RKPD, renja menjadi landasan dalam penyusunan RKPD dimaksud.

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka 1 (satu) tahun, sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja menduduki posisi penting dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA) ke dalam operasionalisasi program dan kegiatan berupa penganggarannya, yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan tahunan.

Adapun ruang lingkup Renja Tahun 2025 adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara selama satu tahun

dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada dan tujuan pembangunan peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan yang realistis yang dapat dicapai, dimana Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD 2025 dan Perbup Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

B. TUJUAN

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

disusun dengan tujuan :

1. Acuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengoperasionalkan RKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan III Tahun Berkenan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025

BAB IV. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan III Tahun Berkenan

Tingkat capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja yang meliputi *input*, *output* dan *income*, sedangkan untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* dikembangkan pengukurannya. Beberapa faktor penyebab belum dapat dikembangkannya pengukuran tingkat indikator kinerja *benefit* dan *impact* adalah sulitnya untuk menetapkan secara tepat apa yang akan diukur, penampakan indikator benefit dan impact adalah hasil dari integrasi dari banyak kegiatan bahkan lebih dari satu program dengan jangka waktu lebih satu tahun; disamping belum tersedianya media atau sistem pengumpulan data kinerja.

Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada Triwulan III, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Berikut pada tabel 2.1 akan ditampilkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2025 Triwulan III.

Table 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2029		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100%		15=12/7 x 100%	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	500	23.712.196.735	98	394.192.321	100	4.516.427.957	21,99	993.000.807	28	1.284.184.127	21	948.002.596	-	-	71,41	3.225.187.530	120,83	3.619.379.851	24%	15%	71%	71%
2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis	14	188.000.000	5	11.751.000	5	20.000.000	-	-	-	9.695.000	5	2.056.000	-	-	5	11.751.000	10	23.502.000	71%	13%	100%	59%
3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	65	54.000.000	7	4.600.000	7	6.000.000				3.480.000	7	1.120.000			7	4.600.000	14	9.200.000	22%	17%	100%	77%
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	26.000.000	1	1.736.000	1	2.000.000				800.000	1	936.000			1	1.736.000	2	3.472.000	40%	13%	100%	87%
8		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	35	108.000.000	7	5.415.000	7	12.000.000				5.415.000	7				7	5.415.000	14	10.830.000	40%	10%	100%	45%
9		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis	6	19.848.142.585	13	37.575.600	3	3.880.606.307	1	993.000.807	-	1.053.091.081	3	822.478.921	-	-	4	2.868.570.809	1	2.906.146.409	17%	15%	133%	74%
10		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	240	19.541.376.585	0	0	48	3.822.133.107	48	993.000.807		1.039.503.281	48	798.491.121			96	2.830.995.209	48	2.830.995.209	20%	14%	200%	74%
11		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	60	280.366.000	1	35.571.600	1	56.073.200				12.415.800	1	23.155.800			1	35.571.600	2	71.143.200	3%	25%	100%	63%
12		Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	Dokumen	5	26.400.000	12	2.004.000	12	2.400.000				1.172.000	12	832.000			12	2.004.000	24	4.008.000	480%	15%	100%	84%

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2029		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100%		15=12/7 x 100%	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																							
13		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum PD	Jenis	12	923.000.000	78	77.886.152	78	119.000.000	-	-	-	37.210.000	78	40.676.152	-	-	78	77.886.152	156	155.772.304	1300%	17%	100%	65%
14		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	36.000.000	1	2.284.000	1	4.000.000				2.284.000	1	-			1	2.284.000	2	4.568.000	40%	13%	100%	57%
15		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	112.000.000	1	11.157.000	1	12.000.000				-	1	11.157.000			1	11.157.000	2	22.314.000	40%	20%	100%	93%
16		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	36.000.000	4	1.973.000	4	4.000.000				1.973.000	4	-			4	1.973.000	8	3.946.000	160%	11%	100%	49%
17		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	90.000.000	12	4.500.000	12	10.000.000				2.800.000	12	1.700.000			12	4.500.000	24	9.000.000	480%	10%	100%	45%
18		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	44.000.000	0	0	1.340	4.000.000				-	-	-			-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
19		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	970	605.000.000	65	57.972.152	73	85.000.000				30.153.000	65	27.819.152			65	57.972.152	130	115.944.304	13%	19%	89%	68%
20		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Jenis	4	180.000.000	0	0	-	32.312.000	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
21		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	60.000.000	0	0	-	32.312.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
22		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	120.000.000	0	0	-	0	-	-		-	-	-			-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
23		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan	Jenis	10	1.856.863.500	0	214.729.848	5	331.319.000	1	-	-	149.954.725	5	64.775.123	-	-	6	214.729.848	6	429.459.696	40%	23%	120%	65%

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2029		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100%		15=12/7 x 100%	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			Pemerintahan Daerah																							
24		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	200	2.000.000	30	300.000	40	400.000				-	30	300.000			30	300.000	60		30%	0%	75%	75%
25		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	180	229.658.200	9	12.872.213	12	46.298.200			6	9.897.090	3	2.975.123			9	12.872.213	18	25.744.426	10%	11%	75%	28%
26		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	1.625.205.300	24	201.557.635	36	284.620.800			12	140.057.635	12	61.500.000			24	201.557.635	48	403.115.270	80%	25%	67%	71%
27		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	6	716.190.650	2	52.249.721	3	133.190.650	-	-	-	34.233.321	2	18.016.400		-	2	52.249.721	4	104.499.442	20%	15%	67%	39%
28		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	548.956.750	2	48.549.721	3	113.956.750				34.233.321	2	14.316.400			2	48.549.721	4	97.099.442	27%	18%	67%	43%
29		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	51.749.500	4	3.700.000	4	3.749.500				-	4	3.700.000			4	3.700.000	8	7.400.000	32%	14%	100 %	99%
30		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	115.484.400	0	0	1	15.484.400				-	-	-			-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
36	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	persen	456,50	13.180.818.298	0	1.118.303.800	0,22	2.651.000.000	-	-	-	-		118.303.800	-	-	-	1.118.303.800	-	2.236.607.600	0%	17%	0%	42%
37		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Jenis Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok	Jenis	6	1.520.931.660	0	8.048.400	2	91.000.000	-	-	-	-	-	8.048.400	-	-	-	8.048.400	-	16.096.800	7%	1%	0%	9%

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2029		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100%		15=12/7 x 100%	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	atau Pangan Lainnya																							
		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan	10	661.791.260	0	0	2	50.000.000									-							
		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	40	644.605.300	0	0	5	31.000.000						202.500			-							
38		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	5	127.721.060	0	3.072.000	1	5.000.000						3.072.000			-	3.072.000	-	6.144.000	0%	5%	0%	61%
39		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	60	86.814.040	6	4.976.400	12	5.000.000					6	4.976.400			6	4.976.400	12	9.952.800	20%	11%	50%	100 %
41		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Stock Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	ton	9,54	1.746.623.038	0	108.400	0	10.000.000	-	-	-	-	-	108.400	-	-	-	108.400	-	216.800	0%	0%	0%	1%
42		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	70,00	1.542.087.938	0	108.400	0	10.000.000						108.400			-	108.400	-	216.800	0%	0%	0%	1%
43		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton	66,00	204.535.100	0	0	-	0									-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
44		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Jenis Pencapaian Target Konsumsi Pangan	jenis	10	9.913.263.600	0	1.110.147.000	2	2.550.000.000	-	-	-	1.000.000.000		110.147.000	-	-	-	1.110.147.000	-	2.220.294.000	0%	22%	0%	44%
45		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	93	9.454.193.400	0	1.109.864.000	1	2.500.000.000				1.000.000.000		109.864.000			-	1.109.864.000	-	2.219.728.000	0%	23%	0%	44%

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2029		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100%		15=12/7 x 100%	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
47		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	5	459.070.200	0	283.000	1	50.000.000						283.000			-	283.000	-	566.000	0%	0%	0%	1%
48	Terlaksanaya Penanganan Kerawanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	29,77	1.160.756.887	0	725.000	11	125.000.000	-	-	-	-		725.000	-	-	-	725.000	-	1.450.000	0%	0%	0%	1%
49		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	jenis	6	1.160.756.887	0	725.000	1	125.000.000	-	-	-	-	-	725.000	-	-	-	725.000	-	1.450.000	60%	0%	0%	1%
50		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	1.160.756.887	0	725.000	1	125.000.000						725.000			-	725.000	-	1.450.000	0%	0%	0%	1%
52	Meningkatnya Keamanan/ Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	persen	125	134.290.826	4	9.078.400	8,69	10.000.000	-	-	-	4.640.000	4	4.438.400	-	-	4	9.078.400	8	18.156.800		14%	46%	91%
53		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Sampel	30	134.290.826	4	9.078.400	4	10.000.000	-	-	-	4.640.000	4	4.438.400	-	-	4	9.078.400	8	18.156.800	60%	14%	100 %	91%
54		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	30	134.290.826	4	9.078.400	4	10.000.000				4.640.000	4	4.438.400			4	9.078.400	8	18.156.800	27%	14%	100 %	91%
55	Terlaksanaya Pengelolaan Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	14.550	7.478.150.271	0	303.292.000	14.550	2.824.205.214	-	-	-	21.780.000		281.512.000	-	-	-	303.292.000	-	606.584.000	0%	8%	0%	11%

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2029		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100%		15=12/7 x 100%	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
56		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya	Orang	61	85.000.000	0	0	3	25.000.000	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	60%	0%	0%	0%
58		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	Unit	61	85.000.000	0	0	2	25.000.000									-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
56		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jenis	8	7.393.150.271	0	303.292.000	3	2.799.205.214	-	-	-	21.780.000	-	281.512.000	-	-	-	303.292.000	-	606.584.000	60%	8%	0%	11%
58		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	10	5.428.883.057	0	47.430.000	2	1.577.250.000				21.780.000		25.650.000			-	47.430.000	-	94.860.000	0%	2%	0%	3%
59		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	275	1.021.000.000	0	224.514.000	30	728.688.000						224.514.000			-	224.514.000	-	449.028.000	0%	44%	0%	31%
60		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Unit	5	943.267.214	0	31.348.000	1	493.267.214						31.348.000			-	31.348.000	-	62.696.000	0%	7%	0%	6%
61	Tersedianya dan berkembangnya Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Ton	10.948	2.747.967.906	0	4.597.000	500	55.000.000	-	-	-	4.080.000	-	517.000	-	-	-	4.597.000	-	9.194.000	0%	0%	0%	8%
65		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak	Ekor	8.500	2.747.967.906	0	4.597.000	500	55.000.000	-	-	-	4.080.000	-	517.000	-	-	-	4.597.000	-	9.194.000	60%	0%	0%	8%

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2029		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100%		15=12/7 x 100%	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
66		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	8.500	2.747.967.906	0	4.597.000	500	55.000.000				4.080.000		517.000			-	4.597.000	-	9.194.000	0%	0%	0%	8%
67	Tersedianya dan berkembangnya Prasarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prasarana Pertanian yang Tersedia/Dikembangkan (Dokumen)	unit	8	2.692.967.906	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
68		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Dokumen	8	2.692.967.906	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
69		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	8	2.692.967.906	0	0	-	0									-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
71	Meningkatnya pengendalian terhadap penyakit hewan menular	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	500	1.266.005.508	0	256.315.927	1.860	437.400.000	-	-	-	7.420.000	-	248.895.927	-	-	-	256.315.927	-	512.631.854	0%	40%	0%	59%
72		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang terjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah	15	978.605.508	30	167.543.478	15	230.000.000	-	-	15	3.680.000	15	163.863.478	-	-	30	167.543.478	60	335.086.956	60%	34%	200%	73%
73		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	75	464.302.754	15	81.881.990	15	90.000.000			-	1.690.000	15	80.191.990			15	81.881.990	30	163.763.980	40%	35%	100%	91%
74		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	75	514.302.754	15	85.661.488	15	140.000.000			-	1.990.000	15	83.671.488			15	85.661.488	30	171.322.976	40%	33%	100%	61%
75		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam	Laporan	24	287.400.000	0	88.772.449	12	207.400.000	-	-	-	3.740.000	-	85.032.449	-	-	-	88.772.449	-	177.544.898	0%	62%	0%	43%

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2029		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100%		15=12/7 x 100%	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota																							
76		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	60	287.400.000	9	88.772.449	12	207.400.000			3	3.740.000	6	85.032.449			9	88.772.449	18	177.544.898	30%	62%	75%	43%
TOTAL				**-**	**47.272**	**52.373.154.337**	**463**	**2.086.504.448**	**19.873**	**10.719.033.171**	**72**	**993.000.807**	**64**	**1.322.104.127**	**393**	**1.602.394.723**	**-**	**-**	**529**	**4.917.499.657**	**880**	**7.004.004.105**	**2%**	**13%**	**2,66%**	**46%**
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA																			**2,66%**	**45,88%**			**2%**	**13%**	**3%**	
PREDIKAT KINERJA																				**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Kajian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara tersusun dalam tabel 2.2. Berikut kinerja pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara :

Table 2.2 Target dan Proyeksi Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

No	INDIKATOR	SPM	TARGET					PROYEKSI					Catatan
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	PDRB Sub sektor Perikanan (Milyar Rupiah)		45,41	49,52	53,98	58,8	64,01	45,41	49,52	53,98	58,8	64,01	
2	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)		78,64	79,14	79,69	80,29	80,89	78,64	79,14	79,69	80,29	80,89	
3	Produksi Ikan Air Tawar (Ton)		2.982	2.998	3.014	3.030	3.046	2.982	2.998	3.014	3.030	3.046	
4	Produktivitas Ikan Air Tawar (Ton/Ha)		2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	
5	Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)		2.257	2.258	2.259	2.260	2.261	2.257	2.258	2.259	2.260	2.261	
6	Konsumsi Protein (Gram/Kapita/Hari)		58	59	60	61	62	58	59	60	61	62	
7	Indeks Keterjangkauan (IA) (Skor)		75,3	75,45	75,6	75,75	75,9	75,3	75,45	75,6	75,75	75,9	
8	Indeks Ketersediaan (IK) (Skor)		96,15	96,3	96,45	96,6	96,75	96,15	96,3	96,45	96,6	96,75	
9	Populasi Ternak Kerbau (Ekor)		9.997	10.117	10.237	10.357	10.477	9.997	10.117	10.237	10.357	10.477	
10	Populasi Ternak Sapi (Ekor)		811	831	851	871	891	811	831	851	871	891	
11	Populasi Ternak Kambing (Ekor)		2.116	2.127	2.138	2.149	2.160	2.116	2.127	2.138	2.149	2.160	
12	Populasi Ternak Babi (Ekor)		21.732	23.332	24.932	26.532	28.132	21.732	23.332	24.932	26.532	28.132	
13	Populasi Ternak Ayam (Ekor)		531.353	538.353	545.353	552.353	559.353	531.353	538.353	545.353	552.353	559.353	
14	Populasi Ternak Itik (Ekor)		64.260	64.580	64.900	65.220	65.540	64.260	64.580	64.900	65.220	65.540	
15	Nilai AKIP (Nilai)		75	76	77	78	79	75	76	77	78	79	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Bertitik tolak dari isu tingkat Nasional dan Regional serta diselaraskan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

A. Sub Sistem Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masalah pangan global merupakan krisis akses pangan yang terkait dengan masih tingginya angka kemiskinan. Krisis pangan global yang melanda dunia saat ini memang belum memberikan imbas yang relative besar terhadap Indonesia umumnya atau Tapanuli Utara khususnya, hal ini disebabkan iklim di daerah ini masih mendukung produksi pangan, namun demikian untuk lima tahun kedepan kemandirian pangan akan menghadapi tantangan yang cukup serius baik dari aspek ketersediaan dan kerawananan pangan,distribusi dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan maupun aspek manajemen ketahanan pangan. Swasembada dan Swasembada berkelanjutan harus tetap diperhatikanuntuk menjamin ketahanan pangan.

Perubahan iklim mengakibatkan degradasi kesuburan lahan yang berdampak terhadap pemicu penurunan luas pertanaman dan produksi. Dari beberapa laporanyang telah ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara terjadi gagal panen akibat kekeringan. Namun dilain pihak ada juga gagal panen akibat banjir bandang. Kesemuanya kejadian tersebut diakibatkan oleh cuaca yang ekstrim dan akibat perubahan anomali iklim. Untuk kebutuhan komsumsi penduduk Tapanuli Utara masih tergolong surplus tetapi penyiapan pangansebagai antisipasi penanganan cadangan sangat dibutuhkan berupa cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah untuk antisipasi masalah kekurangan pangan terutama di daerah- daerah kantong kemiskinan/rawan pangan maupun bencana alam transien.

B. Sub Sistem Distribusi dan Akses Pangan

Kestabilan harga dan rendahnya efisiensi system pemasaran hasil-hasil pangan pada saat ini merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen maupun konsumen. Hal ini antara lain disebabkan karena lemahnya disiplin dan penegakan peraturan untuk menjamin sistem pemasaran yang adil dan bertanggung jawab, terbatasnya fasilitas perangkat keras maupun lunak untuk membangun transparansi informasi pasar. Penurunan harga pada saat

panen raya cenderung merugikan petani, sebaliknya pada saat tertentu pada musim paceklik dan hari- hari besar harga pangan meningkat tinggi menekan konsumen, tetapi harga tersebut sering tidak dinikmati oleh petani produsen. Terbatasnya kelembagaan yang menyediakan permodalan bagi petani dan prosedur penyaluran yang kurang mengapresiasikan sifat usahatani dan resiko yang dihadapi, merupakan kendala bagi berkembangnya usahatani.

C. Sub sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan

Dalam mengembangkan produksi bahan pangan dan mengembangkan diversifikasi pangan harus mengacu pada sumberdaya lokal dan budaya lokal yang ada dan pola makan yang dianut oleh masyarakat. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman. . Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, Antara lain; 1). Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga; 2) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi; 3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; 4) lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai social, citra dan daya terima;6) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam,bergizi seimbang dan aman (B2SA). Sampai saat ini, pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan masih belum optimal, yang ditandai oleh ; 1) keterbatasan dalam memberikan dukungan program usaha bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal; dan 2) kurangnya fasilitas pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam,bergizi seimbang dan aman; 3) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas; dan 4) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain: 1). Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama produk pangan segar; 2). Masih banyaknya petani belum memahami dan menerapkan cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar; 3) belum efektifnya penanganan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM dan pedoman masih terbatas; 4). Merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk

pangan segar; 5) Koordinasi lintas sektor dan sub sektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal.

Jadi Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara disimpulkan sebagai berikut :

1. Kurangnya regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah;
2. Lemahnya Kelembagaan Pangan;
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam Sistem Informasi Harga Pangan;
4. Belum terkendalinya stabilitas pasokan dan harga pangan;
5. Belum optimalnya penggunaan cadangan pangan daerah;
6. Belum optimalnya sistem informasi dan pengendalian daerah rawan pangan dan gizi;
7. Belum Optimal pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
8. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan terutama produk pangan segar asal tumbuhan;
9. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat;
10. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan pangan local.

D. Sub Sistem Perikanan

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perikanan yaitu :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana produksi perikanan;
2. Belum tersedianya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
3. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan;
4. Terbatasnya jumlah tenaga teknis penyuluh perikanan;
5. Masih rendahnya pengetahuan pembudidaya ikan.

Isu ini muncul di bidang budidaya perikanan dikarenakan untuk mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan adanya peningkatan produksi dari budidaya perikanan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dari perikanan tangkap pemenuhan kebutuhan produksi tidak dapat dipastikan karena kondisi alam dan musim yang sulit diperkirakan dampak dari perubahan iklim global. Isu-isu yang teridentifikasi adalah :

- Tingginya harga pakan yang berakibat pada tingginya biaya produksi budidaya;
- Terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu;
- Perlunya pengembangan budidaya ikan skala kecil/rumah tangga;

- Masih rendahnya nilai tambah produk hasil perikanan;
- Perlunya peningkatan kontribusi perikanan (darat) bagi perekonomian daerah
- Fluktuasi ketersediaan benih ikan. Upaya yang dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan, peningkatan teknologi perikanan

E. Sub Sistem Peternakan

Pembangunan pada Sektor Peternakan di Kabupaten Tapanuli Utara ditujukan untuk peningkatan produksi peternakan. Permasalahan yang dihadapi dalam sektor peternakan adalah:

1. Terjadinya wabah penyakit hewan menular (African Swine Fever/ASF, Penyakit Mulut dan Kuku/ PMK, New Castle Disease/ND, dll);
2. Tingginya kasus penyakit rabies pada Hewan Pembawa Rabies (HPR);
3. Rendahnya Populasi ternak dan unggas;
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
5. Masih rendahnya pengetahuan petani peternak;
6. Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur pada bidang peternakan.

2.4. Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan rancangan program kegiatan Perubahan Renja satu tahun yaitu Tahun 2025. Sampai saat penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dilakukan, perkiraan kebutuhan masih tetap sama, dengan kata lain tidak ada perubahan kondisi yang mengharuskan adanya penyesuaian.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan KabupatenTapanuli Utara Tahun 2025 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari 8 (delapan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp10.719.033.171 (sepuluh miliar tujuh ratus Sembilan belas juta tiga puluh tiga ribu serratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana tersaji dalam tabel 2.3 berikut :

Table 2.3 Review terhadap P-RKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			**7.402.427.957**		**7.402.427.957**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Realisasi Anggaran**	**100%**	**4.516.427.957**	**100%**	**4.516.427.957**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5 jenis Laporan**	**20.000.000**	**5 jenis Laporan**	**20.000.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	6.000.000	7 dokumen	6.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan Capaian Kinerja	2.000.000	1 Laporan Capaian Kinerja	2.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	12.000.000	7 Laporan	12.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Jenis**	**3.880.606.307**	**3 Jenis**	**3.880.606.307**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang/bulan	3.822.133.107	48 orang/bulan	3.822.133.107	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	56.073.200	12 dokumen	56.073.200	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan	2.400.000	1 Laporan Keuangan	2.400.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Administrasi Umum PD**	**12 Jenis**	**119.000.000**	**12 Jenis**	**119.000.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	1 Paket	12.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4.000.000	4 Paket	4.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	12 Paket	10.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.340 Dokumen	4.000.000	1.340 Dokumen	4.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73 Laporan	85.000.000	73 Laporan	85.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	**1 Jenis**	**32.312.000**	**1 Jenis**	**32.312.000**	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	32.312.000	2 Unit	32.312.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5 Jenis**	**331.319.000**	**5 Jenis**	**331.319.000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 laporan	400.000	40 laporan	400.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	46.298.200	36 laporan	46.298.200	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	284.620.800	12 laporan	284.620.800	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Jenis**	**133.190.650**	**3 Jenis**	**133.190.650**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit mobil	113.956.750	3 unit mobil	113.956.750	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3.749.500	2 Unit	3.749.500	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.484.400	1 Unit	15.484.400	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Skor Pola Pangan Harapan**	**90,30 Poin**	**2.751.000.000**	**90,30 Poin**	**2.751.000.000**	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Jumlah Jenis Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya**	**3 Jenis**	**91.000.000**	**3 Jenis**	**91.000.000**	
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	*Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan*	5 Unit (1.389 kg padi)	31.000.000	5 Unit (1.389 kg padi)	31.000.000	
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	*Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota*	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Stock Cadangan Pangan Kabupaten/Kotata**	**4,4 ton beras**	**110.000.000**	**4,4 ton beras**	**110.000.000**	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan PanganPemerintah Kabupaten/Kota*	4,4 ton beras	110.000.000	4,4 ton beras	110.000.000	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Jumlah Jenis Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**2 Jenis**	**2.550.000.000**	**2 Jenis**	**2.550.000.000**	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	2.500.000.000	1 Laporan	2.500.000.000	
B2SA DAK NON FISIK TA. 2025	Jumlah desa penerima	25 Desa	2.500.000.000	25 Desa	2.500.000.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**7,54 Persen**	**125.000.000**	**7,54 Persen**	**125.000.000**	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**2 Jenis**	**125.000.000**	**2 Jenis**	**125.000.000**	
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	125.000.000	2 Dokumen	125.000.000	
Pembinaan Desa Mandiri Pangan	*Jumlah ternak ayam umur 3 bulan yang diserahkan untuk daerah yang rawan pangan*	*345 ekor ternak ayam umur 2 bulan*	*25.000.000*	*345 ekor ternak ayam umur 2 bulan*	*25.000.000*	
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	*Jumlah balita stunting yang mengalami rawan pangan*	*230 Orang Balita Stunting*	*100.000.000*	*230 Orang Balita Stunting*	*100.000.000*	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan**	**16,67%**	**10.000.000**	**16,67%**	**10.000.000**	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah sample Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**4 sampel pangan segar**	**10.000.000**	**4 sampel pangan segar**	**10.000.000**	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			***3.316.605.214***		***3.316.605.214***	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			***2.824.205.214***		***2.824.205.214***	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	***Jumlah Produksi Perikanan Budidaya***	**2.880 Ton**	***2.824.205.214***	**2.880 Ton**	***2.824.205.214***	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	***Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan***	**1 Jenis**	***25.000.000***	**1 Jenis**	***25.000.000***	
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Kelompok	25.000.000	15 Kelompok	25.000.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil						
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	***Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan***	**3 Jenis**	***2.799.205.214***	**3 Jenis**	***2.799.205.214***	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	1.577.250.000	2 Unit	1.577.250.000	
Penyediaan Operasional UPTD BBI Purbatua	*Jumlah Benih Ikan di BBI Purbatua*	*125.000 ekor benih ikan*	*666.526.700*	*125.000 ekor benih ikan*	*666.526.700*	
Penyediaan Operasional UPTD BBI Silangkitang	*Jumlah Benih Ikan di BBI Silangkitang*	*55.000 ekor benih ikan*	*910.723.300*	*55.000 ekor benih ikan*	*910.723.300*	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	55 Unit	728.688.000	55 Unit	728.688.000	
Pengembangan Benih Ikan Mas untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan	*Jumlah Benih Ikan Mas*	*192.200 ekor benih ikan*	*334.213.000*	*192.200 ekor benih ikan*	*334.213.000*	
Pengembangan Benih Ikan Nila untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan	*Jumlah Benih Ikan Nila*	*146.400 ekor benih ikan*	*196.799.000*	*146.400 ekor benih ikan*	*196.799.000*	
Pengembangan Benih Ikan Lele Dumbo untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan	*Jumlah Benih Ikan Lele Dumbo*	*96.550 ekor benih ikan*	*137.676.000*	*96.550 ekor benih ikan*	*137.676.000*	
Pelatihan Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan di UPTD BBI Silangkitang	*Jumlah Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan*	*55 orang*	*60.000.000*	*55 orang*	*60.000.000*	
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	3 Dokumen	493.267.214	3 Dokumen	493.267.214	
Penyediaan Jasa Operasional Alat Berat Excavator	*Luas Lahan Budidaya*	5 Ha Luas Lahan Budidaya	143.267.214	5 Ha Luas Lahan Budidaya	143.267.214	
Optimalisasi Lahan Pasca Bencana di Pahae	*Luas Lahan Budidaya*	*112 Ha Luas Optimalisasi*	*150.000.000*	*112 Ha Luas Optimalisasi*	*150.000.000*	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
		Lahan Pasca Bencana		*Lahan Pasca Bencana*		
Revitalisasi Sawah di Desa Simanungkalit	*Luas Lahan Budidaya*	*6 Ha Luas Lahan Budidaya Revitalisasi Sawah*	*200.000.000*	*6 Ha Luas Lahan Budidaya Revitalisasi Sawah*	*200.000.000*	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			***492.400.000***		***492.400.000***	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	***Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan***	**2.159,61 Ton**	***55.000.000***	**2.159,61 Ton**	***55.000.000***	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	***Jumlah Laporan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain***	**1 Laporan**	***55.000.000***	**1 Laporan**	***55.000.000***	
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	500 ekor	55.000.000	500 ekor	55.000.000	
Pengembangan Ternak Ayam Buras	*Jumlah Ternak Ayam Buras*	*500 ekor*	*55.000.000*	*500 ekor*	*55.000.000*	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	***Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)***	**2300 Kasus**	***437.400.000***	**2300 Kasus**	***437.400.000***	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah wilayah yang terjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota***	**15 wilayah**	***230.000.000***	**15 wilayah**	***230.000.000***	
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	15 laporan	90.000.000	15 laporan	90.000.000	
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	*1.300 Kasus*	*90.000.000*	*1.300 Kasus*	*90.000.000*	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	15 Laporan	140.000.000	15 Laporan	140.000.000	
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)	*Jumlah Kasus Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)*	*4.830 Kasus*	*140.000.000*	*4.830 Kasus*	*140.000.000*	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota***	**12 laporan**	***207.400.000***	**12 laporan**	***207.400.000***	
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 laporan	207.400.000	12 laporan	207.400.000	
Penyediaan Pelayanan Puskeswan	*Jumlah Hewan yang ditangani*	*121 ekor*	*13.000.000*	*121 ekor*	*13.000.000*	
Biaya Operasional Puskeswan DAK NON FISIK 2025	*Jumlah Hewan yang ditangani*	*1827 ekor*	*194.400.000*	*1827 ekor*	*194.400.000*	
	TOTAL		***10.719.033.171***		***10.719.033.171***	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara, penjaringan kebutuhan masyarakat melalui acara pertemuan dan sosialisasi, serta melalui surat dan proposal yang dikirimkan ke Dinas Ketahanan Kabupaten Tapanuli Utara. Usulan kegiatan masyarakat Tahun 2025 pada umumnya selaras dengan isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta program yang direncanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.

DinasKetahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara menyusun usulan program dan kegiatan sebahagian berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan, LSM, assosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Penyusunan RKPD dilakukan melalui program “bottom up’ dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan elemen pendukungnya. Dapat melalui Musrenbang tingkat desa sampai dengan kecamatan, maupun permohonan yang langsung disampaikan masyarakat ke Pemerintah Daerah. Usulan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Table 2.4 Usulan Program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan dan Kelompok Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

Pengusul	Fraksi	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien
Jonri Tampubolon	Partai Hanura	Penyediaan Benih Ikan Mas	Masyarakat meminta pengadaan Ikan mas, Lele dan Mujahir masing masing 1500 ekor	Desa Parratusan Kecamatan Pangaribuan	4.500 ekor
Jonri Tampubolon	Partai Hanura	Penyediaan Benih Ikan Nila	Benih Ikan Mas Masyarakat meminta pengadaan Ikan mas, Lele dan Mujahir masing masing 1500 ekor	Desa Sigotom Julu Kecamatan Pangaribuan	4.500 ekor
Jonri Tampubolon	Partai Hanura	Penyediaan Benih Ikan Nila	Benih Ikan Mas Masyarakat meminta pengadaan Ikan mas, Lele dan Mujahir masing masing 1500 ekor	Desa Sigotom Timur Kecamatan Pangaribuan	4.500 ekor
Jonri Tampubolon	Partai Hanura	Penyediaan Benih Ikan Mas	Masyarakat meminta pengadaan Ikan mas, Lele dan Mujahir masing masing 1500 ekor	Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan	4.500 ekor
Jonri Tampubolon	Partai Hanura	Penyediaan Benih Ikan Mas	Masyarakat meminta pengadaan Ikan mas, Lele dan Mujahir masing masing 1500 ekor	Desa Sigotom Dolok Nauli Kecamatan Pangaribuan	4.500 ekor

Pengusul	Fraksi	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien
Arnol Panggabean		Ternak Kambing	Mahalnya ternak kambing per ekornya masyarakat tidak mampu membeli kambing, dengan bantuan pemerintah untuk kelompok tani dapat memberi bantuan ternak kambing, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sibalanga	Desa Sibalangan, Kecamatan Adiankoting	
Manto Sianturi		Pengadaaan Mesin Pellet	Belum ada di kelompok	Desa Pagaran, Kecamatan Pagaran	
Luhut Hutabarat		Ternak Ayam Buras	Ayam Buras (ayam kampung) sudah mulai langka di desa Sitoluama karena pernah terkena penyakit sehingga banyak ayam yang mati	Dusun I, II, dan III Desa Sitoluama, Pahae Julu	800 ekor
Paian Sihombing, A.Md		Penyediaan Kebun Bibit, Bibit sayuran dan polibag	Kurangnya penyediaan bibit bagi para kelompok tani	Desa Hutaraja, Kecamatan Sipoholon	
Sabungan Sihombing		Ternak Itik	Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	Desa Bahal Batu I, Kecamatan Siborongborong	
Tagor Nababan		Ternak Ayam Buras	Masih Kurangnya Peternakan di Desa	Desa Sitabotabo, Kecamatan Siborongborong	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam memantapkan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara terintegrasi. Yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Kedaulatan pangan memberikan dukungan kekuatan dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri yang diarahkan untuk menyediakan beraneka ragam pangan dari produksi dalam negeri sesuai potensi sumber daya yang kita miliki. Ketersediaan pangan yang beraneka ragam akan mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 22/2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Permentan 43/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, serta 27 Peraturan/Surat Edaran Gubernur di 27 Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, dapat segera terwujud manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Untuk mendukung prioritas pembangunan Daerah dan Nasional sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara. Tujuan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun atau kapan harus dicapai. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli UtaraTahun 2025 selaras dengan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

Tujuan:

Meningkatkan PDRB (ADHB) sub sektor Perikanan dan Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau

Sasaran :

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Air Tawar;
2. Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
3. Meningkatkan akses pangan Masyarakat;
4. Meningkatkan Produksi Ternak;
5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Berikut penjabaran atas keselarasan misi yang diemban, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Table 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan PDRB (ADHB) sub sektor Perikanan dan Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau		PDRB Sub sektor Perikanan (Milyar Rupiah)	43,99	45,41	49,52	53,98	58,8	64,01	70,05
		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	78,14	78,64	79,14	79,69	80,29	80,89	81,53
	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Air Tawar	Produksi Ikan Air Tawar (Ton)	2.966,64	2.982	2.998	3.014	3.030	3.046	3.062
		Produktivitas Ikan Air Tawar (Ton/Ha)	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
	Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	2.257,5	2.257	2.258	2.259	2.260	2.261	2.262
		Konsumsi Protein (Gram/Kapita/Hari)	58,5	58	59	60	61	62	63
	Meningkatkan akses pangan masyarakat	Indeks Keterjangkauan (IA) (Skor)	75,15	75,3	75,45	75,6	75,75	75,9	76,05
		Indeks Ketersediaan (IK) (Skor)	96,05	96,15	96,3	96,45	96,6	96,75	96,9
	Meningkatkan Produksi Ternak	Populasi Ternak Kerbau (Ekor)	9.872	9.997	10.117	10.237	10.357	10.477	10.597
		Populasi Ternak Sapi (Ekor)	787	811	831	851	871	891	911
		Populasi Ternak Kambing (Ekor)	2.105	2.116	2.127	2.138	2.149	2.160	2.171
		Populasi Ternak Babi (Ekor)	20.132	21.732	23.332	24.932	26.532	28.132	29.732
		Populasi Ternak Ayam (Ekor)	524.353	531.353	538.353	545.353	552.353	559.353	566.353
		Populasi Ternak Itik (Ekor)	63.940	64.260	64.580	64.900	65.220	65.540	65.860
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Nilai)	74,47	75	76	77	78	79	80

Formulasi untuk pencapaian indikator dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan PDRB (ADHB) sub sektor Perikanan dan Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau

   Indikator : PDRB Sub sektor Perikanan (Milyar Rupiah)

   Formulasi :

   Σ(Produksi Bruto Sub sektor Perikanan) - Σ(Input Produksi Sub sektor Perikanan)

   Indikator : Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)

   Formulasi :

   $$Y(j) = \sum_{i=1}^{9} aiXij$$

   i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9

   j : Kabupaten

   Y_j : Indeks Ketersediaan Pangan

   a_i : Bobot masing-masing indikator ke-1

   X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-1 pada Kabupaten ke-j

   Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 –100). Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indicator. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relative indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan IKP mengacu pada metode yang dikembangkan oleh EIU dalam penyusunan GFSI. Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui *expert judgement* (Tabel 3.2).

Tabel 3.2. Bobot Indikator Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten

No.	Indikator	Bobot
	ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN	
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah	0,30
	Sub Total	**0,30**
	ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN	
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,15
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075
	Sub Total	**0,30**
	ASPEK PEMANFAATAN PANGAN	
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,05
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05
8.	Persentase balita stunting	0,05
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10
	Sub Total	**0,40**

Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan Indeks Ketahanan Pangan oleh Badan Pangan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih

   Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah. Produksi bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer, penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan. Sedangkan konsumsi normatif ditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari. Data produksi padi menggunakan angka tetap 2022 dari BPS. Angka produksi jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu dari Kementerian Pertanian. Data stok beras pemerintah daerah dari Badan Pangan Nasional.

2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

   Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015). Data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bersumber dari Susenas 2022, BPS.

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran

   Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori Engel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan semakin turun. Pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan (Suhardjo 1996; Azwar 2004). Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran panganpenduduknya semakin kecil (Deaton dan Muellbauer 1980). Data yang digunakan bersumber dari Susenas 2022, BPS.

4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

   Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan dengan mendorong aktivitas ekonomi di suatu daerah. Karena itu, ketersediaan tenaga Listrik dijadikan salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013). Rumah tangga tanpa akses Listrik diduga akan berpengaruh terhadap kerentanan pangan dan gizi. Data persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik bersumber dari Susenas 2022, BPS.

5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun

   Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat dengan penyerapan pangan dan ketahanan pangan (Khan dan Gill 2009). Sumber data yang digunakan berasal dari Data Susenas 2022, BPS.

6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

   Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, daerah dengan akses terhadap air bersih rendah memiliki kejadian malnutrisi yang tinggi (Sofiati 2010). Peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting untuk mengurangi masalah kesehatan khususnya diare, sehingga dapat memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Kavosi et al. 2014). Sumber data berasal dari data Susenas 2022, BPS.

7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga Kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis) yang cukup di suatu wilayah akan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat yang pada gilirannya dapat menekan penyakit-penyakit infeksi yang berdampak pada masalah gizi, sekaligus mengkampanyekan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Rasio jumlah penduduk per tenaga Kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah (Lubis 2010; Sofiati 2010). Data tenaga kesehatan bersumber dari Profil Tenaga Kesehatan Tahun 2022, Kementerian Kesehatan.

8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)

   Balita stunting adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO 2005). Status gizi balita merupakan salah satu indicator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapan pangan (Pemprov NTT et al. 2015). Data stunting diperoleh dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Kementerian Kesehatan.

9. Angka harapan hidup pada saat lahir

   Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Angka harapan hidup merupakan salah satu dampak dari status kesehatan di suatu wilayah. Meningkatnya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan kualitas konsumsi dan kesehatan ibu hamil, status kesehatan secara fisik dan psikis masyarakat pada umumnya, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Angka harapan hidup saat lahir berasal dari BPS.

10. Sasaran 1 : Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Air Tawar

    Indikator : Produksi Ikan Air Tawar (Ton)

    Formulasi:

∑ Produksi Perikanan Budidaya + ∑ Produksi Perikanan Tangkap

Indikator : Produktivitas Ikan Air Tawar (Ton/Ha)

Formulasi:

$$\text{Produktivitas Ikan Air Tawar} = \frac{Total\ Produksi}{Luas\ Lahan}$$

11. Sasaran 2 : Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Indikator : Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)

Formulasi:

Konsumsi Energi = Total Energi Aktual Kelompok Pangan yang dikonsumsi

Indikator : Konsumsi Protein (Gram/Kapita/Hari)

Angka Konsumsi Protein (AKP) = Kebutuhan protein (%) x Kebutuhan Kalori

Pengumpulan data dikumpulkan lewat wawancara langsung dengan responden dan hasil wawancara dicatat dalam kuesioner, menggunakan metode food recall 24 jam yaitu mencatat semua makanan yang dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga selama 24 jam yang lalu. Survei ini dilakukan selama 2 (dua) hari berturut-turut. Data yang telah terkumpul dalam bentuk kuesioner akan diedit lalu direkap dengan melakukan konversi terhadap porsi bahan makanan, dari ukuran rumah tangga ke ukuran gram. Kemudian hasil rekapan tersebut akan dientry / diinput ke dalam aplikasi yang telah tersedia.

Kelompok/jenis bahan makanan yang dihitung tersebut mencakup:

1. Padi-padian, meliputi beras, jagung, terigu, dan hasil olahannya.
2. Umbi-umbian atau pangan berpati, meliputi ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu dan hasil olahannya.
3. Pangan hewani, meliputi ikan, daging, telur, susu, dan hasil olahannya.
4. Minyak dan lemak, meliputi minyak kelapa, minyak jagung, minyak goreng kelapa sawit dan margarine.
5. Buah dan biji berminyak, meliputi mete, kelapa, kenari, kemiri dan cokelat.
6. Kacang-kacangan, meliputi kacang kedelai, kacang tanah, kacang tonggak, kacang polong.
7. Gula, meliputi gula pasir, gula merah/mangkok, dan sirup.
8. Sayuran dan buah-buahan, meliputi semua jenis sayuran dan buah-buahan.
9. Lain-lain, meliputi bumbu-bumbu.

Sasaran 3 : Meningkatkan akses pangan masyarakat

Indikator : Indeks Ketersediaan (IK)

Formulasi :

$$Y(j) = \sum_{i=1}^{1} aiXij$$

i	: Indikator ke 1
j	: Kabupaten
Y_j	: Indeks Ketersediaan Pangan
a_i	: Bobot masing-masing indikator ke-1
X_{ij}	: Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-1 pada Kabupaten ke-j

Indikator : Indeks Keterjangkauan (IA)

Formulasi :

$$Y(j) = \sum_{i=2}^{4} aiXij$$

i	: Indikator ke 2, 3, 4
j	: Kabupaten
Y_j	: Indeks Ketersediaan Pangan
a_i	: Bobot masing-masing indikator ke-i
X_{ij}	: Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-1 pada Kabupaten ke-j

Sasaran 4 : Meningkatkan Produksi Ternak

Indikator : Populasi Ternak (Ekor)

Formulasi:

Hasil Pendataaan Petugas (sumber Data Dinas Ketahanan Pangan)

Sasaran 5 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Nilai AKIP (Nilai)

Formulasi:

Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasamadengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Pada Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan Program Pembangunan yang direncanakan sebanyak 8 program dan 17 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan. Rincian rencana kegiatan per program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TapanuliUtara sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TapanuliUtara Tahun 2025.

Ada pun rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat tabel 3.2. di bawah ini:

Table 3.3 Rencana Aksi Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
1	Meningkatkan PDRB (ADHB) sub sektor Perikanan dan Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	1	Meningkatkan akses pangan masyarakat	- Indeks Keterjangkauan (IA) - Indeks Ketersediaan (IK)	TW 1		Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	TW 1		Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	TW 1	
					TW 2				TW 2				TW 2	
					TW 3				TW 3				TW 3	1 Jenis
					TW 4	- 75,30 Skor - 96,15 Skor			TW 4	7,54 Persen			TW 4	1 Jenis
		2	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya Air Tawar	- Produksi Ikan Air Tawar - Produktivitas Ikan air Tawar	TW 1		Terlaksananya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	TW 1		Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	TW 1	
					TW 2				TW 2				TW 2	3 Jenis
					TW 3				TW 3				TW 3	3 Jenis
					TW 4	- 2.982 ton - 2,17 ton			TW 4	2.880 Ton			TW 4	3 Jenis
		3	Meningkatkan Produksi Ternak	Meningkatnya Produksi Ternak: -Kerbau - Sapi - Kambing - Babi - Ayam - Itik	TW 1		Tersedianya dan berkembangnya Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	TW 1		Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak	TW 1	
					TW 2				TW 2	2.159,61 Ton			TW 2	
					TW 3				TW 3				TW 3	
					TW 4	- 9.997 Ekor - 811 Ekor - 2.116 Ekor - 21.732 Ekor - 531.353 Ekor - 64.260 Ekor			TW 4				TW 4	500 ekor
							Meningkatnya pengendalian terhadap penyakit hewan menular	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	TW 1		Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang terjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	TW 1	
									TW 2				TW 2	15 wilayah
									TW 3				TW 3	15 wilayah
									TW 4	100 Persen			TW 4	15 wilayah
											Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Laporan Pengelolaan	TW 1	3 laporan

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
											Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	TW 2	6 laporan
													TW 3	12 laporan
													TW 4	12 laporan
		4	Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Komsumsi Energi; Protein	TW 1		Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	TW 1		Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	TW 1	
					TW 2				TW 2				TW 2	
					TW 3				TW 3				TW 3	2 Jenis
					TW 4	2.257kkal/kap/hari ; 58 gr/kap/hari			TW 4	90,3 Persen			TW 4	2 Jenis
											Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Stock Cadangan Pangan Kabupaten/Kotata	TW 1	
													TW 2	
													TW 3	
													TW 4	4,4 ton beras
											Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Jenis Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	TW 1	
													TW 2	1 Jenis
													TW 3	1 Jenis
													TW 4	2 Jenis
							Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	TW 1		Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sample Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	TW 1	
									TW 2				TW 2	
									TW 3				TW 3	4 Sampel Tanaman Buah dan Sayuran
									TW 4	16,67% Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi			TW 4	4 Sampel Tanaman Buah dan Sayuran
		5	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	TW 1		Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase Realisasi Anggaran	TW 1		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	TW 1	4 Jenis
					TW 2				TW 2				TW 2	2 Jenis

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
				Perangkat Daerah	TW 3				TW 3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW 3	1 Jenis
					TW 4	Nilai 75			TW 4	100%			TW 4	7 jenis
											Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TW 1	3 jenis
													TW 2	2 jenis
													TW 3	2 jenis
													TW 4	3 Jenis
											Terlaksananya administrasi umum PD	Jumlah Jenis Administrasi Umum PD	TW 1	6 Jenis
													TW 2	6 Jenis
													TW 3	6 Jenis
													TW 4	6 Jenis
											Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TW 1	5 Jenis
													TW 2	5 Jenis
													TW 3	5 Jenis
													TW 4	5 Jenis
											Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TW 1	
													TW 2	
													TW 3	3 Jenis
													TW 4	3 Jenis

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III, secara keseluruhan pagu indikatif Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 yang semula sebesar Rp7.786.994.469,00 (tujuh miliyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 naik menjadi Rp10.719.033.171 (sepuluh miliar tujuh ratus Sembilan belas juta tiga puluh tiga ribu serratus tujuh puluh satu rupiah), ada penambahan sebesar Rp2.932.032.038.702.

Adapun kebijakan dalam perubahan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara secara garis besar diantaranya adalah:

1. Penambahan belanja pelaksanaan bahan lainnya (plastik kemasan), biaya umum (atk, spanduk), makanan dan minuman, sewa tratak, sewa truk dan belanja sewa meja/kursi & sound pada 2 Kegiatan Gerakan Pasar Murah yakni Hari Jadi Tapanuli Utara dan Hari Natal Tahun Baru (Nataru) pada subkegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota;
2. Penambahan belanja pelaksanaan biaya umum, karung goni, pengadaan beras local 4.171 Kg, sewa truk pada Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Penambahan belanja pelaksanaan biaya umum, Benih Padi Sawah Label Biru 1.120 Kg, sewa truk pada Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota;
4. Penambahan belanja belanja bibit ikan (calon induk), belanja bahan-bahan lainnya (cangkul, kompos, spuit, ember, lampu, sapu, atk, laporan), belanja obat-obatan (ovaprim, molase, vitamin, hormon), belanja natura dan pakan (pakan, bahan pakan), belanja alat produksi perikanan (kakaban, tanggok, plastik packing, heater), belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (kolam,

saluran air dan bangunan), belanja modal alat produksi perikanan (mesin, genset, kincir, paket budidaya alami, bioflok, waring, blower), belanja jasa konsultansi (perencanaan dan pengawasan arsitektur), belanja peralatan kantor lainnya (toren, kasur, selimut, bantal pelatihan) untuk Balai Benih Ikan Silangkitang dan Balai Benih Ikan Purbatua pada Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

5. Penambahan Belanja Registrasi/Keanggotaan untuk Pembuatan Akte Notaris 15 Kelompok Pembudidaya Ikan pada Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
6. Penambahan Belanja Biaya Pelatihan Pembudidaya Ikan di BBI Silangkitang kepada 55 Kelompok Pembudidaya Ikan pada Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat;
7. Penambahan Belanja Pengadaan 192.200 ekor Benih Ikan Mas Uk 5-8 cm, 146.400 ekor Ikan Nila Uk 5-8 cm dan 96.550 ekor Ikan Lele Uk 8-10 cm serta Pakan/Pellet Ikan Protein sedang pada Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
8. Penambahan belanja bahan-bahan bakar, belanja suku cadang alat besar, biaya operasional operator dan mobilisasi excavator untuk Operasional Alat Berat Excavator, Optimalisasi Lahan Pasca Bencana di Pahae, dan Revitalisasi Sawah di Desa Simanungkalit pada Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat;
9. Penambahan anggaran pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan penyesuaian gaji ASN.
10. Pengurangan anggaran pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dikarenakan penyesuaian jumlah pegawai.
11. Penambahan anggaran pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yakni belanja perbaikan, penggantian dan pengecatan kendaraan operasional dinas.
12. Penambahan belanja vaksin rabies pada kegiatan Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R) menjadi 4.830 ekor (dosis).

Perubahan Rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam perencanaan Perubahan Renja OPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :

Table 4.1 Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Perikiraan Maju Rencana Tahun 2025		PENANGGUNG JAWAB	KET.
					Murni	P-APBD	Murni	P-APBD	Bertambah/ Berkurang (8-7)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**			**11 Desa/ Kelurahan Rentan Pangan**	**7,54 Persen**	**25.000.000**	**125.000.000**	**100.000.000**	**6,746031746**	**250.000.000**	**Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan**	
Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**			**2 Jenis**	**2 Jenis**	**25.000.000**	**125.000.000**	**100.000.000**	**1 Jenis**	**250.000.000**	**Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan**	
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	125.000.000	100.000.000	1 Dokumen	250.000.000	Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	
Tersedianya ternak ayam umur 3 bulan yang diserahkan untuk daerah yang rawan pangan	*Pembinaan Desa Mandiri Pangan*	*Jumlah ternak ayam umur 3 bulan yang diserahkan untuk daerah yang rawan pangan*	*Tapanuli Utara*	*PAD*	*345 ekor ternak ayam umur 2 bulan*	*345 ekor ternak ayam umur 2 bulan*	*25.000.000*	*25.000.000*	*0*	*2.050 ekor ternak ayam umur 2 bulan*	*150.000.000*	*Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan*	
Tersedianya ternak ayam umur 3 bulan yang diserahkan untuk daerah yang rawan pangan	*Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)*	*Jumlah balita stunting yang mengalami rawan pangan*	*Tapanuli Utara*	*DAU*	*0*	*230 Orang Balita Stunting*	*0*	*100.000.000*	*100.000.000*	*230 Orang Balita Stunting*	*100.000.000*	*Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan*	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor Pola Pangan Harapan**			**0,23% Cadangan Pangan Daerah Tercukupi - 100%**	**90,30 Poin**	**2.576.000.000**	**2.751.000.000**	**175.000.000**	**90,80 Poin**	**2.517.438.800**	**Kepala Konsumsi dan Keamanan Pangan**	
Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah Jenis Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya**			**3 Jenis**	**3 Jenis**	**16.000.000**	**91.000.000**	**75.000.000**	**4 Jenis**	**350.000.000**	**Kepala Konsumsi dan Keamanan Pangan**	
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Tarutung	DAU	0,00	2 Laporan	0	50.000.000	0	1 Laporan	150.000.000		
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Tarutung	Pendapatan Transfer Antar Daerah, DAU	1 Unit (269 kg padi)	5 Unit (1.389 kg padi)	6.000.000	31.000.000	25.000.000	8	150.000.000	J.F Analis Ketahanan Pangan; Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
Tersedianya informasi harga dan pasokan pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan	Tarutung	Pendapatan Transfer	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	0	1 laporan	20.000.000	J.F Analis Ketahanan Pangan; Pengelola	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Perikiraan Maju Rencana Tahun 2025		PENANGGUNG JAWAB	KET.
					Murni	P-APBD	Murni	P-APBD	Bertambah/ Berkurang (8-7)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Konsumen wilayah Kabupaten/Kota		Antar Daerah								Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
Tersedianya laporan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tarutung	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	0	1 dokumen	30.000.000	J.F Analis Ketahanan Pangan; Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Stock Cadangan Pangan Kabupaten/Kotata**			**0,225 ton beras**	**4,4 ton beras**	**10.000.000**	**110.000.000**	**100.000.000**	**15 Ton**	**110.000.000**	**Kepala Konsumsi dan Keamanan Pangan**	
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Tarutung*	Pendapatan Transfer Antar Daerah, DAU	0,225 ton beras	4,4 ton beras	10.000.000	110.000.000	100.000.000	**15 Ton**	110.000.000	JF. Analis Ketahanan Pangan	
Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Jumlah Jenis Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**			**2 Jenis**	**2 Jenis**	**2.550.000.000**	**2.550.000.000**	**0**	**2 Jenis**	**1.800.000.000**	**Kepala Konsumsi dan Keamanan Pangan**	
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Kecamatan	DAK NON FISIK	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000.000	2.500.000.000	0	1 Laporan	1.700.000.000	Kepala Konsumsi dan Keamanan Pangan	
B2SA DAK NON FISIK TA. 2025	B2SA DAK NON FISIK TA. 2025	Jumlah desa penerima			25 Desa	25 Desa	2.500.000.000	2.500.000.000		17 Desa	1.700.000.000	JF. Analis Ketahanan Pangan; Pengelola Penganekaragaman Pangan	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Tarutung	PAD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	0	1 Laporan	100.000.000	JF. Analis Ketahanan Pangan; Pengelola Penganekaragaman Pangan	
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	***PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN***	***Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan***			***8,69%***	***16,67%***	***10.000.000***	***10.000.000***	***0***	***21,00%***	***30.000.000***	**Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**	
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sample Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**			**4 sampel pangan segar**	**4 sampel pangan segar**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**	**5 sampel pangan segar**	**30.000.000**	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tarutung	PAD	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000	0	5 Dokumen	30.000.000	JF. Analis Ketahanan Pangan; Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	***PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA***	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**			***- 30 orang - 5 Ha - 309.800 ekor***	***2.880 Ton***	***371.517.214***	***2.824.205.214***	***2.452.688.000***	***2895***	***2.015.000.000***	**Kepala Bidang Perikanan**	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Perikiraan Maju Rencana Tahun 2025		PENANGGUNG JAWAB	KET.
					Murni	P-APBD	Murni	P-APBD	Bertambah/ Berkurang (8-7)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	***Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil***	***Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil***			***1 Jenis***	***1 Jenis***	***0***	***25.000.000***	***25.000.000***	***1 Jenis***	***15.000.000***	**Kepala Bidang Perikanan**	
Pembuatan Akte Notaris Kelompok Pembudidaya Ikan	Pembuatan Akte Notaris Kelompok Pembudidaya Ikan	*Pembuatan Akte Notaris Kelompok Pembudidaya Ikan*	*Tarutung*	*DAU*	*15 Kelompok*	*15 Kelompok*	0	25.000.000	25.000.000	*10 Kelompok*	15.000.000	Kepala Bidang Perikanan	
Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	***Pengelolaan Pembudidayaan Ikan***	***Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan***			***3 Jenis***	***3 Jenis***	***371.517.214***	***2.799.205.214***	***2.427.688.000***	***3 Jenis***	***2.000.000.000***	**Kepala Bidang Perikanan**	
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*			*2 Unit*	*2 Unit*	*77.250.000*	*1.577.250.000*	*1.500.000.000*	*200.000 ekor benih ikan*	*1.600.000.000*	Kepala UPT BBI Purbatua; Pramu Benih Ikan	
Tersedianya Benih Ikan di BBI Purbatua	*Penyediaan Operasional UPTD BBI Purbatua*	*Jumlah Benih Ikan di BBI Purbatua*	*Purbatua*	*DID, Pendapatan Transfer Antar Daerah, DAU*	*100.000 ekor benih ikan*	*105.000 ekor benih ikan*	*45.000.000*	*666.526.700*	*621.526.700*	*150.000 ekor benih ikan*	*800.000.000*	Kepala UPT BBI Silangkitang	
Tersedianya Benih Ikan di BBI Silangkitang	Penyediaan Operasional UPTD BBI Silangkitang	Jumlah Benih Ikan di BBI Silangkitang	*Sipoholon*	*DID, Pendapatan Transfer Antar Daerah, DAU*	50.000 ekor benih ikan	55.000 ekor benih ikan	32.250.000	910.723.300	878.473.300	30 Unit	*800.000.000*	Kepala Bidang Perikanan	
Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	*Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat*	*Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat*	*15 Kecamatan*	*DID, Pendapatan Transfer Antar Daerah, DAU*	*30 Unit*	*55 Unit*	*226.000.000*	*728.688.000*	*502.688.000*	*35.500 ekor benih ikan*	*200.000.000*	*JF. Penyuluh Perikanan*	
Tersedianya Benih Ikan Mas	*Pengembangan Benih Ikan Mas untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan*	*Jumlah Benih Ikan Mas*	*15 Kecamatan*	*DID, Pendapatan Transfer Antar Daerah, DAU*	*67.200 ekor benih ikan*	*192.200 ekor benih ikan*	*109.545.000*	*334.213.000*	*224.668.000*	*46.400 ekor benih ikan*	*200.000.000*	*JF. Penyuluh Perikanan*	
Tersedianya Benih Ikan Nila	*Pengembangan Benih Ikan Nila untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan*	*Jumlah Benih Ikan Nila*	*15 Kecamatan*	*DID, Pendapatan Transfer Antar Daerah, DAU*	*46.400 ekor benih ikan*	*146.400 ekor benih ikan*	*58.129.000*	*196.799.000*	*138.670.000*	*46.200 ekor benih ikan*	*200.000.000*	*JF. Penyuluh Perikanan*	
Tersedianya Benih Ikan Lele Dumbo	*Pengembangan Benih Ikan Lele Dumbo untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan*	*Jumlah Benih Ikan Lele Dumbo*	*16 Kecamatan*	*DID, Pendapatan Transfer Antar Daerah, DAU*	*46.200 ekor benih ikan*	*101.200 ekor benih ikan*	*58.326.000*	*137.676.000*	*79.350.000*	*0*	*200.000.000*	*JF. Penyuluh Perikanan*	
Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan	*Pelatihan Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan di UPTD BBI Silangkitang*	*Jumlah Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan*	*15 Kecamatan*	*DID*	*0*	*55 orang*	*0*	*60.000.000*	*60.000.000*	*30 orang*	*65.000.000*	*JF. Penyuluh Perikanan*	
Terlaksananya Perencanaan, dan	Perencanaan, Pengembangan,	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan			1 Dokumen	3 Dokumen	68.267.214	493.267.214	425.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Kepala Bidang Perikanan	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Perikiraan Maju Rencana Tahun 2025		PENANGGUNG JAWAB	KET.
					Murni	P-APBD	Murni	P-APBD	Bertambah/ Berkurang (8-7)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan											
Tersedianya Luas Lahan Budidaya	*Penyediaan Jasa Operasional Alat Berat Excavator*	*Luas Lahan Budidaya*	*15 Kecamatan*	*DID, Pendapatan Transfer Antar Daerah*	*5 Ha Luas Lahan Budidaya*	*10 Ha Luas Lahan Budidaya*	*68.267.214*	*143.267.214*	*75.000.000*	*5 Ha Luas Lahan Budidaya*	*200.000.000*	*JF. Penyuluh Perikanan*	
Optimalisasi Lahan Pasca Bencana di Pahae	*Optimalisasi Lahan Pasca Bencana di Pahae*	*Optimalisasi Lahan Pasca Bencana di Pahae*	*Pahae*	*DAU*		*112 Ha Luas Optimalisasi Lahan Pasca Bencana*	*0*	*150.000.000*	*150.000.000*	*5 Ha Luas Lahan Budidaya*	*0*	*JF. Penyuluh Perikanan*	
Revitalisasi Sawah di Desa Simanungkalit	*Revitalisasi Sawah di Desa Simanungkalit*	*Revitalisasi Sawah di Desa Simanungkalit*	*Sipoholon*	*DAU*		*6 Ha Luas Lahan Budidaya Revitalisasi Sawah*	*0*	*200.000.000*	*200.000.000*	*5 Ha Luas Lahan Budidaya*	*0*	*JF. Penyuluh Perikanan*	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	***PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN***	**Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan**			***500 ekor***	***2.159,61 Ton***	***55.000.000***	***55.000.000***	***0***	***2175 Ton***	***650.000.000***	**Kepala Bidang Peternakan**	
Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	***Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain***	***Jumlah Laporan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain***			***1 Laporan***	***1 Laporan***	***55.000.000***	***55.000.000***	***0***	***5300 ekor***	***650.000.000***	***Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan***	
Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain**			**500 ekor**	**500 ekor**	*55.000.000*	*55.000.000*	*0*	**5300 ekor**	*650.000.000*	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	
Tersedianya Ternak Ayam Buras	*Pengembangan Ternak Ayam Buras*	*Jumlah Ternak Ayam Buras*	*15 Kecamatan*	*DID*	*500 ekor ayam buras umur 3 bulan*	*500 ekor ayam buras umur 3 bulan*	*55.000.000*	*55.000.000*	*0*	*5300 ekor*	*650.000.000*	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**			5.460 Kasus	100%	**387.400.000**	**437.400.000**	**50.000.000**	100%	**200.000.000**	**Kepala Bidang Peternakan**	
Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah wilayah yang terjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota***			15 wilayah	15 wilayah	***180.000.000***	***230.000.000***	***50.000.000***	15 wilayah	***180.000.000***	***Kepala Bidang Peternakan***	
Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali			15 laporan	15 laporan	*90.000.000*	*90.000.000*	*0*	15 laporan	*90.000.000*	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	
Terlaksananya Pencegahan, Pemberantasan dan	*Pencegahan, Pemberantasan dan*	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan*	*15 Kecamatan*	*PAD, DID*	*1.300 Kasus*	*1.300 Kasus*	*90.000.000*	*90.000.000*	*0*	*1.300 Kasus*	*90.000.000*	*Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan*	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Perikiraan Maju Rencana Tahun 2025		PENANGGUNG JAWAB	KET.
					Murni	P-APBD	Murni	P-APBD	Bertambah/ Berkurang (8-7)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)	*Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)*	*kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*											
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			15 Laporan	15 Laporan	90.000.000	140.000.000	50.000.000	15 Laporan	90.000.000	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	
Terlaksananya Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)	*Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)*	*Jumlah Kasus Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)*	*15 Kecamatan*	*PAD, DID, DAU*	*4.030 Kasus*	*4.830 Kasus*	*90.000.000*	*140.000.000*	*50.000.000*	*4.030 Kasus*	*90.000.000*	*Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan*	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota***			***12 laporan***	***12 laporan***	***207.400.000***	***207.400.000***	***0***	***12 laporan***	***20.000.000***	**Kepala Bidang Peternakan**	
Tersedianya Pelayanan Jasa MedikVeteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa MedikVeteriner			12 laporan	12 laporan	*207.400.000*	*207.400.000*	*0*	12 laporan	*20.000.000*	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	
Tersedianya Pelayanan Puskeswan	Penyediaan Pelayanan Puskeswan	Jumlah Hewan yang ditangani	Siborongborong	PAD	121 ekor	121 ekor	*13.000.000*	*13.000.000*	*0*	1.200 ekor	*20.000.000*	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	
Biaya Operasional Puskeswan DAK NON FISIK 2025	Biaya Operasional Puskeswan DAK NON FISIK 2025	Jumlah Hewan yang ditangani	Siborongborong	DAK NON FISIK	1827 ekor	1827 ekor	*194.400.000*	*194.400.000*	*0*			Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	
Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Persentase Realisasi Anggaran***			***100%***	***100%***	***4.362.077.255***	***4.516.427.957***	***154.350.702***	***100%***	***4.369.616.615***	**Sekretaris Dinas**	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***5 jenis Laporan***	***5 jenis Laporan***	***20.000.000***	***20.000.000***	***0***	***5 jenis Laporan***	***20.000.000***	**Sekretaris Dinas**	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tarutung*	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	*7 dokumen*	*7 dokumen*	*6.000.000*	*6.000.000*	*0*	*7 dokumen*	*6.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengadministrasi Keuangan	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tarutung*	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	*1 Laporan Capaian Kinerja*	*1 Laporan Capaian Kinerja*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*	*1 Laporan Capaian Kinerja*	*2.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengadministrasi Keuangan	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Perikiraan Maju Rencana Tahun 2025		PENANGGUNG JAWAB	KET.
					Murni	P-APBD	Murni	P-APBD	Bertambah/ Berkurang (8-7)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tarutung*	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	*7 Laporan*	*7 Laporan*	*12.000.000*	*12.000.000*	*0*	*13 Laporan*	*12.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengadministrasi Keuangan	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***3 Jenis***	***3 Jenis***	***3.703.954.805***	***3.880.606.307***	***176.651.502***	***3 Jenis***	***3.737.273.965***	**Sekretaris Dinas**	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tarutung*	*DAU, DBH*	*48 orang/bulan*	*48 orang/bulan*	*3.645.481.605*	*3.822.133.107*	*176.651.502*	*48 orang/bulan*	*3.698.587.117*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengadministrasi Keuangan	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tarutung*	*PAD*	*12 dokumen*	*12 dokumen*	*56.073.200*	*56.073.200*	*0*	*1 Laporan Keuangan*	*35.886.848*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengadministrasi Keuangan	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tarutung*	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	*1 Laporan Keuangan*	*1 Laporan Keuangan*	*2.400.000*	*2.400.000*	*0*	*12 dokumen*	*2.800.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengadministrasi Keuangan	
Terlaksananya administrasi umum PD	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Jenis Administrasi Umum PD***			***12 Jenis***	***12 Jenis***	***115.000.000***	***119.000.000***	***4.000.000***	***12 Jenis***	***115.000.000***	**Sekretaris Dinas**	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Tarutung*	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	*1 Paket*	*1 Paket*	*4.000.000*	*4.000.000*	*0*	*1 Paket*	*4.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Tarutung*	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	*1 Paket*	*1 Paket*	*12.000.000*	*12.000.000*	*0*	*1 Paket*	*12.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Tarutung*	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	*4 Paket*	*4 Paket*	*4.000.000*	*4.000.000*	*0*	*4 Paket*	*4.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Tarutung*	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	*12 Paket*	*12 Paket*	*6.000.000*	*10.000.000*	*4.000.000*	*12 Paket*	*6.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*Tarutung*	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	1.340 Dokumen	1.340 Dokumen	*4.000.000*	*4.000.000*	*0*	1340 Dokumen	*4.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan*	*Tarutung*	*Pendapatan Transfer*	*73 Laporan*	*73 Laporan*	*85.000.000*	*85.000.000*	*0*	*141 Laporan*	*85.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian,	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Perikiraan Maju Rencana Tahun 2025		PENANGGUNG JAWAB	KET.
					Murni	P-APBD	Murni	P-APBD	Bertambah/ Berkurang (8-7)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Konsultasi SKPD*		*Antar Daerah*								Pengadministrasi Umum	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah pengadaan barang milik daerah***			***1 Jenis***	***1 Jenis***	***0***	***32.312.000***			***32.312.000***		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*		*DAU*	*0 Unit*	*2 Unit*	*0*	*32.312.000*			*32.312.000*		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***5 Jenis***	***5 Jenis***	***440.931.800***	***331.319.000***	***-109.612.800***	***5 Jenis***	***331.840.000***	**Sekretaris Dinas**	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tarutung*	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	*40 laporan*	*40 laporan*	*400.000*	*400.000*	*0*	*100 Laporan*	*400.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Tarutung*	*PAD*	*36 laporan*	*36 laporan*	*46.298.200*	*46.298.200*	*0*	*36 Laporan*	*45.840.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yangDisediakan*	*Tarutung*	*PAD*	*12 laporan*	*12 laporan*	*394.233.600*	*284.620.800*	*-109.612.800*	*12 Laporan*	*285.600.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***3 Jenis***	***3 Jenis***	***82.190.650***	***133.190.650***	***51.000.000***	***3 Jenis***	***133.190.650***	**Sekretaris Dinas**	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Tarutung*	*Pendapatan Transfer Antar Daerah, DAU*	*3 unit mobil*	*3 unit mobil*	*70.956.750*	*113.956.750*	*43.000.000*	*3 Unit*	*113.956.750*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Tarutung*	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	*2 Unit*	*2 Unit*	*3.749.500*	*3.749.500*	*0*	*10 unit*	*3.749.500*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Tarutung*	*Pendapatan Transfer Antar Daerah, DAU*	*1 Unit*	*1 Unit*	*7.484.400*	*15.484.400*	*8.000.000*	*4 Unit*	*15.484.400*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
	JUMLAH						***7.786.994.469***	***10.719.033.171***	***2.932.038.702***		***11.943.888.000***		

CROSSCUTTING KINERJA KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

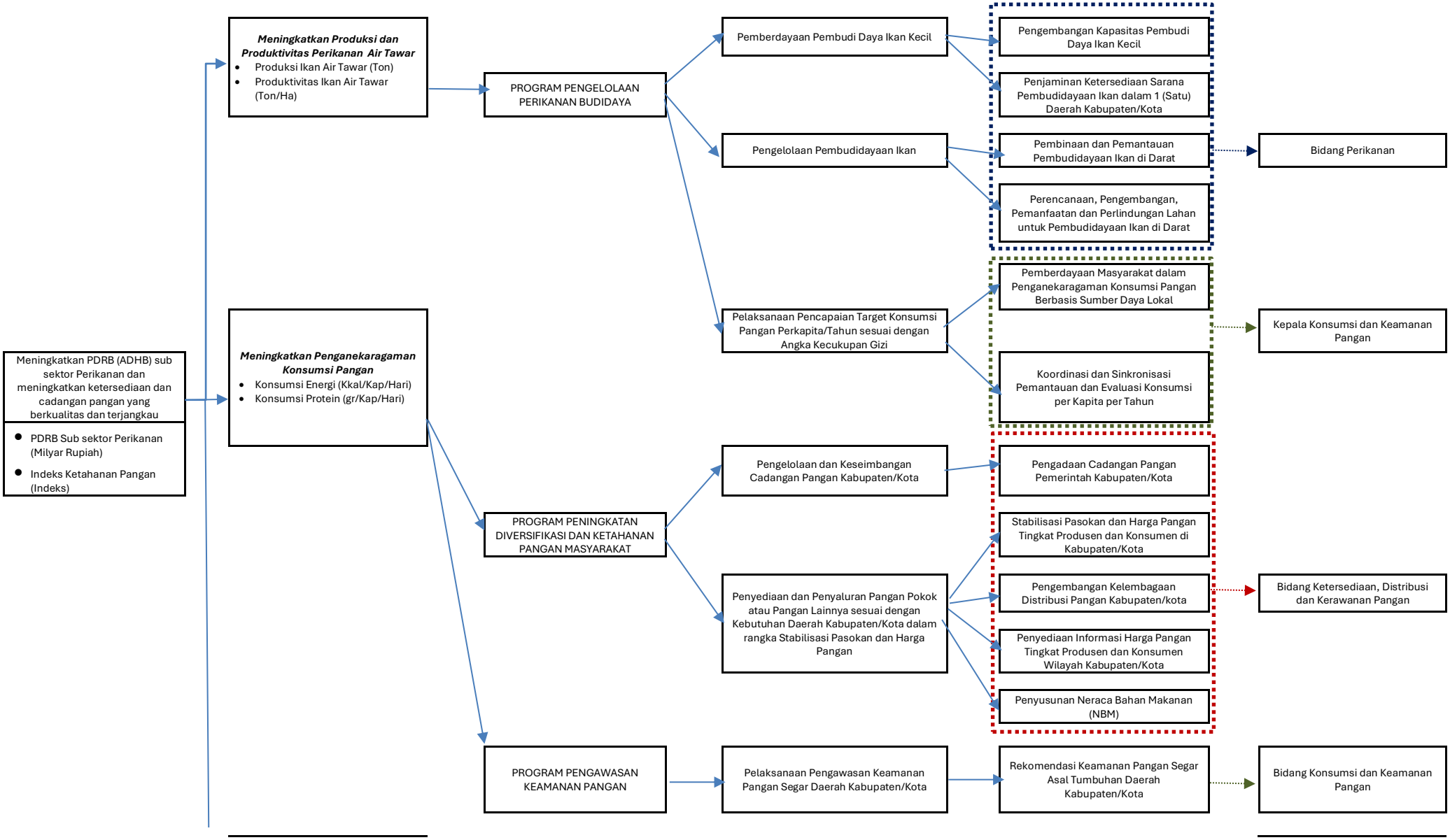

...Lanjutan

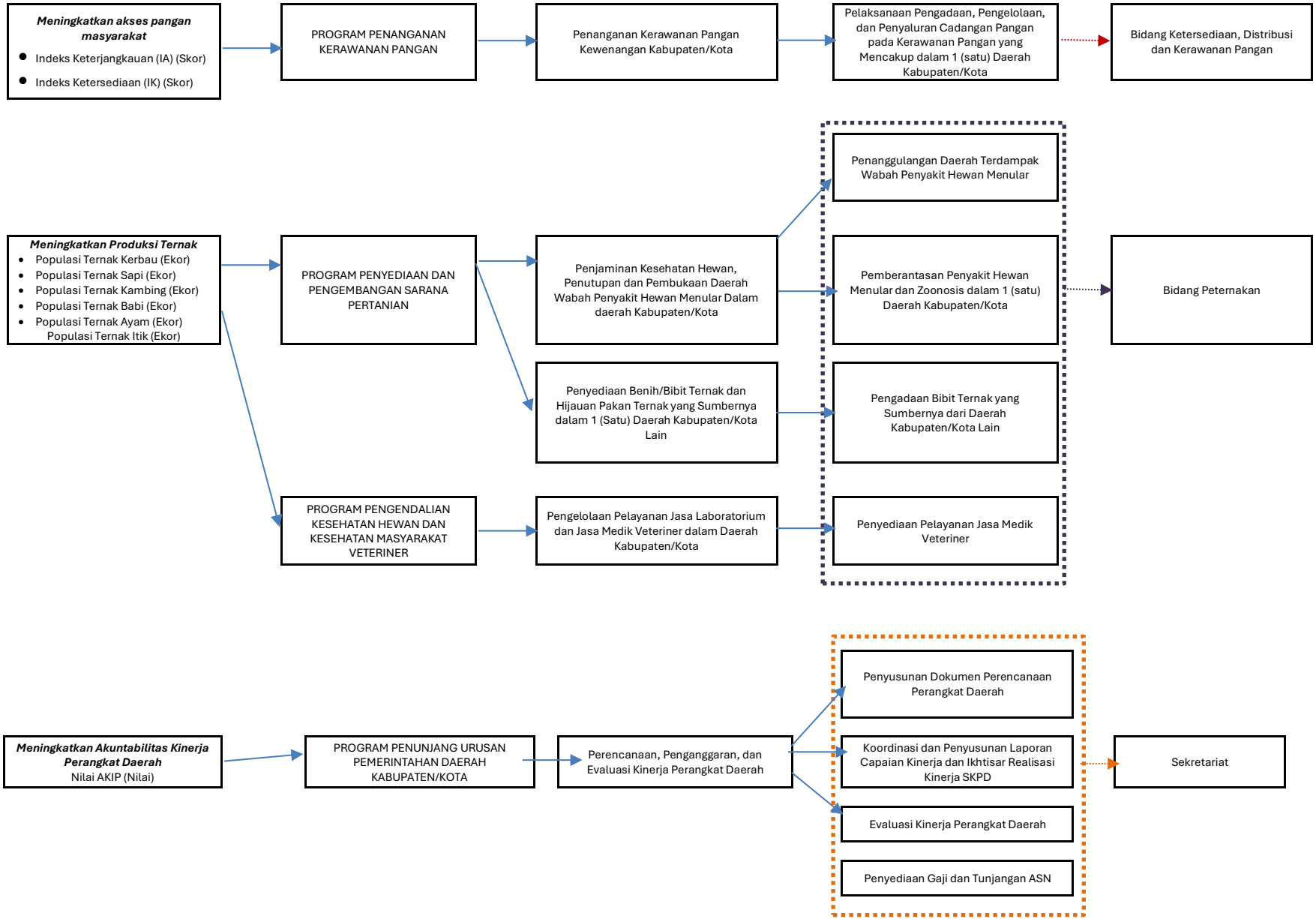
Meningkatkan akses pangan masyarakat
Indeks Keterjangkauan (IA) (Skor)
Indeks Ketersediaan (IK) (Skor)
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan
Meningkatkan Produksi Ternak
Populasi Ternak Kerbau (Ekor)
Populasi Ternak Sapi (Ekor)
Populasi Ternak Kambing (Ekor)
Populasi Ternak Babi (Ekor)
Populasi Ternak Ayam (Ekor)
Populasi Ternak Itik (Ekor)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Bidang Peternakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Nilai AKIP (Nilai)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sekretariat

...Lanjutan

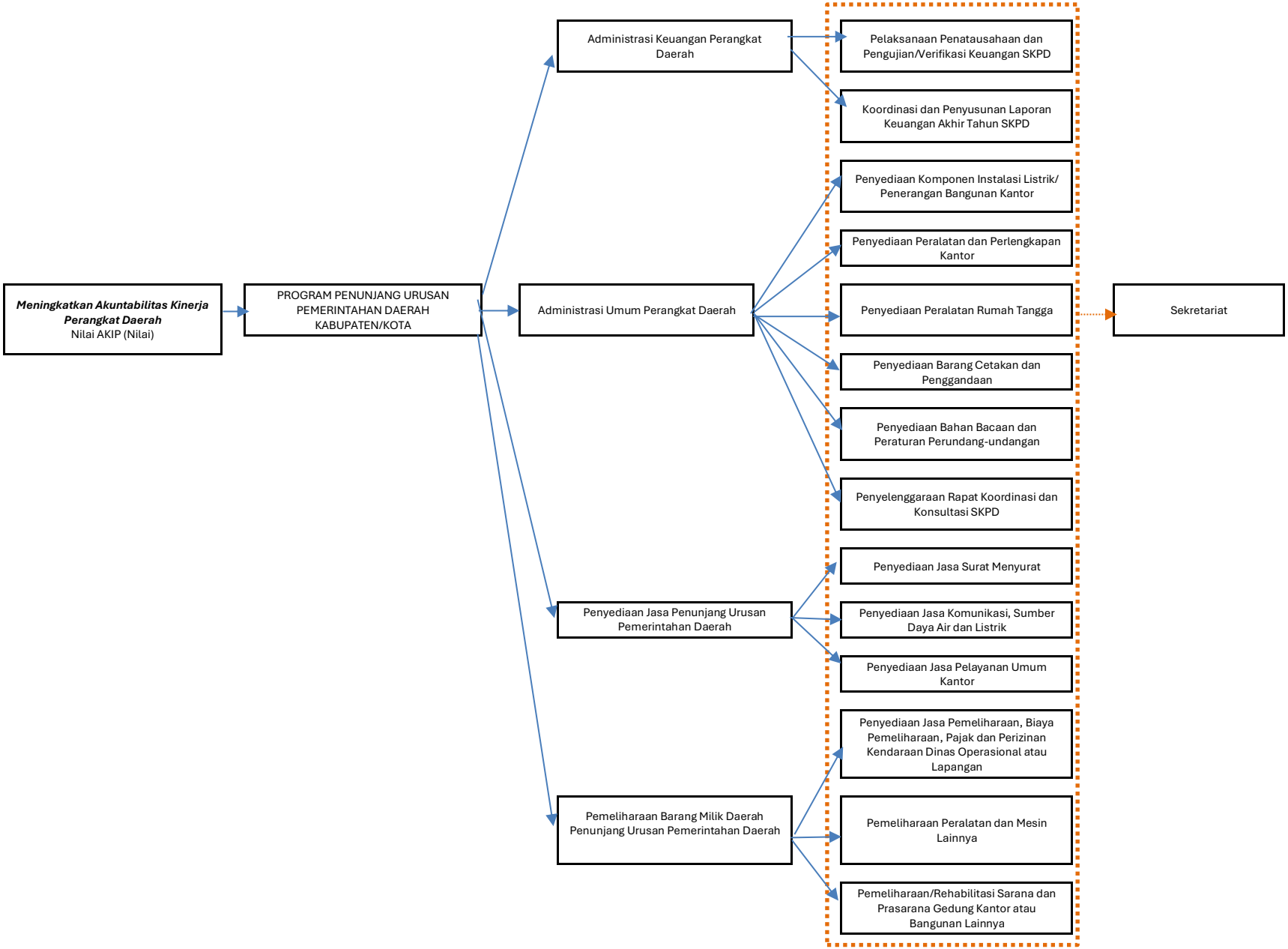
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Nilai AKIP (Nilai)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sekretariat

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun 2025.

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Ramah Br. Saragih, SKM
Pembina (IV/a)
NIP 197506161999032007

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat-Nya semata, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dan Penetapan Nomenklatur Perencanaan Program dan Kegiatan telah mengadopsi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini mengacu pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dapat mendukung keberhasilan RKPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya yang memuat informasi tentang rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif di Kabupaten Tapanuli Utara.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Tarutung, Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA

JONNER JULIFER, ST. M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19700718 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2024 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2024 dan Capaian Renstra 9

2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 17

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 29

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 29

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 29

3.3 Program dan Kegiatan 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 37

BAB V PENUTUP 41

Lampiran 42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 11

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP 16

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 23

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 28

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025..... 30

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 34

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang memegang peranan sangat penting bagi terlaksananya suatu kegiatan pembangunan yang baik. Perencanaan harus dijadikan suatu pedoman dan landasan bagi suatu kegiatan pembangunan, dan harus dilaksanakan secara baik dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi dan evaluasi terhadap kinerja dimasa yang lalu. Disamping itu perencanaan yang baik juga harus disesuaikan dengan visi dan misi dari pembangunan itu sendiri.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 maka seluruh perencanaan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara harus berpedoman kepada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada dokumen tersebut, sehingga tercipta suatu arah pembangunan daerah yang baik dan bersinergis. Selain itu, pengaruh isu-isu global yang sedang terjadi juga sangat berpengaruh bagi perencanaan yang akan dibuat, sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi perkembangan global yang terjadi di suatu daerah.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam waktu kurun satu tahun. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak *(stakeholder)* yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan.

Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up).* Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni:

(1) penyusunan rencana;

(2) penetapan rencana;

(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa telah dijelaskan bahwa Renja Perubahan Perubahan OPD merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) OPD, sehingga penyusunan Renja Perubahan Perubahan OPD berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada Rencana Kerja Perubahan Perubahan Pemerintah Daerah (RKPPD), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan RKPPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja Perubahan-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah). Kepala Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan, sasaran, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menyusun

Renja Perubahan Tahun 2025 yang merupakan dokumen rencana pembangunan PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dapat mendukung keberhasilan RKPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Perubahan OPD Tahun 2025 :

1) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

14) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

27) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
28) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
29) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
30) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025;
31) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
32) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037;
33) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024
34) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
35) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
36) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli

Utara Tahun 2025 – 2026, yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun Tujuan disusunnya Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah:

1. Menjabarkan arahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 kedalam Rencana Kerja Perubahan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi, dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. **PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada SPBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perubahan PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan PD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**, yang berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), tantangan dan peluang serta formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. **Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD,** yang merupakan peninjauan kembali terhadap rancangan Rencana Kerja Perubahan awal dengan perbandingan dengan Rencana Kerja Perubahan yang dilaksanakan.

2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** yang menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para stake holder, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. **Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan PD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 **Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. PENUTUP, yang menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara

Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabillitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan dapat dilihat sebagai berikut:

2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan Indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2. Capaian Analisis Kinerja

Secara umum rata-rata capaian kinerja yang telah dicapai tahun anggaran 2024 adalah sebesar 94,30%, dan diharapkan pada tahun 2025 ini capaian kinerja tersebut akan mencapai 100% disetiap Program dan Kegiatan. Oleh karena itu secara umum dapat dikatakan capaian kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan pada Renstra PD yang telah direncanakan.

Adapun Sub Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal karena mengalami refocusing anggaran. Kegiatan yang bersumber dari dana DAK yang terfokus pada Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya, Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha, dan Pengawasan Penanaman Modal belum terlaksana maksimal dengan capaian kinerja 86%. Berdasarkan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024, beberapa rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya telah sesuai dengan kebutuhan, namun ada yang mengalami perubahan. Diantaranya ada kegiatan yang memiliki tingkat realisasi anggaran terendah yaitu Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, hal ini dikarenakan konsultasi dan pengaduan masyrakat yang masuk sangat rendah, hanya 1 pengaduan masyarakat yang masuk dan telah ditindaklanjuti, dari target 10 pengaduan yang ditindaklanjuti.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA PERUBAHAN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2. 18.	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2. 18. 01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
1. 03. 01. 2. 01.	**Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	*Terlaksananya Penyusunan dokumen LAKIP Tahun Sebelumnya*	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	100%	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	100%
11 18. 01. 2. 01. 01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat*	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2. 18. 01. 2. 01. 06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	100%	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	100%
2. 18. 01. 2. 01. 07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2. 18 01. 2. 02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD serta Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya*	*Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan*	*Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan*	*Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan*	*Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan*	100%	*Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan*	*Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan*	100%
2. 18. 01. 2. 02. 01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	25 Orang/ Bulan	14 Bulan	28 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	100%	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	100%
2. 18. 01. 2. 02. 03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	50 Dokumen	12 Bulan	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	50 Dokumen	100%
2. 18. 01. 2. 02. 05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Dokumen Lap. Keuangan	1 Dokumen Lap. Keuangan	1 Dokumen Lap. Keuangan	1 Dokumen Lap. Keuangan	100%	1 Dokumen Lap. Keuangan	1 Dokumen Lap. Keuangan	100%
2. 18. 01. 2. 02. 07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD*	14 Laporan	-	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.	**18.**	**01.**	**2. 06.**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	*Tersedianya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	100%	*12 Bulan*	*12 Bulan*	100%
2.	18.	01.	2. 06.	01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*	12 Paket	12 Bulan	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
2.	18.	01.	2. 06.	02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2.	18.	01.	2. 06.	03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga disediakan*	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2.	18.	01.	2. 06.	05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan disediakan*	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2.	18.	01.	2. 06.	08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Laporan	12 Bulan	Laporan	Laporan	100%	-	-	0%
2.	18.	01.	2. 06.	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.	**18.**	**01.**	**2. 08.**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	100%	*12 Bulan*	*12 Bulan*	100%
2.	18.	01.	2. 08.	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	18.	01.	2. 08.	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	36 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.	18.	01.	2. 08.	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.	**18.**	**01.**	**2. 09.**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	100%	*12 Bulan*	*12 Bulan*	100%
2.	18.	01.	2. 09.	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya*	5 Unit	12 Bulan	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
2.	18.	01.	2. 09.	06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara*	*8 Unit*	12 Bulan	*3 Unit*	*3 Unit*	100%	*3 Unit*	*3 Unit*	100%
2.	18.	01.	2. 09.	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara*	1 Unit	12 Bulan	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
2.	18.	01.	2. 09.	11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diperlihara*	6 Unit	12 Bulan	10 Unit	10 Unit	100%	-	-	-
2.	**18**	**02.**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Peningkatan Jumlah Investor**	**45 Investor**	**42 Investor**	**40 Investor**	**42 Investor**	**105%**	**45 Investor**	**50 Investor**	**111%**
2.	**18.**	**02.**	**2. 01.**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*	*10 Investor*	*5 Kali*	*5 Kali*	*5 Kali*	-	*5 Kali*	*5 Kali*	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2. 18. 02. 2. 01. 01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perda dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal*	10 Investor	5 Kali	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2. 18. 02. 2. 01. 2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha dari yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah*	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 18. 02. 2. 02.	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	*Tersedianya dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	-	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	-
2. 18. 02. 2. 02. 01.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perda rencana umum penanaman modal daerah Tapanuli Utara*	1 Dokumen Perda	1 Dokumen Perda	-	-	-	-	-	-
2. 18. 02. 2. 02. 02.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	*Jumlah peta potensi dan peluang usaha kabupaten tapanuli utara*	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2. 18. 03.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Keikutsertaan pada Pameran Investasi**	**6 Event**	**3 Event**	**6 Event**	**3 Event**	**60%**	**1 Event**	**0 Event**	**60%**
2. 18. 03. 2. 01.	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	*Tersusunnya Dokumen Strategi Promosi serta keikutsertaan pada kegiatan promosi penanaman modal*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-
2. 18. 03. 2. 01. 01.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	*Jumlah dokumen strategis promosi penanaman modal*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
2. 18. 03. 2. 01. 02.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal*	6 Event	3 Event	6 Event	4 Event	67%	1 Event	0 Event	0%
2. 18. 04.	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu**	**91 Persen**	**93,40 Persen**	**91 Persen**	**90.54 Persen**	**99%**	**92 Persen**	**90.35 Persen**	**98.2%**
2. 18. 04. 2. 01.	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	*Tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah*	*650 Dokumen dan 15 pengaduan*	*650 Dokumen dan 15 pengaduan*	*650 Dokumen dan 15 pengaduan*	*1148 Dokumen dan 15 pengaduan*	177%	*650 Dokumen dan 10 pengaduan*	*1140 Dokumen dan 1 pengaduan*	175%
2. 18. 04. 2. 01. 01.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*	*650 Pelaku usaha*	940 Dokumen	650 Dokumen	1148 Dokumen	177%	650 Dokumen	1140 Dokumen	175%
2. 18. 04. 2. 01. 02.	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	*jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal*	*20 Kegiatan Usaha*	-	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	100%	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.	18.	04.	2. 01.	03.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	*jumlah Orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan*	*10 Orang*	1 Pengaduan	10 Pengaduan	1 Pengaduan	10%	10 Pengaduan	1 Pengaduan	10%
2.	18.	04.	2. 01.	04.	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	*jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah*	*10 Kegiatan Usaha*	-	-	-	-	-	-	-
2.	**18**	**05.**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Izin yang Dikendalikan**	**75 Persen**	**70 Persen**	**70 Persen**	**70 Persen**	**100%**	**70 Persen**	**70 Persen**	**100%**
2.	**18.**	**05.**	**2. 01.**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	*Tersedianya profil hasil pemantauan dan pengawasan, terlaksananya monitoring kepemilikan izin dan bimtek/ sosialisasi kemudahan berusaha serta validasi faktual dan berita acara pengawasan terhadap pelaku usaha*	*350 pelaku usaha, 70 pemilik bangunan dan 80 BAP*	*223 pelaku usaha, 59 Kegiatan Usaha*	*350 pelaku usaha, 35 Kegiatan Usaha*	*223 pelaku usaha, 59 Kegiatan Usaha*	-	*223 pelaku usaha, 59 Kegiatan Usaha*	*223 pelaku usaha, 59 Kegiatan Usaha*	-
2.	18.	05.	2. 01.	01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	*jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pelaksanaan penanaman modal*	40 Kegiatan Usaha	-	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	100.0%	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	100.0%
2.	18.	05.	2. 01.	01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	*Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal*	350 pelaku usaha	223 pelaku usaha	350 pelaku usaha	350 pelaku usaha	100.0%	240 pelaku usaha	227 pelaku usaha	94.6%
2.	18.	05.	2. 01.	01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	*jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan, pelaksanaan penanaman modal*	40 kegiatan usaha	59 Kegiatan Usaha	40 kegiatan usaha	58 Kegiatan Usaha	145.0%	250 Kegiatan Usaha	355 Kegiatan Usaha	142.0%
2.	**18.**	**06.**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Data dan Informasi yang Dikendalikan**	**80 Persen**	**78 Persen**	**78 Persen**	**78 Persen**	**100%**	**78 Persen**	**78 Persen**	**100%**
2.	**18.**	**06.**	**2. 01.**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Terlaksananya pemeliharaan ISO, survey IKM dan LKPM*	*1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM*	*1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM*	*1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM*	*1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM*	100%	*1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM*	*1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM*	100%
2.	18.	06.	2. 01.	01.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan*	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	100%	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang berhubungan dengan penanaman modal dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan terpadu maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bekerja sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan adanya pedoman pada SOP tersebut, maka pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus dijalankan dengan baik.

Pada tahun 2016 sampai tahun 2024, Dinas penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Utara telah meraih Sertifikat ISO 9001:2015 sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal peningkatan pelayanan publik, dan pemeliharaan dan perbaikan sesuai dengan standar mutu ISO tersebut, maka perbaikan sistem pelayanan harus dilakukan setiap waktu sehingga diperoleh tingkat pelayanan yang prima. Sehingga dalam penilaian kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang rutin dilaksanakan oleh Ombudsman, pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dikategorikan Baik dan berada pada Zona Hijau. Hal ini dapat terlihat dari jumlah izin yang diterbitkan pada tahun 2024 sebanyak 1.140 izin dengan persentase izin yang terbit tepat waktu adalah 90,35%. Untuk itu diharapkan di tahun 2025 untuk menaikkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu diharapkan persentase izin yang terbit tepat waktu dapat mencapai 92%, terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Investasi	Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021		100%	100%	100%	100%	586.8%	82,34%	100%	100%	
2	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu	Perbup Nomor 61 Tahun 2020, dan Standar Pelayanan Nomor 20 Tahun 2021		91%	92%	91,50%	92%	90.59%	90.35%	92%	92%	
4	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021	Persentase Peningkatan investasi di kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Cakupan Pelayanan Perizinan yang ditindaklanjuti	Perbup Nomor 61 Tahun 2020, dan Standar Pelayanan Nomor 20 Tahun 2021	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	87,81%	87,81%	100%	100%	
7	Persentase Temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020	Temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Nilai hasil evaluasi AKIP	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Nilai AKIP yang diberikan Inspektorat Daerah	100%	100%	100%	100%	88,9%	93,68%	100%	100%	

note : semua target (semua kolom) diisi dgn persentase (%) karena bersifat Outcome

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara memiliki tugas dan fungsi antar lain:

1. Penyelenggaraan penyusunan program Dinas;
2. Penyelenggaraan promosi, perencanaan, kerjasama dan pengembangan penanaman modal;
3. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
4. Penyelenggaraan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
5. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
6. Penyelenggaraan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
7. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Utara difokuskan pada peningkatan nilai investasi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan, promosi, dan penanganan pengaduan.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini adalah **Rendahnya Nilai Investasi,** yang disebabkan oleh:

1. Belum optimalnya jumlah realisasi penanaman modal;
2. Belum optimalnya informasi dan strategi promosi pengembangan potensi daerah yang berbasis IT di bidang penanaman modal;
3. Kurangnya regulasi dibidang penanaman modal,
   a. Belum adanya regulasi yang mengatur pemberian fasilitasi/insentif kepada para pelaku usaha.
   b. Belum adanya regulasi tentang Strategi Promosi
4. Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha, yang disebabkan oleh:

a. Minimnya sarana dan prasarana;
b. Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia;
c. Kurangnya koordinasi antar instansi teknis.

2.3.2 Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan di masa transisi, memuat terkait isu strategis di Kabupaten Tapanuli Utara yang akan diselesaikan. Isu strategis ini telah diselaraskan dengan Isu Strategis Global, Nasional, Isu Strategis Lingkungan yang menjadi fokus pemerintah.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional 2025 – 2045 terdapat 5 isu strategis yang menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan visinya, yaitu:

1) Pendapatan per kapita setara negara maju;
2) Kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang;
3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5) Intensitas emisi GRK menuju *net zero emission.*

Beberapa kondisi atau isu global telah diidentifikasi sebagai faktor yang berpotensi mempengaruhi implementasi kebijakan Pembangunan di Tingkat daerah, meliputi:

1. **Perubahan Iklim**; Peningkatan suhu global, cuaca ekstrim, dan kerusakan lingkungan yang terjadi berpotensi memiliki dampak krusial pada kehidupan Masyarakat. Meningkatnya emisi CO_2 menjadi isu utama yang menjadi perhatian dunia global saat ini.
2. **Artificial Intelligence (AI)**; keamanan siber Inovasi teknologi yang berkembang pesat tidak memiliki dampak positif saja, namun juga memiliki dampak negatif. Kehadiran AI berpotensi untuk menggantikan kemampuan manusia saat ini. Selain itu keberadaan hacker mengancam keamanan nasional dan kestabilan ekonomi global
3. **Kemiskinan dan Ketidaksetaraan Gender**; Ketidaksetaraan ekonomi, akses terhadap Pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan serta

ketidaksetaraan gender masih menjadi perhatian global. Beberapa negara masih mengalami masalah kemiskinan, serta masih banyak negara yang melakukan diskriminasi terhadap gender.

4. **Ketegangan Geopolitik**; Ketegangan antara negara – negara besar, seperti AS-China dan Isu-isu, seperti penyebaran senjata nuklir dan konflik regional mempengaruhi stabilitas geopolitik global.

Mengacu pada RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026, ditetapkan 4 isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Uraian Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut;

1. Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Optimalisasi Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
3. Optimalisasi Infrastruktur yang Berkelanjutan dalam Penguatan Konektivitas dan Daya Saing Produktivitas Wilayah
4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif

Berdasarkan hasil analisis kondisi daerah maka isu strategis Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. **Peningkatan Pendapatan Masyarakat**; kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana anggota masyarakat memperoleh akses dan kebutuhan dasar yang memadai untuk hidup yang layak, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rumah, dan keamanan. Dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui program sosial dan pemberdayaan masyarakat.
2. **Kualitas Infrastruktur Daerah yang Tangguh dan berkelanjutan**; Pembangunan infrastruktur yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari aspek sosial maupun ekonomi, misalnya peningkatan struktur untuk jalan yang telah dibangun. Pembangunan jalan pada beberapa wilayah agar lebih memadai akan meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga masyarakat pada wilayah tersebut memperoleh kemudahan akan akses pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan lainnya.

3. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**; Sumber daya manusia merupakan aset berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Peran SDM penting dalam menggerakkan berbagai aktivitas dan menciptakan nilai tambah. Keberadaan SDM yang berkualitas akan mendorong percepatan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah.
4. **Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel**; Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) harus diterapkan agar daerah semakin berkembang. Penerapan prinsip-prinsip, meliputi 1) transparansi; 2) Akuntabilitas; 3) Partisipasi Publik; 4) Keadilan; 5) Efisiensi dan Efektivitas. akan menghasilkan kepercayaan publik, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Selain isu strategis daerah, Kabupaten Tapanuli Utara juga menetapkan isu strategis tematik yaitu terkait dengan:

1. Penurunan Angka Stunting
2. Penurunan Angka Kemiskinan

Sementara itu, permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan penanaman modal di Kabupaten Tapanuli Utara adalah belum adanya Peraturan Daerah terkait kebijakan Pemberian Fasilitasi/Insentif kepada Pelaku usaha dan investor, minimnya promosi investasi dan pengembangan kerjasama serta potensi dan peluang pengembangan investasi belum dikemas dengan menarik dan belum diinformasikan secara luas kepada calon investor.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan yaitu, **Meningkatnya Nilai Investasi**. Dengan sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan Nilai Investasi
2. Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Perizinan

Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal memperhatikan kondisi alam dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara tanpa mengurangi fasilitas kepada investor dalam rangka pemberian kemudahan dalam investasi dan pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu.

Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha didalam pengurusan izin. Berbagai kemudahan telah diberikan, yang diharapkan dapat menstimulasi animo masyarakat didalam mengurus izin yang dibutuhkannya.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan antara lain: keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan baik untuk peningkatan Kapasitas SDM, monitoring, maupun peninjauan lapangan. Hal ini menyebabkan pelayanan yang dilaksanakan tidak akan dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan di tahun-tahun yang akan datang. Disamping itu, perlu juga dilihat peluang dan potensi yang harus dikembangkan dan diraih untuk meningkatkan pelayanan terpadu yang nantinya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dilihat perkembangan dunia usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, terlihat jelas bahwa potensi untuk mengembangkan perizinan masih sangat mungkin untuk dilaksanakan. Hal inilah yang perlu dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.3.4 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Sebagai garda depan investasi di Kabupaten Tapanuli Utara yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan utnuk meningkatkan nilai investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan nilai investasi, serta pertumbuhan dan pengembangan potensi unggulan daerah, beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Penyusunan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
2. Penyusunan Strategi dan Peningkatan Promosi penananam modal yang lebih inovatif.
3. Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan.
4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai.
5. Peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat
6. Pemuktahiran data potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten Tapanuli Utara
7. Peningkatan kualitas Pengawasan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalah pelaku usaha/investor
8. Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada para pelaku usaha/investor agar taat dalam pelaporan LKPM

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Apabila kita membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terdapat kesamaan dan perbedaan. Adapun kesamaan tersebut terjadi karena adanya identifikasi permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan untuk dapat segera dilaksanakan. Perbandingan ini sangat perlu dilakukan untuk dapat melihat apakah rancangan awal OPD yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan riil. Adapun perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya kebutuhan akan suatu kegiatan yang tidak diakomodir pada rancangan awal RKPD. Perbedaan yang terjadi ini tidaklah mengurangi esensi atau pun bertentangan dengan Rancangan awal RKPD, hanya saja untuk menyikapi kekurangan-kekurangan didalam penyusunan sebelumnya serta sebagai jawaban atas antisipasi isu-isu strategis yang berkembang secara dinamis, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**DPMPTSP**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	100 Persen	**3,316,476,384.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**DPMPTSP**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	100 Persen	**2,904,920,107.00**	
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**DPMPTSP**	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	20 Dokumen	**52,000,000.00**	**Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**DPMPTSP**	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	20 Dokumen	**33,719,990.00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat*	6 Dokumen	15,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat*	6 Dokumen	10,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	2 Laporan	7,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	2 Laporan	4,999,990.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 Laporan	30,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah*	12 Laporan	18,720,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**DPMPTSP**	***Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran dan Tahunan SKPD***	***65 Dokumen***	**2,447,065,268.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**DPMPTSP**	***Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran dan Tahunan SKPD***	***65 Dokumen***	**2,410,162,602.00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN*	25 Orang/ Bulan	2,380,015,268.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN*	25 Orang/ Bulan	2,348,899,402.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	50 Dokumen	53,050,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	50 Dokumen	52,263,200.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir*	1 dokumen Laporan Keuangan	7,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir*	1 dokumen Laporan Keuangan	5,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	14 Laporan	7,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	14 Laporan	4,000,000.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**DPMPTSP**	***Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**12 bulan**	**3,000,000.00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**DPMPTSP**	***Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**12 bulan**	-	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	3 Laporan	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*		-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**DPMPTSP**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**28,000,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**DPMPTSP**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**-**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMPTSP	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Dokumen	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMPTSP	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*		-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMPTSP	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	4 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMPTSP	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*		-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**DPMPTSP**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	**6 Dokumen**	**355,000,000.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**DPMPTSP**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	**6 Dokumen**	**231,963,715.00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*	12 Paket	10,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*	12 Paket	4,999,700.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	12 Paket	65,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	12 Paket	28,499,215.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga disediakan*	12 Paket	20,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga disediakan*	12 Paket	7,498,800.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan disediakan*	12 Paket	25,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan disediakan*	12 Paket	13,000,000.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	10 Laporan	5,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	10 Laporan	3,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	50 Laporan	230,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	174,966,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**DPMPTSP**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**9 Unit**	**140,000,000.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**DPMPTSP**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**-**	**-**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan*	2 Unit	60,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan*	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan*	7 Unit	80,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan*	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**DPMPTSP**	**Jumlah Kegiatan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	**176,411,116.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPMPTSP**	**Jumlah Kegiatan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	**98,545,100.00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	2,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	2,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	36 Laporan	65,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	36 Laporan	41,940,300.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*	12 Laporan	109,411,116.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*	12 Laporan	54,604,800.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**DPMPTSP**	***Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara***	**15 Unit**	**146,000,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPMPTSP**	***Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara***	**15 Unit**	**130,528,700.00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya*	5 Unit	85,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya*	5 Unit	94,995,200.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara*	3 Unit	11,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara*	*8 Unit*	11,882,800.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara*	1 Unit	40,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara*	1 Unit	19,210,700.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipertihara*	6 Unit	10,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipertihara*	6 Unit	4,440,000.00	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**Peningkatan Jumlah Investor**	45 Investor	**100,000,000.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**Peningkatan Jumlah Investor**	50 Investor	**50,000,010.00**	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**DPMPTSP**	**Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**	1 Dokumen	**45,000,000.00**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**DPMPTSP**	**Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**	1 Dokumen	**14,999,900.00**	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	*Jumlah Perda dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal*	-	-	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	*Jumlah Perda dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal*	-	-	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	*Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah*	1 Dokumen	45,000,000.00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	*Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah*	1 Dokumen	14,999,900.00	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**DPMPTSP**	**Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Utara**	2 Dokumen	**55,000,000.00**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**DPMPTSP**	**Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Utara**	2 Dokumen	**35,000,110.00**	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	*Jumlah Perda rencana umum penanaman modal daerah Tapanuli Utara*	-	-	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	*Jumlah Perda rencana umum penanaman modal daerah Tapanuli Utara*	-	-	
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	DPMPTSP	*Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi*	1 Daerah	30,000,000.00	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	DPMPTSP	*Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi*	1 Daerah	10,000,000.00	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota*	1 Dokumen	25,000,000.00	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota*	1 Dokumen	25,000,110.00	
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**Keikutsertaan pada Pameran Investasi**	**6 Event**	**225,000,000.00**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**Keikutsertaan pada Pameran Investasi**	**3 Event**	**54,311,800.00**	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**DPMPTSP**	***Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang diikuti***	*2 Dok*	**225,000,000.00**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**DPMPTSP**	***Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang diikuti***	*2 Dok*	**54,311,800.00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota*	3 Dok	140,000,000.00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota*	1 Dok	39,991,600.00	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	*Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota*	1 Dok	85,000,000.00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	*Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota*	1 Dok	14,320,200.00	
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu**	91,50 Persen	**129,000,000.00**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu**	91,50 Persen	**97,999,750.00**	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**DPMPTSP**	**Tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah**	*12 Bulan*	**129,000,000.00**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**DPMPTSP**	**Tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah**	*12 Bulan*	**97,999,750.00**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP	*Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	*1 Dokumen*	5,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP	*Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	-	-	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	*650 Pelaku Usaha*	100,000,000.00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	*650 Pelaku Usaha*	72,999,850.00	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	*6 Pelaku Usaha*	9,000,000.00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	*6 Pelaku Usaha*	4,999,900.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	DPMPTSP	*jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah*	*10 Kegiatan Usaha*	-	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	DPMPTSP	*jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah*	*10 Kegiatan Usaha*	-	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha*	*20 Kegiatan Usaha*	15,000,000.00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha*	*20 Kegiatan Usaha*	20,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**Persentase Izin yang Dikendalikan**	*75 Persen*	**400,000,000.00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**Persentase Izin yang Dikendalikan**	*75 Persen*	**54,999,000.00**	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**DPMPPTSP**	**jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal**	**350 pelaku usaha, 29 Kegiatan Usaha**	**400,000,000.00**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**DPMPPTSP**	**jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal**	**40 Kegiatan Usaha**	**54,999,000.00**	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*	40 Kegiatan Usaha	50,000,000.00	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*	40 Kegiatan Usaha	15,000,000.00	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*	350 pelaku usaha	300,000,000.00	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*	-	-	
	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan*	40 kegiatan usaha	50,000,000.00	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan*	40 kegiatan usaha	39,999,000.00	
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**Persentase Data dan Informasi yang Dimutakhirkan**	**80 Persen**	**85,000,000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP**	**Persentase Data dan Informasi yang Dimutakhirkan**	**80 Persen**	**14,999,900.00**	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**DPMPTSP**	**Terlaksananya pemeliharaan ISO, dan tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan**	**2 Dok**	**85,000,000.00**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**DPMPTSP**	**Terlaksananya pemeliharaan ISO, dan tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan**	**2 Dok**	**14,999,900.00**	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	*Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan*	1 Dok	85,000,000.00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	*Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan*	2 Dok	14,999,900.00	
	TOTAL PAGU				**4,255,476,384.00**	**TOTAL PAGU**				**3,177,230,567.00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang datangnya dari masyarakat baik itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun stakeholder yang lain hingga saat ini belum terakomodir. Hal ini disebabkan ketersediaan dana saat ini sangat minim.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 2025
Kabupaten Tapanuli Utara

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP Kab. Tapanuli Utara	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*	31.900.000,00	DAU
2	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Tapanuli Utara	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan*	46.374.600,00	DAU

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana progam sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai.

Berdasarkan pengertian diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengembangan investasi
2. Meningkatkan kualitas Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada para pelaku usaha/investor agar taat dalam pelaporan LKPM
4. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas SDM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Penerapan Standar Pelayanan yang mudah, murah, pasti, transparan, dan terjangkau;

Kebijakan tersebut diatas akan diimplementasikan dalam bentuk surat – surat keputusan dan akan dijadikan pedoman:

1. Mengatur mekanisme kegiatan lanjutan.
2. Mengarahkan setiap pejabat dan pelaksana bahwa mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan PD

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan yaitu, **Meningkatnya Nilai Investasi.** Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara struktur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Nilai Investasi
2. Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Perizinan.
3. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Laporan Evaluasi Program Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024, Nilai realisasi investasi tahun 2024 adalah 354,07 Miliar Rupiah, realisasi nilai investasi tahun 2024 belum mencapai target Nilai Investasi tahun 2024 sebesar 430 Miliar, dengan capaian 82,34%. Pada Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 kami menetapkan target kinerja sebagai berikut;

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2023	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatkan Nilai Investasi	Nilai Investasi	450.000.000.000	450.000.000.000
		Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Perizinan	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu	91,50	91,50
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	87,70	87,70
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	80	80

3.3. Program dan Kegiatan

1. Program Kerja

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Pemerintah pada Dinas Penamanan Modal dan PTSP guna mencapai tujuan dan sasaran. Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara:

- Memperhatikan program kerja Kabupaten Tapanuli Utara
- Mempertimbangkan keadaan masa lampau, kini dan masa datang.
- Memperhatikan skala prioritas yang menunjang Visi dan Misi.
- Memperhatikan kepentingan masing-masing Sekretariat dan Kepala-kepala Bidang

Program kerja yang dimaksud adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
3. Program Promosi Penanaman Modal.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan dan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

2. Kegiatan

Rumusan Rencana Program Kerja dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 terlampir dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sesuai dengan program kerja adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
   - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
   - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
   - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR
   - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/kota.

3. Program Promosi Penanaman Modal

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah/Kota.
   - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota.
   - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal.

a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
   - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

- Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

5. Program Pengendalian Pelaksanaan dan Penanaman Modal.
   a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
      - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.
      - Pengawasan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
   a. Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
      - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020)	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
Urusan	Bidang Urusan	program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
2.	18.				**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2.	**18.**	**01.**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPMPTSP**	**DPMPTSP**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2,904,920,107.00**	**2,763,499,558.00**			**100 Persen**	**2,549,001,920.00**
1.	**03.**	**01.**	**2. 01.**		**Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	DPMPTSP	DPMPTSP	20 Dokumen	20 Dokumen	**33,719,990.00**	**34,960,040.00**			20 Dokumen	**12,000,000.00**
2.	18.	01.	2. 01.	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	DPMPTSP	DPMPTSP	6 Dokumen	6 Dokumen	10,000,000.00	12,995,910.00	DAU	-	6 Dokumen	2,000,000.00
2.	18.	01.	2. 01.	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	DPMPTSP	2 Laporan	2 Laporan	4,999,990.00	3,244,130.00	DAU	-	2 Laporan	2,000,000.00
2.	18.	01.	2. 01.	000	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	DPMPTSP	DPMPTSP	12 Laporan	12 Laporan	18,720,000.00	18,720,000.00	DAU	-	12 Laporan	8,000,000.00
2.	**18.**	**01.**	**2. 02.**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran dan Tahunan SKPD*	DPMPTSP	DPMPTSP	*65 Dokumen*	*65 Dokumen*	**2,410,162,602.00**	**2,352,510,463.00**			*65 Dokumen*	**2,313,622,520.00**
2.	18.	01.	2. 02.	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	DPMPTSP	25 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan	2,348,899,402.00	2,293,174,788.00	DAU	-	25 Orang/ Bulan	2,267,942,520.00
2.	18.	01.	2. 02.	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	DPMPTSP	50 Dokumen	50 Dokumen	52,263,200.00	55,703,200.00	DAU	-	50 Dokumen	43,680,000.00
2.	18.	01.	2. 02.	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	DPMPTSP	1 dokumen Laporan Keuangan	1 dokumen Laporan Keuangan	5,000,000.00	2,033,525.00	DAU	-	1 dokumen Laporan Keuangan	2,000,000.00
2.	18.	01.	2. 02.	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMPTSP	DPMPTSP	14 Laporan	14 Laporan	4,000,000.00	1,598,950.00	DAU	-	14 Dokumen	-
2.	**18.**	**01.**	**2. 06.**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia*	DPMPTSP	DPMPTSP	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	**231,963,715.00**	**119,628,555.00**			*6 Dokumen*	**67,000,000.00**
2.	18.	01.	2. 06.	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	DPMPTSP	DPMPTSP	12 Paket	12 Paket	4,999,700.00	2,481,000.00	DAU	-	12 Paket	2,500,000.00
2.	18.	01.	2. 06.	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	DPMPTSP	DPMPTSP	12 Paket	12 Paket	28,499,215.00	12,992,555.00	DAU	-	12 Paket	13,500,000.00
2.	18.	01.	2. 06.	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	DPMPTSP	DPMPTSP	12 Paket	12 Paket	7,498,800.00	3,609,000.00	DAU	-	12 Paket	5,000,000.00
2.	18.	01.	2. 06.	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	DPMPTSP	DPMPTSP	12 Paket	12 Paket	13,000,000.00	13,000,000.00	DAU	-	12 Paket	6,000,000.00
2.	18.	01.	2. 06.	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	DPMPTSP	10 Laporan	10 Laporan	3,000,000.00	-	DAU	-	10 Laporan	-
2.	18.	01.	2. 06.	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	DPMPTSP	12 Laporan	12 Laporan	174,966,000.00	87,546,000.00	DAU	-	12 Laporan	40,000,000.00

2.	**18.**	**01.**	**2. 07.**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	DPMPTSP	DPMPTSP	*9 Unit*	*9 Unit*	-	-			-	-
2.	18.	01.	2. 07.	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DPMPTSP	DPMPTSP	-	-	-	-	DAU	-	-	-
2.	18.	01.	2. 07.	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	DPMPTSP	DPMPTSP	-	-	-	-	DAU	-	-	-
2.	18.	01.	2. 07.	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	DPMPTSP	DPMPTSP	-	-	-	-	DAU	-	-	-
2.	18.	01.	2. 07.	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	DPMPTSP	-	-	-	-	DAU	-	-	-
2.	**18.**	**01.**	**2. 08.**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Jumlah Kegiatan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan*	DPMPTSP	DPMPTSP	*3 Kegiatan*	*3 Kegiatan*	**98,545,100.00**	**97,345,100.00**			*3 Kegiatan*	**108,610,000.00**
2.	18.	01.	2. 08.	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	DPMPTSP	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000.00	800,000.00	DAU	-	1 Laporan	1,000,000.00
2.	18.	01.	2. 08.	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	DPMPTSP	36 Laporan	36 Laporan	41,940,300.00	41,940,300.00	DAU	-	36 Laporan	36,210,000.00
2.	18.	01.	2. 08.	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	DPMPTSP	DPMPTSP	12 Laporan	12 Laporan	54,604,800.00	54,604,800.00	DAU	-	12 Laporan	71,400,000.00
2.	**18.**	**01.**	**2. 09.**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara*	DPMPTSP	DPMPTSP	*22 Unit*	*22 Unit*	**130,528,700.00**	**159,055,400.00**			*22 Unit*	**47,769,400.00**
2.	18.	01.	2. 09.	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DPMPTSP	DPMPTSP	5 Unit	5 Unit	94,995,200.00	107,905,800.00	DAU	-	5 Unit	40,000,000.00
2.	18.	01.	2. 09.	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	DPMPTSP	DPMPTSP	*10 Unit*	*10 Unit*	11,882,800.00	13,430,000.00	DAU	-	*10 Unit*	6,000,000.00
2.	18.	01.	2. 09.	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	DPMPTSP	1 Unit	1 Unit	19,210,700.00	33,079,600.00	DAU	-	1 Unit	-
2.	18.	01.	2. 09.	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	DPMPTSP	6 Unit	6 Unit	4,440,000.00	4,640,000.00	DAU	-	6 Unit	1,769,400.00
2.	**18.**	**02.**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Peningkatan Jumlah Investor**	**DPMPTSP**	**DPMPTSP**	**50 Investor**	**50 Investor**	**50,000,010.00**	**25,639,105.00**			**55 Investor**	**70,000,000.00**
2.	**18.**	**02.**	**2. 01.**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	DPMPTSP	DPMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	**14,999,900.00**	**7,464,600.00**			1 Dokumen	**50,000,000.00**
2.	18.	02.	2. 01.	000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	DPMPTSP	-	-	-	-	DAU	-	1 Perda	40,000,000.00
2.	18.	02.	2. 01.	000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	DPMPTSP	DPMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	14,999,900.00	7,464,600.00	DAU	-	1 Dokumen	10,000,000.00
2.	**18.**	**02.**	**2. 02.**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Utara*	DPMPPTSP	DPMPPTSP	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	**35,000,110.00**	**18,174,505.00**			*2 Dokumen*	**20,000,000.00**
2.	18.	02.	2. 02.	000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	DPMPTSP	-	-	-	-	DAU	-	-	-
2.	18.	02.	2. 02.	000	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	DPMPTSP	DPMPTSP	1 Daerah	1 Daerah	10,000,000.00	6,134,850.00	DAU		1 Daerah	10,000,000.00
2.	18.	02.	2. 02.	000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	DPMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,110.00	12,039,655.00	DAU	-	1 Dokumen	10,000,000.00
2.	**18.**	**03.**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Keikutsertaan pada Pameran Investasi**	**DPMPTSP**	**DPMPTSP**	**3 Event**	**3 Event**	**54,311,800.00**	**34,932,000.00**			**3 Event**	**65,000,000.00**
2.	**18.**	**03.**	**2. 01.**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang diikuti*	DPMPTSP	DPMPTSP	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	**54,311,800.00**	**34,932,000.00**			*5 Dokumen*	**65,000,000.00**
2.	18.	03.	2. 01.	000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	DPMPTSP	4 Dokumen	4 Dokumen	39,991,600.00	19,932,000.00	DAU	-	4 Dokumen	45,000,000.00
2.	18.	03.	2. 01.	000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	DPMPTSP	DPMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	14,320,200.00	15,000,000.00	DAU	-	1 Dokumen	20,000,000.00

2.	**18.**	**04.**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu**	**DPMPTSP**	**DPMPTSP**	**91,50 Persen**	**91,50 Persen**	**97,999,750.00**	**89,431,750.00**			**92 Persen**	**120,000,000.00**
2.	**18.**	**04.**	**2. 01.**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	*Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dilayani* *Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu*	DPMPTSP	DPMPTSP	*650 Dokumen dan 6 pengaduan*	*650 Dokumen dan 6 pengaduan*	**97,999,750.00**	**89,431,750.00**			*650 Dokumen dan 6 pengaduan*	**120,000,000.00**
2.	18.	04.	2. 01.	000	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	DPMPTSP	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	18.	04.	2. 01.	000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	DPMPTSP	650 Pelaku Usaha	650 Pelaku Usaha	72,999,850.00	68,199,850.00	DAU	-	650 Pelaku Usaha	90,000,000.00
2.	18.	04.	2. 01.	000	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	DPMPTSP	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	4,999,900.00	2,231,900.00	DAU	-	6 Pelaku Usaha	8,000,000.00
2.	18.	04.	2. 01.	000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	DPMPTSP	DPMPTSP	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	20,000,000.00	19,000,000.00	DAU	-	20 Kegiatan Usaha	22,000,000.00
2.	**18.**	**05.**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM**	**DPMPTSP**	**DPMPTSP**	**75 Persen**	**75 Persen**	**54,999,000.00**	**78,274,600.00**			**80 Persen**	**65,000,000.00**
2.	**18.**	**05.**	**2. 01.**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal*	DPMPTSP	DPMPTSP	*40 pelaku usaha*	*40 pelaku usaha*	**54,999,000.00**	**78,274,600.00**			*60 pelaku usaha*	**65,000,000.00**
2.	18.	05.	2. 01.	000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	DPMPTSP	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	15,000,000.00	31,900,000.00	DAU	-	60 Kegiatan Usaha	15,000,000.00
2.	18.	05.	2. 01.	000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	DPMPTSP	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	18.	05.	2. 01.	000	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	DPMPTSP	DPMPTSP	40 kegiatan usaha	40 kegiatan usaha	39,999,000.00	46,374,600.00	DAU	-	60 kegiatan usaha	50,000,000.00
2.	**18.**	**06.**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola**	**DPMPTSP**	**DPMPTSP**	**80 Persen**	**80 Persen**	**14,999,900.00**	**7,301,450.00**			**80 Persen**	**20,000,000.00**
2.	**18.**	**06.**	**2. 01.**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi yang diolah, dikaji dan di manfaatkan*	DPMPTSP	DPMPTSP	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	**14,999,900.00**	**7,301,450.00**			*1 Dokumen*	**20,000,000.00**
2.	18.	06.	2. 01.	000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DPMPTSP	DPMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	14,999,900.00	7,301,450.00	DAU	-	6 Dokumen	20,000,000.00
					TOTAL PAGU						**3,177,230,567.00**	**2,999,078,463.00**		-		**2,889,001,920.00**

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Tujuan dan sasaran, serta Rencana Strategis Tahun 2025-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025. Penetapan Nomenklatur Perencanaan Program dan Kegiatan telah mengadopsi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020)	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju 2026		Catatan Penting	Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif		Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
Urusan	Bidang Urusan	program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
2.	18.				**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2.	**18.**	**01.**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPMPTSP**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2,904,920,107.00**	**2,763,499,558.00**	**2,549,001,920.00**			
1.	**03.**	**01.**	**2. 01.**		**Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	DPMPTSP	20 Dokumen	20 Dokumen	**33,719,990.00**	**34,960,040.00**	**12,000,000.00**			
2.	18.	01.	2. 01.	0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	DPMPTSP	6 Dokumen	6 Dokumen	10,000,000.00	12,995,910.00	2,000,000.00	DAU	-	Sekretaris
2.	18.	01.	2. 01.	0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	2 Laporan	2 Laporan	4,999,990.00	3,244,130.00	2,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 01.	0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	DPMPTSP	12 Laporan	12 Laporan	18,720,000.00	18,720,000.00	8,000,000.00	DAU		
2.	**18.**	**01.**	**2. 02.**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran dan Tahunan SKPD*	DPMPTSP	*65 Dokumen*	*65 Dokumen*	**2,410,162,602.00**	**2,352,510,463.00**	**2,313,622,520.00**			
2.	18.	01.	2. 02.	0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	25 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan	2,348,899,402.00	2,293,174,788.00	2,267,942,520.00	DAU	-	Sekretaris
2.	18.	01.	2. 02.	0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	50 Dokumen	50 Dokumen	52,263,200.00	55,703,200.00	43,680,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 02.	0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	1 dokumen Laporan Keuangan	1 dokumen Laporan Keuangan	5,000,000.00	2,033,525.00	2,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 02.	0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMPTSP	14 Laporan	14 Laporan	4,000,000.00	1,598,950.00	-	DAU	-	
2.	**18.**	**01.**	**2. 06.**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia*	DPMPTSP	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	**231,963,715.00**	**119,628,555.00**	**67,000,000.00**			
2.	18.	01.	2. 06.	0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	DPMPTSP	12 Paket	12 Paket	4,999,700.00	2,481,000.00	2,500,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 06.	0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	DPMPTSP	12 Paket	12 Paket	28,499,215.00	12,992,555.00	13,500,000.00	DAU	-	Sekretaris
2.	18.	01.	2. 06.	0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	DPMPTSP	12 Paket	12 Paket	7,498,800.00	3,609,000.00	5,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 06.	0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	DPMPTSP	12 Paket	12 Paket	13,000,000.00	13,000,000.00	6,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 06.	0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Laporan	Laporan	3,000,000.00	-	-	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 06.	0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	12 Laporan	12 Laporan	174,966,000.00	87,546,000.00	40,000,000.00	DAU		

2.	**18.**	**01.**	**2. 07.**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	DPMPTSP	*9 Unit*	*9 Unit*	-	-	-			
2.	18.	01.	2. 07.	0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	DPMPTSP	-	-	-	-	-	DAU	-	Sekretaris
2.	**18.**	**01.**	**2. 08.**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		*Jumlah Kegiatan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan*	DPMPTSP	*3 Kegiatan*	*3 Kegiatan*	**98,545,100.00**	**97,345,100.00**	**108,610,000.00**			
2.	18.	01.	2. 08.	0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000.00	800,000.00	1,000,000.00	DAU		Sekretaris
2.	18.	01.	2. 08.	0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	DPMPTSP	36 Laporan	36 Laporan	41,940,300.00	41,940,300.00	36,210,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 08.	0003.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	12 Laporan	54,604,800.00	54,604,800.00	71,400,000.00	DAU	-	
2.	**18.**	**01.**	**2. 09.**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		*Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara*	DPMPTSP	*22 Unit*	*22 Unit*	**130,528,700.00**	**159,055,400.00**	**47,769,400.00**			
2.	18.	01.	2. 09.	0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DPMPTSP	5 Unit	5 Unit	94,995,200.00	107,905,800.00	40,000,000.00	DAU	-	Sekretaris
2.	18.	01.	2. 09.	0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	DPMPTSP	*10 Unit*	*10 Unit*	11,882,800.00	13,430,000.00	6,000,000.00	DAU		
2.	18.	01.	2. 09.	0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	1 Unit	1 Unit	19,210,700.00	33,079,600.00	-	DAU	-	
2.	18.	01.	2. 09.	0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	6 Unit	6 Unit	4,440,000.00	4,640,000.00	1,769,400.00	DAU	-	
2.	**18.**	**02.**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**Peningkatan Jumlah Investor**	**DPMPTSP**	**50 Investor**	**50 Investor**	**50,000,010.00**	**25,639,105.00**	**70,000,000.00**			
2.	**18.**	**02.**	**2. 01.**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		*Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	DPMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	**14,999,900.00**	**7,464,600.00**	**50,000,000.00**			
2.	18.	02.	2. 01.	0001.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	-	-	-	-	40,000,000.00	DAU	-	Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi
2.	18.	02.	2. 01.	0003.	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	DPMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	14,999,900.00	7,464,600.00	10,000,000.00	DAU	-	
2.	**18.**	**02.**	**2. 02.**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Utara*	DPMPPTSP	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	**35,000,110.00**	**18,174,505.00**	**20,000,000.00**			
2.	18.	02.	2. 02.	0003.	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Meningkatkan Nilai Investasi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi		1 Daerah	1 Daerah	10,000,000.00	6,134,850.00	10,000,000.00	DAU		Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi
2.	18.	02.	2. 02.	0004.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,110.00	12,039,655.00	10,000,000.00	DAU	-	
2.	**18.**	**03.**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		**Keikutsertaan pada Pameran Investasi**	**DPMPTSP**	**5 Event**	**5 Event**	**54,311,800.00**	**34,932,000.00**	**65,000,000.00**			
2.	**18.**	**03.**	**2. 01.**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang diikuti*	DPMPTSP	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	**54,311,800.00**	**34,932,000.00**	**65,000,000.00**			
2.	18.	03.	2. 01.	0002.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	4 Dokumen	4 Dokumen	39,991,600.00	19,932,000.00	45,000,000.00	DAU	-	Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi
2.	18.	03.	2. 01.	0003.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	14,320,200.00	15,000,000.00	20,000,000.00	DAU	-	

2.	**18.**	**04.**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu**	**DPMPTSP**	**92 Persen**	**92 Persen**	**97,999,750.00**	**89,431,750.00**	**120,000,000.00**			
2.	**18.**	**04.**	**2. 01.**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		*Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dilayani Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu*	DPMPTSP	*650 Dokumen dan 10 pengaduan*	*650 Dokumen dan 10 pengaduan*	**97,999,750.00**	**89,431,750.00**	**120,000,000.00**			
2.	18.	04.	2. 01.	0005.	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Perizinan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	-	-	-	-	-	DAU		Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
2.	18.	04.	2. 01.	0006.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	650 Pelaku Usaha	650 Pelaku Usaha	72,999,850.00	68,199,850.00	90,000,000.00	DAU		
2.	18.	04.	2. 01.	0007.	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko	Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	4,999,900.00	2,231,900.00	8,000,000.00	DAU		Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
2.	18.	04.	2. 01.	0008.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	DPMPTSP	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	20,000,000.00	19,000,000.00	22,000,000.00	DAU		
2.	**18.**	**05.**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM**	**DPMPTSP**	**70 Persen**	**70 Persen**	**54,999,000.00**	**78,274,600.00**	**65,000,000.00**			
2.	**18.**	**05.**	**2. 01.**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		*Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal*	DPMPTSP	*50 pelaku usaha*	*50 pelaku usaha*	**54,999,000.00**	**78,274,600.00**	**65,000,000.00**			
2.	18.	05.	2. 01.	0004.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Meningkatkan Nilai Investasi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	15,000,000.00	31,900,000.00	15,000,000.00	DAU		Kepala Bidang Pengendalian Pelayanan, Informasi dan Pelaporan
2.	18.	05.	2. 01.	0005.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	-	-	-	-	-	-		
2.	18.	05.	2. 01.	0006.	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	DPMPTSP	40 kegiatan usaha	40 kegiatan usaha	39,999,000.00	46,374,600.00	50,000,000.00	DAU		
2.	**18.**	**06.**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		**Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola**	**DPMPTSP**	**80 Persen**	**80 Persen**	**14,999,900.00**	**7,301,450.00**	**20,000,000.00**			
2.	**18.**	**06.**	**2. 01.**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		*Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi yang diolah, dikaji dan di manfaatkan*	DPMPTSP	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	**14,999,900.00**	**7,301,450.00**	**20,000,000.00**			
2.	18.	06.	2. 01.	0002.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DPMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	14,999,900.00	7,301,450.00	20,000,000.00	DAU		Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
					TOTAL PAGU						**3,177,230,567.00**	**2,999,078,463.00**	**2,889,001,920.00**			

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Kab. Tapanuli Utara Tahun 2025 ini merupakan Rencana Kerja Perubahan tahunan berdasarkan RENSTRA-DPMPTSP Tahun 2025 – 2026 dalam menunjang tercapainya target tujuan dan sasaran Pembangunan daerah.

Melalui Penyusunan Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, maka penetapan prioritas Pembangunan daerah yang merupakan Upaya penjabaran tujuan, sasaran dan target DPMPTSP diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara maupun dengan perangkat daerah lingkup luar yang membidangi fungsi tertentu.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan, kami mohon masukan dari semua pihak agar dokumen ini bisa menjadi lebih bermanfaat dan berguna kedepannya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA,

JONNER JULIFER, ST. M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19700718 200502 1 001

LAMPIRAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA PERUBAHAN)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Sisingamangaraja No. 100 Tarutung, 22411 Provinsi Sumatera Utara
Post-el perizinan@taputkab.go.id, Laman eperizinan.taputkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR: 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

Menimbang :

a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026;
b. bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo. Undang – undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahunb 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2026

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025**

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;

KEDUA : Renja Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

a. Bab I : Pendahuluan
b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2024
c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
e. Bab V : Penutup

KETIGA : Renja Perubahan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi Pedoman dalam:

a. Pelaksanaan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan bagi seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode 2025;
b. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA,

JONNER JULIFER, ST. M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 197007182005021001

Tembusan Yth:
1. Kepala BAPPEDA Kab. Tapanuli Utara;
2. Pertinggal.

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN TAPANULI UTARA

2025

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun 2025 ini, dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sesuai dengan tugas dan fungsi, Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara merupakan perencanaan satu tahunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sarana strategis sebagai komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik ***(Good Governance)*** dan pemerintahan yang bersih ***(Clean Government)*** di Kabupaten Tapanuli Utara.

Dengan adanya Rencana Kerja ***(RENJA) Perubahan*** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun 2025 ini, akan sangat berguna dalam menyusun pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Kerja ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga bermanfaat.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

BUDIMAN GULTOM, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741014 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANGAN AWAL OPD

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

4.1 LAMPIRAN KEGIATAN TAHUN 2025

BAB V : PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan upaya pemerintah untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan permukiman yang layak huni, sebagai tempat aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang berkualitas, terintegrasi dalam kawasan perkotaan dan perdesaan secara serasi dan seimbang serta berkelanjutan dengan sarana dan prasarana dasar seperti air bersih untuk perumahan yang sehat, sarana dan prasarana lingkungan seperti sanitasi, serta drainase yang dapat mencegah terjadinya genangan air yang berlebihan di permukiman, penataan bangunan yang aman, serta lingkungan dan kawasan perkotaan dan perdesaan yang serasi sehingga dapat mendukung sistem ekonomi, sosial budaya dan sistem ekologi lingkungan. Pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dawasa ini, disadari sepenuhnya masih belum dapat memuaskan semua pihak, karena kita masih banyak menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik terkait jumlah penduduk yang demikian besar tersebar di 15 (lima belas) kecamatan dan 252 desa/kelurahan, dengan kehidupan masyarakat yang masih belum sejahtera dengan income/capita yang masih relatif rendah,bila dibandingkan dengan kondisi Kabupaten tetangga yang terdekat yang relatif sudah maju.

Kemampuan pemerintah sangat terbatas sehingga pemerintah hanya dapat membiayai sebagian pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan. Masyarakat dan dunia usaha mau atau tidak mau harus membiayai sebagian besar kebutuhannya sendiri. Berbagai tantangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- Kebutuhan akan prasarana dan sarana (seperti Air Bersih, sanitasi, prasarana Perumahan dan permukiman dan sebagainya) yang terus meningkat sebagai akibat keterbatasan pemerintah;
- Pertambahan jumlah penduduk, ditambah lagi kekurangan backlog dari tahun-tahun sebelumnya, serta
- Adanya kebutuhan untuk memenuhi komitmen pemerintah kepada masyarakat internasional dalam pencapaian MDG,s 2025 yang akan datang.

Adanya perubahan organisasi dan lingkungan stategis perlu dilihat secara positif sebagai peluang untuk menghadapi tantangan (mancari solusi). Perubahan organisasi perlu disikapi secara bijak sebagai peluang untuk mewujudkan pola kerja yang efektif dan efisien menghadapi tantangan ke depan. Fungsi dan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara sangat penting dalam mendorong terjadinya perubahan paradigma pembangunan, pengelolaan konfik soaial, dengan perubahan kebijakan yang lebih proporsional dan mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi lokal, pembinaan perencanaan kebijakan dan strategis pembangunan, tata pemograman dan anggaran yang lebih transparan, penataan

data dan sistem informasi pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyiapkan Rencana Kerja ***(RENJA)*** OPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini untuk mewujudkan pemerintah yang baik (Good Governance) dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Rencana Kerja ***(RENJA)*** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara ini, merupakan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran stategis (cara mencapai tujuan dan sasaran). Perencanaan ini disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dalam meningkatkan akuntabitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran untuk mewujudkan secara proporsional dan terukur.

Sebagaimana amanat Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap 0PD wajib menyusun Rencana Kerja ***(RENJA)***, dengan sumberdaya yang tersedia, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara berupanya menyusun dan melaksankan Rencana Kerja ***(RENJA)*** guna mewujudkan *Good Governance*.

Dalam menyusun Rencana Kerja ***(RENJA)*** ada beberapa hal sangat perlu diperhatikan, seperti :

a) Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara,
b) Capaian kinerja tahun sebelumnya,
c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang, dan
d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga diwajibkan menyusun Rencana Kinerja ***(RENJA)*** yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan. Rencana Kerja ***(RENJA)*** tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Sebagaimana disebutkan diatas, dengan terbitnya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara yang mengemban tugas membantu Bupati Tapanuli Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka pelaksana Rencan Kenerja ***(RENJA)***, Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Keputusan Kepala Lembaga Administarasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;
l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
m. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang RPD Tahun 2025-2026
n. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2005-2025:
o. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah; dan
p. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 13 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.
q. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 tahun 2024 tentang RPD Tahun 2025-2026
r. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 500 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara merupakan rencana pembangunan dalam urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman seperti Sanitasi, Drainase/Gorong-gorong, Sarana dan prasarana permukiman, Sarana Air Bersih dan pertanahan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, maka Rencana Keja ***(RENJA)*** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ditetapkannya dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan penyusunan Rencana Renja ***(RENJA)*** Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai pedoman 1 (satu) tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ***(RKA)*** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan program Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 1 (satu) tahun.
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ***(LKIP)***.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penyusunan perencanaan kerja ***(RENJA) Perubahan*** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang penyusunan Rencana Kerja ***(RENJA)*** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

Pada bab ini menguraikan tentang : Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, dan realisasi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 0PD dan/atau realisasi APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

Bab ini memuat : Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupeten Tapanuli Utara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Bab ini memuat : Lampiran Rencana Program Kegiatan Tahun Anggaran 2025

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang : cacatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersedianan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

2.1 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2024 memiliki pagu murni sebesar Rp. 21.799.692.800 (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi anggaran sampai TW III sebesar 20.262.476.479 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atas persentase realisasi sebesar 52,68 %. Diharapkan Realisasi Belanja tahun 2024 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan. Pada tahun 2024 sampai dengan Triwulan III secara keseluruhan program dan kegiatan serta sub kegiatan belum mencapai target dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun berjalan (tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025 sampai dengan triwulan III disajikan sebagaimana tabel 1 (Tabel T-C.29) berikut:

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025 per Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja terhadap Renja Tahun 2025 (%)
						I		II		III		IV		
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(%)
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan kebutuhan dasar di permukiman	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman**	**35.28%**	**1,342,490,160**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**			0
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100	1,342,490,160	0	-	0	-		-			0

		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	0	-	0	-	0	-	0	-			
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	terselenggaranya rehab/peningkatan jaringan air minum	200 liter/detik	1,342,490,160	0	-	0	-	0	-			0
		Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	0	-	0	-	0	-	0	-			
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan kebutuhan dasar di permukiman	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tangga berakses sanitasi aman**	**12 %**	**710,775,000**	**0**	**-**	**0**	**-**					0
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	100	710,775,000	0	-	0	-	0				0
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	0	-	0	-	0	-	0	-			

		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	65 KK	710.775,000	0	-	0	-	0	-			0
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan kebutuhan dasar di permukiman	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK**	**100%**	**197,096,640**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**58,000,000**			29.43
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya penataan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1	197,096,640	0	-	0	-	0	58,000,000			29.43
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1	97,096,640	0	-	0	-	-	58,000,000			59.73

		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1	100,000,000	0	-	0	-	0	-			0
	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Realisasi Anggaran**	**100%**	**11,851,537,801**	**33%**	**3,855,216,831**	**56%**	**2.149.951.487**					50.67
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	77,624,450	0	-	0	-					0
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	75,592,250	0	-	0	-	0	-			0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	2,032,200	0	-	0	-	0	-			0
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	8,020,000	0		0	-	0	-			0

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan dinas	1	3,762,957,801	26.1	983,710,197	-	703,221,644		636,855,821			61.75
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	3,695,533,601	0	969,938,397	0	686,876,294	0	632,265,221			61.94
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	55,087,200	0	13,771,800	0	9,181,200		4,590,600			50
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	12,337,000	0	-	1	7,164,150	0	-			58.07
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum dinas	5	153,878,210	0	19,669,200		21,755,006		46,175,217			56.93
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6,281,520	0	-	0	-	0	-			0
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	32,476,650	0	-	0	3,140,000	0	-			9.67

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	9,080,000	0	-	0	2,975,000	0	-			32.76
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	11,261,040	0	-	0	3,540,000					31.44
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	-	0	-	0	-	0	-			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	3,404,000	0	-	0	1,000,000	0	-			29.38
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	77,975,000	0	19,669,200	0	11,100,006		46,175,217			98.68
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8,088,580,000		2,871,506,634		1.370.663.147		1,772,178,985			74.36
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1,980,000	0		0	990,000	0	-			50

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	7,132,000,000	3	2,812,496,634	3	1.129.673.147	3	1,691,803,985			79.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	954,600,000	3	59,010,000	3	240,000,000	3	80,375,000			39.74
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	83,493,000	0	28,092,500	0	6,550,000	0	13,152,000			57.24
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	58,820,240	1	28,092,500	1	750,000	1	750,000			50.31
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	12,590,160	0	-	0	-	1	12,402,000			98.51

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	20 Unit	12,082,600	0	-	0	5,800,000	0	-			48.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13,400,000		-		-		-			0
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	-		-		-		-			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	13,400,000	0	-	0	-	0	-			0
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan kebutuhan dasar di permukiman	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase rumah layak huni bagi warga negara korban bencana**	**100%**	**131,628,500**	**0%**	**-**	**0%**	**19,000,000**		**49,159,855**			51.78

		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksanya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	96,805,000	0	-	0	19,000,000		14,359,855			34.46
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	100	96,805,000	0	-	0	19,000,000	0	14,359,855			34.46
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50	34,823,500		-	0	-	0	34,800,000			99.93
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	250	234,823,500		-	0	-	50	34,800,000			14.82
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan kebutuhan dasar di permukiman	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**89,50%**	**356,669,000**		**-**		**-**					0

		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0	-		-		-	0	-			
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	0	-		-		-					
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0	356,669,000		-		-		3,649,551			1.02
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	15	316,150,000		-		-	0	3,649,551			1.15
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	5	40,519,000		-		-	0	-			0

	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan kebutuhan dasar di permukiman	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase kawasan pemukiman kumuh**	**5.94%**	**589,313,891**		**-**		**-**	**0**	**138,286,549**			23.47
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	1	589,313,891		-	0	-		138,286,549			23.47
		Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terselenggaranya Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	2	589,313,891		-	0	-	0	138,286,549			23.47
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan kebutuhan dasar di permukiman	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)**	**89%**	**4,567,688,518**		**-**	**89%**	**488,724,300**	**89%**	**154,703,700**			14.09

		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaranya pemenuhan PSU perumahan	1	4,845,688,518		-	0	488,724,300	0	154,703,700			13.28
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	32	3,688,140,000		-	0	-	0	-			0
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5	1,157,548,518		-		488,724,300		154,703,700			55.59
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase lingkungan kondisi baik**	**80%**	**1,294,109,000**		**-**		**-**					0
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	TerselenggaranyaPengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	1,294,109,000		-		-					0

		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1500	1,294,109,000		-		-					0
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan kebutuhan dasar di permukiman	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase lahan untuk kepentingan umum**		**-**		**-**		**-**					
		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		-		-		-					
		Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana PengadaanTanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	0	-		-		-					
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase mediasi sengketa/konflik tanah**	**100.00 %**	**21,439,800**		**-**		**-**	**0**	**5,290,000**			24.67

	kebutuhan dasar di permukiman													
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah	100	21,439,800	0	-	0	-	0	5,290,000			24.67
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	-	0	-	0	-	0	-			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	10	21,439,800	0	-	0	-	2	5,290,000			0

2.2 ANALISIS PELAYANAN KINERJA OPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang menjadi target pelayanan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi.Berdasarkan analisis capaian kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberi penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program.

Tabel T-C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator Kinerja Program	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi		catatan analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman	√	√	33,28%	34,28%	35,28%	33,28%	34,28%	-	36,28%	37,28%	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra
2	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK		√	100%	100%	100%	100%	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra
3	Persentase rumah tangga berakses sanitasi aman	√	√	10 %	11 %	12 %	10 %	11 %	-	13 %	14 %	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra
4	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)		√	87,04%	88,04%	88,50%	87,04%	88,04%	-	89 %	89,50 %	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra

No	Indikator Kinerja Program	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi		catatan analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
5	Persentase kawasan pemukiman kumuh		√	6,44%	6.49 %	5,94%	6,74%	6,45%	-	5,54%	5,14%	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra
6	Persentase rumah layak huni	√	√	86,39%	88,40%	88.97%	87,94%	88,44%	_	89,97%	90,47%	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra
7	Persentase rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	√	√	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra
7	Persentase drainase lingkungan kondisi baik		√	78%	80%	80%	78%	80%	_	82 %	84 %	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra
8	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum		√	86,71%	87,66%	86.71%	86,28%	86,35%	-	87,71%	88,71%	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra
9	Persentase mediasi sengketa/konflik tanah		√	100 %	100%	100%	100%	100 %	_	100 %	100 %	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Pelaksanaan kegiatan dan program dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut diatas secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik dengan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata pada tahun 2024 dari 9 (Sembilan) indikator kinerja program kegiatan yang direncanakan, terdapat 7 (tujuh) program kegiatan yang dilasanakan dengan capaian indikator ***"baik"***.

Keberhasilan capaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mengalokasikan dalam P- APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 36.874.136.492,- (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)**

Beberapa hal sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapakan untuk dapat mendukung tercapainya sasaran sebagaimana diuraikan di atas antara lain adalah :

1. Perencanaan (planning) yang sistematis dan akurat dengan mempetimbangkan berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Tersedianya fasilitas (sarana dan prasarana) yang memadai;
3. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan, baik berupa Peraturan Bupati, Peraturan Daerah maupun peraturan perundangan yang lebih tinggi;
4. Kemampuan (kualitas dan kuantitas) Sumber Daya Manusia aparatur yang memadai;
5. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
6. Terpenuhinya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;
7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar instansi dan lintas sector terkait yang terbina dengan baik dan harmonis.

Guna menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 3 (tiga) urusan yaitu urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan. Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara juga memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan peraturan menteri dalam negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal dan turunannya yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

a) Tingkat pelayanan dan hal kritis terkait pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

   Terdapat 3 (tiga) isu strategis pembangunan yang dihadapi pada bidang urusan pekerjaan umum dan perumahan dan kawasan permukiman, yaitu :

   1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
   2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
   3. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

      Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menangani urusan bidang Pekerjaan Umum bertanggung jawab terhadap Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup *sehari*-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci. Demi

mewujudkan pelayanan ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengaplikasikan melalui program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Begitu juga dengan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik merupakan standar *pelayanan* minimal yang berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik yang memadai, serta menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan hal tersebut melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.

Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan pelayanan pemerintah di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan melalui program Pengembangan Perumahan melalui kegiatan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana.

Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yaitu terkait dengan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan urusan perumahan dan kawasan permukiman senantiasa berkoordinasi dengan kementerian PUPR dan urusan bidang pertanahan yang selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Tapanuli Utara.

b) Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada setiap kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut.

Dibawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 antara lain :

a. Masih kurang optimal koordinasi dalam menyusun perencanaan kegiatan sehingga masih terkesan parsial, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan);
b. Masih belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Manusia;
c. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah (APBD Kabupaten) sehingga belum semua indikator kinerja didukung oleh kegiatan yang teranggarkan;
d. Dukungan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah yang masih belum mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya;
e. Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;

f. Belum optimalnya dukungan, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Suatu permasalahan atau masalah pada dasarnya timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksaan kegiatan pasti akan menemui sesuatu masalah, kendala dan hambatan sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi setiap permasalah yang timbul.

Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain :

a. Perencanaan kegiatan yang sistematik, terkoordinir dan komprehensif;
b. Peningkatan dan pembembangan SDM selalu ditingkatkan;
c. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representative;
d. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat diperlukan, untuk itu perlu juga adanya perencanaan dan klasifikasi yang baik terhadap fasilitas, sasrana dan prasarana penunjang; mengupayaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
e. Pengembangan system jaringan informasi dan peningkatan kualitas dasar;
f. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis;
g. Perlu meningkatkan dukungan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara;
h. Koordinasi dalam rangka peninjauan kembali serta evaluasi.

Issu-issu Strategis Pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara meliputi issu-issu baru dan penting yang diperkirakan akan memberikan akan memberi dampak potensial bagi pelayanan prasarana dan sarana bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu meliputi:

a. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah;

Saat ini arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam. Proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat. Diperkiraan tren yang berkembang akan terus terjadi.

Tetapi disisi lain, hal ini juga mengindikasikan kuatnya pengaruh kota, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan wilayah yan tidak konstruktif antara kota besar-kota menengah atau antara kota-desa. Proses urbanisasi yang terjadi saat ini lebih banyak didorong oleh terbatasnya lapangan kerja di daerah perdesaan.

b. Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan Lingkungan Hidup perkotaan berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukiman, di bawah dan diatas tanah kawasan perkotaan yang tidak terkendali. Misalnya, penggunaan air tanah yang sudah berlebihan menyebabkan sulitnya masyarakat memperoleh air bersih, sementara penyediaan air bersih oleh PDAM belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan.

c. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan bagi kita, dan memang tidak hanya sekarang, namum ini perlu diperhitungkan secara cermat dalam konteks pembangunan perkotaan. Dampak perubahan iklim dengan intensitas hujan yang meningkat, dan meningkatnya permukaan air laut, dapat menyebabkan permasalahan tersendiri. Peran infrastruktur menjadi penting dalam mitigasi perubahan iklim.

d. Modal Sosial

Dalam konteks pembangunan perkotaan saat ini yang menjadi masalah bukan pada modal finansial, namun perlu dilihat pada tataran modal sosial. Apaun yang kita lakukan, Apabila aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka inventasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan.

e. Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Pengembangan Nilai Tambah

Dalam menjawab tantangan ke depan, kita harus mampu mempertahankan ***cultural expression*** yang mampu mendorong berkembangannya ekonomi kreatif menjadi daya saing. Oleh karena itu kedepan harus diupayakan mendukung ekonomi kreatif yang didukung dengan desain yang baik, serta didukung dengan marketing yang terintegrasi. Kebijakan pemerintah diharapkan harus mampu menjembatani dalam mengekplorasi pasar pada tataran nasional.

c. Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam peningkatan pelayanan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Tingkat pendidikan yang relative masih rendah
2. Jumlah penduduk yang tinggi
3. Kualitas dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
4. Masih tingginya degradasi lingkungan
5. Perlunya komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi

Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara :

1. Meningkatnya pemahaman Aparatur terhadap Tugas, Pokok dan Fungsi
2. Dukungan berbagai pihak terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara
3. Adanya hubungan yang harmonis dalam menjalin koordinasi lintas sector
4.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA AWAL OPD

RKPD tahun 2024 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas dan merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024. Kegiatan-kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara tetap mengacu kepada Rencana Strategis

(RENSTRA) Tahun 2019-2024. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Renstra tersebut kemudian dijabarkan menjadi Rencana Kerja Tahunan ***(RKT)*** yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun dalam penyusunan Ranwal Renja tahun 2025 hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan adalah identifikasi program/kegiatan prioritas dan review terhadap Rancangan Awal RKPD seperti tabel dibawah ini :

Tabel T-C 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bidang Urusan Pekerjaan Umum											
I	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum	78,80 %	1.425.000.000	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum	78,80 %	1.425.000.000	Dukungan terhadap: -Pencapaian SPM - Percepatan penurunan *stunting*
II	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	93,71 %	315.000.000	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	93,71 %	315.000.000	
III	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	100%	164.870.600	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	100 %	164.870.600	
iv	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase drainase kondisi baik di perkotaan dan lingkungan	80 %	1.310.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase drainase kondisi baik di perkotaan dan lingkungan	80 %	1.310.000.000	
Bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman											
IV	Program Pengembangan Perumahan	Kabupaten Tapan	Persentase perhitungan kerugian akibat	100%	194.8	Program Pengembangan Perumahan	Kabupaten Tapan	Persentase perhitungan kerugian akibat	100 %	200.020.000	Dukungan terhadap : - Percepatan penurunan

	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
		uli Utara	bencana alam		23.500		uli Utara	bencana alam			lokasi kawasan kumuh -Pencapaian SPM bidang perumahan
V	Program Kawasan Permukiman	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Rumah Layak Huni	89 %	415.000.000	Program Kawasan Permukiman	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Rumah Layak Huni	89 %	415.000.000	
VI	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase kawasan pemukiman kumuh	6%	615.479.891	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase kawasan pemukiman kumuh	6 %	615.479.891	
VII	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kabupaten Tapanuli Utara	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung PSU	85,65 %	6.276.784.410	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kabupaten Tapanuli Utara	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung PSU	85,65 %	6.276.784.410	
Bidang urusan Pertanahan											
VIII	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	86,70 %	—	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	86,70 %	—	
IX	Program Penatagunaan Tanah	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Mediasi Sengketa/Konflik tanah	100%	—	Program Penatagunaan Tanah	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Mediasi Sengketa/Konflik tanah	100%	—	
Bidang Urusan Non Penunjang Pemerintah Daerah											
X	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi	100%	10.888.815.106	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi	100%	10.888.815.106	Termasuk dengan gaji dan tunjangan

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sasaran kinerja malalui program dan kegiatan mengambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam melaksankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan indikator kinerja yang terdiri dari indikator output dan outcome.

Indikator kinerja output adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Sedangkan indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam penentuan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Tahunan ***(RENJA)*** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan sharing melalui musrenbang kecamatan/Desa, musrenbang Kabupaten, musrenbang Provinsi dan musrenbang Nasional untuk mengsinkronkan setiap program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Hasil rakapitulasi tersebut dikaji dan dilakukan survey lapangan untuk menghasilkan outcome yang lebih. maksimal dan dapat langsung bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	120 m	Hasil Musrenbang kecamatan
2	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	100 m	Hasil Musrenbang kecamatan
3	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Parsibarungan Kecamatan Pangaribuan	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	110 m	Hasil Musrenbang kecamatan
4	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	100 m	Hasil Musrenbang kecamatan
5	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	120 m	Hasil Musrenbang kecamatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
6	Pembangunan Drainase Lingkungan	di Desa Lumban Tonga Kecamatan Pahae Julu	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	120 m	Hasil Musrenbang kecamatan
7	Pembangunan Jalan Lingkungan	Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	100 m	Hasil Musrenbang kecamatan
8	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	di Dusun III sigurung-gurung Kecamatan Pahae Jae	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	40 m	Hasil Musrenbang kecamatan
9	Pembangunan Jalan Lingkungan	Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	120 m	Hasil Musrenbang kecamatan
10	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan	menuju SMP 1 Purba Tua di Desa Janji Nauli Kecamatan Purba Tua	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	120 m	Hasil Musrenbang kecamatan
11	Pembangunan Tembok penahan tanah	Desa Pardamean Nainggolan Kecamatan Pahae Jae	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	35 m	Hasil Musrenbang kecamatan
12	Pembangunan Jalan Lingkungan	Desa Hutanagodang Kecamatan Purbatua	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	120 m	Hasil Musrenbang kecamatan
13	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan	Desa Dolok Sanggul Kecamatan Simangumban	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	120 m	Hasil Musrenbang kecamatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur yang pelaksanaanya dibagi kedalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.

Amanat untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada level Nasional (RPJMN) dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada level kementrian/Lembaga (K/L) atau unit di bawahnya tercantum pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 melalui Perpres Nomor 18 tahun 2020. Selama periode 2020-2024 pembangunan akan difokuskan pada 5 aspek, yaitu:

a. Pembangunan SDM
b. Pembangunan Infastruktur
c. Penyederhanaan Regulasi
d. Penyederhanaan Birokrasi
e. Transformasi Ekonomi

No	Kebijakan		Keterangan
1	RPJP 2005-2025		
	A	Pembangunan dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	
	B	Pemenuhan Perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya	
	C	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa air minum dan sanitasi	
2	SDG'S		
	Tujuan 6.1 pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua		

	Tujuan 11.1 pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman terjangkau dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh		
3	**RPJMN 2020-2024**		**7 Agenda**
	A	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024
	B	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	
	C	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	
	D	Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa	
	E	Memperkuat Infastruktur untuk mendukung Pengemangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
	F	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	
	G	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	

Kebijakan pelaksanaan Pembangunan secara Nasional sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Bertitik tolak pada fungsi sesuai tugas pembinaan program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam situasi dan kondisi saat ini serta lingkungan strategis dalam upaya pencapaian target diharapkan pada berbagai tantangan strategis terkait dengan :

1) Perencanaan kebijakan dan pengendalian program nasional bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional.
2) Mengelola perubahan secara cepat, dengan bekerja keras, dan bertindak tetap untuk kepentingan daerah.

Beberapa tugas yang perlu diantisipasi dan dikelola secara profesional diantaranya adalah :

- Penjabaran dan review pelaksanaan rencana dan strategi (RENSTRA) tahunan.
- Penyiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
- Penyiapan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Kinerja.
- Pengembangan sistem pembiayaan dan pola inventasi melalui kemitraan.
- Peningkatan kapasitas daerah dalam penyiapan rencana dan program inventasi pembangunan jangka menengah dalam rangka pengendalian kebijakan strategis nasional pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Pengembangan sistem informasi nasional pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Penyiapan Norma Standart Prosedur Manual bantuan teknis (bantek), serta pembinaan teknis (bintek) perencanaan dan pemprograman serta penataan kawasan permukiman.
- Ikut mendorong upaya pemberdayaan masyarakat malaui sosialisasi.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam era desentralisasi dan perkuatan otonomi daerah.

Mengingat besarnya tantangan dan tugas tersebut maka program kerja ini disusun dengan memperhatikan aspek keterpaduan antar unit kerja dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi. Keterpaduan antara unit kerja hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama yang harmonis serta kebersamaan dan mendukung semua unit kerja. Oleh karena itu rasa kebersamaan harus senantiasa dipertahankan. Melalui kerjasama yang baik diharapkan pelaksanaan program kerja tahun 2025 dapat ikut memberikan manfaat bagi terwujudnya pengelolaan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih responsif, adil terhadap perubahan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin).

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organinasi mengambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan Organisasi memperjatam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara yang tersusun dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara serta didasarkan isu-isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya telah merumuskan tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
2. Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/ permukiman layak
2. Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana, sarana dan utilitas
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak
4. Meningkatnya kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan
5. Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah
6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari program yang secara langsung menunjang pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024.

Adapun Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada tahun 2024 terdiri dari 8 (delapan) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar 36.874.136.492. Adapun rinciannya terdiri dari :

- ✓ Belanja Pegawai Rp. 3.474.744.668
- ✓ Belanja Barang dan Jasa Rp. 31.477.601.264
- ✓ Belanja Bantuan Sosial Rp. 90.000.000
- ✓ Belanja Modal Tanah Rp. 164.000.000
- ✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 87.790.500
- ✓ Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 1.580.000.000

Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa lebih dari 80 persen anggaran dinas perumahan dan kawasan permukiman di alokasikan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan Sistem Pembangunan Air Minum, Tangki Septic Individual, Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan jalan lingkungan.

Tabel T.C 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	03	03			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum**	**Tapanuli Utara**	77,80%	15.319.937.000		78,80%	1.425.000.000
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tapanuli Utara**	100%	3.087.241.631		100%	15.385.517.000
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak**	**Tapanuli Utara**	95,71%	5.050.000.000		93,71%	315.000.000
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Tapanuli Utara**	100%	5.050.000.000		100%	315.000.000

1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik**	**Tapanuli Utara**	80%	—	**Karena Keterbatasan Anggaran, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase tidak dianggarkan pada APBD murni TA 2024**	80%	1.310.000.000
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah kabupaten/kota**	**Tapanuli Utara**	100%	—		80%	1.310.000.000
1	**3**	**8**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Kesesuaian Bangunan Gedung Pemerintah dengan NSPK**	**Tapanuli Utara**	100%	1.424.361.720		100%	164.870.600
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Tapanuli Utara**	100%	1.424.361.720		100%	164.870.600
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							
1	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**Tapanuli Utara**	88,40%	125.070.000	**Karena Keterbatasan Anggaran,kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak dianggarkan pada APBD murni TA 2024**	88,44%	194.823.500
1	**04**	**02**	**2.01**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Tapanuli Utara**	1 Laporan	35.070.000		1 Laporan	160.000.000
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Tapanuli Utara**	1 Laporan	90.000.000		1 Laporan	34.823.500
1	**4**	**3**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh**	**Tapanuli Utara**	5,94%	64.955.000	**Karena Keterbatasan**	5,94%	415.000.000

1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**	**Tapanuli Utara**	100%	—	**Anggaran,kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha tidak dianggarkan pada APBD murni TA 2024**	0	0
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Tapanuli Utara**	100%	64.955.000		100%	415.000.000
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU**	**Tapanuli Utara**	88,00%	1.693.902.580	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Ha tidak dianggarkan pada APBD TA 2024**	89 %	4.779.450.008
1	**4**	**5**	**2.01**	02	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Tapanuli Utara**	17 Lokasi	1.693.902.580		26 Lokasi	3.558.152.000
1	**4**	**5**	**2.01**	03	**Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan**	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan**	**Tapanuli Utara**	1 Laporan	—		1 Laporan	1.221.298.008
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase Ketersediaan Lahan untuk kepentingan umum**	**Tapanuli Utara**	87,66%	0	**Karena Keterbatasan Anggaran,PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE tidak dianggarkan pada APBD TA 2023 dan APBD TA 2024**	87,66%	0
2	**10**	**06**	**2.01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksnanya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tapanuli Utara**	0	-		0	-
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Mediasi/Sengketa Konflik Tanah**	**Tapanuli Utara**	100%	209.761.810	**Karena Keterbatasan Anggaran,**	100%	45.000.000

2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Tapanuli Utara**	1 Laporan	209.761.810	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH tidak dianggarkan pada APBD murni TA 2024**	1 Laporan	45.000.000
1	04				Bidang Urusan Non Penunjang Pemerintah Daerah							
1	04	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi**	**Tapanuli Utara**	100%	11.857.675.962		100%	12.535.073.565

BAB IV
RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun secara detail alokasi anggaran tersaji dalam tabel Program dan Kegiatan Tahun 2025 beserta summber dana dapat dilihat pada tebel berikut ini :

LAMPIRAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
P APBD TA. 2025

Kode						URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu P-APBD	Sumber Dana	Ket
1	2	3	4	5		6			
1	**03**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		`	
1	**03**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**1,502,490,160**		
1	**03**	**03**	**2.01**			**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**1,502,490,160**		
1	**03**	**03**	**2.01**	**28**		***Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan***			
1	**03**	**03**	**2.01**	**30**		***Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota***			
1	**03**	**03**	**2.01**	**26**		***Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan***	**1,502,490,160**		
						Biaya Umum Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	42,490,160	DID	
						Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Tapian Nauli III Kecamatan Sipahutar	1,000,000,000	DID	
						Peningkatan SPAM di Dusun Sosor Dolok Desa Unte Mungkur Kecamatan Muara	152,000,000		P Apbd
						Biaya Umum Peningkatan SPAM di Dusun Sosor Dolok Desa Unte Mungkur Kecamatan Muara	8,000,000		
						Perbaikan Bak Penampung Air (Dam Air) dan Perbaikan Perpipaan Saluran Air di Dusun 3 Tor Nauli Desa Manalu Kecamatan Parmonangan	100,000,000	DAU	
						Rehabilitasi Jaringan Perpipaan Air Minum di Desa Sitompul Kecamatan Siatas Barita	200,000,000	DID	
1	**03**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**710,775,000**		
1	**03**	**05**	**2.01**			**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**710,775,000**		
1	**03**	**05**	**2.01**	**39**		***Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat***	**710,775,000**		

						Biaya Umum Kegiatan Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	8,775,000	**DID**	
						Pembangunan MCK di Desa Simangumban Julu Kecamatan Simangumban	100,000,000	Bonus Produksi	
						Pembangunan Jamban beserta Utilitasnya di Kabupaten Tapanuli Utara	389,500,000		
						Biaya Umum Pembangunan Jamban beserta Utilitasnya di Kabupaten Tapanuli Utara	12,500,000		P Apbd
						Pembangunan MCK di Dusun Parik Matia Desa Sitolu Ama Kecamatan Pahae Julu	100,000,000	DID	
						Pembangunan MCK di Desa Parsosoran Kecamatan Garoga	100,000,000	DID	
1	**03**	**05**	**2.01**	**41**		***Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)***			
1	**03**	**06**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**1,294,109,000**		
1	**03**	**06**	**2.01**			**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1,294,109,000**		
1	**03**	**06**	**2.01**	**12**		***Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan***	**1,294,109,000**		
						Biaya umum Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	44,109,000	DID	
						Rehabilitasi Jaringan Drainase di Aek Nasia desa Hutatoruan 8 Kecamatan Tarutung	50,000,000	DAU	
						Pembangunan Drainase Lingkungan Jalan Ringroad Peaniburan Desa Silando, Kecamatan Muara	150,000,000	DID	
						Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Sosor Liang Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar	100,000,000	DID	
						Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga	150,000,000	DID	
						Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga	130,000,000	DID	
						Pembangunan Drainase Lingkungan di Jalan Pancasila Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon	100,000,000	DID	
						Pembangunan Drainase di Kompleks jalan GKPI Rambing, Kecamatan Tarutung	100,000,000	DID	
						Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Parsibarungan Kecamatan Pangaribuan	120,000,000	DID	
						Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae	100,000,000	Bonus Produksi	
						Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae	125,000,000	Bonus Produksi	
						Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Lumban Tonga Kecamatan Pahae Julu	-	Bonus Produksi	
						Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Lumban Tonga menjadi Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Lumban Gaol	125,000,000	Bonus Produksi	P Apbd
1	**3**	**8**				**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**197,096,640**		
1	**03**	**08**	**2.01**			**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**197,096,640**		
1	**03**	**08**	**2.01**	**2**		**Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**	**100,000,000**		
						Rehabilitasi Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Tarutung	**100,000,000**		P Apbd
`	**03**	**08**	**2.01**	**21**		***Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota***			
1	**03**	**08**	**2.01**	**23**		***Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG***	**97,096,640**		

						Biaya Operasional Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG)	87,148,200	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
						Penyediaan Jasa Koordinasi SHSTBGN (Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara)	9,948,440	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	04					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**17,299,271,380**		
1	04	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11,715,285,362**		
1	04	01	2.01			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**83,612,250**		
1	04	01	2.01	01		***Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***	**73,560,050**		
						Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	1,296,000	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,184,800	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	815,000	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	889,000	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,163,000	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
						Prasurvey pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025	15,212,250	DID	
1	04	01	2.01	05		***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD***	**2,032,200**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	04	01	2.01	07		***Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**8,020,000**		
1	**4**	**1**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3,279,241,902**		
1	**04**	**01**	**2.02**	**01**		***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN***	**3,211,817,702**	DAU GAJI	
						Gaji PNSD	**2,165,909,088**		
						Gaji PPPK	**406,824,314**		
						TPP PNSD	**639,084,300**		
1	**04**	**01**	**2.02**	**03**		***Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD***	**55,087,200**	DAU Honorarium Pengelolaan Keuangan	
1	**04**	**01**	**2.02**	**05**		***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD***	**12,337,000**		
						Penyusunan Laporan Keuangan/Aset Akhir Tahun	9,839,500	DAU Rutin & Program/K	

								egiatan OPD	
						Penyusunan laporan Keuangan Bulanan	2,497,500	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**4**	**1**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**153,878,210**		
1	**04**	**01**	**2.06**	**01**		***Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor***	**6,281,520**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.06**	**02**		***Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	**32,476,650**		
						Alat Tulis Kantor	15,857,050	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
						Laptop	16,619,600	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.06**	**03**		***Penyediaan Peralatan Rumah Tangga***	**9,080,000**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.06**	**05**		***Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan***	**11,261,040**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.06**	**06**		***Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan***			
1	**4**	**1**	**2.06**	**08**		***Fasilitasi Kunjungan Tamu***	**3,404,000**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.06**	**09**		***Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***	**77,975,000**		
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	25,505,000	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	52,470,000	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**		
1	**04**	**01**	**2.07**	**02**		***Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan***	**-**		
						Pengadaan Kendaraan Beroda Dua			
						Pengadaan Kendaraan Beroda Empat			
1	**04**	**01**	**2.07**	**07**		**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**13,400,000**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	04	01	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8,059,080,000**		
1	**04**	**01**	**2.08**	**01**		***Penyediaan Jasa Surat Menyurat***	**1,980,000**	DAU Rutin & Program/K	

								egiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.08**	**02**		***Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik***	**7,143,000,000**	DAU LISTRIK, AIR DAN INTERNET	
1	**04**	**01**	**2.08**	**04**		***Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***	**914,100,000**	DAU NON ASN	
1	**04**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**139,473,000**		
1	**04**	**01**	**2.09**	**01**		***Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan***	**114,800,240**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.09**	**09**		***Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya***	**12,590,160**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.09**	**11**		***Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***	**12,082,600**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**4**	**2**				**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**381,628,500**		
1	**04**	**02**	**2.01**			**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**146,805,000**		
1	**04**	**02**	**2.01**	**04**		***Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana***	**70,950,000**	DID	
						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			
						Identifikasi Perumahan dan Permukiman di Lokasi Rawan Bencana	75,855,000	DID	
1	**04**	**02**	**2.03**			**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**234,823,500**		
1	**04**	**02**	**2.03**	**01**		***Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana***	**234,823,500**		
						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	234,823,500	DAU	
						Identifikasi Perumahan dan Permukiman di Lokasi Rawan Bencana			
1	**4**	**3**				**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**356,669,000**		
1	**04**	**03**	**2.02**			**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		`	
1	**04**	**03**	**2.03**			**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**356,669,000**		
1	**04**	**03**	**2.03**	**02**		***Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni***	**316,150,000**	**DAU**	
						Updating Database RTLH di Kabupaten Tapanuli Utara			
1	**04**	**03**	**2.03**	**03**		***Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU***	**40,519,000**		
						Biaya Pendamping Pelaksanaan Program BSPS, Koridor dan Homestay di Kabupaten Tapanuli Utara	20,519,000	DID	
						Biaya Pendamping kegiatan Provinsi di Kabupaten Tapanuli Utara	20,000,000	DID	
						Pembangunan/Rehabilitasi RTLH bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			
						Biaya Pendukung Pelaksanaan RTLH bagi MBR di Kabupaten Tapanuli Utara			
1	**04**	**04**				**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**589,313,891**		
			2.01			**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota**			
1	**04**	**04**	**2.01**	**00 07**		***Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru***	**589,313,891**		
						Revisi Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tapanuli Utara	450,000,000	DID	

						Revisi DED Kawasan Aek Ristop	105,472,500	DAU	
						Biaya Umum Revisi Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tapanuli Utara	12,631,391	DID	
						Verifikasi Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)	21,210,000	DID	
1	**04**	**05**				**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**4,845,688,518**		
1	**4**	**5**	**2.01**			**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**4,845,688,518**		
1	**04**	**05**	**2.01**	**02**		***Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian***	**3,688,140,000**		
						Biaya Umum Pengelolaan Kegiatan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	91,988,000	DID	
						Lanjutan pembangunan jalan lingkungan di Desa Pariksabungan Kecamatan Siborong-borong	111,152,000	DID	
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Sitompul Kecamatan Siatas Barita	100,000,000	DAU	
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Sangkaran Kecamatan Siatas Barita	100,000,000	DID	
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Silando Kecamatan Muara	100,000,000	DID	
						Pembangunan jalan lingkungan di Dusun Hapoltahan Desa Banuaji IV Kecamatan Adiankoting	100,000,000	DID	
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sabungan ni huta IV Kecamatan Sipahutar	100,000,000	DID	
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Desa Parbaju Tonga Kecamatan Tarutung	100,000,000	DID	
						Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pagaran Lambung IV, Kecamatan Adiankoting	100,000,000	DID	
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Binumbun Kecamatan Muara	100,000,000	DID	
						Pembangunan Jalan Lingkungan Simpang SD Latihan Aek Ristop Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung	100,000,000	DID	
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong	100,000,000	DID	
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun III sigurung-gurung Kecamatan Pahae Jae	125,000,000	BONUS PRODUKSI	
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu	125,000,000	BONUS PRODUKSI	
						Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan menuju SMP 1 Purba Tua di Desa Janji Nauli Kecamatan Purba Tua	125,000,000	BONUS PRODUKSI	
						Pembangunan Tembok penahan tanah di Desa Pardamean Nainggolan Kecamatan Pahae Jae	125,000,000	DID	
						Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Dolok Sanggul Kecamatan Simangumban	125,000,000	BONUS PRODUKSI	
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Hutanagodang Kecamatan Purbatua	125,000,000	DID	
						Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Gang Sentosa Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung	200,000,000	DID	
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu	200,000,000	BONUS PRODUKSI	
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Gang Agave kelurahan Hutatoruan VII kecamatan Tarutung	100,000,000	DID	
						Pembangunan Jalan Alternatif dari Jalan Mahligai menuju Desa Banuaji di desa Banuaji II kecamatan Adiankoting	-	DAU	
						Perbaikan Jalan Kompleks Fatimah Regency di Desa Pagar Batu Kecamatan Sipoholon	175,000,000	DAU	
						Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Dusun Lumban Baringin Desa Dolok Saribu Kecamatan Pagaran	100,000,000	DID	

						Peningkatan Jalan Huta Siraya Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong	90,000,000	DAU	
						Lanjutan Pembangunan Jalan Lapen dari Jalan Jeges Menuju Sigambogambo Kecamatan Siborongborong	90,000,000	DAU	
						Penataan Lingkungan di Desa Hutapea Banuarea Kecamatan Tarutung	150,000,000		P Apbd
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Pansinaran desa Dolok Sanggul kecamatan Simangumban	-	DID	
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah di SD 173160 Kecamatan Sipahutar	100,000,000		P Apbd
						Pembangunan Jalan Lingkungan Di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung	100,000,000		P Apbd
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah Di SMP Negeri 2 Tarutung	80,000,000		P Apbd
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kreasi Anak Muda (3 Titik) di Kabupaten Tapanuli Utara	150,000,000		P Apbd
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Aritonang Kecamatan Muara	200,000,000	DID	
1	**04**	**05**	**2.01**	**03**		***Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan***	**1,157,548,518**		
						Pemeliharaan Lampu Taman dan Lampu Kota	208,094,908	DID	
						Pemeliharaan Taman dan Pohon Lindung	205,552,960	DID	
						Monitoring dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara	739,119,250	DID	
						Pemeliharaan Rutin TPU Pagar Batu Kec, Sipoholon dan TPU Siarang-arang Kec, Tarutung	4,781,400	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
2	**10**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**21,439,800**		
2	**10**	**06**				**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**-**		
2	**10**	**06**	**2.01**			**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**-**		
2	**10**	**06**	**2.01**	**03**		***Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota***			
2	**10**	**10**				**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**			
			2.01			**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**21,439,800**		
			2.01	**01**		***Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah***	**-**		
				02		***Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota***	**-**		
						Penentuan zona nilai tanah di Kabupaten Tapanuli Utara			
				03		***Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota***	**21,439,800**		
						Mediasi Sengketa Tanah di Kabupaten Tapanuli Utara	21,439,800	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
TOTAL							**21,614,495,871**		

BAB V

PENUTUP

Penyusunan program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara merupakan kegiatan tahunan yang seyogyannya dilakukan penyusunannya oleh masing-masing instansi pada awal tahun pelaksanaan program kerjanya. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini cukup penting karena berisi arah, tujuan, pelaksanaan tugas pokok, serta pengorganisasian dari instansi yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai kedudukan dan peran yang cukup straregis, hal ini disebabkan karena instansi ini mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan rumusan kebijakan dan strategis pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang berbasis kinerja yang telah ditetapkan dewasa ini, maka rencana kerja ini mempunyai arti yang cukup penting pula, karena rencana kerja ini tertuang kemajuan dan langkah-langkah yang hendak dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan rencana kerja perubahan tahun 2025 ini, berbagai usulan serta masukan penyempurnaan rencana kerja ini kami terima dengan tangan terbuka serta pengertian yang diberikan terhadap berbagai upaya yang belum terselesaikan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

BUDIMAN GULTOM, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741014 200003 1 002

RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAPANULI UTARA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2024 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 dan Capaian Renstra 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 12
2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD 14
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 16
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 17
3.3 Program dan Kegiatan 17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 30
BAB V PENUTUP 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan K/L yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja K/L), dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

1. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2030 merupakan pedoman dan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra dan Renja OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya RPJM ini menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya sebagai dasar Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Dan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Namun demikian dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan keluarnya Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Tapanuli Utara dan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 12/SKB/TU/2016 dan Nomor : 06/PB/DPRD-TU/2016 tanggal 18 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Mengharuskan Pemerintah Daerah membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang baru, yang sesuai dengan amanat peraturan tersebut, menggabungkan beberapa Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam rangka memenuhi amanat tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2025 ini menyusun Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 berdasarkan usulan masyarakat baik secara bottom up dan top down melalui musrenbang kecamatan, konsultasi publik, forum OPD, musrenbang RKPD Kabupaten serta mengacu kepada Renja Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2025 antara lain :

1. Percepatan pencapaian prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana antara lain dengan program;
   - Pengendalian kerusakan lingkungan
   - Pengendalian pencemaran dan peningkatan kapasitas SDM
2. Penguatan pencapaian SPM daerah, untuk kabupaten :
   - Pencegahan pencemaran air
   - Pencegahan pencemaran udara stasioner
   - Info status kerusakan lahan untuk produksi biomassa
   - Tindak lanjut pengaduan
3. Investasi pada infrastruktur lingkungan hidup
   - Infrastruktur pemanfaatan kualitas lingkungan
   - Infrastruktur pengelolaan limbah dan sampah
   - Infrastruktur pemulihan kualitas lingkungan akibat pencemaran
   - Infrastruktur pengendalian kerusakan ekosistem
4. Pelaksanaan inventaris data secara menyeluruh
5. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.
6. Focussing pada isu isu strategis menurut kondisi wilayah.

Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara disusun atas berbagai landasan hukum, yaitu :

2. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. **Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. **Undang undang 23 Tahun 2014** tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58654);
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018** tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017** tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. **Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
11. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
12. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018** tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
13. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018** tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019** tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);

15. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daserah 2021;
17. **Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021** tentang hasil Verifikasi danValidasi Pemuktahiran Klasifikasi,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanan pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. **Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.115.5-1317 Tahun 2023** tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi danValidasi Pemuktahiran Klasifikasi,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023** tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah periode rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024;
20. **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dsaerah Provinsui Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
21. **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017** tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037.
22. **Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023** tentang Rencana Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026
23. **Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006** tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
24. **Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2016** tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
25. **Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017** tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
26. **Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2016** tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
27. **Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024** tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026.
28. **Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025** tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara adalah menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan, pengangaran dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun 2025 dalam prinsip tata pemerintahan yang baik.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah:

1. Pedoman/acuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan RKPD nya sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Merumuskan Rencana, Kebijakan dan Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

Bab I **PENDAHULUAN** merupakan penjelasan mengenai latar belakang penulisan, landasan hukum yang digunakan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

Bab II **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU** merupakan penjelasan mengenai evaluasi pelaksanaan renja Dinas Lingkungan Hidup tahun lalu dan capaian renstra Dinas Lingkungan Hidup, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH** menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja SKPD, serta Program dan Kegiatan.

Bab V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV PENUTUP merupakan gambaran kondisi yang diharapkan untuk pencapaian pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 secara keseluruhan sangat baik memenuhi target penyerapan dana sebesar 98,26% , adapun hasil-hasil yang telah dicapai pada Kegiatan Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup adalah :

Secara umum rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Lingkungan Hidup dan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	100%	-	9.961.346.240	9.788.028.988	98,26%	7.020.438.325	16.808.467.313	100%
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya proses perencanaan dan evaluasi kinerja dinas	100%	-	44.815.200	42.918.700	95,77%	44.872.000	87.790.700	100%
Administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya administrasi keuangan	100%	-	2.751.608.728	2.661.635.608	96,73%	2.909.558.775	5.571.194.383	100%
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya administrasi Kepegawaian dinas	100%	-	61.875.000	61.750.000	99,80%	0	61.750.000	100%
Administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya administrasi Umum dinas	100%	-	264.289.550	250.147.538	94,65%	234.418.900	484.566.438	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Biaya Jasa Tenaga Pelayana Umum	100%	-	2.864.630.487	2.860.109.150	99,84%	2.734.374.700	5.594.483.850	100%
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	1.250.536.800	1.226.726.567	98,10%	1.097.213.950	2.323.940.517	100%
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	-	0	0	0	0	0	0

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) yang Terintegrasi dengan Setiap Dokumen Rencana Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara	100%	-	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlasakanya Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	-	1.530.982.000	1.519.544.100	99,25%	84.605.950	1.604.150.050	100%
Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Terselengaranya upaya pencegahan pencemaran/kerussakan lingkungan hidup	100%	-	29.999.250	29.954.000	98,65%	30.928.450	60.882.450	100%
Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Terselengaranya Penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	100%	-	1.500.982.750	1.489.950.100	99,26	53.677.500	1.543.627.600	100%
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terselengaranya pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	100%	-	0	0	0	0	0	100%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terciptanya Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	-	12.162.475	8.278.800	68,12	27.500.000	35.778.800	100%
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten	100%	-	12.162.475	8.278.800	68,12	27.500.000	35.778.800	100%

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	TERLAKSANANYA ROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	100%	-	31.550.900	31.023.100	98,33%	27.499.500	58.522.600	100%
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan ketentuan	100%	-	31.550.900	31.023.100	98,33%	27.499.500	58.522.600	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100%	-	54.131.200	51.327.200	94,82%	69.982.000	121.309.200	100%
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	54.131.200	51.327.200	94,82%	69.982.000	121.309.200	100%
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100%	-	0	0	0	0	0	0
Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten / kota	100%	-	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100%	-	25.448.375	24.630.800	96,79%	24.000.000	48.630.800	100%

Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	100%	-	25.448.375	24.630.800	96,79%	24.000.000	48.630.800	100%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan Sampah yang dikelola	100%	-	1.069.325.525	1.049.937.425	98,19%	94.999.500	1.144.936.925	100%
Pengelolaan sampah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan persampahan	100%	-	1.069.325.525	1.049.937.425	98,19%	94.999.500	1.144.936.925	100%
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen RPPLH yang diakomodir	100%	-	-	-		299.998.800	-	-
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (RPPLH) Kabupaten/Kota	100%	-	-	-	-	299.998.800	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja pelayanan urusan Lingkungan Hidup dapat diukur dengan 6 indikator kinerja pelayanan yaitu :

Tabel 2.2

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Rumus Perhitungan Kinerja	Keterangan
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(0,376xIKA) + (0,405xIKU) + (0,219xIKTL)	nilai
2	Indeks Kualitas Air	$IPj = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 M + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 A}{2}}$ IPj = Indeks Pencemaran bagi peruntukan j Ci = Konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij = Baku Mutu Parameter i bagi peruntukan j M = Maksimum, A =Average (Rata-rata)	nilai
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKL = 100 - ((84{,}3 - ((\frac{LTL}{LW} - DKK) X 100)) X \frac{50}{54{,}3})$ DKK = ∑Rumus W ditutupan Hutan + Rumus W ditutupan belukar DKK= Dampak kebakaran dan kanal	nilai
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU=100-(50/0,9X (PU-0,1)) Dimana PU= 50% indeks SO2+Indeks NO2 PU= Indeks Pencemaran Udara	nilai
5	Persentase Penanganan Sampah	Tidak Ada	persentase
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tidak Ada	Penilaian dari Inspektorat Kabupaten

Adapun pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara disajikan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capain		Proyeksi	Catatan Analisis
		2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	
1	*2*	*5*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	84,01	72,26	72,75	73,05	73,35	77,81	81,53	79,51	Dalam bentuk nilai
2	Indeks Kualitas Air	80	50	53,81	53,91	54,01	63,33	70	74,16	Dalam bentuk nilai
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	73,5	74,45	75,50	76,50	77,50	75,85	76,89	82,61	Dalam bentuk nilai
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	93,42	91,60	88,86	88,96	89,06	92,31	94,75	82,8	Dalam bentuk nilai
5	Persentase Penanganan Sampah	22	22	26	27	28	22	22	27	Dalam bentuk persen
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	51,43	65,43	80	80	85	70,08	70,89	80	Dalam bentuk nilai

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Menurunnya kualitas lingkungan yang ditunjukkan dengan meningkatknya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pertambangan, limbah rumah tangga yang memanfaatkan bahan kimia.
2. Menurunnya kualitas air (pencemaran) Danau Toba dan sumber daya air lainnya di Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Pengalihan fungsi kawasan tidak terbangun menjadi areal pertanian/perkebunan, perumahan dan kebutuhan pembangunan yang juga mengakibatkan hilangnya sumber mata air, serta penurunan ketersediaan air, sementara permintaan kebutuhan akan air baku meningkat.
4. Kurangnya pengendalian eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup pada kawasan yang rentan terhadap kerusakan.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan.
6. Penegakan hukum yang belum tegas terhadap pelaku pelanggaran perusak lingkungan. Meningkatnya permasalahan lingkungan tidak dibarengi dengan kesiapam perangkat hukum daerah, dengan keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
7. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten di bidang lingkungan hidup (PPNS, PPLHD, penilai amdal, auditor lingkungan, fungsional laboratorium).
8. Meningkatkan kepedulian dan peran serta dunia pendidikan terhadap kelestarian lingkungan hidup.
9. Meningkatkan kinerja kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap indikasi perusakan lingkungan, pendataan kegiatan/usaha yang berjalan yang memiliki/tidak memiliki UKL/UPL.
10. Pengelolaan sampah yang belum mencapai kemitraan antar pemerintah daerah dan masyarakat dan belum optimalnya upaya pemisahan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
11. Dilaksanakannnya peringatan dini bencana dalam upaya antisipasi terhadap bencana terkait perubahan iklim seperti banjir, longsor, kekeringan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah :

1. Keterbatasan dana/anggaran yang tidak sebanding dengan kecenderungan peningkatan permasalahan lingkungna hidup yang ada.
2. Status kelembagaan pengelola lingkungan hidup yang sudah Dinas (eselon II) di Kabupaten Tapanuli Utara. yang berdampak terhadap koordinasi dan pengambilan keputusan.
3. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Dukungan Peraturan Daerah terhadap kelestraian lingkungan hidup.
5. Sumber daya aparatur yang terbatas baik jumlah personel dan tenaga teknis di bidang lingkungan hidup.
6. Partisipasi masyarakat dan pemerhati lingkungan yang masih kurang dalam pelestarian lingkungan hidup.

Secara keseluruhan program dan kegiatan yang diselenggarakan melalui tugas dan fungsi Dinas Lingkugan Hidup mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalaui RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2030 dan capaian Program Nasional/Internasional.

Adapun tantangan dan peluang dalam penyelenggraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Isu lingkungan merupakan isu global yang berdampak pada tuntutan Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih inovatif, inisiatif dan kreatif menyusun kebijakan, rencana dan program/kegiatan.
2. Semakin berkembangnya organisasi masyarakat/non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
3. Perhatian dunia internasional terhadap perubahan iklim dunia, memberikan alternatif pendanaan membantu perbaikan lingkungan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD dengan rencana kebutuhan dikaitkan dengan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup perencanaannya dilakukan dengan mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara dan dilakukan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan kendala yang kemungkinan akan timbul. Perencanaan strategis adalah integrasi antara keahlian sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan pemanfaatan kondisi lingkungan strategis. Dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan usulan Dinas Lingkungan Hidup

sebelum penetapan RKPD tidak begitu terjadi perbedaan, semua usulan terakomodir di dalam rancangan awal RKPD tersebut dan dapat diuraikan pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.020.438..325	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.252.563	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	84.605.950	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	1.612.879	
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Tapanuli Utara	Terlaksananya Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	27.499.500	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Tapanuli Utara	Terlaksananya Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	39.814	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	69.982.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	80.000	
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Tapanuli Utara	Terlaksanaya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	27.500.000	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Tapanuli Utara	Terlaksanaya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	47.082	

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	24.000.000	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	34.957	
7	Program Pengelolaan Persampahan	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	100%	94.999.500	Program Pengelolaan Persampahan	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	100%	1.088.999	
8	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tapanuli Utara	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	299.998.800	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tapanuli Utara	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	299.998.800	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun hasil dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten serta memperhatikan usulan-usulan masyarakat pada kunjungan kerja Bupati Tapanuli Utara ke Desa-desa terdapat beberapa usulan-usulan yang sesuai yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dapat disajikan pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya bibit tanaman berbuah	5000 batang	-
2	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	43 pengaduan	-
3	Program Pengelolaan Persampahan	15 Kecamatan	Tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	328 unit	-

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sangat terkait dengan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumtera Utara. Program/kegiatan yang ada pada Program/kegiatan Nasional melalui program/kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup diadopsi dan disesuaikan dengan program/kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara , beberapa hal yang mengacu kepada Renja Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Percepatan pencapaian prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana antara lain dengan program;
- Pengendalian kerusakan lingkungan
- Pengendalian Pencemaran dan Peningkatan Kapasitas

2. Penguatan pencapaian SPM daerah, untuk kabupaten :
- Pencegahan pencemaran air
- Pencegahan pencemaran udara stasioner
- Info status kerusakan lahan untuk produksi biomassa
- Tindak lanjut pengaduan

3. Investasi pada infrastruktur lingkungan hidup
- Infrastruktur pemanfaatan kualitas lingkungan
- Infrastruktur pengelolaan limbah dan dan sampah
- Infrastrukktur pemulihan kualitas lingkungan akibat pencemaran
- Infrastruktur pengendalaian kerusakan ekosistem

4. Pelaksanaan inventaris data secara menyeluruh

5. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

6. Focussing pada isu isu strategis menurut kondisi wilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan Renja SKPD

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara pada Rencana Kerja Perubahan menetapkan tujuan :

" MENINGKATNYA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH"

3.2.2 Sasaran Renja SKPD

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sasaran yaitu :

1. Meningkatkan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara

Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks KualitaS Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	84.01	72.26	72,75	73,05	73,35
1. Indeks Kualitas Air	80	50	53,81	53,91	54,01
2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	73.5	74.45	75,50	76,50	77,50
3. Indeks Kualitas Udara	93.42	91.60	88,86	88,96	89,06
4. Persentase penanganan sampah	22	22	26	27	28
5. Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	51.43	65.43	80	80	85

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan ditentukan berdasarkan metode strategis untuk mendukung program Internasional dan Nasional yang terkait dengan lingkungan dari visi misi Kementerian Lingkungan Hidup; pencapaian MDGs, pencapaian SPM, pengentasan kemiskinan, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir dll. , pencapaian visi misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, pencapaian misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 5 (lima)

tahun ke depan, penampungan aspirasi secara bottom up melalui musrenbang ditingkat desa, kecamatan dll.

3.3.2. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun 2025 terdiri dari 8 Program dan 15 Kegiatan, antara lain meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
    - ❖ Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - ❖ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
    - ❖ Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota
3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
    - ❖ Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota
4. Program Pengelolaan Persampahan
    - ❖ Pengelolaan sampah
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
    - ❖ Penyimpanan Sementara Limbah B3
6. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
    - ❖ Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota
    - ❖ Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota
    - ❖ Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
    - ❖ Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

❖ Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.

Program dan kegiatan tersebut diatas dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang meliputi 15 kecamatan dan rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tertuang pada tabel 3.3 sebagai berikut:

TABEL 3.3

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			7.913.036.651		4.788.125.423,00
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.030.669.623,00
Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	1	6.771.780.451	1	4.030.669.623,00
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.571.675		154.844.850,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	100	18.571.675	100	154.844.850,00
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	100	-	100	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100		100	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1	
	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)				
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	100		100	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	100		100	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)				

	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	100		100	
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	100		100	
	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)				
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.698.150		8.353.850,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	3.698.150	1	8.353.850,00
2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-		8.000.000,00
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	-	100	8.000.000,00
2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		10.000.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	100	-	100	10.000.000,00
2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		12.000.000,00
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	100	-	100	12.000.000,00
2.11.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		15.000.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	100	-	100	15.000.000,00
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.610.525		4.000.000,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1.610.525	1	4.000.000,00
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.993.000		32.491.000,00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	12.993.000	1	32.491.000,00
2.11.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			-		30.000.000,00
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	100	-	100	30.000.000,00
2.11.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			-		20.000.000,00
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	100	-	100	20.000.000,00
2.11.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		15.000.000,00
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	100	-	100	15.000.000,00
2.11.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			-		0
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)		-		0

2.11.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu			-		0
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)		-		0
2.11.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan			-		0
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)		-		0
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.755.499.601		2.046.444.773,00
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	2.755.499.601	100	2.046.444.773,00
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		100	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100		100	
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.692.436.551		2.000.444.773,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	2.692.436.551	100	2.000.444.773,00
2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			61.063.200		44.000.000,00
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	61.063.200	100	44.000.000,00
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.999.850		2.000.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	1.999.850	100	2.000.000,00
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		25.000.000,00
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	-	100	25.000.000,00
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	100	-	100	
2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		20.000.000,00
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	-	100	20.000.000,00
2.11.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-		5.000.000,00
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	100	-	100	5.000.000,00
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			134.346.375		106.780.000,00
Terlaksanaya Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	134.346.375	100	106.780.000,00
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	100		100	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100		100	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100		100	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100		100	
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.908.000		1.880.000,00

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	1.908.000	100	1.880.000,00
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			23.358.575		20.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	23.358.575	100	20.000.000,00
2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			36.294.000		26.000.000,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	100	36.294.000	100	26.000.000,00
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8.000.000		10.900.000,00
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100	8.000.000	100	10.900.000,00
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			64.785.000		48.000.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	64.785.000	100	48.000.000,00
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		20.000.000,00
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	-	100	20.000.000,00
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100	-	100	
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			-		10.000.000,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100	-	100	10.000.000,00
2.11.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		10.000.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	-	100	10.000.000,00
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.635.137.500		1.558.600.000,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	2.635.137.500	100	1.558.600.000,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	-	100	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100	-	100	
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			800.000		800.000,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	800.000	100	800.000,00
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			25.100.000		26.800.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100	25.100.000	100	26.800.000,00
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.629.237.500		1.531.000.000,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	2.629.237.500	100	1.531.000.000,00
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.208.225.300		119.000.000,00
Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	1.208.225.300	100	119.000.000,00
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100		100	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	100		100	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	100		100	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100		100	
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			6.000.000		34.000.000,00

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	100	6.000.000	100	34.000.000,00
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.131.132.150		50.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	100	1.131.132.150	100	50.000.000,00
2.11.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			23.082.150		20.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	23.082.150	100	20.000.000,00
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.084.900		10.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	5.084.900	100	10.000.000,00
2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.920.200		5.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	5.920.200	100	5.000.000,00
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			237.759.050		130.000.000,00
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (%)	1	237.759.050	96	130.000.000,00
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			237.759.050		40.000.000,00
Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	90	237.759.050	96,5	40.000.000,00
	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	90		97	
2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			-		20.000.000,00
RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	90	-	97	20.000.000,00
2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota			-		20.000.000,00
RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	90	-	96,5	20.000.000,00
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			-		90.000.000,00
MENINGKATNYA KEPATUHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP [ERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	90	-	96,5	90.000.000,00
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	90	-	96,5	
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			-		45.000.000,00
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	90	-	96,5	45.000.000,00
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang			-		45.000.000,00
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	90	-	96,5	45.000.000,00
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			56.180.750		220.000.000,00
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	95		96	220.000.000,00
	Indeks Kualitas Air (Indeks)	70		58	
	Persentase Tutupan Lahan (Persentase)	77		77	

2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			15.249.600		132.000.000,00
Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	1	15.249.600	1	132.000.000,00
	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1		1	
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1		1	
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			-		44.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1	-	1	44.000.000,00
2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK			-		44.000.000,00
Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1	-	1	44.000.000,00
2.11.03.2.01.0009 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota			-		44.000.000,00
Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	1	-	1	44.000.000,00
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			-		44.000.000,00
Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	1	-	1	44.000.000,00
2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			-		44.000.000,00
Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	1	-	1	44.000.000,00
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			-		44.000.000,00
Terlaksananya Pemulihan Pencemaran/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	5	-	5	44.000.000,00
2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi			-		44.000.000,00
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	5	-	5	44.000.000,00
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			-		50.000.000,00
MEINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Poin)	1	-	0	50.000.000,00
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			-		50.000.000,00
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Rencana pengelolaan Keanekaragaman hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	0	-	96,5	50.000.000,00
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	0	-	96,5	
	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0	-	96,5	
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0	-	96,5	
2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			-		12.500.000,00
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0	-	96,5	12.500.000,00
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			-		12.500.000,00

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	0	-	96,5	12.500.000,00
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati			-		12.500.000,00
Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	0	-	96,5	12.500.000,00
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya			-		12.500.000,00
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0	-	96,5	12.500.000,00
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			13.695.000		23.694.600,00
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	98,33	13.695.000	98,35	23.694.600,00
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3			13.695.000		23.694.600,00
Terselengaranya Penyimpanan sementara bahan berbahaya dan Beracun (B3) sesuai Peraturan	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	98	13.695.000	98	23.694.600,00
	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	98	-	98	
	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	98	-	98	
2.11.05.2.01.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota			-		8.694.600,00
beroperasinya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	98	-	98	8.694.600,00
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)			-		7.500.000,00
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	98	-	98	7.500.000,00
2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3			-		7.500.000,00
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	98	-	98	7.500.000,00
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			34.385.675		54.885.200,00
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	94,82	34.385.675	94,84	54.885.200,00
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			34.385.675		54.885.200,00
Terlaksananya embinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	95	34.385.675	95	54.885.200,00

	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	95	-	95	
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			-		27.885.200,00
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	95	-	95	27.885.200,00
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			-		27.000.000,00
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	95	-	95	27.000.000,00
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			-		30.000.000,00
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Pelaku Industri Perfilman yang Tervalidasi (Persentase)	-	-	95,5	30.000.000,00
	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	-	-	95,5	
2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			-		15.000.000,00
Terlaksananya engakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 0 Î£ ouput	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	0	-	95	15.000.000,00
2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			-		15.000.000,00
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	0	-	95	15.000.000,00
2.11.07.2.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			-		15.000.000,00
Tercapainya Peningkatan kapasitas MHA dan Kearifan lokal,Pengetahuan Tradisional dan hal MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1	-	1	15.000.000,00
2.11.07.2.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			-		15.000.000,00
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1	-	1	15.000.000,00
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			40.677.050		23.676.800,00
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	80	40.677.050	90	23.676.800,00

2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			40.677.050		23.676.800,00
Terlaksananya penyelenggaraan Penyuluh dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	66	40.677.050	66	23.676.800,00
	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	66	-	66	
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			-		12.176.800,00
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	66	-	66	12.176.800,00
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat			-		11.500.000,00
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	66	-	66	11.500.000,00
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			-		5.000.000,00
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kinerja Ormas (Nilai)	-	-	95,5	5.000.000,00
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		5.000.000,00
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	100	-	100	5.000.000,00
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			-		5.000.000,00
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	100	-	100	5.000.000,00
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			11.699.550		20.199.200,00
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup			11.699.550		20.199.200,00
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			11.699.550		20.199.200,00
Persentase Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	97	-	97	20.199.200,00
	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	97	-	97	
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	97	11.699.550	97	
	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	97	-	97	
	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	97	-	97	

2.11.10.2.01.0003 - Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota			-		4.000.000,00
Diselesaikannya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kewenangan kabupaten/kota sampai P-21	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	97	-	97	4.000.000,00
2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			-		4.000.000,00
Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	97	-	97	4.000.000,00
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			-		4.199.200,00
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	97	-	97	4.199.200,00
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			-		4.000.000,00
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	97	-	97	4.000.000,00
2.11.10.2.01.0012 - Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup			-		4.000.000,00
PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	97	-	97	4.000.000,00
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			746.859.125		200.000.000,00
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	98,19	746.859.125	98,21	200.000.000,00
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah			746.859.125		200.000.000,00
Terlaksananya Tata Kelola Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	20	-	55	200.000.000,00
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	20	-	55	
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	20	-	55	
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			-		66.500.000,00
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	20	746.859.125	55	66.500.000,00
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah			-		67.000.000,00
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	20	-	55	67.000.000,00
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			-		66.500.000,00

Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	20	-	55	66.500.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Adapun rencana kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2025	
						Target	Anggaran
Tujuan Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	**Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang yang tertangani**	**100%**	**100%**	**7.020.438.325**
			<u>Kegiatan:</u> **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya proses perencanaan dan evaluasi kinerja dinas	**100%**	**100%**	**44.872.000**
			<u>Sub Kegiatan :</u> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan rencana kerja dinas	**100%**	**100%**	8.353.850
			<u>Sub Kegiatan</u> : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tersedianya laporan capaian kinerja	**100%**	**100%**	40.027.150
			<u>Sub Kegiatan</u> : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**	32.491.000
			<u>Kegiatan:</u> **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi keuangan	**100%**	**100%**	**2.909.558.775**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2025	
						Target	Anggaran
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujuian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	**100%**	**100%**	76.733.200
			Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**100%**	**100%**	2.827.825.875
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	**100%**	**100%**	4.999.999
			Kegiatan: **Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi Umum dinas	**100%**	**100%**	**234.418.900**
			Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	**100%**	**100%**	4.943.100
			Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	**100%**	**100%**	50.658.000
			Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	**100%**	**100%**	38.983.800
			Sub Kegiatan :	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	**100%**	**100%**	20.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2025	
						Target	Anggaran
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya biaya rapat rapat ke luar daerah	**100%**	**100%**	119.834.000
			Kegiatan: **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Biaya Jasa Tenaga Pelayana Umum	**100%**	**100%**	**2.734.374.700**
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya biaya surat menyurat	**100%**	**100%**	2.000.000
			Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan lsitrik	Tersedianya biaya komuikasi, kebutuhan air dan listrik	**100%**	**100%**	25.100.000
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Biaya Jasa Non PNS	**100%**	**100%**	2.707.274.700
			Kegiatan: **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**100%**	**1.097.213.950**
			Sub Kegiatan :	Tersedianya pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	**100%**	**100%**	57.280.650

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2025	
						Target	Anggaran
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Tersedianya pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	**100%**	**100%**	989.461.600
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan TPS dan TPA	**100%**	**100%**	24.999.999
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan	**100%**	**100%**	9.966400
			Sub Kegiatan: Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	**100%**	**100%**	5.065.100

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2025	
						Target	Anggaran
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Terselenggaranya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3	**100%**	**100%**	**27.499.500**
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Sasaran : Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan		**Kegiatan:** **Penyimpanan Sementara Limbah B3**	Terselenggaranya Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) sesuai peraturan	**100%**	**100%**	**27.499.500**
			Sub Kegiatan: Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Adminisrtrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3	Terselenggaranya verifikasi lapangan unyuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara linbah B3	**100%**	**100%**	27.499.500
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Cakupan usaha yang wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan**	**100%**	**100%**	**69.982.000**
			Kegiatan: **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**69.982.000**
			<u>Sub Kegiatan:</u>	Banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan pemenuhan kewajiban	**100%**	**100%**	30.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2025	
						Target	Anggaran
			Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin lingkungan dan/atau Izin PPLH	pengelolaan lingkungan hidup			
			<u>Sub Kegiatan:</u> Pengawasan Perijinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provnsi dan Peraturan PerUndang-Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Pengawasan Perijinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provnsi dan Peraturan PerUndang-Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	**100%**	**100%**	**39.982.000**
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN	**Cakupan Pengaduan masyarakat yang terselesaikan**	**100%**	**100%**	**24.000.000**
			<u>Kegiatan:</u> **Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota**	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	**100%**	**100%**	**24.000.000**
			<u>Sub Kegiatan:</u> Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**	24.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Cakupan Sampah yang dikelola**	**100%**	**100%**	**94.999.500**
			<u>Kegiatan:</u>	Terkelolanya sampah sampai ke TPA	**100%**	**100%**	**94.999.500**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2025	
						Target	Anggaran
			Pengelolaan Sampah				
			<u>Sub Kegiatan:</u> Penanganan sampah melalui Pemilhan dan Pengolahan sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSA,RDF,Pusat Pengomposan,Biodigester,Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Peerundangan	Penanganan sampah melalui Pemilhan dan Pengolahan sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSA,RDF,Pusat Pengomposan,Biodigester,Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Peerundangan	**100%** **100%**	**100%** **100%**	94.999.500
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Terlaksananya Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**100%**	**100%**	**84.605.950**
			<u>Kegiatan:</u> **Pencegahan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**	Terselengaranya upaya pencegahan pencemaran/kerussakan lingkungan hidup	**100%**	**100%**	**30.928.450**
			<u>Sub Kegiatan:</u> Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air,udara dan laut	Terselengaranya penelitian dan pengujian mutu kualitas air	**100%**	**100%**	30.928.450
			<u>Kegiatan:</u>		**100%**	**100%**	53.677.500

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2025	
						Target	Anggaran
			Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Terlaksananya **Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**			
			Sub Kegiatan : Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Tersedianya buku informasi pengelolaan lingkungan hidup	**100%**	**100%**	25.020.250
			Sub Kegiatan : Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**100%**	**100%**	28.657.250
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	**100%**	**100%**	27.500.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2025	
						Target	Anggaran
			Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**	27.500.00
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	**100%**	**100%**	27.500.000
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	**100%**	**100%**	299.998.800
			Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**	299.998.800

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 yang merupakan acuan dalam penyusunan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama 1 (satu) tahun kedepan dan merupakan program dan kegiatan sangat prioritas yang harus dilaksanakan dan dicapai targetnya mengingat setiap saat kemungkinan terjadinya keterbatasan ketersediaan anggaran pembangunan dan pencapaian program dan kegiatan prioritas ini dapat menjadi bahan untuk pertimbangan dalam mengukur capaian kinerja OPD selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, maka keseluruhan rencana kegiatan setiap tahunnya telah tertuang dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara ini disusun dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

TARUTUNG, Oktober 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAPANULI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

HEBER SAUR MARULI TAMBUNAN, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741212 199303 1 001

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 -10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

DINAS PERPUSTAKAAN KAB. TAPANULI UTARA

TARUTUNG

2025

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2021

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,yang telah memberikan berkat rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Diharapkan kedepannya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2025, yang memuat program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara.

Dengan demikian diharapkan melalui Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 ini dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan Tata Kelola arsip yang dapat dicapai melalui peningkatan literasi masyarakat, meningkatkan tata kelola arsip serta meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Disadari bahwa Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan untuk selanjutnya.

Tarutung, Agustus 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

BUHA M. AUGUS SINAGA S.P,M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19730825 199803 1 003

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
BAB I : PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024..... **11**

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dan Target Capaian Renstra Dinas Perpustakaan Tahun 2019-2024..... 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 17

2.3 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara 19

2.4 Kondisi Umum Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara 20

2.5 Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara..... 23

2.6 Review terhadap Rancangan RKPD 25

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... **29**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 29

3.2 Tujuan Dinas Perpustakaan 30

3.3 Sasaran Dinas Perpustakaan 31

3.4 Program dan Kegiataan 36

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN TA. 2025..... **40**

BAB V : PENUTUP..... **43**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2019-2024 12

Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara Periode Triwulan II Tahun 2025 dan Target Capaian Renstra Tahun 2025-2029 14

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bdg Perpust ..... 18 Tahun 2020-2024

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024 19

Tabel 2.5 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Dinas Perpustakaan Tahun 2025-2029 22

Tabel 2.6 Review Terhadap Rencana Kerja Tahun 2025 26

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan Dinas Perpustakaan Tahun 2025 31

Tabel 3.2 Sasaran Dinas Perpustakaan Tahun 2025 33

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara 34

Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan Tahun 2019-2024 35

Tabel 3.5 Capaian Realiasasi Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan Tahun 2020-2024 36

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan/Alur Penyusunan Rencana Kerja 4
Gambar 1.2 Hubungan Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 5

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahun (Rencana strategis), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keberadaan dokumen Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan.

Sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir Tahun 2024.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman strategis bagi Pembangunan selama jangka waktu 2025-2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024. Penyusunan RPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 dan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan dalam RPJMD tahu 2019-2024.Sementara itu dengan disusunnya RPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026, maka sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap perangkat

daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (2025-2026) Tahun 2025-2026.

Pada tahun 2025, Kabupaten Tapanuli Utara memasuki babak baru kepemimpinan seiring dengan pelantikan Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara periode 2025–2030. Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025–2030, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025–2030. Dengan demikian, pasangan kepala daerah yang baru memiliki legitimasi penuh untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebagai tindak lanjut dari proses pelantikan tersebut, penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan daerah yang jelas, terarah, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. RPJMD akan menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Rencana Strategis (renstra) Tahun 2025-2029 disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*)

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini merupakan uraian dari pelaksanaan rencana strategis (renstra) Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029. Dimana penyusunan renstra tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029. Dimana pada renstra 2025-2029 diuraikan target pencapaian tujuan dan sasaran untuk tahun 2025-

2029 untuk urusan perpustakaan dan kearsipan yang menjadi tanggung jawab penuh Dinas Perpustakaan Kabupaten Utara yang akan diuraikan secara detail pelaksanaanya dalam bentuk Program dan Kegiatan Tahunan.

Setiap perangkat daerah akan berupaya untuk menyusun renja dengan kualitas yang baik, oleh karena itu salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterkaitan secara konsisten dan sinergis antara muatan materi renja dengan dokumen perencanaan lainnya secara komperehensif sehingga renja perangkat daerah secara konkrit dapat memberikan landasan hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang tidak terlepaskan dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Perda;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Perda;
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun renja sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang berisi rencana kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan perubahan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2025, yang memuat program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Tahun 2025 Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara dengan mengakomodir visi dan misi yang digariskan oleh Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dinas perpustakaan yang telah ditentukan sesuai Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029.

Adapun Bagan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah sebagaimana tercantum pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1
Tahapan/Alur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

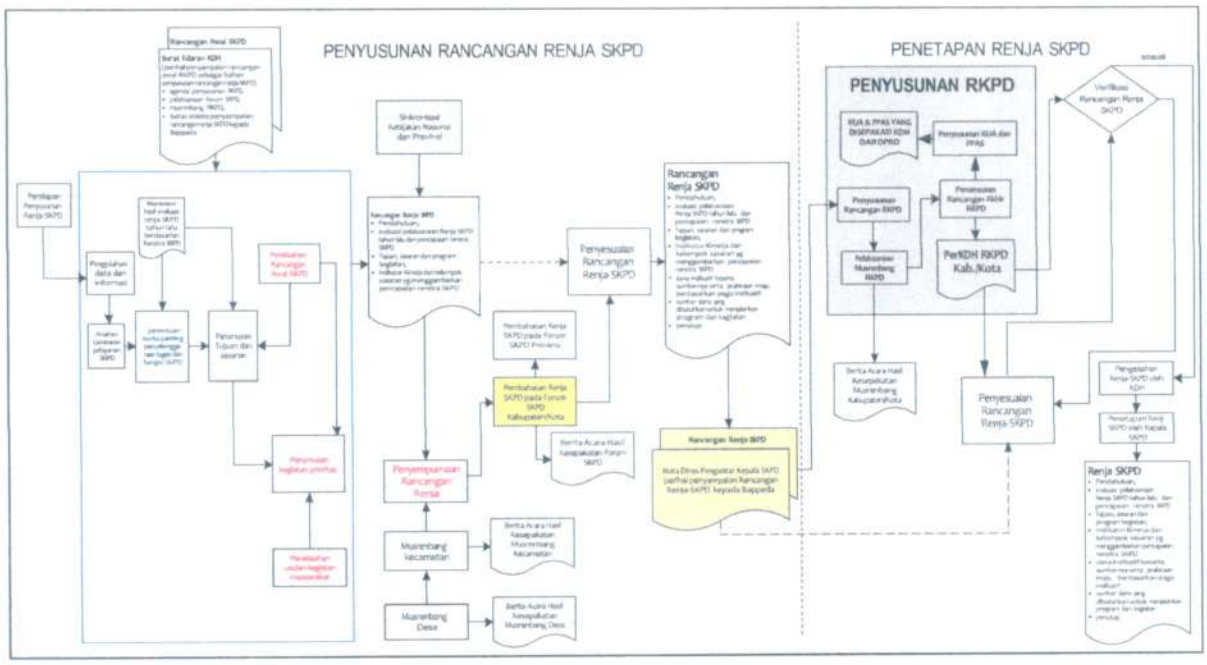

Sedangkan hubungan Rencana Kerja (Renja) dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada diagram alur di bawah ini :

Gambar 1.2
Hubungan Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

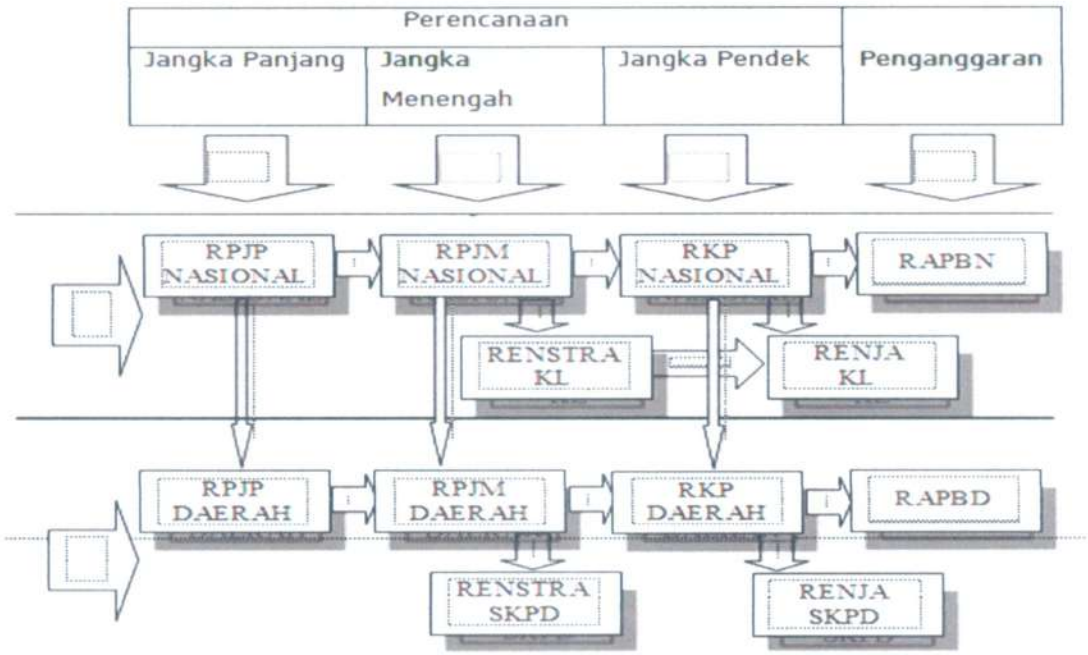

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 mempedomani ketentuan pada Pasal 346 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dimana melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini akan menjadi dasar/bahan penyusunan perubahan Rencana Kerja Program/Kegiatan Dinas Perpustakaan Tahun 2025; Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Sekaitan dengan itu Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah dokumen perubahan perihal perencanaan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2025, yang memuat program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada akhirnya dengan dilaksanakannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tahun 2025 selanjutnya serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun 2025 dan juga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undnag-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarea Republik Inonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah, dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2024;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
19. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
22. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 adalah untuk menetapkan perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan akan disesuaikan dengan situasi/kondisi yang dialami oleh Dinas Perpustakaan pada waktu yang berjalan saat ini.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
2. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja unit Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara serta sebagai acuan penentuan indikator program yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Merupakan komitmen bersama antara Pimpinan, Kepala Bidang,Kasubbag/Pejabat Fungsional dan semua pelaksana program/kegiatan pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara terhadap program dan kegiatan yang telah dituangkan selama satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN yang terdiri dari :

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN TAHUN 2024 DAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025, yang terdiri dari:

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dan Periode Triwulan II Tahun 2025 serta Target capaian Renstra Dinas Tahun 2025-2029.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perpustakaan

Kabupaten Tapanuli Utara
2.4 Kondisi Umum Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
2.5 Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam Pengembangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
2.6 Review terhadap Rancangan RKPD
2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan Dinas Perpustakaan
3.3 Sasaran Dinas Perpustakaan
3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB V. PENUTUP

BAB II.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024 DAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dan Periode Triwulan II Tahun 2025 serta Target capaian Renstra Dinas Perpustakaan Tahun 2019-2024.

Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang dinilai adalah untuk periode Triwulan II (Januari s/d Juni 2025) dan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perpustakaan dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatanyang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan 3 kondisi di atas ini nantinya akan dijelaskan faktor- faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perpustakaan. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dan periode Triwulan II Tahun 2025 beserta Target Capaian Renstra Tahun 2025-2029 disajikan pada **Tabel 2.1** dan **Tabel 2.2** di bawah ini:

EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 S/D TRIWULAN IV

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2024 PER TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024(%)		TINGKAT CA KINERJA DA REALISASI A RENJA PERA DAERAH TA (%)
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13= 6+12		14=13/5*100%		15= 12/
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		DINAS PERPUSTAKAAN			16.130.681.200		12.762.612.442		3.440.905.014										3.219.347.914,85		15.982.160.057			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang tertangani	100%	14.980.289.400	73,88%	11.055.683.945	100%	3.170.834.189	25%	468.956.781	25%	962.301.925	25%	747.552.486	25%	791.399.153	100%	2.969.437.323	173,88%	14.041.121.268	173,88%	93,73%	100,00%
		Perencanaan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan,Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tertangani	100%	186.217.300	100%	86.571.000	100%	14.116.300	0%	0	25%	3.589.000	25%	1.633.000	50%	7.771.100	100%	12.993.100	200%	99.564.100	200%	73,39%	100,00%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	8 Dok	21.124.900	6 Dok	11.593.500	2 Dok	2.499.700	0	0	0	0	1 dok	0	1 dok	2.063.000	2 dok	2.063.000	8 Dok	13.656.500	75%	64,65%	100,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	9.750.000	3 Dok	4.632.300	1 Dok	1.043.900	0	0	0	0	0	0	1 dok	1.630.600	1 dok	1.630.600	4 Dok	6.262.900	75%	64,23%	100,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 lap	37.805.800	4 Lap	24.569.300	1 Lap	2.499.700	0	0	3 lap	0	0	1.633.000	0	440.000	1 lap	2.073.000	5 lap	26.642.300	100%	70,47%	100,00%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 lap	67.536.900	48 lap	45.775.900	12 Laporan	7.275.000	0	0	3 lap	5.585.000,00	1 lap	0	4 lap	3.637.500	8 lap	7.226.500	56 lap	53.002.400	90%	78,48%	66,67%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertangani	100%	12.576.005.700	100%	9.557.831.591	100%	2.792.549.871	25%	451.156.781	25%	871.457.850	25%	658.816.218	25%	660.171.711	100%	2.640.733.116	200%	12.198.564.707	200%	97,00%	100,00%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediaanya Gaji dan Tunjangan ASN	60 lap	12.358.624.900	48 lap	9.404.102.591	12 laporan (35)	2.757.686.771	3 lap	451.156.781	3 lap	863.242.950	3 lap	648.864.318	3 lap	642.878.467	12 lap	2.606.142.516	60 lap	12.010.245.107	100%	97,16%	100,00%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 lap	179.768.400	48 lap	131.352.100	12 laporan	32.859.600	3 lap	0	3 lap	8.214.900	3 lap	8.214.900	3 lap	16.429.800	12 lap	32.859.600	60 lap	164.211.700	100%	91,35%	100,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 lap	37.412.400	4 lap	22.378.900	1 laporan	2.003.000	1 lap	0	0	0	0	1.731.000	0	0	1 lap	1.731.000	5 lap	24.109.900	100%	64,44%	100,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang tertangani	100%	702.215.600	100%	398.577.381	100%	80.265.050	16,6%	0	25%	27.825.125	25%	26.867.880	33,40%	19.464.600	100,0%	73.748.015	200,0%	472.325.396	200%	67,28%	100,00%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi disediakan	5 paket	19.104.300	4 paket	8.226.100	1 paket	1.888.800	0	0	0	0	1 paket	1.888.800	0	0	1 paket	1.888.800	5 paket	10.114.900	100%	52,95%	100,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 paket	117.065.200	38 paket	90.925.400	2 paket	16.319.150	0	0	0	0	1 paket	11.421.900	- 0	0	1 paket	11.421.900	39 paket	102.347.300	98%	87,43%	50,00%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60 paket	66.328.700	48 paket	30.078.400	12 paket	4.991.000	0	0	3 paket	2.500.000	2 paket	0	3 paket	2.491.000	8 paket	4.991.000	56 paket	35.069.400	93%	52,89%	66,67%
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 paket	40.682.800	48 paket	40.596.700	12 paket	5.581.900	0	0	3 paket	0	2 paket	3.266.000	3 paket	2.168.800	8 paket	5.436.800	56 paket	46.035.500	93%	113,16%	66,67%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.000 eksm	16.111.600	1700 eksm	12.710.000	300 Dok	3.905.500	60 dok	0	60 dok	975.375	90 dok	969.000	90 dok	1.227.600	300 dok	3.172.975	2.000 eksm	15.882.975	100,0%	98,58%	100,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 lap	442.942.000	190 Lap	216.038.781	70 Lap	47.379.000	0	0	48 lap	24.348.750	4 lap	9.320.180	8 lap	13.167.610	60 lap	46.836.540	220 lap	262.875.321	73,33%	59,35%	85,71%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani	100%	74.000.000	100%	12.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	100%	12.000.000	28,57%	16,22%	0,00%
		Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	14 unit	74.000.000	4 unit	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 unit	12.000.000	28,57%	16,22%	0,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi penunjang yang Tertangani	100%	1.258.514.300	100%	878.812.817	100%	254.194.268	25%	57.800.000	25%	57.685.550	25%	57.717.400	25%	81.746.599	100%	234.962.549	200%	1.113.775.366	200%	88,93%	100,00%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	60 lap	7.202.000	48 Lap	5.598.000	12 Laporan	150.000	0	0	0	0	0	0	4 lap	150.000	4 lap	150.000	52 lap	5.748.000	87%	79,81%	33,33%
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 lap	133.312.300	144 lap	28.429.400	36 Laporan	25.126.800	9 Lap	0	9 lap	2.795.550	9 lap	6.417.400	9 lap	11.510.400	36 lap	20.723.350	180 lap	49.152.750	100%	36,87%	100,00%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 lap	1.098.000.000	48 Lap	844.783.417	12 Laporan	229.017.468	2 lap	57.800.000	3 lap	54.900.000	3 lap	51.300.000	4 lap	70.089.199	12 lap	214.089.199	60 lap	1.058.874.616	100%	96,44%	100,00%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertangani	100%	253.336.500	100%	117.889.156	100%	29.707.200	0%	0	25%	1.754.400	50%	2.534.000	25%	22.742.143	100%	27.030.543	200%	144.889.699	200%	57,19%	100,00%

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	229.777.000	8 Unit	106.789.196	4 Unit	28.788.200	0	0	1 unit	1.734.400	1 unit	2.524.000	2 unit	21.821.143	4 unit	28.079.643	12 unit	132.888.699	120%	57,88%	100,00%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 unit	23.539.500	11 Unit	11.100.000	3 Unit	921.000	0	0	0	0	0	0	3 unit	921.000	3 unit	921.000	14 unit	12.021.000	70%	51,02%	100,00%
II	Meningkatkan Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**25,95%**	**2.843.695,800**	**14,64%**	**1.522.267.215**	**4,90%**	**250.070.825**	**0,88%**	**0**	**1,32%**	**1.500.000**	**2,04%**	**14.673.600**	**1,40%**	**195.925.891,86**	**5,58%**	**212.099.491,86**	**20,22%**	**1.794.966.706,86**	**78,83%**	**60,99%**	113,88%
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Jenis Layanan yang dikelola oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara**	**7 layanan**	**2.322.771,800**	**9 layanan**	**1.458.193.315**	**9 layanan**	**247.070.825**	**9 layanan**	**0**	**9 layanan**	**1.500.000**	**1 layanan**	**14.673.600**	**11 layanan**	**194.525.891,86**	**11 layanan**	**210.099.491,86**	**11 layanan**	**1.668.892.806,86**	**157%**	**71,85%**	122,22%
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management.)	2 layanan	421.066,800	2 layanan	225.888,242	2 layanan	50.334.200	2 layanan	0	2 layanan	1.500.000	2 layanan	0	2 layanan	42.889.010,86	2 layanan	44.389.010,86	2 layanan	270.277,253	100%	64,19%	100,00%
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	794 perpustakaan	1.532.205.000	712 perpustakaan	992.162.110	180 perpustakaan	152.440.225	0	0	45 perpustakaan	0	40 perpustakaan	14.673.600	49 perpustakaan	107.932.451	134 perpustakaan	122.606.051,00	828 perpus	1.114.768.161	104,28%	72,76%	74,44%
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola/ Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan.	130.387 eksm	389.500.000	04.535 eksm	240.142.963	7.000 eksm	44.296.400	0	0	0	0	0	0	27.924 eksemplar	43.704.430	27.924 eksemplar	43.704.430,00	82.459 eksm	283.847.393	101,59%	76,82%	103,42%
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah masyarakat/pelajar yang berprestasi gemar membaca**	**80 orang**	**520.924.000**	**6 orang**	**64.073.900**	**6 orang**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 orang**	**1.400.000**	**6 orang**	**1.400.000**	**12 orang**	**65.473.900**	**40%**	**12,57%**	100,00%
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10 lokus	520.924.000	2 lokus	64.073.900	2 lokus	3.000.000	0	0	0	0	0	0	2 lokus	1.400.000	2 lokus	1.400.000	4 lokus	65.473.900	40%	12,57%	100,00%
III	Meningkatkan tata kelola kearsipan yang baku pada Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																							
		Program Pengelolaan Arsip	**Persentase Pengelolaan Arsip Daerah**	**130%**	**306.696.000**	**84,82%**	**188.861.282**	**35%**	**20.000.000**	**27,35%**	**0**	**3,04%**	**0**	**2,56%**	**0**	**1,24%**	**17.811.100**	**34,19%**	**17.811.100**	119,01%	**206.672.382**	**91,55%**	**67,39%**	97,69%
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kot	**Persentase Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola secara baku**	**21,8%**	**306.696.000**	**123,52%**	**188.861.282**	**50%**	**20.000.000**	**27,35%**	**0**	**8,06%**	**0**	**10,72%**	**0**	**20,18%**	**17.811.100**	**66,31%**	**17.811.100**	191,93%	**206.672.382**	**88,00%**	**67,39%**	132,62%
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	185 berkas	250.032.000	127 berkas	178.311.782	55 berkas	17.471.125	102 berkas	0	209 berkas	0	12 berkas	0	316 berkas	15.417.100	459 berkas	15.417.100	588 berkas	193.728.882	316,76%	77,48%	834,55%
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	60 laporan	56.664.000	15 laporan	10.549.300	15 laporan	2.528.875	0	0	0	0	0	0	14 laporan	2.394.000	14 laporan	2.394.000	29 laporan	12.943.300	48,33%	22,84%	93,33%

EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2025 PER TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026(%)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)	
										I		II									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10= 8+9		11= 6+10		12=11/5*100%		13= 10/7*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		DINAS PERPUSTAKAAN			**16.890.125.358**		**1.307.724.535**		**3.434.271.122**		**661.225.981**		**646.498.554**		**1.307.724.535,00**		**2.615.449.070**				(%)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase realisasi Penyerapan Anggaran**	**100%**	**15.998.744.705**	**25,00%**	**1.306.224.535**	**100,00%**	**3.273.952.072**	**25,00%**	**661.225.981**	**25%**	**644.998.554**	**50%**	**1.306.224.535**	**75,00%**	**2.612.449.070**	**75,00%**	**16,33%**	**50,00%**	**39,90%**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan penganggaran da Evaluasi Kinerja perangkat daerah dengan tepat waktu**	**100%**	**83.658.500**	**25%**	**798.000**	**100%**	**6.551.600**	**25%**	**0**	**25%**	**798.000**	**50%**	**798.000**	**75%**	**1.596.000**	**75%**	**2%**	**50,00%**	**12,18**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	12	14.788.750	0	0	3	1.183.100	0	0	0	0	0 dok	0	0 Dok	0	50%	0,00%	50,00%	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	9.473.750	0	0	1	749.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	20.496.000	0	0	1	1.370.000	0	0	0	0	1 lap	0	2 lap	0	100%	0,00%	100,00%	0,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	38.900.000		798.000	12	3.249.000			1	798.000		798.000						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan prosedur dan tepat waktu**	**100%**	**14.583.572.666**	**40,91%**	**1.204.473.099**	**100%**	**2.944.278.672**	**25%**	**661.225.981**	**25%**	**543.247.118**	**50%**	**1.204.473.099**	**91%**	**2.408.946.198**	**91%**	**16,52%**	**50,00%**	**40,91**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196	14.389.907.316	36	1.204.473.099,00	36	2.909.684.072	36	661.225.981	36	543.247.118	72 Orang	1.204.473.099	108 Orang	2.408.946.198	32,50%	16,74%	32,50%	41,40
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	175.747.600	0	0	12	33.747.600	0	0	0	0	0 dok	0	0 dok	0	25%	0,00%	25,00%	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	17.917.750	0	0	1	847.000	0	0	0	0	1 lap	0	1 lap	0	100%	0,00%	100,00%	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah**	**100%**	**466.002.474**	**49,11%**	**28.615.000**	**100%**	**58.271.700**	**25%**	**0**	**25%**	**28.615.000**	**50,0%**	**28.615.000**	**99,1%**	**57.230.000**	**99%**	**12,28%**	**50,00%**	**48,11**
1	**MeningkatkanAkuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi disediakan	5	9.286.000	1	754.400	1	1.276.400	0	0	1	754.400	1 Paket	754.400	2 Paket	1.508.800	0%	16,25%	0,00%	59,10
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	112.251.122	0	0	1	8.070.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	34.583.800	6	2.200.000	12	4.611.000	0	0	5	2.200.000	5 paket	2.200.000	11 paket	4.400.000	16,67%	12,72%	16,67%	47,71
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	35.185.000	6	1.746.400	12	5.611.200	0	0	2	1.746.400	2 paket	1.746.400	8 paket	3.492.800	16,67%	9,93%	16,67%	31,12
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1800	10.950.000	30	216.000	360	2.190.000	0	0	30	216.000	30 dok	216.000	60 eksm	432.000	30,0%	3,95%	25,00%	9,86
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260	263.746.552	45	23.698.200	45	36.513.000	0	0	41	23.698.200	41 lap	23.698.200	86lap	47.396.400	11,76%	17,97%	22,22%	64,90
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya jasa layanan penunjang kegiatan urusan pemerintah daerah**	**100%**	**729.856.000**	**100%**	**66.839.436**	**100%**	**245.427.100**	**25%**	**0**	**25%**	**66.839.436**	**50%**	**66.839.436**	**150%**	**133.678.872**	**150%**	**18,32%**	**50,00%**	**27,23**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	30	750.000	0		6	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0,00
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180	196.600.000	36	5.985.600	36	37.675.100	0	0	4	5.985.600	4 lap	5.985.600	40 lap	11.971.200	25%	6,09%	25,00%	15,89
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	532.500.000	12	60.853.836	12	207.672.000	0	0	6	60.853.836	6 Laporan	60.853.836	18 lap	121.707.672	0%	22,86%	0,00%	28,30

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi terawat/terpelihara**	**100%**	**195.661.065**	**100%**	**5.499.000**	**100%**	**19.423.000**	**25%**	**0**	**25%**	**5.499.000**	**50%**	**5.499.000**	**150%**	**10.998.000**	**150%**	**8%**	**50,00%**	**28,31**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	109.620.065	4	5.099.000	4	16.788.100	0	0	1	5.099.000	1 unit	**5.099.000**	5 Unit	0	12,50%	0%	25,00%	30,01
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	18	26.041.000	3	460.000	3	2.633.900	0	0	1	460.000	1 Unit	460.000	4 Unit	920.000	0%	3,53%	0,00%	17,46
II	Meningkatkan literasi masyarakat	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**	**71,06**	**593.027.719**	**69,26**	**1.500.000**	**69,26**	**84.891.875**	**0**	**0**	**0,00%**	**1.500.000**	**0,00**	**1.500.000**	**69,26**	**1.000.000,00**	**97,47%**	**1%**	**0,00%**	**1,77**
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Jumlah Perpustakaan yang telah dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)**	**25,20**	**593.027.719**	**18,50**	**0**	**18,50**	**84.891.875**	**3,6%**	**0**	**8,9%**	**0**	**12,5%**	**0,00**	**21,4%**	**3.000.000,00**	**100%**	**0,51%**	**100,00%**	**0,00**
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	5	81.000.000	3	1.500.000	3	8.708.400	0	0	3 Layanan	1.500.000	3 layanan	**1.500.000,00**	3 layanan	3.000.000	100%	3,70%	100,00%	17,22
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/kota sesuai kewenangannya	603	474.179.119	0	0	103	73.843.075	20 Perpustakaan	0	50 Perpustakaan	0	70 Perpustakaan	**0,00**	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	35000	37.848.600	0	0	29500	2.340.400	27924 Eksm	0	0	0	27924 Eksm	**0,00**	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
III	Meningkatkan tata kelola kearsipan yang baku pada perangkat daerah di Kab. Tapanuli Utara	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																				
		Program Pengelolaan Arsip	**Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional**	**70,15%**	**298.352.934**	**0,0%**	**0**	**64,3%**	**75.427.175**	**13,35%**	**0**	**27,06%**	**0**	**40,41%**	**0**	40,41%	**0**	**57,61%**	**0,00%**	62,85%	0,00
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Persentase Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola secara baku oleh Daerah Kabupaten/Kota**	**72,27%**	**298.352.934**	**0,0%**	**0**	**67,1%**	**75.427.175**	**12,57%**	**0**	**26,50%**	**0**	**39,07%**	**0**	39,07%	**0**	**54,06%**	**0,00%**	58,23%	0,00
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	8804	298.352.934	0	0	1304	75.427.175	164	0	346	0	0	0	0,0%	0	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	0,00

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara periode Triwulan II (Januari s/d Juni 2025) dengan total anggaran sebesar **Rp. 3.434.271.122,-** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki nilai total pagu anggaran sebesar Rp 3.273.952.072,- (dengan rincian Pagu Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah selain anggaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 364.268.000,- sementara pagu anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.909.684.072,-. Dimana realisasi anggaran sebesar untuk kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 1.306.224.535.- (dengan rincian: realisasi penyerapan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 1.204.473.099,- dan penyerapan Kegiatan dan sub kegiatan lainnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp 101.751.436,-) dengan persentase realisasi penyerapan anggaran sebesar 39,90%.
2. Program Pembinaan Perpustakaan dimana Program ini memiliki nilai total pagu anggaran sebesar Rp 84.891.875,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.500.000,- atau dengan persentase realisasi penyerapan anggaran sebesar 1,77%,. Berdasarkan kondisi diatas, maka dapat disimpulkan untuk periode triwulan II penyerapan anggaran pada Program Pembinaan perpustakaan masih tergolong rendah. Hal ini bukan oleh disebabkan pada bidang perpustakaan belum sama sekali melaksanakan kegiatannya di lapangannya. Kegiatan-kegiatan pada program perpustakaan telah terlaksana sebagian akan tetapi proses pencairan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya belum terealisasi pencairan berhubung masih proses pencairan di bagin bendahara sehingga akan muncul pada periode bulan berikutnya. Dimana hal ini menyebabkan seakan-akan kegiatan-kegiatan pada program pembinaan perpustakaan terlambat pelaksanaan penyerapan anggaran kegiatan yang telah tersedia .
3. Sedangkan pada Program Pengelolaan Arsip yang memiliki anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp.75.427.175,- sama sekali belum memiliki penyerapan anggaran. Adapun kegiatan pada Program Pengelolaan Kearsipan direncanakan pada Sistem Keuangan Pemerintah Daerah (SIPD) dimulai dari Triwulan II, serta bidang pengelola

kearsipan juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya akan tetapi untuk proses pencairan untuk kegiatan terssebut belum terealisasi pada periode ini, sehingga penyerapan anggaran untuk Program Pengelolaan Arsip masih nihil.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya yang memerlukan pelayanan perpustakaan maupun pelayanan kearsipan. Sementara itu Tolak ukur kinerja yang dapat diterapkan dalam penetapan Indikator Kinerja adalah berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perpustakaan yaitu sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
2. Tingkat Digitalisasi Arsip;
3. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 dapat dilihat capaian pada **Tabel 2.3** dibawah ini:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat	0	10,84	12,29	12,82	30,11
2.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	10,63	10,39	12,69	13,16	68,96
3.	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan penduduk	8,52	8,35	8,36	8,48	8,75
4.	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	2,74	2,66	4,37	4,87	5,58
5.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,017	0,017	0,02	0,03	0,15
6.	Jumlah perpustakaan umum di tingkat kabupaten (unit)	1	1	1	1	1
7.	Jumlah perpustakaan umum di tingkat desa/kel (unit)	3	3	3	3	28
8.	Jumlah sarana perpustakaan keliling (unit)	2	2	2	2	2
9.	Jumlah pengunjung perpustakaan umum kabupaten per tahun	6.818	6.956	11.446	12.745	15.009
10.	Rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	18,67	19,05	31,35	34,91	41,12
11.	Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikat	1	-	-	2	3
12.	Rasio Perpustakaan Per satuan Penduduk	0,42	0,812	0,815	0,819	1,031
13.	Persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan Perpustakaan	2,24	2,73	15,27	29,96	40,73

Dari tabel capaian indikator diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Tapanuli Utara masih rendah yaitu sebesar 30,11 persen. Sementara itu untuk Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat termasuk tinggi yaitu sebesar 68,96 persen. Sementara itu untuk Jumlah Pustakawan yang memiliki sertifikat memang mengalami peningkatan tetapi masih membutuhkan dorongan/strategi yang kuat untuk dapat meningkatkan indikator tersebut. Menurut standar IFLA/UNESCO, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum adalah 1:2500, artinya maksimal 1 orang tenaga perpustakaan melayani 2.500 orang penduduk. Sedangkan pada saat ini, perpustakaan hanya memiliki 3 orang tenaga pustakawan yang memiliki sertifikat yang dimana hal ini akan mempengaruhi capaian tingkat literasi masyarakat.

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kab.Tapanuli Utara
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Persen	48,89	51,11	51,11	53,33	55,56
2.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Persen	100	100	34,01	52,50	78,90
3.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Persen	100	100	57,72	42,64	70,02
4.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	Persen	100	13,74	45,98	45,98	95,39
5.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	75	75	26,24	26,24	63,51

2.3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak yang dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.Tujuan dari perumusan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Pada bagian ini mereviu

kembali faktor- faktor pelayanan Perangkat Daerah yang menimbulkan isu strategis dari permasalahan- permasalahan yang ada berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara maka rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yang akan didukung melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029.

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, **Isu Strategis** Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Masih rendahnya literasi masyarakat;
2. Optimalisasi tata kelola kearsipan di Kabupaten Tapanuli.

2.4 Kondisi Umum Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara

Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat menghendaki perubahan dan evaluasi serta penyempurnaan kea rah terwujudnya administrasi publik yang semakin transparan dan akuntabel,serta tuntutan untuk dapat dilayani berbagai macam jasa layanan perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menjadikan perpustakaan sebagi sumber belajar yang efektif. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan mulai dari penciptaan sampai dengan penyusutan dan pelestarian sehingga peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, peningkatan sarana prasarana kerja dan peningkatan manajemen kearsipan menjadi suatu hal yang penting.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Literasi adalah kemampuan untuk mengindentifikasi, memahami, menafsirkan,menciptakan, mengkomunikasikan dan menghitung menggunakan materi cetak dan tertulis dalam berbagai konteks. Literasi mencakup sebuah proses pembelajaran berkelanjutan yang memungkinkan individu mencapai tujuan dan mengembangkan potensinya. Peningkatan literasi masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh perpustakaan. Literasi masyarakat yang meningkat akan

berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi modal dasar bagi Indonesia untuk bersaing di kancah internasional.

Dengan adanya audit dan pengawasan kearsipan, diharapkan dapat terwujud pengelolaan kearsipan yang lebih baik. Terciptanya budaya tertib arsip yang berkesinambungan dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian dapat terwujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga memori kolektif bangsa.

Sesuai Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pada Pasal 16 ayat 2 bahwasanya dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan kearsipan, ANRI dibantu oleh Lembaga dan/atau unit kearsipan bekerja sama dengan Lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya. Kemudian pada Pasal 16 ayat 3 menyatakan bahwa pengawasan di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementrian lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

. Dalam mendukung mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan maka Dinas Perpustakaan memiliki 3 sasaran yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 dan terlihat pada **Tabel 2.5** dibawah ini:

Tabel 2.5

Keterkaitan Tujuan, Sasaran Dinas Perpustakaan

Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target (Tahun)				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan tata Kelola arsip	Meningkatkan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	35	40	45	50	55
		Meningkatkan tata kelola arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	17,14	22,29	26,74	33,1	42,01
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	69	70	72	73	74

Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diatur berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara diuraikan sebagai berikut :

- **Kedudukan** : Dinas Perpustakaan merupakan Unsur pendukung tugas Bupati, yang
  dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada
  Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- **Tugas** : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

- **Fungsi** :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerinahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5 Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam Pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Sementara itu dalam peningkatan pengembangan pelayanannya, Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara memiliki tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan ke depan antara lain :

a. Tantangan yang dihadapi Bidang Perpustakaan:

1. Perkembangan era digitalisasi dan globalisasi dimana sebagian kebutuhan informasi akan buku, literatur dan bahan pustaka lainnya dapat diakses melalui perangkat elektronik sehingga berpotensi menurunkan jumlah pemustaka ke perpustakaan;
2. Minimnya kemampuan Sumber Daya Perpustakaan yang dibina di Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membaca atau literasi di tengah gencarnya arus globalisasi teknologi informasi;
4. Komitmen dan dukungan pentingnya penyelenggaraan kearsipan rendah, sehingga Arsip Perangkat Daerah belum tertata dengan baik di setiap perangkat daerah / pencipta arsip;

5. Minimnya Publikasi dan Promosi Kearsipan bagi kalangan masyarakat;
6. Jumlah Koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyrakat Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Kualitas tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan masih belum memadai (pustakawan memiliki sertifikasi) dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan dan arsip juga masih terbatas;
8. Layanan perpustakaan keliling belum menjangkau ke seluruh wilayah/pedesaan di Kabupaten Tapanuli Utara karena keterbatasan tersedia sarana mobil keliling perpustakaan.

2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara ke depan antara lain :

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Utara merupakan gambaran peningkatan kualitas hidup. Peningkatan IPM berkaitan erat dengan peningkatan kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi di tengah arus reformasi dan globalisasi. Kondisi ini dapat mendukung upaya peningkatan kegemaran membaca dan mengakses arsip untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan dapat dimanfaatkan dalam administrasi pemerintahan sehingga dapat meningkatkan jumlah arsip baik dinamis maupun statis di setiap perangkat daerah;
3. Adanya kesempatan meningkatkan pemberdayaan minat masyarakat terhadap perpustakaan yang dicanangkan program pusat melalui Program Perpustakaan Berbasis inklusi sosial;
4. Dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemerintahan berbasis TIK *(e-Government)* terbuka peluang bagi Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara untuk menyediakan Pelayanan Perpustakaan berbasis TIK *(e-Perpustakan)* dan Pelayanan Kearsipan berbasis TIK, kearsipan (*e-Archive*); seperti: penerapan SRIKANDI maupun

digitalisasi kearsipan dan layanan perpustakaan berbasis IT;

5. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara dapat menjadi simpul pemersatu bangsa dan sumber naskah arsip bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana motto ANRI, melalui akuisisi arsip-arsip penting (asli/salinan/fotocopy) OPD yang direncanakan akan disimpan di Depo Arsip Kabupaten Tapanuli Utara ;
6. Promosi layanan perpustakaan dan kearsipan melalui brosur, poster, web dan facebook serta media sosial lainnya;
7. Dukungan anggaran untuk mewujudkan sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara sesuai tuntutan yang diharapkan organisasi Pemerintah dan masyarakat ke depan.

2.6 Review terhadap Rancangan RKPD

Adapun hasil perbandingan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam Renja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara tertuang pada **Tabel 2.6** di bawah ini:

Tabel 2.6

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Sumber Dana	Catatan Penting
						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Hasil)/ Kegiatan (Keluaran)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Hasil)/ Kegiatan (Keluaran)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1						**DINAS PERPUSTAKAAN**				**3,434,271,122**					**3,076,125,148**		
	2	23				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**3,358,843,947**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**3,000,697,973**		
	2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran**	Dinas Perpustakaan	100%	**3,273,952,072**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani**	Dinas Perpustakaan	100%	**2,873,369,248**	DAU	
	2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Tepat Waktu**	Dinas Perpustakaan	100%	**6,551,600**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dinas Perpustakaan	100%	**7,862,600**	DAU	
	2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan	3 Dokumen	1,183,100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan	3 Dokumen	1,183,100	DAU	
	2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dinas Perpustakaan	1 Dokumen	749,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dinas Perpustakaan	1 Dokumen	749,500	DAU	
	2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Dinas Perpustakaan	1 Laporan	1,370,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Dinas Perpustakaan	1 Laporan	1,370,000	DAU	
	2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan	12 Laporan	3,249,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan	12 Laporan	4,560,000	DAU	
	2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Prosedur dan Tepat Waktu**	Dinas Perpustakaan	100%	**2,944,278,672**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dinas Perpustakaan	100%	**2,601,406,998**	DAU	
	2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan	(36 orang/bulan)	2,909,684,072	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan	(36 orang/bulan)	2,566,812,398	DAU	
	2	23	01	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perpustakaan	12 Dokumen	33,747,600	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perpustakaan	12 Dokumen	33,747,600	DAU	
	2	23	01	2.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Dinas Perpustakaan	1 Laporan	847,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Dinas Perpustakaan	1 Laporan	847,000	DAU	
	2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Layanan Administrasi umum Penunjang Kegiatan Perangkat**	Dinas Perpustakaan	100%	**58,271,700**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang**	Dinas Perpustakaan	100%	**60,372,100**	DAU	
	2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi disediakan	Dinas Perpustakaan	1 Paket	1,276,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Dinas Perpustakaan	1 Paket	1,276,400	DAU	
	2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Perpustakaan	1 Paket	8,070,100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Dinas Perpustakaan	1 Paket	8,070,100	DAU	
	2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas Perpustakaan	12 Paket	4,611,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas Perpustakaan	12 Paket	4,611,000	DAU	
	2	23	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Dinas Perpustakaan	12 Paket	5,611,200	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Dinas Perpustakaan	12 Paket	7,711,600	DAU	
	2	23	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dinas Perpustakaan	360 Dokumen	2,190,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dinas Perpustakaan	360 Dokumen	2,190,000	DAU	
	2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perpustakaan	45 Laporan	36,513,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perpustakaan	45 Laporan	36,513,000	DAU	
	2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Layanan Penunjang Kegiatan Urusan Pemerintah Daerah**	Dinas Perpustakaan	100%	**245,427,100**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Yang Tertangani**	Dinas Perpustakaan	100%	**155,152,900**	DAU	
	2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perpustakaan	6 Laporan	80,000	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perpustakaan	6 Laporan	80,000	DAU	
	2	23	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Perpustakaan	36 Laporan	37,675,100	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Perpustakaan	36 Laporan	37,675,100	DAU	
	2	23	01	2.08	04	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perpustakaan	12 Laporan	207,672,000	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perpustakaan	12 Laporan	117,397,800	DAU	
	2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dinas Perpustakaan	100%	**19,423,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Dinas Perpustakaan	100%	**48,574,650**	DAU	
	2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Perpustakaan	4 Unit	16,789,100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Perpustakaan	4 Unit	45,940,750	DAU	

	2	23	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Dinas Perpustakaan	3 Unit	2,633,900	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dinas Perpustakaan	3 Unit	2,633,900	DAU
	2	23	02				**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	Dinas Perpustakaan	**4.92%**	**84,891,875**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan**		**4.92%**	**127,328,725**	
	2	23	02	2.01			**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Perpustakaan yang telah dikelola sesuat Standard Nasional Perpustakaan (SNP)**	Dinas Perpustakaan	**18.50%**	**84,891,875**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Jenis Layanan yang dikelola oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Tapanuli**		**18.50%**	127,328,725	PAD
	2	23	02	2.01	01		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan	Dinas Perpustakaan	3 Layanan	8,708,400	**Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik**	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	Dinas Perpustakaan	3 Layanan	8,708,400	PAD
	2	23	02	2.01	02		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Dinas Perpustakaan	103 Perpustakaan	73,843,075	**Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai	Dinas Perpustakaan	103 Perpustakaan	116,279,925	PAD
	2	23	02	2.01	09		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	29.500 eksemplar	2,340,400	**Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka**	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman	Dinas Perpustakaan	29.500 eksemplar	2,340,400	PAD
5	2	24					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**					
	2	24	02				**Program Pengelolaan Arsip**	**Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggung Jawaban Nasional**	**Dinas Perpustakaan**	**64.3%**	**75,427,175**	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase arsip daerah yang diselamatkan**	**Dinas Perpustakaan**	**64.3%**	**75,427,175**	PAD
	2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola secara baku Oleh Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan	67.1%	75,427,175	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola secara baku	Dinas Perpustakaan	67.1%	75,427,175	PAD
	2	24	02	2.01	01		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	Dinas Perpustakaan	1304 Berkas	75,427,175	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	Dinas Perpustakaan	1304 Berkas	75,427,175	PAD

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan dari masyarakat yang merupakan salah satu instrumen penyusunan perencanaan pembangunan dengan sistem partisipasi langsung masyarakat dengan melalui Musrenbang yang dimulai dengan Musrenbang tingkat lingkungan/dusun, Kelurahan/Desa, Kecamatan serta kabupaten sampai dengan musrenbang tingkat nasional.

Berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten Tahun 2025 yang difasilitasi oleh Bappedalitbang Kabupaten Tapanuli Utara, tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM maupun asosiasi-asosiasi yang langsung ditujukan kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi pada tahap ini Dinas Perpustakaan tidak melakukan penelahaan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat pada Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Identifikasi arah kebijakan dan strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 43 Tahun 2007. Berdasarkan BAB VII Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Pasal 74 bahwasanya:

a. Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui :
   1. Gerakan nasional gemar membaca;
   2. Peningkatan penyediaan koleksi buku perpustakaan baik buku fisik maupun buku digital (*e-book*);
   3. Pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
   4. Pengadaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu (Pojok baca, Titik Baca Digital)
   5. Taman bacaan masyarakat;
   6. Rumah baca;
   7. Kegiatan sejenis lainnya.
b. Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
c. Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghargaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Salah satu ayat pada pasal 74 point1 sampai dengan 7 yang berkaitan dengan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yakni pengadaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau seperti :peningkatan pelayanan berbasis inklusi soSial (seperti: Pembinaan perpustakaan sekolah/ desa; layanan perpustakaan keliling), peningkatan layanan perpustakaan digital, pembentukan taman bacaan dan rumah baca bagi masyarakat sebagai sarana yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pada Bab VIII Kewajiban Penyelenggaraan Perpustakaan, Pasal 80 penyelenggara perpustakaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk :

a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah.
b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing masing.
c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.
e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah
f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Pada pasal 81 memuat sanksi bagi pemerintah provinsi dan dan kabupaten/kota yang melanggar ketentuan pasal 80 dikenai sanksi administratif berupa :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian bantuan pembinaan.

3.2 Tujuan Dinas Perpustakaan

Sesuai RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 maka Dinas Perpustakaan memiliki tujuan berupa meningkatnya kualitas pendidikan dan tata kelola arsip. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka Dinas Perpustakaan sebagai salah satu lembaga di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dan sasaran organisasi yang diinginkan untuk diwujudkan merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 . Perencanaan yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi, perlu dicermati dengan sebaik-baiknya.

Adapun Tujuan Dinas Perpustakaan sesuai RPD 2025-2026 ialah Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat, akan tetapi setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 maka Tujuan Dinas Perpustakaan menjadi yaitu Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Tata Kelola Arsip.

Tabel 3.1

Perubahan Tujuan Dinas Perpustakaan Tahun 2025

No.	Tujuan Awal (sesuai RPD 2025-2026)	Perubahan Tujuan (sesuai RPJMD 2025-2029)
1.	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Tata Kelola arsip

3.3 Sasaran Dinas Perpustakaan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan.

Sasaran Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan berdasarkan pada tujuan Dinas Perpustakaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana Tujuan Dinas Perpustakaan yaitu meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Tata Kelola Arsip adalah merupakan sasaran yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 sesuai dengan keterkaitan pada Misi ,

dimana Dinas Perpustakaan termasuk ke dalam Misi ke 3 yaitu Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata,Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan.

Adapun rumusan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2029 yaitu :

a. Meningkatkan Literasi Masyarakat

b. Meningkatkan tata kelola arsip

c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Dengan Indikator sasaran untuk mencapai 3 sasaran strategis diatas, yaitu :

a. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Dalam rangka mencapai sasaran strategis pertama yaitu meningkatkan Literasi Masyarakat, dapat diperoleh dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun Formulasi Pengukuran:

(Dengan menghitung Jumlah dari hasil perbandingan 7 Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat(UPLM) dengan Aspek Masyarakat(AM) x 100)

b. Tingkat Digitalisasi Arsip

Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu meningkatkan tata kelola arsip dapat diukur dengan semakin meningkatnya Tingkat Digitalisasi Arsip yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara itu Adapun Formulasi pengukuran Tingkat Digitalisasi Arsip adalah dengan cara:

(Jumlah Nilai Akhir Aspek Kebijakan + Nilai Akhir Implementasi Kebijakan)

c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai dengan meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan meningkatkan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP. Adapun Formulasi Pengukurannya ialah : (*Sesuai dengan Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara*).

Adapun sasaran Dinas Perpustakaan juga mengalami perubahan seperti halnya perubahan tujuan Dinas Perpustakaan, dimana hal ini disebabkan adanya transisi dari sasaran yang terdapat pada RPD Kabupaten Tapanuli Utara 2025-2026 kemudian disempurnakan dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029, atau dapat dilihat pada **Tabel 3.2** dibawah ini:

Tabel 3.2

Perubahan Sasaran Dinas Perpustakaan Tahun 2025

No	Sebelum			Sesudah		
	Sasaran sesuai RPD 2025-2026	**Indikator sasaran sesuai RPD**	**Target 2025**	**Sasaran sesuai RPJMD 2025-2029**	**Indikator sasaran sesuai RPJMD**	**Target 2025**
1.	Meningkatkan Literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Nilai)	12,98	Meningkatkan Literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	35
2.	Meningkatkan Tata Kelola kearsipan baku pada perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (%)	57,77	Meningkatkan Tata Kelola arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	17,14
3.	Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP (Nilai)	70	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	69

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan saat ini (sesuai RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029) dapat kita lihat pada **Tabel 3.3** dibawah ini :

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kelompok Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Tata kelola arsip	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS)	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Masyarakat dan Perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara	= ∑ UPLM / AM X 100 UPLM 1: Pemerataan Layanan Perpustakaan; UPLM 2 : Ketercukupan Koleksi; UPLM 3 : Ketercukupan tenaga perpustakaan; UPLM 4 : Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5: Perpustakaan ber SNP UPLM 6 : Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan; UPLM 7 : Anggota perpustakaan AM : Aspek Masyarakat (AM)	Nilai	30,11	35	40	45	50	55	60
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Meningkatnya tata kelola arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara	= Nilai Akhir Aspek Kebijakan + Nilai Akhir Implementasi Kebijakan	Nilai	10,71	17,14	22,29	26,74	33,1	42,01	50
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	Sesuai dengan Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara	Nilai	67,93	69	70	72	73	74	75

Sementara itu adapun Tujuan dan Sasaran Startegis Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode sebelumnya yaitu pada Perubahan Rencana Startegis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2024 memiliki Tujuan dan Sasaran yang berbeda dengan Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditentukan pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029 dimana penyusunan Rencana Strategis ini berdasarkan dengan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 3.4** dibawah ini:

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara
Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun-				
				2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1.	Memenuhi Standar Pendidikan	Meningkatkan Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan Perpustakaan (%)	1,5	1,5	1,3	1,9	2,4	40,44
			Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (Nilai)	8,35	8,68	9,01	9,34	9,67	8,51
		Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	60	60	70	70	72	68
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan yang baku pada Perangkat Daerah di Kab.Tap. Utara	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (%)	48,89	48,89	48,89	51,1	53,33	55,56

Adapun realisasi capaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 3.5** dibawah ini:

Tabel 3.5
Capaian realisasi indikator tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan Tahun 2020-2024

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,42	0,44	0,45	0,46	0,83	0,42	0,812	0,815	0,819	1,031
2.	Persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan Perpustakaan	1,5	1,3	1,9	2,4	40,44	2,24	2,73	15,27	29,96	40,73
3.	Rasio Ketercukupan Koleksi perpustakaan	8,68	9,01	9,34	9,67	8,51	7,96	8,35	8,36	8,48	8,75
4.	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	60	70	70	72	68	51,48	54,70	59,71	67,93	67,93*
5.	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	48,89	48,89	51,1	53,33	55,56	48,89	51,1	51,1	53,33	55,56

*= Nilai Hasil Evaluasi AKIP dianggap sama dengan tahun sebelumnya,berhubung penilaian dilakukan N+1

3.4 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktiviats pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai (outcome) suatu program.

Pada Tahun 2025 penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah; dimana seluruh Program/kegiatan/Sub kegiatan telah dilakukan penginputan secara online melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) serta telah berlaku untuk seluruh instansi di Republik Indonesia.

Program pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara guna mencapai tujuan dan sasaran. Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara :

1. Memperhatikan kepentingan masing-masing bidang, sub bagian, dan kepala seksi.
2. Memperhatikan program kerja kabupaten Tapanuli Utara.
3. Mempertimbangkan keadaan masa lampau, kini, dan masa yang akan dating, termasuk didalamnya unsur-unsur yang diperhatikan terkait orientasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
4. Memperhatikan skala prioritas yang menunjang visi dan misi
5. Memperhatikan realisasi setiap tahun rencana strategis Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pengelolaan Arsip;

Sedangkan penjabaran kegiatan dari Program-Program yang dimaksud yaitu:

A. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA,** yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

   1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan terdiri dari :
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut:
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah:
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan terdiri dari :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan terdiri dari:
   - Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya;

B. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN, yang terdiri dari;

1. Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik,

      dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
      - Penyediaan Jasa Information Communication Technology (ICT);

b. Sub Kegiatan: Pengembangan Perpustakaan di Tingkat daerah Kabupaten/Kota,

dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:

- Operasional MPK
- Koordinasi, Pembinaan dan Supervisi pada Perpustakaan Umum,Khusus dan Perpustakaan Sekolah
- Jasa Administrasi UPTD Siborong-borong
- Jasa Administrasi UPTD Pangaribuan
- Pembuatan ID Card Anggota Perpustakaan
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Perpustakaan Daerah

c. Sub Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pengolahan dan Penataan Bahan Koleksi Pustaka

C. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP, yang terdiri dari:

1. Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan : Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis, dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- Pembinaan Pengelolaan arsip
- Prasarana Kearsipan
- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA)
- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD)
- Sosialisasi Aplikasi Srikandi.

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2025

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2025-2029 yang telah disususn sebelumnya, untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (Outcome) suatu program.

Program dan Kegiatan prioritas pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 berisi rancangan tentang program dan kegiatan yang dipersiapkan untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun penjabaran Program, Kegiatan maupun sub kegiatan daripada Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 beserta perkiraan maju Tahun 2026 disajikan pada **Tabel 4.1** di bawah ini:

Tabel 4.1

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 dan PRAKIRAAN MAJU PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2026

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Hasil) / Kegiatan (Keluaran)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						DINAS PERPUSTAKAAN				**3,434,271,122**				**3,021,759,429**
1	**2**	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi Penyerapan Anggaran**	**Dinas Perpustakaan**	**100%**	**3,273,952,072**	**DAU**	**Utama**	**100%**	**2,937,971,704**
	2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan penganggaran da Evaluasi Kinerja perangkat daerah dengan tepat waktu**	**Dinas Perpustakaan**	**100%**	**6,551,600**	**DAU**	**Utama**	**100%**	**15,658,500**
	2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan	2 Dokumen	1,183,100	**DAU**	Utama	2 Dokumen	2,957,750
	2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perpustakaan	1 Dokumen	749,500	**DAU**	Utama	1 Dokumen	1,894,750
	2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perpustakaan	1 Dokumen	1,370,000	**DAU**	Utama	1 Dokumen	3,826,000
	2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan	12 Laporan	3,249,000	DAU	Utama	12 Laporan	6,980,000
	2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan prosedur dan tepat waktu**	**Dinas Perpustakaan**	**100%**	**2,944,278,672**	**DAU**	**Utama**	**100%**	**2,680,190,520**
	2	**23**	**01**	**2.02**	**01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan	36 Orang/Bulan	2,909,684,072	DAU	Utama	12 Laporan	2,643,525,170
	2	23	01	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perpustakaan	12 Dokumen	33,747,600	DAU	Utama	12 Dokumen	33,747,600
	2	23	01	2.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perpustakaan	1 Laporan	847,000	DAU	Utama	1 Laporan	2,917,750
	2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah**	**Dinas Perpustakaan**	**100%**	**58,271,700**	**DAU**	**Utama**	**100%**	**83,486,784**
	2	23	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi disediakan	Dinas Perpustakaan	1 paket	1,276,400	DAU	Utama	1 paket	1,286,000
	2	23	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Perpustakaan	1 paket	8,070,100	DAU	Utama	1 paket	17,815,784
	2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas Perpustakaan	12 paket	4,611,000	DAU	Utama	12 paket	6,837,000
	2	23	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Dinas Perpustakaan	12 paket	5,611,200	DAU	Utama	12 paket	6,837,000
	2	23	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dinas Perpustakaan	360 dokumen	2,190,000	DAU	Utama	360 dokumen	2,190,000
	2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perpustakaan	45 laporan	36,513,000	DAU	Utama	45 laporan	48,521,000
	2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa layanan penunjang kegiatan urusan pemerintah daerah**	Dinas Perpustakaan	100 Persen	**245,427,100**	DAU		100 Persen	**133,700,000**
	2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perpustakaan	6 laporan	80,000	DAU	Utama	12 laporan	100,000
	2	23	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Perpustakaan	36 Laporan	37,675,100	DAU	Utama	36 Laporan	33,600,000
	2	23	01	2.08	04	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perpustakaan	12 laporan	207,672,000	DAU	Utama	12 laporan	100,000,000
	2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi terawat/terpelihara**	Dinas Perpustakaan	100 Persen	**19,423,000**	DAU	Utama	100 Persen	**24,935,900**
	2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Perpustakaan	4 Unit	16,789,100	DAU	Utama	2 Unit	23,388,700
	2	23	01	2.03	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Perpustakaan	2 unit	2,633,900	DAU	Utama	4 Unit	1,547,200
2	**2**	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								
	2	**23**	**02**			**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**	**Dinas Perpustakaan**	**69.26%**	**84,891,875**	**PAD**	**Utama**	**69.66%**	**71,787,725**

	2	23	02	2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perpustakaan yang telah dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Dinas Perpustakaan	18.50%	84,891,875	PAD	Utama	19.80%	71,787,725
	2	23	02	2.01	01		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Dinas Perpustakaan	3 Layanan	8,708,400	PAD	Utama	4 layanan	15,000,000
	2	23	02	2.01	02		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standard Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Dinas Perpustakaan	103 perpustakaan	73,843,075	PAD	Utama	110 Perpustakaan	50,939,125
	2	23	02	2.01	09		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	29.500 eksm	2,340,400	PAD	Utama	32.000 eksm	5,848,600
3	2	24					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								
	2	24	02				**Program Pengelolaan Arsip**	**Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional**	**Dinas Perpustakaan**	**26,55%**	**75,427,175**	**PAD**	**Utama**	**31.50%**	**12,000,000**
	2	24	02	2.01			**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis pada OPD**	**Dinas Perpustakaan**	**33,33%**	**75,427,175**	**PAD**	**Utama**	**45.00%**	**12,000,000**
	2	24	02	2.01	01		**Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis**	**Meningkatnya Persentase Jumlah Arsip Dinamis yang dikeola secara baku oleh Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Perpustakaan**	**1304 berkas**	**75,427,175**	**PAD**	**Utama**	**1800 Berkas**	**12,000,000**

BAB V.
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 merupakan uraian dari pelaksanaan Rencana Strategis (renstra) Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029. Dimana penyusunan Renstra tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 yang menguraikan target pencapaian tujuan dan sasaran untuk tahun 2025-2029 untuk urusan perpustakaan dan kearsipan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Tahun 2025 merupakan rancangan yang berisi rencana kebijakan mengenai program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, serta aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara dengan berorientasi pada target hasil kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Adapun Program, Kegiatan maupun sub kegiatan yang dijabarkan pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 mengacu pada pencapaian tujuan Dinas Perpustakaan yang telah ditetapkan yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan dan tata kelola arsip , dimana untuk mencapai tujuan ini dapat diperoleh dengan melaksanakan 3 sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu: meningkatkan literasi masyarakat, meningkatkan tata kelola arsip dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan juga setiap staf Dinas Perpustakaan terhadap pelaksanaan program serta kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun, semoga bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Tarutung, Agustus 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

BUHA M. AUGUS SINAGA S.P, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19670720 199503 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PERPUSTAKAAN

Jl. Sisingamangaraja No. 198 Tarutung 22411
Laman : http://www.taputkab.go.id; Post-el: perpustakaan@taputkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR: / / / /
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan perlu disusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undnag-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarea Republik Inonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunh 2019, Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah, dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2024;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;

22. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
23. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menetapkan :

Kesatu : Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 dan Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Tapanuli Utara;

Kedua : Rencana Kerja (Renja) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan sebagai acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tarutung
Pada tanggal : Oktober 2025

KEPALA DINAS

BUHA M. AUGUS SINAGA S.P,M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19730825 199803 1 003

RENCANA KERJA
(RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen 6
1.4. Maksud dan Tujuan 6
1.5. Sistematika Penulisan 7

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD 8
2.2 Analisis Kinerja Palayanan SKPD 18
2.3 Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD 29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB III Tuujan, sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 42
3.3. Program dan Kegiatan 43

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan 90

BAB V Penutup 99

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.
Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026. Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Rencana Kerja Perubahan ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. Dokumen ini akan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, target indikator kinerja dan kerangka pendanaan pembangunan. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD Perubahan akan digunakan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah. Mengingat Rencana Kerja merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJP Nasional, RPJMN, RKP, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RKPD Provinsi Sumatera Utara, RPD Kabupaten Tapanuli Utara dan terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara.;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disiase;
19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah(SIPD) (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 Tanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005- 2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun Rencana Kerja Perubahan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu produk perencanaan, Rencana Kerja tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Rencana Kerja ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPD, (3) Renstra-OPD, (4) RKPD dan (5) Renja-OPD. Secara substansi, keberadaan Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya melakukan penyesuaian atas perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
2. Tersedianya acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari :

BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab V Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBD adalah :

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor (rapat gabungan antara p2p, kesmas dan yankes)

b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 Pengadaan Mebel
2 Pengadaan Peralatan dan Mesin

f Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

II PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

a Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3 Pengadaan Obat, Vaksin
4 Pengadaan Bahan Habis Pakai
5 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

b Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga
14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
15 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
16 Pengelolaan Surveilens Kesehatan
17 Pengelolaan Upaya Pelayanan Khusus
18 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
19 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
20 Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat
21 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dukungan Manajemen BOK Kab dan BOK Puskesmas)
21 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

c Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

D Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (DAU)
2 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

A Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

B Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

C Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

IV PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

a Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

b Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

1 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

2 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

c Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

d Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

e Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

f Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (DAU) BOK Pengawasan Obat dan Makanan

V PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

a Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil evaluasi lebih rinci pelaksanaan Renja OPD Tahun 202 dan perkiraan capaian OPD tahun 2023 yang mengacu pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023, disajikan dalam dengan format tabel Rekapitulasi

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Utara (Lampiran Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara terlampir).

Tabel TC. 29

Tabel TC-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Pada Tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2021)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022							Target Program dan Kegiatan (Renja 2023)			Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023			
									Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022			Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4			5			6			7			8.00	9			10			11
			K	Satuan		K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	%	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Pemerintahan Daerah Terlaksana	100	persen	281,801,533,296	100	persen	61,499,175,627	100	persen	65,352,468,696	100	persen	64,924,433,607	863	100	persen	100,098,243,736	100	persen	191,299,934,080	100
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan	18 dok, 15 lap	Dokumen, Laporan	382,097,900	10	dokumen, laporan	97618000	4 dok, 3 lap	dokumen, laporan	66957000	4 dok, 3 lap	dokumen, laporan	Rp66,575,000	99.43	5 dok, 2 lap	dokumen, laporan	323640000	13 dok, 21 lap	dokumen, laporan	231150000	5 dok, 6 lap
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10	Dokumen	104,800,000	4	Dokumen	7208000	4	Dokumen	Rp25,950,000	4	Dokumen	Rp25,588,000	100.00	1	Dokumen	64800000	9	Dokumen	58746000	90
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	10,000,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	1	Dokumen	5000000	1	Dokumen	0	50
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	10,000,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	1	Dokumen	5000000	1	Dokumen	0	50
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	10,000,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	1	Dokumen	5000000	1	Dokumen	0	50
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	10,000,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	1	Dokumen	5000000	1	Dokumen	0	50
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5	Laporan	34,507,900	2	Laporan	7500000	1	Laporan	Rp6,057,000	1	Laporan	Rp6,057,000	100.00	1	Laporan	5000000	4	Laporan	19614000	80
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10	Laporan	202,790,000	4	Laporan	82910000	2	Laporan	Rp34,950,000	2	Laporan	Rp34,930,000	100.00	2	Laporan	233840000	8	Laporan	152790000	80
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	3745 org, 5 lap, 5 dok	org, lap, dok	247,339,193,600	1430 org, 2 lap, 2 dok	org, lap, dok	56895165788	745 org, 1 lap, 1 dok	org, lap, dok	Rp55,519,853,639	745 org, 1 lap, 1 dok	org, lap, dok	Rp55,230,080,214	100.00	746 Org, 3 dok, 1 lap	dokumen	92649776354	#VALUE!	dokumen	167645099641	#VALUE!
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang meneriman Gaji dan Tunjangan ASN	3,725	orang	123,959,386,000	1,490	orang	56405264388	745	orang	Rp55,189,722,639	745	orang	Rp54,907,399,174	100.00	745	Orang/bulan	92320259954	2,980	Orang/bulan	166502386201	80
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	5	Laporan	122,557,325,200	2	Laporan	477901600	1	Laporan	Rp324,131,200	1	Laporan	Rp316,681,240	100.00	12	Dokumen	324516400	15	Dokumen	1118714040	300
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dokumen	822,482,400	2	Dokumen	11999800	1	Dokumen	Rp5,999,800	1	Dokumen	Rp5,999,800	100.00	1	Laporan	5000000	4	Laporan	23999400	80
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset Barang Milik Daerah	5	Laporan	480,018,800	2	Laporan	59999900	1	Laporan	80000000	1	Laporan	79560000	100.00	2	Laporan	80000000	5	Laporan	219559900	100
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	5	Laporan	480,018,800	2	Laporan	59999900	1	Laporan	Rp80,000,000	1	Laporan	Rp79,560,000	100.00	2	Laporan	80000000	5	Laporan	219559900	100
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepagawaian yang diselenggarakan	5	Dokumen	158,875,500	2	Dokumen	102955500	1	Dokumen	45000000	1	Dokumen	44529145	100.00	0	-	0	3	-	192484645	60
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dokumen	158,875,500	2	Dokumen	102955500	1	Dokumen	Rp45,000,000	1	Dokumen	Rp44,529,145	100.00	0	-	-	3	-	192484645	60

1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		paket, dok, lap			paket, dok, lap			paket, dok, lap			paket, dok, lap			34 paket, 45 dokumen, 42 laporan	paket, dok, lap	396986200		paket, dok, lap	0	#DIV/0!
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	15	paket	233,369,000	2	paket	65369000	1	paket	Rp28,000,000	1	paket	Rp21,288,300	100.00	9	Paket	35000000	12	Paket	114657300	80
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	50	paket	277,936,600	2	paket	64995800	33	paket	Rp75,197,100	33	paket	Rp75,176,400	100.00	12	Paket	60980100	47	Paket	215369300	94
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	40	paket	164,967,800	2	paket	53978600	17	paket	Rp35,160,400	17	paket	Rp34,891,975	100.00	7	Paket	30003000	26	Paket	124030975	65
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"	15	paket	197,004,400	2	paket	43984500	7	paket	Rp45,010,600	7	paket	Rp45,005,125	100.00	6	Paket	51006100	15	Paket	134000225	100
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	dokumen	30,967,800	4	dokumen	8375000	2	dokumen	Rp4,990,000	2	dokumen	Rp4,940,000	100.00	2	Dokumen	10000000	8	Dokumen	18305000	80
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makanan dan Minuman)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2130	Laporan	262,514,000	852	Laporan	91880500	426	Laporan	Rp42,476,000	426	Laporan	Rp42,467,000	100.00	12	Laporan	29997000	1,290	Laporan	176823500	60.56338028
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	200	Laporan	906,473,300	20	Laporan	318161496	50	Laporan	Rp134,975,000	50	Laporan	Rp133,428,850	100.00	30	Laporan	180000000	100	Laporan	586565346	50
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	207	0	1170877400	0	unit	0	77	unit	258677400	69	unit	217466450	89.61	60	unit	150000000	129	0		
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	157	unit	480,000,000	0	unit	0	62	unit	Rp80,000,000	54	unit	Rp45,059,600	87.10	56	Unit	100000000	110	Unit	125059600	70.06369427
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"	50	unit	690,877,400	0	unit	0	15	unit	Rp178,677,400	15	unit	Rp172,406,850	100.00	4	Unit	50000000	19	Unit	351084250	38
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penunjang umum yang diselenggarakan	77	0	29092497407	26	Laporan	3906508350	17	Laporan	8460383657	17	Laporan	8385301694	100.00	583	Laporan	5773352450	626	Laporan	20752193701	812.987013
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	2,225,720,548	24	Laporan	316008350	12	Laporan	Rp346,606,798	12	Laporan	Rp344,698,309	100.00	12	Laporan	297342850	48	Laporan	1007313457	80
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	Laporan	26,866,776,859	2	Laporan	3590500000	5	Laporan	Rp8,113,776,859	5	Laporan	Rp8,040,603,385	100.00	4	Laporan	5476009600	11	Laporan	19744880244	64.70588235
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	425	0	2810250089	106	unit	436928089	187	unit	921597000	176	0	900921104	273.8095238	53	unit	624488732	335	unit	2259446193	78.82352941
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	210	Unit	2,368,578,889	84	Unit	367230489	42	Unit	Rp806,608,400	31	Unit	Rp785,932,504	73.81	42	Unit	474997832	157	Unit	1959771393	74.76190476
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	243,748,800	6	Unit	41734400	1	Unit	Rp41,999,400	1	Unit	Rp41,999,400	100.00	3	Unit	75000000	10	Unit	125733200	66.66666667
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200	unit	197,922,400	16	unit	27963200	144	unit	Rp72,989,200	144	unit	Rp72,989,200	100.00	8	Unit	74490900	168	Unit	173941600	84
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah FKTP yang BLUD	4	unit	367,722,600	0	unit	0								2	Unit Kerja	100000000	2	Unit Kerja	0	50
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	FKTP yang BLUD	4	unit	367,722,600	0	unit	0	0	unit	Rp167,722,600	0	unit	Rp151,773,016	0.00	2	Unit Kerja	100000000	2	Unit Kerja	319495616	50
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	100	persen		100	persen		100	persen		100	persen			100	persen		300	persen	0	300
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia	600 unit, 474 paket	unit, paket	56,896,220,657	281 unit, 167 paket	unit, paket	14817344693		unit, paket	Rp12,127,523,000		unit, paket	Rp10,357,784,060	100.00	161 unit, 254 paket	unit, paket	20245361000	440 paket, 555 unit	unit, paket	37302651753	#VALUE!
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400	unit	6,086,017,200	281	unit	3955794284	80	unit	Rp719,248,000	80	unit	Rp646,598,000	100.00	4	unit	1690000000	365	unit	5321640284	91.25

1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400	paket	27,479,214,464	139	paket	5560256296	70	paket	Rp7,060,866,000	70	paket	Rp5,981,728,670	100.00	157	paket	14102085000	366	paket	18602850966	91.5
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Tersedianya Obat dan Vaksin	5	paket	13,718,025,493	2	paket	4881925413	1	paket	Rp1,950,997,000	1	paket	Rp1,729,343,750	100.00	1	paket	1940783000	4	paket	8562266163	80
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Tersedianya Bahan Habis Pakai	5	paket	8,589,203,000	2	paket	74404250	1	paket	Rp2,152,574,000	1	paket	Rp1,781,360,640	100.00	1	paket	4062070000	4	paket	4008338890	80
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serat Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan	84	paket	1,023,760,500	24	paket	344964450	12	paket	Rp151,788,000	21	paket	Rp130,138,000	175.00	21	paket	140423000	66	paket	626890450	78.57142857
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat yang Dikalibrasi	200	Unit	0	0	Unit	0	190	Unit	Rp92,050,000	190	Unit	Rp88,615,000	100.00	0	Unit	0	190	Unit	180665000	95
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia	27	layanan															0	0	0	0
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	27316	orang	1,267,410,400	6,829	orang	138508100	4,699	orang	Rp966,830,400	4699	orang	Rp911,485,200	100.00	6788	orang	289123500	18,316	orang	2016823700	67.05227705
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	"Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	32590	orang	6,903,733,100	13,036	orang	5040968625	4111	orang	Rp2,156,246,400	4111	orang	Rp1,839,290,775	100.00	6480	orang	246650000	23,627	orang	9036505800	72.49769868
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	24832	orang	181,920,000	12,016	orang	43649000	4133	orang	Rp290,922,100	4133	orang	Rp264,634,230	100.00	6171	orang	161461500	22,320	orang	599205330	89.88402062
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120,136	orang	1,787,843,500	30,034	orang	931900506	20764	orang	Rp499,618,200	19661	orang	Rp483,498,400	94.69	20462	orang	100520000	70,157	orang	1915017106	58.39798229
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	161,010	orang	193,051,000	0	orang	0	53670	orang	Rp390,677,500	53670	orang	Rp386,072,000	100.00	0	orang	0	53,670	orang	776749500	33.33333333
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	750,204	orang	397,800,000	234,432	orang	22400000	17290	orang	Rp95,000,000	17290	orang	Rp93,180,600	100.00	17290	orang	271000000	269,012	orang	210580600	35.85851315
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	409,004	orang	894,400,000	102,251	orang	359864115	36658	orang	Rp611,018,800	36570	orang	Rp594,656,517	99.76	36912	orang	321753600	175,733	orang	1565539432	42.96608346
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	384,936	orang	289,000,000	96,234	orang	50000000	5606	orang	Rp186,867,900	5606	orang	Rp186,486,900	100.00	46697	orang	179814000	148,537	orang	423354800	38.5874535
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	"Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	7492	orang	242,000,000	0	orang	0	902	orang	Rp165,851,700	888	orang	Rp165,851,700	98.45	1860	orang	117865300	2,748	orang	331703400	36.6791244
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2245	orang	1,209,999,900	898	orang	519991175	450	orang	Rp356,508,700	425	orang	Rp356,448,700	94.44	452	orang	402306800	1,775	orang	1232948575	79.06458797
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2145	orang	630,634,600	858	orang	92287600	671	orang	Rp231,947,500	679	orang	Rp231,856,500	101.19	3285	orang	52000000	4,822	orang	556091600	224.8018648
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	23530	orang	590,551,200	4,706	orang	42486000	4,971	orang	Rp157,564,500	1125.88	orang	Rp157,263,500	22.65	8538	orang	50000000	14,370	orang	357314000	61.07046324
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	5	dokumen	1,491,357,350	2	dokumen	733519630	2	dokumen	Rp1,392,138,850	2	dokumen	Rp1,309,510,100	100.00	0	dokumen	0	4	dokumen	3435168580	80
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	105	dokumen	4,361,804,900	42	dokumen	1203946130	21	dokumen	Rp2,022,199,100	21	dokumen	Rp1,919,828,469	100.00	7	dokumen	467040200	70	dokumen	5145973699	66.66666667
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	105	orang	2,956,800,640	42	orang	112222500	21	orang	Rp134,742,200	21	orang	Rp128,512,200	100.00	4	orang	88990600	67	orang	375476900	63.80952381
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	105	Dokumen	4,778,030,088	42	Dokumen	1514017913	21	Dokumen	Rp1,421,051,150	21	Dokumen	Rp1,344,144,942	100.00	4	Dokumen	801116500	67	Dokumen	4279214005	63.80952381
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	105	dokumen	1,227,128,540	42	dokumen	551456700	12	dokumen	Rp1,496,106,800	12	dokumen	Rp1,474,258,600	100.00	5	dokumen	439632700	59	dokumen	3521822100	56.19047619
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	15	Dokumen	3,000,000,000	6	Dokumen	94653600	3	Dokumen	Rp2,570,315,100	3	Dokumen	Rp2,570,245,100	100.00	5	Dokumen	143431000	14	Dokumen	5235213800	93.33333333

1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus"	25	Dokumen	279,990,000	10	Dokumen	34950000	3	Dokumen	Rp60,000,000	2	Dokumen	Rp49,970,000	66.67	3	Dokumen	165000000	15	Dokumen	144920000	60
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Sesuai Standar	550	orang	57,864,000	0	orang	0	466	orang	Rp58,064,000	466	orang	Rp57,864,000	100.00	0	orang	0	466	orang	115928000	84.72727273
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25	dokumen	2,060,364,300	10	dokumen	673739300	10	dokumen	Rp1,087,261,600	10	dokumen	Rp1,084,224,800	100.00	9	dokumen	581151900	29	dokumen	2845225700	116
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat"	182,500	Dokumen	129,912,964,356	34,432	Dokumen	32752815879	36,000	Dokumen	Rp32,561,270,985	72000	Dokumen	Rp27,641,818,498	200.00	37000	Dokumen	31114135200	143,432	Dokumen	92955905362	78.59287671
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas"	105	Dokumen	9,450,000,000	42	Dokumen	3696000000	21	Dokumen	Rp3,656,915,300	42	Dokumen	Rp3,601,572,608	200.00	21	Dokumen	17435652000	105	Dokumen	10954487908	100
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya"	105	Dokumen	9,450,000,000	42	Dokumen	3696000000	21	Dokumen	Rp188,509,500	2	Dokumen	Rp187,664,800	9.52	12	Dokumen	50000000	56	Dokumen	4072174300	53.33333333
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	"Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota"	21	Puskesmas	2,427,346,000	9	Puskesmas	111291000	11	Puskesmas	Rp526,900,000	0	Puskesmas	Rp0	0.00	21	Puskesmas	91585000	30	Puskesmas	638191000	142.8571429
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadin Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadin Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	orang	7,950,000	0	orang	0	12	orang	Rp7,950,000	12	orang	Rp7,950,000	100.00	0	orang	0	12	orang	15900000	12
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	36	Dokumen	30,050,000	0	Dokumen	0	12	Dokumen	Rp30,050,000	12	Dokumen	Rp30,050,000	100.00	0	Dokumen	0	12	Dokumen	60100000	33.33333333
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen informasi kesehatan yang tersedia	65	dokumen	901,299,400	26	dokumen	366,760,700	13	0	125,640,300	13	dokumen	122,661,017	100	13	dokumen	138,260,700	52	dokumen	615,062,017	80
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5	Dokumen	330,304,900	2	Dokumen	101271000	1	Dokumen	Rp70,536,600	1	Dokumen	Rp70,346,600	100.00	1	Dokumen	74785300	4	Dokumen	242154200	80
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	60	Dokumen	570,994,500	24	Dokumen	265489700	12	Dokumen	Rp55,103,700	12	Dokumen	Rp52,314,417	100.00	12	Dokumen	63475400	48	Dokumen	372907817	80
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Jumlah izin Rumah Sakit Tipe C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	1105	dokumen	2778279730	442	dokumen	736814500	221	dokumen	270000000	371	dokumen	269591050	167.8733032	221	dokumen	537950000	1034	dokumen	1276405550	175
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	105	Dokumen	858,666,000	42	Dokumen	487594500	21	Dokumen	Rp80,000,000	21	Dokumen	Rp79,901,050	100.00	21	Dokumen	309950000	84	Dokumen	647495550	80
1.02.02.2.04.03	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1000	Dokumen	1,919,613,730	400	Dokumen	249220000	200	Dokumen	Rp190,000,000	350	Dokumen	Rp189,690,000	175.00	200	Dokumen	228000000	950	Dokumen	628910000	95
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESSEHATAN	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan minimal Puskesmas		persen			persen			persen			persen				persen		0	persen	0	#DIV/0!
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan	3,052	0	266,000,000	500	dokumen	29,920,000	500	dokumen	20,000,000	609	dokumen	20,000,000	122	801	dokumen	103,000,000	1,910	dokumen	122,920,000	117
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2,250	Dokumen	160,000,000	500	Dokumen	29920000	500	Dokumen	Rp20,000,000	609	Dokumen	Rp20,000,000	121.80	400	Dokumen	50000000	1,509	Dokumen	69920000	67.06666667
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik	802	Dokumen	106,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401	dokumen	53000000	401	dokumen	53000000	50
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang direncanakan		dok, org	2,280,010,000		dok, org	49500000		dok, org	1,568,010,000		dok, org	1,542,609,200			dok, org	135000000	0	dok, org	3160119200	#DIV/0!
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	736	dokumen	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368	Dokumen	60000000	368	Dokumen	60000000	50
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standart di Fasilitas	5,720	orang	2,000,000,000	0	orang	0	1,433	orang	Rp1,528,000,000	2866	orang	Rp1,502,660,000	200.00	2195	orang	35000000	5,061	orang	3030660000	88.47902098

1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	105	Dokumen	160,010,000	42	Dokumen	49500000	21	Dokumen	Rp40,010,000	21	Dokumen	Rp39,949,200	100.00	21	Dokumen	40000000	84	Dokumen	129459200	80
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan mutunya	2000	orang	240,000,000	0	orang	0	1350	orang	50000000	1350	orang	46539250	100.00	380	orang	995079700	1,730	orang	96539250	86.5
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2000	orang	240,000,000	0	orang	0	1350	orang	Rp50,000,000	1350	orang	Rp46,539,250	100.00	380	orang	995079700	1,730	orang	96539250	86.5
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standart Good Distribution Practice dan Good Manufacture Practice														100	persen	387800000	100	persen	0	#DIV/0!
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan	300	Dokumen	303,935,600	0	Dokumen	0	100	Dokumen	63935600	95	Dokumen	61750439	95.00	40	Dokumen	40000000	135	Dokumen	125686039	45
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	300	Dokumen	303,935,600	0	Dokumen	0	100	Dokumen	Rp63,935,600	95	Dokumen	Rp61,750,439	95.00	40	Dokumen	40000000	135	Dokumen	125686039	45
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan	10	dokumen	477989700	4	dokumen	76253700	2	dokumen	85000000	2	dokumen	84796000	100	2	dokumen	85000000	8	dokumen	246049700	80
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan kelas I tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	"Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga"	5	Dokumen	241,989,900	2	Dokumen	26447900	1	Dokumen	Rp40,000,000	1	Dokumen	Rp39,923,000	100.00	1	Dokumen	40000000	4	Dokumen	106370900	80
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	5	Dokumen	235,999,800	2	Dokumen	49805800	1	Dokumen	Rp45,000,000	1	Dokumen	Rp44,873,000	100.00	1	Dokumen	45000000	4	Dokumen	139678800	80
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri yang diberikan	120	Dokumen	888,567,800	0	Dokumen	0	48	Dokumen	148849800	48	Dokumen	106265000	100.00	70	Dokumen	187800000	118	Dokumen	255114800	98.33333333
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	120	Dokumen	888,567,800	0	Dokumen	0	48	Dokumen	Rp148,849,800	48	Dokumen	Rp106,265,000	100.00	70	Dokumen	187800000	118	Dokumen	255114800	98.33333333
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	24	Dokumen	216,472,000	0	Dokumen	0	4	Dokumen	71932500	4	Dokumen	64866842	100.00	5	Dokumen	40000000	9	Dokumen	136799342	37.5

1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24	Dokumen	216,472,000	0	Dokumen	0	4	Dokumen	Rp71,932,500	4	Dokumen	Rp64,866,842	100.00	5	Dokumen	40000000	9	Dokumen	136799342	37.5
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	90	unit	285,550,600	0	unit	0	47	unit	285550600	47	unit	279651417	100.00	2	unit	30000000	49	unit	565202017	54.44444444
1.02.04.2.06.01	"Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan"	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	90	unit	285,550,600	0	unit	0	47	unit	Rp285,550,600	47	unit	Rp279,651,417	100.00	2	unit	30000000	49	unit	565202017	54.44444444
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	88	Persen			Persen			Persen			Persen			28	Persen	35000000	28	Persen	0	31.81818182
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	36	Dokumen	662,758,950	0	Dokumen	0	12	Dokumen	42000000	12	Dokumen	41652923	100.00	2	Dokumen	90000000	14	Dokumen	83652923	38.88888889
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	36	Dokumen	662,758,950	0	Dokumen	0	12	Dokumen	Rp42,000,000	12	Dokumen	Rp41,652,923	100.00	2	Dokumen	90000000	14	Dokumen	83652923	38.88888889
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84	Dokumen	1,269,000,000	0	Dokumen	0	21	Dokumen	401664000	21	Dokumen	401608000	100.00	0	Dokumen	0	21	Dokumen	803272000	25
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	84	Dokumen	1,269,000,000	0	Dokumen	0	21	Dokumen	Rp401,664,000	21	Dokumen	Rp401,608,000	100.00	0	Dokumen	0	21	Dokumen	803272000	25
			2148975		**Rp 536691257907**	**540,001**		**Rp 130639181**	**196220**		**Rp 134468634481**	**228860**		**Rp 125911518610**								

2.2. Analisis Kinerja Palayanan SKPD

2.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Indikator ini juga terkait langsung dengan kelangsungan hidup anak serta merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian bayi di Indonesia saat ini dipergunakan dari hasil berbagai sumber, yaitu Sensus Penduduk, Surkesnas/Susenas dan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

Tabel 2.1
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018-2024

No	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi lahir hidup (jiwa)	6.996	4.819	4.513	3776	4124	4234	3791
2	Angka kematian bayi (jiwa)	30	27	3	37	15	21	14
3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran	6,32	5.6	0,66	9,79	3,6	4,95	3,7

Berdasarkan data tersebut, AKB di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami naik turun. Faktor penyebab rendahnya AKB dimaksud diantaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan utamanya di daerah terpencil dan sangat terpencil, persebaran sarana pelayanan kesehatan beserta fasilitasnya, pemerataan penyebaran tenaga kesehatan utamanya bidan di desa, serta perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat yang berkontribusi pada perbaikan gizi bayi dan Masyarakat, namun pada dasarnya petugas kesehatan tetap melakukan pelayanan yang terbaik dan kedepan lebih ditingkatkan lagi.

2.2.2. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama disektor kesehatan. Angka harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia selain pendidikan dan ekonomi. Angka harapan hidup dapat diketahui dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Tabel 2.2
Angka Harapan Hidup Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2024

Uraian	Satuan	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Tapanuli Utara	Tahun	68,11	68,46	68,63	68,76	69,16	74,10	74,36
Provinsi Sumatera Utara	Tahun	68,61	68,95	69,10	69,23	69,61	73,67	73,90
Nasional	Tahun	71,20	71,34	71,52	71,57	71,85	73,93	74,15

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini disebabkan faktor membaiknya pelayanan kesehatan, adanya kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan serta peningkatan keadaan sosial ekonomi penduduk yang selanjutnya memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup.

2.2.3. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per
100.000 kelahiran hidup. AKI dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi

dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Faktor penyebab utama kematian maternal adalah keterlambatan mencari, mencapai dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Disamping itu beberapa faktor lain yang turut memperburuk keadaan adalah pengetahuan ibu yang kurang, jarak yang sulit dicapai dan masih adanya beberapa desa yang belum mempunyai tenaga kesehatan utamanya bidan desa. Secara nasional target AKI adalah 306 per 100.000 penduduk. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan bahwa jumlah ibu melahirkan setiap tahunnya tidak mencapai angka 100.000 sehingga angka kematian ibu yang disajikan pada tabel berikut merupakan jumlah ibu meninggal per kelahiran bayi.

Tabel 2.3
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018-2024

No	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi lahir hidup (jiwa)	6.996	4.819	4.513	3776	4124	4234	3791
2	Jumlah ibu meninggal (jiwa)	4	4	8	5	4	2	1
3	Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4	73,2	71,7	68,7	60,2	63	95	56,6
4	Persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	44,56	51,1	78,6	85,8	92,4	87	53
5	Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	67,10	66,8	63,4	57,5	63,1	97	54,5
6	Persentase cakupan pelayanan nifas	64,6	60,5	60	57,7	63,0	97	54,0

7	Persetase cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	3	25,5	0	18,4	17,5	9,8	0,5

Apabila kita hitung secara persentase, maka rata-rata selama lima tahun terakhir angka kematian ibu melahirkan berdasarkan jumlah bayi yang lahir hidup berada pada kisaran 0,1 persen (lebih rendah dari target nasional sebesar 0,30 persen) dengan cakupan kunjungan ibu hamil yang berfluktuasi.

2.2.4. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk, terutama pertumbuhan yang terhambat, merupakan sebuah masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, sehingga salah satu arah kebijakan perbaikan gizi sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pemangunan Jangka Menengah Nasional adalah peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan. Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun.

Tabel 2.4
Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2018-2024

Uraian	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah balita (jiwa)	34.711	34.146	23.19	25499	20462	17383	18264
Jumlah balita gizi buruk (jiwa)	19	20	11	14	12	52	39
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100

Jumlah balita gizi buruk mengalami naik turun dari tahun ke tahun, namun secara keseluruhan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.

2.2.5. Pemberian ASI

Faktor yang mempengaruhi Angka Kematian Bayi selain kesehatan ibu, juga masa persalinan, pemberian ASI dan makanan tambahan serta pemberian imunisasi. Oleh karena itu, lamanya masa pemberian ASI dan lengkapnya pemberian imunisasi perlu diperhatikan. Pemberian ASI eksklusif juga akan mempengaruhi perkembangan dan tingkat inteligensi anak kelak.

Tabel 2.5
Jumlah Bayi yang Diberi ASI Eksklusif (Usia 0-6 bulan)
Tahun 2018 - 2024

No	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi (lahir hidup)	6.996	4.819	4.513	3776	4124	4234	3791
2	Jumlah bayi yang diberi asi eksklusif	961	2.914	2.898	2179	3543	3003	784

Berdasarkan data pada tabel 2.5, terjadi peningkatan jumlah bayi yang diberi asi eksklusif. Hal ini dapat dicapai berkat sosialisasi atau penyuluhan serta pendampingan oleh petugas kesehatan di tingkat poskesdes, puskesmas pembantu hingga puskesmas bagi ibu hamil mengenai pentingnya asi eksklusif bagi bayi sampai umur enam bulan.

2.2.6. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Program imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan terjangkitnya penyakit tertentu, yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti tuberkulosis, difteri, tetanus, hepatitis B, polio dan campak. Imunisasi melindungi anak-anak dari beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100 persen desa/kelurahan.

Tabel 2.6
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan Tahun 2018 - 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Desa/Kel UCI (Tahun)						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Parmonangan	14	7	9	11	10	10	10	11
2	Adiankoting	16	13	13	16	16	16	16	16
3	Sipoholon	14	13	12	11	13	14	14	14
4	Tarutung	31	25	27	27	20	25	31	31
5	Siatas Barita	12	12	11	9	8	12	12	12
6	Pahae Julu	19	17	18	16	16	19	19	19
7	Pahae Jae	13	10	11	10	13	13	13	13
8	Purbatua	11	9	10	9	9	11	9	11
9	Simangumban	8	7	6	6	6	8	6	8
10	Pangaribuan	26	21	21	18	20	24	25	26
11	Garoga	13	10	9	9	10	10	13	8
12	Sipahutar	25	23	21	21	20	21	25	25
13	Siborongborong	21	21	20	18	19	21	21	21
14	Pagaran	14	11	13	14	14	14	14	14
15	Muara	15	13	15	15	15	15	15	15
	Kabupaten	**252**	**212**	**216**	**210**	**209**	**235**	**243**	**244**

Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan suatu gambaran terhadap cakupan sasaran bayi dimana 80% dari jumlah bayi telah mendapatkan imunisasi secara lengkap pada satu kurun waktu tertentu. Pelayanan imunisasi bayi mencakup vaksinasi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis campak yang dilakukan melalui pelayanan rutin di posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Sesuai data pada tabel tersebut cakupan desa/kelurahan UCI tahun 2023 mencapai 243 desa/kelurahan.

2.2.7. Sarana Kesehatan

Salah satu indikator kesehatan yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kesehatan suatu daerah dapat dilihat dari rasio antara penduduk dengan tenaga medis. Untuk kepentingan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan termasuk sarana kesehatan dan tenaga medis.

Tabel 2.7
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2018-2024

No	Sarana Kesehatan	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Sakit Umum	1	1	2	2	2	2	2
2	Jumlah Puskesmas							
	a. Biasa	14	14	14	14	14	14	14
	b. Rawat Inap	6	7	7	7	7	7	7
	c. Puskesmas dengan akreditasi paripurna	6	12	12	12	12	7	9
	d. Puskesmas dengan akreditasi utama	3	7	7	7	7	3	2
3	Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)	61	61	62	61	61	61	61
	a. Parmonangan	4	4	4	4	4	4	4
	b. Adiankoting	6	6	6	6	6	6	6
	c. Sipoholon	5	5	5	5	5	5	5
	d. Tarutung	5	5	5	5	5	5	5
	e. Siatas Barita	4	4	4	4	4	4	4
	f. Pahae Julu	6	5	6	6	6	6	6
	g. Pahae Jae	1	1	1	1	1	1	1
	h. Purbatua	1	1	1	1	1	1	1
	i. Simangumban	1	1	1	1	1	1	1
	j. Pangaribuan	8	8	8	8	8	8	8
	k. Garoga	5	5	5	5	5	5	5
	l. Sipahutar	3	3	3	3	3	3	3
	m.Siborongborong	6	6	6	6	6	6	6
	n. Pagaran	4	4	4	4	4	4	4
	o. Muara	3	3	3	3	3	3	3
4	Poskesdes	95	95	95	95	95	95	95
	a. Parmonangan	14	14	14	14	14	14	14
	b. Adiankoting	3	3	3	3	3	3	3
	c. Sipoholon	5	5	5	5	5	5	5

	d. Tarutung	3	3	3	3	3	3	3
	e. Siatas Barita	1	1	1	1	1	1	1
	f. Pahae Julu	4	4	4	4	4	4	4
	g. Pahae Jae	1	1	1	1	1	1	1
	h. Purbatua	3	3	3	3	3	3	3
	i. Simangumban	3	3	3	3	3	3	3
	j. Pangaribuan	13	13	13	13	13	13	13
	k. Garoga	9	9	9	9	9	9	9
	l. Sipahutar	9	9	9	9	9	9	9
	m.Siborongborong	12	12	12	12	12	12	12
	n. Pagaran	9	9	9	9	9	9	9
	o. Muara	6	6	6	6	6	6	6

Kabupaten Tapanuli Utara terus berbenah dan berupaya meningkatkan pembangunan kesehatan untuk mencapai Kabupaten Sehat. Salah satu hal yang sangat penting dalam upaya tersebut adalah dengan mendirikan sarana pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau oleh masyarakat serta menyediakan tenaga medis yang dibutuhkan. Guna meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, penambahan tenaga medis khususnya jumlah dokter spesialis juga tetap dilakukan.

Selain pemenuhan fasilitas kesehatan, keberadaan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Sesuai data yang diperoleh, upaya penambahan tenaga kesehatan terus dilakukan baik di sarana pelayanan kesehatan dasar maupun lanjutan demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2.2.8. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu *fundamental right* yang menjadi tanggung jawab bersama oleh negara dan masyarakat itu sendiri, tetapi yang terjadi justru akses kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin/tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan masih sangat rendah. Permasalahan ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari pihak pemerintah, terlebih lagi semakin meningkatnya biaya kesehatan akan menjauhkan pelayanan kesehatan utamanya bagi masyarakat miskin. Hal ini terkait dengan belum berjalannya sistem jaminan sosial terutama bidang kesehatan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, sangat penting memberikan porsi yang cukup besar bagi jaminan kesehatan masyarakat. Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu

upaya dalam bidang kesehatan untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat kurang mampu agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien. Melalui jaminan kesehatan masyarakat diharapkan dapat menurunkun angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita serta menurunkan angka kelahiran disamping dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat kurang mampu pada umumnya.

Tabel 2.8
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Tahun 2018-2024

No	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jaminan Kesehatan Nasional	193.21	194.206	201.26	172850			
	* Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	120.73	117.752	129.71	109172	107137	126709	131834
	*PBI APBD Provinsi	7.073	9.703	3.048	4666	4666	4666	5017
	* Pekerja Penerima Upah (PPU)	25.959	66.751	68.5	59012	75016	54687	60506
	* Pekerja Bukan Penerima Upah/ Mandiri	31.473	31.473				43678	43315
	* Bukan Pekerja	5.979	5.979				10200	9652
2	Jamkesda	29.588	29.962	34.357	34416	41945	179718	71538
	Jumlah	222.8	224.168	235.62	207266	228764	419658	321862
	Cakupan persentase (%)	74,3	74,3	73,63	78,31	72	77	97,8

Tabel TC. 30

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1			Angka Kematian Bayi (AKB)	8.5	7.21	5.92	5	3.64	4,95	3,7	5	5	
2			Angka Kematian Ibu (AKI)	5	4	4	4	4	2	1	4	4	
3			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	22.85	18.85	14	14	27.4	27,4	32,5	14	14	
4			Angka Kesakitan	22.72	20.7	18.97	8	28.9	19,60	20,30	8	8	
5			Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	21.57	22.24	22.59	23	21.46	21	22,3	23	23	
6			Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes Per Satuan Penduduk	70.11	70.17	70.54	71	68.73	72.42	71.56	71	71	
7			Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten	73	78	80.5	81	*71,64	77.34	77.23	81	77.80	
8		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		100%	100%	100%	100%	68.18	67,6	90.90	100%	92.8	
9		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		100%	100%	100%	100%	63.07	61,4	93.47	100%	94	
10		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		100%	100%	100%	100%	66.25	72,7	93.29	100%	94	

11		Pelayanan Kesehatan Balita		100%	100%	100%	100%	85.09	93,9	93.44	100%	94	
12		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		100%	100%	100%	100%	91.06	95,2	98.51	100%	98.68	
13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		100%	100%	100%	100%	90.16	55,8	98.76	100%	98.98	
14		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		100%	100%	100%	100%	99.76	95,5	99.25	100%	99.3	
15		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		100%	100%	100%	100%	85.16	11,2	99.94	100%	99.96	
16		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		100%	100%	100%	100%	47.74	100	100.00	100%	100	
17		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100%	100%	100%	100%	92.92	100	95.56	100%	96	
18		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis		100%	100%	100%	100%	96.27	84,7	99.68	100%	99.7	
19		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		100%	100%	100%	100%	80.47	82,5	95.27	100%	96	

2.3. Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan kesehatan, isu stategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu **masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat**, dengan permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain :

a) Status Kesehatan Ibu dan Bayi
b) Masalah Gizi (Gizi Kurang, Gizi Buruk, Stunting dan Obesitas)
c) Disparitas tenaga kesehatan antar Puskesmas/ Kecamatan
d) Sarana Prasarana yang belum memadai di beberapa pelayanan kesehatan
e) Sanitasi Lingkungan
f) Triple Burden Disease (Penyakit Infeksi Belum Teratasi, Penyakit Tidak Menular Meningkat dan Munculnya Penyakit Baru)
g) Kepesertaan JKN

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reformasi dan akselerasi pembangunan kesehatan Nasional 2019–2024 yang telah ditetapkan dan sejalan dengan RPJMN 2019–2024, Renstra Kemenkes 2019-2024, menetapkan 6 sasaran pokok yaitu : 1). Meningkatnya status kesehatan gizi ibu dan anak, 2). Meningkatnya pengendalian penyakit, 3). Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, 4). Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan yang universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, 5). Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, 6). Meningkatnya responsivitas sistem kesehatan.

Tabel TC. 31

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Cakupan Layanan Penunjang Pemerintahan Daerah Terlaksana	100	persen	59,751,726,680	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Cakupan Layanan Penunjang Pemerintahan Daerah Terlaksana	100	persen	100,098,243,736	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan	5 dok, 2 lap	Dokumen, Laporan	323,640,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan	5 dok, 2 lap	Dokumen, Laporan	323,640,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1	Dokumen	64,800,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1	Dokumen	64,800,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Laporan	5,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2	Laporan	233,840,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2	Laporan	233,840,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	746 Org, 3 dok, 1 lap	org, lap, dok	52,303,259,298	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	746 Org, 3	org, lap, dok	92,649,776,354	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Orang yang meneriman Gaji dan Tunjangan ASN	745	orang	51,973,742,898	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Orang yang meneriman Gaji dan Tunjangan ASN	745	orang	92,320,259,954	Adanya kenaikan gaji karena penerimaan P3K Tahun Anggaran 2022 sebanyak 630 orang
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	12	Laporan	324,516,400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	12	Laporan	324,516,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	Dokumen	5,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Aset Barang Milik Daerah	2	Laporan	80,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Aset Barang Milik Daerah	2	Laporan	80,000,000	
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	2	Laporan	80,000,000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	2	Laporan	80,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	34 paket, 45 dokumen, 42 laporan	paket, dok, lap	396,986,200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	34 paket, 45 dokume n, 42 laporan	paket, dok, lap	396,986,200	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	paket	35,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	9	paket	35,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	60,980,100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	12	paket	60,980,100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	7	paket	30,003,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	7	paket	30,003,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"	6	paket	51,006,100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"	6	paket	51,006,100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	10,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makanan dan Minuman)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	29,997,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makanan dan Minuman)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	29,997,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Laporan	180,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	30	Laporan	180,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	60	0	150,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	60	0	150,000,000	
	Pengadaan Mebel	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	56	unit	100,000,000	Pengadaan Mebel	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	56	unit	100,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"	4	unit	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	unit	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah laporan penunjang umum yang diselenggarakan	583	0	5,773,352,450	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah laporan penunjang umum yang diselenggarakan	583	0	5,773,352,450	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	297,342,850	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	297,342,850	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	5,476,009,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	5,476,009,600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	53	0	624,488,732	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	53	0	624,488,732	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42	Unit	474,997,832	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42	Unit	474,997,832	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	75,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	75,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	unit	74,490,900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	unit	74,490,900	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah FKTP yang BLUD	2	unit	100,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah FKTP yang BLUD	2	unit	100,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	FKTP yang BLUD	2	unit	100,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	FKTP yang BLUD	2	unit	100,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	100	persen	74,957,409,600	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	100	persen	87,627,409,600	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia	161 unit, 254 paket	unit, paket	20,245,361,000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia	161 unit, 254 paket	unit, paket	32,915,361,000	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0	Unit	0	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	13	Unit	5,460,000,000	Usulan Pokir dan Aspirasi Masyarakat pembangunan Poskesdes
	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0	Unit	0	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	Unit	200,000,000	Pembanguann Pagar Puskesmas Butar Kec. Pagaran

	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0	Unit	0	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7	Unit	1,450,000,000	Usulan Pokir
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0	Unit	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	Unit	2,500,000,000	Rehabilitasi Puskesmas Aek Raja Kec. Parmonangan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	Unit	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	Unit	2,760,000,000	Usulan Pokir dan Aspirasi Masyarakat
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0	Unit	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	Unit	300,000,000	Rehabilitasi Rumah Dinas Medis Puskesmas Butar Kec. Pagaran
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	157	paket	14,102,085,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	157	paket	14,102,085,000	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Tersedianya Obat dan Vaksin	1	paket	1,940,783,000	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Tersedianya Obat dan Vaksin	1	paket	1,940,783,000	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Tersedianya Bahan Habis Pakai	1	paket	4,062,070,000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Tersedianya Bahan Habis Pakai	1	paket	4,062,070,000	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serat Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	21	paket	140,423,000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serat Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	21	paket	140,423,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia	24	layanan	54,035,837,900	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia	24	layanan	54,035,837,900	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	6788	orang	289,123,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	6788	orang	289,123,500	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	6480	orang	246,650,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	6480	orang	246,650,000	
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	6171	orang	161,461,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	6171	orang	161,461,500	
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20,462	orang	100,520,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20462	orang	100,520,000	
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	orang	50,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	orang	50,000,000	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	17,290	orang	271,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	17290	orang	271,000,000	
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36,912	orang	271,753,600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36912	orang	271,753,600	
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46,697	orang	179,814,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46697	orang	179,814,000	
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	1860	orang	117,865,300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	1860	orang	117,865,300	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	452	orang	402,306,800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	452	orang	402,306,800	
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3285	orang	52,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3285	orang	52,000,000	
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	8538	orang	50,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	8538	orang	50,000,000	
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7	dokumen	467,040,200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7	dokumen	467,040,200	
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	orang	88,990,600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	orang	88,990,600	
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	4	Dokumen	801,116,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	4	Dokumen	801,116,500	

16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	5	dokumen	439,632,700	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	5	dokumen	439,632,700	
17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	5	Dokumen	143,431,100	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	5	Dokumen	143,431,100	
18	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus"	3	Dokumen	165,000,000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus"	3	Dokumen	165,000,000	
19	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9	dokumen	581,151,900	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9	dokumen	581,151,900	
20	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat"	37,000	Dokumen	31,534,135,200	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat"	37000	Dokumen	31,534,135,200	
21	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	Dokumen	45,608,000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	Dokumen	45,608,000	
22	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	21	Dokumen	17,435,652,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas"	21	Dokumen	17,435,652,000	
23	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	Dokumen	50,000,000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya"	12	Dokumen	50,000,000	
24	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	21	Puskesmas	91,585,000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota"	21	Puskesmas	91,585,000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen informasi kesehatan yang tersedia	13	dokumen	138,260,700	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen informasi kesehatan yang tersedia	13	dokumen	138,260,700	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	Dokumen	74,785,300	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	Dokumen	74,785,300	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12	Dokumen	63,475,400	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12	Dokumen	63,475,400	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah izin Rumah Sakit Tipe C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	221	dokumen	537,950,000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah izin Rumah Sakit Tipe C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	221	dokumen	537,950,000	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	21	Dokumen	309,950,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	21	Dokumen	309,950,000	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	200	Dokumen	228,000,000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	200	Dokumen	228,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESSEHATAN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan minimal Puskesmas	65	persen	1,233,079,700	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESSEHATAN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan minimal Puskesmas	65	persen	1,233,079,700	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan	801	0	103,000,000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan	801	0	103,000,000	
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	400	Dokumen	50,000,000	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	400	Dokumen	50,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	401	Dokumen	53,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	401	Dokumen	53,000,000	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang direncanakan		dok, org	135,000,000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang direncanakan		dok, org	135,000,000	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	368	dokumen	60,000,000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	368	dokumen	60,000,000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standart di Fasilitas Kesehatan	2,195	orang	35,000,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standart di Fasilitas Kesehatan	2195	orang	35,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	21	Dokumen	40,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	21	Dokumen	40,000,000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan mutunya	380	orang	995,079,700	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan mutunya	380	orang	995,079,700	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	380	orang	995,079,700	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	380	orang	995,079,700	

	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standart Good Distribution Practice dan Good Manufacture Practice	100	100	382,800,000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standart Good Distribution Practice dan Good Manufacture Practice	100	persen	564,994,000	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan	40	Dokumen	40,000,000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan	40	Dokumen	40,000,000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40	Dokumen	40,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40	Dokumen	40,000,000	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan	2	dokumen	85,000,000	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan	2	dokumen	85,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan kelas I tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga"	1	Dokumen	40,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan kelas I tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga"	1	Dokumen	40,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	Dokumen	45,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	Dokumen	45,000,000	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri yang diberikan	70	Dokumen	187,800,000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri yang diberikan	70	Dokumen	187,800,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70	Dokumen	187,800,000	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70	Dokumen	187,800,000	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	5	Dokumen	40,000,000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	5	Dokumen	40,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	5	Dokumen	40,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	5	Dokumen	40,000,000	
	Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	Dokumen	30,000,000	Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	Dokumen	30,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	Dokumen	30,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	Dokumen	30,000,000	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	2	unit	30,000,000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	2	unit	182,194,000	
	"Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	2	unit	30,000,000	"Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	2	unit	182,194,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Posyandu Aktif	88	Persen	90,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Posyandu Aktif	88	Persen	90,000,000	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2	Dokumen	90,000,000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2	Dokumen	90,000,000	

	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	Dokumen	90,000,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	Dokumen	90,000,000	
						136,415,015,980						**189,613,727,036**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya pemecahan masalah yang akan dilaksanakan adalah :

a. Terlaksananya keterpaduan upaya kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan terutama dalam upaya promotif dan preventif, maupun kuratif dan rehabilitatif.
b. Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular utamanya melalui optimalisasi pencegahan dan pemberantasan penyakit dengan imunisasi (P3DI). Demikian juga untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit menular lainnya (TB Paru, DBD, Malaria, HIV/AIDS, dsb).
c. Terlaksananya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) diantaranya peningkatan cakupan desa siaga, rumah tangga ber-PHBS dan kemandirian Posyandu.
d. Terpenuhinya SDM yang merata sesuai ratio kebutuhan tenaga dengan jumlah penduduk di UPT Puskesmas dan jaringannya.
e. Tersedianya SDM yang berkualitas (mampu menggunakan sarana teknologi (utamanya alat kesehatan) yang telah tersedia).
f. Tersedianya Jaminan Pembiayaan Kesehatan khususnya kelompok rentan (maskin, ibu hamil, dsb).
g. Tersedianya Sarana/Prasana untuk mendukung program dan kegiatan melalui pembangunan, Pengadaan sarana/prasarana kesehatan terutama untuk mendukung program Desa Siaga melalui pembangunan Poskesdes, Pengadaan Alkes, Pengadaan Kenderaan R-4/Pusling dan R-2.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang sosial dan budaya yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kebijakan pembangunan kesehatan nasional diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian SDG's; dengan sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya umur harapan hidup (UHH), menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan (AKB dan AKI).

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Demikian juga dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2019-2023.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut maka penyelenggaraan pembangunan kesehatan diutamakan bagi penduduk rentan, yakni ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin, daerah tertinggal, daerah bencana, daerah perbatasan, daerah terpencil termasuk pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kesetaraan gender melalui peningkatan upaya pokok pembangunan

kesehatan yang terdiri dari: Upaya Kesehatan; Pembiayaan Kesehatan; Sumber Daya Manusia Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Manajemen dan informasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Upaya pokok tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEK, globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor.

Di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 terdapat beberapa permasalahan yang meliputi:

1. Perkembangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia meliputi Pandemi COVID-19 berdampak multidimensi dan menciptakan berbagai beban tambahan terhadap situasi sistem kesehatan dan krisis berbagai aspek pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga masih diwarnai permasalahan disparitas pada sistem pelayanan kesehatan yang substansial, krisis kesehatan masyarakat, menurunnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Tantangan Kesehatan Ibu dan Anak.

   Angka Kematian Ibu Indonesia juga merupakan salah satu yang tertinggi dari negara-negara ASEAN dengan angka 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015). Angka Kematian Bayi di Indonesia relatif masih tinggi (24 kematian per1.000 KH, SDKI 2017 .Indonesia menempati urutan kedelapan jumlah kematian neonataltertinggi dunia dengan 72.400 kematian neonatal (2018).
3. *Triple Burden* Malnutrisi

   Penurunan prevalensi *wasting* dan *stunting* pada balita merupakan sasaran pokok RPJMN 2020-2024. Prevalensi *wasting* pada balita telah menurun dari 12,1% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 7,4% pada tahun 2019 (SSGI, 2019) dan pada tahun 2021 turun menjadi 7,1% (SSGBI, 2021). Selain itu telah terjadi penurunan balita *stunting* dari 37,2% tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 30,8% tahun 2018 (Riskesdas, 2018), dan pada tahun 2021 telah turun lagi menjadi 24,4% (SSGBI, 2021). Di lain pihak, 3,8% anak balita mengalami kegemukan/*overweight* pada tahun 2021.
4. Transisi Epidemiologi terhadap Beban Penyakit.

   Tantangan penyakit menular yang masih persisten. Dengan jumlah estimasi kasus TB sebesar 824.000 pada tahun 2021, Indonesia menempati rangking ketiga dunia (*WHO Global TB Report* 2021), Infeksi HIV di Indonesia juga masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, Di tahun 2017, 52% dari 514 kabupaten/kota di Indonesia telah diklasifikasikan sebagai daerah bebas malaria, Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data Riskesdas, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada tahun 2013 baru mencapai 59,2% dan turun pada tahun 2018 menjadi 58,4%. Di tahun 2021 terdapat peningkatan capaian menjadi 65,8% berdasarkan SSGI 2021. Tren kejadian *dengue* mengalami peningkatan dari kurun waktu kurang lebih 20 tahun terakhir.

5. Pembudayaan GERMAS.

   GERMAS adalah berbagai upaya intervensi yang komprehensif dan holistik yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan *continuum of care.* Melalui pembudayaan GERMAS, *continuum of care* ini dilakukan secara terpadu dengan pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan aksi multisektor.

6. Potensi, Tantangan Sistem, dan Pelayanan Kesehatan.

   Rasio dokter per 1.000 penduduk di Indonesia mencapai 0,4, masih jauh dari rasio di negara-negara Asia yang rerata mencapai 1,2 per 1.000 penduduk dan negara-negara OECD dengan 3,2 dokter tersedia untuk tiap 1.000 penduduk. Secara nasional Indonesia memiliki rerata 1,18 tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk, sementara rerata di negara-negara Asia memiliki rasio 3,3 tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk, rerata negara-negara OECD mencapai 4,8. Dari sekitar 27.700 fasilitas kesehatan primer yang ada di Indonesia, sebanyak 22.764 fasilitas kesehatan primer telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada Juli 2021, dan direncanakan hingga 23.430 fasilitas pada akhir tahun.

7. Perlunya Peningkatan Akses dan Penguatan Kualitas Layanan Rujukan Sampai dengan tahun 2021, tercatat 3.120 rumah sakit di Indonesia, terdiri dari 2.522 rumah sakit umum (RSU), 521 rumah sakit khusus (RSK), dan 77 rumah sakit darurat. Sebanyak 1.531 rumah sakit umum dan 433 rumah sakit khusus adalah milik swasta, selebihnya milik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan TNI/POLRI. Pada kurun waktu tahun 2015-2019 terjadi peningkatan jumlah RSU dari 1.951 RSU di tahun 2015 menjadi 2.522 RSU pada tahun 2021 (naik 29%). Kenaikan terbesar terjadi pada RSU milik swasta. Untuk RSK, dalam periode yang sama justru terjadi sedikit penurunan, yakni dari 537 pada tahun 2015 menjadi 521 pada tahun 2021. Sebanyak 2.482 RS (79,6%) telah terakreditasi.

8. Perlunya Peningkatan Akses dan Penguatan Kualitas Layanan Rujukan Sampai dengan tahun 2021, tercatat 3.120 rumah sakit di Indonesia, terdiri dari 2.522 rumah sakit umum (RSU), 521 rumah sakit khusus (RSK), dan 77 rumah sakit darurat. Sebanyak 1.531 rumah sakit umum dan 433 rumah sakit khusus adalah milik swasta, selebihnya milik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan TNI/POLRI. Pada kurun waktu tahun 2015-2019 terjadi peningkatan jumlah RSU dari 1.951 RSU di tahun 2015 menjadi 2.522 RSU pada tahun 2021 (naik 29%). Kenaikan terbesar terjadi pada RSU milik swasta. Untuk RSK, dalam periode yang sama justru terjadi sedikit penurunan, yakni dari 537 pada tahun 2015 menjadi 521 pada tahun 2021. Sebanyak 2.482 RS (79,6%) telah terakreditasi.

9. Ketahanan Sektor Farmasi dan Alat Kesehatan

   Penyediaan dan pengelolaan anggaran untuk obat dan alkes di sektor publik dilaksanakan secara konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengambil peran memastikan bahwa pasokan obat program kesehatan dan stok penyangga (*buffer stock*) memadai, serta memastikan keamanan, efikasi dan kualitasnya. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan obat

dan vaksin di puskesmas telah mengalami peningkatan secara signifikan, dari 79,4% di tahun 2015 menjadi 92,12% di tahun 2020.

10. Memperkuat Ketahanan Kesehatan dan Tanggap Darurat Krisis Kesehatan

    Kemampuan dan kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat global menempati peringkat 45 dari 195 negara yang dinilai Global Health Security Index/Indeks Ketahanan Kesehatan Global 2021. Indonesia mempunyai skor untuk Indeks Ketahanan Kesehatan Global 50,4.

11. Sistem Pembiayaan Kesehatan

    Belanja kesehatan Indonesia per kapita telah menunjukkan peningkatan berarti menjadi rata-rata Rp 1,8 juta/kapita/tahun di tahun 2019 (dari Rp 1,1 juta/kapita/tahun di tahun 2012). Total belanja kesehatan ini mewakili hanya 3,1% dari PDB (CHE 2,9% dan *capital formation* 0,2%), di mana proporsi Total Belanja Kesehatan (TBK) terhadap PDB relatif statis dan tidak mengalami perubahan bermakna dibanding tahun-tahun sebelumnya.

12. Ketersediaan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan

    Jumlah dan jenis tenaga kesehatan puskesmas dapat dihitung berdasarkan standar ketenagaan minimal di puskesmas mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas dan dengan perhitungan kebutuhan tenaga di puskesmas berdasarkan beban kerja.

    Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2019, ada 363.714 tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dengan proporsi terbesar adalah bidan yaitu sebesar 41,66% dan yang paling sedikit adalah dokter gigi (2,16%). Dari total 10.134 puskesmas seluruh Indonesia, hanya 44,25% puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga promotif dan preventif kesehatan, meningkat dari 2018 yang mencapai 40%. Keterisian puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan lengkap di provinsi lain rata-rata masih di bawah 50%. Secara nasional terdapat 20% puskesmas yang kekurangan dokter, 31,6% puskesmas dengan status jumlah dokter cukup, dan 48,4% puskesmas yang memiliki jumlah dokter melebihi standar kebutuhan minimal.

13. Penguatan Teknologi Kesehatan, Tatakelola, dan Pengembangan Kebijakan Kesehatan

    Pengembangan dan penguatan pemanfaatan teknologi kesehatan. Pada situasi disrupsi dan perkembangan teknologi yang terus berkembang, pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan merupakan sebuah keniscayaan. Lebih khusus lagi pada aspek terkait kesehatan. Pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga terkait peranan teknologi kesehatan dalam penanganan dan pemberian pelayanan kesehatan. Dengan demikian, menjadi penting penguatan pemanfaatan teknologi kesehatan yang lebih integratif.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di

bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh;
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan;
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan;
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan

4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasilguna dan berdayaguna untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024 yaitu :

- Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indikator :
  a) Penurunan Angka Kematian Ibu
  b) Penurunan Angka Kematian Bayi
  c) Penurunan Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita
  d) Penurunan Angka Kesakitan
  e) Tercapainya Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
  f) Tercapainya Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes Per Satuan Penduduk
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator :
  a) Meningkatnya Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan diatas, maka disusunlah program-program Dinas Kesehatan untuk kurun waktu 2025-2026. Program-program Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dibagi dalam dua jenis, yaitu program Teknis dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Teknis

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Tabel TC. 33

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TAPANULI UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Pemerintah Daerah Terlaksana**				**100 persen**	**100 persen**	**99.028.491.433,00**	**104.140.986.691,00**	**93.911.105.261,00**	**-39.149.847.553,00**							**59.878.643.880,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan*				5 Dokumen	5 Dokumen	105.500.000,00	124.500.000,00	56.494.500,00	-49.005.500,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		150.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	63.000.000,00	73.500.000,00	36.094.500,00	-26.905.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			63.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	-4.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	43.500.000,00	17.400.000,00	-17.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran*				746 Orang	746 Orang	96.132.388.375,00	102.072.135.875,00	92.160.748.505,00	-3.971.639.870,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		56.669.146.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				782 Orang/ bulan	782 Orang/ bulan	95.812.827.175,00	101.752.574.675,00	91.869.687.785,00	-3.943.139.390,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			56.338.630.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	314.561.200,00	314.561.200,00	289.060.720,00	-25.500.480,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			324.516.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Aset Barang Milik Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				34 Paket	34 Paket	223.000.000,00	300.000.000,00	140.672.600,00	-82.327.400,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		346.997.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	10.672.600,00	-14.327.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.997.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	123.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-23.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah*				60 Unit	60 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		932.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			932.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan jasa penunjang umum yang diselenggarakan*				583 Laporan	583 Laporan	2.216.103.058,00	892.850.816,00	892.850.816,00	-1.323.252.242,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		1.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	310.400.000,00	310.400.000,00	310.400.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.905.703.058,00	582.450.816,00	582.450.816,00	-1.323.252.242,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara*				53 Unit	53 Unit	311.500.000,00	711.500.000,00	640.338.840,00	328.838.840,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		470.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	261.500.000,00	261.500.000,00	161.640.840,00	-99.859.160,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	425.000.000,00	468.698.000,00	443.698.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan**				**100 persen**	**100 persen**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				161 unit	161 unit	14.810.459.100,00	8.893.087.000,00	8.893.087.000,00	-5.917.372.100,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		2.221.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	5.718.185.000,00	0,00	0,00	-5.718.185.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	165 Unit	96.000.000,00	121.419.000,00	121.419.000,00	25.419.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			96.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	8.716.274.100,00	8.614.880.400,00	8.614.880.400,00	-101.393.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			1.845.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				21 Paket	21 Paket	80.000.000,00	156.787.600,00	156.787.600,00	76.787.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				23 Layanan	23 Layanan	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4889 Orang	4889 Orang	252.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4317 Orang	4317 Orang	189.850.000,00	132.408.000,00	132.408.000,00	-57.442.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			212.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4330 Orang	4330 Orang	213.461.500,00	52.000.000,00	52.000.000,00	-161.461.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			161.461.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19419 Orang	19419 Orang	169.520.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	-100.520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			100.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				64727 Orang	64727 Orang	80.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				197049 Orang	197049 Orang	205.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-140.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40489 Orang	40489 Orang	123.000.000,00	217.672.000,00	217.672.000,00	94.672.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10720 Orang	10720 Orang	212.269.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-142.269.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			172.269.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2284 Orang	2284 Orang	142.865.300,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-67.865.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			117.865.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				624 Orang	624 Orang	275.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			245.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5481 Orang	5481 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			52.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6491 Orang	6491 Orang	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				-	12 Dokumen	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-210.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	88.990.600,00	52.999.600,00	52.999.600,00	-35.991.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			88.990.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	465.060.160,00	466.060.160,00	466.060.160,00	1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	279.224.700,00	659.938.400,00	659.938.400,00	380.713.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			279.224.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	103.720.800,00	181.000.000,00	181.000.000,00	77.279.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			103.720.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	12 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	325.883.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-275.883.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			335.883.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				41000 Dokumen	41000 Dokumen	22.246.928.499,00	39.067.702.499,00	32.146.831.386,00	9.899.902.887,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			29.140.635.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	0,00	165.192.000,00	165.192.000,00	165.192.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			213.710.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	171.835.000,00	171.835.000,00	126.835.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				600 Orang	600 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			53.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			51.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	98.100.000,00	98.100.000,00	98.100.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	31.500.000,00	518.420.000,00	518.420.000,00	486.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			51.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah dokumen informasi kesehatan yang tersedia*				13 Dokumen	13 Dokumen	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	98.000.000,00	137.900.000,00	137.900.000,00	39.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			109.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah izin Rumah Sakit Tipe C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan*				21 unit	21 unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				21 Unit	21 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				100 Dokumen	100 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis Tenaga Kesehatan Minimal Puskesmas**				**65 persen**	**65 persen**	**1.795.000.000,00**	**1.259.114.000,00**	**1.259.114.000,00**	**-1.090.000.000,00**							**705.000.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan*				801 Dokumen	801 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				600 Dokumen	600 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				600 Dokumen	600 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang direncanakan*				388 Dokumen	388 Dokumen	165.000.000,00	249.000.000,00	249.000.000,00	84.000.000,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				4000 Dokumen	4000 Dokumen	100.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	84.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan mutunya*				380 Orang	380 Orang	1.570.000.000,00	950.114.000,00	950.114.000,00	-619.886.000,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		495.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				150 Orang	150 Orang	1.570.000.000,00	950.114.000,00	950.114.000,00	-619.886.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			495.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standart Good Distribution Practice (GDP) dan Good Manufacture Practice (GMP)**				**100 persen**	**100 persen**	**612.000.000,00**	**441.958.000,00**	**441.958.000,00**	**-247.000.000,00**							**365.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan*				40 sarana	40 sarana	33.000.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00	65.400.000,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00	65.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan*				2 Dokumen	2 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri yang diberikan Rumah Tangga*				70 sarana	70 sarana	250.000.000,00	66.924.000,00	66.924.000,00	-183.076.000,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				80 Dokumen	80 Dokumen	250.000.000,00	66.924.000,00	66.924.000,00	-183.076.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	- -			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan*				5 Dokumen	5 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	12 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan*				2 Dokumenn	2 Dokumenn	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa*				22 Dokumen	22 Dokumen	235.000.000,00	182.634.000,00	182.634.000,00	-52.366.000,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				12 Unit	12 Unit	235.000.000,00	182.634.000,00	182.634.000,00	-52.366.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	- -			135.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			78.130.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS AEK RAJA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	102.850.000,00	102.850.000,00	82.850.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-11.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	71.400.000,00	71.400.000,00	51.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	-13.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				40 Dokumen	40 Dokumen	400.000.000,00	164.875.000,00	164.875.000,00	-235.125.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00	10.370.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	23.970.000,00	23.970.000,00	3.970.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	6.182.000,00	6.182.000,00	-13.818.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1200 Orang	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	117.748.000,00	117.748.000,00	97.748.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	60.000.000,00	197.100.000,00	650.471.458,00	590.471.458,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	6.135.000,00	6.135.000,00	-13.865.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	-17.765.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	28.560.000,00	28.560.000,00	28.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00	-10.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BUTAR							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	101.200.000,00	101.200.000,00	81.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85 Orang	85 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	180 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1700 Orang	1700 Orang	20.000.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	-15.380.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	350 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				870 Orang	870 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85 Orang	85 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				46 Orang	46 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	-8.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				98 Orang	98 Orang	20.000.000,00	23.650.000,00	23.650.000,00	3.650.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				300 Dokumen	300 Dokumen	400.000.000,00	171.614.000,00	171.614.000,00	-228.386.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				30 Dokumen	30 Dokumen	20.000.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	-6.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				18 Dokumen	18 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	6.333.200,00	6.333.200,00	-13.666.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				37 Dokumen	37 Dokumen	20.000.000,00	111.266.800,00	111.266.800,00	91.266.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				42 Dokumen	42 Dokumen	60.000.000,00	190.940.000,00	889.687.484,00	829.687.484,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- --			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				69 Dokumen	69 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				11 Laporan	11 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				27 Orang	27 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				40 Dokumen	40 Dokumen	20.000.000,00	80.550.000,00	80.550.000,00	60.550.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	-17.030.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- --	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				150 Dokumen	150 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- --	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				350 Dokumen	350 Dokumen	20.000.000,00	8.960.000,00	8.960.000,00	-11.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS GAROGA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- --	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	185.250.000,00	185.250.000,00	165.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4000 Orang	4000 Orang	20.000.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	-2.720.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				750 Orang	750 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2750 Orang	2750 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				260 Orang	260 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				045 Orang	045 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00	-10.650.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				440 Orang	440 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1000 Dokumen	1000 Dokumen	400.000.000,00	238.015.000,00	238.015.000,00	-161.985.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	-7.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	7.676.000,00	7.676.000,00	-12.324.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	130.874.000,00	130.874.000,00	110.874.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	232.040.000,00	1.003.952.512,00	943.952.512,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	65.450.000,00	65.450.000,00	45.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	10.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	-18.520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	16.880.000,00	16.880.000,00	-3.120.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS HUTABAGINDA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	239.400.000,00	239.400.000,00	219.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00	-7.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	23.760.000,00	23.760.000,00	3.760.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	30.150.000,00	30.150.000,00	10.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	730.000.000,00	276.976.000,00	276.976.000,00	-453.024.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	11.340.000,00	11.340.000,00	11.340.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	12.870.000,00	12.870.000,00	-7.130.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	11.140.000,00	11.140.000,00	-8.860.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	181.781.000,00	181.781.000,00	161.781.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	256.774.000,00	2.304.581.811,00	2.244.581.811,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	7.972.000,00	7.972.000,00	-12.028.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				400 Orang	400 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				400 Orang	400 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	-15.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	684.000,00	684.000,00	-19.316.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	25.336.000,00	25.336.000,00	5.336.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS JANJI ANGKOLA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	152.350.000,00	152.350.000,00	132.350.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	8.430.000,00	8.430.000,00	-11.570.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	-14.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00	-10.760.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	8.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				200 Dokumen	200 Dokumen	400.000.000,00	200.273.000,00	200.273.000,00	-199.727.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	16.240.000,00	16.240.000,00	-3.760.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	-15.140.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	8.960.000,00	8.960.000,00	8.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00	123.500.000,00	123.500.000,00	103.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				20 Dokumen	20 Dokumen	60.000.000,00	196.420.000,00	591.021.505,00	531.021.505,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				50 Laporan	50 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	280.000,00	280.000,00	-19.720.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	16.940.000,00	16.940.000,00	-3.060.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LUMBAN SINAGA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				325 Orang	325 Orang	20.000.000,00	111.900.000,00	111.900.000,00	91.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				228 Orang	228 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				310 Orang	310 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1488 Orang	1488 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7000 Orang	7000 Orang	20.000.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	-12.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17000 Orang	17000 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2418 Orang	2418 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00	1.120.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	22.560.000,00	22.560.000,00	2.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				364 Dokumen	364 Dokumen	400.000.000,00	221.745.000,00	221.745.000,00	-178.255.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	14.880.000,00	14.880.000,00	14.880.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	4.768.000,00	4.768.000,00	-15.232.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	30.720.000,00	30.720.000,00	30.720.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	155.172.000,00	155.172.000,00	135.172.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	221.440.000,00	733.100.531,00	673.100.531,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	17.320.000,00	17.320.000,00	-2.680.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	920.000,00	920.000,00	-19.080.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	9.320.000,00	9.320.000,00	-10.680.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MUARA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	350 Orang	20.000.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	36.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	8.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	36.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	28.125.000,00	28.125.000,00	8.125.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	-7.850.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	400.000.000,00	258.975.000,00	258.975.000,00	-141.025.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	-200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	44.900.000,00	44.900.000,00	24.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	38.800.000,00	38.800.000,00	18.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	79.300.000,00	79.300.000,00	59.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				20 Dokumen	20 Dokumen	60.000.000,00	225.160.000,00	876.219.474,00	816.219.474,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- --			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00	-14.760.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	960.000,00	960.000,00	-19.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- --	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	-6.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- --	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	900.000,00	900.000,00	-19.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PUSKESMAS ONAN HASANG							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85 Orang	85 Orang	20.000.000,00	165.300.000,00	165.300.000,00	145.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85 Orang	85 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85 Orang	85 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2250 Orang	2250 Orang	20.000.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	-8.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6930 Orang	6930 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1850 Orang	1850 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				145 Orang	145 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	20.000.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	12.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2500 Dokumen	2500 Dokumen	400.000.000,00	220.059.000,00	220.059.000,00	-179.941.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	-7.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				40 Dokumen	40 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-18.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	155.800.000,00	155.800.000,00	135.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				24 Dokumen	24 Dokumen	60.000.000,00	217.340.000,00	870.334.380,00	810.334.380,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- --			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	970.000,00	970.000,00	-19.030.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- --	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- --	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	13.740.000,00	13.740.000,00	-6.260.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANGARIBUAN							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- --	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	187.704.000,00	187.704.000,00	167.704.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1380 Orang	1380 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7000 Orang	7000 Orang	20.000.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	-7.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17000 Orang	17000 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70 Orang	70 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-6.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				800 Dokumen	800 Dokumen	400.000.000,00	205.242.000,00	205.242.000,00	-194.758.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	20 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	-11.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				15 Dokumen	15 Dokumen	20.000.000,00	160.400.000,00	160.400.000,00	140.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	217.900.000,00	1.005.690.279,00	945.690.279,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				20 Laporan	20 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				50 Dokumen	50 Dokumen	20.000.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	-18.784.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				0 Keluarga	0 Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	-7.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANIARAN							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	20.000.000,00	84.600.000,00	84.600.000,00	64.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	6.160.000,00	6.160.000,00	-13.840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	18.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				700 Dokumen	700 Dokumen	400.000.000,00	169.275.000,00	169.275.000,00	-230.725.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	61.600.000,00	61.600.000,00	61.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				250 Dokumen	250 Dokumen	20.000.000,00	10.230.000,00	10.230.000,00	-9.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				300 Dokumen	300 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				350 Dokumen	350 Dokumen	20.000.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	-14.530.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				300 Dokumen	300 Dokumen	20.000.000,00	100.600.000,00	100.600.000,00	80.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				250 Dokumen	250 Dokumen	60.000.000,00	189.240.000,00	814.256.547,00	754.256.547,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				200 Laporan	200 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				170 Orang	170 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				300 Dokumen	300 Dokumen	20.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				200 Dokumen	200 Dokumen	20.000.000,00	660.000,00	660.000,00	-19.340.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- --	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- --	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				180 Dokumen	180 Dokumen	20.000.000,00	11.120.000,00	11.120.000,00	-8.880.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PARMONANGAN							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- --	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				130 Orang	130 Orang	20.000.000,00	122.400.000,00	122.400.000,00	102.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				130 Orang	130 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				130 Orang	130 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				130 Orang	130 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				700 Orang	700 Orang	20.000.000,00	13.260.000,00	13.260.000,00	-6.740.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				320 Orang	320 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	22.440.000,00	22.440.000,00	2.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	-11.840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1500 Dokumen	1500 Dokumen	400.000.000,00	209.217.000,00	209.217.000,00	-190.783.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1500 Dokumen	1500 Dokumen	20.000.000,00	16.490.000,00	16.490.000,00	-3.510.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1500 Dokumen	1500 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	20.000.000,00	18.646.000,00	18.646.000,00	-1.354.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	12 Orang	0,00	13.260.000,00	13.260.000,00	13.260.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1000 Dokumen	1000 Dokumen	20.000.000,00	148.304.000,00	148.304.000,00	128.304.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1000 Dokumen	1000 Dokumen	60.000.000,00	215.160.000,00	611.991.693,00	551.991.693,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				800 Dokumen	800 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				500 Laporan	500 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1000 Dokumen	1000 Dokumen	20.000.000,00	37.725.000,00	37.725.000,00	17.725.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1000 Dokumen	1000 Dokumen	20.000.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	-18.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				500 Dokumen	500 Dokumen	20.000.000,00	13.095.000,00	13.095.000,00	-6.905.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PARSINGKAMAN							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				308 Orang	308 Orang	20.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	183.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				294 Orang	294 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				280 Orang	280 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1343 Orang	1343 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2700 Orang	2700 Orang	20.000.000,00	16.640.000,00	16.640.000,00	-3.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7858 Orang	7858 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1733 Orang	1733 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				790 Orang	790 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	45 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				22 Orang	22 Orang	20.000.000,00	17.160.000,00	17.160.000,00	-2.840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				262 Orang	262 Orang	20.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				365 Orang	365 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	214.491.000,00	214.491.000,00	-185.509.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	8.320.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	14.170.000,00	14.170.000,00	-5.830.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	10.748.000,00	10.748.000,00	-9.252.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	145.082.000,00	145.082.000,00	125.082.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	237.184.000,00	923.057.313,00	863.057.313,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- - -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				53 Orang	53 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	15.560.000,00	15.560.000,00	-4.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	950.000,00	950.000,00	-19.050.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- - -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- - -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	10.953.000,00	10.953.000,00	-9.047.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SARULLA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				43 Orang	43 Orang	20.000.000,00	131.040.000,00	131.040.000,00	111.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				576 Orang	576 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1300 Orang	1300 Orang	20.000.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	-13.520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1700 Orang	1700 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				675 Orang	675 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	-4.160.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	34.450.000,00	34.450.000,00	14.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	213.160.000,00	213.160.000,00	-186.840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	15.960.000,00	15.960.000,00	-4.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	7.388.000,00	7.388.000,00	-12.612.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	8.320.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	134.600.000,00	134.600.000,00	114.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	221.520.000,00	987.641.593,00	927.641.593,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				18 Orang	18 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	74.880.000,00	74.880.000,00	54.880.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	905.000,00	905.000,00	-19.095.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	-12.340.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIATAS BARITA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	154.200.000,00	154.200.000,00	134.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1316 Orang	1316 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-11.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	9.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	730.000.000,00	216.528.000,00	216.528.000,00	-513.472.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00	-6.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	12.148.000,00	12.148.000,00	-7.852.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	130.552.000,00	130.552.000,00	110.552.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	215.688.000,00	1.251.835.977,00	1.191.835.977,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	15.130.000,00	15.130.000,00	-4.870.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	910.000,00	910.000,00	-19.090.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	9.312.000,00	9.312.000,00	-10.688.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIBORONGBORONG							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	20.000.000,00	134.500.000,00	134.500.000,00	114.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				240 Orang	240 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				240 Orang	240 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1280 Orang	1280 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3990 Orang	3990 Orang	20.000.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	-4.160.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13960 Orang	13960 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3705 Orang	3705 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1513 Orang	1513 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				112 Orang	112 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	20.000.000,00	63.360.000,00	63.360.000,00	43.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				45 Orang	45 Orang	20.000.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00	15.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	212.303.000,00	212.303.000,00	-187.697.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	14.630.000,00	14.630.000,00	-5.370.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	14.328.000,00	14.328.000,00	-5.672.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	142.892.000,00	142.892.000,00	122.892.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	234.440.000,00	1.824.370.250,00	1.764.370.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	7.972.000,00	7.972.000,00	-12.028.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				45 Orang	45 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	-5.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	8.760.000,00	8.760.000,00	-11.240.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SILANGIT							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				241 Orang	241 Orang	20.000.000,00	80.100.000,00	80.100.000,00	60.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				230 Orang	230 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				230 Orang	230 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1053 Orang	1053 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1298 Orang	1298 Orang	20.000.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	-8.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6226 Orang	6226 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11711 Orang	11711 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				678 Orang	678 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				78 Orang	78 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				38 Orang	38 Orang	20.000.000,00	29.040.000,00	29.040.000,00	9.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				216 Orang	216 Orang	20.000.000,00	11.660.000,00	11.660.000,00	-8.340.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				348 Orang	348 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1053 Dokumen	1053 Dokumen	400.000.000,00	165.177.000,00	165.177.000,00	-234.823.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				120 Dokumen	120 Dokumen	20.000.000,00	27.610.000,00	27.610.000,00	7.610.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				150 Dokumen	150 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				150 Dokumen	150 Dokumen	20.000.000,00	8.624.000,00	8.624.000,00	-11.376.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1550 Dokumen	1550 Dokumen	20.000.000,00	106.906.000,00	106.906.000,00	86.906.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1110 Dokumen	1110 Dokumen	60.000.000,00	189.740.000,00	843.295.318,00	783.295.318,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1110 Dokumen	1110 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				20 Laporan	20 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				9 Orang	9 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1908 Dokumen	1908 Dokumen	20.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1053 Dokumen	1053 Dokumen	20.000.000,00	840.000,00	840.000,00	-19.160.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				50 Dokumen	50 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1500 Dokumen	1500 Dokumen	20.000.000,00	9.060.000,00	9.060.000,00	-10.940.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMANGUMBAN							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	119.200.000,00	119.200.000,00	99.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-11.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				70 Orang	70 Orang	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				250 Dokumen	250 Dokumen	400.000.000,00	197.307.000,00	197.307.000,00	-202.693.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	-9.650.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	12.307.000,00	12.307.000,00	-7.693.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	117.442.000,00	117.442.000,00	97.442.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	202.220.000,00	625.055.572,00	565.055.572,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				70 Orang	70 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-18.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- --	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- --	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	8.680.000,00	8.680.000,00	-11.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIPAHUTAR							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- --	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	252.250.000,00	252.250.000,00	232.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	20.240.000,00	20.240.000,00	240.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00	1.120.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	51.150.000,00	51.150.000,00	31.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	246.823.000,00	246.823.000,00	-153.177.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	12.870.000,00	12.870.000,00	-7.130.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	13.476.000,00	13.476.000,00	-6.524.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	140.504.000,00	140.504.000,00	120.504.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	239.692.000,00	1.654.947.413,00	1.594.947.413,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	6.690.000,00	6.690.000,00	-13.310.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	952.000,00	952.000,00	-19.048.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	14.148.000,00	14.148.000,00	-5.852.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIPULTAK							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	106.200.000,00	106.200.000,00	86.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1650 Orang	1650 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1100 Orang	1100 Orang	20.000.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	-13.280.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	2000 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1100 Orang	1100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	-2.720.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	20.000.000,00	24.480.000,00	24.480.000,00	4.480.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	161.262.000,00	161.262.000,00	-238.738.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	24.480.000,00	24.480.000,00	24.480.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	37.440.000,00	37.440.000,00	17.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	5.488.000,00	5.488.000,00	-14.512.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	89.592.000,00	89.592.000,00	69.592.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	191.800.000,00	625.697.658,00	565.697.658,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KE SEHATAN/NONK APITASI	-	- --			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	920.000,00	920.000,00	-19.080.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- --	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- --	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	9.280.000,00	9.280.000,00	-10.720.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PUSKESMAS SITADATADA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	81.720.000,00	81.720.000,00	61.720.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1500 Orang	1500 Orang	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				850 Orang	850 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	-8.120.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	20.000.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00	1.120.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	204.348.000,00	204.348.000,00	-195.652.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-10.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	8.324.800,00	8.324.800,00	-11.675.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	15.360.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	120.805.200,00	120.805.200,00	100.805.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	198.800.000,00	706.320.651,00	646.320.651,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- --			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				16 Orang	16 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	47.050.000,00	47.050.000,00	27.050.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	-18.060.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- --	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- --	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-15.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SITUMEANG HABINSARAN							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- --	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	64.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- --			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1300 Orang	1300 Orang	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9100 Orang	9100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1800 Orang	1800 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				104 Orang	104 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	8.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				140 Orang	140 Orang	20.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	203.139.000,00	203.139.000,00	-196.861.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	30 Dokumen	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				30 Dokumen	30 Dokumen	20.000.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	-6.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	9.786.400,00	9.786.400,00	-10.213.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				15 Dokumen	15 Dokumen	20.000.000,00	117.773.600,00	117.773.600,00	97.773.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				15 Dokumen	15 Dokumen	60.000.000,00	213.120.000,00	1.057.394.708,00	997.394.708,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				60 Orang	60 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	46.750.000,00	46.750.000,00	26.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	350.000,00	350.000,00	-19.650.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	-15.120.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.125.081.632,86**							**114.383.403.980,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja perubahan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rumusan rencana program- kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tapanuli Utara.

Namun demikian Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara masih mengusulkan tambahan anggaran untuk beberapa sub kegiatan yang sangat penting terutama untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN KAB. TAPANULI UTARA

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Bertambah/ (Berkurang)	SUMBER DANA
		SEBELUM	EFISIENSI	P-APBD		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73,500,000	36,094,500	36,094,500	-	DAU
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,500,000	3,000,000	3,000,000	-	DAU
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43,500,000	17,400,000	17,400,000	-	DAU
b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					90,451,332,534.00
	GAJI PNSD	47,828,825,080	47,828,825,080	36,527,582,940	(11,301,242,140)	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
	GAJI PPPK	33,157,058,320	33,157,058,320	33,157,058,320	-	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
	TPP PNSD	10,571,602,524	10,571,602,524	10,571,602,524	-	TPP PNSD
	GAJI DAU KESEHATAN	10,195,088,750	10,195,088,750	10,195,088,750	-	DAU BIDANG KESEHATAN/GAJI
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	314,561,200	289,060,720	312,580,720	23,520,000	PAD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000	2,000,000	2,000,000	-	DAU
c	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40,000,000	20,000,000	20,000,000	-	DAU
d	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,000,000	10,000,000	10,000,000	-	DAU
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,000,000	10,000,000	10,000,000	-	DAU
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,000,000	10,672,600	10,672,600	-	DAU
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25,000,000	10,000,000	10,000,000	-	DAU
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,000,000	100,000,000	100,000,000	-	DAU
e	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310,400,000	310,400,000	310,400,000	-	PAD
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582,450,816	582,450,816	152,937,600	(429,513,216)	PAD
f	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	261,500,000	121,640,840	161,640,840	40,000,000	DAU
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25,000,000	10,000,000	70,000,000	60,000,000	DAU
	Rehabilitasi Berat Gudang Farmasi	400,000,000	398,698,000	398,698,000	-	DAU

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Bertambah/ (Berkurang)	SUMBER DANA
		SEBELUM	EFISIENSI	P-APBD		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000	10,000,000	10,000,000	-	DAU
II	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					
a	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
1	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
	Kalibrasi Peralatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar	121,419,000	121,419,000	121,419,000	-	DAK NF
2	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					
	Biaya Umum Pengadaan Obat, Vaksin	113,000,000	113,000,000	113,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
	Pengadaan Obat PKD	3,402,218,279	3,402,218,279	3,402,218,279	-	DAK NF
	Pengadaan BMHP PKD	2,379,844,191	2,379,844,191	2,379,844,191	-	DAK NF
	Penyediaan kartrid TCM	931,655,900	931,655,900	931,655,900	-	DAK NF
	Penyediaan BMHP HPV DNA (reagen test, Collecting Kit/Cytobrush dan VTM, Reagen Ekstraksi DNA HPV)	529,809,139	529,809,139	529,809,139	-	DAK NF
	Penyediaan BMHP Thermal paper untuk EKG dan Gel untuk EKG	86,668,000	86,668,000	86,668,000	-	DAK NF
	Penyediaan BMHP Profil Lipid untuk Deteksi Dini Faktor Risiko Stroke	-	-	-	-	DAK NF
	BMHP Gula darah	793,265,400	793,265,400	793,265,400	-	DAK NF
	Reagen Sanitarian Kit	233,960,000	233,960,000	233,960,000	-	DAK NF
	Pengadaan BMHP SHK	55,336,344	55,336,344	55,336,344	-	DAK NF
	Pengadaan BMHP Strip Hb pada Rematri	89,123,147	89,123,147	89,123,147	-	DAK NF
3	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					
	Biaya Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP Kabupaten/ Kota ke Puskesmas	156,787,600	156,787,600	156,787,600	-	DAK NF
b	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52,000,000	52,000,000	52,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	52,000,000	52,000,000	52,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
	Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) (termasuk Transport Rujukan Pelayanan Ibu Melahirkan)	80,408,000	80,408,000	80,408,000	-	DAK NF
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	52,000,000	52,000,000	52,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	69,000,000	69,000,000	69,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	55,000,000	55,000,000	55,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut					

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Bertambah/ (Berkurang)	SUMBER DANA
		SEBELUM	EFISIENSI	P-APBD		
	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	53,000,000	53,000,000	53,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
	Pembinan Teknis dan penguatan Puskesmas santun lansia dan perawatan jangka panjang lansia	164,672,000	164,672,000	164,672,000	-	DAK NF
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	75,000,000	75,000,000	75,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	73,000,000	73,000,000	73,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	90,000,000	90,000,000	90,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
	Pelaksanaan Gerakan Kebugaran Jasmani	32,999,600	32,999,600	32,999,600	-	DAK NF
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	176,060,160	176,060,160	176,060,160	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
	Pembiayaan Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis dan B3 dari Fasyankes ke Pengelola Berizin	290,000,000	290,000,000	290,000,000	-	DAK NF
17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
	Penyediaan media KIE untuk posyandu dan Bahan bacaan kader	175,523,000	175,523,000	175,523,000	-	DAK NF
	Pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi	127,378,000	127,378,000	127,378,000	-	DAK NF
	Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting	131,897,800	131,897,800	131,897,800	-	DAK NF
	Pelaksanaan Gerakan Bumil Sehat	94,139,200	94,139,200	94,139,200	-	DAK NF
	Pelaksanaan Gerakan Posyandu Aktif	75,000,400	75,000,400	75,000,400	-	DAK NF
	Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA)	56,000,000	56,000,000	56,000,000	-	DAK NF
18	Pengelolaan Surveilens Kesehatan					
	Surveilens Kesehatan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
	Verifikasi sinyal/rumor, PE/pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB/Wabah, investigasi kasus KIPI, serta PE penyakit menular lainnya, keracunan makanan dan penyehatan lingkungan	116,000,000	116,000,000	116,000,000	-	DAK NF
	Validasi data sasaran/cakupan penemuan kasus dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit	45,000,000	45,000,000	45,000,000	-	DAK NF
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
20	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Bertambah/ (Berkurang)	SUMBER DANA
		SEBELUM	EFISIENSI	P-APBD		
	DBD, Chikungunya, Rabies, ISPA, Diare, Kusta, Campak, Frambusia, Kecacingan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
21	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					
	Monitoring Dan Evaluasi Jaminan Kesehatan	55,000,000	55,000,000	55,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
	Premi Jaminan Kesehatan Daerah	8,695,088,750	8,695,088,750	10,513,016,750	1,817,928,000	DAU BIDANG KESEHATAN/JAMKES
	Premi Jaminan Kesehatan Daerah (DBH-SAWIT)	150,114,000	150,114,000	150,114,000	-	DBH SAWIT
	Premi Jaminan Kesehatan Daerah (DAU)	1,726,782,550	1,726,782,550	1,726,782,550	-	DAU JAMKESDA
	Premi Jaminan Kesehatan Daerah (DBH-ROKOK)	9,378,267,700	9,378,267,700	12,672,285,314	3,294,017,614	DBH-PAJAK ROKOK
	Premi Jaminan Kesehatan Daerah (PAD)	4,174,913,900	4,174,913,900	4,174,913,900	-	PAD
	Premi Jaminan Kesehatan Daerah (DBH-CHT)	1,482,407,100	1,482,407,100	1,526,570,486	44,163,386	DBH-CHT
	Bantuan Pemerintah Daerah untuk Kelas III (DAU)	2,032,800,000	2,032,800,000	2,032,800,000	-	DAU JAMKESDA
	Dana Kapitasi (APBN)	11,322,328,500	11,322,328,500	-	(11,322,328,500)	APBN/KAPITASI
	Operasional Pendukung JKN	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	DBH-CHT
21a	Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN)					
1	PUSKESMAS PANGARIBUAN	-	-	752,362,548	752,362,548	APBN/KAPITASI
2	PUSKESMAS PARMONANGAN	-	-	380,842,008	380,842,008	APBN/KAPITASI
3	PUSKESMAS SIPAHUTAR	-	-	1,317,904,212	1,317,904,212	APBN/KAPITASI
4	PUSKESMAS LUMBAN SINAGA	-	-	497,869,992	497,869,992	APBN/KAPITASI
5	PUSKESMAS MUARA	-	-	624,847,344	624,847,344	APBN/KAPITASI
6	PUSKESMAS SILANGIT	-	-	570,313,080	570,313,080	APBN/KAPITASI
7	PUSKESMAS ONAN HASANG	-	-	624,267,204	624,267,204	APBN/KAPITASI
8	PUSKESMAS SIBORONGBORONG	-	-	1,509,074,208	1,509,074,208	APBN/KAPITASI
9	PUSKESMAS PANIARAN	-	-	571,956,576	571,956,576	APBN/KAPITASI
10	PUSKESMAS SARULLA	-	-	730,938,192	730,938,192	APBN/KAPITASI
11	PUSKESMAS PARSINGKAMAN	-	-	639,255,324	639,255,324	APBN/KAPITASI
12	PUSKESMAS HUTABAGINDA	-	-	1,943,552,280	1,943,552,280	APBN/KAPITASI
13	PUSKESMAS SITADATADA	-	-	474,729,168	474,729,168	APBN/KAPITASI
14	PUSKESMAS AEK RAJA	-	-	421,867,236	421,867,236	APBN/KAPITASI
15	PUSKESMAS JANJI ANGKOLA	-	-	376,779,648	376,779,648	APBN/KAPITASI
16	PUSKESMAS SITUMEANG HABINSARAN	-	-	805,721,376	805,721,376	APBN/KAPITASI
17	PUSKESMAS GAROGA	-	-	725,641,212	725,641,212	APBN/KAPITASI
18	PUSKESMAS BUTAR	-	-	671,047,284	671,047,284	APBN/KAPITASI
19	PUSKESMAS SIATAS BARITA	-	-	850,941,948	850,941,948	APBN/KAPITASI
20	PUSKESMAS SIPULTAK	-	-	418,659,276	418,659,276	APBN/KAPITASI
21	PUSKESMAS SIMANGUMBAN	-	-	396,381,991	396,381,991	APBN/KAPITASI
1	PUSKESMAS BUTAR	-	-	27,700,200	27,700,200	APBN/NON KAPITASI
2	PUSKESMAS GAROGA	-	-	46,271,300	46,271,300	APBN/NON KAPITASI
3	PUSKESMAS HUTABAGINDA	-	-	104,255,531	104,255,531	APBN/NON KAPITASI
4	PUSKESMAS MUARA	-	-	26,212,130	26,212,130	APBN/NON KAPITASI
5	PUSKESMAS ONAN HASANG	-	-	28,727,176	28,727,176	APBN/NON KAPITASI
6	PUSKESMAS PANGARIBUAN	-	-	35,427,730	35,427,730	APBN/NON KAPITASI
7	PUSKESMAS PANIARAN	-	-	53,059,970	53,059,970	APBN/NON KAPITASI
8	PUSKESMAS PARSINGKAMAN	-	-	46,617,989	46,617,989	APBN/NON KAPITASI
9	PUSKESMAS SARULLA	-	-	35,183,401	35,183,401	APBN/NON KAPITASI
10	PUSKESMAS SIATAS BARITA	-	-	185,206,029	185,206,029	APBN/NON KAPITASI
11	PUSKESMAS SIBORONGBORONG	-	-	80,856,041	80,856,041	APBN/NON KAPITASI
12	PUSKESMAS SIPAHUTAR	-	-	97,351,201	97,351,201	APBN/NON KAPITASI
13	PUSKESMAS SIPULTAK	-	-	15,238,381	15,238,381	APBN/NON KAPITASI
14	PUSKESMAS SITUMEANG HABINSARAN	-	-	38,553,332	38,553,332	APBN/NON KAPITASI
15	PUSKESMAS SITADATADA	-	-	32,791,483	32,791,483	APBN/NON KAPITASI

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Bertambah/ (Berkurang)	SUMBER DANA
		SEBELUM	EFISIENSI	P-APBD		
16	PUSKESMAS LUMBAN SINAGA	-	-	13,790,539	13,790,539	APBN/NON KAPITASI
17	PUSKESMAS AEK RAJA	-	-	31,504,222	31,504,222	APBN/NON KAPITASI
18	PUSKESMAS PARMONANGAN	-	-	15,989,685	15,989,685	APBN/NON KAPITASI
19	PUSKESMAS JANJI ANGKOLA	-	-	17,821,857	17,821,857	APBN/NON KAPITASI
20	PUSKESMAS SILANGIT	-	-	83,242,237	83,242,237	APBN/NON KAPITASI
21	PUSKESMAS SIMANGUMBAN	-	-	26,453,581	26,453,581	APBN/NON KAPITASI
22	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		-			
	Pengiriman dan pemeriksaan spesimen ke laboratorium rujukan tingkat kab/kota atau provinsi serta pengembalian spesimen carrier dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit (termasuk membiayai sampel dari puskesmas)	165,192,000	165,192,000	165,192,000	-	DAK NF
23	Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK Puskesmas)	18,321,519,000	18,321,519,000	18,321,519,000	-	DAK NF
24	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					185,239,000
	Dukungan Manajemen BOK Kab dan BOK Puskesmas	45,000,000	45,000,000	45,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
	Pendampingan pelaksanaan ILP	99,260,000	99,260,000	99,260,000	-	DAK NF
	Pembinaan Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	27,575,000	27,575,000	27,575,000	-	DAK NF
	Dukungan Operasi Katarak dan Bibir Sumbing	-	-	13,404,000	13,404,000	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kab/Kota	98,100,000	98,100,000	98,100,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
26	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	31,500,000	31,500,000	31,500,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
	Verifikasi dan Analisis data MPDN serta Audit kasus kematian maternal dan perinatal	142,000,000	142,000,000	142,000,000	-	DAK NF
	Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi	174,920,000	174,920,000	174,920,000	-	DAK NF
	Pemeriksaan dan Pengiriman Sampel ke Lab Rujukan SHK	170,000,000	170,000,000	170,000,000	-	DAK NF
27	Pengelolaan Layanan Imunisasi					
	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
	Imunisasi Rutin	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji					
	Pelayanan Kesehatan calon jamaah haji	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
c	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**					
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	98,000,000	98,000,000	98,000,000	-	DAK NF
	Penilaian Ketersediaan Obat Kabupaten/Kota melalui Evaluasi Pelaporan Obat di Puskesmas	39,900,000	39,900,000	39,900,000	-	DAK NF
d	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (DAU)	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	90,000,000	90,000,000	90,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
III	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Bertambah/ (Berkurang)	SUMBER DANA
		SEBELUM	EFISIENSI	P-APBD		
a	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**					
1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
b	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**					
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	119,000,000	119,000,000	119,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
	Penyelenggaraan BLUD	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
c	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
	Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	259,647,850	259,647,850	259,647,850	-	DAK NF
	Pelatihan Pelayanan Kesehatan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak(KtP/A dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Dasilitas Pelayanan Kesehatan	196,604,450	196,604,450	196,604,450	-	DAK NF
	Pelatihan Pelayanan ANC dan Penggunaan USG Dasar Obstetri Terbatas melalui Blended Learning	119,282,400	119,282,400	119,282,400	-	DAK NF
	Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan	221,748,300	221,748,300	221,748,300	-	DAK NF
	Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu	82,831,000	82,831,000	82,831,000	-	DAK NF
IV	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					
a	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**					
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
	Pemeriksaan sarana apotek dan toko obat serta pendampingan pemenuhan CAPA	36,110,000	36,110,000	36,110,000	-	DAK NF (BPOM)
	Bimtek perizinan dan pengelolaan obat di apotek dan toko obat	29,290,000	29,290,000	29,290,000	-	DAK NF (BPOM)
b	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**					

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Bertambah/ (Berkurang)	SUMBER DANA
		SEBELUM	EFISIENSI	P-APBD		
1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	32,000,000	32,000,000	32,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
c	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**					
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					
	Bimtek Keamanan Pangan bagi pelaku usaha	38,780,000	38,780,000	38,780,000	-	DAK NF (BPOM)
	Pemeriksaan sarana IRTP dalam pemenuhan komitmen dan pendampingan pemenuhan CAPA	28,144,000	28,144,000	28,144,000	-	DAK NF (BPOM)
d	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**					
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	32,000,000	32,000,000	32,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
e	**Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**					
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
f	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**					
1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (DAU)	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG
	Pemeriksaan post market sarana IRTP dan pendampingan pemenuhan CAPA	30,632,000	30,632,000	30,632,000	-	DAK NF (BPOM)
	Bimtek Penerapan CPPOB-IRTP bagi Pelaku Usaha	43,156,000	43,156,000	43,156,000	-	DAK NF (BPOM)
	Pengujian sampel PIRT dan tindak lanjut hasil pengawasan PIRT	68,954,000	68,954,000	68,954,000	-	DAK NF (BPOM)
	Pengawasan iklan dan tindak lanjut hasil pengawasan iklan	4,892,000	4,892,000	4,892,000	-	DAK NF (BPOM)
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					
a	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	DAU BIDANG KESEHATAN/DAU SG

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Bertambah/ (Berkurang)	SUMBER DANA
		SEBELUM	EFISIENSI	P-APBD		
b	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					
1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
	Advokasi, koordinasi dan Bintek kelompok kerja operasional posyandu, Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam transformasi layanan primer	101,000,000	101,000,000	101,000,000	-	DAK NF
TOTAL		**176,307,892,350**	**175,860,897,810**	**174,448,053,076**	**(1,412,844,734)**	

BAB V
PENUTUP

Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 tetap berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026. Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat bergantung dari sistem informasi yang ada dan konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama, karena pengukuran kinerja bersifat *on going proces* sehingga wajib secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator kinerja yang benar-benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai. Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performa organisasi, merupakan *entry point* terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan baik tergantung dari bagaimana merumuskan dan menjabarkan jenis atau bentuk intervensi sesuai dengan masalah-masalah spesifik yang ada. Dengan demikian metode dan tehnik melaksanakan program kegiatan merupakan hal yang sangat penting, sehingga program-program dimaksud dapat terlaksana dengan baik, efektif dan tepat sasaran.

Tarutung, Juni 2025

Plt. KEPALA DINAS,

LAMSERIA NABABAN, SKM, M.Kes.
PEMBINA
NIP. 19691225 199003 2 008

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA PERUBAHAN)
TAHUN 2025

KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DINAS SOSIAL

Jalan Raja Johannes Hutabarat Tarutung 22411 Provinsi Sumatera Utara
Telepon +62821-6214-0638, Faximile. -
Post-el: dinsos@taputkab.go.id Laman :
http://www.dinsos.taputkab.go.id;

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial perlu disusun Rencana Kerja Dinas Sosial;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

16. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025**

Pasal 1

1. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Tapanuli Utara;

2. Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2025.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.
1.2. Landasan Hukum.
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD Tahun 2024 Semester I (Triwulan I).
2.2. Analisis Pelayanan Kinerja OPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

BABIII : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD.
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya atau membutuhkan penyesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
pada tanggal : Juni 2025

KEPALA DINAS,

Drs. DENNY SIMAMORA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670909 199703 1 002

DAFTAR ISI

SK 1

DAFTAR ISI 5

DAFTAR LAMPIRAN ..... --

BAB I PENDAHULUAN 6

1.1. Latar Belakang 6

1.2 Landasan Hukum 7

1.3 Maksud dan Tujuan 9

1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 12

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD s.d Triwulan II Tahun. 12

2.2 Analisis Pelayanan Kinerja OPD 21

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 31

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 33

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 35

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 35

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD 37

3.3 Program dan Kegiatan 38

BAB IV PENUTUP 59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini adalah salah satu Dokumen Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2025, yang isinya memuat program dan kegiatan pembangunan bidang sosial, yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara. Renja ini adalah merupakan pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Disamping itu dijadikan sebagai Pedoman adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan-Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan pada Pasal 27 bahwa SKPD menyusun Renja SKPD dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok da*n* fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan adalah :

1. Penjabaran dari program-program yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis ke dalam Rencana Tahunan.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan tahunan untuk mencapai sasaran organisasi;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah; kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PROGRAM & KEGIATAN

Rencana Kerja dan pendanaan mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Perubahan Renja 2025.

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tahun 2025

Merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025.

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kode	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi		
1		2	3		4	7			12 = 8 + 9 + 10 + 11		
			Program /Kegiatan/Sub Kegiatan			K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.
1	**1.06.01**	**-**	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Layanan yang terpenuhi**						
2	1.06.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

3	1.06.01.2.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dokumen	7,499,600	5	dokumen	2,812,250.00
4	1.06.01.2.01.0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1,600,000	1	Dokumen	1,599,900.00
5	1.06.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	11,245,000	6	Laporan	8,000,000.00
6	1.06.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
7	1.06.01.2.02.06.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	orang/bulan	1,920,361,181	21	orang/bulan	1,416,452,012.00
8	1.06.01.2.02.06.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	40,587,600	9	Dokumen	26,233,800.00
9	1.06.01.2.02.06.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	1,600,000	2	Dokumen	1,599,950.00
10	1.06.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						
11	1.06.01.2.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1,199,200	1	Paket	1,199,200.00

12	1.06.01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	17,024,800	1	Paket	10,929,504.00
13	1.06.01.2.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	Paket	13,993,000	9	Paket	13,825,000.00
14	1.06.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	Paket	20,415,200	5	Paket	9,354,400.00
15	1.06.01.2.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	31,425,000	1	Laporan	5,160,000.00
16	1.06.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	725	Laporan	170,711,000	530	Laporan	90,598,318.00
18	1.06.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
19	1.06.01.2.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
20	1.06.01.2.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						
21	1.06.01.2.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						
22	1.06.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
23	1.06.01.2.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1,000,000			

24	1.06.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	37,938,900	8	Laporan	14,815,389.00
25	1.06.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	41,171,800	3	Laporan	34,707,689.00
26	1.06.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
27	1.06.01.2.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Unit	55,155,500	4	Unit	28,570,682.00
28	1.06.01.2.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	12,797,600	18	Unit	7,320,000.00
29	1.06.01.2.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	6,299,600	0	Unit	4,989,300.00
30	1.06.01.2.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	3,035,000			
31	**1.06.02**	**-**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan yang diberdayakan dalam penyelenggaraan**						

					kesejahteraan sosial						
32	1.06.02.2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						
33	1.06.02.2.03.0002			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	10,000,000	0	Orang	0.00
34	1.06.01.2.03.0004			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Lembaga	79,189,000	3	Lembaga	4,200,000.00
35	**1.06.04**	**-**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								
36	1.06.04.2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
37	1.06.04.2.01.0001			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	465	Orang	51,380,000	30	orang	2,155,000.00

38	1.06.04.2.01.0002			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70	Orang	23,920,000	70	orang	3,910,000.00
39	1.06.04.2.01.0003			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yangMendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	43	Orang	48,140,000	47	Orang	8,840,000.00
40	1.06.04.2.01.0004			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Orang	920,000	2	Orang	910,000.00
41	1.06.04.2.01.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	10,000,000	20	orang	9,612,696.00
42	1.06.04.2.01.0006			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	7,715,400	20	Orang	7,511,912.00
43	1.06.04.2.01.0008			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	790,000	4	0	790,000.00

44	1.06.04.2.01.0009			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		
45	1.06.04.2.01.0010			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Orang	920,000	3		910,000.00
46	1.06.04.2.01.0011			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Orang	390,000	1	Orang	390,000.00
47	1.06.04.2.01.0012			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Orang	3,008,000	2	Orang	2,962,000.00
64	**1.06.05**	**-**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase Fakir Miskin dan orang tak mampu Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani**						
65	1.06.05.2.01			Pemeliharaan Anak-anak Terlantar							
66	1.06.05.2.01.0001			Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota						
67	1.06.05.2.02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan Data Yang Valid						
68	1.06.05.2.02.01			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata						

69	1.06.05.2.02.0002			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	500	Keluarga	4,810,000	500	Keluarga	4,790,000.00
70	1.06.05.2.02.0003			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Keluarga	6,000,000			
75	1.06.06	-	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase korban bencana yang tertangani**						
76	1.06.06.2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlindunginya Korban bencana						
77	1.06.06.2.01.0001			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	276	Orang	246,102,699	205	Orang	192,542,700.00
78	1.06.06.2.02			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-						
79	1.06.06.2.02.0002			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						

80	**1.06.07**	**-**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten**						
81	1.06.07.2.01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten						
82	1.06.07.2.01.0001			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	dokumen	7,640,900	1	dokumen	7,640,900.00
83	1.06.07.2.01.0002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50	makam	3,005,000	0	makam	3,004,500.00

2.2. Analisis Pelayanan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Capaian Kinerja ini diulas dalam 2 hal yaitu:

a. Capaian Kinerja atas setiap sasaran strategis pada setiap Program Kerja.
b. Capaian Kinerja Kebijakan Program yaitu menggambarkan capaian kinerja seluruh indikator kinerja yang ada.

Indikator yang dikaji adalah Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang pelayanan:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Penilaian terhadap Evaluasi Kinerja ini akan diperoleh berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan capaian kinerja yang telah dinilai maka berikut ini adalah tabel keberhasilan pelaksanaan setiap kegiatan berdasarkan program / kegiatan, sbb:

Tabel II.2 **Analisis Pelayanan Kinerja**

No	Kode	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2026	
1		2	3		4	7			12 = 8 + 9 + 10 + 11			15	
			Program /Kegiatan/Sub Kegiatan			K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.		
1	1.06.01	-	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Layanan yang terpenuhi								
2	1.06.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
3	1.06.01.2.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dokumen	7,499,600	5	dokumen	2,812,250.00	71.43%	37.50%
4	1.06.01.2.01.0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1,600,000	1	Dokumen	1,599,900.00	100.00%	99.99%
5	1.06.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	11,245,000	6	Laporan	8,000,000.00	50.00%	71.14%

6	1.06.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7	1.06.01.2.02.06.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	orang/bulan	1,920,361,181	21	orang/bulan	1,416,452,012.00	100.00%	73.76%
8	1.06.01.2.02.06.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	40,587,600	9	Dokumen	26,233,800.00	75.00%	64.64%
9	1.06.01.2.02.06.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	1,600,000	2	Dokumen	1,599,950.00	100.00%	100.00%
10	1.06.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah								
11	1.06.01.2.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1,199,200	1	Paket	1,199,200.00	100.00%	100.00%
12	1.06.01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	17,024,800	1	Paket	10,929,504.00	100.00%	64.20%
13	1.06.01.2.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	Paket	13,993,000	9	Paket	13,825,000.00	100.00%	98.80%
14	1.06.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	Paket	20,415,200	5	Paket	9,354,400.00	55.56%	45.82%

15	1.06.01.2.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	31,425,000	1	Laporan	5,160,000.00	16.67%	16.42%
16	1.06.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	725	Laporan	170,711,000	530	Laporan	90,598,318.00	73.10%	53.07%
18	1.06.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
19	1.06.01.2.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
20	1.06.01.2.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								
21	1.06.01.2.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								
22	1.06.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
23	1.06.01.2.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1,000,000					
24	1.06.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	37,938,900	8	Laporan	14,815,389.00	66.67%	39.05%

25	1.06.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	41,171,800	3	Laporan	34,707,689.00	25.00%	84.30%
26	1.06.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
27	1.06.01.2.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Unit	55,155,500	4	Unit	28,570,682.00	80.00%	51.80%
28	1.06.01.2.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	12,797,600	18	Unit	7,320,000.00	90.00%	57.20%
29	1.06.01.2.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	6,299,600	0	Unit	4,989,300.00		
30	1.06.01.2.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	3,035,000					
31	**1.06.02**	**-**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**								

32	1.06.02.2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
33	1.06.02.2.03.0002			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	10,000,000	0	Orang	0.00	0.00%	0.00%
34	1.06.01.2.03.0004			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Lembaga	79,189,000	3	Lembaga	4,200,000.00	100.00%	5.30%
35	**1.06.04**	**-**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**										
36	1.06.04.2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									
37	1.06.04.2.01.0001			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	465	Orang	51,380,000	30	orang	2,155,000.00	6.45%	4.19%

38	1.06.04.2.01.0002			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70	Orang	23,920,000	70	orang	3,910,000.00	100.00 %	16.35%
39	1.06.04.2.01.0003			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yangMendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	43	Orang	48,140,000	47	Orang	8,840,000.00	109.30 %	18.36%
40	1.06.04.2.01.0004			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Orang	920,000	2	Orang	910,000.00	66.67%	98.91%
41	1.06.04.2.01.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	10,000,000	20	orang	9,612,696.00	100.00 %	96.13%
42	1.06.04.2.01.0006			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	7,715,400	20	Orang	7,511,912.00	100.00 %	97.36%
43	1.06.04.2.01.0008			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	790,000	4	0	790,000.00	40.00%	100.00 %

44	1.06.04.2.01.0009			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				0				
45	1.06.04.2.01.0010			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Orang	920,000	3		910,000.00		
46	1.06.04.2.01.0011			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Orang	390,000	1	Orang	390,000.00	33.33%	100.00%
47	1.06.04.2.01.0012			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Orang	3,008,000	2	Orang	2,962,000.00	200.00%	98.47%
64	**1.06.05**	**-**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase Fakir Miskin dan orang tak mampu Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani**								
65	1.06.05.2.01			Pemeliharaan Anak-anak Terlantar									
66	1.06.05.2.01.0001			Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota								
67	1.06.05.2.02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan Data Yang Valid								
68	1.06.05.2.02.01			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata								

69	1.06.05.2.02.0002			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	500	Keluarga	4,810,000	500	Keluarga	4,790,000.00	100.00%	99.58%
70	1.06.05.2.02.0003			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Keluarga	6,000,000					
75	1.06.06	-	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase korban bencana yang tertangani**								
76	1.06.06.2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlindunginya Korban bencana								
77	1.06.06.2.01.0001			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	276	Orang	246,102,699	205	Orang	192,542,700.00	74.28%	78.24%
78	1.06.06.2.02			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-								
79	1.06.06.2.02.0002			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota								

80	**1.06.07**	**-**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten**								
81	1.06.07.2.01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten								
82	1.06.07.2.01.0001			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	dokumen	7,640,900	1	dokumen	7,640,900.00	100.00 %	100.00 %
83	1.06.07.2.01.0002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50	makam	3,005,000	0	makam	3,004,500.00	0.00%	99.98%
TOTAL						38987		2,898,990,980	1,532		1,928,337,102		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA									3.93		66.52%		
PREDIKAT KINERJA											**Sedang**		

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki serta capaian kinerja pelayanan masa lalu yang belum tercapai. dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihasilkan melalui pemetaan masalah. Pemetaan permasalahan di kelompokan menjadi:

a. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi perangkat daerah dan masalah pokok ini akan dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran;
b. Masalah merupakan penyebab yang lebih spesifik dari munculnya masalah pokok. Pemecahan masalah melalui strategi; dan
c. Akar masalah adalah mencari penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan.

Masalah Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(7)
1	Tingginya Angka Kemiskinan	Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kurang Optimalnya Pengelolaan Database PMKS
			Penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran

Adapun sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara antara lain:

1. Minimnya SDM kesejahteraan Sosial,
2. Rendahnya kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),,

3. Minimnya sarana prasarana,Minimnya ketersediaan logistic bencana,
4. Minimnya ketersediaan logistic bencana,
5. Terbatasnya dukungan pemerintah terhadap PSKS.

Dinas Sosial menyelenggarakan kewenangan di Bidang Sosial dengan melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara melalui kegiatan Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Masalah Kemiskinan berdasarkan identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial/penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, kelembagaan sosial dan dunia usaha, serta penyediaan data base PMKS terpadu.

Isu strategis pelayanan Dinas Sosial di jelaskan pada tabel berikut:

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Bidang Urusan Sosial	Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pengentassan Kemiskinan	Cuaca Ekstrim	Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	Kualitas da daya saing Sumber Daya Manusia	Masih Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Data PMKS yang kurang Akurat		Misinformasi dan disinformasi		Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan	
	SDM Kesejahteraan Sosial yang		Dampak buruk Artificial			

	minim	Intelligence (A.I.)
	Minimnya sarana prasarana	Polarisasi Sosial
	Rendahnya kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Isu-isu strategis dalam kinerja pelayanan Dinas Sosial adalah: *"Masih rendahnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)".*

2.4. Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan panduan Rencana Kerja Dinas Sosial kabupaten Tapanuli Utara yang tertuang dalam Program Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.

Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara bukan semata-mata memberikan bantuan kepada masyarakat PMKS namun juga berupaya memberikan dorongan agar penyandang PMKS keluar dari permasalahan dan membina masyarakat PMKS untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang akan diwujudkan serta sekaligus dapat memberikan fokus terhadap program Kerja yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Pelayanan Bantuan Sosial
2. dan Bencana Alam

Dari uraian, yang menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi antara lain :

1. Penanganan terhadap PMKS selama ini telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Sosial, tetapi

belum secara keseluruhan, untuk ini sangatlah diperlukan lagi kegiatan-kegiatan Penangan PMKS.

2. Bantuan Sosial dan Bencana Alam akan diupayakan tepat waktu dan tepat sasaran.
3. Lembaga-lembaga sosial yang ada selama ini masih kurang aktif dalam membantu penanganan masalah sosial di Tapanuli Utara, sehingga sangat diperlukan pembinaan kepada lembaga sosial.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dijelaskan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. 4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut:

1. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab;
2. Kecacatan, yaitu hilang / terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
3. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religious, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat.
4. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
5. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara selaku bagian dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meliputi :

1. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. Perlindungan dan Jaminan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial dan merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara merupakan tujuan dan sasaran dari target Renstra 2025-2026 :

Tujuan	:	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik
Indikator Tujuan	:	Indeks kepuasan masyarakat.
Strategi	:	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sasaran	:	1. Meningkatkan penanganan PMKS 2. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja
Indikator Sasaran	:	1. Persentase PMKS yang ditangani. 2. Hasil Evaluasi Akip.

Formula : 1. Jumlah PMKS yang tertangani / Jumlah PMKS yang ada x 100%
2. Nilai.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka upaya menjawab dan mengatasi isu-isu strategis tersebut di atas serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai OPD, Dinas Sosial telah merencanakan program, kegiatan dan pendanaan yang disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi ;
2. Memperhatikan program kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia ;
4. Memperhatikan skala prioritas yang menunjang visi dan misi.

Program kerja yang dimaksud terdiri dari 6 Program,11 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan		No	Sub Kegiatan
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan

			Perangkat Daerah		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan

			Urusan Pemerintahan Daerah		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
03	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan
				2	Penyediaan Sandang
				3	Penyediaan Alat Bantu
				4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
				7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				8	Pemberian Layanan Kedaruratan
				9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				10	Pemberian Layanan Rujukan
04	PROGRAM PERLINDUNGA	1	Pengelolaan Data Fakir	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

	N DAN JAMINAN SOSIAL		Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota
05	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan
06	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
				2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Dinas Sosial Tahun Anggaran Tahun 2025 adalah Sebagai berikut:

Tabel 3.4 **Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	16	17	18
		DINAS SOSIAL				**2.962.449.821,00**	**3.138.073.405,00**	**2.725.891.928,00**	**-236.557.893,00**			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.962.449.821,00**	**3.138.073.405,00**	**2.725.891.928,00**	**-236.557.893,00**			
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**2.962.449.821,00**	**3.138.073.405,00**	**2.725.891.928,00**	**-236.557.893,00**			
1	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang yang tertangani**	**100 persen**	**100 persen**	**2.811.207.821,00**	**2.813.623.705,00**	**2.279.589.929,00**	**-2.778.358.921,00**			
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	30.999.800,00	30.999.800,00	20.344.600,00	-10.655.200,00	-	-	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7 Dokumen	6.999.800,00	6.999.800,00	7.499.600,00	499.800,00	-	- -	
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.600.000,00	-2.400.000,00	-	- -	

			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	11.245.000,00	-8.755.000,00	-	- -	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 persen	100 persen	2.224.286.871,00	2.224.286.955,00	1.852.298.829,00	-371.988.042,00	-	-	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.179.699.271,00	2.179.699.355,00	1.810.111.229,00	-369.588.042,00	-	- -	
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	40.587.600,00	40.587.600,00	40.587.600,00	0,00	-	- -	
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.600.000,00	-2.400.000,00	-	- -	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 persen	100 persen	289.960.150,00	290.088.950,00	149.343.400,00	-140.616.750,00	-	-	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.998.200,00	2.998.200,00	1.199.200,00	-1.799.000,00	-	- -	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.999.150,00	29.999.150,00	17.024.800,00	-12.974.350,00	-	- -	

	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	13.993.000,00	-21.007.000,00	-	- -	
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9 Paket	25.172.800,00	25.301.600,00	20.356.400,00	-4.816.400,00	-	- -	
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	-9.000.000,00	-	- -	
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	725 Laporan	725 Laporan	181.790.000,00	181.790.000,00	90.770.000,00	-91.020.000,00	-	- -	
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 persen	100 persen	29.736.800,00	29.736.800,00	0,00	-29.736.800,00	-	- -	Dinas Sosial
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	29.736.800,00	29.736.800,00	0,00	-29.736.800,00	-	- -	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 persen	100 persen	173.478.400,00	174.579.300,00	178.669.300,00	5.190.900,00	-	- -	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-	- -	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	31.748.000,00	0,00	0,00	-31.748.000,00	-	-	

			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								-	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan	0,00	32.848.900,00	37.938.900,00	37.938.900,00	-	- -	
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	139.730.400,00	139.730.400,00	139.730.400,00	0,00	-	- -	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 persen	100 persen	62.745.800,00	63.931.900,00	78.933.800,00	16.188.000,00	-	- -	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	45.989.400,00	47.175.500,00	56.801.600,00	10.812.200,00	-	- -	
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	11.767.100,00	11.767.100,00	12.797.600,00	1.030.500,00	-	- -	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	4.989.300,00	4.989.300,00	6.299.600,00	1.310.300,00	-	- -	
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00	-	-	

			atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								-	
2	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS dan Kelembagaan yang diberdayakan dalam Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial**	**80 persen**	**80 persen**	**49.999.000,00**	**49.999.000,00**	**39.200.000,00**	**-49.999.000,00**			
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*	15 Orang 4 Lembaga	15 Orang 4 Lembaga	49.999.000,00	49.999.000,00	39.200.000,00	-10.799.000,00	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	2 Lembaga	39.999.000,00	39.999.000,00	29.200.000,00	-10.799.000,00	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	
3	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS Diluar Panti Sosial yang ditangani**	**-**	**100 persen**	**51.243.000,00**	**51.243.000,00**	**148.743.400,00**	**-51.243.000,00**			
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	*Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia*	181 Orang	638 Orang	51.243.000,00	51.243.000,00	148.743.400,00	97.500.400,00	-	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,

		Pengemis di Luar Panti Sosial	*Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial yang Tertangani*								untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	465 Orang	2.940.000,00	2.940.000,00	52.160.000,00	49.220.000,00	-	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang										
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	70 Orang	4.950.000,00	4.950.000,00	23.920.000,00	18.970.000,00	-	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	43 Orang	9.950.000,00	9.950.000,00	48.920.000,00	38.970.000,00	-	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing	

											untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	1.970.000,00	1.970.000,00	920.000,00	-1.050.000,00	-	- -	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial										
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-	- -	
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat										
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	7.715.400,00	-2.284.600,00	-	- -	
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	1.920.000,00	1.920.000,00	790.000,00	-1.130.000,00	-	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan	

											dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan	
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	1.970.000,00	1.970.000,00	920.000,00	-1.050.000,00	-	- -	
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	920.000,00	920.000,00	390.000,00	-530.000,00	-	- -	
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan										
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	6.623.000,00	6.623.000,00	3.008.000,00	-3.615.000,00	-	- -	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Tertangani*	181 orang	0 orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	- -	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

										gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2400 Orang	2400 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam	

										perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan	
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang										
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	- -	

										pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan	
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial										

			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA										
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	132 Orang	132 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke	24 Orang	24 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Memperkuat	-	

			Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota							pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	7 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Memperkuat pembangunan sumber daya	- -	

										manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan										
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	
4	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu, serta Anak-anak terlantar yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**82 persen**	**35 persen**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**4.810.000,00**	**-10.000.000,00**			
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak	*Jumlah Penjangkauan,*	7 orang	0 orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Membangun dari	-	Anak-Anak Terlantar

		Terlantar	*Rujukan dan Pemantauan Pemeliharaan Anak terlantar*							desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	1.06.05.2.01.00 01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar										
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	
	1.06.05.2.01.00 03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar										
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan	

	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang Valid*	93743 orang	20459 orang	10.000.000,00	10.000.000,00	4.810.000,00	-5.190.000,00	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	2000 Keluarga	500 Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	4.810.000,00	-5.190.000,00	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga										
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Keluarga	5000 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	
5	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang Tertangani**	**-**	**50 persen**	**25.000.000,00**	**198.207.700,00**	**242.902.699,00**	**-25.000.000,00**			
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang Tertangani*	-	275 Orang	25.000.000,00	198.207.700,00	242.902.699,00	217.902.699,00	-	- -	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	276 Orang	25.000.000,00	198.207.700,00	242.902.699,00	217.902.699,00	-	- -	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan	*Jumlah Masyarakat yang Diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- -	Masyarakat Kabupaten/Kota

		Bencana Kabupaten/Kota										
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana										
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	17 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- -	
6	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang dikelola**	**100 persen**	**100 persen**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**10.645.900,00**	**-15.000.000,00**			
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten*	1 unit	1 unit	15.000.000,00	15.000.000,00	10.645.900,00	-4.354.100,00	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	7.640.900,00	-2.359.100,00	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50 Makam	50 Makam	5.000.000,00	5.000.000,00	3.005.000,00	-1.995.000,00	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	
	J U M L A H					**2.962.449.821,00**	**3.138.073.405,00**	**2.725.891.928,00**	**12.125.081.632,86**			

BAB IV
PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi pada Tahun 2025 sampai denga triwulan II diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara masih akan mengalami kehidupan yang cukup berat dikarenakan dampak dari tingginya bencana alam dan sosial yang terjadi serta munculnya masyarakat miskin baru dan rentan yang hampir berpengaruh di semua sektor. Situasi yang berat tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Sosial untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Sosial Tahun 2025 yang telah tersusun, memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Sosial itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Tarutung, Juni 2025
KEPALA DINAS,

Drs. DENNY SIMAMORA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670909 199703 1 002

TANO BATAK
TAPANULI UTARA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TARUTUNG
2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebagai bagian dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita pembangunan Kabupaten yang diaplikasikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Rencana Kerja ini sebagai salah satu indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan dan bermanfaat.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini disusun. Kami sadari bahwa rancangan Rencana Kerja ini masih belum sempurna, tetapi kami yakin bahwa dokumen ini akan bermanfaat, setidak-tidaknya sebagai kerangka dasar untuk meningkatkan efisiensi perencanaan pengelolaan aktivitas kerja masing-masing satuan kerja, khususnya oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta pengawasan dan pengendaliannya oleh Penanggung jawab kegiatan, maupun Pengguna Anggaran.

Tarutung, 10 September 2025

Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN DAN DESA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Drs. SATYA DHARMA NABABAN, M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP:197305011992031001.-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sejalan dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029, RENSTRA, hasil Musrenbang Kecamatan, Program/kegiatan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta menjadi dasar penyusunan perubahaan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tapanuli Utara.

Dengan demikian, maka komitmen pelaksanaan kegiatan menjadi kekuatan atas keberhasilan pelaksanaan anggaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dalam mewujudkan pelayanan publik, percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara yang memuat program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara.

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya menuntut banyak hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyiapkan Desa. Pengakuan kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam UU Desa menjadi pintu masuk yang membuka peluang bagi rakyat desa untuk melatih diri menjalankan otonomi mengurus rumah tangga sendiri. Desa menjalankan kewenangan lebih besar mulai dari perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan prioritas, pengalokasian anggaran, pelaksanaan teknis pembangunan, dan pengawasan serta evaluasinya sampai pada pertanggungjawabannya.

1.2. Landasan Hukum.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
19. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran serta berkesinambungan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdayaguna dan berhasilguna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, Proses Penyusunannya, Keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan prosese penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan dilakukannya penyusunan dokumen Rencana Kerja

1.4. Sistematika Penyusunan

Memberikan gambaran susunan / tata urutan penyusunan dokumen Rencana Kerja.

BAB II. EVALUASI HASIL RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN BERJALAN DAN RENSTRA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Berjalan dan Capaian Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara.

Mengemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kondisi umum, permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara

3.1. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN RENSTRA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun berjalan dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun berjalan 2025 dapat dilihat secara rinci sebagaimana terlampir pada Lampiran "Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten semester I Tahun 2025".

Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target dan yang memenuhi target tahun 2024 antara lain :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kinerja		memenuhi /tidak memenuhi target	Permasalahan	Upaya Permasalahan
				Target	Realisasi			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang yang tertangani**	Persen	100	100	memenuhi target	-	-
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terselenggaranya penyusunan dokumen dan laporan kinerja**	Tahun	1	1	memenuhi target	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1	memenuhi target	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	12	12	memenuhi target	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi keuangan**	Tahun	1	1	memenuhi target	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ bulan	31	31	memenuhi target	-	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	12	12	memenuhi target	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	memenuhi target	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terselenggaranya administrasi umum**	Tahun	1	1	memenuhi target	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	4	4	memenuhi target	-	-

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	4	4	memenuhi target	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	4	memenuhi target	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	4	memenuhi target	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	dokumen	12	12	memenuhi target	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	3	3	memenuhi target	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	3	memenuhi target	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya jasa penunjang urusan kantor**	Tahun	1	1	memenuhi target	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	memenuhi target	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1	memenuhi target	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	memenuhi target	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terselenggaranya pemeliharaan**	Tahun	1	1	memenuhi target	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kenderaan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Unit	8	8	memenuhi target	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	7	7	memenuhi target	-	-

2	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**cakupan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi desa**	Persen	100	82,73	tidak memenuhi target	adanya beberapa kegiatan yang kurang optimal dalam pelaksanaannya seperti proses seleksi perangkat desa,pembinaan BUMDes, fasilitasasi pengentrian profil dan ketersediaan anggaran serta kapasitas pemerintahan desa yang belum optimal	pengoptimalan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penentuan target dan penyesuaian anggaran
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Terselengaranya administrasi Pemerintahan Desa yang lebih baik**	Persen	100	82,73	tidak memenuhi target		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	65	60	tidak memenuhi target	Adanya seleksi Perangkat Desa yang tertunda akibat ketersediaan anggaran	Perlu adanya koordinasi dan laporan dari Pemerintah Desa kondisi kelengkapan Perangkat Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Dokumen	7	7	memenuhi	Kurang optimalnya pelaksanaan tugas karena terbatasnya anggaran	Perlunya sosialisasi langsung ke Desa dan perlunya pengoptimalan sinkronisasi dengan OPD terkait
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	dokumen	30	20	tidak memenuhi target	terbatasnya Anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan BUMDesa	Bekerjasama dengan BUMDesa secara online atau via telepon serta bekerjasama dengan pihak ke tiga yakni BUMN untuk melaksanakan pelatihan dan pembinaan
	Fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Aset desa	Dokumen	30	30	memenuhi	Adanya perubahan aplikasi SIPADES	Perlunya koordinasi ke Pemerintah Pusat yang menangani SIPADES dan mensosialisasikan kembali ke Desa
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	dokumen	64	35	tidak memenuhi	Dibutuhkan sosialisasi langsung dalam penyusunan profil desa	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Cakupan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hokum**	Persen	100	100	memenuhi target		

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten aktif**	Persen	100	100	memenuhi target		
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	memenuhi target		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	195	195	memenuhi target	Adanya rasionalisasi anggaran sehingga bentuk pembinaan yang dilakukan tidak maksimal hanya berupa sosialisasi tidak sampai kepada pendampingan	Pengajuan anggaran dalam pembinaan dan pengalokasian dana desa untuk mendukung kegiatan pembinaan kelembagaan
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	1	1	memenuhi target	Adanya rasionalisasi anggaran sehingga banyak program PKK yang tidak dipenuhi	Adanya penambhan anggaran
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	dokumen	2	2	memenuhi target		

Evaluasi sasaran melalui pelaporan kinerja didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukurannya, Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024		Capaian
					Target	Realisasi	
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1	Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK	Persen	98	97,43	99,41
		2	Persentase SiLPA penggunaan APBDes	Persen	2	1.8	100
		3	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Persen	90	90,57	100
		4	Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	90	82,98	92,2
		5	Persentase BUMDes yang aktif	Persen	65	36,58	52,25
		6	Jumlah BUMDesaMa yang terbentuk	Jumlah	17	17	100
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	7	Nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	80	69,09	86,36

Analisis Capaian Kinerja di atas antara lain :

1. Sasaran Kinerja : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa

Sasaran kinerja meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa serta kerjasama desa ditunjukkan melalui 6 indikator kinerja antara lain :

a. Indikator : Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK

Program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut antara lain :

Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penyebab gagal	Solusi
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100	82,7	27,999,725	24,549,000		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100	82,7	27,999,725	24,549,000		
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	65	60	20,990,000	20,637,500	Adanya seleksi Perangkat Desa yang tertunda akibat ketersediaan anggaran	Perlu adanya koordinasi dan laporan dari Pemerintah Desa kondisi kelengkapan

						Perangkat Desa
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	64	35	7,009,725	3,911,500	Dibutuhkan sosialisasi langsung dalam penyusunan profil desa	

b. Indikator : Persentase SiLPA penggunaan APBDes

Program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut antara lain :

Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penyebab gagal	Solusi
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100	82,7	31,000,000	30,219,950		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100	82,7	31,000,000	30,219,950		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	7	7	28,500,000	27,843,750	Kurang optimalnya pelaksanaan tugas karena terbatasnya anggaran	Perlunya sosialisasi langsung ke Desa dan perlunya pengoptimalan sinkronisasi dengan OPD terkait
Fasilitasi pengelolaan aset desa	30	30	2,500,000	2,376,200	Adanya perubahan aplikasi SIPADES	Perlunya koordinasi ke Pemerintah Pusat yang menangani SIPADES dan mensosialisasi kan kembali ke Desa

c. Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif

Program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut antara lain :

Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penyebab gagal	Solusi
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100 %	100 %	31,000,000	30,219,950		

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	117,810,400	115,173,555		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	195 lembaga	195 lembaga	19,892,000	19,238,700	Kurang optimalnya pelaksanaan tugas karena terbatasnya anggaran	Perlunya sosialisasi langsung ke Desa dan perlunya pengoptimalan sinkronisasi dengan OPD terkait
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	1 unit	1 unit	97,918,400	95,934,855	Adanya perubahan aplikasi SIPADES	Perlunya koordinasi ke Pemerintah Pusat yang menangani SIPADES dan mensosialisasikan kembali ke Desa

d. Indikator : Persentase lembaga adat yang aktif

Program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut antara lain :

Program/Kegiatan / sub kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penyebab gagal	Solusi
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	karena terbatas pada anggaran sehingga kegiatan di tingkat Kabupaten	Untuk tahun berikutnya diharapakan adanya peningkatan anggaran

Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					hanya sebatas menghadiri undangan dan rapat rapat internal dan perwakilan kecamatan serta acara adat yang diselenggarakan di desa	kegiatan dalam rangka sosialisasi peran aktif menyangkut tugas, pokok dan fungsi dari LADN dan LAD sehingga LADN dan LAD berperan aktif dalam pelestarian adat istiadat dan pembangunan di Desa
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	1 dokumen	25,000,000	25,000,000		

e. Indikator : Persentase BUMDes yang aktif

Program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut antara lain :

Program/Kegiatan / sub kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penyebab gagal	Solusi
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100	82.7	26,899,900	25,987,600	Terbatasnya Anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan BUMDesa	Bekerjasama dengan BUMDesa secara online atau via telepon serta bekerjasama dengan pihak ke tiga yakni BUMN untuk melaksanakan pelatihan dan pembinaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100	82,7	26,899,900	25,987,600		
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	30 dokumen	20 dokumen	26,899,900	25,987,600		

f. Indikator : Jumlah BUMDesaMa yang terbentuk

Program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut antara lain :

Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penyebab gagal	Solusi
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT	100 %	100 %	4.689.500	4,246,000	Beum optimalnya dalm pembentukan BUMDesMa	Mempedomani peraturan tentang BUMDesMa dan peningkatan

DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					dan pelaksanaan kegiatannya di Desa	kapasitas pengurus BUMDesMa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	4.689.500	4,246,000		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 dokumen	2 dokumen	4.689.500	4,246,000		

2. Sasaran Kinerja : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

   Indikator : Nilai hasil evaluasi AKIP

Target Nilai AKIP Tahun 2024 sebesar 80 namun Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat realisasi sebesar 69,09 atau sebesar 86,36%. Renstra diharapkan dapat meningkatkan nilai Sakip Kabupaten sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi kinerja dapat diukur dengan indikator yang mendukung tujuan yang didalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan. Program pendukung kegiatan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara

2.2.1. Kondisi Umum Dinas Pemberdayaan Dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) untuk membantu dan memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun, merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tanggung Jawab :

a. Menyusun Program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara.

b. Merumuskan kebijakan pedoman teknis penyelenggaraan program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

c. Merumuskan pembinaan tentang Pemberdayaan masyarakat desa;

d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan serta lembaga-lembaga desa lainnya;

e. Merumuskan upaya pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

f. Membina dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

g. Merumuskan kebijakan program kerjasama bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

1. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat
2. Hubungan kerja antar lembaga yang menyelenggarakan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan sebagai sumber kekuatan ekonomi desa belum terbentuk dan yang sudah terbentuk sepenuhnya mampu berjalan secara optimal
4. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi desa atau produk unggulan desa
5. Belum optimalnya data profil desa dan database terpadu penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi di perdesaan

2.2.3. Upaya pemecahan masalah yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

a. Meningkatkan penataan dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta kerjasama desa

b. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa

2.3. Review terhadap rancangan awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara, program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara terdiri atas 4 (empat) program antara lain terlampir review terhadap rancangan awal RKPD PAPBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2.4. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diprogramkan dalam rencana program kerja Tahun 2025. Terkait dengan peningkatan sarana prasarana Pemerintahan Desa dan peningkatan biaya operasional pelaksanaan Pemerintahan Desa termasuk menyangkut penghasilan tetap Pemerintahan Desa dan honor BPD direncanakan dialokasikan dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Usulan program dan kegiatan masyarakat yang terangkum dalam musrenbang Kecamatan akan ditelaah dan disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dan sebagian besar kegiatan yang diusulkan dapat di anggarkan dalam kegiatan yang ditampung dalam kegiatan Dana Desa dan ADD Tahun 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam pelaksanaan program pembangunan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Utara selalu melakukan sinergi dengan kebijakan nasional terutama dalam pelaksanaan program pembangunan nasional di daerah dan berdasarkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara berpedoman pada misi Bupati yaitu memperkuat reformasi birokrasi, mengoptimalkan tata kelola pemerintahan sera misi yang ke delapan yaitu Menjadikan desa mandiri yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam. Maka yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara antara lain

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatkan jumlah desa mandiri	Indeks desa	n/a	64%	65%	66%	67%	68%	69%

Tabel 3.2

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan status desa	Jumlah desa naik status	44	20	15	20	20	20	20
Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan daerah	Nilai SAKIP	69,09	70	71	72	73	74	75

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang secara sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Rencana kerja tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu cakupan layanan penunjang yang tertangani.

Kegiatan antara lain :

2.13.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.13.01.2.01.07 Evaluasi kinerja perangkat daerah

2.13.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.13.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2.13.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.13.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang undangan

2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.13.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.13.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan antara lain :

2.13.03 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator program adminiatrasi pemerintahan desa yaitu persentase BUMDes aktif, persentase SiLPA penggunaan APBDes dan Persenrase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK

Kegiatan antara lain :

2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

2.13.04.2.01.15 Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa

2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Indikator Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yaitu persentase BUMDesMa aktif dan persentasw lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat yang aktif

Kegiatan antara lain :

2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Mayarakat

2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah terlampir

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan sistem perencanaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan yang sinergis, berkesinambungan dan optimal, serta menjadi bagian dari perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Tarutung, 10 September 2025

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Drs.SATYA DHARMA NABABAN, M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 197305011992031001

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TW II TAHUN 2025

No	Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2030			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025 Per Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	
												I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6		7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 +10 + 11			13 = 12 ÷ 6		14 = 13/5 x 100%		15=12/7 x 100%	
		Kegiatan/Sub Kegiatan		K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	100	Persen	18.336.736.604	-	-	100	Persen	3.383.470.506	25	Persen	564.496.642	25	Persen	1.606.867.852	-	-	-	-	-	-	50	Persen	564.496.642	50	564.496.642	50%	3,08%	50%	16,7%
		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terselenggaranya penyusunan dokumen dan laporan kinerja	100	Persen	86.691.800	-	-	100	Persen	42.999.800	25	Persen	-	25	Persen	9.121.600	-	-	-	-	-	-	50	Persen	-	50		50%	0,00%	50%	0,0%
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	5	Laporan	24.999.800	-	-	1	Laporan	4.999.800	1	Laporan	-	-	-	3.365.600	-	-	-	-	-	-	1	Laporan	-	1		20%	0,00%	100%	0,0%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Laporan	61.692.000	-	-	12	Laporan	38.000.000	1	Laporan	-	-	-	5.756.000	-	-	-	-	-	-	1	Laporan	-	1		2%	0,00%	8%	0,0%
		Administrasi Keuangan perangkat daerah	Terlaksanaanya administrasi keuangan	100	Persen	15.834.570.044	-	-	100	Persen	2.964.417.368	25	Persen	564.496.642	25	Persen	1.510.151.388	-	-	-	-	-	-	50	Persen	564.496.642	50	564.496.642	50%	3,54%	50%	19,0%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi KEuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan	60	Dokumen	229.488.800	-	-	12	Dokumen	40.587.600	3	Dokumen	-	3	Dokumen	10.146.900	-	-	-	-	-	-	6	Dokumen	-	6		10%	0,00%	50%	0,0%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	30.000.000	-	-	1	Laporan	6.000.000	1	Laporan	-	-	-	4.524.400	-	-	-	-	-	-	1	Laporan	-	1		20%	0,00%	100%	0,0%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediaanya Gaji dan Tunjangan ASN	165	Orang	15.575.081.244	-	-	29	Orang	2.917.829.768	32	Orang	564.496.642	29	Orang	1.495.480.088	-	-	-	-	-	-	61	Orang	564.496.642	61	564.496.642	37%	3,62%	210%	19,3%
		Administrasi Umum perangkat daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum	100	Persen	1.033.877.100	-	-	100	Persen	121.730.878	25	Persen	-	25	Persen	40.448.785	-	-	-	-	-	-	50	Persen	-	50		50%	0,00%	50%	0,0%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20	Paket	27.211.600	-	-	4	Paket	4.006.600	1	Paket	-	1	Paket	1.547.800	-	-	-	-	-	-	2	Paket	-	2		10%	0,00%	50%	0,0%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	Paket	82.616.100	-	-	4	Paket	13.001.100	1	Paket	-	1	Paket	-	-	-	-	-	-	-	2	Paket	-	2		10%	0,00%	50%	0,0%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20	Paket	40.519.400	-	-	4	Paket	8.032.400	1	Paket	-	1	Paket	2.488.000	-	-	-	-	-	-	2	Paket	-	2		10%	0,00%	50%	0,0%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20	Paket	79.615.000	-	-	4	Paket	10.141.178	1	Paket	-	1	Paket	3.032.300	-	-	-	-	-	-	2	Paket	-	2		10%	0,00%	50%	0,0%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dokumen	27.846.000	-	-	-	-	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0	Dokumen	-	-		0%	0,00%	0%	0,0%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	776.069.000	-	-	12	Laporan	86.549.600	3	Laporan	-	3	Laporan	33.380.685	-	-	-	-	-	-	6	Laporan	-	6		10%	0,00%	50%	0,0%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediaanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57	Unit	245.239.200	-	-	7	Unit	33.239.200	0	Unit	-	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-	0	Unit	-	-		0%	0,00%	0%	0,0%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10	Unit	173.239.200	-	-	2	Unit	33.239.200	0	Unit	-	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-	0	Unit	-	-		0%	0,00%	0%	0,0%
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	47	Unit	72.000.000	-	-	-	-	-	0	Unit	-	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-	0	Unit	-	-		0%	0,00%	0%	0,0%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	720.992.000	-	-	100	Persen	114.927.200	25	Persen	-	25	Persen	47.146.079	-	-	-	-	-	-	50	Persen	-	50		50%	0,00%	50%	0,0%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	5.000.000		-	4	Laporan	1.000.000	1	Laporan	-	1	Laporan	200.000	-	-	-	-	-	-	2	Laporan	-	2		40%	0,00%	50%	0,0%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	Laporan	169.944.000	-	-	12	Laporan	32.020.000	1	Laporan	-	1	Laporan	7.643.679	-	-	-	-	-	-	2	Laporan	-	2		3%	0,00%	17%	0,0%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	Laporan	546.048.000	-	-	12	Laporan	81.907.200	1	Laporan		1	Laporan	39.302.400	-	-	-	-	-	-	2	Laporan	-	2		3%	0,00%	17%	0,0%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33	Unit	415.366.460	-	-	13	Unit	108.156.060	2	Unit	-	2	Unit	-	-	-	-	-	-	-	4	Unit	-	4		12%	0,00%	31%	0,0%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2030			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025 Per Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dilevaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2029 (%)	
												I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6		7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 +10 + 11			13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100%		15=12/7 x 100%	
		Kegiatan/Sub Kegiatan		K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35	Unit	362.908.360	-	-	7	Unit	82.908.360	1	Unit	-	1	Unit	14.021.805	-	-	-	-	-	-	2	Unit	-	2	-	9%	0,00%	29%	0,0%
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	10.459.300	-	-	1	unit	10.459.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			-					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50	Unit	41.998.800	-	-	10	Unit	12.788.400	1	Unit	-	1	Unit	1.776.100	-	-	-	-	-	-	2	Unit	-	2	-	4%	0,00%	20%	0,0%
	meningkatkan status desa	Program administrasi pemerintahan desa	1. Persentase aparatur desa dan BPD yang ditingkatkan kapasitasnya 2.persentase fasilitasi tata kelola desa	27% 100%	Persen	2.019.755.225	- -	-	25% 100%	Persen	135.655.696	10% 100%	Persen	-	15% 100%	Persen	14.166.000	-	-	-	-	-	-	25 100	Persen	-	25 100	-	25% 100%	0,00%	25% 100%	0,0%
		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa yang lebih baik	100	persen	2.019.755.225	-	-	100	persen	135.655.696	25	persen	-	25	persen	14.166.000	-	-	-	-	-	-	50	persen	-	50	-	50%	0,00%	50%	0,0%
		Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	241	Dokumen	200.309.000	-	-	45	Dokumen	14.669.000	10	Dokumen	-	15	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	25	Dokumen	-	25	-	10%	0,00%	56%	0,0%
		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	35	Dokumen	391.093.350	-	-	6	Dokumen	19.813.350	2	Dokumen	-	2	Dokumen	6.620.000	-	-	-	-	-	-	4	Dokumen	-	4	-	11%	0,00%	67%	0,0%
		Fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	9	Dokumen	228.700.750	-	-	1	Dokumen	4.925.750	0	Dokumen		0	Dokumen		-	-	-	-	-	-	0	Dokumen		-	-	0%	0,00%	0%	0,0%
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUMI Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMI Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	520	Dokumen	484.419.000	-	-	100	Dokumen	72.205.000	36	Dokumen	-	36	Dokumen	7.546.000	-	-	-	-	-	-	72	Dokumen	-	72	-	14%	0,00%	72%	0,0%
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	4	Dokumen	107.753.125	-	-	2	Dokumen	17.343.346	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	Dokumen	-	-	-	0%	0,00%	0%	0,0%
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	241	Dokumen	375.430.000	-	-	1	Dokumen	4.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Dokumen	-	-	-	0%	0,00%	0%	0,0%
		Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	187	Desa	232.050.000	-	-	2	Desa	2.549.250	0	Desa	-	0	Desa	-	-	-	-	-	-	-	0	Desa	-	-	-	0%	0,00%	0%	0,0%
		Program Penataan Desa	Jumlah desa berubah status	95	Desa	81.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	0,00%	0%	0,0%
		Penyelenggaraan Penataan desa	Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaran penataan desa	95	Desa	81.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	0,00%	0%	0,0%
		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan status desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan penghapusan penggabungan dan perubahan status desa	95	Desa	81.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	0,00%	0%	0,0%
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) 2. Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa	82% 58%	persen	3.876.478.628	-	-	70 33	persen	739.523.928	25 8	persen	-	25 8	persen	30.915.432	-	-	-	-	-	-	50 16	persen	-	50 16	-	60,98% 27,59%	0,00%	0% 0%	0,0%
		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten aktif	100	Persen	3.876.478.628	-	-	100	Persen	739.523.928	25	Persen	-	25	Persen	30.915.432	-	-	-	-	-	-	50	Persen	-	50	-	50%	0,00%	50%	0,0%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2030			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025 Per Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2029 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2029 (%)	
												I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6		7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100%		15=12/7 x 100%	
		Kegiatan/Sub Kegiatan		K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Fasilitasi penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah dokumen hasil penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	5	Dokumen	257.050.000	-	-	1	Dokumen	25.700.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	Dokumen	-	-	-	0%	0,00%	0%	0,0%
		Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	10	Unit	2.856.424.628	-	-	2	Unit	666.213.928	0	Unit	-	0	Unit	30.915.432	-	-	-	-	-	-	0	Unit	-	-	-	0%	0,00%	0%	0,0%
		Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	975	Lembaga	474.544.000	-	-	156	Lembaga	30.155.000	30	Lembaga	-	40	Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	70	Lembaga	-	70	-	7%	0,00%	45%	0,0%
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4	Laporan	69.615.000	-	-	1	Laporan	8.155.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	0	Laporan	-	-	-	0%	0,00%	0%	0,0%
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	4	Laporan	69.615.000	-	-	-	-	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	0	Laporan	-	-	-	0%	0,00%	0%	0,0%
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaran Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5	Dokumen	102.820.000	-	-	1	Dokumen	10.300.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	Dokumen	-	-	-	0%	0,00%	0%	0,0%
		Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	12	Dokumen	46.410.000	-	-	-	-	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	Dokumen	-	-	-	0%	0,00%	0%	0,0%
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan kerjasama desa yang difasilitasi	100	persen	188.080.250	-	-	4	Dokumen	2.140.250		Dokumen	-	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	Dokumen	-	1	-	1%	0,00%	25%	0,0%
		Fasilitasi Kerjasama antar desa	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama desanya	13	Dokumen	188.080.250	-	-	4	Dokumen	2.140.250		Dokumen	-	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	Dokumen	-	1	-	8%	0,00%	25%	0,0%
		Fasilitasi Kerja sama antar desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota	52	Dokumen	188.080.250	-	-	2	dokumen	2.140.250	-	dokumen	-	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2%	0,00%	0%	0,0%
			TOTAL	298		24.502.250.707	-	-	208		4.361.090.880	59		564.496.642	60		1.651.949.284	-	-	-	-	-	-	119		564.496.642	119	564.496.642	40%	2,30%	57%	13,2%
																											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					
																											PREDIKAT KINERJA					

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA*	tersediamya fasilitas dalam pelaksanaan tugas
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA*	penyesuaian efesiensi anggaran dan jadwal
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA**	
TINDAK LANJUT YANG PERLU DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH BERIKUTNYA**	

Tarutung, September 2025
Plt. Kepala Dinas

Drs. Satya Dharma Nababan, M.Si
NIP. 197305011992031001

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2025		Perubahan Rencana Tahun 2025		Keterangan
				Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
1	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**presentase realisasi anggaran**	96%	**3.807.780.226**	96%	**3.359.153.506**	
	2.13.01.2.01	**Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**terselenggaranya penyusunan dokumen dan laporan kinerja**	1 Tahun	**42.999.800**	1 Tahun	**16.999.800**	
	2.13.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.999.800	1 Laporan	4.999.800	
	2.13.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	38.000.000	2 laporan	12.000.000	efisiensi anggaran
	2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**terlaksananya administrasi keuangan**	1 Tahun	**3.200.039.027**	1 Tahun	**2.966.100.368**	
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.153.451.427	29 Orang/bulan	2.917.829.768	
	2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	40.587.600	12 Dokumen	42.270.600	
	2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1 laporan	6.000.000	1 laporan	6.000.000	
	2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**terselenggaranya administrasi umum**	1 Tahun	**239.994.225**	1 Tahun	**121.730.878**	
	2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	9.997.600	4 paket	4.006.600	efisiensi anggaran
	2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	29.999.625	1 paket	13.001.100	efisiensi anggaran
	2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	15.000.000	4 paket	8.032.400	efisiensi anggaran
	2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	15.000.000	4 paket	10.141.178	efisiensi anggaran
	2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	12 dokumen	9.998.000	0 Dokumen	-	efisiensi anggaran
	2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	159.999.000	12 Laporan	86.549.600	efisiensi anggaran

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2025		Perubahan Rencana Tahun 2025		Keterangan
				Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
	2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**88.731.700**	**2 unit**	**33.239.200**	
	2.13.01.2.07.06	pengadaan mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	17.446.800	0 unit	-	efisiensi anggaran
	2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yangb disediakan	7 unit	71.284.900	2 unit	33.239.200	efisiensi anggaran
	2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**tersedianya jasa penunjang urusan kantor**	1 Tahun	**141.009.600**	1 Tahun	**114.927.200**	
	2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 1 Laporan	1.000.000	4 1 Laporan	1.000.000	
	2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 1 Laporan	30.800.000	12 1 Laporan	32.020.000	
	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	109.209.600	12 Laporan	81.907.200	
	2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terselenggaranya pemeliharaan**	1 Tahun	**95.005.874**	1 Tahun	**106.156.060**	
	2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kenderaan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	8 unit	70.035.474	7 unit	82.908.360	
	2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	1 unit	14.971.600	1 unit	10.459.300	
	2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	9.998.800	10 unit	12.788.400	
2	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**jumlah kerjasama desa yang aktif**	4 kerjasama	**4.899.000**	2 kerjasama	2.440.250	
	2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**terselenggaranya fasilitasi kerjasama desa**	4 dokumen	**4.899.000**	2 Dokumen	2.440.250	
	2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam Kabupaten/Kota	4 dokumen	4.899.000	2 Dokumen	2.440.250	efisiensi anggaran
3	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**persentase aparatur desa dn anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya ; persentase fasilitasi tata kelola desa**	25% ; 100%	**129.562.000**	25% ; 100%	**135.655.696**	

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2025		Perubahan Rencana Tahun 2025		Keterangan
				Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
	2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa**	100%	**129.562.000**	100%	**135.655.696**	
	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	50 Dokumen	30.000.000	45 Dokumen	14.669.000	efisiensi anggaran
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	7 dokumen	40.000.000	6 dokumen	19.813.350	efisiensi anggaran
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	50 Dokumen	29.576.000	100 Dokumen	72.205.000	pertambahan anggaran untuk fasilitasi BUMDes dalam mengelola ketapang
	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah dokumen profil desa yang tersusun	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	4.150.000	efisiensi anggaran
	2.13.04.2.01.13	Fasilitasi pengelolaan aset desa	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Aset desa	2 dokumen	9.987.000	1 dokumen	4.925.750	efisiensi anggaran
	2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	5 desa	5.000.000	2 desa	2.549.250	efisiensi anggaran
	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 dokumen	4.999.000	2 dokumen	17.343.346	pertambahan anggaran dalam rangka lomba desa untuk kegiatan hari jadi Kabuaten Tapanuli Utara ke 80 Tahun
4	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) ; persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa**	70% ; 33%	**296.835.528**	70% ; 33%	**739.523.928**	
	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang**	**Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten aktif**	100%	**296.835.528**	100%	**739.523.928**	
	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2025		Perubahan Rencana Tahun 2025		Keterangan
				Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	156 lembaga	20.000.000	156 lembaga	30.155.000	
	2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 unit	206.838.528	2 unit	666.213.928	pertambahan anggaran untuk operasional PKK Kabuaten dan kegiatan New Posyandu
	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	2 dokumen	9.999.000	0 dokumen	-	efisiensi anggaran
	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Guna	jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Guna	1 laporan	4.998.000	0 Laporan	-	efisiensi anggaran
	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Mayarakat	jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Mayarakat	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	8.155.000	efisiensi anggaran
	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah dokumen Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	
					4.239.076.754		**4.236.773.380**	

Tarutung, 10 September 2025
Plt KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA

Drs. SATYA DHARMA NABABAN, M.Si
NIP. 197305011992031001

RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2025

TARUTUNG
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 telah selesai disusun. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran kegiatan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026, sekaligus sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025. Arah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025, diantaranya adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berpendidikan, berbudaya , sejahtera, sehat dan beriman. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara menterjemahkan arah dan prioritas pembangunan tersebut dalam program dan kegiatan yang akan direalisasikan pada tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 ini belum sempurna, sehingga kritik dan masukan dari berbagai pihak yang peduli dan berkepentingan dengan kemajuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara sangat kami harapkan. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan bidang pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Tarutung, September 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bontor A. Hutasoit, S.IP., M.SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19731003 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
DAFTAR GAMBAR			iv
BAB I	**:**	**PENDAHULUAN**	
		1.1. Latar Belakang	1
		1.2. Landasan Hukum	6
		1.3. Maksud dan Tujuan	9
		1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II	:	**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022**	
		2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11
		2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	13
BAB III	:	**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**	
		3.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah	14
		3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024	16
BAB IV	:	**PENUTUP**	29
LAMPIRAN			
Rencana Awal Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara			

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan rencana Kerja 2024	12
Tabel 2.2`	Analisis Kinerja Pelayanan	13
Tabel 3.1	Tujuan Sasaran dan Strategi Pencapaian Misi Bidang Pendidikan	16
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat daerah

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembati perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serbagai implementasi pelaksaaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah disusun dalam rangka Menyusun rancangan awal RKPD dengan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu sebagai saran dan masukan untuk tahun berikutnya, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi :

A. Persiapan penyusunan;

B. Penyusunan rancangan renja;

C. Penyusunan rancangan;

D. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

E. Perumusan rancangan renja;

F. Penetapan

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Renja RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perubahan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menyusun Rancangan Renja tahunan dalam hal ini Rancangan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 serta Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD, Organissasi Pernagkat Daerah juga menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD).Penyusunan Renstra-OPD ini mengacu pada RPJMD.Renstra-OPD memuat tujuan,sasaran,program, dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara ini, didasarkan atas kebutuhan dan permasalahan pendidikan yang ada saat ini antara lain adalah:

1. Peningkatan Mutu Pendidikan

   Proses pembelajaran yang dilakukan oleh banyak guru saat ini cenderung pada pencapaian target materi kurikulum dan lebih mementingkan pada penghafalan konsep bukan pada pemahaman. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang selalu didominasi oleh guru. Dalam penyampaian materi, biasanya guru menggunakan metode ceramah yang dalam pelaksanaannya siswa hanya duduk, mencatat, dan mendengarkan apa yang disampaikan guru dan sedikit peluang bagi siswa untuk bertanya. Dengan demikian, suasana pembelajaran menjadi tidak kondusif sehingga siswa menjadi pasif.

   Jika secara psikologis siswa kurang tertarik dengan metode yang digunakan guru, maka dengan sendirinya siswa akan memberikan umpan balik psikologis yang kurang mendukung dalam proses pembelajaran. Indikasinya adalah timbul rasa tidak simpati terhadap guru, tidak tertarik dengan materi-materi pembelajaran, dan lama-kelamaan timbul sikap acuh tak acuh terhadap mata pelajaran.

2. Masih rendahnya kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk meletakkan dasar kecerdasan, wawasan pengetahuan, kepribadian yang berakhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya

3. Mutu kompetensi guru masih memerlukan perhatian khusus dan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik antar wilayah maupun antar sekolah belum merata;

   Kondisi guru di Tapanuli Utara juga masih perlu ditingkatkan kompetesinya dimana kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk

menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Secara kuantitas jumlah guru di Tapanuli Utara belum cukup memadai, dalam hal distribusi guru ternyata banyak mengandung kelemahan yakni pada satu sisi ada daerah atau sekolah yang kelebihan jumlah guru, dan di sisi lain ada daerah atau sekolah yang kekurangan guru. Dalam banyak kasus, ada SD yang jumlah gurunya hanya tiga hingga empat orang bahkan satu orang yakni Kepala Sekolahnya sendiri, sehingga mereka harus mengajar kelas secara paralel dan simultan.

4. Masih kurangnya sarana prasarana sekolah yang berkualitas;

   Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu diantaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Seperti yang dijelaskan dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

   Oleh karena itu kondisi sarana prasarana pendidikan di sekolah masih belum cukup untuk mengembangkan potensi guru dan peserta didik.

5. Masih rendahnya pengelolaan satuan pendidikan dasar yang bermutu;

   Berbagai keberhasilan pembangunan pendidikan telah dicapai hingga saat ini, terutama dalam dalam hal akses pendidikan dasar menunjukkan kemajuan penting. Namun demikian, kepastian penduduk usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata. masih merupakan permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini setidaknya terlihat dengan masih terdapatnya anak yang putus sekolah dan angka melanjutkan yang masih belum seratus

persen. Hal ini disebabkan karena faktor ekomoni yang merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak mampu membiayai sekolah maupun karena tuntutan keluarga bahwa mereka harus bekerja. Selain itu, beasiswa untuk siswa miskin juga belum sepenuhnya terbagi secara menyeluruh dan merata. Terutama belum menyentuh pada beberapa komunitas suku laut yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara yang identik dengan kemiskinan. Sementara itu, peningkatan mutu pendidikan dasar masih terkendala oleh permasalahan distribusi yang tidak merata dan kualitas guru yang masih terbatas. Meskipun rasio guru terhadap siswa cukup baik, namun demikian distribusi guru masih terkonsentrasi di daerah perkotaan (ibukota Kabupaten dan Kecamatan). Kualitas rata-rata guru pendidikan dasar juga masih belum tinggi. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pendidikan juga belum sepenuhnya dapat diwujudkan seperti yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM).

6. Pembiayaan di Satuan Pendidik yang masih minimal;

   Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada satu sekolah merupakan komponen produksi konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah.

   Namun hingga saat ini, dunia pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara masih menghadapi berbagai persoalan yang sangat serius dan kompleks, mulai dari rendahnya alokasi anggaran sehingga belum memadainya untuk melaksanakan pelatihan dalam peningkatan kompetensi guru dan peserta didik.

7. Belum meratanya pelayanan PAUD yang berkualitas;

   Hal ini terlihat dengan belum optimalnya pelaksanaan PAUD nonformal dan informal terutama dalam memberikan layanan pengembangan anak usia 0-6 tahun serta masih kurangnya pendidikan orang tua dalam hal pengasuhan anak (*parenting education*), dan masih rendahnya peran orang tua serta masyarakat

dalam pengembangan program PAUD, seperti taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis. Masih sering ditemui orang tua yang memasukkan anaknya ke Sekolah Dasar padahal masih berusia 5 tahun. Selain itu, lembaga pendidikan nonformal dan informal yang mempunyai nilai komparatif dan kompetitif untuk memenuhi tuntutan global juga dirasakan masih sangat kurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

8. Masih rendahnya Pelestarian Budaya Lokal (cagar budaya, Desa adat, museum, sanggar kebudayaan);

   Pengembangan dan pelestarian Buday Lokal sangat berperan untuk pengembangan destinasi wisata bidang budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. Sampai saat ini pelestarian dan pendatan Budaya lokal belum terlaksana secara baik.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, diantaranya adalah :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
22) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
24) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
26) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
28) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahab Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

30) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
31) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
32) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
33) Surat dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
34) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayann Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan program strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan 2021-2026 kedalam skala tahunan;
2. Melakukan identifikasi atas ketersediaan alokasi sumber untuk dipadukan dengan kebutuhan sesuai program dan kegiatan yang direncanakan;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah :

1. Terwujudnya pemahaman, kesatuan langkah, sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Blora dalam kurun tahun 2025;
2. Terwujudnya kepastian dan kejelasan pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Blora dalam kurun tahun 2025;
3. Tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Blora dalam kurun tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, yang antara lain memuat permasalahan yang terjadi sehingga diperlukannya suatu dokumen perencanaan yang komprehensif dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara. Bab ini juga memuat landasan hukum serta maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

Bab ini memuat tentang kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tapanuli Utara Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara sudah disahkan. Selain itu, juga berisi pencapaian target Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, berisi juga perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara. Pada Bab ini juga disampaikan faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, berisi kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rancangan Renja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam bentuk indikator hasil (outcome) yang terealisasikan melalui kegiatan-kegiatan di masing-masing program tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) kategori capaian yaitu realisasi kinerja yang kurang dari target dan realisasi capaian kinerja yang melebihi target.

Pada Tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan 3 (tiga) Program dan 10 (kegiatan), 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 443.083.394.327.00,- (empat ratus empat puluh tiga milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu

tiga ratus dua puluh tujuh rupiah). Realisasi keuangan terhadap anggaran yang tersedia sebesar Rp. 413.808.832.786,50,- (empat ratus tiga belas milyar delapan ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam lima puluh rupiah) dengan perincian realisasi belanja sebagi berikut:

1. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp 355.940.802,854 dan terealisasi sebesar Rp 327.524.231,094 atau mencapai persentase sebesar 92,02% dengan kegiatan yang mendukung program iantara lain :
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp 87.012.591.473 dan terealisasi sebesar Rp 86.154.866.092,50 atau mencapai persentase sebesar 99,01% dengan kegiatan yang mendukung program ini antara lain :
   a. Pengelolaan Pendidikan Dasar
   b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3. Program Pengembangan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp 130.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 129.735.600 atau mencapai persentase sebesar 99,80% dengan kegiatan yang mendukung program ini antara lain :
   a. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)

KABUPATEN TAPANULI UTARA

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6									
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	9 Jenis	300%
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	1 kegiatan	1 dokumen	1 kegiatan	1 dokumen	100%	1 kegiatan	3 dokumen	300%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 kegiatan	1 Laporan	1 kegiatan	1 Laporan	200%	1 kegiatan	3 Laporan	300%

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 kegiatan	12 Laporan	1 kegiatan	12 Laporan	1200%	1 kegiatan	12 Laporan	1200%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Jenis	2 jenis	2 Jenis	2 jenis	100%	2 Jenis	12 jenis	300%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 kegiatan	12 orang/Bulan	1 kegiatan	12 orang/Bulan	1200%	1 kegiatan	25 orang/Bulan	2500%
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 kegiatan	12 Dokumen	1 kegiatan	12 Dokumen	1200%	1 kegiatan	25 Dokumen	2500%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	18 Jenis	300%
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	4 paket	12 bulan	4 paket	33%	12 bulan	20 paket	167%
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	4 paket	12 bulan	4 paket	33%	12 bulan	20 paket	167%
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	4 paket	12 bulan	4 paket	33%	12 bulan	20 paket	167%
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	3 paket	12 bulan	3 paket	25%	12 bulan	20 paket	167%

					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	4 laporan	12 bulan	4 laporan	33%	12 bulan	20 paket	167%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	3 laporan	12 bulan	3 laporan	25%	12 bulan	20 paket	167%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	12 Jenis	300%
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1 laporan	12 Bulan	1 laporan	8%	12 Bulan	14 laporan	117%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	1 laporan	12 Bulan	1 laporan	8%	12 Bulan	14 laporan	117%
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	3 laporan	12 Bulan	3 laporan	25%	12 Bulan	18 laporan	150%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1 laporan	12 Bulan	1 laporan	8%	12 Bulan	14 laporan	117%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	6 jenis	300%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	6 unit	12 Bulan	6 unit	50%	12 Bulan	6 unit	50%

					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Tingkat Partsisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	16,34%	67,97%	16,30	72,37	444%	16,32%	156,66	9,59
						2. Tingkat Partsisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	79,25%	102,58%	79,21	89,09	112%	79,23%	270,9	3,42
						3. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	66,67%	33,33%	33,33	16,67	50%	49,95%	99,95	1,50
					Pengelolaan Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Dasar	11 Jenis	11 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	13 Jenis	9 Jenis	36	2,571428571
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang bertambah	5 sekolah	6 sekolah	4 sekolah	1 ruang	100%	5 ruang	12	2,4
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah	2 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	2 ruang	50%	2 ruang	8	4
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang baru	2 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	2 ruang	50%	2 ruang	8	4
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang bertambah	1 sekolah	1sekolah	0	0	0%	1 paket	1	1
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan	1 sekolah	1sekolah	0	0	0%	1 paket	1	1

					Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer yang bertambah	4 sekolah	2 sekolah	0	0	0%	4 ruang	6	1,5
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang baru	1 sekolah	1sekolah	0	0	0%	1 paket	1	1
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah yang baru	8 sekolah	4 sekolah	2 sekolah	2 ruang	100%	8 ruang	12	1,5
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 kegiatan	3044 orang	1 kegiatan	4568 orang	91360%	3044 ruang	10656	2131,2
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2 kegiatan	385 lembaga	2 kegiatan	386 lembaga	7720%	385 lembaga	1156	192,6666667
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	12 bulan	385 lembaga	12 bulan	386 lembaga	3217%	385 lembaga	1156	96,33333333
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14 Jenis	14 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	24	1,714285714
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU bertambah	1 sekolah	1 sekolah	0	0	0%	1	1	1
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah bertambah	4 sekolah	4 sekolah	0	0	0%	4	4	4

					Pembangunan laboratorium	Pembangunan laboratorium bertambah	4 sekolah	4 sekolah	0	0	0%	4	4	4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara lebih menitikberatkan pada upaya pencapaian indikator-indikator pembangunan pendidikan yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dan KebudayaanTahun 2025 - 2026.

T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tapanuli Utara

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Proyeksi						Realisasi Capaian Proyeksi Catatan analisis				Proyeksi		Catatan analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Angka Kelulusan															
	a.SD			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	b.SMP			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Rata-rata Lama Sekolah			10,00	10,02	10,24	10,28	10,29	10,30	9,99	10,00	10,10	10,31	10,32	10,33	
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)			88,17	89,30	90,19	91,09	91,10	91,11	89,56	91,46	91,50	94,03	94,53	95,03	
	a.5-6 Tahun			n/a	n/a	n/a	74,00	75,00	76,00	n/a	n/a	n/a	76,91	75,00	76,00	
	b.7-15 Tahun			n/a	n/a	n/a	94,65	94,85	95,00	n/a	n/a	n/a	99,21	94,85	95,00	
4	Angka Partisipasi Murni															
	a. PAUD			16,25	16,30	16,32	16,34	16,35	16,36	17,22	46,90	47,90	67,52	68,02	68,52	
	b. SD			83,78	83,80	83,82	83,84	83,84	83,84	95,73	93,07	96,07	96,14	96,64	97,14	
	c. SMP			74,60	74,62	74,64	74,66	74,67	74,68	88,76	90,53	91,53	95,27	95,77	96,27	
5	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP			100	100	100	100	100	100	100	97,89	100	100	100	100	
6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV															
	a. PAUD			10,86	10,96	10,98	11,00	11,01	11,02	34,24	35,14	36,14	40,23	40,73	41,23	
	b. SD			70,77	71,89	73,33	74,79	74,80	74,81	81,83	82,31	83,31	89,25	89,75	90,25	
	c. SMP			91,48	93,04	93,97	94,91	94,92	94,93	95,90	93,88	94,88	95,69	96,19	96,69	
7	Rasio Jumlah Siswa pertingkatan terhadap ruang kelas															
	a. SD			n/a	103,00	102,50	101,11	101,12	101,13	n/a	128,49	129,49	122,36	122,86	123,36	
	b. SMP			n/a	100	100	100	100	100	n/a	103,59	104,59	84,65	85,15	85,65	
8	Persentasi Budaya Daerah yang dilestarikan			n/a	19,00	19,50	20,54	20,55	20,56	n/a	100	105	135	135	135	
9	Nilai Hasil Evaluasi AKIP			58,00	83,00	84,00	85,00	85,01	85,02	58,00	69,19	68,64	60,34	60,84	61,34	

10	Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini terhadap target		100	100	100	100	100	100	n/a	96,01	96,10	44,92	45,42	45,92	
	Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar terhadap target		100	100	100	100	100	100	n/a	98,68	98,78	89,31	89,81	90,31	
	Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan		100	100	100	100	100	100	n/a	96,3	96,40	96,92	97,42	97,92	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan, namun masih terdapat beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian untuk lebih di tingkatkan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan umum dari semua kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Akses dan pemerataan Pendidikan;
2) Peningkatan mutu Pendidikan;
3) Peningkatan relevansi Pendidikan;
4) Peningkatan Efesiensi pendidikan.

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan diatas, maka Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki beberapa strategi untuk meminimalisir permasalahan yang ada, diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
2. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
3. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas

4. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
5. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga pendidik melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan;
6. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan prestasi pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

Peluang bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi tantangan di atas, antara lain : Kesiapan Pemerintah untuk membantu memperluas layanan pendidikan melalui program DAK dan DAU untuk membangun RKB, ruang penunjang, ruang perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas, peningkatan kapasitas SDM dan penyaluran biaya operasional satuan pendidikan jenjang SD dan SMP, Komitmen pimpinan daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang menempatkan pendidikan ke dalam skala prioritas program pembangunan,Kemajuan teknologi IT yang memungkinkan proses managemen penyelenggaraan pendidikan lebih efektif khususnya terkait akses layanan data dan informasi sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam rangka pengembangan program - program pendidikan di setiap level penyelenggara sesuai ketentuan dan kewenangan.

Analisis capaian pelayanan serta kajian atas pencapaian kinerja sasaran dalam 4 Tahun terakhir, maka isu - isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sektor pendidikan, adalah sebagai berikut :

1. Upaya perluasan dan pemerataan pendidikan masih belum sepenuhnya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat usia sekolah.
2. Upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan masih dihadapkan pada persoalan : banyak gedung sekolah yang rusak, terbatasnya fasilitas penunjang untuk kegiatan pembelajaran yang efektif, tingkat profesionalitas tenaga pendidik yang belum merata antar jenis dan satuan pendidikan, kurang optimalnya pemahaman tenaga pendidik terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang berdampak pada lemahnya implementasi Kurikulum dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas, terbatasnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pendidikan kesetaraan fungsional yang menyebabkan sering munculnya tindakan tidak taat asas dan lemahnya hasil proses pembelajaran yang dialami warga belajar.

TABEL.T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi		**369.243.209.242**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi		**387.705.369.704**	
I.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3 Jenis**	**150.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3 Jenis**	**157.500.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	**42.000.000**	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan	1 dokumen	**10.500.000**	
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan			
			Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian					Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian			
			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	**105.000.000**	
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat**	**4 Jenis**	**366.900.722.882**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4 Jenis**	**385.245.759.026**	

		Kabupaten Tapanuli Utara	**Daerah**								
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	366.442.722.882	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	**384.764.859.026**	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Bulan	300.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Bulan	**315.000.000**	
			ASN					ASN			
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	**8.400.000**	
			SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan					SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan			
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen	150.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen	**157.500.000**	
I.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Jenis**	**843.310.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Jenis**	**885.475.500**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Komponen Instalasi	4 paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Komponen Instalasi	4 paket	**15.750.000**	
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	270.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	**283.500.000**	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 paket	28.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	**29.400.000**	

4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3 paket	120.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3 paket	**126.000.000**	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 paket	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 paket	**5.250.000**	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	60.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	**63.000.000**	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	345.310.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	**362.575.500**	
I.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Jenis**	**360.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Jenis**	**378.000.000**	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 unit	360.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 unit	**378.000.000**	
I.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Jenis**	**592.136.700**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Jenis**	**621.743.535**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	**5.250.000**	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	**157.500.000**	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan	3 laporan	95.136.700	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan	3 laporan	**99.893.535**	

		Kabupaten Tapanuli Utara	Kantor					Kantor			
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	342.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	**359.100.000**	
I.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2 Jenis**	**397.039.660**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2 Jenis**	**416.891.643**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	7 unit	357.039.660	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	7 unit	**374.891.643**	
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan					Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan			
			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	3 laporan	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	3 laporan	**42.000.000**	
	Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya			Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya			
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		1. Tingkat Partsisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	**81.267.508.625**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		1. Tingkat Partsisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	**85.330.884.056**	
			2. Tingkat Partsisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%				2. Tingkat Partsisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%		
			3. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	100%				3. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	100%		
II.1	**Pengelolaan Pendidikan Dasar**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Dasar**	**17 Jenis**	**44.995.641.525**	**Pengelolaan Pendidikan Dasar**		**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Dasar**	**17 Jenis**	**47.245.423.601**	

1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Ruang Kelas Baru Bertambah	2 sekolah	400.000.000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Ruang Kelas Baru Bertambah	2 sekolah	**420.000.000**	
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Ruang Guru Baru bertambah	1 sekolah	200.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Ruang Guru Baru bertambah	1 sekolah	**210.000.000**	
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah	1 sekolah	200.000.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah	1 sekolah	**210.000.000**	
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah	2 sekolah	300.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah	2 sekolah	**315.000.000**	
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas yang baru	1 sekolah	180.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas yang baru	1 sekolah	**189.000.000**	
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 sekolah	150.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 sekolah	**157.500.000**	
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 sekolah	150.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 sekolah	**157.500.000**	
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 sekolah	100.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 sekolah	**105.000.000**	
9	Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Mebel Sekolah yang Tersedia	2 sekolah	100.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Mebel Sekolah yang Tersedia	2 sekolah	**105.000.000**	
10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan	4 sekolah	800.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan	4 sekolah	**840.000.000**	
11	Pembinaan Minat, Bakat dan	Dinas Pendidikan	Siswa yang Mengikuti Ajang	3 kegiatan	80.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	3 kegiatan	**84.000.000**	

	Kreativitas Siswa	dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Kompetisi/Lomba			Siswa	Utara				
			Akademik dan Non Akademik					Akademik dan Non Akademik			
12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	4 kegiatan	1.580.575.350	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	4 kegiatan	**1.659.604.118**	
			Uji kompetensi Guru					Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan			
			Pelaksanaan Guru penggerak					Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,			
			Jaminan Sosial Tenaga kerja Non ASN					Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan	2 kegiatan	47.159.850	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan	2 kegiatan	**49.517.843**	
			Hibah Kepada Dewan Pendidikan					Manajemen Sekolah			
14	Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Pembinmaan Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan Sekolah (TPPKS)	1 Kegiatan	58.639.800	Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Pembinmaan Tim Pencegahan Penganganan Kekerasan Sekolah (TPPKS)	1 Kegiatan	**61.571.790**	
15	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	1 Sekolah	75.000.000	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	1 Sekolah	**78.750.000**	
16	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Penguatan Literasi dan Numereasi	1 Kegiatan	85.868.950	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Penguatan Literasi dan Numereasi	1 Kegiatan	**90.162.398**	
17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	12 bulan	40.488.397.575	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah	12 bulan	**42.512.817.454**	
			Manajemen BOS					Dasar			
II.2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**10 Jenis**	**29.086.077.100**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**10 Jenis**	**30.540.380.955**	
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	8 sekolah	2.294.527.100	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	8 sekolah	**2.409.253.455**	
			Terbangun					Terbangun			

2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2 Sekolah	400.000.000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2 Sekolah	**420.000.000**	
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 sekolah	180.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 sekolah	**189.000.000**	
4	Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Pengadaan Mebel Sekolah	2 Sekolah	100.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Pengadaan Mebel Sekolah	2 Sekolah	**105.000.000**	
5	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1 Kegiatan	85.000.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1 Kegiatan	**89.250.000**	
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Diidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Diidik	1 Sekolah	150.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Diidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Diidik	1 Sekolah	**157.500.000**	
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 sekolah	177.206.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 sekolah	**186.066.300**	
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat	1 sekolah	100.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat	1 sekolah	**105.000.000**	
9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12 bulan	25.514.344.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12 bulan	**26.790.061.200**	
10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 kegiatan	85.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 kegiatan	**89.250.000**	
II.3	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**4 Jenis**	**6.371.110.000**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**4 Jenis**	**6.689.665.500**	

		Utara									
1	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Kegiatan	75.000.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Kegiatan	**78.750.000**	
2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Penyedian Jasa Guru Paud	254 Lembaga	1.620.950.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	254 Lembaga	**1.701.997.500**	
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan	254 Lembaga	70.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan	254 Lembaga	**73.500.000**	
4	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	12 bulan	4.605.160.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	12 bulan	**4.835.418.000**	
II.4	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**1 Jenis**	**814.680.000**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**1 Jenis**	**855.414.000**	
1	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah	12 Bulan	814.680.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah	12 Bulan	**855.414.000**	
III	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Jumlah guru dan tenaga pendidik yang profesional, Jumlah kepala sekolah yang profesional. Jumlah pengawas yang profesional, Rasio guru terhadap siswa,**	**Jumlah 1**	**45.000.000**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Jumlah guru dan tenaga pendidik yang profesional, Jumlah kepala sekolah yang profesional. Jumlah pengawas yang profesional, Rasio guru terhadap siswa,**	**Jumlah 1**	**47.250.000**	
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Sosialisasi Pemetaan dan Penempatan Tenaga Kepedidikan Dasar	1 Kegiatan	45.000.000	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Sosialisasi Pemetaan dan Penempatan Tenaga Kepedidikan Dasar	1 Kegiatan	**47.250.000**	

	Formal/Kesetaraan.										
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi)	**Jumlah 1**	**135.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi)	**Jumlah 1**	**141.750.000**	
IV.1	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2 Jenis**	**135.000.000**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**	**Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2 Jenis**	**141.750.000**	
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Kegiatan Festival Tunas Bahasa Indonesia	1 kegiatan	85.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Kegiatan Festival Tunas Bahasa Indonesia	1 kegiatan	**89.250.000**	
2	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan	50.000.000	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan	**52.500.000**	
	TOTAL				**450.690.717.867**					**473.225.253.760**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menciptakan Pendidikan Nasional yang berkualitas, tentunya pemerintah harus mengeluarkan berbagai kebijakan baik itu yang menyangkut institusinya maupun personalia serta anggaran yang dapat memacu dan memicu terciptanya pendidikan nasional yang berkualitas. Standar Nasional Pendidikan adalah untuk menindak lanjuti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, tentunya undang-undang sisdiknas yang sudah ada tidak cukup sampai disitu tentu harus di dukung dengan kebijakan lain sebagai operasional dilapangan. Maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia saat ini tengah mengalami berbagai persoalan yang cukup berat dan kompleks. Permasalahan itu meliputi masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dan masih lemahnya manajemen pendidikan, disamping belum terwujudnya keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi dan kemandirian.

Adapun Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 adalah Program Indonesia Pintar (PIP) melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Perhatian lebih besar diberikan bagi daerah-daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Dengan terintegrasinya pendidikan, kebudayaan, ristek dan teknologi keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan adaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban

bangsa. Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah

Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026, maka tujuan dan sasaran dari rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

Tabel 3.2.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapain Misi Bidang Pendidikan
Pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas	1. Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif	1. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap guru untuk menjadikan pembelajaransecara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif
		2. Meningkatkan kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk meletakkan dasar kecerdasan, wawasan pengetahuan, kepribadian yang berakhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya;	2. Melaksanakan lomba-lomba untuk peningkatan mutu lulusan dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah
		3. Meningkatkan mutu kompetensi guru dan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik antar wilayah maupun antar sekolah	3. Melaksanakan pelatihan bagi guru, peningkatan kualifikasi akademis guru dan regroping sekolah
		4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana sekolah	4. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana

			prasarana
		5. Meningkatkan pengelolaan satuan pendidikan dasar yang bermutu;	5. Melaksanakan pembinaan kepada Kepala Sekolah dibidang Manajer, Administrator, supervisor, inovator, motivator.
		6. Meningkatkan pembiayaan di Satuan Pendidik;	6. Penambahan pembiayaan di satuan pendidikan dari beberapa sumber dana
		7. Meningkatkan pelayanan PAUD yang merata dan berkualitas;	7. Melaksanakan pengembangan siswa PAUD, Pembinaan tenaga pendidk PAUD dan pendirian PAUD untuk satu desa satu PAUD
		8. Meningkatkan Pelestarian Budaya Lokal (cagar budaya, Desa adat, museum, sanggar kebudayaan)	8. Melaksanakan inventarisasi dan penetapan Budaya Lokal (cagar budaya, Desa adat, museum, sanggar kebudayaan)

Dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi yang tertuang dalam Renstra Kabupaten Tapanuli Utara dimaksud, maka target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025, sesuai dengan indikator yang tercantum dalam RPJMD, sebagaimana table 3.2.1

Indikator kinerja yang akan diukur pada tahun 2025 ini merupakan indikator kinerja minimal yang akan diukur, mengingat indikator-indikator ini tercantum dalam RPJMD.

Tabel 3.2.
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Target	
					2025	2026
1	2	3		4	5	6
I	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**					
1	**Angka Kelulusan**					
	a. SD	persen	100	100	100	100
	b. SMP	persen	100	100	100	100
2	**Rata-rata Lama Sekolah**	persen	10,28	10,31	10,29	10,30
3	**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**					
	a. 5-6 Tahun	persen	74,00	76,91	75,00	76,00
	b. 7-15 Tahun	persen	94,65	99,21	94,85	95,00
4	**Angka Partisipasi Murni (APM)**					
	a. PAUD	persen	16,34	67,52	68,85	68,90
	b. SD	persen	83,84	96,14	83,86	83,88
	c. SMP	persen	74,66	95,27	74,68	74,7
5	**Angka Melanjutkan dari SD ke SMP**	persen	100	100	100	100
6	**Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV**					
	c. PAUD	persen	11	40,23	11,50	12,00
	d. SD	persen	74,79	89,25	75,29	71,79
	e. SMP	persen	94,91	95,69	95,41	95,91
7	**Rasio Jumlah Siswa pertingkatan terhadap ruang kelas**					
	a. SD	persen	101,11	122,36	100	100
	b. SMP	persen	100	84,65	100	100
8	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**					
	a. PAUD	persen	16,34	68,48	68,85	68,90
	b. SD	persen	96,63	94,05	96,65	96,67
	c. SMP	persen	112,32	93,25	112,34	112,36
9	**Angka Putus Sekolah**					
	a. SD	persen	0,28	0,01	0,01	0,01
	b. SMP	persen	0,01	0,03	0,01	0,01
II	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**					

1	Persentasi Budaya Daerah yang dilestarikan	Persen	20,54	135	135	135
III	**Urusan Pemerintahan Daerah**					
1	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	nilai	85	60,34	86,00	87,00

Untuk mencapai target kinerja serta melaksanakan tugas pembangunan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara agar seluruh permasalahan dapat diatasi dan tantangan kedepan dapat dihadapi dengan baik, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dituntut untuk bisa berkerja keras, bekerja cerdas dan bekerja amanah. Untuk itu dibentuk struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara yang seluruh komponennya diharapkan mampu melaksanakan pembangunan pendidikan. Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

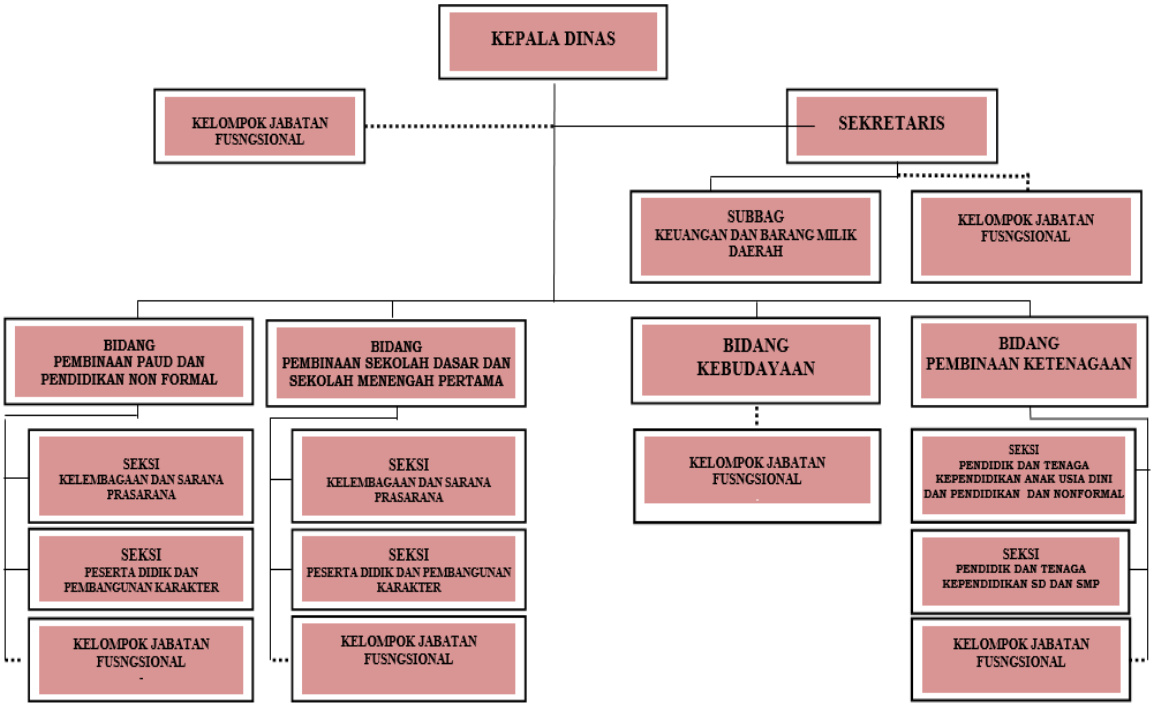

Adapun Pelaksanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Sebagai Berikut:

1) Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:
   a. membantu Bupati di bidang tugasnya;
   b. merumuskan dan menyusun program kerja dinas;
   c. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah;
   d. merumuskan dan menetapkan kebijakan program dinas;
   e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dinas;
   f. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
   g. melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah;
   h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah;

i. memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporannya. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:
a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
b. menyusun rencana program dan kegiatan sekretariat;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada para Kepala Bidang di dinas;
d. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
e. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan dinas;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dinas yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. melakukan pengendalian terhadap pengadaan barang dan pengendalian inventaris dan aset dinas;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kebudayaan;
j. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

3) Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pengembangan pembinaan serta tata usaha pegawai;
c. melaksanakan kebijakan, evaluasi dan administrasi umum dan kepegawaian;
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan naskah dinas, dokumentasi kedinasan, pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik, keprotokolan dan urusan penerimaan tamu, penatausahaan barang dan aset, sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
e. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

4) Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
d. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
f. mengkoordinasikan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
g. mengkoordinasikan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
h. mengkoordinasikan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan nonformal;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya;
j. melaksanakan program perlindungan guru PAUD yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga pendidik PAUD;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan melalui Sekretaris.

5) Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana, mepunyai tugas:
a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi;
c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
d. menyiapkan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan nonformal;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bawahannya;
f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis;
g. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
h. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

6) Kepala Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi;
c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bawahannya;
e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis;
f. menyiapkan bahan analisis, perumusan standar dan kriteria kegiatan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal;
g. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

7) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
e. mengkoordinasikan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD dan SMP;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter SD dan SMP;
g. menyiapkan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD dan SMP;
h. menyusun kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
i. menganalisis data dan informasi bidang;
j. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

8) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasana, mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi;
c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bawahannya;
e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis;
f. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD dan SMP;
g. melakukan pembinaan terhadap tugas bawahan;
h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. mengumpulkan data dan informasi kelembagaan dan akreditasi SD dan SMP;
j. mengidentifikasi kebutuhan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), rehabilitasi, pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan prasarana penunjang lainnya pada sarana prasarana pendidikan SD dan SMP;
k. mengidentifikasi kebutuhan sarana yang meliputi alat pendidikan, meubeler, perlengkapan sekolah dan sarana lainnya pada sarana prasarana pendidikan SD dan SMP;
l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

9) Kepala Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter , mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi;
c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bawahannya;
e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis;
f. menyiapkan bahan analisis, perumusan standar dan kriteria kegiatan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP;

g. melaksanakan pemetaan data peserta didik yang tidak mampu dan penentuan calon penerima beasiswa;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

10) Kepala Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
f. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan melalui Sekretaris.

11) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
f. melaksanakan pemetaan dan analisis kebutuhan promosi, rotasi, mutasi guru dan tenaga kependidikan;
g. menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan tugas tenaga kebudayaan;
i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
j. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

12) Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas:
   a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
   b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi;
   c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal;
   d. menyiapkan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal;
   e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya;
   f. melaksanakan dan mengelola program sertifikasi dan program tunjangan lainnya;
   g. menyiapkan bahan petunjuk teknis;
   h. memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
   j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

13) Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama, mempunyai tugas:
   a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
   b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi
   c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP;
   d. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP;
   e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya;
   f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; melaksanakan dan mengelola program sertifikasi dan program tunjangan lainnya;
   g. menyiapkan bahan petunjuk teknis;
   h. memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
   j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

14) Koordinator Wilayah, mempunyai tugas:
   a. melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing;
   b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

c. melaporkan hasil laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

15) Satuan Pendidikan melaksanakan tugas :
   a. Pelaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar;
   b. Pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah;
   c. Pembinaan dan pengorganisasian pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah;
   d. Pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik;
   e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;
   f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

16) Kelompok Jabatan Fungsional
   a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kebudayaan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
   b. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
   c. Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

17) Kelompok Jabatan Pelaksana, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kebudayaan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara memikul tugas dan tanggungjawab yang besar. Bupati Tapanuli Utara memberikan kepercayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan karena melalui peran serta aktif seluruh komponen pemangku kepentingan maka pembangunan pendidikan akan berhasil. Untuk itu, program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara juga bersumber dari usulan dari para pemangku kepentingan, yang disampaikan melalui forum Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan, Forum

OPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten. Usulan kegiatan juga disampaikan melalui Anggota Legislatif pada saat melakukan reses dan kembali ke daerah pemilihannya. Selain itu, usulan juga bisa disampaikan langsung, baik dari masyarakat maupun Satuan Pendidikan melalui Kepala Sekolahnya langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi dalam bentuk program kerja dalam pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran terinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Penjabaran program kerja harus memiliki tingkat perincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diuraikan dalam kegiatan. Program kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembagan Kebudayaan

Sedangkan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 merupakan penjabaran dari program yang telah ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu strategis pembangunan pendidikan, Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026. Kegiatan dimaksud, selain diusulkan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara, juga diusulkan melalui APBD Provinsi Sumatera Utara maupun APBN. Rekapitulasi dari program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dan pembiayaannya diusulkan melalui APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

BAB IV
PENUTUP

Pendidikan merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk di antaranya untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Dalam konteks lebih luas, pendidikan merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif, misalnya: pendidikan dasar dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan; pendidikan menengah diarahkan untuk meningkatkan potensi kebekerjaan (*employment)*; dan pendidikan tinggi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan dalam masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai manusia utuh.

Di era sekarang ini, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Pendidikan tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi telah menjadi salah satu hak mendasar yang harus diterima oleh setiap manusia. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan manusia, maka akan semakin besar pula kualitas pendidikan yang diharapkan. Sekolah yang tadinya dididirikan berdasarkan sisi pasokan (*supply oriented*) bergeser menjadi berdasarkan kebutuhan (*demand oriented*). Dalam hal ini pemerintah dan penyelenggara pendidikan harus memberikan layanan kebutuhan siswa, pendidik,

tenaga kependidikan dan orang tua. Dengan demikian terjadi pergeseran orientasi yaitu ingin memberikan keterjaminan dalam layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana tertera pada RPJMN 2019-2024, pendidikan merupakan prioritas kedua dari sebelas prioritas pembangunan. Pendidikan diharapkan memberikan andil dalam menjawab isu strategis peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam peningkatan pembangunan sumberdaya manusia. Di samping itu, pendidikan juga menjadi faktor inti dalam penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda yang berkompeten dan mampu menjawab kebutuhan jaman.

Seluruh program dan kegiatan yang diusulkan, akan diupayakan pembiayaannya melalui APBD Kabupaten Tapanuli Utara, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN maupun sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, usulan-usulan ini akan disampaikan kepada para pengambil kebijakan pada wilayahnya masing-masing. Program dan kegiatan yang pembiayaannya diusulkan melalui APBD Kabupaten Tapanuli Utara disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara. Program dan kegiatan yang pembiayaannya diusulkan melalui APBD Provinsi Sumatera Utara, disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, usulan juga disampaikan melalui Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara, yang secara kolektif akan menyampaikannya ke Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara. Begitu juga halnya dengan program dan kegiatan yang diusulkan pembiayaannya disulkan melalui APBN. Disampaikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara ini disusun, dengan harapan dapat dilaksanakan semua agar tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak, diucapkan terima kasih.

Tarutung, September 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bontor A. Hutasoit, S.IP., M.SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19731003 199303 1 003

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA)
PERUBAHAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun Rencana Kerja Perubahan Perubahan Tahun 2025 ini merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdyaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan Rencana Kerja Perubahan merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan . Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara RPJPD, RPJMD dan RKPD maupun RPD, Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Rencana Kerja Perubahan ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS). Dokumen ini akan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, target indikator kinerja dan kerangka pendanaan pembangunan. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD akan digunakan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Mengingat Rencana Kerja Perubahan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJP Nasional, RPJMN, RKP, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RKPD Provinsi Sumatera Utara, RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dan terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada sisa tahun anggaran tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaa Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
14. Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan Serentak secara Nasional pada Tahun 2024
15. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan

dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-Rencana Kerja Perubahan dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun Rencana Kerja Perubahan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu produk perencanaan, Rencana Kerja Perubahan tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Rencana Kerja Perubahan ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Secara substansi, keberadaan Rencana Kerja Perubahan dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya melakukan penyesuaian atas perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.
2. Tersedianya acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

Bab IV Penutup.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBD adalah :

a. *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota* dengan jenis kegiatan terdiri dari Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

   Fokus Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota adalah tersedianya operasional untuk mendukung kegiatan berjalan dengan baik selama 10 bulan terakhir ini dengan baik.

b. *Program Pengendalian Penduduk* dengan jenis kegiatan terdiri dari Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana dimana isi kegiatan ini adalah Operasional Sekretariat Stunting dan Aksi-aksi dalam rangka Penurunan Stunting dan juga Kegiatan yang bermitra dengan Stakeholders terkait Stunting maupun Keluarga Berencana.

c. *Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)* dengan jenis kegiatan terdiri dari : Pelakanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan Kearifan Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayananan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

   Program ini beruraikan Penyuluhan dan Penggaran Para Kader seperti Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan juga Kader KB (PPKBD dan Sub -PKBD) dalam rangka komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Kelompok KB atau Akseptor KB maupun masyarakat dan juga melakukan penggarapan Akseptor KB yang untuk dapat dilakukan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan (Faskes) maupun di Rumah Sakit.

d. *Program Pemberdayaan dan Peningaktan Keluarga Sejahtera (KS)* dengan jenis kegiatan terdiri dari ; Pelakanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Dimana kegiatan ini bertujuan dalam melakukan Pembinaan pada Kelompok Tribina, PIK-R maupun Kelompok UPPKA (usaha Peningkatan Pendapan Keluarga Akseptor) da Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan dalam rangka Penurunan Angka Stunting yang dilakukan Oleh Kader Tim Pendamping Keluarga

e. *Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan* dengan jenis kegiatan terdiri dari ; Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dimana kegiatan ini seperti Pemberian Hibah kepada Persit dan Bhayangkari.

f. *Program Perlindungan Perempuan*, kegiatan Pencengahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan kepada Perempuan berupa Pendapingan atau Biaya Visum dan Pengganti Transport untuk Konseling dengan Psikiater atau Psikolog.

g. *Program Peningkatan Kualitas Keluarga* dengan jenis kegiatan Penngkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

h. *Program Pemenuhan Hak Anak* dengan jenis kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota. Dimana Kegiatan bertujuan memberikan sosialiasasi dan koordinasi kepada anak-anak dalam rangka pencegahan kekerasan kepada anak maupun orang tua.

i. *Program Perlindungan Khusus Anak* dengan jenis kegiatan terdiri dari ; Pencengahan Kekeran Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan pencengahan dan Pendampingan Korban Kekesanan Fisik maupun Non Fisik kepada Anak sebagai korban.

Program dan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBD adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
   a) PenyediaaPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
   b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
   c) Adminitrasi Umum Perangkat Daerah,
   d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
   e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
   f) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum, dan
   g) Pemelirahaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pengendalian Penduduk :
   a) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   a) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Local,
   b) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
   c) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelyanana dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
   a) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Program Pengarusutamaa Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   a) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
   b) Penguatan dan Pengenbangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota
6. Program Perlindungan Perempuan
   a. Pencengahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
   a) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Program Prlindungan Khusus Anak
   a) Pencengahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

Hasil evaluasi lebih rinci pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renstra PD tahun 2024 yang mengacu pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, disajikan dalam dengan format tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara (Lampiran Tabel Rekaputilasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara terlampir).

2.2 Analisis Kinerja Palayanan SKPD

Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk manganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara digunakan beberapa indicator.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan berdasarkan indicator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan SKPD yang telah tertuang dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Indeks Pembagunan Keluarga (i-Bangga)
2. Total Fertility Rate (TFR)
3. Contraceptive Prevalance Rate (CPR)
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
5. Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dan politik
6. Cakupan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti
7. Cakupan anak korban kekerasan yang yang ditindaklanjuti
8. Capaian hasil evaluasi SAKIP
9. Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen

Data untuk analisis akan menunjukkan tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2021 disajikan sebagaimana Tabel 2.2 berikut : (exel)

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara

NO.	**Indikator Tujuan/Sasaran**	**Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun**				**Target**		**capaian**
		2020	2021	2022	2023	2025	2026	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
1.	**Indeks Pembagunan Keluarga (I-Bangga)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60.6**	**61.9**	**59.17**
	Indeks Pembangunan Berwawasan Keluarga (IPBK)	-	-	-	-	61.7	62.89	60.5
	Jumlah Anak dilahirkan Wanita Usia Subur (Total Fertelity Rate/ TFR)	4	3.9	3.8	2.87	2.82	2.82	2.83
	Angka Prevalensi Kotrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalensi Rate /MCPR)	66.63	67.29	67.03	51.27	53.4	55.63	51.27
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet Need)	20.19	20.63	20.24	21.51	14.7	12.48	16.45
	Angka Kelahiran Kelompok umur 15-s19 Tahun (ASFR)	21.7	7.5	7.8	7.9	4.7	4.4	5
	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	-	-	-	-	61.19	63.19	59.19
2.	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**97.51**	**97.52**	**97.53**	**97.54**	**97.56**	**97.57**	**97.69**
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	-	-	-	-	0.332	0.329	0.335
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	-	-	-	-	61.11	63.21	59.21
3.	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	cc	cc	c	c	70	74	63.91

2.3. Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Hasil analisis isu-isu penting selanjutnya dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara, maka hambatan dan masalah yang dihadapi adalah :

Tabel 2.4.
Hambatan dan Masalah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-rata jumlah anak dari WUS	2.82	Angka Kelahiran Total (TFR)/ Wanita Usia Subur (WUS)(15-49 Tahun)	Promosi, Informasi dan edukasi belum optimal	Dukungan dan sinergitas dengan sektor terkait belum optimal	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk secara aktif mengikuti program KB - Rendahnya pengguna metoda kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
Contraceptive Prevalance Rate (CPR)	51.27	Jumlah Peserta KB Aktif / Pasangan Usia Subur	Promosi, Informasi dan edukasi belum optimal	Ratio Petugas PLKB dan PKB belum memadai	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk secara aktif mengikuti program KB
Angka Kelahiran Kelompok Umum 15-19 Tahun	5	Jumlah Wanitas Subur Umur 15-19 tahun	Promosi, Informasi dan edukasi belum optimal	Dukungan dan sinergitas dengan sektor terkait belum optimal	- Rendah Pengetahuan Wanita Subur Umur 15-19 Tahun tentang pengetahuan melahirkan di usia dini
Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	59.19	Jumlah Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Promosi, Informasi dan edukasi belum optimal	Ratio Petugas PLKB dan PKB serta kader belum memadai	- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Kegiatan Kelompok Ketahanan Keluarga
Perentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan politik	2	Jumlah Perempuan yang bekerja di Lembaga pemerintah dan DPRD/Jumlah Perempuan yang ada	Promosi, Informasi dan edukasi belum optimal	Masih rendahnya akses perempuan dalam bidang Politik dan Ekonomi	Kurangnya kualitas SDM, sarana/prasarana dan anggaran untuk mendukung program -
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	Jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditindaklanjuti/jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ada	Promosi, Informasi dan edukasi belum optimal	Tingkat Pendidikan/Pengetahuan, ekonomi dan social masyarakat Masih Rendah	- Kurangnya Sosialisasi yg dilakukan Petugas tentang kebiajakan-kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak -

Dari tabel hambatan dan masalah serta permasalahan, tantangan dan solusi dapat ditentukan isu-isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas adalah Meningkatkan pengelolaan pengendalian penduduk dan meningkatkan efektifitas Keluarga Berencana serta meningkatkan efektifitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan didapatkan dari hasil Musrenbang maupun usulan lainnya dari masyarakat. Untuk usulan Program/kegiatan yang telah dibahas dalam musrenbang kecamatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 yang telah lalu, usulan desa maupun kecamatan yang ditujukan ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Tapanuli Utara tidak ada, pada dasarnya usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan fisik serta pengadaan sarana lainnya yang tidak terkait dengan tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I.	**Program peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender**				
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
II.	**Program Peningkatan Perlindungan perempuan dan anak**				
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
III.	**Program Keluarga Berencana dantiPembinaan Keluarga**				
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
IV.	**Program advokasi dan pengendalian penduduk**				
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Jumlah		

Sumber : Musrenbang Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Agenda pembangunan Nasional selama 20 tahun telah di tuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2045 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Lebih lanjut sebagaimana tertera dalam Undang-undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2025-2045 dalam mendukung Perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, Kementerian PPN/ Bappenas telah menyusun Undang-undang No.59 Tahun 2024 yang memiliki Misi sebagai berikut :

1. Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju,
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang,
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat,
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat, dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun menuju Net Zero Emission.

RPJPN 2025-2045, Visi Indonesia 2045 dalam mendukung perwujudan Indonesi Emas. Dalam hal ini, Tahapan Pembangunan RPJPN 2025-2045 dengan Tahap I (Pertama) dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional (PN) Penguatan Transformasi;

1) Transformasi Sosial : Penuntasan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial, serta Peningkatan Kualitas SDM untuk membentuk Manusia Produktif.

2) Trasnsformasi Ekonomi Hilirisasi SDA Unggulan, Peningkatan Kapasitas Riset Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penerapan Ekonomi Hijau, Pemenuhan Akses Digital di seluruh wilayah Indonesia, Pembagunan perkotaan dan pusat-

pusat pertumbuhan utamanya di luar Pulau Jawa.

3) Transformasi Tata Kelola : Kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan menajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, dengan fokus strategi untuk:

a) perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah;
b) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender;
c) peningkatan kompetensi PKB/PLKB;
d) penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi; dan
e) penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif.

b. Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan : PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP Revolusi mental dalam sistem social untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Dari KP tersebut, BKKBN berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:

1) Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja.
2) Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter.
3) Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini.
4) Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJPN 2025-2045, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

a. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:

1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.

b. menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:

1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.

c. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:

1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
4) Peningkatan KB Pria.
5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
6) Peningkatan kemandirian PUS dalamber-KB.

d. meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.

e. memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:

1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Berbagai arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tersebut diatas tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Dari sisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program BanggaKencana, arah kebijakan yang diambil diantaranya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi, serta Penguatan Kerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

a. peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi;
b. peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai *input*/masukan atas rumusan kebijakan;
c. peningkatan kemitraan dan kerjasama global di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat kelembagaan.

2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Utama memiliki arah kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

a. penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana;
b. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN;
c. penguatan Perencanaan Program dan Anggaran;
d. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur; dan
e. penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah-tanggaan yang berkualitas.

3. Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, Inspektorat Utama memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan

Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang akan diwujudkan melalui strategi:

a. mendorong pengelolaan keuangan BKKBN secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, eisien, dan efektif;
b. mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara efektif dan eisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi;
c. mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala BKKBN dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
d. mendorong pencapaian sasaran strategis BKKBN secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana terteradiatas, terutama dalam implemetasinya, BKKBN akan terus memperhatikan perkembangan situasi/kondisi dan isu strategis nasional serta prioritas strategi pembangunan nasional.

Salah satu strategi pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah Pengarusutamaan Gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Pengarusutamaan Gender merupakan isu lintas sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baik oleh Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah. BKKBN berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan perempuan) mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan Program Bangga Kencana serta memperhatikan konsep Pegarusutamaan Gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Program/Kegiatan Bangga Kencana yang inklusif gender.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun focus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka DPPKBP3A menetapkan Tujuan dan Sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukurannya sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	**Mewujudkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender**		**Angka Kelahiran total (TFR)**
		1. Program Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
			Angka Kelahiran Kelompok umur 15-19 Tahun
		2. Program Pembinaan Keluarga Berencana)KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern /Modern Contaceptive (mCPR)
			Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
			Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/Demand Satisfied
			Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (TKD)
		3. Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelomok Kegiatan Ketahanan Keluarga
			Indeks Pembangunan Gender
		4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
		5. Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekersan dan TPPO yang mendapatkan Layanan komprehensif
		6. Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
		7. Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
		8. Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
			Nilai Hasil Evaluasi AKIP
		9. Program Penunjang Urusan	Cakupan Pemenuhan Dukungan Manajemen

3.4. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program-program diharapkan akan dapat memacu peningkatan kinerja aparatur. Pelaksanaan dari program adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 dan turunannya Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada 9 (sembilan) Program yang telah ditetapkan sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan sebagai berikut
   1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
   2. Program perlindungan perempuan
   3. Program peningkatan kualitas keluarga
   4. Program pemenuhan hak anak (PHA)
   5. Program perlindungan khusus anak

B. Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana ditetapkan sebagai berikut
   6. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
   7. Program pengendalian penduduk
   8. Program pembinaan keluarga berencana (KB)
   9. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN PAGU RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Kegiatan Baru/Berkurang		Perangkat Daerah Penanggungj awab		
		Renja 2024	DPA PD 2024	Renja 2025	DPA PD 2025	Renja 2025	DPA P PD 2025	Jumlah Porgram	Jumlah Kegiatan	Perangkat Penanggungjawab
1	2	3	4	6	7	9	10	12	13	14
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	7	7	15	15	14.152.529.595	13.705.300.971	-	18	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA PD TAHUN 2024

NO	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target	Pagu	Alasan
				Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025
1	2	3	5	6	8	10
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran Yang Terpenuhi**	**100%**	**5.342.325.175**	**4.950.028.631**
		Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			*14.346.000*	*6.591.900*
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA-SKPD	1 Dokumen	2.499.900	999.650
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Dokumen	4.081.625	1.632.250
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediaya Evaluasi Perangkat Daerah	1 Tahun	9.346.000	3.960.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	4.680.718.350	4.629.379.131
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan	1 Tahun	62.223.600	62.223.600
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	4.052.800	1.621.150
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			*198.313.400*	*102.455.400*
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bagunan Kantor	Tersedianya Penerangan Gedung	1 Tahun	2.025.600	803.400

			Kantor			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	19.946.000	7.978.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	8.005.800	5.198.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	11.000.000	12.160.800
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	3.498.000	1.399.200
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	153.835.000	74.916..000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			*68.080.100*	*27.738.800*
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	7 Unit	68.080.100	27.738.800
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			*212.515.400*	*101.205.800*
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	1 Tahun	3.500.000	1.400.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	1 Tahun	26.999.400	26.999.400
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	182.016.000	72.806.400
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			*99.940.000*	*82.659.000*
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	99.940.000	82.659.000
2		**Program Pengendalian Penduduk**	**Indeks Pembangunan Berwawasan Keluarga Berencana**	**60.6**	**250.000.000**	**250.000.000**
			Angka Kelahiran Kelompok Umur 15-19 Tahun	**4.7**		

		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			*250.000.000*	*250.000.000*
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Terlaksananya Rapat Pengendalian Bangga Kencana	1 Tahun	250.000.000	250.000.000
3		**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Angka Kelahiran Total (TFR)**	**2.82**	**6.806.691.050**	**6.750.836.250**
			Angka Prevalansi Kontrasepsi Modern (modern Contraseptive Prevalance Rate/mCPR)	**53.45**		
			Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet Need)	**14.47**		
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			*1.055.245.000*	*1.042.405.000*
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Tersedianya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	12 Balai	731.568.000	731.568.000
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Tersedianya Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	15 Kecamatan	298.677.000	298.677.000
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Tahun	25.000.000	12.160.000
		Pendanyagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			*2.015.363.050*	*2.015.363.050*
		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Tersedianya Sarana Pendukung	16 Unit	101.878.800	101.878.800

			Operasional PKB/PLKB			
		Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tersedianya Pergerakan Kader Masyarakat Pedesaan (IMP)	742 Orang	1.913.484.250	1.913.484.250
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota			*1.412.683.000*	*1.412.683.000*
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tersedianya Pendistrubusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan	25 Faskes	26.320.000	26.320.000
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	80 Orang	118.335.000	118.335.000
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tersedianya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25 Faskes	60.928.000	60.928.000
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Tersedianya Pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) dan IUD	3560 Orang	1.198.050.000	1.198.050.000
		Peningkat Kesertaan KB Pria	Tersedianya Pelayanan KB Metode Operasi Pria	8 Orang	9.050.000	9.050.000
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			*2.323.400.000*	*2.280.385.000*
		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Tersedianya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Tahun	80.000.000	36.985.000
		Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat	252 Desa	1.353.000.000	1.353.000.000

		Berkualitas	Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas			
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Tersedianya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	159 Desa	890.400.000	890.400.000
4		**Progam Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**	**61.19**	**1.453.688.000**	**1.410.884.350**
		Pelaksanaan Pembagunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			*1.453.688.000*	*1.453.688.000*
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Tahun	75.000.000	32.196.350
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga	1.128 Orang 10 Unit	1.263.490.000	1.263.490.000
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Tersedianya Biaya Operasional Satya tingkat Kecamatan di Balai Penyuluhan	12 Balai	115.198.000	115.198.000
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Indeks Pembagunan Gender**	**97.75**	**158.053.000**	**173.365.350**
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	**0.332**		
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**61.11**		
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) PADA Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota			*68.053.000*	*48.365.350*
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi	12 Bulan	68.053.000	48.365.350

			Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			*90.000.000*	*125.000.000*
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	4 Kali	90.000.000	*125.000.000*
6		**Program Pemenuhan Hak Anak**	**Prevalensi Kasus Kekerasan pada Anak yang ditindaklanjuti**	**65.61**	**41.104.000**	**91.668.050**
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			*41.104.000*	*91.668.050*
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembangaan Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	41.104.000	91.668.050
7		**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Presentase Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif**	**100**	**100.843.000**	**78.518.940**
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			*100.843.000*	*78.518.940*
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Prevalensi Kasus Kekerasan pada Anak yang ditindaklanjuti	**100**	100.843.000	78.518.940

BAB IV
PENUTUP

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara dalam penyusunan Renja 2025 tetap berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat bergantung dari sistem informasi yang ada dan konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama, karena pengukuran kinerja bersifat *on going proces* sehingga wajib secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator kinerja yang benar-benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai. Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performa organisasi, merupakan *entry point* terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan baik tergantung dari bagaimana merumuskan dan menjabarkan jenis atau bentuk intervensi sesuai dengan masalah-masalah spesifik yang ada. Dengan demikian metode dan tehnik melaksanakan program kegiatan merupakan hal yang sangat penting, sehingga program-program dimaksud dapat terlaksana dengan baik, efektif dan tepat sasaran.

Tarutung, Oktober 2025
KEPALA DINAS,

DONNA NURSITI SITUMEANG, S.IP
PEMBINA TK. I
NIP. 19750705 200312 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan KaruniaNya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara telah dapat menyelesaikan penyusunan/perencanaan Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, yang merupakan bentuk perencanaan program dan kegiatan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 - 2026 adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 ini kami susun, semoga dapat menjadi acuan dan sebagai peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Tarutung, 2025

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Utara,

PEMBINA
MUTIHA SIMAREMARE, ST
NIP. 197201162005021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....ii
BAB I.....1
PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Landasan Hukum.....2
1.3 Maksud dan Tujuan.....3
1.4 Sistematika Penulisan.....4
BAB II.....5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD.....5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Capaian Renstra OPD.....5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....10
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....11
BAB III.....16
TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP.....16
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....16
3.3. Program dan Kegiatan.....17
BAB IV.....24
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP.....24
BAB V.....28
PENUTUP.....28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja P OPD) berupaya untuk terus melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan dalam berbagai perubahan yang terjadi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan terciptanya good governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2025, yang memuat program dan kegiatan pembangunan didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renja P Satuan Polisi Pamong Praja merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang harus disusun oleh OPD diantaranya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja

Satuan Polisi Pamong Prjaa Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang berisi rencana kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dimana acuan penanggaran sesuai dengan pagu indikatif pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara 2025 – 2026.

Ruang lingkup Renja Adalah pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara dalam 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai. Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara 2025 -2026, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada diagram alir dibawah ini :

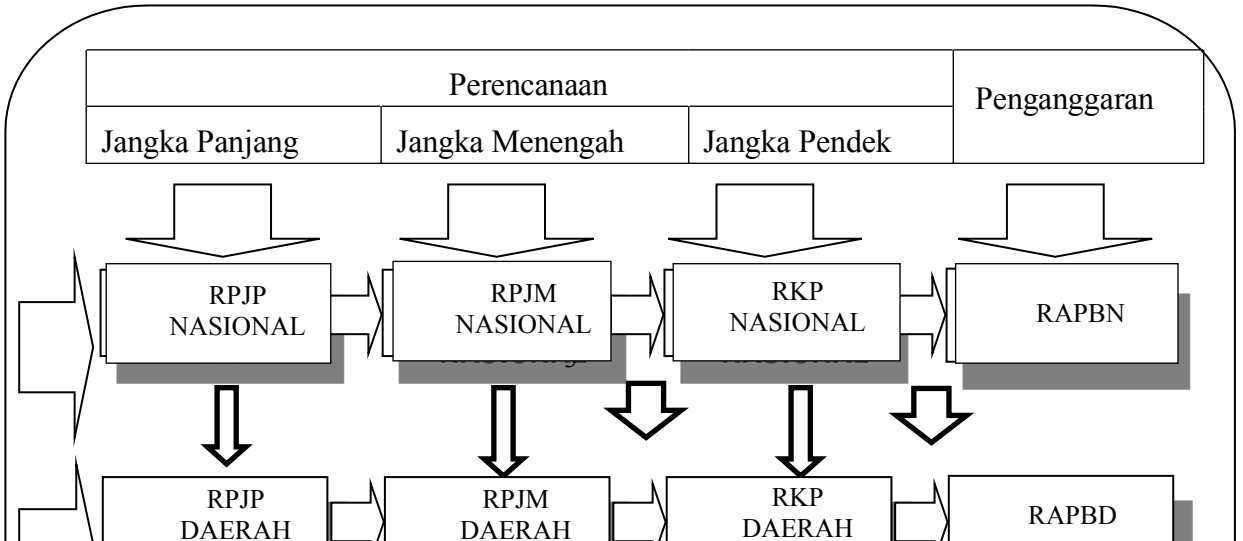

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
11) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
12) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2026;
13) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tersebut adalah:

1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran antara DPRD Kabupaten Tapanuli Utara

dengan Bupati Tapanuli Utara yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan.

2) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3) Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.1 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satpol PP Kabupaten Tapanuli Utara.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan TUPOKSI.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Capaian Renstra OPD.

Rencana Kerja Perubahan OPD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan Anggaran. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 tertuang dalam P.APBD Tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp.12.106.966.084,- (Dua belas milyar seratus enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) dari sebelumnya Rp.11.361.872.929, - (Sebelas milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah)

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Tapanuli Utara

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/8)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	97,18	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA, RKAP	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusanan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98,15	

1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang	108 Orang	108 Orang	108 Orang	108 Orang	108 Orang	108 Orang	94,44	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	98,07	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapanya	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	98,07	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	91,83	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	96,49	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	25 Paket	25 Paket	25 Paket	25 Paket	86,37	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100,00	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	96,87	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	133 Lembar	133 Lembar	133 Lembar	133 Lembar	133 Lembar	133 Lembar	133 Lembar	100,00	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55,36	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	192 Laporan	192 Laporan	192 Laporan	192 Laporan	192 Laporan	192 Laporan	192 Laporan	99.58	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	97,83	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	97,83	

1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98.33	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,89	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	400 Kasus	400 Kasus	400 Kasus	400 Kasus	400 Kasus	400 Kasus	400 Kasus	99,89	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	96.77	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	99.02	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	97.25	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai dengan SOP	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	95.80	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan Pencegahan, penanggulan, penyelamatan kebakran dan non kebakaran pada wilyah manajemen kebakaran (WMK)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Tugas Pemadam Kebakaran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadam Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Kasus	100 Kasus	100 Kasus	100 Kasus	100 Kasus	100 Kasus	100 Kasus	100.00	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 dan IKK Perraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra.

SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban Umum melalui Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			94	100	100	100	99	100	100	100	
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran			20	15	15	15	25	15	15	15	Capaian rendah menunjukan kinerja yang baik
3	Nilai Hasil Evaluasi Akip			80	85	90	90	60.20	66,61	90	90	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Pasal 5) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas menegakkan Perda/Perkada dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya, pada Pasa l7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 disebutkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hokum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada; dan
d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

Jika kita melihat pada tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja maka kita akan mengetahui betapa berat tugas dan tanggung jawab ini apabila tidak didukung oleh segenap lapisan masyarakat dan aparatur pemerintah lainnya. Dalam melaksanakan tupoksinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara sudah pasti menghadapi berbagai kendala baik bersifat internal maupun eksternal.

Adapun permasalahan dan isu-isu penting yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara adalah, sebagai berikut:

a. SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara belum berimbang, karena minimnya pelatihan teknis dan non teknis guna mewujudkan SDM aparatur yang handal, profesional dan menguasai teknologi informasi;
b. Adanya opini masyarakat yang hanya melihat Satuan Polisi Pamong Praja dari sisi negatifnya saja dan sering di anggap musuh Masyarakat;
c. Masih kurangnya personil dan peralatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
d. Masih kurangnya Anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja;
e. Masih kurangnya tingkat kesadaran warga masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah dan Perundang – Undangan yang berlaku;
f. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait khususnya Dinas/Badan yang mempunyai Perda yang ada kaitannya dengan sanksi dan denda.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja SKPD	12 Bulan	7.711.380.104	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja SKPD	12 Bulan	10.311.163.679
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja SKPD	12 Bulan	81.983.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja SKPD	12 Bulan	40.952.000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.999.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tapanuli Utara	Tersedianya Dokumen RKA, RKAP	2 Dokumen	4.999.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tapanuli Utara	Tersedianya Dokumen RKA, RKAP	2 Dokumen	2.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.999.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusanan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	61.984.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	29.952.000
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik	12 Bulan	3.315.153.748	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik	12 Bulan	6.509.508.179
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapanuli Utara	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	3.259.914.548	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapanuli Utara	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	6.451.004.979
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.239.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	53.503.200
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Bulan	200.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tapanuli Utara	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapanya	10 Paket	200.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tapanuli Utara	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapanya	-	0
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	166.686.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	85.918.350
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	7.998.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	5.000.000
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 Paket	22.325.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 Paket	11.162.350
17	Penyediaan Peralatan	Tapanul	Jumlah Paket Peralatan Rumah	12	6.171.000	Penyediaan Peralatan	Tapanul	Jumlah Paket Peralatan	12 Paket	3.000.000

	Rumah Tangga	i Utara	Tangga yang disediakan	Paket		Rumah Tangga	i Utara	Rumah Tangga yang disediakan		
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	4 Paket	3.531.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	4 Paket	1.756.000
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	126.660.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	65.000.000
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Paket	250.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapanuli Utara	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Paket	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapanuli Utara	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Tugas-Tugas Kantor	12 Bulan	3.776.606.356	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Tugas-Tugas Kantor	12 Bulan	3.520.040.100
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	133 Lembar	1.330.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	133 Lembar	1.330.000
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	27.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	24.002.900
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapanuli Utara	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	237 Laporan	3.748.276.356	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapanuli Utara	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	237 Laporan	3.494.707.200
26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	170.950.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	154.957.050

27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapanuli Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	22 Unit	170.950.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapanuli Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	22 Unit	154.957.050
29	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tapanuli Utara	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	12 Bulan	6.874.852.150	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tapanuli Utara	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	12 Bulan	870.497.250
30	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	12 Bulan	6.613.908.350	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	12 Bulan	532.481.550
31	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Tapanuli Utara	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	400 Kasus	6.613.908.350	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Tapanuli Utara	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	400 Kasus	532.481.550
32	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah	12 Bulan	260.943.800	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah	12 Bulan	338.015.700
33	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1 Laporan	60.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1 Laporan	87.565.000
34	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	200 Kasus	50.000.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	200 Kasus	80.031.400

35	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai dengan SOP	250 Kasus	150.943.800	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai dengan SOP	250 Kasus	170.419.300
36	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tapanuli Utara	Persentase layanan Pencegahan, penanggulan, penyelamatan kebakran dan non kebakaran pada wilyah manajemen kebakaran (WMK)	12 Bulan	210.000.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tapanuli Utara	Persentase layanan Pencegahan, penanggulan, penyelamatan kebakran dan non kebakaran pada wilyah manajemen kebakaran (WMK)	12 Bulan	180.000.000
37	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terwujudnya Tugas Pemadam Kebakaran	12 Bulan	210.000.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terwujudnya Tugas Pemadam Kebakaran	12 Bulan	180.000.000
38	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadam Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Kasus	210.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadam Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Kasus	180.000.000
Total					15.046.232.254	Total				11.361.872.929

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja yaitu meningkatkan kewaspadaan secara dini pada Masyarakat, terutama terhadap kemungkinan terjadinya benturan dalam Masyarakat, serta penciptaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat, terutama melalui peningkatan kompetensi instistus Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarakan telahaan dari Renstra Satpol PP, maka terdapat keterkaitan antara Isu strategis dari Satpol PP pusat maupun provinsi dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu :

a. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan Masyarakat dan kebakaran;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan Masyarakat dan kebakaran;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan Masyarakat dan kebakaran;
d. Pelaksanaan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

Sesuai RPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 – 2026 maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara memiliki tujuan berupa melaksanakan pelayanan terhadap penyelenggaran keamanan dan ketertiban Masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakat.

Sasaran :

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Penanggulangan Kebakaran
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah ritme tahapan untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pencapaian sasaran strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah yang berkaitan dengan meningkatkan keamanan wilayah. Disamping program prioritas tersebut diatas diperlukan program– program penunjang yang merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD serta kegiatan yang bersifat sektoral dan rintisan.

Adapun Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	2	4	3	5	6			7	8	9	10	11
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja SKPD	Tapanuli Utara	12 Bulan	10.311.163.679	Dau		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja SKPD	12 Bulan	10.090.222.011
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja SKPD	Tapanuli Utara	12 Bulan	40.952.000	Dau		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja SKPD	12 Bulan	41.467.545
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	2 Dokumen	2.000.000	Dau		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.100.000
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA, RKAP	Tapanuli Utara	2 Dokumen	2.000.000	Dau		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tapanuli Utara	Tersedianya Dokumen RKA, RKAP	2 Dokumen	2.100.000

1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tapanuli Utara	2 Dokumen	2.000.000	Dau		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.100.945
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusanan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapanuli Utara	1 Laporan	5.000.000	Dau		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusanan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.625.000
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	12 Laporan	29.952.000	Dau		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	32.541.600
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik	Tapanuli Utara	12 Bulan	6.509.508.179	Dau		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik	12 Bulan	5.372.009.573
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tapanuli Utara	36 Orang	6.451.004.979	Dau		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapanuli Utara	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	5.316.633.413
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Tapanuli Utara	12 Dokumen	53.503.200	Dau		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	52.751.160
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapanuli Utara	1 Laporan	5.000.000	Dau		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.625.000

1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	-	0	Dau		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Bulan	205.951.200
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Tapanuli Utara	-	0	Dau		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tapanuli Utara	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapanya	10 Paket	205.951.200
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	12 Bulan	85.918.350	Dau		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	82.145.098
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapanuli Utara	12 Paket	5.000.000	Dau		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	3.039.435
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tapanuli Utara	25 Paket	11.162.350	Dau		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 Paket	10.123.365
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Tapanuli Utara	12 Paket	3.000.000	Dau		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	2.710.050
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	Tapanuli Utara	4 Paket	1.756.000	Dau		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	4 Paket	1.853.880
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapanuli Utara	100 Laporan	65.000.000	Dau		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	64.418..368
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapanuli Utara	0	0	Dau		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Palet	250.000.000

1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapanuli Utara	0	0	Dau		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapanuli Utara	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Paket	250.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tugas-Tugas Kantor	Tapanuli Utara	12 Bulan	3.520.040.100	Dau		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Tugas-Tugas Kantor	12 Bulan	3.963.041.338
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tapanuli Utara	133 Lembar	1.330.000	Dau		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	133 Lembar	1.396.500
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tapanuli Utara	12 Laporan	24.002.900	Dau		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	15.694.855
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tapanuli Utara	237 Laporan	3.494.707.200	Dau		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapanuli Utara	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	237 Laporan	3.945.949.983
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tapanuli Utara	12 Bulan	154.957.050	Dau		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	175.607.256
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Tapanuli Utara	22 Unit	154.957.050	Dau		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapanuli Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	22 Unit	175.607.256
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Tapanuli Utara	12 Bulan	870.497.250	Dau		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Tapanuli Utara	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	12 Bulan	7.097.412.840

	UMUM							UMUM				
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Tapanuli Utara	12 Bulan	532.481.550	Dau		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	12 Bulan	6.817.670.318
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Tapanuli Utara	400 Kasus	532.481.550	Dau		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Tapanuli Utara	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	400 Kasus	6.817.670.318
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah	Tapanuli Utara	12 Bulan	338.015.700	Dau		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah	12 Bulan	279.742.523
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Tapanuli Utara	1 Laporan	87.565.000	Dau		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1 Laporan	62.385.540
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Tapanuli Utara	200 Kasus	80.031.400	Dau		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	200 Kasus	51.056.408

1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai dengan SOP	Tapanuli Utara	250 Kasus	170.419.300	Dau		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai dengan SOP	250 Kasus	166.300.575
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan Pencegahan, penanggulan, penyelamatan kebakran dan non kebakaran pada wilyah manajemen kebakaran (WMK)	Tapanuli Utara	12 Bulan	180.000.000	Dau		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tapanuli Utara	Persentase layanan Pencegahan, penanggulan, penyelamatan kebakran dan non kebakaran pada wilyah manajemen kebakaran (WMK)	12 Bulan	220.500.000
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Tugas Pemadam Kebakaran	Tapanuli Utara	12 Bulan	180.000.000	Dau		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terwujudnya Tugas Pemadam Kebakaran	12 Bulan	220.500.000
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadam Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	100 Kasus	180.000.000	Dau		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadam Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Kasus	220.500.000
Total					11.361.872.929	Total						17.128.392.328

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Satuan Kerja pelaksana program, Rencana Kerja ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dari sisi pendanaan, sumber dana untuk membiayai anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025 dan jika memungkinkan maka akan diupayakan sumber-sumber pendanaan lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat. Adapun dana yang dibutuhkan Satpol PP Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka merealisasikan program/kegiatan tahun 2025 sebesar Rp.11.361.872.929, - (Sebelas milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dan terjadi perubahan anggaran menjadi Rp.12.106.966.084,- (Dua belas milyar seratus enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) dari sebelumnya sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1

TABEL 4.1 ERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2025

SKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun											Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									Rp11.361.660.929,00	Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.361.872.929,00	Rp12.106.754.084,00	Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.106.966.084,00	Rp745.093.155,00	6.15	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp11.361.660.929,00	Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.361.872.929,00	Rp12.106.754.084,00	Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.106.966.084,00	Rp745.093.155,00	6.15	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				Rp11.361.660.929,00	Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.361.872.929,00	Rp12.106.754.084,00	Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.106.966.084,00	Rp745.093.155,00	6.15	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp10.311.163.679,00	Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.311.375.679,00	Rp10.011.651.889,00	Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.011.863.889,00	(Rp299.511.790,00)	(2.99)	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp40.952.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.952.000,00	Rp16.377.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.377.000,00	(Rp24.575.000,00)	(150.06)	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	(Rp1.200.000,00)	(150.00)	
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	(Rp1.200.000,00)	(150.00)	
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	(Rp1.200.000,00)	(150.00)	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	(Rp3.000.000,00)	(150.00)	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		Rp29.952.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.952.000,00	Rp11.977.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.977.000,00	(Rp17.975.000,00)	(150.08)	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp6.509.508.179,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.509.508.179,00	Rp6.287.830.503,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.287.830.503,00	(Rp221.677.676,00)	(3.53)	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		Rp6.451.004.979,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.451.004.979,00	Rp6.232.327.303,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.232.327.303,00	(Rp218.677.676,00)	(3.51)	
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		Rp53.503.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.503.200,00	Rp53.503.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.503.200,00	Rp0,00	0.00	
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	(Rp3.000.000,00)	(150.00)	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.997.711,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.997.711,00	Rp74.997.711,00	100.00	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung,		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.997.711,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.997.711,00	Rp74.997.711,00	100.00	

					Kelengkapannya	(DAU)	Hutatoruan X														
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp85.706.350,00	Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.918.350,00	Rp40.552.325,00	Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.764.325,00	(Rp45.154.025,00)	(110.77)	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp1.997.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.997.800,00	(Rp3.002.200,00)	(150.28)	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		Rp11.162.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.162.350,00	Rp4.464.125,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.464.125,00	(Rp6.698.225,00)	(150.05)	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.788.000,00	Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp893.000,00	Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.105.000,00	(Rp1.895.000,00)	(171.49)	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		Rp1.756.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.756.000,00	Rp702.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp702.400,00	(Rp1.053.600,00)	(150.00)	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.000.000,00	Rp32.495.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.495.000,00	(Rp32.505.000,00)	(100.03)	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp3.520.040.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.520.040.100,00	Rp3.317.718.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.317.718.500,00	(Rp202.321.600,00)	(6.10)	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		Rp1.330.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.330.000,00	Rp530.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp530.000,00	(Rp800.000,00)	(150.94)	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		Rp24.002.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.002.900,00	Rp24.002.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.002.900,00	Rp0,00	0.00	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		Rp3.494.707.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.494.707.200,00	Rp3.293.185.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.293.185.600,00	(Rp201.521.600,00)	(6.12)	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp154.957.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.957.050,00	Rp274.175.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp274.175.850,00	Rp119.218.800,00	43.48	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		Rp154.957.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.957.050,00	Rp274.175.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp274.175.850,00	Rp119.218.800,00	43.48	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				Rp870.497.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp870.497.250,00	Rp1.835.109.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.835.109.400,00	Rp964.612.150,00	52.56	
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				Rp532.481.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp532.481.550,00	Rp1.510.560.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.510.560.250,00	Rp978.078.700,00	64.75	
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp532.481.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp532.481.550,00	Rp1.510.560.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.510.560.250,00	Rp978.078.700,00	64.75	
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**				Rp338.015.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp338.015.700,00	Rp324.549.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp324.549.150,00	(Rp13.466.550,00)	(4.15)	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp87.565.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.565.000,00	Rp87.565.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.565.000,00	Rp0,00	0.00	

1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Dana Alokasi Umum (DAU); DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp170.419.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.419.300,00	Rp171.007.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp171.007.850,00	Rp588.550,00	0.34	
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp80.031.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.031.400,00	Rp65.976.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.976.300,00	(Rp14.055.100,00)	(21.30)	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp259.992.795,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp259.992.795,00	Rp79.992.795,00	30.77	
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**				Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp259.992.795,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp259.992.795,00	Rp79.992.795,00	30.77	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.992.795,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.992.795,00	Rp79.992.795,00	100.00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan sebagai implementasi tahun kelima dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021-2025. Penyusunan Renja P Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dilakukan dengan berupaya mewujudkan konsistensi antara dokumen renja OPD disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran Renja dalam menunjang program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara.

Sejumlah program kegiatan Polisi Pamong Praja serta indikator kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu tahun untuk berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2025 – 2026. Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025 melalui koordinasi/asistensi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai proses dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025. RKAP yang telah disetujui oleh TAPD dan DPRD dalam pembahasan RAPBD akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara sebagai penjabaran dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara.

Tarutung, 2025

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Utara,

MUTIHA SIMAREMARE, ST
PEMBINA
NIP. 197201162005021001

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2021

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA PERUBAHAN)

KECAMATAN GAROGA

KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2025

KECAMATAN GAROGA KABUPATEN TAPANULI UTARA

Jalan Parluasan Garoga Kp. 22473

KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmatNya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini merupakan pedoman dan acuan untuk perencanaan pembangunan dalam melaksanakan Program Kegiatan Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara di Tahun 2025 yang dibuat berdasarkan Renstra Kecamatan Garoga 2025-2026. Juga sebagai penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan program kerja dengan menampung aspirasi dan kebutuhan di Tahun 2025 yang merupakan prioritas.

Kami berharap Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini dapat menjadi pegangan bagi semua pihak untuk memberikan koreksi maupun saran masukan ke arah yang positif demi kemajuan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Garoga serta kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Garoga. Semoga Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Garoga Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dan digunakan sebagai bahan pembahasan Forum Perangkat Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Garoga.

CAMAT GAROGA,

HENDRIK SIMANJUNTAK,SP
NIP. 198109122000031001

DAFTAR ISI

Halaman

KataPengantar..... 1

DaftarIsi..... 2

BABI PENDAHULUAN..... 3

1.1 Latar Belakang..... 3

1.2 Landasan Hukum..... 4

1.3 Maksud danTujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BABII EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TERIWULAN II..... 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Garoga sampai dengan Triwulan II..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD dan Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 8

BABIII PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 12

BABIV PENUTUP..... 14

4.1 Hal – Hal Penting yang perlu mendapat Perhatian..... 14

4.2 Kaidah Pelaksanaan..... 14

4.3 Rencana Tindak Lanjut..... 15S

LAMPIRAN .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Garoga Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan Ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka menjaga kosistensi antara Perencanaan dan Penganggaran serta mengakomodir perkembangan dinamika kondisi pembangunan daerah Tahun 2024, maka perlu disusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya tidak terlepas pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Berpedoman perkembangan dinamika pembangunan di Kecamatan Garoga dan adanya kebutuhan yang mendesak guna menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamataan Garoga, dan adanya hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Garoga sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan program kegiatan untuk mengakomodir kebutuhan yang ada yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Garoga Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Garoga Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari RKPD Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dibuat bertahap sesuai dengan ketentuan yang ada. Dari Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja yang merupakan ajuan awal dari Perubahan Rencana Kerja untuk dibahas di Tingkat Forum Perangkat Daerah, disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi. Hasil pembahasan disusun kembali menjadi Rancangan Perubahan Rencana Kerja. Rancangan Perubahan Rencana Kerja kembali dibahas di Tingkat Forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh BAPPELITBANGDA disesuaikan dengan Prioritas. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan setelah diadakan pembahasan dalam Rancangan Akhir ditetapkan sebagai Rencana Kerja Perubahan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Garoga disusun berdasarkan hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Kinerja s/d. Triwulan II tahun berjalan serta Realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Garoga pada tahun-tahun sebelumnya.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 berdasarkan ketentuan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahn Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera UtaraTahun 2019-2023;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 03/2025 tentang P-APBD Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbub No. 20/2025;

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
e. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dengan mempedomani Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Garoga disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BABII EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2025).
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Garoga sampai dengan Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BABIII PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BABIV PENUTUP
- 4.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan.
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut.

LAMPIRAN – LAMPIRAN.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2025)

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GAROGA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Tahun 2025 merupakan tahun ke-tiga dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Garoga yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2025-2026. Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Kecamatan Garoga sampai dengan Triwulan II perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program kegiatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II juga untuk mengetahui seberapa hasil pencapaian pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja terhadap Renstra 2025 – 2026 berdasarkan realisasi pelaksanaan Renja Kecamatan Garoga Tahun sebelumnya.

Program Kegiatan Tahun 2025 di Kecamatan Garoga sebanyak 6 program dan 20 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.603.631.830,- sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 732.667.652,- yang terdiri dari 3 program 13 kegiatan. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai Triwulan II adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Renja Kecamatan Garoga sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat dalam ***Form I*** *: Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara.*

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Bagian ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Garoga berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Garoga dapat dilihat dari beberapa Indikator Kinerja :

- Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Prosentase Kondisi Sarana Prasarana kondisi baik,
- Prosentase tersusunnya dokumen LKjIP.
- Prosentase terfasilitasinya pengelolaan budaya.
- Prosentase terlaksananya pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- Prosentase terlaksananya Pembinaan Pemuda dan OlahRaga.
- Prosentase terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Keagamaan.
- Prosentase Peningkatan Pengelolaan Logistik.
- Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan diKecamatan.
- Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Katentraman dan KetertibanUmum.
- Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan.
- Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Garoga secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian perlu diadakan analisis dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Garoga sampai dengan Triwulan II untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Renja Tahun 2025. Sehingga pelaksanaanan program kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik, sesuai dengan yang telah ditetapkan / ditargetkan dalam Perubahan Renja Kecamatan Garoga Tahun 2025.

Dari Analisa diatas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Garoga berdasarkan analisa kinerja yang ada beberapa permasalahan/hambatan, antara lain :

1. Keterbatasan anggaran dan adanya peraturan yang terus berkembang yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan seperti adanya penambahan kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan dimasyarakat.
2. Masih adanya program kegiatan di SKPD Kecamatan Garoga yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Garoga.

3. Adanya kegiatan lain yang melibatkan secara langsung ASN Kecamatan Garoga, seperti pelaksanaan Pilpres, Pilkades dan Pileg. Sedangkan di Kecamatan Garoga masih ada kekurangan ASN.
4. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Staf SKPD Kecamatan Garoga dan Pemerintah Desa masih belum sesuai harapan, sehingga mempengaruhi pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi.
5. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan keamanan dan kenyamnan kantor (contoh seperti Laptop, Finger Print dan CCTV)

Dengan melihat permasalahan dan hambatan yang ada, maka agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Garoga dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar maka perlu diadakan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Garoga Tahun 2025 untuk mengakomodir dan penyesuaian dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Garoga di Tahun 2025.

Demi kelancaran dan ketepatan pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD Kecamatan Garoga ada tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini, antara lain :

1. Untuk alokasi program kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Meningkatkan Kompetensi ASN SKPD Kecamatan Garoga dan Pemerintah Desa dengan jalan memberikan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
3. Penambahan alokasi staf /ASN di SKPD Kecamatan Garoga.
4. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan.

Dalam memperlancar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Garoga, ditentukan isu – isu penting, sebgai berikut :

- Profesionalisme pelayanan masyarakat secara optimal kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan secara cepat, akurat dan memiliki legalitas hukum yang berdasarkan prosedur serta tatanan/peraturan yang ada.
- Meningkatkan Kapasitas ASN dengan mengikuti Workshop ataupun diklat/peltihan –pelatihan.
- Penambahan kuantitas aparatur dengan mengangkat PPPK, karena keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangaka kelancaran

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pemberian pelayanan kepada masyarakat.

- Mengoptimalkan pola koordinasi internal di Kecamatan Garoga dengan Instansi terkait maupun stakeholder yang ada.
- Meningkatkan kordinasi, pembinaan dan fasilitasi kepada desa untuk meningkatkan tugas dan fungsi desa.

Analisa Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Garoga merupakan tolok ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Garoga dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran Kinerja tersebut merupakan implementasi dari pencapaian Kinerja Kecamatan Garoga sesuai Renstra 2025 – 2026 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2030.

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisa kebutuhan dan dinamika didalam masyarakat serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 SKPD Kecamatan Garoga serta prioritas kebutuhan dipandang perlu untuk diadakan penambahan kegiatan serta dukungan alokasi pendanaan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

     Dengan upaya efisiensi dan semakin berkurangnya kegiatan zoom meeting, alokasi anggaran untuk penyediaan Jasa komunikasi (biaya internet) semakin berkurang yaitu dari Rp. 24.177.100,- menjadi Rp. 6.176.900,-
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

     Dengan adanya kebijakan pengeloaan ASN dimana tenaga honorer dialihkan menjadi PPPK maka Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang semula ditampung sebesar Rp. 54.673.200 berkurang menjadi Rp. 13.668.300,- yaitu dari 12 bulan menjadi 3 bulan pada perubahan Renja 2025.
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

     Berkurangnya jumlah ASN karena pensiun (satu orang) mempengaruhi semakin berkurangnya alokasi anggaran sehingga perlu adanya pengurangan alokasi dari pagu sebesar Rp. 1.322.166.480,- sehingga total anggaran kegiatan Tahun 2025 sebesar Rp. 1.274.644.422,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan dan atau Kendaraan Dinas Jabatan

     Kegiatan ini mengalami penambahan dari anggaran Rp.32.230.650 menjadi Rp. 58.840.300 karena sesuai kebutuhan pemeliharaan yang sangat mendesak untuk mengganti suku cadang ban dan biaya servis sedang.
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

     Kegiatan ini mengalami penambahan dari anggaran Rp.10.073.800 menjadi Rp. 18.460.200 pada perubahan Renja 2025karena sesuai kebutuhan pemeliharaan yang sangat mendesak untuk mengecat gedung kantor dan rumah dinas.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik:
   - Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;

     Adanya kegiatan peringatan hari besar tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan Garoga yaitu Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 di Kecamatan Garoga dan kegiatan-kegiatan hari besar yaitu Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 dan Semarak dan Peringatan Hari Jadi ke 80 Kabupate Tapanuli Utara tahun 2025 maka pagu anggaran dialokasikan bertambah dari Rp. 12.000.000 menjadi Rp. 40.000.000 pada Renja Perubahan Kecamatan Garoga Tahun 2025.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka SKPD Kecamatan Garoga perlu mengadakan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan disesuaikan kebutuhan yang ada, yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini serta mengakomodir kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Garoga yang belum direncanakan di dalam Renja 2025.

Untuk Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Garoga dapat dilihat dalam ***Form II****: Rencana Kerja Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara*

BAB IV

PENUTUP

4.1 HAL – HAL PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Dalam pencapaian target program/kegiatan yang telah direncanakan masih menghadapi permasalahan/kendala yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya :

a. Kurangnya personil di Kecamatan Garoga, sehingga masih adanya pegawai yang merangkap pekerjaan.
b. Masih adanya Pegawai/SDM yang kurang memahami tugas fungsi dan kewajiban.
c. Masih adanya SDM yang menangani bidangnya tidak sesuai dengan keahlian/kemampuannya.
d. Masih adanya sarana prasarana yang kurang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

4.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Garoga Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai penyesuaian dengan kebutuhan yang ada/mendesak yang sekiranya perlu dilaksanakan di tahun 2025 agar pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kecamatan Garoga di Tahun 2025 ini bisa sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rencana kerja Perubahan SKPD memuat Program dan Kegiatan SKPD dan pagu pendanaan Perubahan Tahun 2025.
2. Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Garoga tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD Kebupaten Tapanuli Utara tahun 2025 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan pemerintah kabupaten Tapanuli Utara.
3. SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman/acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025.
5. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD di Tahun yang akan datang.

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mencapai tujuan dan Sasaran pada Kantor Kecamatan Garoga merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

a. Agar segala program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam Pencapaian Kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Karena Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara merupakan Organisasi Publik tugasnya memberikan Pelayanan kepada Publik / Masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus diutamakan kaitannya dengan para pelanggan /Masyarakat.
b. Agar kepada semua karyawan / karyawati selalu meningkatkan diri untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam perkembangan nanti sebagai seorang aparatur dapat mengikuti perubahan jaman ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju dan canggih. Dan memahami tugas fungsi dan kewajiban masing –masing.
c. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Kecamatan Garoga.
d. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi dengan Pihak terkait guna menciptakan kondusifitas wilayah.

CAMAT GAROGA,

HENDRIK SIMANJUNTAK,SP
NIP. 198109122000031001

FORM I

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKATDAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 KABUPATEN TAPANULI UTARA

OPD : KANTOR CAMAT GAROGA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
				5		6		7		12 = 8+9		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Pemenuhan Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**100**	**2.749.969.540**	**17**	**3.483.960.103**	**8**	**2.159.861.590**	**8**	**804.435.621**	**25**	**4.288.395.724**		**43**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD**	**42**	**100.000.000**	**17**	**4.501.500**	**8**	**31.970.800**	**8**	**15.873.000**	**25**	**20.374.500**		**47,08**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		50.000.000										
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	42	50.000.000	17	4.501.500	8	31.970.800	8	15.873.000	25	20.374.500		47,08
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi keuangan PD**	**100**	**2.081.008.760**		**3.324.345.103**		**1.981.432.660**	**0**	**742.718.371**	**0**	**4.067.063.474**		**43,21**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	70	2.013.474.760		3.270.159.803		1.941.580.000		727.173.471		3.997.333.274		43,28
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga administrasi keuangan	25	59.534.000		46.435.200		36.336.960		12.029.200		58.464.400		36,68

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	7.000.000		7.750.100		3.515.700		3.515.700		11.265.800		66,83
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan	36	8.000.000		7.750.100		3.515.700		3.515.700		11.265.800		66,83
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum PD**	**100**	**260.604.780**		**101.020.700**		**58.683.130**	**0**	**12.794.350**	**0**	**113.815.050**		**37,13**
		Penyedian Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik	100	10.000.000		5.671.300		3.190.000		998.550		6.669.850		39,65
		Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	100	24.000.000				5.000.000		1.182.000		1.182.000		5,48
		Penyedian Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	100	15.000.000				5.600.000		1.212.400		1.212.400		5,02
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100	11.604.780		9.412.500		3.030.500		1.811.400		11.223.900		57,62
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi	100	200.000.000		70.080.600		40.022.000		7.590.000		77.670.600		38,34
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**171.356.000**		**123.274.540**		**60.545.600**	**0**	**28.866.100**	**0**	**152.140.640**		47,63
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan jenis ATK	100	3.000.000		1.323.000		2.197.800		500.000		1.823.000		19
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan umum	100	48.356.000		4.816.940		3.847.800		1.117.700		5.934.640		32,4
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			120.000.000		117.134.600		54.500.000		27.248.400		144.383.000		49,53
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**130.000.000**		**35.747.900**		**27.275.000**	**0**	**4.449.900**	**0**	**40.197.800**		**31,28**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas	1	100.000.000		25.749.300		16.275.000		4.449.900		30.199.200		36,79

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya	2	30.000.000		9.998.600		11.000.000				9.998.600		21,54
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Cakupan Layanan Publik yang dilaksanakan**	**85**	**48.000.000**		**48.640.000**		**44.000.000**		**10.276.750**		**58.916.750**		**31,38**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**85**	**48.000.000**		**48.640.000**		**44.000.000**		**10.276.750**		**58.916.750**		**31,38**
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	100	24.000.000		48.640.000		44.000.000		10.276.750		58.916.750		31,38
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	100	24.000.000		48.640.000		44.000.000		10.276.750		58.916.750		31,38
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang Ditindaklanjuti**	80	30.000		0		9.960		0		0		0
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan PD dan/atau Kepolisian	80	30.000		0		9.960		0		0		0
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**85**	**130.720.000**		**40.382.900**		**32.720.000**		**9.000.000**		**49.382.900**		**37,78**

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Tereselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**85**	**74.000.000**		**40.382.900**		**32.720.000**		**9.000.000**		**49.382.900**		**37,78**
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pimpinan kecamatan	3	74.000.000		40.382.900		32.720.000		9.000.000		49.382.900		37,78
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang Aktif**		80.000.000		0		9.960		0		0		0
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarkatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Desa	80	40.000.000		0		4.960		0		0		0
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	80	40.000.000		0		5.000		0		0		0
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti**	**90**	**67.500.000**		**0**		**15.000.000**	**0**	**6.839.000**	**0**	**6.839.000**		10,13
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**90**	**60.000.000**		**0**		**10.000.000**	**0**	**4.679.000**	**0**	**4.679.000**		10,4
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa	13	30.000.000				5.000.000		2.160.000		2.160.000		9,6
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah penyelenggaraan kegiatan	13	30.000.000				5.000.000		2.519.000		2.519.000		11,2

CAMATGAROGA,

HENDRIK SIMANJUNTAK,SP
NIP. 198109122000031001

Form : II

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 KABUPATEN TAPANULI UTARA

PerangkatDaerah : Kecamatan Garoga

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2026	Ket
					Sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	Sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah		
1				2	3		4	5	6	7	(Rp. X 1.000)	(Rp. X 1.000)	9	10	(Rp. X 1.000)	
				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan												
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tersedianya penunjang urusan pemerintahan**	**Tersedianya penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**100**	**Kec. Garoga**	**Kec. Garoga**	**1.537.531**	**1.466.050**	**DAU**	**DAU**	**1.466.050**	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja	Jumlah laporan kinerja	100	100	Kec. Garoga	Kec. Garoga	1.900	1.900	DAU	DAU	1.900	
				Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan kinerja	Jumlah laporan kinerja	100	100	Kec. Garoga	Kec. Garoga	12.000	12.000	DAU	DAU	12.000	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASAN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASAN	100	100	Kec. Garoga	Kec. Garoga	1.322.166	1.274.644	DAU	DAU	1.274.644	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi	100	100	Kec. Garoga	Kec. Garoga	29.947	29.947	DAU	DAU	29.947	
				Koordinasi dan Penyusunan Lap Keu akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	Kec. Garoga	Kec. Garoga	2.120	2.120	DAU	DAU	2.120	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jmlah dan jenis komponen instalasi listrik	Jmlah dan jenis komponen instalasi listrik	100	100	Kec. Garoga	Kec. Garoga	1.984	1.984	DAU	DAU	1.984	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100	100	Kec. Garoga	Kec. Garoga	4.682	4.732	DAU	DAU	4.732	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi	Jumlah rapat koordinasi	100	100	Kec. Garoga	Kec. Garoga	24.880	24.880	DAU	DAU	24.880	
				Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	Jumlah surat terkirim	100	100	Kec. Garoga	Kec. Garoga	1.500	1.500	DAU	DAU	1.500	
				Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat/perlengkapan	Jumlah alat/perlengkapan	100	100	Kec. Garoga	Kec. Garoga	9.999	9.999	DAU	DAU	9.999	
				Penyedian Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat/perlengkapan	Jumlah alat/perlengkapan	100	100	Kec. Garoga	Kec. Garoga	5.197	5.197	DAU	DAU	5.197	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dan jenis rekening	Jumlah dan jenis rekening	100	100	Kec. Garoga	Kec. Garoga	24.177	6.176	DAU	DAU	6.176	

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum	Tersedianya jasa pelayanan umum	100	100	Kec. Garoga	Kec. Garoga	54.500	13.668	DAU	DAU	13.668	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	100	100	Kec. Garoga	Kec. Garoga	32.230	58.840	DAU	DAU	58.840	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya	100	100	Kec. Garoga	Kec. Garoga	10.073	18.460	DAU	DAU	18.460	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Cakupan Layanan Publik yang dilaksanakan**	**Cakupan Layanan Publik yang dilaksanakan**	**75**	**75**	**Kec. Garoga**	**Kec. Garoga**	**12.000**	**40.000**	**DAU**	**DAU**	**40.000**	
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	75	75	Kec. Garoga	Kec. Garoga	12.000	40.000	DAU	DAU	40.000	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang Aktif**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang Aktif**	**80**	**80**	**Kec. Garoga**	**Kec. Garoga**	**20.000**	**20.000**	DAU	DAU	**20.000**	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarkatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarkatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Desa	80	80	Kec. Garoga	Kec. Garoga	10.000	10.000	DAU	DAU	10.000	
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	80	80	Kec. Garoga	Kec. Garoga	10.000	10.000	DAU	DAU	10.000	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang Ditindaklanjuti**	**Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang Ditindaklanjuti**	**75**	**75**	Kec. Garoga	Kec. Garoga	**5.000**	**5.000**	DAU	DAU	**5.000**	
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan PD dan/atau Kepolisian	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan PD dan/atau Kepolisian	75	75	Kec. Garoga	Kec. Garoga	5.000	5.000	DAU	DAU	5.000	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan**	**Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan**	**80**	**80**	Kec. Garoga	Kec. Garoga	**21.600**	**21.600**	DAU	DAU	**21.600**	
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi pimpinan kecamatan	Jumlah koordinasi pimpinan kecamatan	80	80	Kec. Garoga	Kec. Garoga	21.600	21.600	DAU	DAU	21.600	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti**	**Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti**	**75**	**75**	Kec. Garoga	Kec. Garoga	**7.500**	**7.500**	DAU	DAU	**7.500**	
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa	Jumlah desa	75	75	Kec. Garoga	Kec. Garoga	7.500	7.500	DAU	DAU	7.500	

CAMATGAROGA,

HENDRIK SIMANJUNTAK,SP
NIP. 198109122000031001

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2025

KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA

KABUPATEN TAPANULI UTARA

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat karunia-NYA kami dapat menyelesaiakn Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Siatas Barita dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku yang berjudul : **RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SIATAS BARITA TAHUN 2025 .**

Rencana kerja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan serta sasaran dan target Rencana Kinerja Kecamatan Siatas Barita, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan Rencana Kerja yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini, tak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini pihak masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Rencana kerja (RENJA) ini semua kebijakan Program dan Kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik Aparatur Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara maupun masyarakat serta DPRD, agar dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Siatasbarita, Desember 2024

CAMAT SIATAS BARITA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA KECAMATAN SIATAS BARITA

ELYANTO SITOMPUL,ST,MM

NIP 196801281992031002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	:	PENDAHULUAN	1
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Landasan Hukum	3
		1.3 Maksud dan Tujuan	4
		1.4 Sistematika PenulisaM	4
BAB II	:	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN SIIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI UTARA	6
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kantor Kecamatan Siatas Barita dan Capaian Renstra SKPD	6
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Siatas Barita	29
		2.3 Isu penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD	30
		2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD	32
		2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	54
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN	66
		3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional	66
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Siatas Barita	73
		3.3 Program dan Kegiatan	75
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	89
BAB V	:	PENUTUP	105

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Siatas Barita menyusun Renja Perubahan Kecamatan Siatas Barita Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Siatas Barita. Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Anggarapan Pndapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Perubahan Kecamatan Siatas Barita Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD.

Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

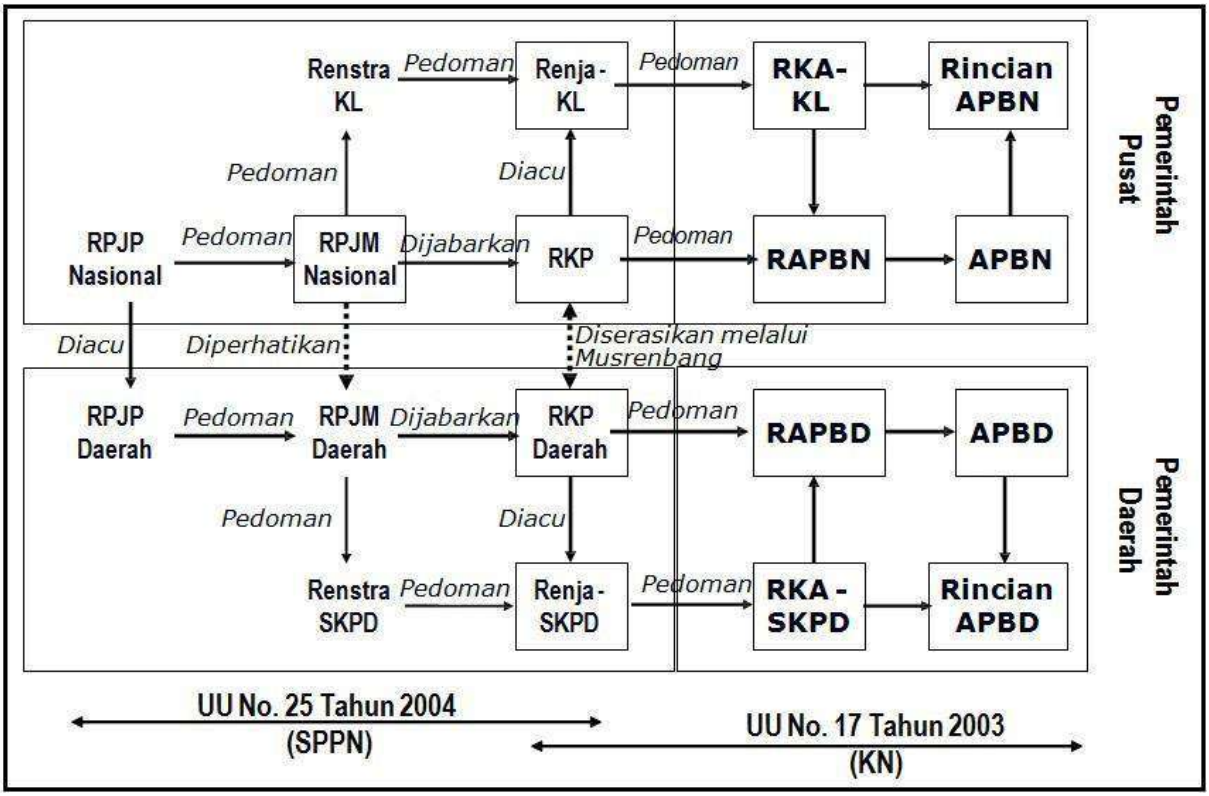

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

d Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi , kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daera;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

h. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

j. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Tahun 2024 Kecamatan Siatas Barita disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Siatas Barita dalam penyusunan RKA Kecamatan Siatas Barita

Tahun 2025. Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Siatas Barita adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Siatas Barita Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Siatas Barita Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Siatas Barita Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA S/D TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. PENUTUP

BAB II.

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2025 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Siatas serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025
Tabel 2.2

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Siatas Barita

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kinerja 2024		Anggaran Tahun 2024		Kinerja 2025		Anggaran Tahun 2025	
				Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi s/d TW II
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Persen	100	100	2.277.835.042	1.747.206.501	100	100	1.682.569.696	799.600.805
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persen	100	100	32.553.050	31.864.000	100	100	16.780.000	2.635.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA SKPD	Dokumen	2 Dok	2 Dok	1.703.050	1.619.500	2 Dok	2 Dok	880.000	120.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dokumen	2 Dok	2 Dok	1.410.000	1.299.500	2 Dok	2 Dok	840.000	-
	Koordinasi	Jumlah	Laporan	1 Lap	1 Lap	840.000	720.000	1 Lap	1 Lap	960.000	240.000

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LKIP									
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	28.600.000	28.255.000,-	4 Laporan	4 Laporan	13.980.000	2.275.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Terlaksananya Administrasi keuangan dengan baik***	***Persen***	***100 Persen***	***100 Persen***	***2.051.260.828***	***1.548.723.691***	***100 Persen***	***100 Persen***	***1.475.383.546***	***766.631.676***
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang	23 orang	23 orang	2.013.969.228	1.518.492.791	23 orang	23 orang	1.439.515.946	751.620.176
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35.439.600	33.339.600	12 Dokumen	12 Dokumen	35.307.600	14.711.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1 laporan	1 laporan	1.204.000	362.000	1 laporan	1 laporan	560.000	300.000

	Akhir Tahun	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan baik***	***Persen***	***100 Persen***	***100 Persen***	***51.249.600***	***43.498.700***	***100 Persen***	***100 Persen***	***66.410.150***	10.861.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1 paket	1 paket	24.697.400	19.012.400	1 paket	1 paket	20.225.350	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	4 Paket	4 Paket	3.272.200	3.260.600	4 Paket	4 Paket	1.321.200	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Paket	4 Paket	4 Paket	6.870.000	4.905.700	4 Paket	4 Paket	10.245.600	943.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	380 Laporan	380 Laporan	16.410.000	16.320.000	380 Laporan	380 Laporan	34.618.000	9.918.300
	Pengadaan	***Tersedianya***	***Unit***	***1 unit***	***1 unit***	***19.736.700***	***19.400.000***	***1 unit***	***1 unit***	***24.513.200***	**-**

	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah***									
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang tersedia	Unit	1 unit	1 unit	19.736.700	19.400.000	1 unit	1 unit	24.513.200	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah***	***Persen***	***100 Persen***	***100 Persen***	***85.604.764***	***66.328.225***	***100 Persen***	***100 Persen***	***33.317.000***	***12.468.629***
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	980.000	12 Laporan	12 Laporan	500.000	100.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	15.944.178	12 Laporan	12 Laporan	19.131.600	3.368.629
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan umum Kantor	Laporan	12 Lap	12 Lap	54.000.000	49.074.500	12 Lap	12 Lap	13.685.400	9.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Jumlah unit Kenderaan dinas jabatan	Unit	1 unit	1 unit	35.127.600	31.118.385	1 unit	1 unit	58.584.200	6.504.000

	Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Dinas Perorangan	yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya									
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	unit	4 unit	4 unit	2.302.500	2.302.500	4 unit	4 unit	7.581.600	500.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Persen	100	100	11.609.000	5.283.000	100	100	36.423.000	-
	Koordinasi Penyelenggaraan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Persen	100	100	11.609.000	5.283,000	100	100	19.195.000	-
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.397.000	1.363.000	12 Laporan	12 Laporan	8.250.000	-

	Kegiatan Pemerintahan	dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait									
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	10.212.000	3.920.000	1 Dok	1 Dok	24.775.000	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang aktif	Persen	100	100	20.110.000	15.663.000	100	100	16.739.200	6.755.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Terlaksananya Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Persen***	***100***	***100***	***20.110.000***	***15.663.000***	***100***	***100***	***16.739.200***	***6.755.000***
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyarawah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan	Lembaga	72 Lembaga	72 lembaga	17.660.000	13.248.000	72 Lembaga	72 lembaga	15.440.000	6.755.000

		Desa									
	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.450.000	2.415.000	2 Laporan	2 Laporan	1.299.200	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	1.400.000	0	100	100	750.000	-
	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	***Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***Persen***	***100***	***100***	***1.400.000***	***0***	***100***	***100***	***750.000***	***-***
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.400.000	0	1 Laporan	1 Laporan	750.000	-

		dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan forum koordinasi tingkat kecamatan	Persen	100	100	21.600.000	21.600.000	100	100	21.600.000	9.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan kepala Daerah	Persen	100	100	21.600.000	21.600.000	100	100	21.600.000	9.000.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000	21.600.000	12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000	9.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	3.607.500	3.336.000	100	100	1.750.000	-
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Terlaksananya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	100	3.607.500	3.336.000	100	100	1.750.000	-

	Pemerintah	Pemerintah									
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.360.000	1.320.000	5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenraman dan Keteriban Umum	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1 Dokumen	1Dokumen	2.247.500	2.016.000	1 Dokumen	1Dokumen	750.000	-

Tabel 2.4

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang

Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan tercapai dikarenakan anggaran yang minim Dana yang sangat minim tetapi untuk target kinerja terealisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Dan yang mendukung keberhasilan adalah adanya tanggungjawab aparatur terhadap perjanjian kinerja yang telah dibuat pada awal tahun

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.3, dan Tabel 2.4, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2026 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatankapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Siatas Barita dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Siatas Barita disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi 2025 sd TW II	Catatan Analisis
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,80	80	-	
2	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	BB	-	

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Siatas Barita Tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 2.5 dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Siatas Barita yang tidak memenuhi target adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) . Dari target 90 realisasi 79,80
2. IKU Kecamatan Siatas Barita yang dapat memenuhi target adalah Nilai SAKIP Kecamatan dari target BB realisasi BB

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Kecamatan Siatas Barita Tahun 2024 maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2025 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlunya komitmen dan kerjasama seluruh Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan pelayanan
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang ada di Kecamatan Siatas Barita

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Siatas Barita merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2025 kondisi sampai keadaan triwulan II, Kecamatan Siatas Barita menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2025 keadaan sampai dengan Triwulan II

Permasalahan	Hambatan
Terbatasnya SDM/jumlah	Tidak semua aparatur yang ada di Kecamatan menguasai Aplikasi
	Kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab .
Kurangnya sarana dan prasana	Tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan kecamatan

Selain itu, selama Tahun 2025 keadaan sampai dengan Triwulan II, Kecamatan Siatas Barita juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.7

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025
kondisi sampai triwulan II

Peluang	Tantangan
Perkembangan Teknologi Informasi: Teknologi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan, transparansi, serta akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi.	**Minimnya Anggaran:** Keterbatasa anggaran dapat menghambat inovasi da pengembangan program pelayanan yan lebih baik.
Dukungan Stakeholder: Keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dapat menjadi dukungan signifikan bagi kecamatan dalam menjalankan program dan kegiatannya.	**Koordinasi Lintas Sektor:** Kesulita dalam koordinasi dengan berbagai piha terkait, baik di tingkat vertikal maupu horizontal, dapat menghambat kinerj pelayanan.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Paradigma pemerintahan yang lebih demokratis membuka peluang untuk meningkatkan peran kecamatan dalam perencanaan dan melibatkan masyarakat lebih aktif dalam proses pembangunan.	**Koordinasi Lintas Sektor:** Kesulita dalam koordinasi dengan berbagai piha terkait, baik di tingkat vertikal maupu horizontal, dapat menghambat kinerj pelayanan.
	Keterbatasan Partisipasi Masyarakat Rendahnya tingkat partisipasi akti masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban, dan pembangunan serin ditemui.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan

rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Siatas Barita pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perlu penambahan personil/SDM untuk menguatkan kinerja yang maksimal
2. Ada monitoring yang terjadwal secara rutin

Sedangkan isu-isu penting lainnya yang ada Kecamatan Siatas Barita adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia;
2. Kurangnya sarana dan prasarana di Kecamatan mengakibatkan pelayan kurang optimal
3. Minimnya Anggaran di Kecamatan berakibat kepada kurang eefektif dan efisiennya pelayanan.
4. Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati kepada camat tidak disertai anggaran.
5. Pentingnya pemahaman dan pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi aparatur pelayanan pubik

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Siatas Barita Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Siatas Barita Tahun 2025 disajikan pada :

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota**										
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya koordinasi dan penyelenggaraan Kegiatan Pmerintahan di Kecamatan	100	15.640.000	**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Terlaksananya koordinasi dan penyelenggaraan Kegiatan Pmerintahan di Kecamatan	100	16.780.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen Penyusunan RKA SKPD	2 Dok	880.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen Penyusunan RKA SKPD	2 Dok	880.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen dan Penyusunan DPA SKPD	2 Dok	840.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen dan Penyusunan DPA SKPD	2 Dok	840.000	

	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1 Laporan	960.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1 Laporan	960.000	
	Evaluasi KInerja Perangkat Daerah	Kecmatan Siatas Barita	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12.000.000	Evaluasi KInerja Perangkat Daerah	Kecmatan Siatas Barita	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	13.980.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 orang	1.617.367.120	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 orang	1.439.515.946	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan Penatausahaan/verifikasi keuangan SKPD	60 Laporan	38.067.600	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan Penatausahaan/verifikasi keuangan SKPD	60 Laporan	35.307.600	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan keuangan AkhiTahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	560.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan keuangan AkhiTahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	560.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor uang disediakan	1 Paket	20.225.350	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Paket Peralatan dan Rumah tangga yang disediakan	1 Paket	20.225.350	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga disediakan	1 Paket	1.321.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor uang disediakan	1 Paket	1.321.200	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	9.998.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	10.245.600	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	450 laporan	24.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	450 laporan	34.618.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	-	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	832.400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Siatas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	25 Laporan	500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	55 Laporan	500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	29.631.600	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	19.131.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang tersedia	36 Laporan	54.247.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang tersedia	36 Laporan	13.685.400	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemetintah Daeerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah kenderaan dinas operasional yang dipeliahara	1 unit	58.584.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah kenderaan dinas operasional yang dipeliahara	1 unit	58.584.200	
	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Bangunan yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	4.448.600	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Bangunan yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	7.581.600	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	**Kecamatan Siatas Barita**	Terlaksananya koordinasi dan penyelenggaraan kegitan Pemerintahan di Kecamatan	100%	17.228.000	**Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Siatas Barita**	Terlaksananya koordinasi dan penyelenggaraan kegitan Pemerintahan di Kecamatan	100%	17.228.000	
	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Inastansi Vertikel terkait	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan	12 laporan	3.398.000	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Inastansi Vertikel	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Inastansi Vertikel	12 laporan	11.648.000	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	1 Dok	13.830.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	1 Dok	24.775.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
	Koordinasi Kegiatan Peemberdayaan Desa	Kecamatan Siatas Barita	Teerlaksananya Koordinasi kegiatan Peberdayaan Desa	100%	18.839.200	Koordinasi Kegiatan Peemberdayaan Desa	Kecamatan Siatas Barita	Teerlaksananya Koordinasi kegiatan Peberdayaan Desa	100%	16.739.200	
	Peningkatan partisiasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	72 Lembaga	16.540.000	Peningkatan partisiasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	72 Lembaga	15.440.000	

	Peningkatan efektifitas Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	2 Laporan	2.299.200	Peningkatan efektifitas Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	2 Laporan	1.299.200
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
	Koordinasi upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan siatas barita	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	2.250.000	Koordinasi upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan siatas barita	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	750.000
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan	12 Laporan	2.250.000	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan paturan peerundang	12 Laporan	750.000

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Siatas Barita	Terselenggaranya urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	21.600.000	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Siatas Barita	Terselenggaranya urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	21.600.000
	Pelaksanaan tugas forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	21.600.000	Pelaksanaan tugas forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	21.600.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									

	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	Kecamatan Siatas Barita	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	4.500.000	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	Kecamatan Siatas Barita	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	1.750.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecmatan Sitas Barita	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan	5 Dokumen	2.250.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecmatan Sitas Barita	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan	5 Dokumen	1.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Dokunen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	2.250.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Siatas Barita	Jumlah Dokunen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	750.000	

BAB III.
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja

Pada Tahun 2025, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2025

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitias Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

		PP4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, Visi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah ” ***Bersama mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang maju berbudaya dan berkelanjutan***”

Dalam mencapai Visi tersebut dituangkan ke dalam misi yaitu :

1. Mewujudkan ekonomi rakyatyang nklusif berdaya saing untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Mewujudkan ekonomi melalui pertanian yang maju dan berteknologi yang mampu memberikan produktifitas yang tinggi

3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, pencegahan stunting serta peningkatan peran generasi muda dan perempuan dalam pembangunan.
4. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan dan tanggap resiko bencana
5. Penerapan kajian budaya dan kearifan local mulai dari pendidikan dasar untuk memperkuat karakter terbaik masyarakt sehingga mampu meminimalisir efek negtif arus cepat informasi dan media social
6. Pengembangan kebudayaan berdasarkan kekayaan budaya dan kearifan local
7. Memperkuat reformasi birokrasi untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan
8. Meningkatkan pelestarian lingkungan serta peningkatan upaya penanggulangan mitigasi dan bencana

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2025

Visi	:	Bersama mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang Maju Berbudaya dan berkelanjutan.
Misi	:	Memperkuat Reformasi Birokrasi untuk mengoptimalkan tata Kelola Pemerintahan
Tujuan RPJMD	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Sasaran RPJMD	:	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Siatas Barita serta tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Siatas Barita Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
			Nilai SAKIP Kecamatan	BB

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Siatas Barita Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Siatas Barita Tahun 2025 i pada tabel berikut:

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Siatas Barita
Tahun Anggaran : 2025 (PAPBD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA					APBD Kabupaten
7.01.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya koordinasi dan penyelenggaraan Kegiatan Pmerintahan di Kecamatan	Siatas Barita	100	16.780.000	APBD Kabupaten
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA SKPD	Siatas Barita	2 Dok	880.000	APBD Kabupaten
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen dan Penyusunan DPA SKPD	Siatas Barita	2 Dok	840.000	APBD Kabupaten

7.01.01.2.01.0006	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Siatas Barita	1 Laporan	960.000	APBD Kabupaten
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi KInerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Siatas Barita	12 Laporan	13.980.000	APBD Kabupaten
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Siatas Barita			APBD Kabupaten
7.0101.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Siatas Barita	20 orang	1.439.515.946	APBD Kabupaten
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan/verifikasi keuangan SKPD	Siatas Barita	60 Laporan	35.307.600	APBD Kabupaten

7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan AkhiTahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir	Siatas Barita	Laporan	560.000	APBD Kabupaten
7.01.01.2.06	Administrasi Umu Perangkat Daerah		Siatas Barita			APBD Kabupaten
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Siatas Barita	1 Paket	-	APBD Kabupaten
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Rumah tangga yang disediakan	Siatas Barita	1 Paket	20.225.350	APBD Kabupaten
7.01.01.206.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor uang disediakan	Siatas Barita	1 Paket	1.321.200	APBD Kabupaten
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Siatas Barita	1 Paket	10.245.600	APBD Kabupaten

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Siatas Barita	450 laporan	34.618.000	APBD Kabupaten
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Siatas Barita		24.513.200	APBD Kabupaten
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Siatas Barita	2 unit	832.400	APBD Kabupaten
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritah Daerah		Siatas Barita		33.317.000	APBD Kabupaten
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Siatas Barita	55 Laporan	500.000	APBD Kabupaten
7.01.01.2.09.0011	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Siatas Barita	24 Laporan	19.131.600	APBD Kabupaten
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang tersedia	Siatas Barita	36 Laporan	13.685.400	APBD Kabupaten

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Siatas Barita			APBD Kabupaten
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah kenderaan dinas operasional yang dipeliahara	Siatas Barita	1 unit	58.584.200	APBD Kabupaten
	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Bangunan yang dipelihara/rehabilitasi	Siatas Barita	1 unit	7.581.600	APBD Kabupaten
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Siatas Barita			APBD Kabupaten
	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan penyelenggaraan kegitan Pemerintahan di Kecamatan	Siatas Barita	100%	17.228.000	APBD Kabupaten

	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Inastansi Vertikel terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Inastansi Vertikel terkait	Siatas Barita	12 laporan	11.648.000	APBD Kabupaten
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Siatas Barita	1 Dok	24.775.000	APBD Kabupaten
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEKURAHAN		Siatas Barita			
	Koordinasi Kegiatan Peemberdayaan Desa	Teerlaksananya Koordinasi kegiatan Peberdayaan Desa	Siatas Barita	100%	16.739.200	APBD Kabupaten

	Peningkatan partisiasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Siatas Barita	72 Lembaga	15.440.000	APBD Kabupaten
	Peningkatan efektifitas Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	Siatas Barita	2 Laporan	1.299.200	APBD Kabupaten
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUN		Siatas Barita			APBD Kabupaten
	Koordinasi upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Siatas Barita	100%	750.000	APBD Kabupaten

	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan paturan peerundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Siatas Barita	12 Laporan	750.000	APBD Kabupaten
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Siatas Barita			APBD Kabupaten
	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Siatas Barita	100%	21.600.000	APBD Kabupaten
	Pelaksanaan tugas forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Siatas Barita	12 Dokumen	21.600.000	APBD Kabupaten

			Siatas Barita			APBD Kabupaten
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Siatas Barita	100%	1.750.000	APBD Kabupaten
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan	Siatas Barita	5 Dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokunen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Siatas Barita	1 Dokumen	750.000	APBD Kabupaten

BAB V.

PENUTUP

Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara dan berpedoman pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029.

Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025 Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

Siatas Barita, 2025

CAMAT SIATAS BARITA

ELYANTO SITOMPUL,ST,MM
NIP.196801281992031002

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

KECAMATAN SIMANGUMBAN

T.A 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Camat Simangumban Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Simangumban Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Simangumban Tahun 2025 ini disusun karena dalam Tahun Anggaran 2025 yang sedang berjalan ada beberapa perubahan baik penambahan maupun pengurangan anggaran dari beberapa program dan kegiatan. Pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Simangumban Tahun 2025 ini diuraikan juga alasan dari perubahan dimaksud.

Perubahan Renja ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data dan diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Perubahan Renja tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kantor Kecamatan Simangumban dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Simangumban Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simangumban, September 2025

CAMAT SIMANGUMBAN,

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA KECAMATAN SIMANGUMBAN

RINI SINAGA. SH, MM

NIP. 198803262015052001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja SKPD adalah Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Tahun 2025-2029 dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat**.**

Kecamatan Simangumban sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) perlu menetapkan target Kinerja sehingga pada akhir tahun anggaran dapat diketahui pencapaian kinerjanya, hal ini dimaksudkan agar dapat lebih mudah mengetahui keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Renja Perubahan Kantor Kecamatan Simangumban Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Simangumban untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun keberhasilan dan tidaknya Renja Perubahan SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Kecamatan Simangumban menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program,kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan

dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Simangumban ini dilandaskan pada :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Simangumban Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja SKPD memuat program dan kegiatan, lokasi

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif prakiraan maju. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan :

1. Mengacu pada RKPD
2. Mengacu pada Renstra SKPD
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi
5. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

a. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Camat Simangumban Tahun 2025 disusun dengan maksud:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Simangumban Tahun 2025;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara khususnya Kecamatan Simangumban;
3. Untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan Simangumban, agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar, dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini adalah :

1. Untuk menjadi acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
2. Untuk menjadi bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya;
3. Untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan kedalam Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Camat Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan, perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KANTOR CAMAT SIMANGUMBAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Menampilkan dan menguraikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Simangumban sampai dengan Triwulan II yang mengacu pada APBD Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelasakan tentang uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik perhatian dalam tahapan pelaksanaan atau ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah dalam pelaksanaan, serta rencana tindak lanjutnya.

BAB II

EVALUASI RENJA S/D TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari Program/Kegiatan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Simangumban Triwulan II Tahun 2025 dihitung berdasarkan Laporan Hasil Realisasi Pelaksanaan Renja yang tertuang pada DPA Kantor Kecamatan Simangumban Triwulan II (Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2025).

Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Kantor Kecamatan Simangumban dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rata-rata capaian kinerja Kantor Kecamatan Simangumban selanjutnya dapat diolah menjadi rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran dengan menghitung rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari perangkat daerah. Tabel 2.1 berikut ini menyajikan capaian kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan Kantor Kecamatan Simangumban Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 2.1

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN TAHUN 2025 s/d TW II

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025 per Triwulan								
							I			II			III		
1	2	3	4	5			6			7			8		
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		R
###	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**			**1.117.246.749**			**273.400.297**			**284.457.158**			
7.01.01.2.01	Meningkatkan Nilai AKIP dari Inspektorat	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**8.395.550**			**0**			**1.950.000**			
7.01.01.2.01.06		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2.195.550	1	Laporan	0	0	Laporan	0			

7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	6.200.000	3	Laporan	0	3	Laporan	1.950.000		
7.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**946.699.171**			**259.900.297**			**246.485.958**		
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	Orang/Bulan	909.655.171	10	Orang/Bulan	259.900.297	-	Orang/Bulan	229.852.158		
3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	32.787.600	3	Dokumen	0	3	Dokumen	16393800		
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	4.256.400	1	laporan	0	1	laporan	240000		
7.01.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			**39.708.500**			**0**			**8.334.400**		
7.01.01.2.06.01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.907.000	0	Paket	0	1	Paket	965.400		
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.285.500	0	Paket	0	0	Paket	-		
7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	8.752.000	0	Paket	0	1	Paket	4.374.000		

7.01.01.2.06.05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	6.224.000	0	Paket	0	0	Paket	2.995.000		
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	8.540.000	0	Laporan	0	0	Laporan	-		
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**0**			**0**		0			
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-		
7.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah			**79.553.200**			**13.500.000**			**10.360.000**		
7.01.01.2.08.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	710.000	0	Laporan	0	6	Laporan	360.000		
7.01.01.2.08.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	24.101.600	0	Laporan	0	3	Laporan	10.000.000		
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	54.741.600	3	Laporan	13.500.000	-	Laporan	-		
7.01.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**42.890.328**			**0**			**17.326.800**		

7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	34.994.928	0	Unit	0	1	Unit	16.566.800			
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3	Unit	3.319.900	0	Unit	0	-	Unit	0			
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	4.575.500	0	Unit	0	1	Unit	760000			
###		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan**			**28.306.900**			**0**			**5.590.200**			
7.01.02.2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**28.306.900**			**0**			**5.590.200**			
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	Laporan	28.306.900	3	Laporan	0	3	Laporan	5.590.200			
###		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**			**13.810.275**			**0**			**11715000**			

7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa			**13.810.275**			**0**			**11715000**			
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	48	Lembaga	13.810.275	40	Lembaga	0	0	Lembaga	11715000			
###		**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti**			**24.791.500**			**0**			**2921000**			
7.01.04.2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			**24.791.500**			**0**			**2921000**			
7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	24.791.500	3	Laporan	0	3	Laporan	2921000			
###		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan**			**21.600.000**			**0**			**10800000**			
7.01.05.2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			**21600000**			**0**			**10800000**			
7.01.05.2.01.08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	21600000	3	Dokumen	0	3	Dokumen	10800000			

###		**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti**		**%**	**15.817.900**			**0**			**1470500**			
7.01.06.2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah		**%**	**15.817.900**			0			**1470500**			
7.01.06.2.01.05		Fasilitasi PelaksanaanTugas Kepala Desa danPerangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Dokumen	15.817.900	3	Dokumen	0	3	Dokumen	1470500			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 PERUBAHAN BELANJA SKPD TAHUN 2025 BELANJA

Pada Bab ini dirangkum Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah yang telah dientri pada system Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2025 ***(Terlampir).***

Belanja Kantor Kecamatan Simangumban dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 1.221.573.323,- mengalami perubahan dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu Rp. 1.147.222.591,-. terdiri dari 6 (enam) program pada Kantor Kecamatan Simangumban sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp. 1.117.246.748,- menjadi Rp. 1.041.888.316,-.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dianggarkan sebesar Rp. 28.306.900,- menjadi Rp. 44.168.000,-.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dianggarkan sebesar Rp. 13.810.275,- menjadi Rp. 12.764.875,-.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp. 24.791.500,- menjadi Rp. 13.793.000,-.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dianggarkan sebesar Rp. 21.600.000,- menjadi Rp. 21.600.000,-.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp. 15.817.900,- menjadi Rp. 13.008.400,-.

3.2 PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

III. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

IV. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

I. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan

Sub kegiatan :

1. Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

I. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

I. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub kegiatan :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

I. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

I. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub kegiatan :

1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN TAHUN 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Urusan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun - 1	Tahun N											Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN																				
7					URUSAN KEWILAYAHAN				Rp. 1.221.573.323				Rp. 1.221.573.323	Rp. 1.147.222.591				Rp. 1.147.222.591	Rp. 1.345.466.978,00
7	01				KECAMATAN				Rp. 1.221.573.323				Rp. 1.221.573.323	Rp. 1.147.222.591				Rp. 1.147.222.591	Rp. 1.345.466.978,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 1.117.248.748				Rp. 1.117.248.748	Rp. 1.041.888.318				Rp. 1.041.888.318	Rp. 1.229.202.854,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 8.395.550				Rp. 8.395.550	Rp. 11.245.550				Rp. 11.245.550	Rp. 10.795.827,00
7	01	01	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 2.195.550				Rp. 2.195.550	Rp. 2.195.550				Rp. 2.195.550	Rp. 2.415.139,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 6.200.000				Rp. 6.200.000	Rp. 9.050.000				Rp. 9.050.000	Rp. 8.380.688,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 948.899.171				Rp. 948.899.171	Rp. 887.979.089				Rp. 887.979.089	Rp. 1.041.885.881,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 909.855.171				Rp. 909.855.171	Rp. 853.471.189				Rp. 853.471.189	Rp. 1.000.820.415,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 32.787.600				Rp. 32.787.600	Rp. 30.251.500				Rp. 30.251.500	Rp. 36.383.160,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 4.256.400				Rp. 4.256.400	Rp. 4.256.400				Rp. 4.256.400	Rp. 4.682.108,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 39.708.500				Rp. 39.708.500	Rp. 52.203.750				Rp. 52.203.750	Rp. 38.943.582,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 1.997.000				Rp. 1.997.000	Rp. 6.131.000				Rp. 6.131.000	Rp. 2.097.916,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 14.285.500				Rp. 14.285.500	Rp. 20.159.750				Rp. 20.159.750	Rp. 12.899.283,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 8.752.000				Rp. 8.752.000	Rp. 9.745.000				Rp. 9.745.000	Rp. 9.629.004,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 6.224.000				Rp. 6.224.000	Rp. 7.828.000				Rp. 7.828.000	Rp. 5.131.579,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 8.540.000				Rp. 8.540.000	Rp. 8.540.000				Rp. 8.540.000	Rp. 9.424.800,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														Rp. 2.000.000,00
7	01	01	2.07	0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 2.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 79.553.200				Rp. 79.553.200	Rp. 38.147.300				Rp. 38.147.300	Rp. 87.237.800,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.05	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 710.000				Rp. 710.000	Rp. 380.000				Rp. 380.000	Rp. 760.000,00
7	01	01	2.05	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 24.101.600				Rp. 24.101.600	Rp. 24.101.900				Rp. 24.101.900	Rp. 26.511.320,00
7	01	01	2.05	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 54.741.600				Rp. 54.741.600	Rp. 13.685.400				Rp. 13.685.400	Rp. 59.946.480,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 42.890.328				Rp. 42.890.328	Rp. 52.312.628				Rp. 52.312.628	Rp. 48.539.804,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 34.994.928				Rp. 34.994.928	Rp. 34.994.928				Rp. 34.994.928	Rp. 39.925.201,00
7	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 3.319.900				Rp. 3.319.900	Rp. 3.319.900				Rp. 3.319.900	Rp. 3.581.087,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 4.575.500				Rp. 4.575.500	Rp. 13.997.800				Rp. 13.997.800	Rp. 5.033.516,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 28.306.900				Rp. 28.306.900	Rp. 44.168.000				Rp. 44.168.000	Rp. 31.139.988,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 28.306.900				Rp. 28.306.900	Rp. 44.168.000				Rp. 44.168.000	Rp. 31.139.988,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 28.306.900				Rp. 28.306.900	Rp. 44.168.000				Rp. 44.168.000	Rp. 31.139.988,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 13.810.275				Rp. 13.810.275	Rp. 12.764.875				Rp. 12.764.875	Rp. 15.191.800,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp. 13.810.275				Rp. 13.810.275	Rp. 12.764.875				Rp. 12.764.875	Rp. 15.191.800,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 13.810.275				Rp. 13.810.275	Rp. 12.764.875				Rp. 12.764.875	Rp. 15.191.800,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp. 24.791.500				Rp. 24.791.500	Rp. 13.793.000				Rp. 13.793.000	Rp. 13.816.308,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				Rp. 24.791.500				Rp. 24.791.500	Rp. 13.793.000				Rp. 13.793.000	Rp. 13.816.308,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 24.791.500				Rp. 24.791.500	Rp. 13.793.000				Rp. 13.793.000	Rp. 13.816.308,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 21.800.000				Rp. 21.800.000	Rp. 21.800.000				Rp. 21.800.000	Rp. 38.705.410,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp. 21.800.000				Rp. 21.800.000	Rp. 21.800.000				Rp. 21.800.000	Rp. 38.705.410,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Kondusif Pimpinan di Kecamatan	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 21.800.000				Rp. 21.800.000	Rp. 21.800.000				Rp. 21.800.000	Rp. 38.705.410,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 15.817.900				Rp. 15.817.900	Rp. 13.008.400				Rp. 13.008.400	Rp. 17.399.976,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 15.817.900				Rp. 15.817.900	Rp. 13.008.400				Rp. 13.008.400	Rp. 17.399.976,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	08	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	- Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa		Rp. 15.817.900				Rp. 15.817.900	Rp. 13.008.400				Rp. 13.008.400	Rp. 17.399.976,00
Jumlah									Rp. 1.221.573.323				Rp. 1.221.573.323	Rp. 1.147.222.501				Rp. 1.147.222.501	Rp. 1.345.455.976,00

Kab. Tapanuli Utara, ...
Plt. Camat KANTOR SIMANGUMBAN

RINI SINAGA, SH, MM
NIP. 198803282015052001

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Simangumban Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Simangumban sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Simangumban Tahun 2025 ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Simangumban pada Tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Simangumban Tahun 2025 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Simangumban. Melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Simangumban Tahun 2025 ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Simangumban Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simangumban, September 2025

CAMAT SIMANGUMBAN,

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA KECAMATAN SIMANGUMBAN

RENI SINAGA. SH, MM

NIP. 198803262015052001

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025 KANTOR CAMAT SIPAHUTAR

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan bimbingan sehingga kami dapat Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pedoman dan acuan untuk perencanaan pembangunan dalam melaksanakan Program Kegiatan Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara di Tahun 2025 yang dibuat berdasarkan Surat Edaran Bupati Tapanuli Utara sebagai pedoman pelaksanaan program kerja dengan menampung aspirasi dan kebutuhan di Tahun 2025 yang merupakan prioritas.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Tapanuli Utara *Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara Yang Maju, Berbudaya Dan Berkelanjutan* dan Misi ke tujuh *Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan* serta konsep pembangunan khususnya pada aspek pelayanan umum yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala seperti adanya keterbatasan sumber daya aparatur dan minimnya sarana yang dimiliki sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung oleh sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di semua sektor.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran serta sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Kantor Camat SIpahutar yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi semuanya baik institusi Pemerintah maupun swasta serta semua pihak yang membutuhkannya.

Sipahutar, September 2025

Plt.CAMAT SIPAHUTAR,

REINHARD NIXSON MANULLANG,SH
PEMBINA
NIP. 19741121 200003 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KANTOR CAMAT SIPAHUTAR TAHUN LALU..... 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Sipahutar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Camat Sipahutar..... 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sipahutar..... 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sipahutar..... 16
2.4. Terhadap Rancangan Awal Kecamatan Sipahutar..... 19

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.. 24

3.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan..... 24

BAB IV PENUTUP..... 32

4.1 Catatan – Catatan Penting 32
4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan 32
4.3 Rencana Tindak Lanjut 33
4.4 Kesimpulan 33
4.5 Saran 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan pembangunan, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sipahutar. Renja Perubahan disusun sebagai penyesuaian terhadap Renja awal yang telah ditetapkan, seiring dengan adanya dinamika kebijakan, perubahan asumsi perencanaan, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya, serta perkembangan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sipahutar Tahun 2025 dilakukan sebagai respons terhadap beberapa faktor penting, antara lain adanya penyesuaian kebijakan nasional dan daerah, perubahan prioritas pembangunan, perubahan alokasi anggaran, serta masukan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum konsultasi publik. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan wilayah, dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tersebut agar dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, Renja Perubahan Tahun 2025 Kantor Kecamatan Sipahutar disusun guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan perencanaan pembangunan Kecamatan Sipahutar dapat berjalan lebih optimal serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Renja Perubahan disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Sipahutar Tahun 2025-2029 dan secara otomatis menyesuaikan dengan arah kebijakan serta tema pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Renja Perubahan dimaksud, Kecamatan Sipahutar telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappedaitbangda Kabupaten Tapanuli Utara yang menjadi koordinator perencanaan dan juga dengan para pemangku kepentingan.

Kecamatan Sipahutar sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) perlu menetapkan target Kinerja sehingga pada akhir tahun anggaran dapat diketahui pencapaian kinerjanya, hal ini dimaksudkan agar dapat lebih mudah mengetahui keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Renja Kantor Kecamatan Sipahutar Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sipahutar untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun keberhasilan dan tidaknya Renja SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sipahutar ini dilandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahaan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
24. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28

Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014;

29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Perturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 63 Tahun 2016;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanui Utara Nomor 63 Tahun 2016;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
41. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecvamatan Sipahutar ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sipahutar. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPAS) Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Perubahan (Renja) Kantor Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2. Landasan Hukum
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja.

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KANTOR CAMAT SIPAHUTAR KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kantor Camat Sipahutar Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Camat Sipahutar

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD yang memuat indikator sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kantor Camat Sipahutar

Mengemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kondisi umum, permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Kantor Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat kajian tentang rancangaan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA KANTOR CAMAT SIPAHUTAR TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT SIPAHUTAR TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KANTOR CAMAT SIPAHUTAR

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Sipahutar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, diketahui bahwa capaian kinerja program dan kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Beberapa kegiatan telah mulai direalisasikan, khususnya yang bersifat non-fisik dan persiapan administrasi, sementara kegiatan fisik sebagian besar masih dalam proses perencanaan atau pengadaan. Kendala utama yang dihadapi antara lain terkait dengan keterlambatan penyesuaian anggaran, proses administrasi, serta koordinasi lintas sektor. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan Renja Perubahan agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat lebih realistis, adaptif terhadap kondisi aktual, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Kecamatan Sipahutar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sipahutar dapat dilihat pada Tabel 2.1

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SIPAHUTAR DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SIPAHUTAR 2025 -2026 (TAHUN BERJALAN)*

PROVINSI SUMATERA UTARA KABUPATEN TAPANULI UTARA KECAMATAN SIPAHUTAR

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Realisasi			Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		
									Keuangan	Kinerja	Triwulan	Keuangan	Fisik			Keuangan	Kinerja	Triwulan	Keuangan	Kinerja
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan Sipahutar	85%	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	0%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksanaanya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.112.564.771	100%	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	468.906.964 927.552.755	22,20% 43,91%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.353.800	100 %	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	- 910.000	0% 14%
		Terlaksanaanya Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan dengan baik	Persentase Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Sesuai Peraturan Pemerintah Yang Berlaku	100 %	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	85%								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	1.898.242.586	100 %	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	454.909.614 887.183.420	24% 47%
		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Sipahutar	85%	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	80%								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.271.325	100 %	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	0 8.175.950	0% 19%
														Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	25.353.510	100 %	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	0 5.841.264	0% 23%
														Penyediaan Jasa Penunjang	Cakupan layanan administras	85.802.600	100 %	TW 1 TW 2	13.570.000 20.352.771	16% 24%
														Urusan Pemerintah Daerah	i perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			TW 3 TW 4		

														Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik	53.540.950	100 %	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	427.350 5.089.350	1% 10%
2							Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksanaanya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.580.700	80%	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	- 630.000	0% 3,39%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiataan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan layanan publik yang dilaksanakan	18.580.700	80%	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	- 630.000	0% 3,39%
3							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksanaanya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di desa	15.960.000	85%	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	12.540.000 15.524.000	79% 97%	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga dan Kelurahan yang aktif	15.960.000	85%	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	12.540.000 15.524.000	79% 97%
4							Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksanaanya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.305.000	85%	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	- -	0% 0%	Koordinasi Upaya penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	3.305.000	85%	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	- -	0% 0%
5							Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksanaanya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22.510.000	85%	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	- 5.400.000	0% 24%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tngkat Kecamatan	22.510.000	85%	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	- 5.400.000	0% 24%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SIPAHUTAR

Pelaksanaan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah Kecamatan Sipahutar hingga Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan adanya beberapa capaian positif, namun juga masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera direspon melalui penyusunan Renja Perubahan. Secara umum, pelayanan administrasi kependudukan, perizinan dasar, fasilitasi pembangunan kelurahan, serta layanan sosial kemasyarakatan telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Evaluasi internal menunjukkan bahwa beberapa indikator kinerja utama (IKU) yang terkait langsung dengan pelayanan Masyarakat sudah berada pada kategori "Baik" atau sudah mencapai target triwulan.

Dalam konteks penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025, hasil analisis ini menjadi dasar penting untuk melakukan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan. Renja Perubahan diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelayanan publik melalui program pelatihan aparatur, pengembangan sistem informasi pelayanan terpadu, serta peningkatan koordinasi lintas kelurahan dan lembaga kemasyarakatan. Selain itu, pembiayaan juga perlu diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas layanan masyarakat, seperti digitalisasi proses layanan dan percepatan penyelesaian aduan warga. Dengan melakukan penyesuaian berbasis evaluasi kinerja ini, diharapkan Kecamatan Sipahutar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara lebih terukur dan partisipatif. Kantor Camat Sipahutar merupakan salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang ikut serta dalam menunjang Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan pembangunan. Pencapaian Kinerja Kecamatan Sipahutar selama Tahun 2024 dalam berbagai bidang baik pemerintahan, kesejahteraan sosial, pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Sosial Budaya yang telah terealisasi pada Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan
   a) Telah dilaksanakan pembinaan kepada aparat Pemerintah Desa tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masalah-masalah yang terkait didalamnya.
   b) Telah dilaksanakan Pameran Pembangunan dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara
   c) Dalam bidang kependudukan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembuatan KTP elektronik, telah dilaksanakan pelayanan perekaman e-KTP
   d) Mengenai pelayanan di bidang pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah, dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya ada blanko dimana setiap formulir yang dari Kepala Desa harus diketahui oleh Camat Sipahutar yaitu (F1.35, F1.07, F1.21, dan F1.06) telah terlayani dengan baik dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

e) Dalam bidang pajak bumi dan bangunan telah didistribusikan SPPT bagi wajib pajak PBB sebanyak 25 Desa.

2. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a) Pelaksanaan monitoring pelaksanaan protokol kesehatan di pesta dan tempat-tempat umum lainnya
   b) Pendataan dan Pemberian bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid-19 (mahasiswa, UMKM, dan sebagainya)
   c) Pemberian bantuan sosial untuk korban bencana alam, kebakaran, dan lainnya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
   a) Pelaksanaan Musrenbang Desa tentang APBDes
   b) Pelaksanaan Musrenbang Desa tentang ADD/K dan Dana Desa
   c) Pembinaan PKK Desa Percontohan ; Desa Aek Nauli IV dan Desa Siabal Abal III
   d) Pencairan Honor/Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan BPD Triwulan I sampai dengan Triwulan IV
   e) Pelaksanaan Gotong Royong Desa

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sipahutar terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

EVALUASI KINERJA PROGRAM (EKP)

Kode	Program	Bobot Program	Capaian Kinerja (%)
P1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	91,54
P2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	97,89
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	89,48
P4	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100 %	97,10
P5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	95,65
P6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	42,85

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan	Indeks	-	80	75	80	85	n/a	85	85	85	
2	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan admninistratif yang ditindaklanjuti	Persen		100	84	100	100	80	91	100	100	
4	Persentase pelayanan admnistrasi kependudukan (KTP dan KK) tepat waktu	Persen		80	90	90	95	90.50	90.50	90.50	95	
5	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Persen	-	75	85	85	85	72	85	85	100	
6	Persentase pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	Persen		100	100	100	100	68	100	100	100	
7	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	-	60	B	B	B	61,58	CC	B	B	
8	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SIPAHUTAR

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025, Kecamatan Sipahutar mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu-isu ini muncul sebagai hasil evaluasi kinerja, perubahan kebijakan, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Beberapa isu penting yang menjadi perhatian antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Masih terdapat kesenjangan kompetensi di antara aparatur, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan pelayanan berbasis digital. Hal ini berdampak pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik.
2. Keterbatasan Anggaran dan Reprioritisasi Kegiatan Adanya dinamika dalam alokasi anggaran, termasuk refocusing belanja dan penyesuaian kebijakan fiskal, mengharuskan perangkat daerah untuk melakukan reprioritisasi program. Hal ini menuntut perencanaan yang adaptif dan berbasis hasil.
3. Penanganan Permasalahan Sosial dan Lingkungan Kecamatan Sipahutar menghadapi berbagai isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan drainase. Isu-isu ini memerlukan penanganan lintas sektor dan partisipatif.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Digitalisasi pelayanan masih belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital di kalangan aparatur maupun masyarakat.

Isu-isu di atas menjadi dasar utama dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025. Pendekatan yang digunakan diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas pelayanan, serta mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan kecamatan agar lebih responsif, efektif, dan efisien. Dalam proses pelaksanaan kegiatan kerja Kecamatan Sipahutar akan berbenah diri untuk terus dapat meningkatkan kinerja kegiatan, karena itu pengelolaan pemerintahan diperlukan. Penerapan manajemen pemerintahan seluruh pelaksanaan kegiatannya diarahkan pada sebuah proses bagaimana menciptakan efektivitas usaha secara efisien dan produktif dalam penerapan program kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kecamatan Sipahutar dalam proses kegiatan program kerja kecamatan juga termaksimalkan fungsi manajemen pemerintahan yang tercakup dalam berbagai aspek perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber daya pemerintahan dan kontrol pemerintahan yang kesemuanya dijalankan dalam koordinasi yang baik. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Sipahutar memiliki fungsi pelayanan umum dan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku Kecamatan memiliki urusan wajib yaitu: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan kepala daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Sipahutar telah menetapkan beberapa langkah pencapaian melalui penetapan program kerja,

tujuan maupun sasaran yang semuanya diarahkan pada pencapaian visi dan misi kecamatan secara maksimal. Dalam proses pelaksanaan dilapangan meskipun telah direncanakan dengan baik, berbagai permasalahan timbul yang berpengaruh dalam kegiatan kerja terutama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sipahutar.

1. Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sipahutar selama 1 (satu) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sipahutar 2 (dua) tahun ke depan antara lain:

1. Belum optimalnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
2. Belum optimalnya tata kelola keuangan
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sipahutar bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik *(e-government*) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Peran strategis pelayanan Kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus dipehatikan, antara lain :

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu;
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

3. Perwujudan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan daerah yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Berbagai fenomena terakhir di Indonesia menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas tatakelola pemerintahan yang baik dan inovatif cenderung memiliki kinerja yang baik dibandingkan daerah lainnya. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih menemui kendala di Kabupaten Tapanuli Utara. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik.

Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang semakin baik belum mampu menciptakan pelayanan publik yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Berbagai inovasi yang telah dilakukan dalam penerapan *e-government*, inovasi dalam pemanfaatan potensi daerah serta inovasi lainnya belum mampu secara optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga mengakibatkan tingkat daya saing daerah masih rendah.

Adapun strategi yang dilakukan Kantor Kecamatan Sipahutar dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan etos kerja dan disiplin aparat yang ada di Kantor Kecamatan Sipahutar.
2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan untuk meningkatkan kualitas aparat yang ada di Kantor Kecamatan Sipahutar.
3) Membangun budaya pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
4) Pemanfaatan anggaran operasional yang tersedia dengan optimal, efektif dan efisien.
5) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya perbaikan infrastruktur pendukung yang dapat mengoptimalkan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan peran serta pemuda.
6) Bekerja sama dengan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7) Meningkatkan peran PKK dalam pembangunan kemasyarakatan.

8) Bekerja sama dengan unsur pimpinan kecamatan dalam mewujudkan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
9) Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk membayar pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara.
10) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang ada di Kecamatan Sipahutar
11) Berperan aktif dalam upaya perwujudan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL KECAMATAN SIPAHUTAR

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA. Rencana Kerja Kecamatan Sipahutar berdasarkan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Sipahutar. Untuk Tahun 2025, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat Tabel T-C.31 berikut :

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL KECAMATAN SIPAHUTAR TAHUN 2025
KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
									RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	*2*					*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR			2.185.151.203,00	2.179.160.471,00	1.945.631.387,00			2.185.520.003,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.185.151.203,00	2.179.160.471,00	1.945.631.387,00			2.185.520.003,00
	7	01				KECAMATAN			2.185.151.203,00	2.179.160.471,00	1.945.631.387,00			2.185.520.003,00
1	**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100 Persen**	**2.124.155.303,00**	**2.113.604.771,00**	**1.867.776.287,00**			**2.124.524.103,00**
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.353.800,00	6.353.800,00	6.353.800,00			6.353.800,00
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1.040.000,00
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1.040.000,00
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1.040.000,00
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1.500.000,00
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.733.800,00	1.733.800,00	1.733.800,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN		1.733.800,00

												DAERAH YANG SAH		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan PPPK	1 Orang/bulan 20 Orang/bulan	1.899.179.366,00	1.899.282.586,00	1.899.282.586,00			1.899.179.278,00
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	1.863.976.991,00	1.863.977.111,00	1.604.191.677,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1.863.976.903,00
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	30.907.200,00	30.907.200,00	30.907.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.907.200,00
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	2.295.175,00	2.398.275,00	2.398.275,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		2.295.175,00
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	960.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		2.000.000,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	43.185.325,00	43.271.325,00	43.271.325,00			43.185.413,00
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		2.700.000,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.420.675,00	23.506.675,00	23.506.675,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		23.420.763,00
	7	01	01	2.06	0003									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	13.064.650,00	13.064.650,00	13.064.650,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		13.064.650,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4.000.000,00
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	43.888.512,00	25.353.510,00	25.353.510,00			43.888.512,00

	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	43.888.512,00	25.353.510,00	25.353.510,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		43.888.512,00
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	77.996.600,00	85.802.600,00	85.802.600,00			77.996.600,00
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000,00	1.499.500,00	1.499.500,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1.500.000,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.999.800,00	29.698.300,00	29.698.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21.999.800,00
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54.496.800,00	54.604.800,00	54.604.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		54.496.800,00
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	53.551.700,00	53.540.950,00	53.540.950,00			53.920.500,00
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.921.000,00	45.910.350,00	57.907.600,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		45.921.000,00
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.631.200,00	2.631.200,00	2.631.200,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		3.000.000,00
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.999.500,00	4.999.400,00	7.999.100,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4.999.500,00
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan**	**80 persen**	**19.880.900,00**	**19.880.700,00**	**31.080.100,00**			**19.880.900,00**
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	19.880.900,00	19.880.700,00	19.880.700,00			19.880.900,00
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	12 Laporan	19.880.900,00	19.880.700,00	31.080.100,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		19.880.900,00

							Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
3	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100 persen**	**11.400.000,00**	**15.960.000,00**	**20.960.000,00**			**11.400.000,00**
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakat	11.400.000,00	15.960.000,00	15.960.000,00			11.400.000,00
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	11.400.000,00	15.960.000,00	15.960.000,00	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		11.400.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	0,00	0,00	0,00			0,00
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	0,00	0,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
4	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti**	**85 persen**	**3.305.000,00**	**3.305.000,00**	**3.305.000,00**			**3.305.000,00**
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00			3.305.000,00
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		3.305.000,00
5	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan**	**85 persen**	**26.410.000,00**	**26.410.000,00**	**22.510.000,00**			**26.410.000,00**
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	26.410.000,00	26.410.000,00	26.410.000,00			26.410.000,00
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	26.410.000,00	26.410.000,00	22.510.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		26.410.000,00
								J U M L A H	**2.185.151.203,00**	**2.179.160.471,00**	**1.945.631.387,00**			**2.185.520.003,00**

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program Kecamatan Sipahutar merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sipahutar. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Kecamatan Sipahutar sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Sipahutar.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 10 kegiatan dan 25 Sub kegiatan, sebagaimana rincian meliputi berikut :

1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
	1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
		6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
		10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Peralatan Rumah Tangga
		13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	4		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
		15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

		18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
	6		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
		21	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
	7		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
		22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	8		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**
		23	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
	9		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
		24	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
	10		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**
		25	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Untuk lebih jelasnya Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sipahutar pada tahun 2025 terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SIPAHUTAR KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	*2*					*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
						KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR				2.185.151.203,00	2.179.160.471,00	1.945.631.387,00			2.185.520.003,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.185.151.203,00	2.179.160.471,00	1.945.631.387,00			2.185.520.003,00
	7	01				KECAMATAN				2.185.151.203,00	2.179.160.471,00	1.945.631.387,00			2.185.520.003,00
1	**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.124.155.303,00**	**2.113.604.771,00**	**1.867.776.287,00**			**2.124.524.103,00**
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.353.800,00	6.353.800,00	6.353.800,00			6.353.800,00
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1.040.000,00
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1.040.000,00
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1.040.000,00

							Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1.500.000,00
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.733.800,00	1.733.800,00	1.733.800,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1.733.800,00
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan PPPK	1 Orang/bulan 20 Orang/bulan	1 Orang/bulan 20 Orang/bulan	1.899.179.366,00	1.899.282.586,00	1.899.282.586,00			1.899.179.278,00
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.863.976.991,00	1.863.977.111,00	1.604.191.677,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1.863.976.903,00
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	30.907.200,00	30.907.200,00	30.907.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.907.200,00
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.295.175,00	2.398.275,00	2.398.275,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		2.295.175,00
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	960.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		2.000.000,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	43.185.325,00	43.271.325,00	43.271.325,00			43.185.413,00
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		2.700.000,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	23.420.675,00	23.506.675,00	23.506.675,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		23.420.763,00
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	13.064.650,00	13.064.650,00	13.064.650,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		13.064.650,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4.000.000,00
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	43.888.512,00	25.353.510,00	25.353.510,00			43.888.512,00
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	43.888.512,00	25.353.510,00	25.353.510,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		43.888.512,00

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	77.996.600,00	85.802.600,00	85.802.600,00			77.996.600,00
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.499.500,00	1.499.500,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1.500.000,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	21.999.800,00	29.698.300,00	29.698.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21.999.800,00
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	54.496.800,00	54.604.800,00	54.604.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		54.496.800,00
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	53.551.700,00	53.540.950,00	53.540.950,00			53.920.500,00
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	45.921.000,00	45.910.350,00	57.907.600,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		45.921.000,00
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	2.631.200,00	2.631.200,00	2.631.200,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		3.000.000,00
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	4.999.500,00	4.999.400,00	7.999.100,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4.999.500,00
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan**	**80 persen**	**80 persen**	**19.880.900,00**	**19.880.700,00**	**31.080.100,00**			**19.880.900,00**

	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	19.880.900,00	19.880.700,00	19.880.700,00			19.880.900,00
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	19.880.900,00	19.880.700,00	31.080.100,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		19.880.900,00
3	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100 persen**	**100 persen**	**11.400.000,00**	**15.960.000,00**	**20.960.000,00**			**11.400.000,00**
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakat	10 Lembaga Kemasyarakat	11.400.000,00	15.960.000,00	15.960.000,00			11.400.000,00
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	11.400.000,00	15.960.000,00	15.960.000,00	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		11.400.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	0,00	0,00	0,00			0,00
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
4	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti**	**85 persen**	**85 persen**	**3.305.000,00**	**3.305.000,00**	**3.305.000,00**			**3.305.000,00**

	7	0 1	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00			3.305.000,00
	7	0 1	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		3.305.000,00
5	**7**	**0 1**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan**	**85 persen**	**85 persen**	**26.410.000,00**	**26.410.000,00**	**22.510.000,00**			**26.410.000,00**
	7	0 1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	26.410.000,00	26.410.000,00	26.410.000,00			26.410.000,00
	7	0 1	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	26.410.000,00	26.410.000,00	22.510.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		26.410.000,00

BAB IV
PENUTUP

4.1 CATATAN-CATATAN PENTING

Renja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Sipahutar merupakan penyesuaian terhadap dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat yang berkembang selama tahun berjalan. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan di Kecamatan Sipahutar dapat berjalan secara optimal dan adaptif terhadap kondisi *riil* di lapangan. Kami berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk merealisasikan rencana yang telah disesuaikan ini secara tepat sasaran, waktu, dan anggaran. Adapun indikator kinerja utama yang berupaya dicapai oleh Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara dijabarkan melalui tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 (TC.28)
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2025-2029

NO	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2023)	Target Sasaran Kinerja Tahun Ke-		Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2024)
			2025	2026	
			Target	Target	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*9*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	80 %	82 %	79,8%
2	Nilai SAKIP Kecamatan	61,58 (CC)	68,35 (B)	70,30 (BB)	N/A
3	Persentase Pelaksanaan TUP sesuai Peraturan Pemerintah	N/A	90 %	92 %	N/A

4.2 KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 di tingkat Kecamatan wajib mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Seluruh kegiatan yang telah direncanakan harus tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD, RKPD Tahun 2025, serta regulasi yang berlaku dan kebijakan teknis lainnya. Renja Perubahan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan kondisi sosial ekonomi yang terjadi selama tahun berjalan. Dalam pelaksanaannya, kecamatan berkewajiban menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, mencegah terjadinya tumpang tindih program, serta memperkuat sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah dan desa/kelurahan. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan harus berbasis data dan kebutuhan *riil* masyarakat yang teridentifikasi melalui hasil Musrenbang dan sumber data resmi lainnya. Di samping itu, proses pengendalian dan evaluasi secara berkala harus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya *monitoring* terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran. Bila tersedia, pemanfaatan sistem informasi perencanaan daerah (*e-planning*) juga menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin integrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan akurat.

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, Kecamatan Sipahutar akan menindaklanjuti dokumen ini dengan langkah-langkah konkret guna memastikan implementasi program dan kegiatan berjalan secara tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kebijakan perencanaan daerah. Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025.

Rencana tindak lanjut ini meliputi beberapa hal strategis yang mencakup koordinasi, konsolidasi internal, penguatan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi berkala yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan akan melakukan koordinasi lanjutan dengan perangkat daerah terkait untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang mengalami perubahan, baik dari sisi target, maupun alokasi anggaran. Koordinasi ini juga mencakup penyampaian dokumen Renja Perubahan kepada OPD teknis, Bappelitbangda, serta pihak terkait lainnya sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
2. Kecamatan akan memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi (monev) dengan menetapkan jadwal monitoring, pelaporan perkembangan pelaksanaan program, serta pengukuran terhadap capaian indikator kinerja. Jika diperlukan, revisi lanjutan akan diajukan berdasarkan dinamika yang terjadi di lapangan, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan rencana tindak lanjut ini, diharapkan pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan dapat berjalan sesuai tujuan, berorientasi pada hasil, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Secara garis besar Renja Perubahan Kecamatan Sipahutar tahun 2025 memuat 5 Program, 10 kegiatan dan 25 Sub kegiatan dengan besaran pagu Renja Perubahan sebesar Rp. 1.923.728.179,00; (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dengan Perubahan (Pengurangan) Anggaran Sebesar Rp.249.591.028,00,-.

4.4 KESIMPULAN

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 Kecamatan disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan masyarakat yang berkembang selama tahun berjalan. Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 ini mencerminkan komitmen Kecamatan dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan secara responsif, adaptif, dan terukur, dengan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RKPD dan RPJMD Kabupaten/Kota. Perubahan dalam Renja ini meliputi penyempurnaan pada program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi pelaksanaan, serta alokasi anggaran berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya dan masukan dari berbagai pihak. Penyusunan dokumen ini juga diharapkan menjadi acuan operasional yang jelas

dan terarah bagi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan pada sisa tahun anggaran 2025.

4.5 Saran

1. Penguatan koordinasi lintas sektor perlu terus dilakukan, terutama antara kecamatan, perangkat daerah, dan pemerintah desa, agar pelaksanaan kegiatan lebih sinergis dan efisien.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam memahami dinamika perencanaan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
3. Partisipasi masyarakat perlu lebih dioptimalkan dalam setiap tahapan pelaksanaan program agar hasil pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan riil.
4. Kecamatan perlu memaksimalkan sistem monitoring dan evaluasi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi, untuk memastikan capaian Renja Perubahan dapat diukur secara objektif dan tepat waktu.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sipahutar Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Sipahutar sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sipahutar Tahun 2025 ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Sipahutar pada Tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sipahutar Tahun 2025 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Sipahutar. Melalui Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sipahutar Tahun 2025 ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sipahutar Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sipahutar, September 2025

Plt.CAMAT SIPAHUTAR,

REINHARD NIXSON MANULLANG,SH
PEMBINA
NIP. 19741121 200003 1 002

RENCANA KERJA
(RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2025

KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Sipoholon Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen Renja Perubahan ini merupakan bagian dari siklus perencanaan tahunan sebagai tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, perubahan kebijakan, serta penyesuaian terhadap kondisi dan dinamika pembangunan terkini. Dokumen ini disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, akuntabel, dan transparan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan.

Melalui dokumen ini, diharapkan rencana program dan kegiatan yang telah disusun dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sipoholon untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik berupa data, masukan, maupun saran konstruktif. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025 yang lebih baik.

Sipoholon, September 2025
CAMAT SIPOHOLON,

RONALD TOGU SITUMORANG,SSTP
PEMBINA
NIP. 198504052003121001

DAFTAR ISI

PENGANTAR…….. i

DAFTAR ISI…… ii

DAFTAR TABEL……. iii

BAB I PENDAHULUAN…… 1
- 1.1 LATAR BELAKANG…… 1
- 1.2 LANDASAN HUKUM…….. 3
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN…… 5
- 1.4 SITEMATIKA PENULISAN…… 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 8
- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025…….. 8
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.. 15
- 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH…… 19
- 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD……. 23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH……. 34
- 3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL…… 34
- 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH… 36
- 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN…… 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…. 44

BAB V PENUTUP…….. 47

DAFTAR TABEL

TABEL T-C. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara ……	9
TABEL T-C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara ……..	
TABEL T-C. 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara ……..	24
TABEL T-C. 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara …….……	32
TABEL T-C. 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tapanuli Utara ……..	39
TABEL 4.1	Program Utama dan Kegiatan Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ……	44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan pembangunan, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan. Renja Perubahan disusun sebagai penyesuaian terhadap Renja awal yang telah ditetapkan, seiring dengan adanya dinamika kebijakan, perubahan asumsi perencanaan, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya, serta perkembangan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Tahun 2025 dilakukan sebagai respons terhadap beberapa faktor penting, antara lain adanya penyesuaian kebijakan nasional dan daerah, perubahan prioritas pembangunan, perubahan alokasi anggaran, serta masukan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum konsultasi publik.

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan wilayah, dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tersebut agar dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, Renja Perubahan Tahun 2025 disusun guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan perencanaan pembangunan Kecamatan Sipoholon dapat berjalan lebih optimal serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Renja Perubahan disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024- 2029 dan secara otomatis menyesuaikan dengan arah kebijakan serta tema pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024-2029. Dalam penyusunan Renja Perubahan dimaksud, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang menjadi koordinator perencanaan di Kabupaten Tapanuli Utara dan juga dengan para pemangku kepentingan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Sipoholon ini dilandaskan pada :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Preside Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanui Utara Nomor 63 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 Nomor);
15. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun 2025– 2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Renja Perubahan adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja OPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif prakiraan maju. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan :

1. Mengacu pada RKPD
2. Mengacu pada Renstra OPD
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi
5. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

a. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sipoholon Tahun 2025 disusun dengan maksud:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Sipoholon Tahun 2025
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara khususnya Kecamatan Sipoholon;
3. Untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan Sipoholon, agar

bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar, dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini adalah :

1. Untuk menjadi acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
2. Untuk menjadi bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
3. Untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan kedalam Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2. Landasan Hukum
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja.

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA Kantor Kecamatan SIPOHOLON KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kantor Kecamatan Sipoholon
Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD yang memuat indikator sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kantor Kecamatan Sipoholon.
Mengemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kondisi umum, permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Memuat kajian tentang rancangaan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Kegiatan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sipoholon s/d Triwulan II Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sipoholon ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sipoholon dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Sipoholon

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
7	Unsur kewilayahan									
7.01	Kecamatan									
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2 dokumen	1 dokumen	5 buku	5 buku	100	2 dokumen	2 dokumen	100
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1 dokumen	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1 dokumen	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah laporan capaian kinerja	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100

	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan ikhtisar realisasi kinerja								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyerapan Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/ bulan	10 bulan	14 bulan	14 bulan	100	25 orang/ bulan	25 orang/ bulan	100
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	4 orang dan 1 laporan	4 orang dan 1 laporan	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasilistrik/ penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket	16 jenis	16 jenis	100	1 paket	1 paket	100
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	1 paket	1 paket	15 jenis	15 jenis	100	15 jenis	15 jenis	100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	1 paket	1 paket	1000 kotak nasi dan snack	1000 kotak nasi dan snack	100	1 paket	1 paket	100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah barang cetakan dan	1 paket	1 paket	6650 lembar	6650 lembar	100	1 paket	1 paket	100

	Penggandaan	penggandaan								
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	1 dokumen	1 dokumen	200 eks	200 eks	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	1 laporan	1 laporan	200 oh	200 oh	100	1 laporan	1 laporan	100
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah									
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	1 unit	0	0	0	0	1 unit	1 unit	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyerapan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	70 buah	70 buah	100	1 laporan	1 laporan	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyerapan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	100	1 laporan	1 laporan	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah penyerapan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	3 orang dan 3 bulan	3 orang dan 12 bulan	3 orang dan 11 bulan	97	1 laporan	1 laporan	100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyerapan jasa pemeliharaan barang milik daerah	1 unit	1 unit	1 mobil dan 12 bulan	1 mobil dan 12 bulan	100	1 unit	1 unit	100
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan	Jumlah	5 unit	5 unit				5 unit	5 unit	100

	Peralatan dan Mesin Lainnya	penyerapan jasa pemeliharaan barang milik daerah								
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah penyerapan jasa pemeliharaan barang milik daerah	2 unit	0	2 unit dan 12 bulan	2 unit 12 bulan	100	2 unit	2 unit	100
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik**									
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	1 laporan	3 orang dan 12 bulan	3 orang dan 12 bulan	100	1 laporan	1 laporan	100
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**									
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang di Desa	1 dokumen	0	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									

		kelurahan								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 dokumen	0	12 bulan	12 bulan	100	1 dokumen	1 dokumen	60

Sipoholon,
CAMAT SIPOHOLON,

RONALD TOGU SITUMORANG, SSTP
PEMBINA
NIP. 198504052003121001

2.1. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerka pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanna OPD digunakan beberapa indicator antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Kantor Kecamatan Sipoholon merupakan salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang ikut serta dalam menunjang Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan pembangunan. Pencapaian kinerja Kecamatan Sipoholon selama Tahun 2024 dalam berbagai bidang baik pemerintahan, kesejahteraan sosial, pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Sosial Budaya yang telah terealisasi pada Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan
   a) Telah dilaksanakan Seleksi Perangkat Desa Tahun 2024
   b) Telah dilaksanakan pembinaan kepada aparat Pemerintah Desa tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masalah-masalah yang terkait didalamnya.
   c) Telah dilaksanakan Pameran Pembangunan dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara
   d) Dalam bidang kependudukan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembuatan KTP elektronik, telah dilaksanakan pelayanan perekaman e-KTP
   e) Mengenai pelayanan di bidang pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah, dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya ada perubahan blanko dimana setiap formulir yang dari Kepala Desa harus diketahui oleh Camat Sipoholon yaitu (F1.35, F1.07, F1.21, dan F1.06) telah terlayani dengan baik dan sesuai dengan SOP yang berlaku.
   f) Dalam bidang pajak bumi dan bangunan telah dilaksanakan sosialisasi PBB dan didistribusikan SPPT bagi wajib pajak PBB sebanyak 13 Desa + 1 Kelurahan.
2. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a) Monitoring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial
   b) Pendataan BPJS
   c) Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan : Paskah Raya Kecamatan, HUT Ke-80 RI, HUT Ke-80 Tapanuli Utara dan Perayaan Natal Oikumene
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
   a) Pelaksanaan Musrenbang Desa tentang APBDes

b) Pelaksanaan Musrenbang Desa tentang ADD/K dan Dana Desa
c) Pembinaan PKK Desa Percontohan yaitu Desa Lobusingkam dan Desa Hutaraja Simanungkalit
d) Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten
e) Pencairan Honor/Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan BPD Triwulan I sampai dengan Triwulan IV
f) Pelaksanaan Gotong Royong Desa

Dengan persentasi realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2024 yaitu :

EVALUASI KINERJA PROGRAM (EKP)

Kode	Program	Bobot Program	Capaian Kinerja
P1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	94,42
P2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	87,08
P3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	96,23

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sipoholon
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai		B	BB	B	B	CC	CC	B	CC	
	Ketepatan Waktu Penyerahan Laporan Keuangan	Persen		80	80	80	80	80	80	80	80	
	Persentase Kelembagaan Desa	Persen		75	80	85	90	90	90	85	100	
	Indek Kepuasan Masyarakat	Persen		80	85	88	100	90	90	88	100	
	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	Persen		88	90	95	100	90	90	95	100	
	Persentase Penduduk Yang Melakukan Perekaman KTP-El	Persen		75	80	85	90	85	85	85	100	
	Persentase Penetapan APBDes Tepat Waktu	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Temuan BPK/ Inspektorat	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Realisasi Target PAD/ PBB	Persen		70	75	80	90	80	80	80	90	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan kondisi umum berbagai bidang yang ada di Kecamatan Sipoholon, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentu saja menghadapi tantangan yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk taat pajak sehingga Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan PAD tidak bisa mencapai realisasi sampai dengan 100%
2. Pelayanan kepada masyarakat ataupun penyelesaian tugas sering terhambat dikarenakan Terbatasnya SDM yang dapat mengoperasikan Komputer dan Internet dan Perangkat Komputer untuk perekaman e- KTP sering bermasalah karena jaringan.
3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos.
4. Masih terbatasnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pengurusan administrasi kependudukan dan pengurusan surat kepemilikan tanah sehingga tidak mengikuti prosedur yang berlaku (segala berkas dimulai dari Kepala Desa/Lurah)
5. Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.

Sedangkan Peluang untuk pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Sipoholon adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati ke Camat.
2. Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah yang mengatur tugas,pokok, dan fungsi setiap seksi di Kantor Kecamatan Sipoholon.
3. Adanya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang mengatur tentang jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan, retribusi, dan alur prosedur pengurusannya.
4. Terjalinnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Unsur Pimpinan Kecamatan,Kepala Desa/Lurah, UPTD di Kecamatan, dan tokoh masyarakat/pemuda/agama sehingga ketentraman dan ketertiban dapat tercapai dan penyelesaian masalah-masalah sosial dapat diselesaikan/ditangani dengan baik.
5. Posisi wilayah yang strategis yang dapat di akses dengan transportasi yang cukup memadai khususnya bagi masyarakat yang tinggal di desa.
6. Ketersediaan Dana APBD dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Sipoholon.
7. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai (Tempat Parkir, Balai Data, Gudang, Peralatan Perekaman e-KTP, Infokus, Kamera, Komputer dan Printer, Alat Kebersihan, dan lainnya).

Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan kondisi umum berbagai bidang yang ada di Kecamatan Sipoholon, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentu saja menghadapi kendala dan permasalahan. Secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Infrastruktur pendukung sektor pertanian yang tidak memadai, seperti jalan dan jembatan yang menuju sentra produksi serta saluran irigasi.
b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung Kantor Kecamatan Sipoholon dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
c. Minimnya modal yang dimiliki masyarakat dalam upaya peningkatan hasil produksi pertanian/perikanan/peternakan.
d. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dalam hal pengelolaan lahan pertanian/perikanan/peternakan.
e. Pelayanan kesehatan masyarakat belum optimal, dikarenakan minimnya tenaga kesehatan seperti bidan desa, dokter, perawat serta sarana pendukung kesehatan.
f. Peran serta masyarakat dalam pembangunan masih rendah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sipoholon bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tapanuli Utara kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung
2. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum, dan tentunya dengann tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan tang berlaku.
4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya Rencana Pembangunan Hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.
5. Koordinasi dan konsultasi antar pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai dengan seharusnya sehingga masih sering terjadi ketidakpastian kewenangan.
6. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis maupun diklat

PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Adapun strategi yang dilakukan Kantor Kecamatan Sipoholon dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan etos kerja dan disiplin aparat yang ada di Kantor Kecamatan Sipoholon.
b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan untuk meningkatkan kualitas aparat yang ada di Kantor Kecamatan Sipoholon.
c. Membangun budaya pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
d. Pemanfaatan anggaran operasional yang tersedia dengan optimal, efektif dan efisien.
e. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya perbaikan infrastruktur pendukung yang dapat mengoptimalkan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan peran serta pemuda.
f. Bekerja sama dengan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
g. Meningkatkan peran PKK dalam pembangunan kemasyarakatan.
h. Bekerja sama dengan unsur pimpinan kecamatan dalam mewujudkan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
i. Penanaman kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan.
j. Menggalakkan gotong royong dalam masyarakat.
k. Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk membayar pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara.
l. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang ada di Kecamatan Sipoholon
m. Berperan aktif dalam upaya perwujudan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA. Rencana Kerja Kecamatan Sipoholon berdasarkan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se-Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Sipoholon. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat dilihat Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C. 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Tapanuli Utara

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Sipoholon

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	**Cakupan Layanan Pemenuhan Administrasi**	**12 bulan**	**2.113.851.256**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	**Persentase realisasi anggaran**	**100%**	**1.827.868.062**	
1	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	*Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah*	*12 bulan*	*2.880.000*	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	*100%*	*2.520.000*	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersusunnya RKA, DPA	5 buku	1.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	960.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA- SKPD	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersusunnya RKA	2 set	480.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	360.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersusunnya DPA	2 set	480.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	480.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersusunnya Lakip	2 set	720.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	720.000	

	SKPD										
2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	*Terlaksananya administrasi keuanganperangkat daerah*	*12 bulan*	*1.883.121.903*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah*	*100%*	*1.632.679.712*	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Terssedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	1.847.894.703	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/ bulan	1.597.452.512	
	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Terlaksananya penatausahaa n keuangan	4 orang dan 12 bulan	34.267.200	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	1 dokumen	34.267.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 set	960.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	960.000	
3	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	*12 bulan*	*73.823.453*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan baik*	*100%*	*67.632.450*	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	16 jenis	4.127.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1.916.100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	16 jenis	16.207.350	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	16.207.350	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersedianya peralatan rumah tangga	15 jenis	5.699.503	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	4.599.500	

	Penyediaan bahan Logistik Kantor	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersedianya makanan / minuman rapat	1000 kotak nasi dan snack	16.285.000	Penyediaan bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	16.285.000	
	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6650 lembar	3.350.000	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	3.350.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersedianya bahan bacaan	200 eksemplar	3.002.500	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	3.002.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 oh	25.152.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	22.272.000	
5	*Pengadaan Barang Milik Daerah*	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	*Tersedianya barang milik daerah*	*12 bulan*	*25.000.000*	*Pengadaan Barang Milik Daerah*		*Jumlah pengadaan barang milik daerah*	*100%*	*16.619.600*	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersedianya peralatan dan mesin laiinya	2 jenis	25.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin laiinya yang disediakan	1 unit	16.619.600	
6	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*12 bulan*	*82.865.800*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*100%*	*41.473.200*	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersedianya jasa surat menyurat	100 buah	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	980.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersdianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	26.869.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	26.869.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	3 orang dan 12 bulan	54.496.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	13.624.200	
7	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah*	*12 bulan*	*46.160.100*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah*	*100%*	*66.943.100*	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	1 mobil dan 12 bulan	26.681.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	32.471.400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	5 unit dan 12 bulan	3.160.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	3.160.800	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	2 unit dan 12 bulan	16.317.500	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	31.310.900	
II	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	**Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**12 bulan**	**51.987.800**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase koordinasipermasalahan sarana dan prasarana umum**	**100%**	**62.543.000**	

1	*Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	*Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamtan*	*12 bulan*	*51.987.800*	*Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*		*Persentase terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik*	*100%*	*62.543.000*	
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Pertemuan koordinasi antara uspika dan masyarakat	3 orang dan 12 bulan	51.987.800.	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah laporan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1 laporan	62.543.000.	
III	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon**	**Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**12 bulan**	**205.107.700**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon**	**Persentase lembaga desa yang difasilitasi**	**100%**	**207.607.700**	
1	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	**Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon**	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*	*12 bulan*	*205.107.700*	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		*Persentase lembaga desa dan kelurahan yang difasilitasi*	*100%*	*207.607.700*	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	**Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon**	Terlaksananya pembangunan	12 bulan	132.787.100	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah sraana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 laporan	132.787.100	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon**	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	12 bulan	72.320.600	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 laporan	74.820.600	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Usulan Program dan Kegiatan Kemasyarakatan dilaksanakan terlebih dulu dengan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Desa masing-masing, dengan perangkat Desa sehingga tersusunlah usulan Prioritas dari Desa. Selanjutnya dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan tanggal 26 Februari 2024 di Kantor Kecamatan Sipoholon yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara beserta Dinas terkait seperti anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang berdomisili di Kecamatan Sipoholon, Bappedalitbang Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas PUTR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, Disdukcapil, Dinas Sosial, Ketahanan Pangan, UPT Puskesmas Siatadatada, UPT Puskesmas Situmeang Habinsaran, UPT Perikanan, UPT Peternakan dan Korwil Pendidikan, Kepala Sekolah, Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa, BPD, dan Organisasi Kemasyarakatan. Dalam agenda musrenbang ini membahas Usulan Prioritas untuk APBD TA. 2025 yang sebagian besar berupa Program/Kegiatan berupa pembangunan fisik seperti :

1. Rehabilitasi total Kantor Kecamatan Sipoholon
2. Pembangunan Kantor Kepala Desa, Ruang Kepala Sekolah/Guru, Perpustakaan, Gedung PAUD, Polindes, dan Poskesdes
3. Pemagaran Sekolah
4. Pembangunan Gorong-gorong plat
5. Permintaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kesehatan
6. Pembangunan Drainase
7. Pembangunan Irigasi
8. Pembangunan MCK
9. Pengaspalan Jalan, Pengaspalan Hotmix
10. Pengadaan Alat-alat Pertanian ; Handtraktor, Mesin Babat, Mesin Pembuat Kompos, Bibit Unggul Padi, Pupuk Pertanian, Pemipil Jagung, dan sebagainya

Program/Kegiatan yang diusulkan dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Peningkatan terhadap program dan kegiatan untuk pembinaan PKK di Desa/Kelurahan dan di Kecamatan ;
4. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
5. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan USPIKA, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Tapanuli Utara

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Sipoholon

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/KOta**	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	**Persentase Realisasi Anggaran**	**100%**	
1	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sipoholon	Jumlah Dokume Perencanaan Perangkat Daerah	100%	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sipoholon	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sipoholon	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Baik	100%	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kecamatan Sipoholon	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kecamatan Sipoholon	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kecamatan Sipoholon	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	
II	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	**Persentase Koordinasi Permasalahan Sarana dan Prasarana Umum**	**100%**	
1	KoordinasiPenyelenggaraan Kegiatan	Kantor	Persentase Terlaksananya	12 bulan	

	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sipoholon	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan Baik		
III	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kantor Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon**	**Persentase Lembaga Desa Yang Difasilitasi**	**100%**	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kantor Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon	Persentase Lembaga Desa dan Kelirahan Yang Difasilitasi	12 bulan	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

Rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Sipoholon yang tertuang dalam Rencana Kerja ini merupakan kumpulan kegiatan yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025. Secara terperinci rencana program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini yang juga memuat :

1. Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun Anggaran 2025.
2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan).
3. Review Terhadap RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara
4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiran Maju Tahun 2026

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 mengangkat tema **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang memuat 5 (lima) arahan dan komitmen Pemerintah yakni kebijakan pada 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dan untuk Rancangan Renja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 mengangkat tema : "**Akselerasi Pencapaian Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Sumatera Utara Bermartabat.”**.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yaitu pada Misi 6 dan Misi 7 yaitu sebagai berikut:

1. Misi 6 : Menjadikan Desa sebagai Pusat Percepatan Pembangunan
   Tujuan : Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan
   Sasaran :
   - Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan
   - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan
2. Misi 7 : Membangun Pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan public dengan system e-government

Tujuan : Mewujudkan peningkatan system pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan meningkatkan profesionalisme dan produktivuitas aparatur pelayanan publik

Sasaran :

- Terwujudnya kelembagaan dan tata laksanan pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi.
- Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan
- Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan , pendapatan, dan belanja) yang transparan, akuntabel, inovatif, dan tertib
- Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsive, dan memperhatikan kearifan lokal.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Kantor Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada misinya bertujuan :

1. Meningkatkan Kualitas SDM
2. Meningkatkan Koordinasi dan konsutasi pemerintah di Kecamatan Sipoholon
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Meningkatkan Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Pembangunan.

Sasaran yang direncanakan Kantor Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara yaitu sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen administrasi kependudukan yang tepat waktu untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan administrasi kependudukan
2. Terciptanya koordinasi dan akses pelayanan yang prima mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai ke Kabupaten
3. Terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia aparat pemerintah desa dan kecamatan
4. Timbulnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Sipoholon
5. Terwujudnya pembangunan sarana transportasi antar desa dan dari desa ke ibukota Kecamatan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Sipoholon adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Tabel T-C. 33

Rumusan rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tapanuli Utara

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Sipoholon

Kode					Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					Unsur Kewilayahan								
7	**01**				**Kecamatan**				**2.370.946.756**				**2.582.940.000**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Cakupan Layanan Pemenuhan Administrasi**	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	**12 bulan**	**2.113.851.256**	DAU		**12 bulan**	**2.300.440.000**
7	*01*	*01*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah*	*Kantor Kecamatan Sipoholon*	*12 bulan*	*2.880.000*	DAU		*12 bulan*	*3.640..000*
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya RKA, DPA	Kantor Kecamatan Sipoholon	5 buku	1.200.000	DAU		5 buku	1.560.000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA-SKPD	Kantor Kecamatan Sipoholon	2 set	480.000	DAU		2 set	560.000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD	Kantor Kecamatan Sipoholon	2 set	480.000	DAU		2 set	560..000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan	Tersusunnya Lakip	Kantor Kecamatan	2 set	720.000	DAU		2 set	960.000

					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Sipoholon						
7	*01*	*01*	*2.02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Terlaksananya administrasi keuanganperangkat daerah*	*Kantor Kecamatan Sipoholon*	*12 bulan*	*1.883.121.903*	DAU		*12 bulan*	*2.037.500.000*
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Terssedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Kecamatan Sipoholon	14 bulan	1.847.894.703	DAU		14 bulan	2.000.000.000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan	Kantor Kecamatan Sipoholon	4 orang dan 12 bulan	34.267.200	DAU		4 orang dan 12 bulan	36.500.000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kantor Kecamatan Sipoholon	1 set	960.000	DAU		1 set	1.200.000
7	*01*	*01*	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	*Kantor Kecamatan Sipoholon*	*12 bulan*	*73.823.453*	DAU		*12 bulan*	*82.000.000*
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kantor Kecamatan Sipoholon	16 jenis	4.127.100	DAU		16 jenis	5.000.000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Kecamatan Sipoholon	16 jenis	16.207.350	DAU		16 jenis	18.000.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kantor Kecamatan Sipoholon	15 jenis	5.699.503	DAU		15 jenis	6.000.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan / minuman rapat	Kantor Kecamatan Sipoholon	1000 kotak nasi dan snack	16.285.000	DAU		1000 kotak nasi dan snack	18.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kecamatan Sipoholon	6650 lembar	3.350.000	DAU		6650 lembar	3.500.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan	Tersedianya bahan	Kantor	200	3.002.500	DAU		200	3.500.000

					bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bacaan	Kecamatan Sipoholon	eksemplar				eksemplar	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kantor Kecamatan Sipoholon	200 oh	25.152.000	DAU		200 oh	28.000.000
7	*01*	*01*	*2.07*		*Pengadaan Barang Milik Daerah*	*Tersedianya barang milik daerah*	*Kantor Kecamatan Sipoholon*	*12 bulan*	*25.000.000*	DAU		*12 bulan*	*40.000.000*
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin laiinya	Kantor Kecamatan Sipoholon	2 jenis	25.000.000	DAU		2 jenis	40.000.000
7	*01*	*01*	*2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*Kantor Kecamatan Sipoholon*	*12 bulan*	*82.665.800*	DAU		*12 bulan*	*84.800.000*
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kantor Kecamatan Sipoholon	100 buah	1.500.000	DAU		100 buah	1.800.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersdianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kecamatan Sipoholon	12 bulan	26.869.000	DAU		12 bulan	28.000.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Kantor Kecamatan Sipoholon	3 orang dan 12 bulan	54.496.800	DAU		3 orang dan 12 bulan	55.000.000
7	*01*	*01*	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah*	*Kantor Kecamatan Sipoholon*	*12 bulan*	*46.160.100*	DAU		*12 bulan*	*52.500.000*
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Kantor Kecamatan Sipoholon	1 mobil dan 12 bulan	26.681.800	DAU		1 mobil dan 12 bulan	29.000.000

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Kantor Kecamatan Sipoholon	5 unit dan 12 bulan	3.160.800	DAU		5 unit dan 12 bulan	3.500.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Kantor Kecamatan Sipoholon	2 unit dan 12 bulan	16.317.500	DAU		2 unit dan 12 bulan	20.000.000
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	**12 bulan**	**51.987.800**	DAU		**12 bulan**	**52.500.000**
7	*01*	*02*	*2.01*		*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamtan*	*Kantor Kecamatan Sipoholon*	*12 bulan*	*51.987.800*	DAU		*12 bulan*	*52.500.000*
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pertemuan koordinasi antara uspika dan masyarakat	Kantor Kecamatan Sipoholon	3 orang dan 12 bulan	51.987.800	DAU		3 orang dan 12 bulan	52.500.000
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kantor Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon**	**12 bulan**	**205.107.700**	DAU		**12 bulan**	**230.000.000**
7	*01*	*03*	*2.02*		*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*	*Kantor Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon*	*12 bulan*	*205.107.700*	DAU		*12 bulan*	*230.000.000*
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan	Terlaksananya pembangunan	Kantor Kelurahan	12 bulan	132.787.000	DAU		12 bulan	150.000.000

					Prasarana Kelurahan		Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon						
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kantor Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon	12 bulan	72.320.600	DAU		12 bulan	80.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kerja Kecamatan Sipoholon Tahun 2025 terdiri dari 3 Program dan Beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Sistim Informasi Perangkat daerah yang diuraikan pada Tabel berikut :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASn
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

			Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Alokasi anggaran Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.2.370.946.756,00 dengan perincian untuk belanja Operasi sebesar Rp.2.238.651.703,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.132.295.000,00. Adapun untuk perincian sebagaimana pada lampiran rencana program SKPD Tahun 2025.

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Sipoholon sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun 2025 ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Sipoholon pada Tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun 2025 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Sipoholon. Melalui Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun 2025 ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Sipoholon, 2025
CAMAT SIPOHOLON,

RONALD TOGU SITUMORANG, SSTP
PEMBINA
NIP. 198504052003121001

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 500 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 500 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 - 10 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program- program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
12. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara
13. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
19. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
23. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara
24. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
25. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
30. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
32. Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
33. Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara
34. Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
35. Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
36. Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
37. Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
38. Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
39. Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
40. Kecamatan Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

41. Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
42. Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
43. Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
44. Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
45. Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

KANTOR CAMAT TARUTUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memberi rahmat karuniaNya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 secara garis besar mengupas tentang visi, misi, nilai, tujuan strategis, sasaran dan target stategis Kecamatan Tarutung. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang berhubungan langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan perumusan dokumen Rencanaa Kerja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini.

Kami menyadari Rencana Kerja Perubahan ini banyak kekurangannya, namun demikian berharap semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah maupun masyarakat dapat mengarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Tarutung mau pun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Tarutung, 2025

CAMAT TARUTUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA KECAMATAN TARUTUNG

RENHARD D. LUMBANTOBING,S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 197505272005021002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar I

Daftar Isi II

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2.LANDASAN HUKUM 3

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN 7

BAB II EVALUASI RENJA S/D TW II TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI RENJA S/D TW II TAHUN BERKENAAN 9

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 16

2.3 ISU-ISU PENTINGNYA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 21

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 29

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 29

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 32

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 35

BAB V PENUTUP 36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternative penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara adalah salah satu langkah di dalam mencapai tujuan yang dicapai disesuaikan dengan visi dan misi yang pembangunan Kabupaten yaitu ***Meningkatkan Kualitas dan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah.***

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannnya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Kerja SKPD.

Kecamatan Tarutung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menetapkan target Kinerja sehingga pada akhir tahun anggaran dapat diketahui pencapaian kinerjanya, hal ini dimaksudkan agar dapat lebih mudah mengetahui keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang harus disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rencana 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki jangka waktu perencanaan
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut diatas, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD.

Sesuai dengan amanat itu maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Tarutung Tahun 2025. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan Renja Kantor Kecamatan Tarutung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perncanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
17. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 500 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif prakiraan maju. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan:

1. Mengacu pada RKPD
2. Mengacu pada Renstra SKPD
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan
5. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

A. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tarutung Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan Daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kantor Camat Kecamatan Tarutung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2025. Selain daripada itu Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disusun dengan maksud :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara khususnya Kecamatan Tarutung.
3. Untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme dan displin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara agar senantiasa bertanggungjawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram mengacu pada norma, standard dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.

B. TUJUAN

Sedangkan tujuan disusunnya rencana kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan bagi Kantor Kecamatan Tarutung dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Merumuskan Program dan Kegiatan pembangunan Kantor Kecamatan Tarutung.
3. Mengoptimalkan peran dan fungsinya perencanaan dalam pembangunan Daerah.
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif bermanfaat tepat sasaran dan berkesinambungan.
5. Untuk menjadi acuan perencanaan yang membuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan.

6. Untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan dalam Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

1.4 Sistematika Penyusunan

Renja Kantor Camat Kecamatan Tarutung Tahun 2025 disusun dalam sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara

1.2 Landasan Hukum
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAAN RENJA KANTOR KECAMATAN TARUTUNG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Tarutung Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis pelayanan SKPD,
Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD yang memuat indikator sesuai dengan tugas dan fungsi masing-maing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Mengemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Camat Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kondisi umum, permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan urian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3 Program Dan Kegiatan.

berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjuti.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN TARUTUNG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengindentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengindentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Kecamatan Tarutung. Berdasarkan Renstra Kecamatan Tarutung Tahun 2025 -2029 yang terdiri 6 Program 7 Kegiatan dan 18 sub kegiatan. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, Laporan Evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan DPA Perangkat Daerah (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024).

Pada Tahun 2024 Kecamatan Tarutung melaksanakan Program dan Kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. 8.127.441.590,- (Delapan milyard seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.889.983.837,- (Tujuh milyard delapan ratus delapan puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah),- atau persentase realisasi sebesar 97,08%.

Adapun Target dan Realisasi anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN DAN KEUANGAN
KECAMATAN TARUTUNG TAHUN 2024

No	Uraian Program dan Kegiatan	TARGET SEBELUM PERUBAHAN		TARGET SETELAH PERUBAHAN		REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)
		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		6.574.313.303	100	6.481.047.764	100	98,58	93.265.539
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**37.947.600**		**39.662.600**	**100**	**97,80**	**872.200**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	2.831.600	100	2.831600	100	69,90	872.200
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	35.116.000	100	36.831.000	100	99,95	852.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**5.887.461.668**		**6.233.572.751**	**100**	**98,13**	**20.000**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	5.842.655.868	100	6.188.766.951	100	98,12	116.289.909
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	41.775.600	100	41.775.600	100	100	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	3.030.200	100	3.030.200	100	96,73	99.200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**143.713.050**		**133.248.050**	**100**	**89,75**	**13.661.250**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	8.834.100	100	8.834.100	100	99,91	7.600
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	48.102.550	100	48.102.550	100	72,08	13.432.050
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	16.330.000	100	16.330.000	100	99,26	120.600

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	20.036.400	100	36.371.400	100	100	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	50.410.000	100	23.610.000	100	99,57	101.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusuan Pemerintahan Daerah		**89.620.240**		**84.520.752**	100	74,29	21.732.015
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	860.000	100	860.000	100	100	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	33.752.300	100	46.854.400	100	55,34	20.925.663
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	55.007.940	100	36.000.000	100	97,81	2.486.530
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**59.803.050**		**63.309.150**	**100**	**98,47**	**1.277.665**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	100	38.331.250	100	61.837.350	100	98,05	1.208.865
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	21.471.800	100	21.471.800	100	99,68	68.800
II	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		10.015.000	**100**	8.765.000	100	**70,52**	2.583.500
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		10.015.000	**100**	8.765.000	100	**70,52**	2.583.500
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	10.015.000	100	8.765.000	100	70,52	2.583.500
III	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		22.701.800	100	21.837.800	100	98,01	434.800
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		22.701.800	100	21.837.800	100	98,01	434.800
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	100	22.701.800	100	21.837.800	100	98,01	434.800

IV	**PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			100	3.773.600	100	75.48	1.226.100
	Koordinasi Penerpan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			100	3.773.600	100	75.48	1.226.100
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			100	3.773.600	100	75.48	1.226.100
V	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	100	4.999.700	100	26.599.800	100	75,48	674.050
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	4.999.700	100	26.599.800	100	75,48	674.050
	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Ketahanan Nasional	100	4.999.700	100	4.999.800	100	97,47	674.050
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	21.600.000	100	21.600.000	100	86,52	0
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	4.999.050	100	4.999.050	100	67,67	1.616.250
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	4.999.050	100	4.999.050	100	67,67	1.616.250
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100	4.999.050	100	4.999.050	100	67,67	1.616.250
	Kel. Hutatoruan V							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	200.000.000	100	200.000.000	100	95,48	9.036.900
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	5.000.000	100	5.000.000	100	100	232.500
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100	86.669.600	100	101.059.800	100	95,95	4.097.600
	Pemberdayaan Masyarakat	100	108.330.400	100	93.930.400	100	94,99	4.706.800

	Kel. Hutatoruan VI							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	199.999.750	100	191.592.550	100	90,77	17.692.536
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	5.007.550	100	5.007.550	100	96,08	196.525
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100	85.117.400	100	85.117.400	100	94,11	5.012.400
	Pemberdayaan Masyarakat	100	108.874.800	100	101.467.600	100	87,70	12.483.611
	Kel. Hutatoruan VII							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	200.000.000		292.350.262	100	96,25	10.961.037
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	5.000.000	100	5.000.000	100	78,17	1.091.600
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100	170.750.052	100	170.750.052	100	98,04	3.351.362
	Pemberdayaan Masyarakat	100	116.600.200	100	116.600.200	100	94,41	6.578.075
	Kel. Hutatoruan IX							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	202.009.535	100	199.870.700	100	86,78	26.704.374
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	4.999.635	100	4.999.635	100	88,78	572.135
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100	98.301.800	100	98.301.800	100	88,55	2.321.700
	Pemberdayaan Masyarakat	100	98.708.100	100	98.708.100	100	64,97	23.810.539
	Kel. Hutatoruan X							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	199.970.325	100	195.970.581	100	97,81	4.387.895

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	4.979.000	100	4.979.000	100	97,12	143.500
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100	78.285.100	100	78.285.100	100	99,34	519.400
	Pemberdayaan Masyarakat	100	116.706.225	100	116.706.225	100	96,81	3.724.995
	Kel. Hutatoruan XI							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	200.000.000	100	200.005.865	100	99,37	1.264.250
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	5.000.000	100	5.000.000	100	100	0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100	100.000.000	100	100.000.000	100	99,83	165.285
	Pemberdayaan Masyarakat	100	95.000.000	100	95.005.865	100	98,84	1.098.965
	Kel. Partali Toruan							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	199.998.250		199.998.450	100	96,53	6.943.922
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	4.999.700	100	4.999.700	100	68,76	1.562.100
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100	81.999.800	100	81.990.800	100	97,07	2.399.850
	Pemberdayaan Masyarakat	100	112.998.750	100	112.998.950	100	97,36	2.981.972

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2024)

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yakni terdiri dari 6 Program.

Berdasarkan Evaluasi Laporan Realisasi Keuangan sampai Triwulan IV 31 Desember 2024 realisasi anggaran Rp. 7.889.983.837,- atau sebesar 97,08%.

Adapun rincian anggaran dan target realisasi kinerja sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. ***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***
   Masukan input berupa dana Rp. 39.662.600,00 dengan indikator Keluaran Kegiatan adalah terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 1 tahun dengan Pagu Rp. 1.979.400 dengan target realisasi sebesar 69,90% dan terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu sebesar Rp. 36.831.000,00 dengan realisasi sebesar 99,95%.

2. ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***
   Masukan input dana Rp. 6.233.572.751,00 dengan indikator Keluaran
   Kegiatan adalah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN pagu sebesar Rp. 6.233.572.751 dengan target realisasi sebesar 98,12 ,terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan pagu sebesar Rp 41.775.600,00 dengan realisasi sebesar 100% dan terlaksananya Koordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pagu 3.030.200,00 dengan target realisasi sebesar 96,73%.

3. ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***
   Masukan input dana Rp. 133.248.050,00 dengan indikator Keluaran
   Kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pagu 8.834.100,00 dengan target realisasi sebesar 99,91%, tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu sebesar Rp. 48.102.550,00 target realisasi sebesar 72,08%, tersedianya Peralatan Rumah Tangga pagu sebesar Rp. 16.330.000,00 dengan target realisasi sebesar 99,26%, tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan pagu sebesar Rp. 36.371.400,00 dengan target realisasi sebesar 100% dan terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu 23.610.000,00 dengan target realisasi sebesar 74,29%.

4. ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Masukan input dana Rp. 84.520.752,00 dengan indikator Keluaran

Kegiatan adalah tersedianya Jasa Surat Menyurat pagu sebesar Rp. 860.000,00 dengan target realisasi 100%, tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pagu sebesar Rp. 46.854.400,00 dengan target realisasi sebesar Rp. 55,34% dan tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor pagu sebesar Rp. 36.000.000,00 dengan target realisasi sebesar 97,81%.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan input dana Rp. 63.309.150,00 dengan indikator Keluaran

Kegiatan adalah terpenuhinya penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan pagu sebesar Rp. 61.837.350,00 dengan target realisasi sebesar Rp. 98,05% dan terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pagu sebesar Rp. 21.471.800,00 target realisasi sebesar 99,68%.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Masukan input dana Rp.8.765.000,00 dengan indikator Keluaran

Kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pagu sebesar Rp. 8.765.000,00 selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 70,52%.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Masukan input dana Rp. 1.485.926.987,00 dengan indikator Keluaran

Kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebesar Rp. 21.837.800,00 dengan target realisasi sebesar 98,83% dan masing-masing Kelurahan ada 7 di Kecamatan Tarutung yaitu :

1. Kelurahan Hutatoruan V

Masukan input dana Rp. 200.000.000,00 dengan indikator Keluaran

Kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan target realisasi sebesar 100%, terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana pagu 101.059.800,00 dengan target realisasi 95,95% dan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat pagu sebesar Rp. 93.930.400,00 dengan realisasi sebesar 94,99%.

2. Kelurahan Hutatoruan VI

Masukan input dana Rp. 191.592.550,00 dengan indikator Keluaran

Kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. 5.007.550,00 dengan target realisasi sebesar 96.08%, terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana pagu 85.117.400,00 dengan target realisasi 94,11% dan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat pagu sebesar Rp. 101.467.600,00 dengan realisasi sebesar 87,70%.

3. ***Kelurahan Hutatoruan VII***

Masukan input dana Rp. 292.350.262,00 dengan indikator Keluaran

Kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan target realisasi sebesar 78,17%, terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana pagu 170.750.052,00 dengan target realisasi 98,04% dan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat pagu sebesar Rp. 116.600.200,00 dengan realisasi sebesar 94,41%.

4. ***Kelurahan Hutatoruan IX***

Masukan input dana Rp. 199.870.700,00 dengan indikator Keluaran

Kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. 4.999.635,00 dengan target realisasi sebesar 88,78%, terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana pagu 98.301.800,00 dengan target realisasi 88,55% dan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat pagu sebesar Rp. 98.708.100,00 dengan realisasi sebesar 64,97%.

5. ***Kelurahan Hutatoruan X***

Masukan input dana Rp. 195.970.581,00 dengan indikator Keluaran

Kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. 4.979.000,00 dengan target realisasi sebesar 97,81%, terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana pagu 78.285.100,00 dengan target realisasi 99,34% dan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat pagu sebesar Rp. 116.706.225,00 dengan realisasi sebesar 96,81%.

6. ***Kelurahan Hutatoruan XI***

Masukan input dana Rp. 200.005.865,00 dengan indikator Keluaran

Kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan target realisasi sebesar 100%, terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana pagu 100.000.000,00 dengan target realisasi 99,83% dan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat pagu sebesar Rp. 95.005.865,00 dengan realisasi sebesar 98,84%.

7. ***Kelurahan Partali Toruan***

Masukan input dana Rp. 199.998.450,00 dengan indikator Keluaran

Kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. 4.999.700,00 dengan target realisasi sebesar 68,76%, terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana pagu 81.990.800,00 dengan target realisasi 97,07% dan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat pagu sebesar Rp. 112.998.950,00 dengan realisasi sebesar 97,36%.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Masukan input dana Rp.8.765.000,00 dengan indikator Keluaran
Kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pagu sebesar Rp. 8.765.000,00 selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 70,52%.

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Masukan input dana Rp.8.765.000,00 dengan indikator Keluaran
Kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pagu sebesar Rp. 8.765.000,00 selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 70,52%.

Tabel 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TARUTUNG S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Retribusi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan kegiatan renja SKPD Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusuan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		dan Listrik									
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik										
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksanannya Koordinasi/Sinergi Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pemberdayaan/Kelurahan										
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Pembangunan di Desa										
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananyan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
	Kel. Hutatoruan V										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kel. Hutatoruan VI										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kel. Hutatoruan VII										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kel. Hutatoruan IX										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Kel. Hutatoruan X										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kel. Hutatoruan XI										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kel. Partali Toruan										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program-program yang telah tersusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah SKPD (LAKIP SKPD). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik atau tahunan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Tarutung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tarutung selama Tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Kinerja pemerintah Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan yang dilaksanakan. Untuk evaluasi kinerja ini dikelompokan dalam indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang tertuang dalam tabel pengukuran kinerja kegiatan Kecamatan Tarutung.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada Tahun 2024 anggaran Kecamatan Tarutung sebesar Rp. 7.889.983.837,- dengan 6 Program dan 18 Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 7.889.983.837,- atau 97,08% dari pagu anggaran, dengan capaian kinerja fisik 97,08%.

Kinerja Pemerintah Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 tertuang dalam tabel pengukuran kinerja kegiatan dimana hasil prosentase yang dicapai oleh masing-masing kegiatan tingkat realisasinya baik. Prosentase pencapaiannya kinerja masing-masing kegiatan berkisar antara 0% sampai 100% dan setiap tahunnya sesuai data yang ada mengalami peningkatan. Ini menunjukan bahwa capaian kinerja Kecamatan Tarutung dapat memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Tapanuli Utara untuk mewujudkan *"Good Governance".*

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini seringkali ditemui hambatan dimana ada juga beberapa kegiatan yang hasilnya tidak mencapai 100%.

Sesuai penetapan kinerja tahun 2024 Kecamatan Tarutung telah memprogramkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

EVALUASI KINERJA PROGRAM (EKP)

No	Program	Bobot Program	Capaian Kinerja
1	*2*	*3*	*4*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	98,58%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	70,52%
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	75,48%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	98,83%
5	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	75,48%
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	67,67%
Rata –rata capaian program		**100%**	**81,09**

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian perencanaan strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tarutung s/d 2024 adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.	Nilai AKIP Kecamatan	79,8	80	82	84	86	88	90	100
2.	Indek Kepuasan Masyarakat	72	73	74	75	76	77	78	100

2.3 ISU-ISU PENTINGNYA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Adapun isu penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tarutung didasarkan kepada permasalahan dan hambatan yang dihadapi terutama penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan diuraikan sebagai berikut :

- Inovasi-inovasi dibidang penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
- Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan lebih terstruktur;
- Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan tupoksinya;
- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kinerja;
- Kritertia kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
- Penambahan sarana dan prasarana kantor serta pemanfaatannya sesuai dengan tuntutan tugas.

Kondisi umum berbagai bidang yang ada di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentu saja menghadapi tantangan yang secara umum dijabarkan sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk taat pajak sehingga pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PAD tidak bisa mencapai realiasasi sampai dengan 100%.
2. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai berikut maraknya kasus korupsi yang terekspos.
3. Masih terbatasnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pengurusan administrasi kependudukan dan kepengurusan surat kepemilikan tanah sehingga tidak mengikuti prosedur yang berlaku.

4. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan meningkatnya pengangguran pada usia produkrtif sebagai akibat tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.

Selain itu dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan sumber daya manusia aparatur di Desa/Kelurahan serta Kecamatan Tarutung perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara bahwa ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tapanuli Utara kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi wilayah dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan dan aturan yang berlaku.
3. Mengendornya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana pembangunan hasil musyawarah rencana pembangunan desa dan musyawarah rencana pembangunan kecamatan.
4. Koordinasi dan konsultasi antar pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan dengan seharusnya sehingga masih sering terjadi ketidakpastian kewenangan.

5. Pegawai belum semuanya memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Adapun strategi yang dilakukan Kantor Camat Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan etos kerja dan displin aparat yang ada di Kantor Camat Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan untuk meningkatkan kualitas aparat yang ada di Kantor Camat Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
- Membangun budaya pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- Pemanfaatan anggaran operasional yang tersedia dengan optimal.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya perbaikan infrastruktur pendukung yang dapat mengoptimalkan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan peran serta pemuda.
- Bekerjasama dengan lembaga/Organisasi kemasyarakatan atau pihak ketiga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan peran PKK dalam pembangunan kemasyarakatan.
- Melakukan pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan dalam upaya peningkatan kepemudaan serta pemuda dalam pembangunan.
- Bekerjasama dengan unsur pimpinan kecamatan dalam mewujudkan dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
- Menggalakkan gotong royong dalam masyarakat.
- Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk membayar pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara.

Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat.
2. Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap seksi di Kantor Camat Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Terjalinnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan unsur Pimpinan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, UPTD Kecamatan dan tokoh masyarakat/pemuda/agama

sehingga ketentraman dan ketertiban dapat tercapai dan penyelesaian masalah-masalah sosial dapat diselesaikan dengan baik.

4. Posisi wilayah yang strategis yang dapat diakses dengan transportasi yang cukup memadai khususnya bagi masyarakat yang tinggal di desa.
5. Ketersediaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Sarana dan prasarana yang cukup memadai (kamar mandi, Balai Data, Peralatan dan Perlengkapan lainnya).

Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan pelayanan Kantor Camat Tarutung :

1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai
2. Terbatasnya sarana dan prasarana kantor mengakibatkan pelayanan kurang optimal.
3. Belum optimalnya koordinasi Perangkat Daerah lain dengan Kecamatan
4. Terbatasnya fasilitas umum di Kecamatan
5. Kondisi Geografis yang rawan bencana
6. Masih adanya wilayah blank spot

Tabel 2.3.1
Identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai
			Terbatasnya sarana dan prasarana kantor mengakibatkan pelayanan kurang optimal.
			Belum optimalnya koordinasi Perangkat Daerah lain dengan Kecamatan
			Terbatasnya fasilitas umum di Kecamatan
			Kondisi Geografis yang rawan bencana
			Masih adanya wilayah blank spot
			Adanya Perubahan Peraturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 sehingga ada penambahan untuk Nomenklatur Kegiatan

Dari analisis kondisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, terdapat sejumlah permasalahan yang dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VIsi : **BERSAMA MEWUJUDKAN KABUPATEN TAPANULI UTARA YANG MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN**			
Misi 7 : **MEMPERKUAT REFORMASI BIROKRASI, MENGOPTIMALKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN.**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Kualitas dan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dimulai dari Tingkat Desa hingga Kecamatan	Pembinaan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan melalui: 1. Peningkatan kualitas aparatur desaa dan kecamatan melalui pendidikan dan pelatihan 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Munsrenbang Desa dan Kecamatan
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya peran Lembaga desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pembangunan
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang efektif	1. Meningkatnya koordinasi antar instansi 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang Perda dan Perbup
			Fasilitasi desa tertib administrasi

Dari hasil identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Tarutung dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kantor Kecamatan Tarutung maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya.

   Dalam pelaksanaan tugas dilakukan dengan arah kebijakan :

   a. Pengembangan sumberdaya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kopensasi dan kesejahteraan pegawai.
   b. Peningkatan kemampuan aparatur dengan mengikuti sosialisasi maupun bimtek.
   c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efiensi.

2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan serta menjaga pembangunan yang dilaksanakan dengan arah kebijakan :

   a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis.
   b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
   c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Strategi pembangunan koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan:

   a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan serta dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

2.4 Review terhadap rancangan awal

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap Tahun Anggaran sebagaimana tabel review terhadap rencana kerja PD tahun 2024
2. Alasan proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat (Prosedur Buttom Up).
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.
4. Untuk review terhadap RKPD tahun 2024 Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara lebih jelasnya dilihat pada Tabel T.C 31 Review terhadap rancangan awal tahun 2024 di bawah ini :

Tabel TC.3.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KECAMATAN TARUTUNG

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tarutung	terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	100%	4.222.416	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tarutung	terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	100%	2.374.400	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tarutung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	16.740.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tarutung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	16.740.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tarutung	Terlaksananya administrasi Keuangan PD	100%	7.738.708.791	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tarutung	Terlaksananya administrasi Keuangan PD	100%	5.340.483.342	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tarutung	Terlaksananya administrasi Keuangan PD	100%	50.127.396	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tarutung	Terlaksananya administrasi Keuangan PD	100%	41.775.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tarutung	Terlaksananya administrasi Keuangan PD	100%	4.227.740	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tarutung	Terlaksananya administrasi Keuangan PD	100%	2.184.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tarutung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tarutung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	8.605.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tarutung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	31.013.994	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tarutung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	39.389.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tarutung	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	7.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tarutung	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	6.724.600	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Tarutung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	20.215.470	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Tarutung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	16.450.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tarutung	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	18.912.300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tarutung	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	49.890.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahah Daerah	Kec. Tarutung		100%		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahah Daerah**	Kec. Tarutung				

	Pengadaan Mebel	Kec. Tarutung	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	63.350.000	Pengadaan Mebel	Kec. Tarutung	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	63.350.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tarutung	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	40.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tarutung	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	30.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Tarutung	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	2.417.580	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Tarutung	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	860.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Tarutung	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	19.686.337	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Tarutung	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	35.912.300	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tarutung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	87.120.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tarutung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	72.662.400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	Kec. Tarutung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	100%	45.703.031	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	Kec. Tarutung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	100%	36.987.720	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tarutung	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tarutung	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	19.996.300	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**					
	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					**Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tarutung	Terlaksananya koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	74.812.400	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tarutung	Terlaksananya koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	10.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**					
	Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan					Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan					
	Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tarutung	Terlaksananya Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	40.000.000	Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tarutung	Terlaksananya Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	22.701.900	

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Tarutung				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Tarutung				
	Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tarutung	Terlaksananya Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	5.499.890	Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tarutung	Terlaksananya Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	35.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kec. Tarutung	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana	100%	600.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kec. Tarutung	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana	100%	700.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tarutung	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	400.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tarutung	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	455.000.000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			100%	0	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**			100%	0	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum					**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tarutung	Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	5.500.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tarutung	Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	4.999.800	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tarutung	terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	21.600.000	Pelaksanaan Tugaa Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tarutung	terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	21.600.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	Fasilitasi, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Tarutung	Terselenggaranya Fasilitasi, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	5.500.000	Fasilitasi, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Tarutung	Terselenggaranya Fasilitasi, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	4.999.600	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan Unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes, pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa/kelurahanselanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut ke Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat Desa yang ada pada unit pelaksana teknis di tingkat Kecamatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Tarutung menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : "*MEMPERKUAT REFORMASI BIROKRASI, MENGOPTIMALKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN".* Tujuan tersebut selaras dengan Misi "*BERSAMA MEWUJUDKAN KABUPATEN TAPANULI UTARA YANG MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN". Tujuan : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PEMERINTAH DAERAH" dan Sasaran : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN.*

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarutung, dalam hal ini Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil peencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Tarutung menetapkan Sasaran Strategis :

"MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN KECAMATAN".

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini :

Gambar 4.2

Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara

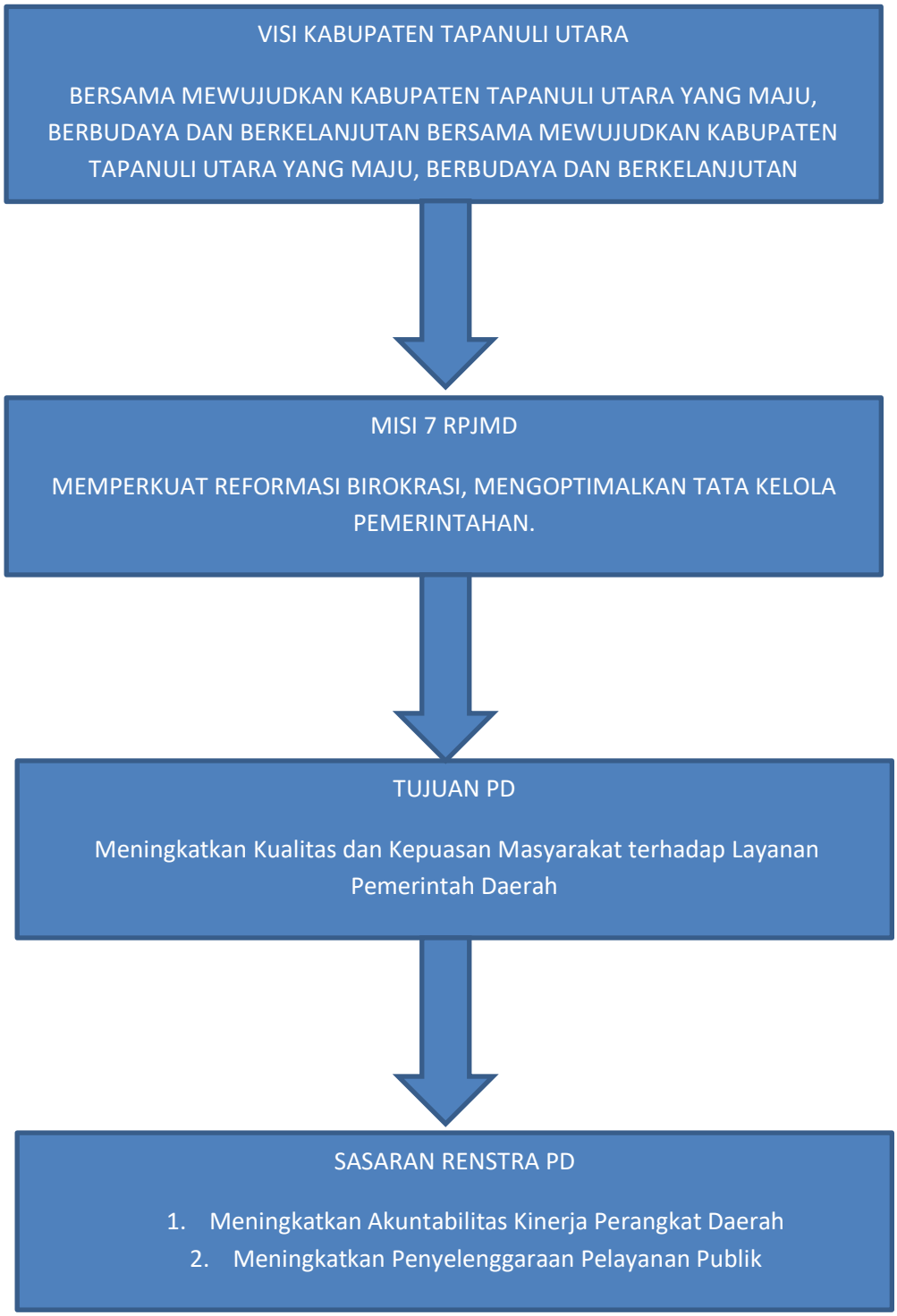

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran		Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan Kualitas dan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan	80	82	84	86	88	90
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	73	74	75	76	77	78

3.2 Sasaran Renstra Kantor Camat Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Tarutung dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Tarutung dalam periode pembangunan 2025-2029 adalah: ***Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan.***

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Kecamatan Tarutung adalah:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dimulai dari Tingkat Desa hingga Kecamatan

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang efektif

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan Kecamatan Tarutung adalah:

A. Pembinaan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan melalui:
   1. Peningkatan kualitas aparatur desa dan kecamatan melalui pendidikan dan pelatihan
   2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Munsrenbang Desa dan Kecamatan

B. Penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai ketentuan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

C. Meningkatnya peran Lembaga desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam Pembangunan

D. Meningkatnya koordinasi antar instansi

E. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup)

F. Fasilitasi desa tertib administrasi

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : **BERSAMA MEWUJUDKAN KABUPATEN TAPANULI UTARA YANG MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN**			
Misi 7 : **MEMPERKUAT REFORMASI BIROKRASI, MENGOPTIMALKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN.**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Kualitas dan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dimulai dari Tingkat Desa hingga Kecamatan	Pembinaan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan melalui: 1. Peningkatan kualitas aparatur desaa dan kecamatan melalui pendidikan dan pelatihan 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Munsrenbang Desa dan Kecamatan
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya peran Lembaga desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pembangunan
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang efektif	1. Meningkatnya koordinasi antar instansi 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang Perda dan Perbup
			Fasilitasi desa tertib administrasi

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Nilai AKIP Kecamatan	79,8	80	82	84	86	88	90	100
2.	Indek Kepuasan Masyarakat	72	73	74	75	76	77	78	100

3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Agenda Musrenbang ini Usulan Prioritas untuk APBD Tahun Anggaran 2025 :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   1. *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
      a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   4. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
      a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      b. Penyediaan Jasa Komunikai, Sumber Daya Air dan Listrik
      c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   5. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
      a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana
c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional
b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dirangkum rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang telah dientri pada system Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 (terlampir).

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Camat Tarutung Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Tarutung sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Tarutung Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Kantor Kecamatan Tarutung yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan serta berfungsi sebagai sarana peningkatan Kinerja Kantor Kecamatan Tarutung.

Akhirnya Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Tarutung ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang strategis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik.

Tarutung, 2025.

CAMAT TARUTUNG,

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA KECAMATAN TARUTUNG

RENHARD D. LUMBANTOBING,S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 197505272005021002